SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dan adanya hasil pengendalian dan evaluasi serta penyesuaian terhadap perkembangan kondisi di Daerah, maka Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu diubah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6);

11. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 17) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 11);
12. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 15 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 16 sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.
8. Rencana Panjang Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RENSTRA Perangkat Daerah adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kota Makassar untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

15. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat P-PPAS adalah perubahan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
16. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah sampai akhir tahun anggaran.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun Pertama dari RPJMD Tahun 2025-2029 yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025
(3) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 memuat:
a. pendahuluan;
b. evaluasi hasil triwulan I tahun berkenan;
c. kerangka ekonomi daerah dan keuangan Daerah;
d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
e. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;dan
g. penutup.

(2) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(3) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2025 dan penyusunan Perubahan RAPBD Tahun 2025.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 18 Juli 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

A. ZULKIFLY

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... i
DAFTAR TABEL ..... v
DAFTAR GRAFIK ..... viii
DAFTAR GAMBAR ..... x
**BAB I PENDAHULUAN ..... I-1**
1.1. Latar Belakang ..... I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ..... I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen ..... I-7
1.4. Maksud dan Tujuan ..... I-9
1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD ..... I-10
**BAB II EVALUASI HASIL RKPD KOTA MAKASSAR TAHUN 2025 SAMPAI TRIWULAN I ..... II-1**
2.1. Evaluasi Indikator Kinerja Makro ..... II-1
2.1.1. Produk Domestik Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi ..... II-1
2.1.2. Inflasi ..... II-12
2.1.3. Ketenagakerjaan ..... II-14
2.1.4. Kemiskinan ..... II-17
2.1.5. Gini Rasio ..... II-23
2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ..... II-26
2.1.7. Nilai SAKIP Kota Makassar ..... II-29
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Kinerja ..... II-29
2.2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama ..... II-25
2.2.2. Capaian Indikator Kinerja Kunci ..... II-43
2.2.3. Capaian SDGs ..... II-62
2.3. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Dengan Prioritas Nasional Tahun 2024 ... II-94
2.3.1. Prioritas Nasional ..... II-94
2.3.1.1. Penguatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kesehatan ..... II-94
2.3.1.2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ..... II-95
2.3.1.3. Pencegahan Stunting dan Kemiskinan ekstrim ..... II-96
2.3.1.4. Pengendalian Inflasi Di Daerah ..... II-101
2.3.1.5. Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah ..... II-101
2.3.1.6. Dukungan swasembada pangan ..... II-102

2.3.1.7. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro,Kecil, dan Menengah (UMKM) ..... . II-103

2.4. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai Triwulan ke I..... II-103

2.4.1. Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan I Tahun 2025. II-103

2.4.2. Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan RKPD Tahun 2024..... ..... . II-105

2.4.3. Evaluasi Standar Pelayanan (SPM) ..... II-109

2.5. Hambatan, Upaya Pencapaian, Dan Rekomendasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 Triwulan I..... II-116

**BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH ..... III-1**

3.1. Kebijakan Ekonomi Daerah..... III-1

3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional ..... III-1

3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan ..... III-2

3.1.3. Kondisi dan Perubahan Target Ekonomi Makro ..... III-3

3.1.3.1. Pertumbuhan Ekonomi ..... III-3

3.1.3.2. Pendapatan (PDRB) Per Kapita ..... III-5

3.1.3.3. Inflasi ..... III-6

3.1.3.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ..... III-7

3.1.3.5. Tingkat Kemiskinan ..... III-7

3.1.3.6. Gini Ratio..... III-8

3.2. Tantangan Perekonomian Daerah..... III-9

3.2.1. Aspek Eksternal..... III-9

3.2.2. Aspek Internal..... III-10

3.2.3. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah..... III-10

3.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..... III-12

3.3.1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah ..... III-12

3.3.2. Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2025 ..... III-12

3.3.2.1. Perubahan Pendapatan Asli Daerah..... III-12

3.3.2.2. Perubahan Pendapatan Transfer..... III-13

3.3.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah ..... III-14

3.3.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah ..... III-17

3.3.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ..... III-22

3.3.4.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan..... IV-22

3.3.4.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan ..... IV-23

**BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025..... IV-1**

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 ..... IV-1

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 ..... IV-8

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 ..... IV-8

4.2.2. Tema dan Sasaran Pembangunan Wilayah Sulawesi Selatan..... IV-10

4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 ..... IV-10

4.2.3.1. Pembangunan Kawasan Makassar ..... IV-14

4.2.3.2. Sasaran Pembangunan Kawasan Makassar..... IV-14

4.2.4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Makassar Tahun 2025 . IV-15

4.2.4.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Makassar 2025 ..... IV-20

4.2.4.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Makassar Tahun 2025 IV-30

4.2.5. Kesesuaian Prioritas Pembangunan Kota Makassar Dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Nasional Tahun 2025 ..... IV-48

4.3. Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar ..... IV-66

**BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024 ... V-1**

5.1. Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2025..... V-1

5.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 ..... V-3

5.3. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025..... V-62

**BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ..... VII-1**

6.1. Indikator Kinerja Makro ..... V-1

6.2. Indikator Kinerja Utama ..... V-8

6.3. Indikator Kinerja Daerah (IKD) ..... V-11

6.4. Indikator Kinerja Kunci ..... V-13

6.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM)..... V-20

6.6. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ..... V-27

6.6.1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan..... V-28

6.6.2. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan ..... V-29

6.6.3. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera..... V-30

6.6.4. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas..... V-31

6.6.5. Tujuan 5 Kesetaraan Gender ..... V-33

6.6.6. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak ..... V-34

6.6.7. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi ..... V-35

6.6.8. Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur ..... V-36

6.6.9. Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan ..... V-37

6.6.10. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab..... V-38

6.6.11. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim..... V-39

6.6.12. Tujuan 15 Ekosistem Daratan..... V-39

6.6.13. Tujuan 16 Pembangunan Hukum dan Tata Kelola ..... V-40

6.6.14. Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan ..... V-41

**BAB VII PENUTUP ..... VII-1**

7.1. Kaidah Pelaksanaan..... VII-1

7.2. Kesimpulan..... VII-2

**LAMPIRAN**

# DAFTAR TABEL

Tabel II.1 PDRB Kota Makassar Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha (Juta Rupiah) Tahun 2020-2024..... II-1

Tabel II.2 PDRB Kota Makassar Atas Dasar Harga Konstan menurut lapangan usaha (Juta Rupiah) Tahun 2020-2024. ..... II-2

Tabel II.3 Pertumbuhan Ekonomi ADHK Kota Makassar Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (%) ..... II-4

Tabel II.4 Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Dan Nasional Tahun 2020 - 2024. ..... II-19

Tabel II.5 Persentase Penduduk Miskin Kota Makassar Dengan Daerah Setara Dikawasan Tahun 2020 - 2024. ..... II-20

Tabel II.6 Persentase Penduduk Miskin Kota Makassar Dengan Kota Setara Tahun 2020 - 2024 ..... II-20

Tabel II.7 Garis Kemiskinan Di Kota Makassar, Sulawesi Selatan Dan Nasional Tahun 2020 - 2024. ..... II-21

Tabel II.8 Garis Kemiskinan Di Kota Makassar Dan Kota Setaranya Daerah Kawasan Tahun 2020 - 2024. ..... II-21

Tabel II.9 Garis Kemiskinan Di Kota Makassar Dan Kota Setaranya Di Luar Kawasan Tahun 2020 – 2024..... II-22

Tabel II.10 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Makassar, Sulawesi Selatan Dan Nasional Tahun 2020 - 2024. ..... II-22

Tabel II.11 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Makassar Dengan Daerah Setaranya Tahun 2020 - 2024 ..... . II-23

Tabel II.12 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Makassar Dengan Daerah Setaranya Di Luar Kawasan Tahun 2020 - 2024..... . II-23

Tabel II.13 Komponen Pembentuk IPM Kota Makassar Tahun 2020 – 2024. ..... II-26

Tabel II.14 Nilai SAKIP Kota Makassar 2020-2024 ..... II-29

Tabel II.15 Indeks Pembangunan Manusia..... II-30

Tabel II.16 Indeks Pendidikan. ..... II-31

Tabel II.17 Pengeluaran Per Kapita..... II-31

Tabel II.18 Indeks Reformasi Birokrasi..... II-32

Tabel II.19 Indeks Kepuasan Masyarakat..... II-33

Tabel II.20 Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. ..... II-33

Tabel III.10 Target Perubahan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 ..... III-20

Tabel III.11 Belanja Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 ..... III-21

Tabel III.12 Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Makassar Tahun 2025..... III-24

Tabel IV.1 Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Daerah Kota Makassar Tahun 2025. IV-4

Tabel IV.2 Terget dan Capaian Pembangunan pada Kawasan Makassar dan Sekitarnya Tahun 2025..... IV-11

Tabel IV.3 Terget dan Capaian Pembangunan pada Kawasan Makassar dan sekitarnya Tahun 2025 ..... IV-13

Tabel IV.4 Sasaran Pembangunan Pada Kawasan Pembangunan Makassar Tahun 2025 .. IV-15

Tabel IV.5 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Makassar Tahun 2025..... IV-17

Tabel IV.6 Hubungan Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis Terhadap Prioritas Pembangunan Tahun 2025..... IV-19

Tabel IV.7 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Makassar mendukung Visi dan Misi Walikota Periode 2025-2029 Kota Makassar Tahun 2025 ..... IV-24

Tabel IV.8 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Makassar ..... IV-30

Tabel IV.9 Program Prioritas Pembangunan Kota Makassar Tahun 2025 ..... IV-33

Tabel IV.10 Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Prioritas Pembangunan Kota Makassar Tahun 2025 ..... IV-50

Tabel IV.11 Kesesuaian Prioritas Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar Tahun 2025..... IV-52

Tabel IV.12 Kesesuaian Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Sulawesi-Selatan Dengan Sasaran dan Program Prioritas Pemerintah Kota Makassar Tahun 2025 ..... IV-54

Tabel IV.13 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Makassar Tahun 2025 ..... IV-67

Tabel V.1 Rincian Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2025..... V-1

Tabel V.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah Pada Perubahan RKPD 2025 ..... V-5

Tabel VI.1 Penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Makassar P-RKPD Tahun 2025 ..... VI-9

Tabel VI.2 Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah Kota Makassar P-RKPD Tahun 2025 ..... VI-11

Tabel VI.3 Penetapan Target Indikator Kinerja Kunci Kota Makassar P-RKPD Tahun 2025. VI-14

Tabel VI.4 Evaluasi Pencapaian SPM Kota Makassar Triwulan I Tahun 2025 ..... VI-21

Tabel VI.5 Target Indikator TPB Tujuan 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun P-RKPD Kota Makassar Tahun 2025 ..... VI-28

Tabel VI.6 Target Indikator SDGS Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik. serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan P-RKPD Kota Makassar Tahun 2025 ..... VI-29

Tabel VI.7 Target Indikator Tujuan SDGS 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia P-RKPD Kota Makassar Tahun 2025 ..... VI-30

Tabel VI.8 Target Indikator SDGS Tujuan 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua P-RKPD Kota Makassar Tahun 2025 ..... VI-32

Tabel VI.9 Target Indikator SDGS Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan P-RKPD Kota Makassar Tahun 2025..... VI-33

Tabel VI.10 Target Indikator SDGS Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan P-RKPD Kota Makassar Tahun 2025 VI-34

Tabel VI. 11 Target Indikator Tujuan SDGS 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua P-RKPD Kota Makassar Tahun 2025... VI-36

Tabel VI.12 Target Indikator SDGS Tujuan 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan. serta Mendorong Inovasi P-RKPD Kota Makassar Tahun 2025 ..... VI-36

Tabel VI.13 Target Pencapaian SDGS Tujuan 11 Membangun kota dan pemukiman yang Inklusif aman tangguh dan berkelanjutan P-RKPD Kota Makassar Tahun 2025. VI-37

Tabel VI.14 Target Indikator SDGS Tujuan 12 Memastikan Pola Konsumsi Dan Produksi Yang BerkelanjutanP-RKPD Kota Makassar Tahun 2025 ..... VI-38

Tabel VI.15 Target Indikator SDGS Tujuan 13 Mengambil Aksi Segera Untuk Memerangi Perubahan Iklim Dan DampaknyaP-RKPD Kota Makassar Tahun 2025 ..... VI-39

Tabel VI.16 Target Indikator SDGS Tujuan 15 Memastikan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati P-RKPD Kota Makassar Tahun 2025..... VI-39

Tabel VI.17 Target Indikator SDGS Tujuan 16 Mendukung Masyarakat Yang Damai Dan Inklusif Untuk Pembangunan Berkelanjutan. Menyediakan Akses Terhadap Keadilan Bagi Semua Dan Membangun Institusi-Institusi Yang Efektif Akuntabel Dan Inklusif Di Semua Level P-RKPD Kota Makassar Tahun 2025 ... VI-40

Tabel VI.18 Menguatkan Ukuran Implementasi Dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan P-RKPD Kota Makassar Tahun 2025. VI-41

# DAFTAR GRAFIK


Grafik II.1 Pertumbuhan PDRB pada 5 (Lima) Jenis Lapangan Usaha dengan Pertumbuhan Tertinggi Pada Tahun 2024 ..... II-5

Grafik II.2 Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar Tahun 2020-Triwulan I 2025 ..... II-6

Grafik II.3 Perbandingan capaian pertumbuhan ekonomi Kota Makassar dengan Kabupaten Takalar, Gowa, Maros,Pangkep dan Gowa Tahun 2020-2024 ..... II-9

Grafik II.4 Perbandingan PDRB Per Kapita Kota Makassar dengan Kabupaten Takalar, Maros, Pangkep dan Gowa Tahun 2020-2024 ..... II-10

Grafik II.5 Perbandingan Capaian Pertumbuhan Ekonomi dengan Kota Setara Tahun 2020-2024 ..... II-11

Grafik II.6 Inflasi Tahunan Kota Makassar 2020-2024 (persen) ..... II-12

Grafik II.7 Tingkat Inflasi Kota Makassar Bulan April Year to Date (YtD) 2025. ..... II-13

Grafik II.8 Jumlah Angkatan Kerja dan Jumlah Orang Bekerja di Kota Makassar Tahun 2020-2024 (jiwa) ..... II-14

Grafik II.9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Makassar Tahun 2020-2024 (persen) ..... II-15

Grafik II.10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Makassar Tahun 2020-2024 (persen) ..... II-16

Grafik II.11 Garis Kemiskinan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-19

Grafik II.12 PersentasePenduduk Di Atas Garis Kemiskinan Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-19

Grafik II.13 Garis Kemiskinan Kota Makassar Tahun 2020-2024 ..... II-21

Grafik II.14 Capaian Gini Rasio Kota Makassar Dengan Kota Setara Tahun 2020 - 2024.... II-24

Grafik II.15 Perbandingan IPM Kota Makassar Dengan Kabupaten Dan Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 ..... II-25

Grafik II.16 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-27

Grafik II.17 Perbandingan IPM Kota Makassar Dengan Kabupaten Dan Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 ..... II-27

Grafik VI-1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... VI-2

Grafik IV-2 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Makassar Tahun 2020-2024 ..... VI-3

Grafik VI-3 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Makassar dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024..... VI-3

Grafik IV-4 Perbandingan Indeks Gini Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia Tahun 2020-2024..... IV-4

Grafik VI-5 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia Tahun 2020-2024..... IV-5

Grafik VI-6 Jumlah Penduduk Miskin Kota Makassar Kota Makassar Tahun 2020-2024.... IV-6

Grafik VI-7 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota Makassar Kota Makassar Dan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-202..... IV-7

Grafik VI-8 Garis Kemiskinan Kota Makassar Tahun 2020-2024..... IV-7

Grafik VI-9 Potensi Penurunan Intensitas Emisi Gsas Rumah Kaca (GRK) Kota Makassar Tahun 2020-2024..... IV-8

# DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Hubungan Antar Dokumen RKPD Kota Makassar ..... I-8

Gambar I.2. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran ..... I-9

Gambar IV1. Tema Pembanguan RKP tahun 2025 Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. ..... IV-8

Gambar IV.2 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025..... IV-9

Gambar IV.3 Prioritas Nasional ..... IV-9

Gambar IV.4 Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan ..... IV-10

# BAB I

# PENDAHULUAN



PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Pendanaan daerah merupakan pemanfaatan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta dukungan pencapaian target pembangunan Provinsi dan target pembangunan Nasional.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bertujuan untuk mengukur sejauh mana target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai dan untuk mengidentifikasi kendala serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) guna memastikan tercapainya visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan selanjutnya dijabarkan dalam RKPD. Dokumen RKPD merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang berisi program/kegiatan perangkat daerah dan atau lintas perangkat daerah. Dokumen RKPD dapat digunakan dalam menjaga konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD, dan juga merupakan landasan penyusunan kebijakan umum perubahan anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara untuk menyusun R-APBD serta merupakan pedoman dalam mengevaluasi peraturan daerah tentang APBD.

Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah. Pengendalian dan evaluasi penting untuk menjamin keberhasilan pencapaian rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan konsistensi antar dokumen rencana pembangunan daerah dan penganggaran dengan pelaksanaannya, serta memastikan agar keberhasilan pembangunan daerah dapat dicapai sesuai dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P–APBD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Perubahan Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 343 ayat (1) disebutkan bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi: (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Selain aspek pengendalian dan evaluasi, hal lain yang menjadi pertimbangan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Hal ini berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bertujuan mengurangi pengeluaran negara sebesar Rp306,69 triliun, atau sekitar 8% dari total belanja yang telah disetujui sebesar Rp. 3.621,3 triliun. Kebijakan efisiensi mencakup pengurangan anggaran di berbagai Kementerian dan Lembaga, termasuk Pemerintah Daerah berdampak pada 16 pos belanja, termasuk pengurangan biaya alat tulis kantor, perjalanan dinas, sewa kendaraan, dan kegiatan seremonial.

Efisiensi tersebut berdampak langsung pada kemampuan instansi pemerintah dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan. Beberapa program ditunda pelaksanaannya karena terbatasnya anggaran, yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Makassar dalam menyikapi kebijakan efisiensi ini, melakukan konsolidasi internal terkait efisiensi dalam belanja APBD 2025. Selain itu perlu dilakukan identifikasi terhadap komponen beberapa belanja yang selaras dengan amanat Inpres Nomor 1 Tahun 2025, penataan ulang belanja daerah dengan prioritas untuk pelayanan publik, menjaga *mandatory spending*, serta permasalahan pembangunan di daerah, termasuk arah kebijakan dan tentunya menyesuaikan dengan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar sesuai Visi Pemerintah Kota Makassar yakni Makassar Unggul, Inklusif, Aman dan Berkelanjutan.

Surat Edaran Nomor 900/833/SJ mengamanatkan Kepala Daerah untuk melakukan identifikasi atas efisiensi belanja dengan tetap memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, serta manfaat yang diutamakan untuk mendukung pencapaian delapan misi atau Asta Cita dan pencapaian tujuh belas program prioritas, serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen. Kepala Daerah juga diminta untuk memperhatikan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Penyusunan P-RKPD Tahun 2025 dilakukan secara transparan, terpadu lintas

sektor serta berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu sebagai gambaran awal untuk capaian Indikator Ekonomi Makro Kota Makassar Tahun 2024 yaitu: Pertumbuhan Ekonomi 5,56 Persen, Tingkat Kemiskinan 4,97 Persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 9,71 Persen, Gini Rasio 0,372, Indeks Pembangunan Manusia 85,23 dan PDRB Perkapita (ADHB) Rp.165,95 Juta. Selain memperhatikan capaian indikator ekonomi makro, Penyusunan P-RKPD Kota Makassar Tahun 2025 juga diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Rancangan RPJMN 2025-2029, Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan serta implementasi peraturan perundang-undangan yang terbaru yang relevan dengan penyusunan RKPD.

Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun ke I (ke-satu) pelaksanaan RPJPD Kota Makassar Tahun 2025–2045 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Perubahan RKPD 2025 akan menjadi dokumen perencanaan tahunan yang lebih spesifik sebagai penjabaran dari RPJPD. Perubahan RKPD Tahun 2025 telah mengakomodir tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program perangkat daerah serta target kinerja pembangunan daerah yang akan ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut perlu dilakukan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja melalui pergeseran anggaran dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah mengenai Penjabaran APBD TA 2025 dan disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah (Perda) mengenai Perubahan APBD TA 2025.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam Perubahan RKPD Kota Makassar adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang PembentukanDaerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat ISulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 2102) juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan DaerahTingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I SulawesiUtara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
26. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar;
27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
28. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
29. Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 259 Tahun 2020, Lembaran Lepas Sekretaris Negara Nomor 27);
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
34. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
41. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

50. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
51. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2025;
52. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
53. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
54. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 17);
55. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
56. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6);
57. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2025-2043 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 7).

## 1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hubungan antar dokumen perencanaan daerah terdiri dari dokumen perencanaan yang berdimensi jangka panjang yaitu 20 tahunan, jangka menengah yakni 5 (lima) tahun dan dokumen perencanaan jangka pendek (operasional) yang berdimensi tahunan. Sedangkan berdasarkan struktur, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanahkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dokumen RKPD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, dimana Renja Perangkat Daerah akan menjadi bahan masukan dalam finalisasi RKPD. Selanjutnya RKPD Kota Makassar Tahun 2025 menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja SKPD Kota Makassar Tahun 2025 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap SKPD.

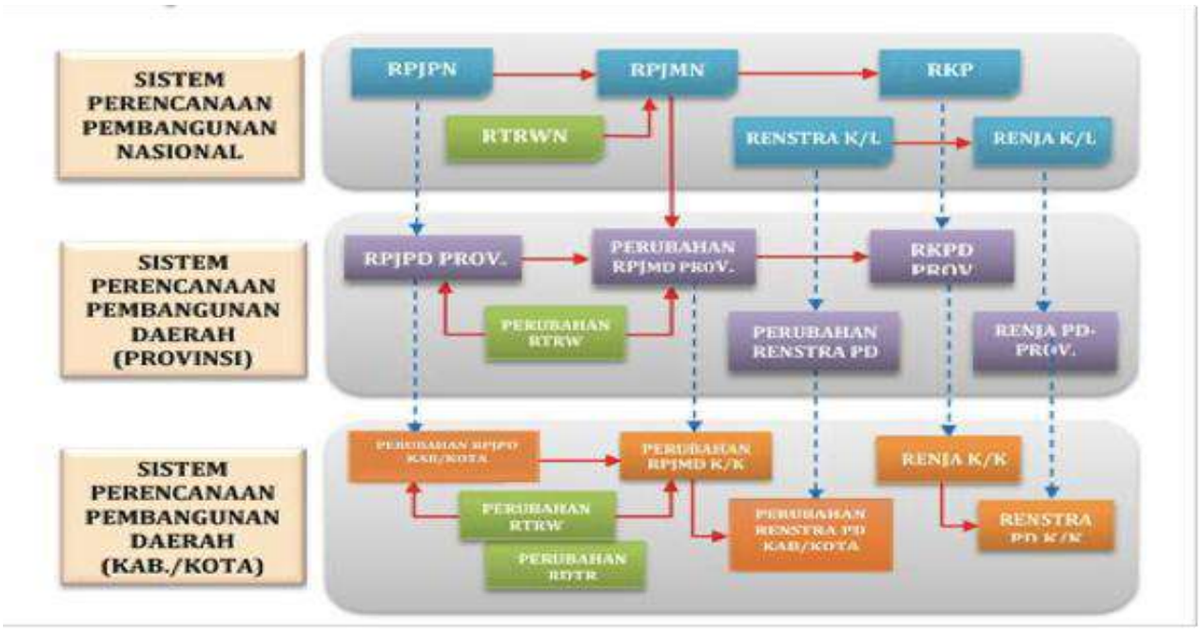
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun

2025 merupakan pelaksanaan tahun pertama dari proses penyelesaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025-2029 dalam rangka mencapai visi pemerintah Kota Makassar Tahun 2025-2029 “Makassar Unggul, Inklusif, Aman dan Berkelanjutan” dengan berpedoman pada RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya dokumen Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2025. Dokumen KUPA dan PPAS-P tersebut merupakan dasar untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun 2025 yang merupakan dokumen penganggaran yang berisikan rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan dan rencana pembiayaan. Dengan demikian, dokumen P-RKPD Tahun 2025 menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dengan dokumen lainnya dan menjadi bagian dalam proses penyusunan Perubahan APBD Tahun 2025. Hubungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran dapat dilihat pada gambar berikut:

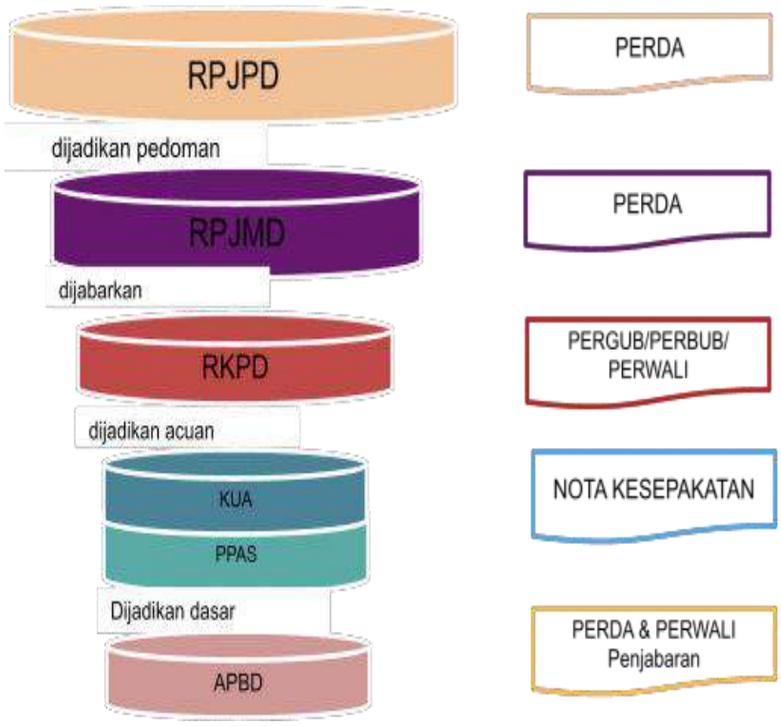
Adapun hubungan antara dokumen dalam penyusunan RKPD Kota Makassar dapat dijelaskan pada gambar berikut:

**Gambar I.1.**
**Hubungan Antar Dokumen RKPD Kota Makassar**




*Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, data diolah*

**Gambar I.2.**
**Hubungan antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran**




*Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, data diolah*

## 1.4 Maksud dan Tujuan

Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2025 dimaksudkan untuk:

1. Memberikan gambaran perubahan arah pembangunan tahunan yang disebabkan adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan yang sudah ditetapkan yaitu terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 serta untuk menjamin konsistensi perencanaan pembangunan serta penganggaran, dengan menyesuaikan perubahan kerangka keuangan daerah dan rencana program/kegiatan berdasarkan hasil evaluasi triwulan pertama;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dilakukan pembahasan dan memperoleh persetujuan DPRD;
3. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P);
4. Sebagai pedoman penyelarasan prioritas pembangunan Provinsi dengan Kabupaten/Kota;
5. Sebagai pedoman penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran atas perubahan asumsi-asumsi Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025;
2. Melakukan perubahan kebijakan pengganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;
3. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam melakukan penyesuaian

prioritas program dan kegiatan Tahun 2025;

4. Sebagai instrumen dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## 1.5 Sistematika Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

**1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan RKPD, latar belakang penyusunan Perubahan RKPD serta proses penyusunan Perubahan RKPD.

**1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD, baik yang berskala Nasional, Provinsi maupun Kota.

**1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Prov/Kab/Kota, RKP/Program Strategis Nasional, dan RKPD Provinsi dalam rangka penyusunan RKPD Kab/Kota.

**1.4. Maksud dan Tujuan**

Menjelaskan secara ringkas tentang maksud penyusunan dokumen Perubahan RKPD dan tujuan penyusunan dokumen Perubahan RKPD

**1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD**

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

**BAB II. EVALUASI HASIL RKPD KOTA MAKASSAR TRIWULAN I TAHUN 2025**

Menguraikan hasil evaluasi RKPD sampai Triwulan I Tahun 2025, selain itu juga memperhatikan Rancangan RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 sebagai bahan acuan.

**2.1 Evaluasi Indikator Kinerja Makro**

Sub bab ini menguraikan hasil evaluasi terkait indikator-indikator kinerja makro yang meliputi Produk Domestik Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Ketenagakerjaan, Kemiskinan, Gini Ratio, Indeks Pembangunan Manusia, termasuk analisis terhadap hasil capaian nilai SAKIP Kota Makassar.

**2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional**

Menguraikan Prioritas Nasional yaitu: Penguatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kesehatan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pencegahan *Stunting* dan Kemiskinan Ekstrim, Pengendalian Inflasi di Daerah, Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah, Dukungan Swasembada Pangan, Pengembangan Industri Kerajinan serta Memfasilitasi dalam Mempromosikan dan Memasarkan Hasil Industri Kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

**2.3 Rekapitulasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Program, Pendanaan berdasarkan OPD.**

Sub bab ini mencakup Evaluasi Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan, Capaian

Kinerja Pendanaan, Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), Evaluasi Capaian Program Perangkat Daerah Kota Makassar Triwulan I Tahun 2025, Upaya dalam Pencapaian Pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, Rekomendasi Pelaksanaan RKPD 2025 Triwulan Selanjutnya serta Evaluasi Capaian Kinerja berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah

## BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, banja daerah dan pembiayaan daerah.

### 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kota Makassar berkaitan dengan arah kebijakan ekonomi skala Nasional dan juga terkait dengan kebijakan ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

### 3.2. Tantangan Perekonomian Daerah

Sub bab ini menguraikan tantangan dalam pembangunan ekonomi daerah, baik yang berasal dari aspek internal maupun eksternal. Selain itu juga membahas arah kebijakan perekonomian daerah yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kota Makassar dalam menjawab tantangan perekonomian yang dihadapi.

### 3.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kota Makassar berkaitan dengan adanya perubahan kebijakan terkait pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

## BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi serta memperhatikan visi dan misi Pemerintah Kota Makassar yang tercantum dalam rancangan RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan.

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari Rancangan RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029.

### 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025.
4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Makassar Tahun 2025.
4.2.3. Strategi dan arah kebijakan Pembangunan Daerah Kota Makassar Tahun 2025
4.2.4. Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Makassar Tahun 2025
4.2.5. Kesesuaian Prioritas Pembangunan Kota Makassar dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Nasional Tahun 2025.

### 4.3. Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

**BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025**

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan hasil evaluasi triwulan I dan memperhatikan capaian kinerja yang direncanakan dalam rancangan RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029.

**5.1 Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2025**
**5.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025**
**5.3 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025**

**BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Menggambarkan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan.

**6.1 Indikator Kinerja Makro**
**6.2 Indikator Kinerja Utama**
**6.3 Indikator Standar Pelayanan Minimal**
**6.4 Indikator Kinerja Kunci**
**6.5 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)**

**BAB VII PENUTUP**

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun bila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

**LAMPIRAN**



# BAB II

# EVALUASI HASIL RKPD KOTA MAKASSAR TAHUN 2025 SAMPAI TRIWULAN I



# BAB II
# EVALUASI HASIL RKPD KOTA MAKASSAR TAHUN 2025 SAMPAI TRIWULAN I

## 2.1. Evaluasi Indikator Kinerja Makro

Untuk mengevaluasi indikator kinerja makro Kota Makassar berdasarkan hasil RKPD Kota Makassar tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dan capaian pelaksanaan tahun sebelumnya, dapat digambarkan sebagai berikut:

### 2.1.1. Produk Domestik Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi

**Produk Domestik Regional Bruto**

Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

**Tabel II.1.**
**PDRB Kota Makassar Atas Dasar Harga Berlaku**
**Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2020 – 2024**

| NO | LAPANGAN USAHA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 840.918,05 | 905.358,84 | 1.007.223,84 | 998.207,55 | 1.085.210,00 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Industri Pengolahan | 31.925.716,50 | 34.200.058,66 | 38.892.736,95 | 42.720.208,33 | 46.173.310,0 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 51.902,20 | 57.153,84 | 63.190,34 | 69.801,43 | 70.610,43 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang | 323.615,70 | 341.524,51 | 368.879,31 | 379.151,33 | 398.267,87 |
| 6 | Konstruksi | 33.290.646,80 | 36.131.952,00 | 38.870.358,63 | 41.301.428,53 | 42.033.922,39 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor | 34.983.124,10 | 37.753.710,41 | 41.997.947,49 | 45.443.609,51 | 48.680.754,61 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 3.928.658,10 | 4.323.529,30 | 5.480.408,04 | 6.565.492,12 | 7.226.856,13 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 3.292.663,00 | 3.407.193,29 | 4.233.262,63 | 4.863.291,93 | 5.294.278,65 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 17.944.237,30 | 19.207.635,32 | 20.159.257,80 | 22.206.263,19 | 23.881.101,42 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 10.592.318,70 | 10.636.609,11 | 11.514.824,70 | 12.331.648,51 | 13.711.978,69 |
| 12 | Real Estate | 6.425.249,70 | 6.628.571,96 | 7.088.392,64 | 7.527.675,09 | 8.076.841,91 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 1.957.202,00 | 2.104.351,32 | 2.513.066,71 | 2.857.304,23 | 3.131.546,43 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib | 6.193.187,00 | 6.516.963,87 | 6.733.069,62 | 7.333.207,96 | 7.506.254,64 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 16.337.464,10 | 16.859.342,75 | 17.439.125,09 | 18.260.203,32 | 19.574.579,81 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 5.813.675,50 | 6.387.493,46 | 7.054.410,76 | 7.772.842,35 | 9.033.623,53* |
| 17 | Jasa lainnya | 4.432.414,20 | 4.856.616,65 | 5.519.697,75 | 6.272.445,50 | 7.283.593,30* |
| | **PDRB Total** | **178.332.992,95** | **190.318.065,29** | **208.935.852,30** | **226.902.780,88** | **243.062.720,00** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, Tahun 2025*

Memperhatikan Tabel II.1, pada tahun 2024, sektor-sektor utama seperti perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, dan konstruksi masih mendominasi PDRB Kota Makassar, masing-masing dengan kontribusi signifikan. Sektor perdagangan besar dan eceran mencerminkan meningkatnya konsumsi domestik dan perkembangan UMKM yang mendukung perekonomian lokal, sementara industri pengolahan berperan

penting dalam menambah nilai komoditas lokal. Konstruksi tetap menjadi sektor kunci dalam pembangunan infrastruktur yang memperkuat konektivitas antarwilayah.

Sebagai Kota yang bertumpu pada jasa kontribusi sektor pertanian mengalami sedikit kenaikan pada 2024, masih membutuhkan perhatian lebih untuk meningkatkan hasil dan ketahanan pangan, sektor pertanian tetap memiliki potensi besar untuk didorong melalui teknologi modern guna meningkatkan hasil dan daya saingnya. Sektor ini, dengan pemanfaatan yang lebih baik, bisa memperkuat ketahanan pangan lokal dan berkontribusi pada penciptaan lapangan pekerjaan.

Selain itu, sektor pengelolaan air dan limbah, serta real estate, meskipun memiliki potensi strategis dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan pemerataan pembangunan, perlu diberikan dorongan untuk berkembang lebih lanjut. Fokus pada pengembangan sektor-sektor ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis pada prinsip keberlanjutan. Dengan demikian, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, perlu ada fokus pada pengembangan sektor-sektor kecil ini, sambil memperkuat sektor dominan yang sudah ada. Pendekatan ini akan menciptakan keseimbangan dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar secara keseluruhan.

**Tabel II.2.**
**PDRB Kota Makassar Atas Dasar Harga Konstan**
**Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2020 – 2024**

| No | Lapangan Usaha/Industri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing | 508.930,00 | 518.310,35 | 532.420,89 | 537.801,72 | 564.160,25 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Industri Pengolahan/Manufacturing | 21.767.900,45 | 22.678.920,62 | 24.726.640,30 | 25.610.980,82 | 26.839.530,49 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas | 51.520,67 | 54.000,85 | 58.660,21 | 61.220,57 | 61.890,24* |
| 5 | Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities | 236.020,75 | 244.660,41 | 256.920,48 | 261.230,52 | 274.390,17 |
| 6 | Konstruksi/Construction | 20.232.800,34 | 21.101.290,89 | 21.371.120,50 | 22.025.080,67 | 22.256.260,72 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles | 23.777.630,28 | 25.119.550,11 | 26.747.840,54 | 28.032.660,19 | 29.532.420,73 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage | 2.476.090,32 | 2.641.160,22 | 3.138.090,35 | 3.470.420,87 | 3.687.610,45 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities | 2.284.790,14 | 2.326.300,53 | 2.791.540,72 | 3.138.850,81 | 3.346.790,89 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi/Information and Communication | 16.487.160,49 | 17.525.170,37 | 18.129.790,55 | 19.770.530,94 | 21.104.450,29 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities | 6.482.790,19 | 6.282.850,88 | 6.290.560,10 | 6.535.930,47 | 7.122.770,30 |
| 12 | Real Estat/Real Estate Activities | 3.838.840,19 | 3.949.180,22 | 4.100.560,31 | 4.290.010,49 | 4.516.170,53 |
| 13 | Jasa Perusahaan/Business Activities | 1.200.580,10 | 1.266.830,62 | 1.447.450,33 | 1.582.640,91 | 1.700.690,59 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security | 3.754.750,21 | 3.917.660,28 | 4.016.180,36 | 4.311.620,73 | 4.307.360,13 |

| No | Lapangan Usaha/Industri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Jasa Pendidikan/Education | 11.302.840,19 | 11.695.480,24 | 11.881.440,58 | 12.224.810,72 | 13.130.230,15 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities | 3.680.340,23 | 3.952.680,13 | 4.323.440,24 | 4.676.240,55 | 5.321.210,41 |
| 17 | Jasa Lainnya/Other Services Activities | 2.822.790,14 | 3.038.780,19 | 3.319.950,30 | 3.667.880,31 | 4.223.270,27 |
| **PDRB Total** | | 120.905.750,57 | 126.312.830,83 | 133.132.600,52 | 140.197.900,29 | 147.989.200,21 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, Tahun 2025*

Merujuk pada Data BPS Tahun 2025 bahwa PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Makassar tahun 2020–2024, Sektor-sektor yang mendominasi PDRB antara lain Perdagangan Besar dan Eceran, Industri Pengolahan, Informasi dan Komunikasi, serta Konstruksi. Perdagangan terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, didorong oleh tingginya permintaan barang dan jasa serta perkembangan sektor UMKM. Sektor Industri Pengolahan juga tumbuh stabil, berkat pengolahan sumber daya alam yang semakin maju dengan teknologi. Informasi dan Komunikasi mengalami perkembangan pesat, mencerminkan transformasi digital yang mengubah hampir semua sektor perekonomian. Sementara itu, Konstruksi terus berkembang seiring dengan pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas antarwilayah. Untuk mempertahankan pertumbuhan sektor-sektor ini, perlu dilakukan digitalisasi, inovasi teknologi, serta penguatan sistem logistik dan rantai pasok. Di sisi lain, sektor-sektor dengan kontribusi lebih kecil seperti Pertanian, Pertambangan, dan Jasa Keuangan memerlukan perhatian lebih. Pertanian masih menghadapi tantangan produktivitas, yang dapat diatasi dengan penerapan teknologi pertanian modern dan peningkatan akses pasar. Pertambangan, meskipun memiliki potensi besar, belum dimanfaatkan secara optimal dan membutuhkan kajian lebih lanjut untuk pengelolaan yang berkelanjutan. Sektor Jasa Keuangan juga menunjukkan kontribusi yang lebih kecil dibandingkan sektor lainnya, meskipun memiliki peran penting dalam perekonomian. Untuk sektor ini, perluasan akses keuangan digital dan peningkatan literasi keuangan dapat membantu mencapainya. Dengan penguatan sektor-sektor yang kurang dominan ini, dapat tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan

Peningkatan nilai PDRB-ADHK (Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan) Kota Makassar selama periode 2022 hingga 2024 menunjukkan pemulihan dan penguatan struktur ekonomi. Kenaikan dari Rp133.132,60 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp147.989,20 miliar di tahun 2024 didorong oleh kinerja positif dari lima sektor dominan yang menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi kota. Adapun kelima sektor tersebut adalah:

1. **Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor:** Sektor ini tetap menjadi penyumbang terbesar dalam struktur PDRB ADHK. Peningkatan aktivitas perdagangan mencerminkan pulihnya daya beli masyarakat serta mobilitas ekonomi pasca-pandemi. Tercatat kontribusi sektor ini mencapai Rp29.532,42 miliar di tahun 2024, mencerminkan peran vital sektor ritel dan jasa reparasi dalam mendorong ekonomi lokal.
2. **Industri Pengolahan:**
   Sebagai pusat industri di Kawasan Timur Indonesia, Kota Makassar diuntungkan dengan keberadaan Kawasan Industri Makassar (KIMA). Peningkatan produksi manufaktur dan efisiensi operasional mendorong pertumbuhan sektor ini, yang

menyumbang Rp26.839,53 miliar pada tahun 2024. Industri ini berkontribusi dalam menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kapasitas ekspor regional.

3. **Sektor Konstruksi:**
   Peningkatan aktivitas pembangunan infrastruktur, termasuk perumahan, fasilitas umum, dan proyek strategis nasional, mendorong pertumbuhan sektor konstruksi. Pada tahun 2024, sektor ini memberikan kontribusi sebesar Rp22.256,26 miliar. Pemulihan proyek-proyek konstruksi yang tertunda selama pandemi menjadi salah satu faktor pendorong utamanya.
4. **Informasi dan Komunikasi:**
   Transformasi digital yang semakin masif pasca-pandemi turut mendorong pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi. Peningkatan akses terhadap teknologi informasi, penggunaan layanan digital, serta penguatan infrastruktur TIK menjadikan sektor ini salah satu yang tumbuh paling pesat, dengan kontribusi sebesar Rp21.104,45 miliar pada 2024.
5. **Sektor Jasa Pendidikan:**
   Sektor pendidikan menunjukkan pemulihan seiring dibukanya kembali aktivitas tatap muka dan meningkatnya investasi pada pendidikan formal dan non-formal. Dengan kontribusi sebesar Rp13.130,23 miliar pada 2024, sektor ini memegang peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia dan mendukung transformasi sosial-ekonomi jangka panjang.

**Tabel II.3.**
**Pertumbuhan Ekonomi ADHK Kota Makassar**
**Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (%)**

| No. | Lapangan Usaha | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasa lainnya | -13,42 | 7,65 | 9,25 | 10,48 | 15,14 |
| 2 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 12,02 | 7,40 | 9,38 | 8,16 | 13,77 |
| 3 | Jasa Pendidikan | 1,64 | 3,47 | 1,59 | 2,89 | 7,40 |
| 4 | Jasa Perusahaan | -11,39 | 5,52 | 14,26 | 9,34 | 7,47 |
| 5 | Informasi dan Komunikasi | 10,53 | 6,30 | 3,45 | 9,05 | 6,76 |
| 6 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | -19,83 | 1,82 | 20,00 | 12,44 | 6,63 |
| 7 | Transportasi dan Pergudangan | -17,34 | 6,67 | 18,81 | 10,59 | 6,28 |
| 8 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | -5,43 | 5,64 | 6,48 | 4,80 | 5,36 |
| 9 | Real Estate | 0,09 | 2,87 | 3,83 | 4,62 | 5,29 |
| 10 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | -3,25 | 1,84 | 2,72 | 1,01 | 4,88 |
| 11 | Industri Pengolahan | -4,22 | 4,19 | 9,03 | 3,58 | 4,80 |
| 12 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 1,82 | -3,08 | 0,12 | 3,90 | 8,97 |
| 13 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 4,98 | 3,66 | 5,01 | 1,68 | 5,01 |
| 14 | Pengadaan Listrik dan Gas | -4,38 | 4,83 | 8,63 | 4,35 | 1,09 |
| 15 | Konstruksi | 0,99 | 4,29 | 1,28 | 3,06 | 1,05 |
| 16 | Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib | -0,43 | 4,34 | 2,51 | 7,36 | -0,43 |
| 17 | Pertambangan dan Penggalian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PDRB Total (ADHK) | -1,27 | 4,47 | 5,40 | 5,31 | 5,56 |

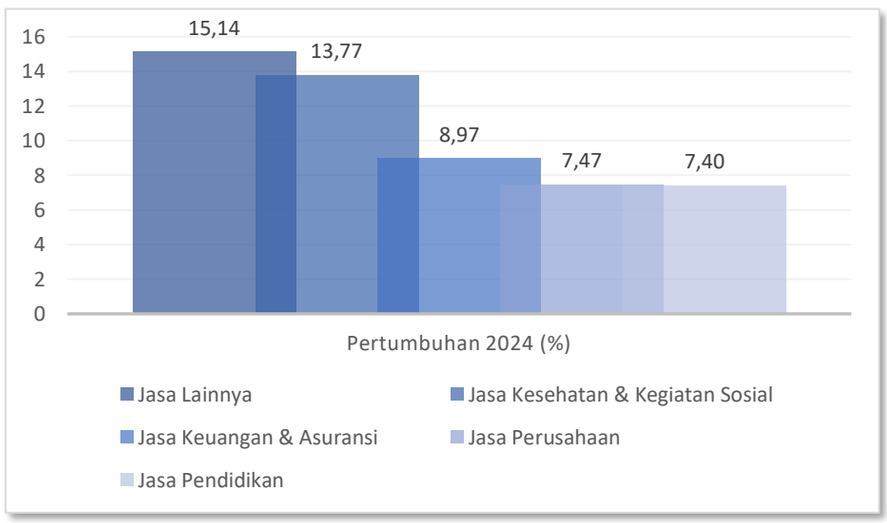
*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar data diolah, tahun 2025*

Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar menunjukkan tren pemulihan yang kuat pasca pandemi. Setelah mengalami kontraksi sebesar -1,27% pada tahun 2020, perekonomian mulai bangkit pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 4,47%, dan terus

menguat hingga mencapai 5,56% pada tahun 2024. Pola ini mencerminkan pemulihan bertahap yang stabil di hampir semua sektor utama. Beberapa sektor yang sempat terkontraksi tajam pada masa pandemi, seperti Transportasi dan Pergudangan, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, menunjukkan rebound yang signifikan, terutama di tahun 2022 dan 2023. Ini menandakan kembalinya mobilitas masyarakat, peningkatan pariwisata, serta aktivitas perdagangan dan logistik.

Pada tahun 2024, sektor jasa menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Makassar. Lima sektor dengan pertumbuhan tertinggi berasal dari jasa, yaitu Jasa Lainnya (15,14%), Jasa Kesehatan (13,77%), Jasa Keuangan (8,97%), Jasa Perusahaan (7,47%), dan Jasa Pendidikan (7,40%). Hal ini menunjukkan pergeseran struktur ekonomi kota ke arah sektor jasa modern yang berbasis pengetahuan, teknologi, dan pelayanan publik. Sementara itu, sektor-sektor tradisional seperti Pertanian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan tetap tumbuh positif, meskipun kontribusinya terhadap percepatan ekonomi secara umum lebih moderat. Stabilnya pertumbuhan di berbagai sektor ini menjadi sinyal positif bagi Makassar untuk terus memperkuat fondasi ekonomi berbasis inovasi, digitalisasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

**Grafik II.1.**
**Pertumbuhan PDRB pada 5 (Lima) Jenis Lapangan Usaha dengan Pertumbuhan Tertinggi Pada Tahun 2024**




*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar data diolah, Tahun 2025*

Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mencapai 5,56%, didorong terutama oleh lima sektor dengan pertumbuhan tertinggi yang seluruhnya berasal dari sektor jasa. Sektor dengan pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Lainnya sebesar 15,14%, mencerminkan pulihnya aktivitas UMKM, jasa personal, dan sektor informal. Diikuti oleh Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan pertumbuhan 13,77%, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap layanan kesehatan. Jasa Keuangan dan Asuransi berada di urutan ketiga dengan 8,97%, menunjukkan pemulihan stabil pada aktivitas perbankan dan asuransi setelah masa pandemi.

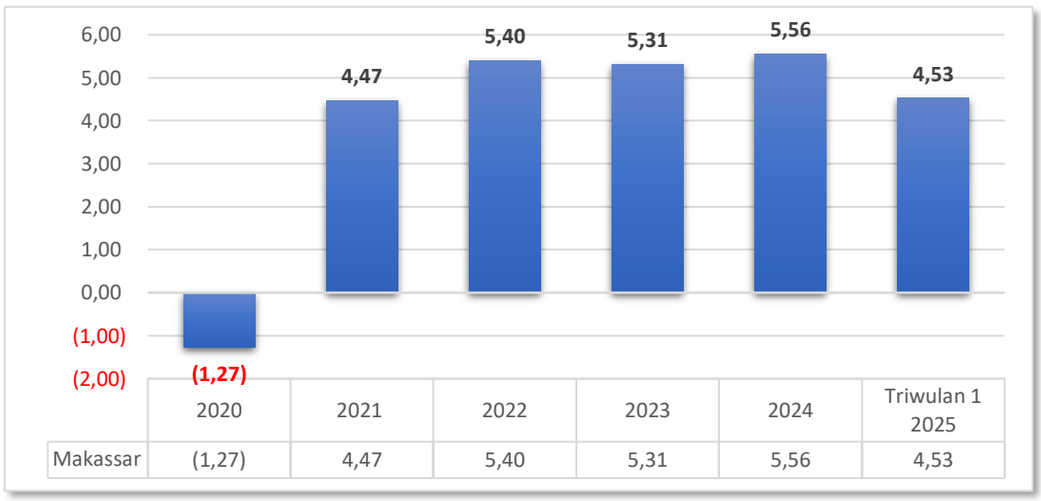
Selanjutnya, Jasa Perusahaan tumbuh 7,47%, mencerminkan meningkatnya permintaan terhadap layanan profesional dan bisnis, sementara Jasa Pendidikan tumbuh 7,40% didorong oleh normalisasi kegiatan belajar-mengajar dan investasi pendidikan.

Kelima sektor ini menunjukkan arah transformasi ekonomi Kota Makassar yang semakin berfokus pada sektor jasa modern berbasis SDM, digitalisasi, dan pelayanan, sekaligus menjadi pijakan penting dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi ke depan.

**Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar**

Kota Makassar termasuk salah satu kota di Indonesia yang perekonomiannya mengalami pertumbuhan yang baik. Kebijakan yang mendukung pemulihan ekonomi dan mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk beraktivitas telah memberi dampak nyata pada kinerja perekonomian Kota Makassar yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi meningkat drastis dari -1,27 persen (tahun 2021) menjadi 5,56 persen (tahun 2024). Kinerja pertumbuhan ekonomi tersebut cukup jauh melampaui kinerja perekonomian Nasional, namun masih di bawah dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan.

**Grafik II.2.**
**Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar**
**Tahun 2020 – 2024 dan Triwulan I 2025**




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Triwulan 1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makassar | (1,27) | 4,47 | 5,40 | 5,31 | 5,56 | 4,53 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar data diolah, Tahun 2025*

Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar menunjukkan dinamika yang menarik dalam dua periode terakhir. Pada tahun 2024, ekonomi tumbuh sebesar 5,56 persen, mencerminkan pemulihan dan penguatan aktivitas ekonomi pascapandemi serta stabilitas konsumsi domestik. Namun, memasuki Triwulan I tahun 2025, laju pertumbuhan ekonomi sedikit melambat menjadi 4,53 persen (y-on-y). Meskipun masih berada di zona positif, perlambatan ini mengindikasikan adanya tekanan pada beberapa sektor utama, terutama sektor sekunder dan belanja pemerintah.

Jika dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Sulawesi selatan capaian pertumbuhan ekonomi triwulan I kota Makassar berada di bawah ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional di angka 5,78 persen dan 4,87 persen. Pada saat yang sama perekonomian di Kota Makassar tumbuh di kisaran angka 4,53 persen lebih rendah dibandingkan realisasi pada Triwulan I 2024 sebesar 6,61 persen. Perlambatan ini terutama disebabkan oleh penurunan tajam pada konsumsi rumah tangga dan kontraksi konsumsi pemerintah. Konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,75 persen, jauh lebih rendah dibandingkan pada tahun 2024 yang mencapai pertumbuhan 8,58 persen. Kondisi ini mencerminkan lemahnya tekanan permintaan

agregat, serta kemungkinan besar dipengaruhi oleh ketidakpastian pendapatan dan preferensi rumah tangga untuk menunda belanja. Beberapa faktor yang menjadi faktor pendukung perekonomian kota Makassar seperti kinerja industri makanan dan minuman, perdagangan, konstruksi, serta potensi ekonomi kreatif, diperkirakan akan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Pada tahun 2024 Sektor perdagangan besar dan eceran menempati posisi teratas dalam struktur PDRB Kota Makassar dengan kontribusi sebesar 19,96 persen. Hal ini mencerminkan peran strategis Makassar sebagai pusat distribusi barang dan jasa di Kawasan Timur Indonesia. Aktivitas perdagangan yang tinggi menunjukkan dinamika konsumsi masyarakat yang kuat, serta keberadaan jaringan ritel dan grosir yang luas. Sektor ini juga menjadi indikator penting dalam mengukur daya beli masyarakat dan efisiensi rantai pasok. Dengan pertumbuhan yang relatif stabil, perdagangan menjadi tulang punggung ekonomi kota dan berpotensi besar untuk terus dikembangkan melalui digitalisasi dan integrasi logistik.

Kemudian Sektor industri pengolahan menempati urutan kedua penyumbang tertinggi terhadap PDRB kota Makassar yakni 18,83 persen. Hal tersebut menandakan peran pentingnya dalam hilirisasi produk lokal dan penciptaan nilai tambah. Industri pengolahan di Makassar mencakup berbagai subsektor seperti makanan dan minuman, serta produk kimia. Meskipun kontribusinya besar, sektor ini menghadapi tantangan seperti keterbatasan bahan baku lokal, teknologi produksi yang belum optimal, dan persaingan pasar. Untuk menjaga daya saing, diperlukan dukungan investasi, pelatihan tenaga kerja, dan kemitraan antara pelaku industri dan pemerintah daerah. Penguatan sektor ini sangat penting untuk mendorong ekspor dan substitusi impor.

Selanjutnya Sektor konstruksi memberikan kontribusi sebesar 18,20 persen terhadap pembentukan PDRB Kota Makassar atau berada pada urutan ketiga. Namun pertumbuhannya tergolong lambat. Hal ini bisa disebabkan oleh penundaan proyek infrastruktur, efisiensi anggaran, atau siklus pembangunan yang cenderung meningkat di pertengahan tahun. Sementara itu, sektor transportasi dan pergudangan menunjukkan pertumbuhan yang stabil dengan kontribusi sebesar 10,95 persen terhadap pembentukan PDRB Kota Makassar. Sektor ini mendukung mobilitas barang dan jasa serta memperkuat konektivitas antarwilayah. Transportasi menjadi penghubung vital bagi sektor perdagangan dan industri, terutama dengan keberadaan pelabuhan dan bandara internasional. Untuk meningkatkan kinerja sektor-sektor ini, diperlukan perencanaan proyek yang matang, percepatan realisasi anggaran, dan integrasi sistem logistik yang efisien.

Sementara itu, kontraksi pada sektor sekunder di triwulan I-2025 menunjukkan tantangan dalam sektor industri pengolahan dan konstruksi, yang sebelumnya juga memiliki kontribusi signifikan dalam struktur PDRB 2024. Penurunan ini bisa disebabkan oleh faktor musiman atau penyesuaian investasi di awal tahun.

Berdasarkan kondisi demikian, maka untuk menjaga dan meningkatkan momentum pertumbuhan ekonomi Kota Makassar, diperlukan strategi yang tidak hanya bersifat reaktif terhadap tantangan jangka pendek, tetapi juga proaktif dalam membangun fondasi ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan. Salah satu langkah utama adalah mendorong investasi di sektor industri dan konstruksi, dua sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota. Meski demikian, keduanya menunjukkan gejala stagnasi dan bahkan kontraksi dalam beberapa periode terakhir. Investasi yang diarahkan pada modernisasi fasilitas produksi, efisiensi energi, dan pembangunan infrastruktur strategis akan memberikan efek ganda:

menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing daerah.

Stabilisasi belanja pemerintah juga menjadi kunci penting dalam menjaga ritme pertumbuhan ekonomi. Kontraksi drastis dalam pengeluaran pemerintah pada awal tahun 2025 menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam perencanaan dan realisasi anggaran. Belanja pemerintah yang tidak merata dapat mengganggu kelangsungan proyek pembangunan dan menghambat perputaran ekonomi lokal. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem penganggaran, termasuk percepatan proses pengadaan, penjadwalan proyek yang lebih merata sepanjang tahun, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.

Di sisi lain, pengembangan sektor jasa dan digitalisasi menjadi pilar penting dalam membangun ekonomi masa depan. Sektor jasa seperti pendidikan, kesehatan, keuangan, dan teknologi informasi memiliki potensi besar untuk tumbuh pesat jika didukung oleh infrastruktur digital yang memadai. Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan publik dan swasta, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, seperti e-commerce, fintech, dan layanan berbasis platform. Pemerintah dapat mendorong transformasi ini melalui kebijakan inklusif, pelatihan digital untuk UMKM, dan pembangunan ekosistem inovasi yang mendukung startup lokal.

Secara keseluruhan, strategi pembangunan ekonomi Kota Makassar harus bersifat holistik dan terintegrasi, dengan memperhatikan keseimbangan antar sektor dan keberlanjutan jangka panjang. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam menciptakan pertumbuhan yang tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga berkualitas dan merata. Dengan arah kebijakan yang tepat, Makassar dapat memperkuat posisinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia dan menjadi model kota yang resilien dan adaptif terhadap perubahan zaman.

## Perbandingan Capaian Indikator Makro dan PDRB Per Kapita Kota Makassar dengan Kabupaten Maros, Pangkep, Takalar dan Gowa

Jika dibandingkan dengan empat kabupaten yang ada dalam kawasan Makassar, maka Kota Makassar tampil sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi paling stabil dan konsisten selama lima tahun terakhir. Meskipun sempat mengalami kontraksi di tahun 2020 akibat pandemi, Makassar berhasil bangkit dan mencatat pertumbuhan positif setiap tahun berikutnya.

**Grafik II.3.**
**Perbandingan Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar dengan Kabupaten Takalar, Maros, Pangkep dan Gowa**
**Tahun 2020-2024**



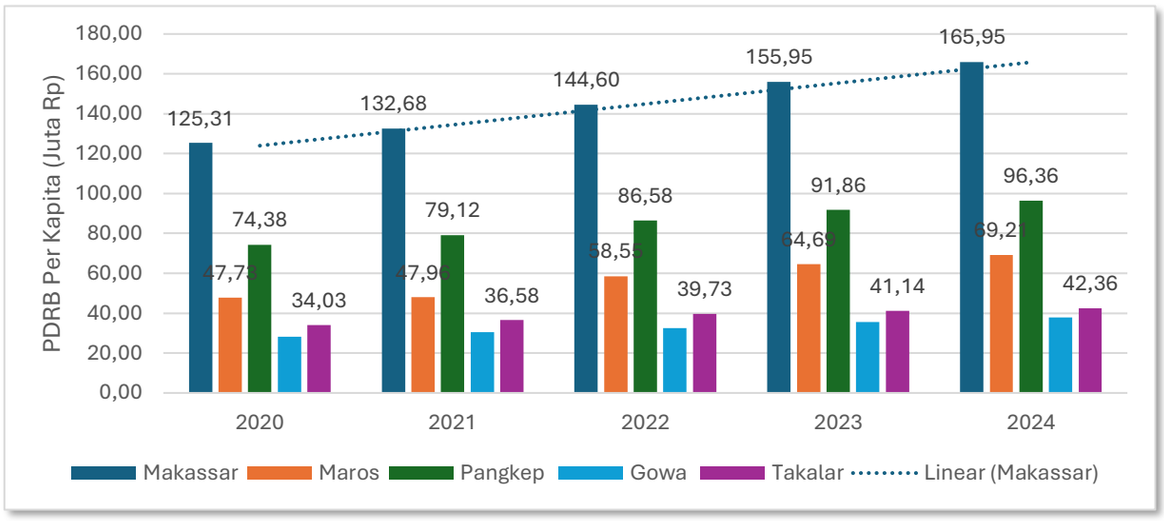

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Takalar | -0,61 | 5,05 | 4,64 | 3,86 | 4,34 |
| Gowa | 1,76 | 7,26 | 4,59 | 5,82 | 5,39 |
| Maros | -10,87 | 1,36 | 9,13 | 5,00 | 3,79 |
| Pangkep | -1,69 | 3,46 | 4,93 | 4,75 | 5,00 |
| Makassar | -1,27 | 4,47 | 5,40 | 5,31 | 5,56 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar data diolah, Tahun 2025*

Selama periode 2020–2024, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar menunjukkan pemulihan yang stabil dan kompetitif, terutama setelah tekanan pandemi pada 2020. Pada 2020, Makassar masih mampu mencatatkan pertumbuhan positif (1,27%), kontras dengan kabupaten lain seperti Maros yang terkontraksi tajam (-10,87%). Hal ini mengindikasikan resiliensi struktur ekonomi Makassar, kemungkinan karena dominasi sektor tersier seperti perdagangan, jasa, dan administrasi pemerintahan yang relatif lebih cepat pulih dibanding sektor primer.

Selanjutnya, meskipun pada 2021–2022 pertumbuhan ekonomi Makassar masih di bawah Gowa dan Maros, laju pemulihan tetap stabil. Yang menarik, pada 2023–2024, Makassar mencatatkan laju pertumbuhan tertinggi dibanding kabupaten lain di kawasan Mamminasata, yakni 5,56% dan 5,06%. Ini memperkuat posisi Makassar sebagai motor utama pertumbuhan kawasan, sekaligus menandakan adanya pemulihan yang menyebar lintas sektor. Sementara itu, kabupaten lain seperti Maros dan Takalar menunjukkan tren yang lebih fluktuatif, memperlihatkan vulnerabilitas struktural terhadap guncangan ekonomi. Keunggulan Makassar ini menjadi penting untuk memperkuat peran kota sebagai pusat pertumbuhan regional yang inklusif dan terintegrasi.

**Grafik II.4.**
**Perbandingan PDRB Per Kapita Kota Makassar dengan Kabupaten Takalar, Maros, Pangkep dan Gowa**
**Tahun 2020-2024**




*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar data diolah, Tahun 2025*

Capaian PDRB per kapita Kota Makassar mempertegas posisinya sebagai pusat ekonomi dominan di Kawasan Mamminasata. Selama periode 2020–2024, PDRB per kapita Makassar meningkat secara konsisten dari Rp125,31 juta menjadi Rp165,95 juta, dengan tren pertumbuhan yang linier dan solid. Kesenjangan antara Makassar dan kabupaten sekitar pun tetap signifikan. Pada 2024, PDRB per kapita Makassar hampir dua kali lipat dari Pangkep (Rp96,36 juta) dan lebih dari dua kali lipat dari Maros (Rp69,21 juta). Kesenjangan ini mencerminkan tingkat produktivitas dan kompleksitas ekonomi Makassar yang jauh lebih tinggi**,** terutama karena dominasi sektor perdagangan besar dan eceran, transportasi, dan jasa keuangan.

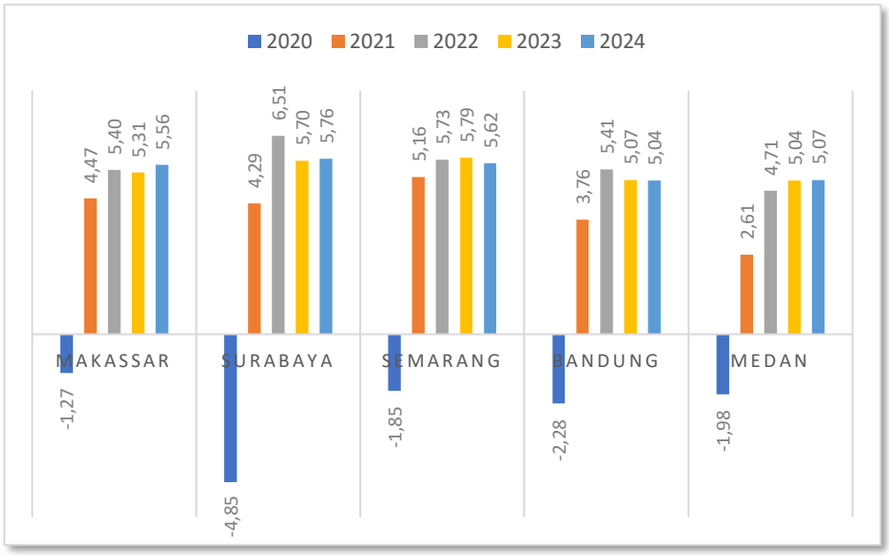
Korelasi dengan grafik sebelumnya menunjukkan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi Makassar pasca-pandemi diiringi dengan peningkatan signifikan pada PDRB per kapita. Artinya, pemulihan ekonomi tidak hanya menciptakan pertumbuhan agregat, tetapi juga mengangkat nilai tambah per individu. Namun, tingginya disparitas PDRB per kapita juga menunjukkan adanya tantangan integrasi ekonomi regional. Makassar ke depan perlu memperkuat peran sebagai *growth pole* yang menular, bukan eksklusif, misalnya melalui penguatan konektivitas sektor produktif antar wilayah dan perluasan rantai nilai wilayah metropolitan.

## Perbandingan Capaian Indikator Makro Kota Makassar dengan Kota Setara

Jika dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi empat kota besar lainnya di Indonesia yakni: Kota Surabaya, Kota Semarang, Kota Bandung dan Kota Medan selama lima tahun terakhir, Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mencapai 5,56%, menunjukkan kinerja yang solid dan melampaui capaian Kota Bandung (5,04%) dan Kota Medan (5,07%), namun masih berada sedikit di bawah Kota Semarang (5,62%) dan Kota Surabaya (5,76%). Dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya yang memiliki karakteristik dan struktur ekonomi serupa, capaian ini mencerminkan keberhasilan Kota Makassar dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui penguatan sektor perdagangan, industri pengolahan, dan konstruksi. Dengan tren pertumbuhan yang stabil dalam tiga tahun terakhir, Makassar berhasil

mempertahankan posisinya sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia, sekaligus menunjukkan daya saing yang terus meningkat di tingkat nasional.

**Grafik II.5.**
**Perbandingan Capaian Pertumbuhan Ekonomi dengan Kota Setara Tahun 2020-2024**




*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar data diolah, Tahun 2025*

Selama periode 2020 hingga 2024, tren pertumbuhan ekonomi di lima kota besar Makassar, Surabaya, Semarang, Bandung, dan Medan menunjukkan pemulihan yang cukup konsisten pasca kontraksi akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020.

Kota Makassar mengalami kontraksi ekonomi sebesar -1,27% pada tahun 2020. Namun, pertumbuhan kembali positif sejak 2021 hingga 2024 dengan laju pertumbuhan berturut-turut sebesar 4,47%, 5,40%, 5,31%, dan 5,56%. Kinerja ini menunjukkan pemulihan yang stabil dengan tren pertumbuhan yang relatif konsisten.

Surabaya mencatat kontraksi terdalam di antara lima kota pada tahun 2020, yakni sebesar -4,85%. Meski demikian, kota ini berhasil bangkit dengan pertumbuhan tinggi pada 2021 sebesar 6,51% dan terus tumbuh positif di kisaran 5,7%–5,76% hingga 2024, menjadikannya salah satu kota dengan pemulihan tercepat.

Semarang juga menunjukkan tren yang solid. Setelah mengalami kontraksi -1,85% pada 2020, kota ini tumbuh 5,73% pada 2021, dan mempertahankan pertumbuhan stabil di kisaran 5,62%–5,79% pada tahun-tahun berikutnya.

Bandung, meskipun mengalami kontraksi cukup dalam pada tahun 2020 (-2,28%), menunjukkan pemulihan yang bertahap dengan pertumbuhan ekonomi meningkat dari 3,76% pada 2021 hingga mencapai 5,41% pada 2023. Namun, pertumbuhan sedikit melambat menjadi 5,04% di tahun 2024.

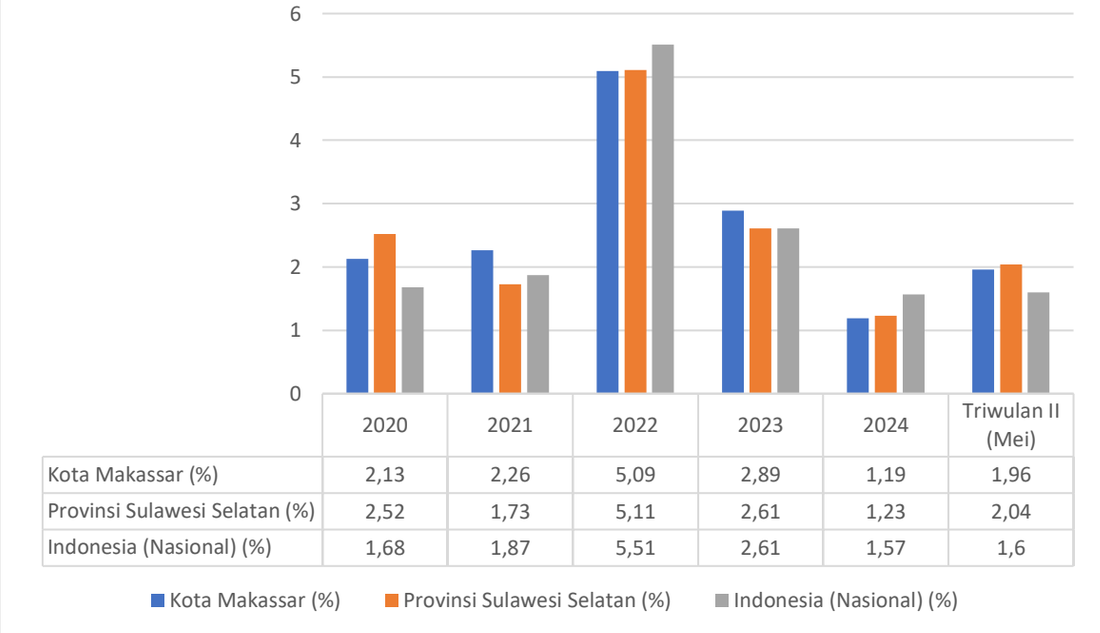
Medan mengalami kontraksi -1,98% pada tahun 2020 dan tumbuh lebih lambat dibanding kota lain pada 2021, yaitu hanya 2,61%. Namun, sejak 2022 hingga 2024, pertumbuhan terus meningkat dan stabil di atas 5%, dengan capaian 5,07% pada 2024. Secara keseluruhan, kelima kota menunjukkan pemulihan ekonomi yang signifikan pasca-pandemi, meskipun dengan pola dan kecepatan yang berbeda-beda. Surabaya dan Semarang menjadi dua kota dengan pertumbuhan paling kuat, sedangkan Medan dan Bandung menunjukkan pemulihan yang lebih bertahap. Sementara itu, Makassar

menampilkan tren pertumbuhan yang stabil dan konsisten, menandakan daya tahan ekonomi yang cukup baik dalam menghadapi berbagai tekanan global maupun domestik.

### 2.1.2. Inflasi

Stabilnya inflasi juga menandakan bahwa tekanan biaya produksi relatif rendah, serta daya beli masyarakat tetap terjaga. Keberhasilan menjaga inflasi dalam rentang yang rendah ini menjadi indikator positif bagi kesinambungan pemulihan ekonomi daerah yang inklusif dan terkendali.

**Grafik II.6.**
**Inflasi Tahunan Kota Makassar 2020-2024 (persen)**




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Triwulan II (Mei) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kota Makassar (%) | 2,13 | 2,26 | 5,09 | 2,89 | 1,19 | 1,96 |
| Provinsi Sulawesi Selatan (%) | 2,52 | 1,73 | 5,11 | 2,61 | 1,23 | 2,04 |
| Indonesia (Nasional) (%) | 1,68 | 1,87 | 5,51 | 2,61 | 1,57 | 1,6 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar data diolah, Tahun 2025*

Pada Triwulan II tahun 2025 (data Mei), Inflasi year-on-year (yoy) Kota Makassar tercatat sebesar 1,96% pada Mei 2025 (Triwulan II), meningkat dibandingkan capaian tahun 2024 yang sebesar 1,19%. Meskipun terjadi peningkatan, angka ini masih berada di bawah inflasi Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 2,04%, namun sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional yang tercatat sebesar 1,60%.

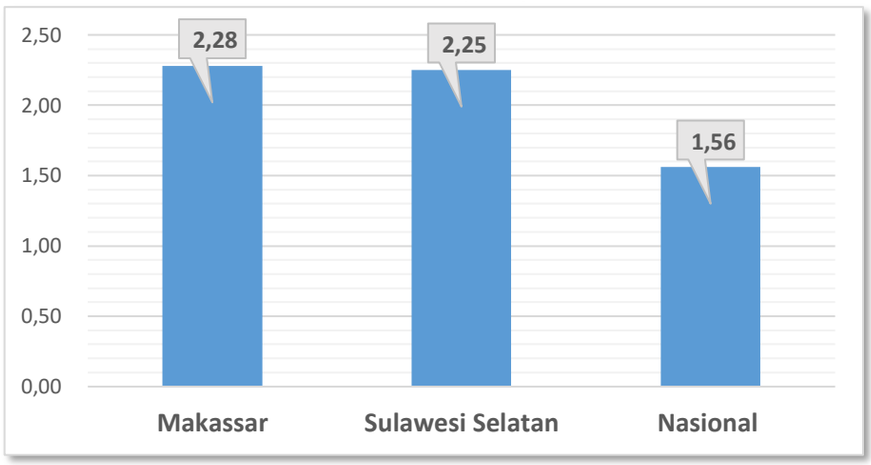
Tren inflasi Kota Makassar selama lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, inflasi tercatat sebesar 2,13%, kemudian meningkat menjadi 2,26% di tahun 2021. Selanjutnya, terjadi lonjakan cukup tajam pada tahun 2022 yang mencapai 5,09% seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Namun, pada 2023 angka inflasi kembali melandai menjadi 2,89%, dan terus menurun menjadi 1,19% di tahun 2024.

Kondisi inflasi saat ini mengindikasikan bahwa tekanan harga mulai kembali meningkat di wilayah Makassar, meski masih dalam batas yang terkendali. Peran aktif Pemerintah Kota dan TPID dalam menjaga stabilitas harga tetap penting, terutama dalam mengantisipasi periode strategis seperti hari besar keagamaan, musim panen, serta dinamika harga komoditas global. Upaya tersebut termasuk menjaga kelancaran pasokan dan distribusi barang pokok, serta penguatan koordinasi antar-instansi.

Sepanjang tahun 2024, terdapat sepuluh komoditas utama penyumbang inflasi year to date, dengan emas perhiasan menjadi sorotan utama. Komoditas ini memberikan kontribusi sebesar 0,37% terhadap total inflasi tahunan, didorong oleh tingginya permintaan masyarakat terhadap emas sebagai instrumen investasi yang relatif aman di tengah ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi pasar. Selain itu, kenaikan harga emas internasional, nilai tukar mata uang, serta kebijakan moneter global turut memengaruhi harga emas domestik.

Menghadapi dinamika tersebut, TPID Kota Makassar menargetkan laju inflasi tetap terjaga dalam rentang sasaran 3,0%±1,0% (yoy) hingga akhir tahun 2025, guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung stabilitas ekonomi daerah.

**Grafik II.7.**
**Tingkat Inflasi Kota Makassar Bulan April *Year to* Date (YtD) 2025**




*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar data diolah, Tahun 2025*

Tingkat inflasi Kota Makassar pada Triwulan I 2024 menunjukkan tekanan yang masih terkendali, terutama disebabkan oleh kenaikan harga pangan strategis yang berlangsung secara bertahap sejak Januari hingga puncaknya pada bulan Maret. Sepanjang tiga bulan pertama, inflasi kumulatif *year to date* tercatat mencapai 1,09%. Tekanan terbesar terjadi pada bulan Maret dengan inflasi *month to month* sebesar 0,41%, tertinggi dalam triwulan tersebut, yang dipicu oleh kenaikan harga beras, cabai rawit, telur ayam ras, dan bawang putih. Kenaikan harga tersebut berkaitan erat dengan datangnya bulan Ramadan yang meningkatkan permintaan rumah tangga secara musiman. Selain itu, tekanan harga juga diperkuat oleh persoalan struktural seperti distribusi pangan yang belum optimal, gangguan produksi akibat fenomena El Nino, serta peningkatan biaya logistik dan transportasi jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan konsumsi, Kota Makassar menunjukkan respons harga yang lebih sensitif dibanding daerah lain di Sulawesi Selatan. Kenaikan harga yang terjadi selama Triwulan I tidak hanya mencerminkan gejolak musiman, tetapi juga menunjukkan kerentanan terhadap gangguan pasokan dan pola konsumsi tinggi khas kota besar. Dengan inflasi Kota Makassar yang melebihi angka nasional dalam periode yang sama, situasi ini menegaskan pentingnya penguatan koordinasi pengendalian inflasi daerah melalui TPID, serta intervensi langsung pada komoditas

pangan utama. Perencanaan pembangunan dan kebijakan harga ke depan perlu berbasis data sektoral dan spasial, agar mampu mengantisipasi tekanan harga yang muncul secara lokal dan tidak tertangkap oleh rata-rata nasional.

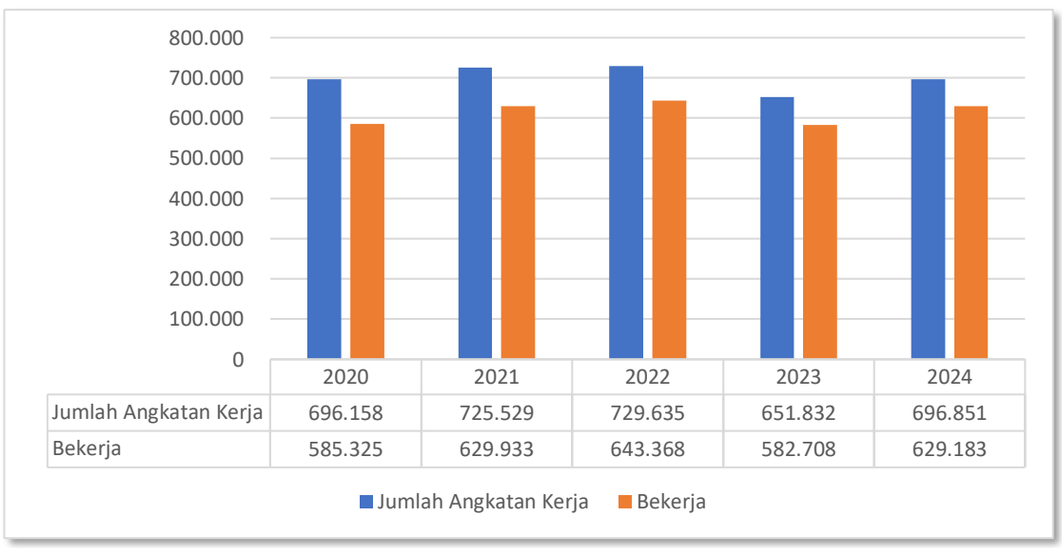
### 2.1.3. Ketenagakerjaan

**Angkatan Kerja**

Perkembangan jumlah angkatan kerja di Kota Makassar selama lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang menarik. Pada tahun 2021, jumlah angkatan kerja tercatat sebanyak 725.529 orang, kemudian mengalami kenaikan menjadi 729.635 orang pada tahun 2022. Kenaikan sekitar 4.106 orang ini mencerminkan pertumbuhan penduduk usia produktif dan tetap kuatnya posisi Kota Makassar sebagai pusat aktivitas ekonomi di Kawasan Timur Indonesia.

Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan cukup signifikan, dengan jumlah angkatan kerja turun menjadi 651.832 orang berkurang sekitar 77.803 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti mobilitas penduduk, perubahan preferensi kerja, atau dampak kebijakan ketenagakerjaan. Meski demikian, pada tahun 2024 jumlah angkatan kerja kembali meningkat menjadi 696.851 orang. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Makassar tetap menjadi daerah tujuan bagi pencari kerja dari berbagai wilayah, khususnya di Sulawesi Selatan dan sekitarnya.

**Grafik II.8.**
**Jumlah Angkatan Kerja dan Jumlah Orang Bekerja di Kota Makassar**
**Tahun 2020-2024 (jiwa)**




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Angkatan Kerja | 696.158 | 725.529 | 729.635 | 651.832 | 696.851 |
| Bekerja | 585.325 | 629.933 | 643.368 | 582.708 | 629.183 |

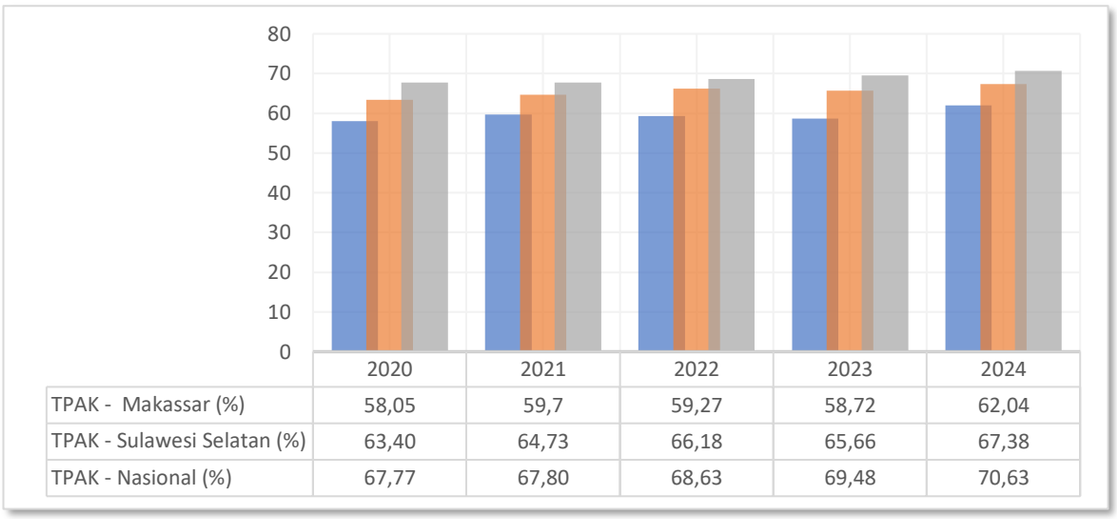
*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar data diolah, Tahun 2025*

Perkembangan jumlah angkatan kerja dan penduduk yang bekerja di Kota Makassar selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang positif. Data dari tahun 2020 hingga 2024 mencerminkan peningkatan kapasitas pasar kerja kota ini, seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi dan penguatan aktivitas sektor-sektor produktif.

**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

TPAK Makassar menunjukkan tren fluktuatif selama 2020–2024, dengan penurunan pada 2022 dan 2023, namun mengalami lonjakan signifikan pada 2024 yang mencapai 62,04%. Meskipun begitu, angka tersebut masih tertinggal dibandingkan rata-rata TPAK Provinsi Sulawesi Selatan (67,38%) dan nasional (70,63%) berdasarkan data BPS. Ketertinggalan ini menandakan masih adanya hambatan struktural dalam menyerap tenaga kerja usia produktif, terutama dalam bentuk terbatasnya lapangan kerja formal, mismatch keterampilan, dan kurang optimalnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, sebagaimana dicatat dalam *Labour Force Situation in Indonesia* (BPS, 2024).

**Grafik II.9.**
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Makassar**
**Tahun 2020-2024 (persen)**




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| TPAK - Makassar (%) | 58,05 | 59,7 | 59,27 | 58,72 | 62,04 |
| TPAK - Sulawesi Selatan (%) | 63,40 | 64,73 | 66,18 | 65,66 | 67,38 |
| TPAK - Nasional (%) | 67,77 | 67,80 | 68,63 | 69,48 | 70,63 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar data diolah, Tahun 2025*

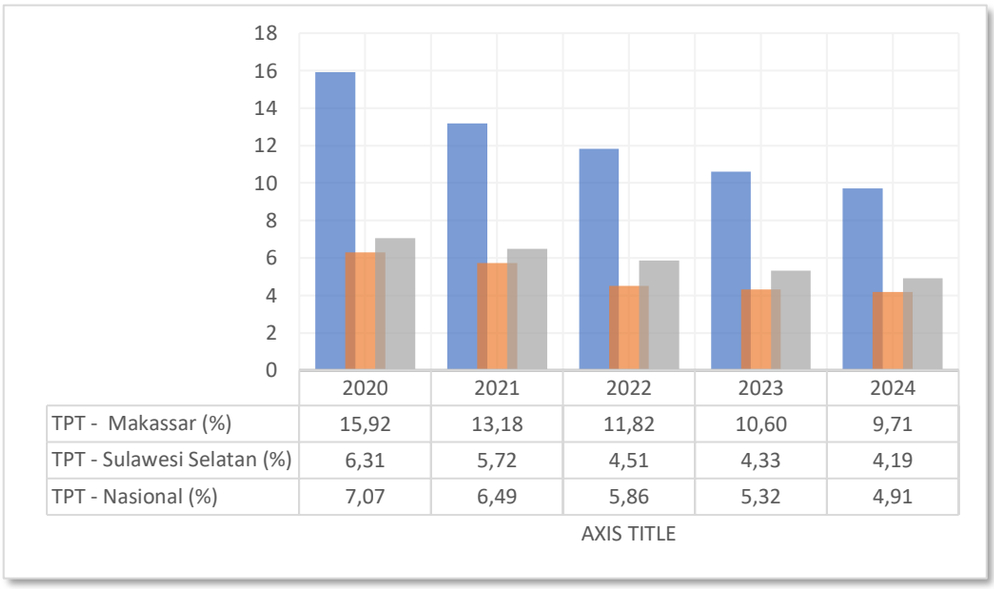
Kenaikan TPAK Makassar pada 2024 menunjukkan dampak langsung dari pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19, ekspansi UMKM lokal, serta penguatan program pelatihan kerja yang digencarkan melalui kerjasama pemerintah daerah dan pusat. Data BPS Kota Makassar mencatat peningkatan signifikan sektor informal dan usaha mandiri sebagai penyumbang utama perluasan lapangan kerja selama periode tersebut. Hal ini mempertegas perlunya arah kebijakan ketenagakerjaan yang fokus pada penciptaan kerja layak (*decent work*), peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan berbasis kebutuhan pasar, serta dorongan terhadap industri padat karya yang berdaya serap tinggi. Dengan pendekatan ini, kesenjangan partisipasi tenaga kerja antara Makassar, provinsi, dan nasional dapat dikurangi secara terukur dan berkelanjutan.

**Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Makassar selama lima tahun terakhir menunjukkan tren penurunan yang cukup konsisten. Pada tahun 2020, TPT mencapai 15,92 persen, sebagai dampak langsung dari krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Ini mencerminkan tekanan besar terhadap pasar tenaga kerja, terutama di sektor informal dan jasa. Seiring dengan pemulihan ekonomi nasional dan lokal, angka TPT mulai menunjukkan perbaikan signifikan. Tahun 2021, TPT menurun menjadi 13,18 persen, lalu terus membaik menjadi 11,82 persen di tahun 2022. Penurunan ini mengindikasikan

membaiknya penyerapan tenaga kerja, baik melalui pemulihan sektor-sektor produktif maupun meningkatnya aktivitas UMKM di wilayah perkotaan. Pada tahun 2023, tren positif ini berlanjut dengan TPT yang turun ke angka 10,60 persen, dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 9,71 persen. Penurunan bertahap ini mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam struktur ketenagakerjaan Kota Makassar, sejalan dengan transformasi ekonomi yang inklusif dan mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Kota Makassar tetap memainkan peran penting sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia, menjadi daya tarik utama bagi pencari kerja dan investor, sekaligus menghadirkan tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus menjaga momentum pemulihan dan meningkatkan kualitas tenaga kerja.

**Grafik II.10.**
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Makassar**
**Tahun 2020-2024 (persen)**




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| TPT - Makassar (%) | 15,92 | 13,18 | 11,82 | 10,60 | 9,71 |
| TPT - Sulawesi Selatan (%) | 6,31 | 5,72 | 4,51 | 4,33 | 4,19 |
| TPT - Nasional (%) | 7,07 | 6,49 | 5,86 | 5,32 | 4,91 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar data diolah, Tahun 2025*

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Makassar menunjukkan kecenderungan fluktuatif dengan arah penurunan selama periode 2020 hingga 2024. Setelah mengalami penurunan signifikan dari 15,92% pada tahun 2020 menjadi 10,60% pada tahun 2023, angka TPT kembali menurun menjadi 9,71% pada tahun 2024. Meskipun terjadi penurunan, laju penurunannya semakin melambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang mengindikasikan bahwa penurunan TPT belum sepenuhnya stabil dan berkelanjutan. Tren fluktuatif yang melambat ini menjadi sinyal penting bahwa penciptaan lapangan kerja belum cukup kuat untuk mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja, terutama di tengah ketidakpastian pasar kerja dan keterbatasan sektor padat karya. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih terarah untuk memastikan penurunan TPT tetap konsisten, sekaligus memperkuat sektor-sektor ekonomi yang berkontribusi langsung terhadap penciptaan lapangan kerja. Berikut penyajian grafik untuk melihat faktor penyebab peningkatan TPT serta korelasi terhadap pertumbuhan ekonomi sektor lapangan usaha jasa atau sektor lainnya yang berhubungan langsung dengan penciptaan lapangan kerja, selanjutnya sajikan analisis bentuk dukungan program prioritas Kota

Makassar Tahun 2025 untuk menurunkan TPT, baik melalui pelatihan keterampilan angkatan kerja yang dibutuhkan

Dalam upaya menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Makassar, Dinas Ketenagakerjaan telah menyusun dan melaksanakan berbagai strategi terarah sepanjang tahun 2024. Strategi ini mencakup penguatan hubungan antara pendidikan dan pasar kerja, peningkatan kualitas SDM, serta pengembangan jejaring penempatan dan penciptaan lapangan kerja baru melalui pendekatan kolaboratif dan inklusif. Rangkaian strategi tersebut dirangkum dalam lima komponen utama berikut:

a. Link and Match Ketenagakerjaan
- Melakukan pemetaan kebutuhan pasar kerja untuk menentukan sektor dan jenis pekerjaan prioritas yang menyerap lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi.
- Memfasilitasi 50 perusahaan dalam penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro guna mengidentifikasi kebutuhan keterampilan dan pengembangan SDM secara lebih adaptif.

b. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
- Melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi untuk 1.190 orang, termasuk pemagangan, pelatihan produktivitas, pelatihan bahasa asing, dan sertifikasi tenaga kerja.
- Melakukan konsultasi produktivitas kepada 90 perusahaan dan membina 80 LPK Swasta untuk meningkatkan kualitas pelatihan kerja.
- Mengikutsertakan LPKS dalam kompetisi keterampilan instruktur untuk mendorong akreditasi dan pengakuan kualitas lembaga.

c. Peningkatan Penempatan Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
- Menyelenggarakan job fair, mengembangkan Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK dan universitas, serta memberikan layanan pencari kerja melalui kartu AK-1 dan penyebaran informasi lowongan.
- Mengembangkan program kewirausahaan dan kegiatan padat karya (infrastruktur dan teknologi tepat guna) untuk menciptakan lapangan kerja baru.
- Melakukan pelatihan bagi penyandang disabilitas dan eks PMI sebagai bagian dari perluasan kesempatan kerja yang inklusif.

d. Pengembangan Kemitraan dan Kolaborasi dengan Stakeholder
- Membangun sinergi dengan pemerintah pusat, dunia usaha, industri, dan masyarakat melalui Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair.
- Bekerja sama dengan PT IHIP Morowali, Kemenkumham Sulsel, dan Dirjen Bina Penta Kemnaker dalam pelatihan kerja, kewirausahaan, dan peningkatan kapasitas TKM pemula.

e. Peningkatan Hubungan Industrial yang Kondusif
- Melakukan pembinaan terhadap serikat pekerja dan pengusaha serta memfasilitasi forum Lembaga Tripartit untuk membahas isu ketenagakerjaan.
- Mengadakan dialog ketenagakerjaan dan kegiatan Hari Buruh (May Day), serta membina jaminan sosial tenaga kerja dan menetapkan UMK melalui Dewan Pengupahan.

### 2.1.4. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks, baik faktor penyebab maupun dampaknya, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait dan mempengaruhi satu dengan lainnya. Kemiskinan menjadi salah satu indikator yang sangat diperhatikan oleh Pemerintah karena menjadi salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat. Persentasependuduk miskin di Kota Makassar dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang beragam, hal ini dipengaruhi oleh berbagai dinamika ekonomi, sosial, dan kebijakan. Pada tahun 2020 pandemi COVID-19 memberikan dampak besar

terhadap perekonomian nasional dan daerah, termasuk Kota Makassar. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan, terutama di sektor informal. Akibatnya, Persentasependuduk miskin meningkat di masa pandemi. Bantuan sosial dari Pemerintah, meskipun masif, tidak sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak.

Badan pusat statistik merilis jumlah penduduk miskin di Kota Makassar tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 74,69 ribu orang dibandingkan tahun 2020 sebesar 69,98 ribu orang dan mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 71,83 ribu jiwa. Namun angka ini mengalami lonjakan pada tahun 2023 sebesar 8,49 ribu orang sehingga jumlah penduduk miskin Kota Makassar menjadi 80,32 ribu orang dan pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan sebesar 79,53 ribu orang. Dengan melihat data-data tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan Kota Makassar mengalami fluktuatif.

Ada beberapa penyebab Kemiskinan diantaranya karena tingkat pendidikan rendah, bekerja di sektor informal dengan upah rendah, hidup di permukiman berkualitas rendah, kurang memiliki jaminan pekerjaan, dan mempunyai akses yang lebih rendah terhadap layanan dasar. Faktor diatas dapat dipengaruhi oleh adanya kebijakan pembangunan yang tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menimbulkan ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan. Kebijakan seperti ini dapat menciptakan kemiskinan relatif dimana sebagian masyarakat tidak dapat menikmati manfaat pembangunan yang sama.

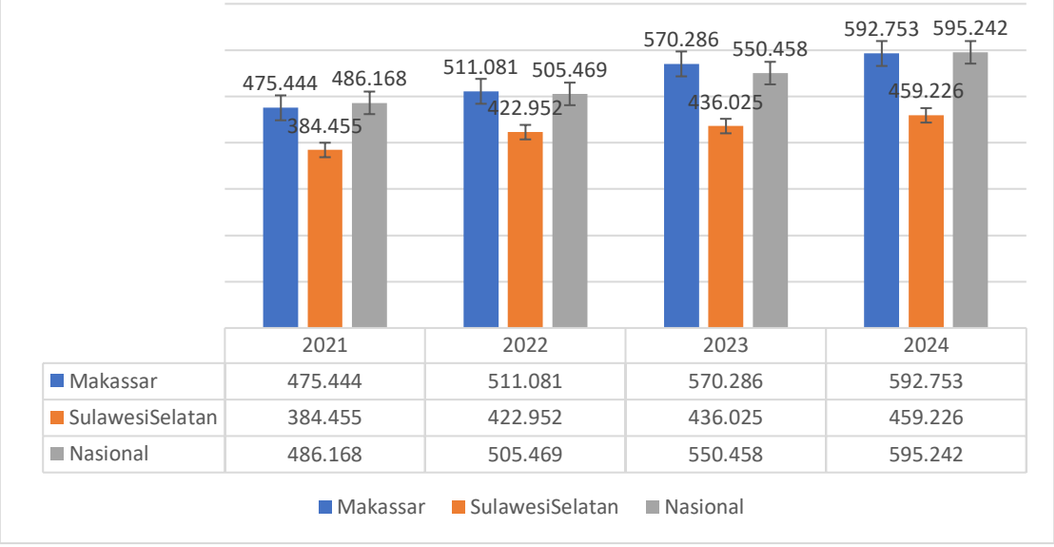
Selain faktor penyebab kemiskinan secara umum, ada pula faktor pribadi diantaranya adalah penyakit mental, hal ini membuat orang menjadi tidak mampu melakukan sesuatu dan menyebabkan penguruangan pendapatan sehingga meningkatkan kemiskinan. Kecelakaan membuat orang berhenti menjadi tidak produktif atau bahkan berhenti bekerja sehingga membuat orang tersebut miskin. Kemalasan merupakan faktor terbanyak yang menyebabkan kemiskinan. Banyak orang yang mempunyai kesempatan kerja tetapi tidak bekerja karena malas. Pemborosan hal ini juga dapat menjadi penyebab kemiskinan, orang yang boros akan tetap miskin berapapun penghasilan yang mereka dapat.

**Persentase penduduk di atas garis kemiskinan**

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Kemiskinan mengacu pada kurangnya sumber daya keuangan yang memadai sehingga individu, rumah tangga, dan seluruh masyarakat tidak memiliki sarana untuk bertahan hidup atau memperoleh kebutuhan dasar untuk kehidupan yang sejahtera. Ketiadaan sarana ini dapat mengakibatkan kesulitan untuk memperoleh makanan, pakaian, tempat tinggal, dan obat-obatan.

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan Kota Makassar pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,49 dari 95,42 turun menjadi 94,93% pada Tahun 2023 dan tahun 2024 naik menjadi 95,03% artinya Persentase penduduk miskin Kota Makassar mengalam penurunan 0,1%. Sedangkan untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan lebih rendah dibandingkan Kota Makassar sebesar 92,23% atau selisih 2,8%.

**Grafik II.11.**
**Garis Kemiskinan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Nasional**
**Tahun 2020-2024**



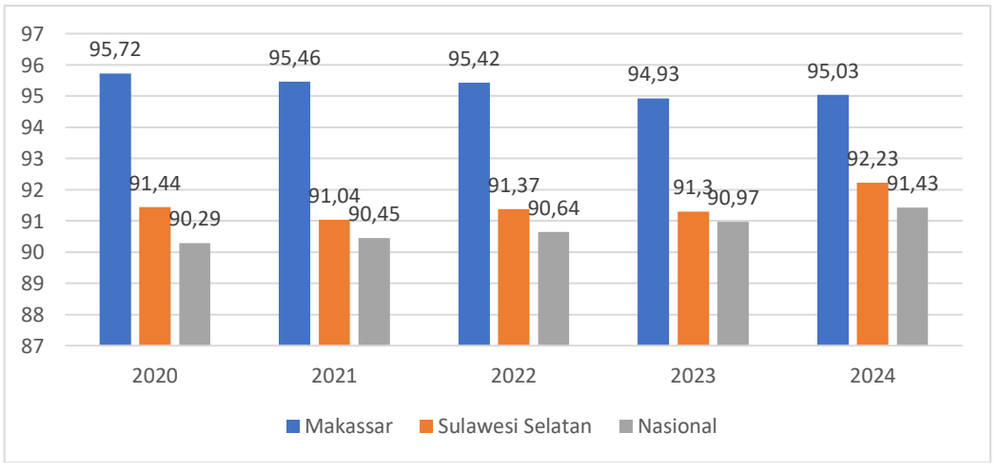

*Sumber: BPS Provinsi Sul-Sel Tahun 2025*

**Tabel II.4.**
**PersentasePenduduk Di Atas Garis Kemiskinan**
**Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Dan**
**Nasional Tahun 2020 - 2024**

| Uraian | 2020 (%) | 2021 (%) | 2022 (%) | 2023 (%) | 2024 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota Makassar | 95,72 | 95,46 | 95,42 | 94,93 | 95,03 |
| Provinsi Sulawesi Selatan | 91,44 | 91,04 | 91,37 | 91,30 | 92,23 |
| Nasional | 90,29 | 90,45 | 90,64 | 90,97 | 91,43 |

*Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025*

**Grafik II.12.**
**PersentasePenduduk Di Atas Garis Kemiskinan Kota Makassar,**
**Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024**




*Sumber: BPS Provinsi Sul-sel Tahun 2025*

Untuk mengukur kemiskinan, menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin adalah Persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK).

**Tabel II.5.**
**PersentasePenduduk Miskin Kota Makassar**
**Dengan Daerah Setara Dikawasan Tahun 2020 – 2024**

| Uraian | 2020 (%) | 2021 (%) | 2022 (%) | 2023 (%) | 2024 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota Makassar | 4,54 | 4,82 | 4,58 | 5,07 | 4,97 |
| Gowa | 7,38 | 7,54 | 7,36 | 7,42 | 6,85 |
| Takalar | 8,44 | 8,25 | 8,25 | 8,29 | 7,75 |
| Maros | 9,74 | 9,57 | 9,43 | 9,65 | 9,32 |
| Pangkep | 13,96 | 14,28 | 13,92 | 13,40 | 12,41 |

*Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2025 (Data diolah)*

Persentase penduduk miskin Kota Makassar bila dibandingkan dengan 4 kabupaten dikawasan yang sama, Kota Makassar merupakan paling rendah selama 5 tahun berturut-turut namun fluktuatif dan tertinggi tahun 2023 sebesar 5,07%. Untuk tahun 2024 turun menjadi 4,97%, sementara 4 kabupaten setara dikawasan juga mengalami penurunan di tahun 2024 yaitu Kabupaten Gowa 6,85%, Kabupaten Takalar 7,75%, Kabupaten Maros 9,32% dan Kabupaten Pangkep 12,41%.

**Tabel II.6.**
**PersentasePenduduk Miskin Kota Makassar Dengan Kota Setara**
**Tahun 2020 - 2024**

| Uraian | 2020 (%) | 2021 (%) | 2022 (%) | 2023 (%) | 2024 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota Makassar | 4,54 | 4,82 | 4,58 | 5,07 | 4,97 |
| Kota Bandung | 3,38 | 4,37 | 4,25 | 3,96 | 3,87 |
| Kota Palembang | 10,89 | 11,34 | 10,48 | 10,22 | 10,90 |
| Kota Surabaya | 5,02 | 5,23 | 4,72 | 4,65 | 3,96 |

*Sumber: BPS RI, Tahun 2025 (Data diolah)*

Persentase Penduduk Miskin Kota Makassar mengalami penurunan 0,1 dengan jumlah penduduk miskin 79,53 ribu bandingkan 3 (tiga) Kota Lainnya hanya Kota Palembang yang mengalami kenaikan dari 10,22% menjadi 10,90% sementara dua kota lainnya mengalami penurunan di tahun 2024. Kota Bandung pada 2023 sebesar 3,96% menjadi 3,87% atau turun 0,09% di Tahun 2024, Kota Palembang dari angka 10,22% di Tahun 2023 naik menjadi 10,99% di Tahun 2024, Untuk Kota Surabaya turun 2,49% sehingga di Tahun 2024 menjadi 3,96%.

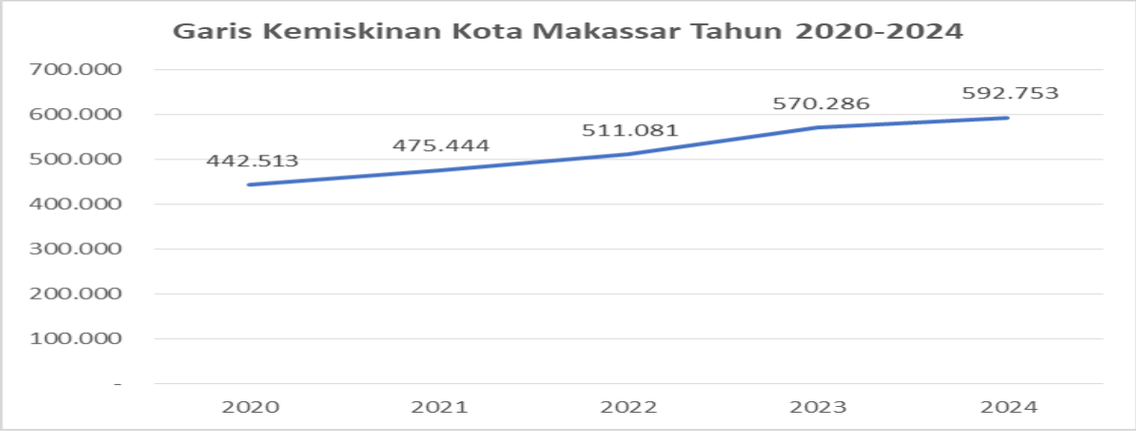
**Tabel II.7.**
**Garis Kemiskinan Di Kota Makassar,**
**Sulawesi Selatan Dan Nasional Tahun 2020 - 2024**

| Uraian | 2020 (Rp) | 2021 (Rp) | 2022 (Rp) | 2023 (Rp) | 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota Makassar | 442.513 | 475.444 | 511.081 | 570.286 | 592.753 |
| Sulawesi Selatan | 362.031 | 384.455 | 422.952 | 436 025 | 459.226 |
| Nasional | 458.947 | 486.168 | 505.469 | 550.458 | 595.242 |

*Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025 (Data diolah),*

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan yang setara dengan 2100 kilokalori perkapita perhari dan non makanan yang harus dipenuhi. Untuk garis kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 sebesar Rp.459.226,- per kapita per bulan, lebih rendah dibandingakan garis kemiskinan Kota Makassar dengan nilai minimum pengeluaran Rp.592.753,- per kapita per bulan. Dan untuk nasional garis kemiskinan sebesar Rp. 550.458,- lebih tinggi dari Kota Makassar.

**Grafik II.13.**
**Garis Kemiskinan Kota Makassar Tahun 2020-2024**




*Sumber: BPS Kota Makassar, Tahun 2025*

**Tabel II.8.**
**Garis Kemiskinan Di Kota Makassar Dan**
**Kota Setaranya Daerah Kawasan Tahun 2020 - 2024**

| Uraian | 2020 (%) | 2021 (%) | 2022 (%) | 2023 (%) | 2024 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota Makassar | 418.831 | 442.513 | 475.444 | 511.081 | 592.753 |
| Gowa | 385.820 | 390.917 | 408.435 | 429.222 | 475.305 |
| Takalar | 356.973 | 364.378 | 380.564 | 399.062 | 455.793 |
| Maros | 405.944 | 414.324 | 424.637 | 450.275 | 530.070 |
| Pangkep | 322.954 | 358.061 | 368.096 | 389.613 | 439.192 |

*Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2025 (Data diolah)*

Garis kemiskinan Kota Makassar tahun 2024 bila dibandingkan dengan kabupaten/kota dalam Kawasan merupakan yang tertinggi yaitu berada pada Rp.592.753,- dan paling rendah adalah Kabupaten Pangkep yaitu Rp.439.192,- disusul Kabupaten Takalar diposisi Rp.455.793,- dan Kebupaten Maros Rp.530.070,-.

**Tabel II.9.**
**Garis Kemiskinan Di Kota Makassar Dan Kota Setaranya**
**Di Luar Kawasan Tahun 2020 – 2024**

| Uraian | 2020 (Rp) | 2021 (Rp) | 2022 (Rp) | 2023 (Rp) | 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota Makassar | 442.513 | 475.444 | 511.081 | 570.286 | 592.753 |
| Kota Bandung | 500.452 | 515.396 | 545.675 | 591 124 | 455.636 |
| Kota Palembang | 548.563 | 567.518 | 597.136 | 643.356 | 660.932 |
| Kota Surabaya | 592.137 | 611.466 | 460.909 | 718.370 | 742.678 |

*Sumber: BPS RI (Data diolah), tahun 2025*

Untuk garis kemiskinan Kota Makassar Tahun 2024 berada pada Rp.592.753,- perkapita perbulan mengalami kenaikan sebesar Rp.22.467,- dari tahun 2023. Bila dibandingkan dengan tiga kota setara di luar kawasan Kota Makassar berada di urutan kedua terendah setelah Kota Bandung. Kota Surabaya adalah yang tertinggi yaitu sebesar Rp.742.678,-.

**Tabel II.10.**
**Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Makassar,**
**Sulawesi Selatan Dan Nasional Tahun 2020 - 2024**

| Uraian | 2020 (%) | 2021 (%) | 2022 (%) | 2023 (%) | 2024 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Makassar | 0,58 | 0.76 | 0.80 | 0,62 | 0.81 |
| Sulawesi Selatan | 1,53 | 1,49 | 1,38 | 1,57 | 1,39 |
| Nasional | 1,75 | 1,67 | 1,56 | 1,53 | 1,46 |

*Sumber: BPS RI, tahun 2025*

Indeks kedalaman kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Untuk Indeks kedalam kemiskinan Kota Makassar pada tahun 2023 sebesar 0,62% turun menjadi 0,81%, Indeks kedalaman kemiskinan Kota Makassar 5 tahun terakhir jauh lebih kecil dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Tahun 2024 Indeks Kedalam kemiskinan Kota Makassar berada pada 0,81%, Sulawesi Selatan 1,39% dan Nasional berada pada 1,46%.

Bila dibandingkan dengan kota setara kawasan, maka Kota Makassar merupakan terkecil kedua setelah Gowa (0,67%). Dan tertinggi adalah Pangkep sebesar 1,78%.

**Tabel II.11.**
**Indeks Kedalaman Kemiskinan**
**Kota Makassar Dengan Daerah Setaranya Tahun 2020 - 2024**

| Uraian | 2020 (%) | 2021 (%) | 2022 (%) | 2023 (%) | 2024 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota Makassar | 0,58 | 0,76 | 0,80 | 0,62 | 0.81 |
| Gowa | 1,18 | 1,38 | 1,13 | 0,72 | 0,67 |
| Takalar | 1,09 | 1,03 | 0,88 | 0,81 | 1,22 |
| Maros | 1,45 | 1,61 | 1,77 | 1,89 | 1,06 |
| Pangkep | 2,52 | 2,78 | 2,09 | 2,15 | 1,78 |

*Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2025*

**Tabel II.12.**
**Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Makassar**
**Dengan Daerah Setaranya Di Luar Kawasan Tahun 2020 - 2024**

| Uraian | 2020 (%) | 2021 (%) | 2022 (%) | 2023 (%) | 2024 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota Makassar | 0,58 | 0.76 | 0,80 | 0,62 | 0.81 |
| Kota Bandung | 0,61 | 0,78 | 0,70 | 0,57 | 0,61 |
| Kota Palembang | 1,67 | 1,86 | 2,25 | 2,06 | 2,06 |
| Kota Surabaya | 0,87 | 0,75 | 0,69 | 0,71 | 0,65 |

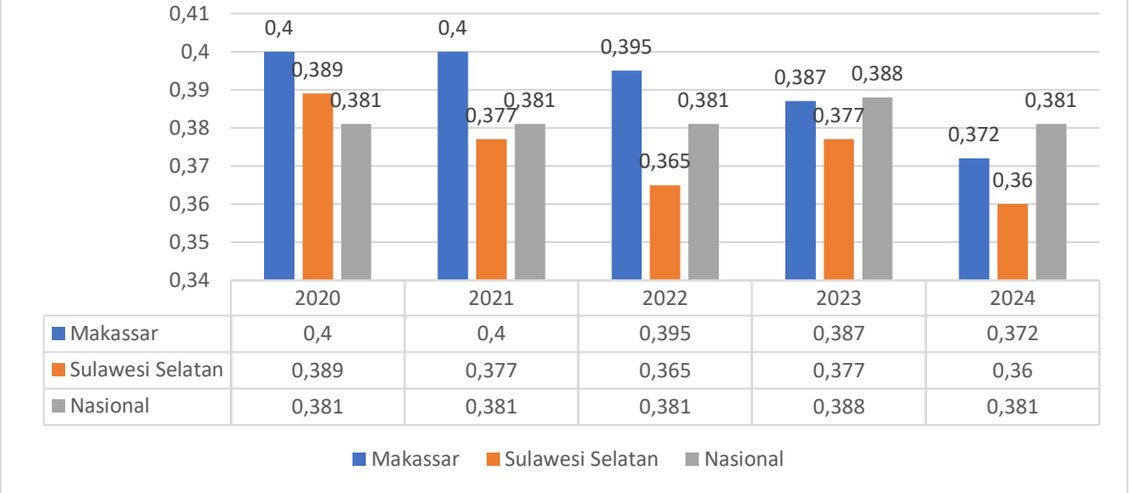
*Sumber: BPS RI, Tahun 2025*

Indeks kedalaman kemiskinan Kota Makassar dan 3 Kota besar lainnya Tahun 2024 merupakan urutan ke 2 terbesar. Terkecil adalah Kota Bandung dari 0,57% pada Tahun 2023 menjadi 0,61% tahun 2024. Kota Palembang indeks kedalam kemiskinan turun dari 2,25% Tahun 2022 menjadi 2,06% Tahun 2023 atau turun sebesar 0,19%, bertahan di 2,06% Tahun 2024. Sementara Kota Surabaya Tahun 2023 diangka 0,71% turun menjadi 0,65% dan Kota Makassar dari 0,62% tahun 2023 menjadi 0,81% Tahun 2024.

### 2.1.5 Ginio Rasio

Tujuan pembangunan adalah peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, jika peningkatan tidak diiringi dengan pemerataan, akan menimbulkan fenomena ketimpangan wilayah. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah Gini Rasio, Rasio Gini adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pendapatan atau pengeluaran di suatu wilayah atau populasi. Nilainya berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1, menunjukkan ketimpangan yang lebih besar, sedangkan semakin mendekati 0 menunjukkan ketimpangan yang lebih kecil.

**Grafik II.14.**
**Perbandingan Gini Rasio Tahun 2020 - 2024**
**Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Dan Nasional**




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Makassar | 0,4 | 0,4 | 0,395 | 0,387 | 0,372 |
| Sulawesi Selatan | 0,389 | 0,377 | 0,365 | 0,377 | 0,36 |
| Nasional | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,388 | 0,381 |

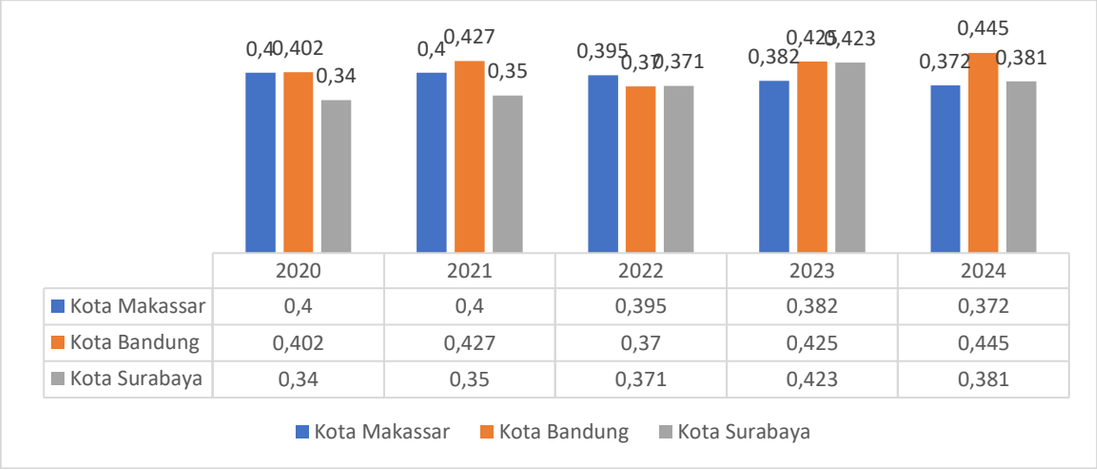
*Sumber: BPS RI, Tahun 2025*

Ukuran kesenjangan indeks gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada gini rasio menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna. Semakin besar nilai gini rasio, maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi kemerataan sempurna, sementara indeks gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna. Standar penilaian ketimpangan gini rasio ditentukan dengan menggunakan kriteria: GR<0,4 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah, 0,4<GR<0,5 dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (moderat), GR>0,5 dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi.

Tahun 2020 dan Tahun 2021 Gini Rasio Makassar mengalami kenaikan menjadi 0,400. Kondisi tersebut menunjukkan Gini Rasio Kota Makassar berada diatas Gini Rasio Sulawesi Selatan dan Nasional yakni 0,377 pada level Provinsi Sulawesi Selatan dan 0,381 pada tingkat Nasional. Begitu pula pada tahun 2022 capaian gini rasio Gini Rasio Kota Makassar sebesar 0,395 atau menurun dari tahun sebelumnya. Akan tetapi kondisi demikian masih lebih tinggi capaian Sulawesi Selatan dan Nasional yang mencapai 0,377 dan 0,381. Pada tahun 2023 Gini Rasio Kota Makassar sebesar 0,387 masih dibawah capaian Gini Rasio Provinsi Sulawesi Selatan diangka 0,377 namun diatas gini rasio Nasional yaitu 0,388. Tahun 2024 Gini Rasio Kota Makassar berada pada angka 0,372, sementara Sulawesi Selatan 0,360 dan nasional diangka 0,381.

Dari angka gini ratio tersebut, menunjukkan bahwa angka ketimpangan di Kota Makassar cukup tinggi. Hal ini menandakan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat masih jauh dari kata baik. Isu ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, menjadi barometer bagi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Pembangunan yang baik, tentu mengindikasikan angka ketimpangan yang rendah dan dibarengi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sehingga semua daerah mencoba untuk menangani hal ini secara serius, untuk mewujudkan pembangunan yang lebih sejahtera.

**Grafik II.15.**
**Capaian Gini Rasio Kota Makassar Dengan Kota Setara**
**Tahun 2020 - 2024**




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota Makassar | 0,4 | 0,4 | 0,395 | 0,382 | 0,372 |
| Kota Bandung | 0,402 | 0,427 | 0,37 | 0,425 | 0,445 |
| Kota Surabaya | 0,34 | 0,35 | 0,371 | 0,423 | 0,381 |

*Sumber: BPS Sulawesi Selatann BPS Jawa Timur dan BPS Jawa Barat Tahun 2025*

Berdasarkan data capaian gini rasio Kota Makassar dengan kota setaranya Tahun 2020 sebesar 0,400 untuk Kota Bandung sebesar 0,402 dan Kota Surabaya 0,340 artinya angka ketimpangan di Kota Makassar masih lebih rendah dibandingkan dengan dua kota tersebut. Demikian pula pada tahun 2023 tingkat ketimpangan Kota Makassar masih lebih rendah dari kedua kota setaranya. Namun tahun 2022 Gini rasio Kota Makassar berada pada 0,395 diatas kedua kota setaranya yaitu Kota Bandung di angka 0,370 dan Kota Surabaya diangka 0,371 artinya tahun 2023 Kota Makassar merupakan tertinggi ketimpangannya dibanding kedua kota tersebut. Tahun 2024 Gini asio Kota Makassar berada pada angka 0,372, Kota Bandung 0,445 dan Kota Surabaya 0,381. Bila diandingkan dengan kedua kota tersebut Kota Makassar merupakan tertingi ketimpangannya.

Beberapa program prioritas pemerintah kota Makassar yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antara lain adalah pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan ekonomi kerakyatan. Pembangunan Infrastruktur diantaranya Peningkatan kualitas infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan transportasi publik, termasuk Pembangunan di wilayah kepulauan bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan memudahkan akses masyarakat ke berbagai fasilitas.

Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan, berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan melalui berbagai program, seperti pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan, serta penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh Masyarakat termasuk di wilayah kepulauan dengan memberikan insentif kepada tenaga Pendidikan dan kependidikan di pulau berdasarkan zona demikian pula untuk tenaga Kesehatan di wilayah kepulauan.

Pengembangan ekonomi kerakyatan bertujuan untuk memberdayakan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat seperti dalam pengadaan baju seragam gratis bagi siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menegah Pertama khusus Negeri. Pemerintah Kota Makassar juga akan memberdayakan UMKM penjahit di seluruh kecamatan untuk penyediaan seragam. Selanjutnya, Iuran Sampah Gratis untuk rumah tangga kategori miskin ekstrem. Kemudian Pemasangan Instalasi Air

Bersih Gratis, program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemerintah Kota Makassar telah menganggarkan puluhan miliar untuk tambahan peserta BPJS kategori PBI (Penerima Bantuan Iuran), termasuk penguatan layanan Posyandu dan peningkatan kelayakan bangunan Puskesmas. Makassar Super Apps juga menjadi salah satu program Mulia, yang merupakan aplikasi super berbasis integrasi dengan 74 layanan publik dari 358 website. Untuk Makassar Apps aplikasi Pemerintah Kota kini tengah dalam pengembangan. Nama resmi dan sistem layanan digitalnya akan segera diumumkan oleh Wali Kota. Terakhir ialah Makassar Creative Hub yakni fasilitas co-working space di tiap kecamatan yang mulai dirintis. Di Pantai Losari, pembangunan fisik Makassar Creative Hub (MCH) telah dimulai dengan gabungan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pariwisata.

Meskipun Gini rasio Kota Makassar menunjukkan perbaikan, masih ada tantangan dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Kota terus berupaya untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi melalui berbagai program dan kebijakan yang berkelanjutan.

### 2.1.6. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks harapan hidup, indeks Pendidikan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah) dan Standar Hidup Layak (Pengeluaragn perkapita). IPM Makassar secara konsisten mengalami peningkatan dalam empat tahun terakhir, dimana tahun 2021 telah mencapai 82,25. IPM Makassar lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan maupun secara nasional yang masih pada angka 72,24 dan 72,29 Program-program disektor Pendidikan, Kesehatan maupun upaya peningkatan pendapatan masyarakat sangatlah penting untuk meningkatkan IPM suatu daerah.

**Tabel II.13.**
**Komponen Pembentuk IPM Kota Makassar Tahun 2020 – 2024**

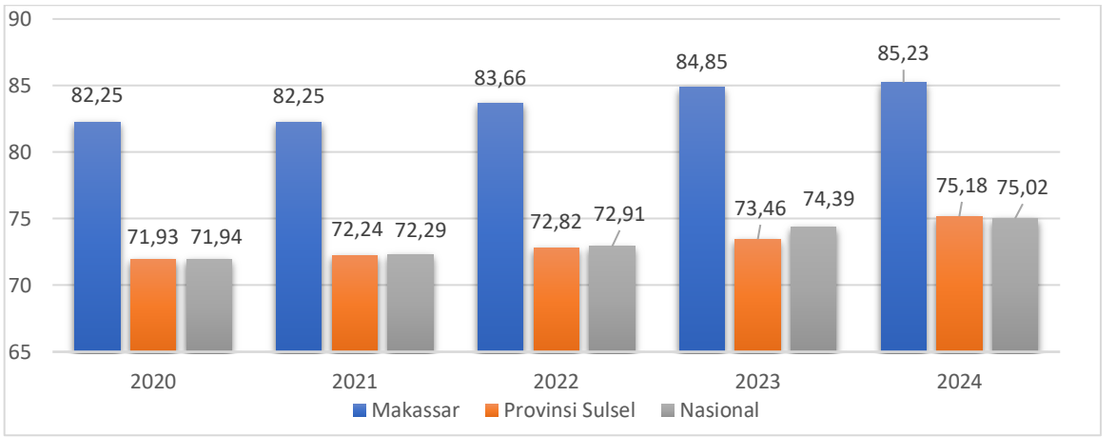
| Indiaktor | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PENDIDIKAN** | | | | | | |
| Harapan lama sekolah | Tahun | 15,57 | 15,58 | 15,59 | 15,61 | 15,62 |
| Rata-rata Lama sekolah | Tahun | 11,21 | 11,43 | 11,55 | 11,56 | 11,57 |
| **KESEHATAN** | | | | | | |
| Angka Harapan Hidup | Tahun | 72,09 | 72,13 | 72,40 | 75,15 | 75,33 |
| **STANDAR HIDUP LAYAK** | | | | | | |
| Pengeluaran per kapita | Rp/Orang | 16.873 | 17.097 | 17.406 | 17.889 | 18,386 |
| **Indek Pembangunan Manusia** | | 81,73 | 82,25 | 82,66 | 84,85 | 85,23 |

*Sumber: Makassar Dalam Angka Tahun 2025*

IPM Makassar secara konsisten mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, dimana tahun 2020 mencapai 81,73 dan pada Tahun 2024 meningkat menjadi 85,23 atau mengalami pertumbuhan 3,74 dalam lima tahun. Pertumbuhan IPM Kota Makassar juga lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 sebesar 71,93 meningkat menjadi 75,18 pada tahun 2024, artinya pertumbuhan IPM

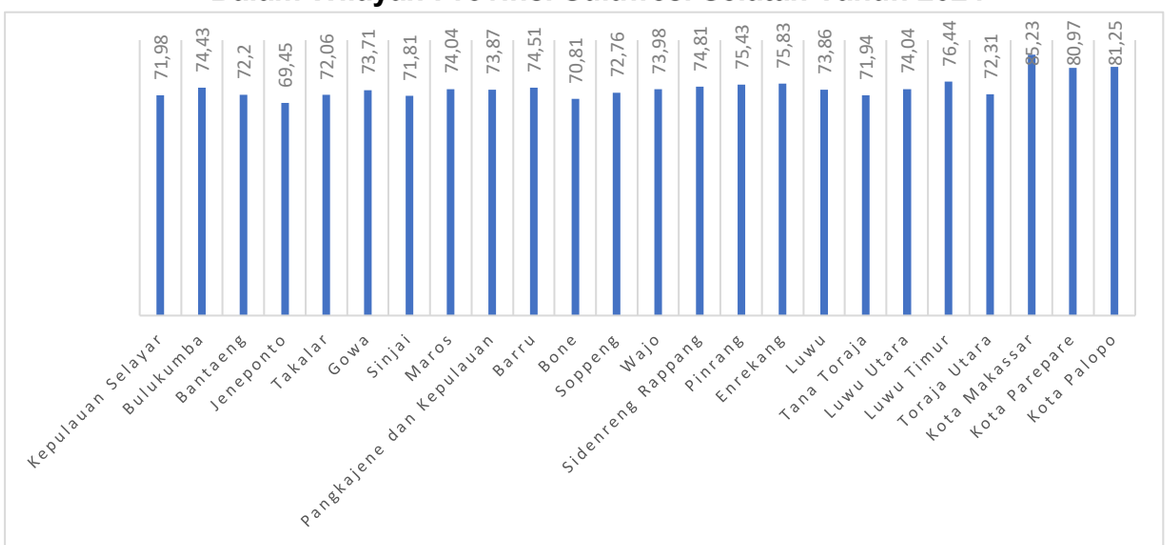
provinsi Sulawesi Selatan hanya mengalami pertumbuhan sebesar 3,25 dalam lima tahun. Demikan pula secara nasional IPM pada tahun 2020 berada pada angka 71,94 menjadi 75,02 di Tahun 2024 atau meningkat hanya 3,08 dalam lima tahun. Program-program disektor Pendidikan, kesehatan maupun upaya peningkatan pendapatan masyarakat sangatlah penting untuk meningkatkan IPM suatu daerah. Perbandingan Indek Pembangunan Manusia Kota Makassar dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, dapat di lihat pada grafik berikut :

**Grafik II.16.**
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**
**Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional**
**Tahun 2020-2024**




*Sumber: BPS Kota Makassar, Tahun 2024*

**Grafik II.17.**
**Perbandingan IPM Kota Makassar Dengan Kabupaten Dan Kota**
**Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024**




*Sumber: Provinsi Sulawesi Selatan dalam Angka Tahun 2025*

Analisis komparasi dengan tingkat nasional dan Provinsi Sulawesi selatan, menunjukkan bahwa perkembangan IPM Kota Makassar mengalami peningkatan dengan nilai yang lebih tinggi dari IPM tingkat nasional dan Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Makassar relatif lebih baik

jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Sebagai kota metropolitan, maka sudah selayaknya IPM Kota Makassar berada di atas level provinsi dan nasional. IPM Kota Makassar juga lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Kabupaten/Kota yang ada dalam wialayah Provinsi Sulawesi Selatn. Grafik di atas menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia 2020-2024 Wilayah kabupaten Kota Se Sulawesi Selatan posisi Kota Makassar masih berada pada posisi yang pertama jika dibanding dengan 23 Kab/Kota lainnya.

Grafik komparasi nilai IPM kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa Kota Makassar memiliki nilai IPM tertinggi di tahun 2024 dengan niali IPM 85,23. IPM tertinggai dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan yang diikuti Kota Palopo pada angka 81,23 dari 24 Kabupaten Kota, sedangkan TPM terendah dicapai oleh Kabupaten Jeneponto dengan angka 69,45. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar secara berkelanjutan melalui perbaikan kualitas kehidupan dan penghidupan di segala bidang harus diupayakan untuk dapat tetap mempertahankan tingkat daya saing yang semakin dinamis.

Badan Program Pembangunan PBB. UNDP adalah jaringan pembangunan global PBB yang bekerja untuk membantu negara-negara mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). UNDP bekerja di berbagai bidang, termasuk pemberantasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Menurut standar United Nations Development Program (UNDP), terdiri dari 4 kriteria, yakni IPM >80 kategori sangat tinggi, IPM 70-79 kategori tinggi. serta IPM 60-69 kategori sedang. Berdasarkan standar ini maka Kota Makassar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada kategori sangat tinggi dan Sulawesi Selatan dan Nasional masih berada pada kategori tinggi. Demikian pula diantara kabupaten/kota se Sulawesi Selatan dan yang masih berada pada kategori sedang adalah Kabupaten Jenneponto diangka 69,45.

Dalam 5 tahun terakhir, Rata-rata Lama Sekolah di Kota Makassar dari tahun 2021 yang sebesar 11,21 tahun hinggaTahun 2024 mengalami pertumbuhan menjadi 11,57 atau peningkatan secara signifikan sebesar 0,36 artinya penduduk usia 25 tahun ke atas saat itu di Kota Makassar menempuh pndidikan formal yang awalnya hanya setara dengan kelas 1 (satu) SMA yang kemudian tahun 2024 telah mencapai setara dengan kelas 3 (tiga) SMA walaupun belum secara penuh. Dari data yang ada pertumbuhan atau peningkatan pada 3 (tiga) tahun terkahir rata- rata 1 sehingga jika kenaikan stabil maka Kota Makassar masih membutuhkan waktu 3 (tiga) tahun lagi untuk mampu memenehui RLS 12 Tahun.

Demikan halnya Harapan lama sekolah, terjadi kenaikan tipis hanya 0,05 dalam lima tahun terakhir, tetapi kenaikan tersebut tetap dapat memberikan gambaran kenaikan yang signifikan dalam tingkat pendidikan yang di peroleh, tahun 2021 hanya setara dengan D3 dan tahun 2024 setara dengan D4 bahkan sudah dapat dikategorikan dengan S1.

Kenaikan atau peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah tersebut di dukung dengan pengeluaran perkapita penduduk Kota Makassar dari tahun ke tahun makin meningkat sebesar Rp.16.873 perkapita pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar Rp. 18.386 perkapita pada tahun 2024 atau terjadi kenaikan pendapatan sebesar Rp.1.513 perkapita perorang pertahun Hal ini mendorong kenaikan IPM Kota Makassar dengan di dukung Program-program di sektor Pendidikan, kesehatan maupun upaya peningkatan pendapatan masyarakat.

### 2.1.7. Nilai SAKIP Kota Makassar

SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar. Adapun capaian SAKIP Kota Makassar dari tahun 2020-2024 selengkapnya terlihat pada table berikut:

**Tabel II.14.**
**Nilai SAKIP Kota Makassar 2020-2024**

| Indikator | Satuan | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Nilai SAKIP Kota Makassar | Huruf/Angka | B (68.82) | B (69.28) | B (69.61) | B (69.64) | B (69.69) |

*Sumber: KemenPANRB, tahun 2024*

Capaian nilai SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Makassar tahun 2020 menunjukkan peningkatan dari angka 68,82 menjadi 69,28 di tahun 2021 Dan berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) KemenPANRB RI tahun 2024, capaian kinerja SAKIP pada Tahun 2024 dengan komponen yang dinilai sebagai berikut; a). Perencanaan Kinerja dengan nilai 21.16 b). Pengukuran Kinerja dengan nilai 20.06 c). Pelaporan Kinerja dengan nilai 10.49 dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan capaian nilai 17.98 dengan Nilai Hasil Evaluasi dengan angka 69.69 atau predikat “B”. Adapaun komponen Penilaianian antara lain, tersebut diatas menunjukan tingkat efektifitas dan efesiensi penggunaan anggaran dengan capaian kinerja Pemerintah Kota Makassar.

## 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Kinerja

### 2.2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

**1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata geometrik dari angka usia harapan hidup, indeks pendidikan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah) dan indeks paritas daya beli (PPP). IPM merupakan salah satu indikator kinerja makro dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. IPM juga merupakan salah satu ukuran kinerja pemerintah daerah yang digunakan untuk mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU).

**Tabel II.15.**
**Indeks Pembangunan Manusia**

| Indikator Kinerja | 2024 | | |
|---|---|---|---|
| | Target | Realisasi | Capaian |
| Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 83.67 | 85,23 | 101.87% |

*Sumber: IKU Dinas Pendidikan Kota Makassar, 2024*

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Indeks Kinerja Utama (IKU) dari tahun 2024 target sebesar 83,67 dengan realisasi sebesar 85,23; dengan persentase capaian target sebesar 101.87%, telah mencapai target. Sehingga persentase capaian sebesar 101.87 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis operasional sudah sesuai prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA.

Beberapa faktor pendukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Makassar, faktor utama adalah Pendidikan dengan akses ke pendidikan dasar dan menengah yang memadai; dilanjutkan dengan Kesehatan dimana ketersediaan fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan yang baik; kemudian Penghasilan: pendapatan per kapita yang meningkat. Adapun aktor pendukung lainnya adalah Infrastruktur: jalan, jaringan listrik, air bersih, dan transportasi yang memadai; Pelayanan dasar: kebersihan, keamanan, dan perlindungan social; Kesempatan kerja: ketersediaan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi; Akses teknologi: internet, telekomunikasi, dan media informasi; Kualitas lingkungan: pengelolaan lingkungan hidup yang baik; Partisipasi masyarakat: kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; Kebijakan pemerintah: kebijakan yang mendukung pembangunan manusia.

**2. Indeks Pendidikan**

Indeks Pendidikan adalah salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Indeks Pendidikan merupakan komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pendidikan digunakan untuk mengukur dimensi pengetahuan sebagai salah satu variabel pengembangan manusia; Indeks Pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan di bidang Pendidikan yang mempunyai kedudukan strategis, mengingat kualitas sumber daya manusia yang tercermin didalamnya sangat menentukan tingkat produktivitas suatu bangsa, Indeks pendidikan merupakan salah satu komponen pengukur pendidikan. Indeks pendidikan adalah cerminan dari hasil pembangunan dibidang pendidikan yang mempunyai kedudukan strategis, mengingat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tercermin didalamnya sangat menentukan tingkat produktivitas suatu negara. Indeks pendidikan digunakan untuk mengukur dimensi pengetahuan sebagai salah satu variabel pembangunan manusia. Indeks pendidikan ini merupakan penggabungan dua indikator pendidikan yaitu angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (BPS, 2021).

**Tabel II.16.**
**Indeks Pendidikan**

| Indikator Kinerja | 2024 | | |
|---|---|---|---|
| | Target | Realisasi | Capaian |
| Indeks Pendidikan | 0.865 | 0,818 | 94,56% |

*Sumber: IKU Dinas Pendidikan Kota Makassar, 2024*

Capaian Indeks Pendidikan pada tabel di atas pada tahun tahun 2024 target sebesar 0.865 dengan realisasi sebesar 0.818; Sehingga persentase capaian sebesar 94.56 %. Hal tersebut menunjukkan tingkat pencapaian pendidikan penduduk yang dikonversi menjadi lama bersekolah setiap tingkat pendidikan yang diikuti cukup tercapai.

Beberapa faktor pendukung Indeks Pendidikan di Kota Makassar: Faktor Utamanya Aksesibilitas: jumlah sekolah yang memadai (SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi); Kualitas pendidikan: standar nasional pendidikan dan akreditasi sekolah; Sumber daya manusia: jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memadai; Infrastruktur: fasilitas sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan teknologi; pendidikan: subsidi dan bantuan pendidikan dari pemerintah. Untuk Faktor Pendukung Lainnya seperti Program pendidikan non-formal: pelatihan vokasional dan kursus; Peningkatan kompetensi guru: pelatihan dan pengembangan professional; Pemanfaatan teknologi: e-learning dan digitalisasi pendidikan; Kerjasama dengan lembaga: universitas, industri, dan organisasi masyarakat sipil; Kebijakan pemerintah: peraturan dan kebijakan pendidikan yang mendukung; Partisipasi masyarakat: kesadaran dan dukungan orang tua terhadap pendidikan; Ketersediaan beasiswa: bantuan pendidikan untuk siswa kurang mampu.

**3. Pengeluaran Per Kapita**

Indikator Kinerja Utama pengeluaran perkapita merupakan salah satu tolok ukur penting dalam menilai perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar. Sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka menengah, indikator ini mencerminkan upaya pemerintah kota dalam meningkatkan taraf hidup warganya.

**Tabel II.17.**
**Pengeluaran Per Kapita**

| Indikator Kinerja | 2024 | | |
|---|---|---|---|
| | Target | Realisasi | Capaian |
| Pengeluaran Perkapita | 18,58 jt | 18,39 jt | 98,97% |

*Sumber: Badan Pusat Statistik diolah Bappeda, 2024*

Berdasarkan penyajian tabel di atas terkait indikator pengeluaran per kapita sebagai IKU pada tahun hingga 2024, pengeluaran per kapita di Kota Makassar menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Beberapa faktor pendorong utama dari kenaikan pengeluaran per kapita ini antara lain adalah kenaikan pendapatan masyarakat yang diiringi dengan berkembangnya sektor ekonomi, khususnya perdagangan, konstruksi, dan jasa. Selain itu, kenaikan harga barang dan jasa, terutama komoditas pangan dan non-pangan seperti beras, cabai, dan rokok, turut berkontribusi pada peningkatan pengeluaran. Pembangunan infrastruktur yang terus berlangsung juga

memberikan dampak positif, meningkatkan aktivitas ekonomi serta konsumsi masyarakat. Di samping itu, perubahan pola konsumsi yang semakin mengarah pada barang dan jasa non-pangan, seperti teknologi dan hiburan, menunjukkan adanya peningkatan standar hidup dan daya beli masyarakat.

Adapun Formula untuk menghitung Pengeluaran Perkapita:

$$\text{Pengeluaran Per Kapita} = \frac{\text{Total Pengeluaran}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

**4. Indeks Reformasi Birokrasi**

Indeks Reformasi Birokrasi ini dibangun dari dua komponen utama yaitu reformasi birokrasi general (RB general) dan reformasi birokrasi tematik (RB tematik). Tahun 2022 IRB pemerintah Kota Makassar sebesar 66,27 dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup tinggi hingga 77,30. Namun Kemenpan RB memberikan catatan terkait dengan capaian tahun 2023 yaitu angka IRB tahun 2023 tidak bisa diperbandingkan dengan tahun sebelumnya karena ada perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot, dan kriteria penilaian yang sangat berbeda dari tahun sebelumnya.

**Tabel II.18.**
**Indeks Reformasi Birokrasi**

| Indikator Kinerja | 2024 | | |
|---|---|---|---|
| | Target | Realisasi | Capaian |
| Indeks Reformasi Birokrasi | 65,8 | 77.30 * | 117.47 |

*Sumber: Kemenpan RB, 2024*

Capaian IRB Kota Makassar tahun 2024 yaitu 77,30 termasuk dalam kategori BB atau sangat baik. Kategori ini berada pada kategori ketiga dari tujuh kategori nilai IRB. Kategori sangat baik yang dicapai Kota Makassar menunjukkan bahwa pemerintah Kota Makassar berhasil Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing, tapi sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan Pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.

**5. Indeks Kepuasan Masyarakat**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Berikut merupakan tabel capaian indeks kepuasan masyarakat di Kota Makassar tahun 2022 sampai dengan 2024.

**Tabel II.19.**
**Indeks Kepuasan Masyarakat**

| Indikator Kinerja | 2024 | | |
|---|---|---|---|
| | Target | Realisasi | Capaian |
| Indeks Kepuasan Masyarakat | 80.5 | 86.2 | 107.08% |

*Sumber: Laporan Survey Kepuasan Masyarakat, 2024*

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2024 telah melebihi dari target yang ditentukan. Pada tahun 2024 indeks kepuasan masyarakat Kota Makassar teralisasi sebesar 86.20 persen dengan capaian 107.08 persen yang termasuk dalam kategori baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden (masyarakat) puas terhadap pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

### 6. Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah (LPPD) adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. Laporan ini mengambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, berikut merupakan tabel pencapaian Status LPPD Kota Makassar pada tahun 2024.

**Tabel II.20.**
**Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

| Indikator Kinerja | 2024 | | |
|---|---|---|---|
| | Target | Realisasi | Capaian |
| Status laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | 100% |

*Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Makassar, 2024*

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Status LPPD Kota Makassar pada tahun 2024 telah mencapai target yang ditentukan sehingga capaian yang didapatkan adalah 100%.

### 7. Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan mengukur kesehatan di tingkat lokal, regional dan nasional. Hal ini juga memungkinkan perbandingan antara wilayah geografis, topik kesehatan, dan kombinasi keduanya dari waktu ke waktu. Indeks kesehatan Indonesia menduduki peringkat ke- 108 dari seluruh negara di dunia menurut *Human Development Reports* pada tahun 2013. Upaya pelayanan kesehatan dasar merupakan langkah penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan dasar yang diberikan dengan cepat dan tepat diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah kesehatan masyarakat. Di Kota Makassar beroperasi sebanyak 50 Rumah Sakit baik pemerintah maupun swasta, yang kesemua rumah sakit tersebut memiliki pelayanan

gawat darurat level 1, atau dengan kata lain akupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan sudah mencapai 100%.

**Tabel II.21.**
**Indeks Kesehatan**

| Indikator Kinerja | 2024 | | |
|---|---|---|---|
| | Target | Realisasi | Capaian |
| Indeks Kesehatan | 0.808 | 0,849 | 109% |

*Sumber: IKU Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2024*

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Indeks Kesehatan pada tahun 2024 target sebesar 0.808 dengan realisasi sebesar 0.849; Sehingga persentase capaian sebesar 109 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan dalam mengukur kesehatan tingkat lokal, regional dan nasional. Sehingga memungkinkan perbandingan antara wilayah geografis, topik kesehatan harapannya ada kombinasi keduanya dari waktu ke waktu.

Faktor pendukung Indeks Kesehatan di Kota Makassar: Faktor Utama, Ketersediaan fasilitas kesehatan: rumah sakit, puskesmas, dan klinik, Akses ke layanan kesehatan: pelayanan kesehatan primer dan sekunder; Kualitas pelayanan kesehatan: kompetensi tenaga medis dan peralatan; Pola hidup sehat: kesadaran masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat; Ketersediaan air bersih dan sanitasi yang memadai. Faktor Lainnya, Program kesehatan masyarakat: vaksinasi, pemeriksaan kesehatan gratis; Peningkatan nutrisi: akses ke makanan bergizi dan edukasi gizi; Pengurangan risiko penyakit: pencegahan penyakit kronis dan infeksi; Kualitas lingkungan: pengelolaan limbah dan polusi; Kesadaran masyarakat tentang kesehatan mental; Fasilitas olahraga dan rekreasi; Kebijakan pemerintah yang mendukung kesehatan; Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat; Pendidikan kesehatan dan kesadaran masyarakat; Pengembangan teknologi kesehatan.

### 8. Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup bisa diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu. Usia Harapan Hidup merupakan salah satu variable membentuk IPM, yang didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir dan dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Pola hidup masyarakat merupakan faktor yang besar pengaruhnya terhadap tercapainya usia harapan hidup. Kebiasaan olahraga rutin dan teratur yang merupakan salah satu upaya hidup sehat belum menjadi pola hidup masyarakat pada umumnya, sehingga untuk pencapaian sasaran ini ditetapkan kegiatan pembinaan kesehatan olahraga khususnya bagi lansia pada program upaya kesehatan masyarakat, dan juga dilakukan kegiatan pengendalian penyakit tidak menular (PPTM) pada program pencegahan dan penangggulangan penyakit.

**Tabel II.22.**
**Usia Harapan Hidup**

| Indikator Kinerja | 2024 | | |
|---|---|---|---|
| | Target | Realisasi | Capaian |
| Usia Harapan Hidup (Tahun) | 72.3 | 72,6 | 100,41% |

*Sumber: IKU Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2024*

Berdasarkan perhitungan pencapaian Angka Harapan Hidup (AHH), pada tahun 2024, target UHH adalah 72,3 dengan realisasi 72,6 dan capaian tahun 2024 adalah 100,41 %. UHH sebesar 72,6, artinya secara rata-rata bayi yang baru lahir pada Tahun 2023 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan 72,6 tahun.

Peningkatan Usia Harapan Hidup menunjukkan keberhasilan program-program pemerintah di bidang kesehatan. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi UHH itu sendiri, berupa faktor sosial maupun faktor ekonomi. UHH dapat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, ketersediaan pangan, pendidikan, kebijakan pemerintah maupun perekonomian masyarakat dan sebagainya. Peningkatan harapan hidup disebabkan karena hidup yang lebih baik, pencegahan serta perawatan ibu, meningkatnya pendidikan dan pendapatan perkapita.

Beberapa faktor pendukung usia harapan hidup (UHH) di Kota Makassar: Ketersediaan fasilitas kesehatan: rumah sakit, puskesmas dan klinik; Akses ke layanan kesehatan: pelayanan kesehatan primer dan sekunder; Kualitas pelayanan kesehatan: kompetensi tenaga medis dan peralatan; Pola hidup sehat: kesadaran masyarakat pentingnya gaya hidup sehat; Ketersediaan air bersih dan sanitasi yang memadai. Faktor Lainnya adalah Program kesehatan masyarakat: vaksinasi, pemeriksaan kesehatan gratis; Peningkatan nutrisi: akses ke makanan bergizi dan edukasi gizi; Pengurangan risiko penyakit: pencegahan penyakit kronis dan infeksi; Kualitas lingkungan: pengelolaan limbah dan polusi; Kesadaran masyarakat tentang kesehatan mental; Fasilitas olahraga dan rekreasi; Kebijakan pemerintah yang mendukung kesehatan.

### 9. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. *Headcount Index* secara sederhana mengukur proporsi yang dikategorikan miskin. Kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang tidak dapat/mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk hidup layak dan bermartabat. Pemerintah (BPS dan beberapa pihak dalam beberapa seminar dan pertemuan) menyepakati mengukur kemiskinan dari sudut ekonomi dengan pendekatan uang (*monetary approach*).

**Tabel II.23.**
**Angka Kemiskinan**

| Indikator Kinerja | 2024 | | |
|---|---|---|---|
| | Target | Realisasi | Capaian |
| Angka Kemiskinan (%) | 4.20% | 4,97% | 118,33% |

*Sumber: IKU Dinas Sosial Kota Makassar, 2024*

Dalam RPJMD Kota Makassar Tahun 2021 – 2026, Pemerintah Kota Makassar menargetkan angka kemiskinan di tahun 2024 target 4.20% dimana jumlah penduduk miskin 79,53 ribu dan pada garis kemiskinan rupiah/kapita/bulan 592.753 dengan realisasi sebesar 4,97% telah mencapai 118,33%.

**10. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan pemulihan dan pertumbuhan yang positif. Setelah menghadapi kontraksi ekonomi pada tahun 2020, Kota Makassar berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026 mencerminkan keberhasilan strategi pembangunan dan kebijakan ekonomi yang diterapkan. Perbaikan ini menunjukkan potensi yang kuat untuk keberlanjutan dan pengembangan ekonomi daerah di masa depan.

**Tabel II.24.**
**Pertumbuhan Ekonomi**

| Indikator Kinerja | 2024 | | |
|---|---|---|---|
| | Target | Realisasi | Capaian |
| Pertumbuhan Ekonomi | 5,80% | 5,56% | 95,86% |

*Sumber: Badan Pusat Statistik diolah Bappeda, 2024*

Dari penyajian tabel diatas untuk perspektif Indikator Kinerja Utama, fluktuasi pertumbuhan ekonomi Kota Makassar dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Di sisi lain, pada tahun 2024, meskipun target pertumbuhan ekonomi sedikit lebih tinggi (5,80%), capaian realisasi yang hanya mencapai 5,56% atau capaian sebesar 95,86% menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang semakin menghambat, seperti fluktuasi harga komoditas, kekhawatiran terhadap resesi global, dan keterbatasan dalam daya saing daerah. Sebagai perencana fungsional, analisis ini menekankan perlunya penyesuaian kebijakan yang lebih adaptif, seperti penguatan sektor-sektor yang dapat mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah dalam menghadapi tantangan global yang terus berkembang.

Selain itu, dukungan terhadap sektor perdagangan dan jasa diwujudkan melalui pengembangan platform digital untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penyelenggaraan acara ekonomi, serta revitalisasi pasar tradisional dan pusat perbelanjaan. Pemerintah Kota Makassar juga fokus pada pengembangan pariwisata, dengan revitalisasi Pantai Losari dan pengembangan destinasi wisata lainnya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan mendongkrak perekonomian lokal. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi Kota Makassar dan menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Faktor pendorong utama pertumbuhan ekonomi Kota Makassar adalah pemulihan **konsumsi domestik** yang didorong oleh kembali aktifnya masyarakat dalam berbelanja setelah pembatasan sosial selama pandemi. **Perbaikan infrastruktur** yang terus berlanjut, termasuk pembangunan jalan, transportasi, dan fasilitas publik, juga

memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas dan aksesibilitas di kota ini. Selain itu, sektor **pariwisata dan perdagangan** kembali bergeliat seiring dengan pemulihan mobilitas dan peningkatan investasi. Namun, meskipun ada kemajuan, beberapa faktor penghambat turut mengemuka. Inflasi yang relatif tinggi di tahun 2023 dan 2024 dapat menekan daya beli masyarakat, terutama untuk barang-barang kebutuhan pokok. Selain itu, ketidakpastian global terkait fluktuasi harga komoditas dan krisis energi dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi kota. Terakhir, ketimpangan ekonomi antarwilayah dan kelompok masyarakat yang masih cukup besar di Makassar dapat memperlambat pemerataan pertumbuhan dan menambah tantangan dalam menciptakan kesejahteraan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

### 11. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Makassar menunjukkan tren penurunan yang menggembirakan sejak tahun 2020, meskipun angka pengangguran tetap tinggi. Dimulai dari 15,92% pada tahun 2020 upaya perbaikan dalam Kebijakan Ketenagakerjaan telah berhasil mengurangi angka ini, namun tantangan besar masih tetap ada untuk mencapai tingkat pengangguran yang lebih rendah.

**Tabel II.25.**
**Tingkat Pengangguran Terbuka**

| Indikator Kinerja | 2024 | | |
|---|---|---|---|
| | Target | Realisasi | Capaian |
| Tingkat Pengangguran Terbuka | 11,00% | 9,71 | 88,27% |

*Sumber: Badan Pusat Statistik diolah Bappeda, 2024*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Makassar pada Tahun 2024 menunjukkan capaian TPT sebesar 9,71%, dengan target 11,00% dan capaian 88,27%. Jika dilihat dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 menunjukkan tren penurunan, Penurunan TPT ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam penyediaan lapangan pekerjaan, meskipun masih terdapat tantangan untuk mencapai target yang lebih rendah. Penurunan TPT di Kota Makassar sejalan dengan beberapa program prioritas, seperti pengembangan infrastruktur dan kawasan ekonomi, penguatan sumber daya manusia (SDM), serta pemberdayaan UMKM. Program pembangunan infrastruktur, termasuk revitalisasi kawasan ekonomi dan pariwisata, membuka peluang kerja baru, khususnya sektor konstruksi dan pariwisata. Selain itu, fokus pada pelatihan keterampilan kerja dan pendidikan vokasi untuk menciptakan tenaga kerja yang siap bersaing di pasar. Program pemberdayaan UMKM juga berkontribusi dengan memperluas kesempatan kerja di sektor informal, yang menjadi sumber lapangan pekerjaan utama di Makassar. Meskipun demikian, tantangan utama tetap pada kesesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar yang terus berkembang.

Beberapa faktor pendorong yang dapat menjelaskan penurunan TPT ini adalah adanya program-program pemerintah yang mendukung penciptaan lapangan pekerjaan, seperti stimulus ekonomi yang memperkuat sektor informal dan pengembangan sektor pariwisata yang memberikan banyak kesempatan kerja. Selain itu, perdagangan dan jasa yang mulai pulih pasca-pandemi juga berkontribusi pada penurunan angka

pengangguran.
Adapun Formula untuk menghitung Tingkat Pengangguran Terbuka:

$$\text{Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

## 12. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan salah satu indikator kunci dalam pelaksanaan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar. Indikator ini berfungsi untuk mengukur proporsi penduduk usia kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik selaku pekerja ataupun pencari kerja.

**Tabel II.26.**
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

| Indikator Kinerja | 2024 | | |
|---|---|---|---|
| | Target | Realisasi | Capaian |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | 61,04% | 62,04% | 101,63% |

*Sumber: Badan Pusat Statistik diolah Bappeda, 2024*

Penyajian Tabel diatas menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Makassar Pada tahun 2024, dengan capaian 101,63% dan realisasi 62,04% melebihi target 61,04%, ini menandakan bahwa program-program yang mendukung perluasan lapangan kerja dan peningkatan kualitas angkatan kerja di Kota Makassar mulai menunjukkan hasil yang optimal. Capaian TPAK yang melebihi target ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi angkatan kerja, namun tantangan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih berkualitas dan merata tetap menjadi fokus yang perlu dioptimalkan di tahun-tahun berikutnya.

Beberapa faktor pendorong untuk meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Makassar antara lain adalah peningkatan kualitas pendidikan yang memberikan keterampilan lebih baik bagi angkatan kerja, serta pembangunan infrastruktur yang mempermudah akses masyarakat ke berbagai peluang pekerjaan. Selain itu, pertumbuhan sektor-sektor ekonomi seperti perdagangan, pariwisata, dan jasa memberikan lebih banyak kesempatan kerja. Kebijakan pemerintah yang mendukung pemberdayaan UMKM dan pelatihan keterampilan juga turut mendorong lebih banyak orang untuk terlibat dalam angkatan kerja. Selain itu, meningkatnya kesempatan kerja di sektor informal dan perubahan sosial yang mendukung peran perempuan dalam angkatan kerja berkontribusi positif terhadap partisipasi angkatan kerja secara keseluruhan.
Adapun Formula untuk menghitung Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja:

$$\text{Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)} = \frac{\text{Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$$

### 13. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita adalah indikator penting dalam mengevaluasi kesejahteraan ekonomi penduduk suatu daerah. Indikator ini mengukur nilai barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh per individu, yang menjadi penggambaran dari tingkat ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar untuk periode 2021-2026, PDRB Per Kapita digunakan untuk menilai kemajuan ekonomi dan efektivitas kebijakan pembangunan ekonomi yang diterapkan.

**Tabel II.27.**
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita**

| Indikator Kinerja | 2024 | | |
|---|---|---|---|
| | Target | Realisasi | Capaian |
| Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per kapita | 137,3 jt | 165,95 jt | 120,9 % |

*Sumber: Badan Pusat Statistik diolah Bappeda, 2024*

### 14. Rasio Gini

Gini ratio, atau yang juga disebut dengan indeks Gini atau Koefisien Gini, adalah sebuah metode ataupun alat yang digunakan agar bisa mengukur tingkat ketimpangan ekonomi yang terdapat dalam sebuah populasi melalui adanya distribusi pendapatan. Menurunkan angka gini rasio memang tidak mudah karena hal ini bertujuan untuk memperkecil kesenjangan antara pendapatan orang miskin dan orang kaya di Kota Makassar. Sebagai gambaran, sebelum pandemi Covid-19 terjadi di Kota Makassar, tingkat gini rasio sebesar 0,390 pada tahun 2019, menunjukkan ketimpangan pendapatan relatif semakin melebar dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan, bahkan nasional. Hingga tahun 2019, ketika gini ratio Kota Makassar naik, gini rasio provinsi dan nasional turun masing-masing menjadi 0,389 dan 0,382. Namun pasca pandemi Covid-19 merebak di Kota Makassar, angka gini rasio kota ini menembus angka 0,40 ditahun 2020. Dengan demikian, terjadi kenaikan gini rasio sebesar 0,1 sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Dengan demikian, tingkat ketimpangan semakin melebar pasca pandemi terjadi, sehingga momentum ini akan menjadi tantangan ke depannya untuk menurunkan angka gini rasio. Kondisi tersebut, dapat menjadi dasar untuk menargetkan penurunan angka gini rasio ditahun mendatang.

Gini Ratio di Kota Makassar pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,363. Ini menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulawesi Selatan yang mengalami penurunan.

**Tabel II.28.**
**Gini Ratio**

| Indikator Kinerja | 2024 | | |
|---|---|---|---|
| | Target | Realisasi | Capaian |
| Gini Ratio | 0,39 | 0,372 | 95,38% |

*Sumber: Badan Pusat Statistik diolah Bappeda, 2024*

**15. Indeks Kota Nyaman**

Pencapaian tujuan "Mewujudkan Makassar menjadi *Livable City* dan *Resilient City*" diukur melalui indikator Indeks Kota Nyaman *(Livable City Index)* yang merupakan ukuran kelayakan huni kota-kota di Indonesia berdasarkan persepsi warga kotanya. Pengukuran dimaksudkan untuk mengukur kualitas hidup warga kota sekaligus identifikasi awal faktor-faktor kritis pembangunan sebagai gambaran kekuatan dan kelemahan melalui data statistik hasil persepsi terhadap pelayanan kota dan kehidupan kota. Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Makassar Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2022-2026, Pengukuran terhadap Indeks Kota Nyaman berdasarkan hasil survey kota nyaman yang dilakukan oleh Ikatan Ahli Perencana (IAP) dalam upaya mengawal perencanaan dan pembangunan wilayah dan kota di Indonesia dengan merilis *Most Livable City Index (MLCI)* setiap 3 tahun mulai tahun 2009, 2011, 2014, 2017 dan terakhir pada tahun 2022.

Target, realisasi dan capaian Indeks Kota Nyaman Kota Makassar Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel II.29.**
**Indeks Kota Nyaman**

| Indikator Kinerja | 2024 | | |
|---|---|---|---|
| | Target | Realisasi | Capaian |
| Indeks Kota Nyaman (%) | 60,22 | NA | NA |

*Sumber: Ikatan Ahli Perencana (IAP) 2023; Data diolah Bappeda Kota Makassar, 2024*

Indeks Kota Nyaman merupakan nilai komposit yang dibentuk oleh 28 kriteria dan 49 indikator. Terdapat 17 kriteria dengan 30 indikator yang berada dibawah angka indeks rata-rata nasional sebagai berikut :

1. Keamanan Kota;
2. Politik Kota;
3. Kesehatan Kota;
4. Perekonomian Kota;
5. Sektor Informal Kota;
6. Ketahanan Pangan;
7. Informasi dan Partisipasi Publik;
8. Fasilitas Administrasi dan Pelayanan Publik Pemerintahan (2);
9. Perumahan;
10. Fasilitas Taman Kota
11. Fasilitas Olahraga
12. Fasilitas Kesenian dan Budaya;
13. Fasilitas Kelompok Rentan;
14. Fasilitas Pejalan Kaki
15. Transportasi
16. Jaringan Telekomunikasi;
17. Penataan Kota

Terdapat 11 kriteria dengan 19 indikator memiliki nilai indeks sama atau diatas nilai indeks diatas rata-rata nasional, sebagai berikut :

1. Keselamatan Kota

2. Fasilitas Kesehatan;
3. Kebersihan Kota;
4. Persampahan
5. Fasilitas Ekonomi;
6. Fasilitas Pendidikan;
7. Fasilitas Peribadatan;
8. Fasilitas Rekreasi;
9. Penyediaan Air Bersih
10. Pengelolaan Air Kotor dan Drainase;
11. Energi.

**16. Indeks Layanan Infrastruktur**

Indeks Layanan Infrastruktur merupakan indikator sasaran "Tersedianya Infrastruktur Menuju Kota Nyaman" dan merupakan nilai capaian indikator komposit dari jalan kota dalam kondisi baik, penduduk berakses air minum, rumah tinggal bersanitasi, jumlah sampah yang tertangani dan areal kawasan kumuh.

Perhitungan capaian indeks berdasarkan formulasi yang tertuang dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2022-2026. Target, realisasi dan capaian Indeks Layanan Infrastruktur pada Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

**Tabel II.30.**
**Indeks Layanan Infrastruktur**

| Indikator Kinerja | 2024 | | |
|---|---|---|---|
| | Target | Realisasi | Capaian |
| Indeks layanan Infrastruktur (%) | 76,27 | 74,253 | 97,35 |

*Sumber: Data diolah Bappeda Kota Makassar, 2024*

Capaian pada tahun 2024 dengan nilai indeks 74,253. Hal tersebut menggambarkan, masih terdapat beberapa kondisi pada layanan infrastruktur dasar yang belum optimal dan harus ditingkatkan.

Kota Makassar memiliki jaringan jalan yang terdiri dari Jalan Nasional, Jalan Provinsi, dan Jalan Kota. Pada tahun 2024, panjang jalan yang berada dalam kewenangan kota tercatat sebesar 1.595,75 km, dengan 98% atau 1.563,81 km dalam kondisi baik. Sisanya sebesar 2% jalan dalam kondisi rusak ringan maupun berat menunjukkan bahwa meskipun cakupan jalan berkondisi baik cukup tinggi, masih ada tantangan dalam mempertahankan kualitas jalan di berbagai wilayah, terutama di area padat penduduk dan daerah berkembang.

Terkait akses air minum, sekitar 74,34% rumah tangga di Kota Makassar pada tahun 2024 memiliki akses terhadap jaringan air minum, baik perpipaan maupun bukan perpipaan yang terlindungi. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 9,15% rumah tangga yang memiliki akses air minum aman sesuai standar kesehatan. Tantangan utama dalam sektor ini meliputi keterbatasan jaringan perpipaan oleh Perumda Air Minum dan kurangnya fasilitas pengolahan air minum yang memenuhi standar kesehatan. Wilayah

Kecamatan Kepulauan Sangkarrang menjadi salah satu daerah yang masih menghadapi keterbatasan akses air minum berkualitas.

Akses sanitasi rumah tinggal diukur dari jumlah rumah yang memiliki septic tank atau terhubung dengan jaringan IPAL komunal. Pada tahun 2024, sebanyak 88,66% rumah tinggal di Kota Makassar memiliki akses terhadap sanitasi yang memadai. Meskipun angka ini cukup tinggi, masih terdapat 11,34% rumah yang belum memiliki akses sanitasi layak, yang dapat menyebabkan permasalahan kesehatan lingkungan dan pencemaran air tanah.

Kota Makassar memiliki sistem pengelolaan sampah dengan fasilitas pengolahan sampah seperti TPA Tamangapa serta TPS3R Bank Sampah Unit (BSU). Pada tahun 2024, sebanyak 76,69% dari total timbulan sampah sebesar 297.869,70 ton tertangani melalui sistem pengangkutan dan pengolahan. Namun, hanya 1,96% sampah yang benar-benar terolah di fasilitas pengolahan, sementara sebagian besar langsung masuk ke TPA. Ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pengelolaan sampah telah tersedia, fasilitas pengolahan masih belum optimal dalam mengurangi timbulan sampah dan mencegah penumpukan di TPA.

Permasalahan kawasan kumuh masih menjadi tantangan di Kota Makassar, terutama di beberapa kecamatan termasuk Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Dari total luas kota sebesar 17.685,2 hektar, sekitar 299,36 hektar masih dikategorikan sebagai kawasan kumuh dengan berbagai masalah seperti keteraturan bangunan yang tidak sesuai standar, kualitas jalan lingkungan yang buruk, terbatasnya akses air minum dan sanitasi, sistem drainase yang belum optimal, serta kurangnya pengelolaan sampah dan proteksi kebakaran

### 17. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Pencapaian sasaran “Meningkatkan Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Lestari” diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Target, realisasi dan capaian IKLH Kota Makassar Tahun 2022, 2023, dan 2023 disajikan pada tabel berikut :

**Tabel II.31.**
**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**

| Indikator Kinerja | 2024 | | |
|---|---|---|---|
| | Target | Realisasi | Capaian |
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Makassar | 59,08 | 61,41 | 103,94% |

*Sumber: Data diolah Bappeda Kota Makassar, 2024*

Nilai IKLH dibentuk oleh 3 indikator pembentuk yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang pengukurannya dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hingga tahun 2024, sasaran Meningkatkan Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Lestari telah terwujud, bahkan dengan capaian melebihi target sebesar 103,94%. Namun masih terdapat beberapa kondisi yang perlu menjadi perhatian yaitu kualitas air pada badan air yang masih terindikasi rata-rata mengalami pencemaran dengan status mutu air rata-rata cemar ringan, salah satu penyebab karena masih terdapat aktivitas pembuangan limbah ke badan air baik oleh

pelaku usaha maupun dimestik, tanpa melalui proses pengolahan dan memenuhi standar baku mutu.

Pada kualitas udara, meskipun berada pada kategori baik namun pada beberapa titik utamanya dengan kepadatan lalulintas tinggi, terdapat kandungan NO2 hasil pembakaran bahan bakar berbahan dasar fosil dari kendaraan bermotor. Dan meskipun capaian IKTL telah melampaui target yang ditetapkan dalam kurun 3 tahun terakhir namun masih terkendala terbatasnya lahan untuk pengembangan vegetasi khususnya pohon untuk meningkatkan luas dan kualitas tutupan hijau.

### 2.2.2. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. IKK meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

**Tabel II.32.**
**Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK)**
**Kota Makassar Tahun 2024**

| No | Aspek / Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Target Tahun 2024 | Capaian tahun 2024 | Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|
| I | **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | | |
| 1 | Pertumbuhan PDRB | | | | |
| | PDRB Atas Dasar Harga Berlaku | Triliun | 227,858 | 243,06 | > |
| | PDRB Atas Dasar Harga Konstan | Triliun | 143,879 | 147,98 | > |
| 2 | Laju Inflasi | % | 2,00 | 1,19 | < |
| 3 | PDRB Per Kapita | Rp (Juta) | 137,3 | 165,95 | > |
| 4 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 5.80 | 5,56 | < |
| 5 | Indeks Gini | % | 0,390 | 0,372 | < |
| 6 | Presentase penduduk diatas garis kemiskinan | % | 95,58 | 95,03 | < |
| 7 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks | 83,67 | 85,23 | > |
| 8 | Angka melek huruf | % | 99,06 | 99,22 | > |
| 9 | Angka rata-rata lama sekolah | % | 12,66 | 11,57 | < |
| 10 | Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,000 (PPP) per kapita per hari | % | 4,42 | 4,97 | > |
| 11 | Angka usia harapan hidup | % | 72,85 | 75,33 | > |
| 12 | Persentase balita gizi buruk | % | 1,43 | 12,07 | > |

| No | Aspek / Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Target Tahun 2024 | Capaian tahun 2024 | Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Prevalensi balita gizi kurang | % | 5,51 | | |
| 14 | Cakupan desa siaga aktif | % | 100 | 100 | = |
| 15 | Angka partisipasi angkatan kerja | % | 58,97 | 62,04 | > |
| 16 | Tingkat partisipasi angkatan kerja (usia 15-65 thn) | % | 64,41 | 67,81 | > |
| 17 | Tingkat pengangguran terbuka | % | 11 | 9,71 | < |
| 18 | Rasio penduduk yang bekerja | Rasio | 87,01 | 90,29 | > |
| 19 | Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja | % | 22,30 | Belum dapat dihitung | - |
| 20 | Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas | Rasio | 87,01 | 90,29 | > |
| 21 | Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja. | % | 33,45 | 40,30 | > |
| 22 | Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I | % | 27,57 | 6,08 | < |
| 23 | Indeks Kepuasan Masyarakat | % | 81,25 | - | - |
| 24 | Persentase PAD terhadap pendapatan | % | 38,28 | | |
| 25 | Opini BPK | Predikat | WTP | WTP | = |
| 26 | Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | % | 85 | 89,73 | > |
| 29 | Penguatan cadangan pangan | Ton | 5 | 20 | > |
| 30 | Penanganan daerah rawan pangan | % | 72,42 | 11,76 | < |
| 31 | Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB | % | 0,063 | 0,05 | < |
| 32 | Kontribusi sector pertanian (palawija) terhadap PDRB | % | 4,36 | 3,56 | < |
| 33 | Produksi sektor pertanian | Ton | 34.304 | 17.166 | < |
| 34 | Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB | % | 100 | 100 | = |
| 35 | Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB | % | 1,32 | | |
| 36 | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | % | 20,56 | | |

| No | Aspek / Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Target Tahun 2024 | Capaian tahun 2024 | Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB | % | 15,52 | | |
| **II** | **ASPEK DAYA SAING DAERAH** | | | | |
| 1 | Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita | Rp. (Juta) | 18,58 | | |
| 2 | Nilai Tukar Petani | % | 100,97 | | |
| 3 | Persentase Pengeluaran konsumsi non pangan per Kapita | % | 61 | | |
| 4 | Produktivitas total daerah | Rp. (Juta) | 202,22 | | |
| 5 | Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi) | Rp. (Juta) | 82,91<br>85,84 | | |
| 6 | Rasio Pinjaman terhadap simpanan di bank umum | % | 1,172 | | |
| 7 | Angka kriminalitas yang tertangani | % | 0,0004 | | |
| 8 | Rasio ketergantungan | % | 39,17 | | |
| III | ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | |
| III.1 | Layanan Urusan Wajib Dasar | | | | |
| 1. | Pendidikan | | | | |
| 1.1 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | % | 52,87 | 39,49 | < |
| 1.2 | Angka partisipasi kasar | % | SD : 100 | SD : 105,51 | > |
| | | | SMP : 98,29 | SMP : 90,85 | < |
| 1.4 | Angka Partisipasi Murni (APM) (PAUD) | % | 36,93 | 98,06 | > |
| 1.5 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B | % | 85,50 | 79,51 | < |
| 1.6 | Angka Pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A | % | 12,30 | 13,09 | > |
| 1.7 | Angka Pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B | % | 23,39 | 19,85 | < |
| 1.8 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A | % | 99,76 | 1025,5 | > |
| 1.9 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B | % | 95,37 | 99.94 | > |
| 1.10 | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI | % | 0,08 | 1,37 | > |

| No | Aspek / Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Target Tahun 2024 | Capaian tahun 2024 | Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.11. | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs | % | 0,31 | 4,83 | > |
| 1.12. | Angka Kelulusan (AL) SD/MI | % | 100 | 100 | = |
| 1.13 | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs | % | 100 | 100 | = |
| 1.14. | Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs | % | 99,08 | 104,95 | > |
| 1.15. | Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA | % | 100 | 104,62 | > |
| 1.16 | Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan | % | 94,78 | 97.05 | > |
| 1.17. | Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik | % | 94,56 | 97.81 | > |
| 1.18 | Rasio ketersediaan Sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar | /10.000 pddk | 38,31 | 37.89 | > |
| 1.19 | Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar | /10.0000 murid | 566,80 | 509,84 | < |
| 1.20 | Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar | % | 100 | 92,56 | < |
| 1.21 | Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki | % | 100 | 100 | = |
| 1.22. | Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) | % | 98,79 | 99,17 | > |
| 1.23 | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | % | 97,21 | 99,16 | > |
| 2. | Kesehatan | | | | |
| 2.1 | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup | /1000KH | 1,39 | 7,3 | > |
| 2.2 | Angka kelangsungan hidup bayi | /1000AKB | 999,09 | 992,7 | < |
| 2.3. | Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup | /1000KH | 1,25 | 3,43 | > |
| 2.4 | Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup | /1000KH | 0,925 | 3,43 | > |
| 2.5 | Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup | /100.000KH | 35,40 | 76,67 | > |
| 2.6. | Rasio posyandu per satuan balita | /1000 B | 7,56 | 9,9 | > |

| No | Aspek / Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Target Tahun 2024 | Capaian tahun 2024 | Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7. | Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk | /1000 pddk | 0,253 | 0,16 | < |
| 2.8 | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk | /1000 pddk | 0,033 | 0,035 | > |
| 2.9 | Rasio dokter per satuan penduduk | /1000 pddk | 0,48 | 2,23 | > |
| 2.10 | Rasio tenaga medis per satuan penduduk | /1000 pddk | 1,35 | 5,55 | > |
| 2.11 | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani | % | 97,55 | 101,38 | > |
| 2.12 | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | % | 94,07 | 100 | > |
| 2.13 | Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | % | 100 | 100 | = |
| 2.14 | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan | % | 100 | 100 | = |
| 2.15 | Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak | % | 99,53 | 100,96 | > |
| 2.16 | Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk | % | 0 | 0,0026 | > |
| 2.17 | Cakupan balita pneumonia yang ditangani | % | 11,38 | 7,41 | < |
| 2.18 | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA | % | 28,14 | 25,91 | < |
| 2.19 | Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) | % | 0,20 | 449,44 | > |
| 2.20 | Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) | % | 0,01 | 15,10 | > |
| 2.21 | Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS | % | 100 | 100 | = |
| 2.22 | Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS | % | 34,024 | 85,83 | > |
| 2.23 | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | % | 100 | 85,83 | < |
| 2.24 | Penderita diare yang ditanganI | % | 100 | 100 | = |

| No | Aspek / Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Target Tahun 2024 | Capaian tahun 2024 | Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.25 | Angka kejadian Malaria | /100.000 pddk | 6,65 | 0,14 | < |
| 2.26 | Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi | % | 0,038 | 0,07 | > |
| 2.27 | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin | % | 120,405 | 59,93 | < |
| 2.28 | Cakupan kunjungan bayi | % | 100 | 100 | = |
| 2.29 | Cakupan puskesmas | % | 319,47 | 313,33 | < |
| 2.30 | Cakupan pembantu puskesmas | % | 22,199 | 22,88 | > |
| 2.31 | Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 | % | 94,18 | 100 | > |
| 2.32 | Cakupan pelayanan nifas | % | 87,284 | 100 | > |
| 2.33 | Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani | % | 85,724 | 84,66 | < |
| 2.34 | Cakupan pelayanan anak balita | % | 78,22 | 100 | > |
| 2.35 | Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin | % | 100 | 100 | = |
| 2.36 | Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingka | % | 100 | 100 | = |
| 2.37 | Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin | % | 84,99 | 59,93 | < |
| 2.38 | Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) | % | 100 | 100 | = |
| 2.39 | Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam | % | 100 | 100 | = |
| 3. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | |
| 3.1. | Pekerjaan Umum | | | | |
| 3.1.1. | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | % | 98,89 | 98,88 | < |
| 3.1.2. | Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk | km/Jiwa | 1 : 997 | 1 : 918 | < |
| 3.1.4. | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam) | % | 92,72 | 95,51 | > |
| 3.1.5. | Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) | % | 40,37 | 40,35 | < |

| No | Aspek / Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Target Tahun 2024 | Capaian tahun 2024 | Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.7. | Persentase rumah tinggal bersanitasi | % | 90,81 | 87,73 | < |
| 3.1.8. | Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar | % | 5,59 | 17,97 | > |
| 3.1.9. | Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat | % | 88,06 | 89,95 | > |
| 3.1.10 | Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun | % | 19,86 | 52,05 | > |
| 3.1.11. | Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor | % | 2,27 | 0 | < |
| 3.1.12. | Persentase penduduk berakses air minum | % | 73,38 | 74,34 | > |
| 3.1.13. | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan | % | 73,38 | 75,87 | > |
| 3.1.14. | Persentase areal kawasan kumuh | % | 1,99 | 1,70 | < |
| 3.1.15. | Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan | % | 89,96 | 3,89 | < |
| 3.1.16. | Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk | /1000 pddk | 151,48 | 119,00 | < |
| 3.1.17. | Rasio tempat ibadah per satuan penduduk | /1000 pddk | 1,06 | 1,14 | > |
| 3.2.Penataan Ruang | | | | | |
| 3.2.1. | Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan | % | 7,031 | 6,42 | < |
| 3.2.2. | Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan | % | 0,021 | 0,009 | < |
| 4. | Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | |
| 4.1. | Rasio rumah layak huni | Unit/Jiwa | 1:6,34 | 1:5,25 | < |
| 4.3. | Cakupan ketersediaan rumah layak huni | % | 100 | 99,89 | < |
| 4.4. | Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau | % | 100 | 99,89 | < |
| 4.6. | Persentase lingkungan pemukiman kumuh | % | 1,78 | 1,70 | < |

| No | Aspek / Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Target Tahun 2024 | Capaian tahun 2024 | Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.7. | Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan | % | 33,66 | 6,92 | > |
| 4.8 | Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan | % | 0,84 | 7,37 | < |
| 5. | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | | | | |
| 5.1 | Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) | % | 21,21 | 1,96 | < |
| 5.2. | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan | % | 90,57 | 100 | > |
| 5.3. | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota | % | 34,08 | 0,0038 | < |
| 5.4. | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | % | 100 | 100 | = |
| 5.5. | Persentase Penegakan PERDA | % | 87,64 | 100 | > |
| 6 | Sosial | | | | |
| 6.1 | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | % | 100 | 100 | = |
| 6.2 | Persentase PMKS yang tertangani | % | 100 | 100 | = |
| 6.3 | Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | % | 100 | 100 | = |
| 6.4 | Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya | % | 100 | 100 | = |
| 6.5 | Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan social | % | 100 | 100 | = |
| 6.6 | Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial | % | 100 | 100 | = |
| 6.7 | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | % | 100 | 100 | = |
| 6.8 | Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan | % | 100 | 99,99 | < |

| No | Aspek / Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Target Tahun 2024 | Capaian tahun 2024 | Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|
| | sarana prasarana tanggap darurat lengkap | | | | |
| 6.9 | Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | % | 100 | 100 | = |
| | Layanan Urusan Wajib Non Dasar | | | | |
| 1. | Tenaga Kerja | | | | |
| 1.1. | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun | % | 3,82 | 4,21 | > |
| 1.2. | Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) | % | 63,41 | 62,62 | < |
| 1.3. | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | % | 59,20 | 59,04 | < |
| 1.4. | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek | % | 31,72 | 45,21 | > |
| 1.5. | Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah | Jumlah | 0 | 0 | = |
| 1.6. | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | % | 34,26 | 25,01 | < |
| 1.7. | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat | % | 46,04 | 23,47 | < |
| 1.8. | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan | % | 28,78 | 22,15 | < |
| 2. | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | |
| 2.1. | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | % | 63,79 | 67,58 | > |
| 2.2. | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR | % | 31 | 26 | < |
| 2.3. | Rasio KDRT | % | 3,40 | 0,01 | < |
| 2.4. | Partisipasi angkatan kerja perempuan | % | 100 | 100 | = |
| 2.5. | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | % | 100 | 100 | = |

| No | Aspek / Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Target Tahun 2024 | Capaian tahun 2024 | Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.6. | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit | % | 100 | 100 | = |
| 2.7. | Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. | % | 17,94 | 47,68 | > |
| 2.8. | Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | % | 96,79 | 100 | > |
| 2.9. | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum | % | 86,96 | 80,13 | < |
| 2.10. | Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan | % | 100 | 100 | = |
| 2.11. | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan | % | 100 | 100 | = |
| 3. | Pangan | | | | |
| 3.1. | Ketersediaan pangan utama | % | 90 | 88,64 | < |
| 3.2. | Ketersediaan energi dan protein perkapita | Kkal/kap/hr | E: 2.600 | E; 2.716 | > |
| | | | P: 126 | P: 67 | < |
| 3.3. | Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan | % | 99,36 | 100 | > |
| 4. | Pertanahan | | | | |
| 4.1. | Persentase luas lahan bersertifikat | % | 4,49 | 92,49 | > |
| 4.2. | Penyelesaian kasus tanah Negara | % | 100 | 100 | = |
| 4.3. | Penyelesaian izin lokasi | % | 6,80 | 0 | < |
| 5. | Lingkungan Hidup | | | | |
| 5.26. | Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota | Dokumen | Tidak Ada | Tidak Ada | = |

| No | Aspek / Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Target Tahun 2024 | Capaian tahun 2024 | Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.27. | Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota | Dokumen | Tidak Ada | Tidak Ada | = |
| 5.28. | Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi | Dok | Ada | Ada | = |
| 5.29. | Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air | Mutu Air | ada | Ada (51,74) | = |
| 5.30. | Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara | % | ada | ada (79,44) | = |
| 5.31. | Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan | % | 21,29 | 26,97 | > |
| 5.32. | Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota | % | 30,52 | 100 | > |
| 5.33. | Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota | Tersedia | ada | Tidak Ada | < |
| 5.34. | Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA | Tersedia | ada | Tidak Ada | < |
| 5.35. | Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional | Tersedia | tidak ada | Tidak Ada | = |
| 5.36. | Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional | Tersedia | tidak ada | Tidak Ada | = |
| 5.37. | Penetapan hak MHA | Tersedia | ada | Tidak Ada | < |
| 5.38. | Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan | Tersedia | ada | Tidak Ada | < |
| 5.39. | Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana | Tersedia | ada | Tidak Ada | < |
| 5.40. | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat | Tersedia | ada | Tidak Ada | < |
| 5.41. | Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup | Jenis | ada | Tidak Ada | < |
| 5.42. | Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha | % | 100 | 100 | = |

| No | Aspek / Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Target Tahun 2024 | Capaian tahun 2024 | Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|
| | dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota. | | | | |
| 5.43. | Timbunan sampah yang ditangani | % | 71,86 | 83,55 | > |
| 5.44. | Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R | % | 27 | 3,89 | < |
| 5.45. | Persentase cakupan area pelayanan | % | 100 | 95,58 | < |
| 5.46. | Persentase jumlah sampah yang tertangani | % | 70,34 | 87,44 | > |
| 5.47. | Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota | Nilai Adipura | 71,62 | 72,80 | > |
| 5.48. | Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan | % | 99,45 | 58,90 | < |
| 5.49. | Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan | % | 99,45 | 58,90 | < |
| 6. | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | |
| 6.1. | Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk | % | 100 | 165 | > |
| 6.2. | Rasio bayi berakte kelahiran | % | 100 | 0,99 | < |
| 6.3. | Rasio pasangan berakte nikah | % | 38,27 | 54 | > |
| 6.4. | Ketersediaan database kependudukan skala provinsi | Database | ada | ada | = |
| 6.5. | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | Database | sudah | sudah | = |
| 6.6. | Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) | % | 100 | 95,21 | < |
| 6.7. | Cakupan penerbitan akta kelahiran | % | 100 | 95,21 | < |
| 7. | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | |
| 7.1. | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik | % | 96,21 | 100 | > |
| 7.2. | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) | % | 100 | 1 | < |
| 7.3. | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | % | 51,58 | 123,75 | > |
| 7.4. | Persentase LSM aktif | % | 100 | 100 | = |

| No | Aspek / Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Target Tahun 2024 | Capaian tahun 2024 | Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.5. | Persentase LPM Berprestasi | % | 2,12 | 0 | < |
| 7.6. | Persentase PKK aktif | % | 100 | 100 | = |
| 7.7. | Persentase Posyandu aktif | % | 100 | 100 | = |
| 7.8. | Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat | % | 100 | 0,65 | < |
| 7.9. | Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat | % | 100 | 0,65 | < |
| 8. | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | | |
| 8.1. | Laju pertumbuhan penduduk (LPP) | % | 1,21 | 0,26 | < |
| 8.2. | Total Fertility Rate (TFR) | % | 2,10 | 2,02 | < |
| 8.3. | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB | % | 54,90 | 64,70 | > |
| 8.4. | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk | % | 41,17 | 66,67 | > |
| 8.5. | Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk | Peraturan | 1 | 1 | = |
| 8.6 | Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan | Sektor | 22 | 34 | > |
| 8.7 | Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan | Kerjasama | 13 | 8 | < |
| 8.8. | Rata-rata jumlah anak per keluarga | Jumlah | 2 | 1,32 | < |
| 8.9. | Ratio Akseptor KB | % | 68,30 | 68,46 | > |
| 8.10. | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 | % | 68,30 | 68,46 | > |
| 8.11. | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per | % | 29,53 | 23,80 | < |

| No | Aspek / Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Target Tahun 2024 | Capaian tahun 2024 | Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) | | | | |
| 8.12. | Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun | % | 0,54 | 23,80 | > |
| 8.13. | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) | % | 8,30 | 9,06 | > |
| 8.14. | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | % | 33,44 | 27,75 | < |
| 8.15. | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi | % | 48,51 | 46,06 | < |
| 8.16. | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB | % | 76,82 | 44,16 | < |
| 8.17. | Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB | % | 72,80 | 23,55 | < |
| 8.18. | Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB | % | 63,47 | 11,10 | < |
| 8.19. | Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa | % | 833,33 | 866,66 | > |
| 8.20. | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk | % | 100 | 100 | = |
| 8.21. | Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri | % | 38,39 | 22,76 | < |
| 8.22. | Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan | % | 100 | 104,57 | > |
| 8.23. | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat | % | 39,43 | 727,23 | > |
| 8.24. | Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan | % | 97,36 | 76,43 | < |

| No | Aspek / Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Target Tahun 2024 | Capaian tahun 2024 | Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.25. | Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa | % | 100 | 100 | = |
| 8.26. | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga | % | 100 | 100 | = |
| 8.27. | Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak | % | 70,19 | 46,04 | < |
| 8.28. | Rata-rata usia kawin pertama wanita | % | 21 | 21 | = |
| 8.29. | Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes | % | 0,712 | 0,73 | > |
| 9. | Perhubungan | | | | |
| 9.1. | Jumlah arus penumpang angkutan umum | Orang | 6.955.970 | 9.845.376 | > |
| 9.2. | Rasio ijin trayek | Unit / jiwa | 1 : 850 | 0,0001 | < |
| 9.3. | Jumlah uji kir angkutan umum | Unit | 2.860 | 27.172 | > |
| 9.4. | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis | Unit | 5 | 5 | = |
| 9.5. | Persentase layanan angkutan darat | % | 1 : 2.125 | 725/8613000 | > |
| 9.6. | Pemasangan Rambu-rambu | % | 3,45 | 0 | < |
| 9.7. | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan | km/unit | 1 : 773 | 827/1217413 | |
| 9.8. | Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum | Orang | 18.505.000 | 8.613.000 | < |
| 9.9. | Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun | Orang | 8.673.137 | 9.182.226 | > |
| 10 | Komunikasi dan Informatika | | | | |
| 10.1. | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan | % | 128,68 | 133 | > |
| 10.2. | Cakupan Layanan Telekomunikasi | % | 100 | 100 | = |

| No | Aspek / Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Target Tahun 2024 | Capaian tahun 2024 | Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Koperasi, Usaha Kecil dan menengah | | | | |
| 11.1. | Persentase koperasi aktif | % | 76,19 | 53,59 | < |
| 11.2. | Persentase UKM non BPR/LKM aktif | % | 100 | 99,95 | < |
| 11.3. | Persentase BPR/LKM aktif | % | 43,51 | 51,72 | > |
| 11.4. | Persentase Usaha Mikro dan Kecil | % | 77,09 | 98,99 | > |
| 12. | Penanaman Modal | | | | |
| 12.1. | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) | Investor | PMDN:1.455<br>PMA: 499 | PMDN : 7.394<br>PMA : 772 | > |
| 12.2. | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) | | PMDN:<br>1.900.000.000.000 | PMDN : 5.238.910.600.000.000 | > |
| | | Rp. | PMA: 75.000.00.000 | PMA: 44.110.690.00 | < |
| 12.3. | Rasio daya serap tenaga kerja | % | 4,89 | 0,82 | < |
| 12.4. | Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) | % | 56,69 | 150,40 | > |
| 13 | Kepemudaan dan Olah Raga | | | | |
| 13.1. | Persentase organisasi pemuda yang aktif | % | 100 | 92 | < |
| 13.2. | Persentase wirausaha muda | % | 17 | 30,19 | < |
| 13.3. | Cakupan pembinaan olahraga | % | 57 | 68 | > |
| 13.4. | Cakupan Pelatih yang bersertifikasi | % | 7,75 | 21,32 | > |
| 13.5. | Cakupan pembinaan atlet muda | % | 18,41 | 7,33 | < |
| 13.6. | Jumlah atlet berprestasi | Orang | 19 | 19 | = |
| 13.7. | Jumlah prestasi olahraga | Prestasi | 25 | 11 | < |
| 14 | Statistik | | | | |
| 14.1. | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | Data terintegrasi | Ada | Ada | = |
| 14.2. | Buku ”kabupaten dalam angka” | Buku | Ada | Ada | = |
| 14.3. | Buku ”PDRB” | Buku | Ada | Ada | = |
| 15. | Persandian | | | | |
| 15.1. | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi | % | 100 | 100 | = |

| No | Aspek / Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Target Tahun 2024 | Capaian tahun 2024 | Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|
| | dalam komunkasi Perangkat Daerah | | | | |
| 16 | Kebudayaan | | | | |
| 16.1. | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | Festival | 4 | 3 | < |
| 16.2. | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | % | 161 | 20 | < |
| 16.3. | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi | Karya | Diinventarisasi 55 | Diinventarisasi 60 | > |
| 16.4. | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu | Jumlah | 55 | 0 | < |
| 17. | Perpustakaan | | | | |
| 17.1. | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun | Pengunjung/ Penduduk | 0,409 | 0,483 | > |
| 17.2. | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | Jumlah Judul/Jumlah Eksamplar | #DIV/0! atau ∞ | 0,428 | < |
| 17.3. | Rasio perpustakaan persatuan penduduk | ‰ (Permil) | 0,117 | 0,385 | > |
| 17.4. | Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun | Pengunjung/ Tahun (12 Bulan) | 46.666,67 | 55.082,83 | > |
| 17.5. | Jumlah koleksi judul buku perpustakaan | Koleksi | 29.212 | 116.111 | > |
| 17.6 | Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat | % | 1,39 | 0,42 | < |
| 18. | Kearsipan | | | | |
| 18.1. | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | % | 80.39 | 80.39 | = |
| 18.2. | Peningkatan SDM pengelola kearsipan | Orang | 10 | 10 | = |
| | Layanan Urusan Pilihan | | | | |
| 1. | Pariwisata | | | | |
| 1.1. | Kunjungan wisata | % | 51,84 | 119,62 | > |
| 1.2. | Lama kunjungan Wisata | Hari | 3,25 | 1,6 | < |
| 1.3. | PAD sektor pariwisata | % | 24,48 | 29,11 | > |
| 2. | Pertanian | | | | |

| No | Aspek / Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Target Tahun 2024 | Capaian tahun 2024 | Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1. | Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB | % | 0,081 | 0,07 | < |
| 2.2. | Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB | % | 11,07 | 1,87 | < |
| 2.3. | Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB | % | 99,38 | 100 | > |
| 2.4. | Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar | % | 57,55 | 6,48 | < |
| 5. | Perdagangan | | | | |
| 5.1. | Ekspor Bersih Perdagangan | Rp | 1.386.945 | 1.133.27 | < |
| 6. | Perindustrian | | | | |
| 6.1. | Cakupan bina kelompok pengrajin | % | 32,22 | 31,05 | < |
| 8. | Perikanan | | | | |
| 8.1. | Produksi perikanan | % | 97,06 | 103,3 | > |
| 8.2. | Konsumsi ikan | Ton | 100 | - | - |
| 8.3. | Cakupan bina kelompok nelayan | & | 100 | 63,27 | < |
| 8.4. | Produksi perikanan kelompok nelayan | % | 18,45 | 14,6 | < |
| 8.5. | Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman | % | 100 | 50 | < |
| | Penunjang Urusan | | | | |
| 1. | Perencanaan Pembangunan | | | | |
| 1.1. | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | Dokumen | Ada | Ada | = |
| 1.2. | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA | Dokumen | Ada | Ada | = |
| 1.3. | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA | Dokumen | Ada | Ada | = |
| 1.4. | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA | Dokumen | Ada | Ada | = |
| 1.5. | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | % | 100 | Konsisten | = |

| No | Aspek / Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Target Tahun 2024 | Capaian tahun 2024 | Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6. | Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD | % | 100 | Konsisten | = |
| 1.7. | Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW | % | Sesuai | Sesuai | = |
| 2. | Keuangan | | | | |
| 2.1. | Opini BPK terhadap laporan keuangan | Opini | WTP | WTP | = |
| 2.2. | Persentase SILPA | % | 3,05 | 14,30 | > |
| 2.3. | Persentase belanja pendidikan (20%) | % | 20 | 19,44 | < |
| 2.4. | Persentase belanja kesehatan (10%) | % | 10 | 11,77 | > |
| 2.5. | Penetapan APBD | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | = |
| 3. | Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | |
| 3.1. | Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan | Jam | 20 JPL | 48 | > |
| 3.2. | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | % | 3,55 | 9,08 | > |
| 3.3. | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | % | 97 | 128 | > |
| 3.4. | Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah | Orang | 42 | 43 | > |
| 3.5. | Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah | Jabatan | 1.095 | 1.095 | = |
| 3.6. | Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah | Orang | 6.850 | 10.558 | > |
| 3.7 | Persentase Pelanggaran Pegawai | % | 0 | 0,09 | < |
| 4. | Penelitian dan Pengembangan | | | | |
| 4.1. | Persentase implementasi rencana kelitbangan. | % | 100 | 100 | = |
| 4.2. | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. | % | 100 | 43,97 | < |
| 4.3. | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. | % | 100 | 50 | < |
| 4.4. | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. | % | 100 | 43,97 | < |

| No | Aspek / Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Target Tahun 2024 | Capaian tahun 2024 | Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Pengawasan | | | | |
| 5.1. | Persentase tindak lanjut temuan(Tahun 2022 indikator jumlah temuan BPK digabung dengan jumlah Temuan APIP) | % | 57,87 | 84,41 | > |
| 5.2 | Jumlah temuan BPK | Jumlah | 22 | 16 | < |
| 6. | Sekretariat Dewan | | | | |
| 6.1. | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota | Dokumen | Ada | Ada | = |
| 6.2. | Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) | Dokumen | Ada | Ada | = |
| 6.3. | Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD | Dokumen | Ada | Ada | = |

### 2.2.3. Capaian SDGs

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Regulasi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals TPB/SDGs telah diatur dalam Paraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

TPB/SDGs yang merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;

5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan daerah yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkatan provinsi. Adapun capaian target TPB/SDGs tahun 2014-2019 dari 17 tujuan, 169 target 249 indikator, maka hasil evaluasi terdapat 44 Target 58 indikator yang tercapai. Untuk capaian realisasi tahun 2020 untuk SDGs terkait program dan kegiatannya untuk Kota Makassar kami tidak melaksanakan dikarenakan dokumen RAD SDGs berakhir di tahun 2019, sementara terdapat 2 tahun kekososngan pimpinan daerah dalam hal ini Wali Kota. Sementara penyusunan RAD SDGs harus selaras dengan dokumen RPJMD. Oleh karena itu RAD SDGs Kota Makassar baru tersusun di tahun 2021 setelah adanya Pimpinan Daerah (Walikota dan Wakil Walikota) sehingga RPJMD yang disusun di tahun 2021-2026 bisa selaras dengan dokumen RAD SDGs 2021-2026. Capaian target di Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel II.33.**
**Capaian Realisasi SDGs**
**Kota Makassar Tahun Anggaran 2024**

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | TAHUN 2024 | | STATUS CAPAIAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET | REALISASI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **TUJUAN 1 : MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN** | | | | | | | |
| **Target 1.2 : mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi sesuai dengan definisi nasional** | | | | | | | |
| 1.2.1 | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | Dinas Sosial | % | 4.27 | 4,97 |  | Secara umum mengalami kenaikan |
| | | Dinas Kesehatan | % | 4,27 | 4,97 |  | Secara umum mengalami kenaikan |
| **1.3 : Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan** | | | | | | | |
| 1.3.1(a) | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan | Dinas Kesehatan | % | 100 | 99,1 |  | |
| 1.3.1(d) | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan | Dinas Sosial | KK | 24000 | 31596 |  | |

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | TAHUN 2024 | | STATUS CAPAIAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET | REALISASI | | |
| **1.4 : Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi bau, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.** | | | | | | | |
| 1.4.1.(a) | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan | Dinas Kesehatan | % | 98,53 | 100 |  | Secara umum mengalami kenaikan |
| 1.4.1.(c) | Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. | DP2KB | % | 68,4 | 70,2 |  | Secara umum mengalami kenaikan |
| 1.4.1.(d) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan | Dinas PU | % | 100 | 82,96 |  | |
| 1.4.1.(e) | persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan | Dinas PU | % | 55,62 | 89,63 |  | Secara umum mengalami kenaikan |
| 1.4.1.(g) | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat. | Dinas Pendidikan | % | 99,63 | 85,36 |  | |
| 1.4.1.(h) | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat | Dinas Pendidikan | % | 89,01 | 73,99 |  | |

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | TAHUN 2024 | | STATUS CAPAIAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET | REALISASI | | |
| 1.4.1.(j) | persentase penduduk usia 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran | Disdukcapil | % | 99 | 98,68 |  | |
| **1.5 : Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana** | | | | | | | |
| 1.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | Damkar | Kejadian | 150 | 150 |  | |
| | | BPBD | % | 100 | 96,94 |  | |
| 1.5.1.(b) | Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial | Dinas Sosial | % | 100 | 100 |  | |
| 1.5.1.(c) | Pendampingan psikososial korban bencana sosial | Dinas Sosial | Jiwa | 100 | 137 |  | |
| **1.a : Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.** | | | | | | | |
| 1.a.1* | Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan. | Dinas Ketahanan Pangan | Klp | 500 | 283 |  | |
| **TUJUAN 2 : MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN** | | | | | | | |

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | TAHUN 2024 | | STATUS CAPAIAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET | REALISASI | | |
| **2.1 : Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi , terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.** | | | | | | | |
| 2.1.1. (a) | Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. | Dinas Kesehatan | % | 5,25 | 100 |  | |
| 2.1.2* | Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan | Dinas Ketahanan Pangan | % | 11,76 | 11.76 |  | |
| **2.2 : Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang telah disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus dibawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula** | | | | | | | |
| 2.2.1* | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek ) pada anak dibawah lima tahun/balita | Dinas Ketahanan Pangan | Klp | 300 | 283 |  | |
| | | DP2KB | % | 70,79 | 6,12 |  | |
| 2.2.2 | Prevalensi malnutrisi (wasting/obesitas) pada anak balita | Dinas Kesehatan | % | 5,25 | 12,07 |  | |
| 2.2.2.(b) | Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapatkan ASI eksklusif | Dinas Kesehatan | % | 55 | 78,81 |  | |

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | TAHUN 2024 | | STATUS CAPAIAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET | REALISASI | | |
| 2.2.2. (c) | Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai ; dan tingkat konsumsi ikan | Dinas Ketahanan Pangan | Skor | 85 | 89,73 |  | |
| **2.c : Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.** | | | | | | | |
| 2.c.1 | Indikator anomali harga pangan | Dinas Ketahanan Pangan | Energi | Energi:2.700 Protein:127 | Energi:2812 Protein: 88,21 |  | |
| **2.3 : Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang amandan sama terhadap lahan, sumberdaya produktif, dan input lainnya, pengetahuan,jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non pertanian.** | | | | | | | |
| 2.3.1* | NilaiTambah Pertanian di bagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah pertenaga kerja). | Dinas Perikanan dan Pertanian | Ton | 7,0 Ton Per Hektar Pertahun | 6,5 Ton Perhektar Pertahun |  | |
| 2.3.2 | Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut jenis dan status adat. | Dinas Perikanan dan Pertanian | Ton | 7,0 Ton Per Hektar Pertahun | 6,5 Ton Perhektar Pertahun |  | |
| **TUJUAN 3 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA** | | | | | | | |

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | TAHUN 2024 | | STATUS CAPAIAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET | REALISASI | | |
| **3.1 : Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup** | | | | | | | |
| 3.1.1 | Angka Kematian Ibu (AKI) | Dinas Kesehatan | % | 28,63 | 76,43 |  | |
| 3.1.2 | Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih | Dinas Kesehatan | % | 100 | 100 |  | |
| 3.1.2.(a) | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. | Dinas Kesehatan | % | 100 | 100 |  | |
| **3.2 : Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000** | | | | | | | |
| 3.2.1 | Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000 Kelahiran Hidup | Dinas Kesehatan | | 0,91 | 0,08 |  | |
| 3.2.2 | Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 Kelahiran Hidup | Dinas Kesehatan | | 0,91 | 5,18 |  | |
| 3.2.2.(a) | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup | Dinas Kesehatan | | 0,91 | 0,80 |  | |

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | TAHUN 2024 | | STATUS CAPAIAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET | REALISASI | | |
| **3.3 : Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya** | | | | | | | |
| 3.3.1.(a) | Prevalensi HIV pada populasi dewasa | Dinas Kesehatan | | 0,035 | 0,06 |  | |
| 3.3.2.(a) | Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk | Dinas Kesehatan | | 0,188 | 0,06 |  | |
| 3.3.3 | Kejadian Malaria per 1000 orang | Dinas Kesehatan | | 0,01 | 0,05 |  | |
| 3.4 : Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan | | | | | | | |
| 3.4.1.(a) | Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun | Dinas Kesehatan | | 1,4 | **N/A** | | Untuk Realisasi Tahun 2024 data belum tersedia |
| 3.4.1.(b) | Prevalensi tekanan darah tinggi | Dinas Kesehatan | | 2,4 | 18,6 |  | |
| 3.4.1.(c) | Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun | Dinas Kesehatan | data tidak tersedia dalam format pelaporan rutin | | | | |
| 3.4.2.(a) | Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa | Dinas Kesehatan | | 1 | **1** |  | |

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | TAHUN 2024 | | STATUS CAPAIAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET | REALISASI | | |
| 3.5 : Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan | | | | | | | |
| 3.5.1.(e) | Prevalensi penyalahgunaan narkoba | Dinas Kesehatan | data tidak tersedia dalam format pelaporan rutin | | | | |
| 3.5.2 | Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir | Dinas Kesehatan | data tidak tersedia dalam format pelaporan rutin | | | | |
| 3.7 : Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. | | | | | | | |
| 3.7.1 | Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. | DP2KB | | 68,4 | 31,23 | ▼ | |
| 3.8 : mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan askes terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang | | | | | | | |
| 3.8.2.(a) | Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) | Dinas Kesehatan | | 100 | 99,1 | ● | |

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | TAHUN 2024 | | STATUS CAPAIAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET | REALISASI | | |
| 3.a : Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat | | | | | | | |
| 3.a.1 | Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun | Dinas Kesehatan | | 19,82 | 0,36 |  | |
| 3.b : Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua | | | | | | | |
| 3.b.1.(a) | Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas | Dinas Kesehatan | | 100 | 100 |  | |
| 3.c : Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil | | | | | | | |
| 3.c.1 | Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan | Dinas Kesehatan | | 1,51 | 0,07 |  | |
| **TUJUAN 4 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA** | | | | | | | |
| **4.1 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.** | | | | | | | |
| 4.1.1.(a) | Persentase SD/MI berakreditasi minimal B. | Dinas Pendidikan | | 82,35 | 86,47 |  | |
| 4.1.1.(b) | Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B | Dinas Pendidikan | | 75,20 | 72,5 |  | |

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | TAHUN 2024 | | STATUS CAPAIAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET | REALISASI | | |
| 4.1.1.(d) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat | Dinas Pendidikan | | 100 | 93,09 |  | |
| 4.1.1.(e) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat | Dinas Pendidikan | | 100 | 86,32 |  | |
| 4.1.1.(f) | Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun | Dinas Pendidikan | | 12 | 11,57 |  | |
| **4.2 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini,pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar** | | | | | | | |
| 4.2.2.(a) | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Dinas Pendidikan | | 50,91 | 34,29 |  | |
| **4.4 : Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.** | | | | | | | |
| 4.4.1 | Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). | Dispora | | 150 | 520 |  | |

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | TAHUN 2024 | | STATUS CAPAIAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET | REALISASI | | |
| **4.5 : Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan** | | | | | | | |
| 4.5.1 | Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi | Dinas Pendidikan | | 100 | SD/MI = 100,49 SMP/MTs = 105,50 |  | |
| **4.6 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi** | | | | | | | |
| 4.6.1 | Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin | Dinas Perpustakaan | % | 60,00% | 78,99% |  | |

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | TAHUN 2024 | | STATUS CAPAIAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET | REALISASI | | |
| 4.6.1.(a) | Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun | Dinas Pendidikan | | 100 | 98,84 |  | |
| 4.6.1.(b) | Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun | Dinas Pendidikan | | 100 | 15-24=100 |  | |
| **4.a : Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dangender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.** | | | | | | | |
| 4.a.1* | Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH) | Dinas Pendidikan | | (a) listrik=96,5% (b) internet untuk tujuan pengajaran=91,5%, (c) komputer untuk tujuan pengajaran= 30%, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa | (a) listrik=100% (b) internet untuk tujuan pengajaran=98,14%, (c) komputer untuk tujuan pengajaran= 73,93%, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas=8,6%, (e) air minum layak=100%, |  | |

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | TAHUN 2024 | | STATUS CAPAIAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET | REALISASI | | |
| | | | | disabilitas =3,5, (e) air minum layak=82, 5%, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin= 65%, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)= 20% | (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin=93,27 %, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)=100 % | | |

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | TAHUN 2024 | | STATUS CAPAIAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET | REALISASI | | |
| 4.c : Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil | | | | | | | |
| 4.c.1* | Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik. | Dinas Pendidikan | | PAUD= 38.49% SD= 45.83% SMP= 47.03% | PAUD= 34,46% SD= 35,23% SMP= 41,33% |  | |
| **TUJUAN 5 : MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN** | | | | | | | |
| **5.1 : mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dimanapun** | | | | | | | |
| 5.1.1 | Jumlah Kebijakan yang responsive gender mendukung pemberdayaan Perempuan | DP3A | % | 85 | 100 |  | |
| **5.2 : Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya** | | | | | | | |
| 5.2.1.a | Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. | DP3A | % | 100 | 100 |  | |
| 5.2.2 | Proporsi Perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 Tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir | DP3A | % | 100 | 100 |  | |

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | TAHUN 2024 | | STATUS CAPAIAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET | REALISASI | | |
| 5.2.2.a | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. | DP3A | % | 100 | 100 |  | |
| **5.5 : Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.** | | | | | | | |
| 5.5.1 | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah. | DP3A | % | 31 | 13 |  | |
| **5.6 : Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi- konferensi tersebut.** | | | | | | | |
| 5.6.1 | Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi. | DP2KB | | 68,4 | 5,25 |  | |

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | TAHUN 2024 | | STATUS CAPAIAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET | REALISASI | | |
| **TUJUAN 6 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERAT PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA** | | | | | | | |
| **6.1 : Pada Tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua** | | | | | | | |
| 6.1.1 (a) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak | Dinas PU | % | 100 | 82,96 |  | |
| | | Dinas Kesehatan | % | 100 | 83,49 |  | |
| 6.1.1 (b) | Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau | Dinas PU | % | 100 | 83,49 |  | |
| 6.1.1 (c) | Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan | Dinas PU | % | 100 | 83,49 |  | |
| **6.2 : Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.** | | | | | | | |
| 6.2.1.(a) | Proporsi Populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air | Dinas Kesehatan | % | 100 | 81,62 |  | |

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | TAHUN 2024 | | STATUS CAPAIAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET | REALISASI | | |
| 6.2.1 (b) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak | Dinas PU | % | 55,62 | 89,63 |  | |
| 6.2.1.(c) | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | Dinas Kesehatan | % | 100 | 92,24 |  | |
| 6.2.1 (e) | Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal | Dinas PU | % | 55,62 | 89,63 |  | |
| 6.2.1 (f) | Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat | Dinas PU | % | 55,62 | 89,63 |  | |
| **6.3 : Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.** | | | | | | | |
| 6.3.1 (a) | Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | Dinas PU | % | 55,62 | - |  | |

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | TAHUN 2024 | | STATUS CAPAIAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET | REALISASI | | |
| 6.3.1 (b) | Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja | Dinas PU | % | 55,62 | 60,70 |  | |
| 6.3.2 (b) | Kualitas air sungai sebagai sumber air baku | DLH | | 59,11 | 58,7 |  | |
| **TUJUAN 8 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA** | | | | | | | |
| **8.1 : Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk do negara kurang berkembang** | | | | | | | |
| 8.1.1 | Laju pertumbuhan PDB per kapita | PTSP | % | 100% | 68,81% |  | |
| **8.3 : Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan,kreativitas dan inovasi dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro,kecil dan menengah,termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan** | | | | | | | |
| 8.3.1 | Persentase tenaga kerja formal | Disnaker | % | 70,00% | 59,70% |  | |
| 8.3.1 (c) | Persentase akses UMKM (Usaha Mikro ,Kecil dan Menengah) ke layanan Keuangan | Dinas Koperasi &UKM | % | 26,83 | 21 |  | |

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | TAHUN 2024 | | STATUS CAPAIAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET | REALISASI | | |
| **8.5 : Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.** | | | | | | | |
| 8.5.2* | Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. | Disnaker | % | 8,81 | 9,71 | | |
| **8.9 : Pada Tahun 2030, meyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal** | | | | | | | |
| 8.9.1* | Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB | Dinas Pariwisata | % | 1,31 | 2,16 | | |
| 8.9.1.(a) | Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara | Dinas Pariwisata | Orang | 33.200 | 160.295 | | |
| 8.9.1.(b) | Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara | Dinas Pariwisata | Orang | 1.906.950 | 5.684.295 | | |
| | | Dinas Kebudayaan | % | 100 | 11000 | | |
| 8.9.2* | Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja. | Dinas Pariwisata | Orang | 6.165 | 6.165 | | |

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | TAHUN 2024 | | STATUS CAPAIAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET | REALISASI | | |
| **TUJUAN 9 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI** | | | | | | | |
| **9.1 : Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.** | | | | | | | |
| 9.1.2.(b) | Jumlah dermaga penyeberangan. | Dishub | | 10 | 2 |  | |
| **9.5 : Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.** | | | | | | | |
| 9.5.1 | Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB | Balitbangda | % | 90% | 100% |  | |
| 9.5.2. | Jumlah peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk. | Balitbangda | % | 90% | 100% |  | |
| **9.b : Mendukung pengembangan teknologi domestic, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industry dan peningkatan nilai tambah komoditas** | | | | | | | |
| 9.b.1. | Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah | Balitbangda | % | 100% | 100% |  | |

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | TAHUN 2024 | | STATUS CAPAIAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET | REALISASI | | |
| **TUJUAN 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PEMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN** | | | | | | | |
| **11.1 : Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.** | | | | | | | |
| 11.1.1 (a) | Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau | Dinas Perumahan | % | 100% | 95% | | |
| | | Kec. Panakukkang | % | 70% | 74,97% | | |
| | | Kec. Manggala | % | 68% | 70% | | |
| | | Kec. Tallo | % | 70% | 70% | | |
| | | Kec. Biringkanaya | % | 70% | 70% | | |
| | | Kec. Tamalanrea | % | 70% | 65% | | |
| | | Kec. Ujung Tanah | % | 100% | 60% | | |
| | | Kec. Wajo | % | 70% | 17,8% | | |
| | | Kec. Mariso | % | 70% | 80% | | |
| | | Kec. Mamajang | % | 70% | | | |
| | | Kec. Ujung Pandang | % | 70% | 70% | | |

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | TAHUN 2024 | | STATUS CAPAIAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET | REALISASI | | |
| | | Kec. Makassar | % | 70% | 26% | | |
| | | Kec. Bontoala | % | 70% | 74,97% | | |
| | | Kec. Rappocini | % | 70% | 65% | | |
| | | Kec. Tamalate | % | 70% | | | |
| | | Kec. Sangkarrang | % | 70% | 70% | | |
| 11.1.1.(b) | jumlah Kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP) | Dinas Pertanahan | | 75% | N/A |  | Tidak ada data terkait Target TPB ditahun 2024 |
| **11.2 : Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.** | | | | | | | |
| 11.2.1.(a) | Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan. | Dishub | % | 5% | 4,70% |  | |
| **11.4 : Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia** | | | | | | | |
| 11.4.1 (a) | Jumlah Kota Pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil | dinas kebudayaan | | 100 | 55 |  | |

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | TAHUN 2024 | | STATUS CAPAIAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET | REALISASI | | |
| **11.5 : Pada Tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak , dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB Global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.** | | | | | | | |
| 11.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang | BPBD | % | 100 | 96,94 |  | |
| **11.6 : Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.** | | | | | | | |
| 11.6.1 .(a) | Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani | Kec. Panakukkang | % | 85% | 85% |  | |
| | | Kec. Manggala | % | 94% | 84% | | |
| | | Kec. Tallo | % | 85% | 85% | | |
| | | Kec. Biringkanaya | % | 85% | 85% | | |
| | | Kec. Tamalanrea | % | 85% | 82% | | |
| | | Kec. Ujung Tanah | % | 100% | 98% | | |
| | | Kec. Wajo | % | 85% | 96,67% | | |
| | | Kec. Mariso | % | 85% | 90% | | |
| | | Kec. Mamajang | % | 85% | | | |

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | TAHUN 2024 | | STATUS CAPAIAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET | REALISASI | | |
| | | Kec. Ujung Pandang | % | 85% | 85% | | |
| | | Kec. Makassar | % | 85% | 79% | | |
| | | Kec. Bontoala | % | 85% | 85% | | |
| | | Kec. Rappocini | % | 95% | 94,80% | | |
| | | Kec. Sangkarrang | % | 85% | 85% | | |
| | | Kec. Tamalate | % | 98% | 95% | | |
| | | DLH | % | 71% | 76,7% | | |
| **11.7 : Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.** | | | | | | | |
| 11.7.1 (a) | Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang. | DLH | - | - | - | | |
| 11.7.1 (a) | Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan | Dinas Tata ruang | % | 15,234% | 13,92% | | |

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | TAHUN 2024 | | STATUS CAPAIAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET | REALISASI | | |
| | metropolitan dan kota sedang. | | | | | | |
| **TUJUAN 12 : MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN** | | | | | | | |
| **12.4 : Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.** | | | | | | | |
| 12.4.2 (a) | Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) | DLH | | Limbah B3 = 8.075,52 Ton B3 = 1.636.799,78 Ton | 6.476,34 Ton | ▼ | |
| **12.5 : Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.** | | | | | | | |
| 12.5.1 (a) | Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. | DLH | | 65.549 | 7601,7 | ▼ | |
| **12.b : Mengembangan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal** | | | | | | | |

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | TAHUN 2024 | | STATUS CAPAIAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET | REALISASI | | |
| 12.b.1 | Jumlah strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan dan pelaksanaan rencana aksi, dengan perangkat monitoring dan evaluasi yang telah disepakati | Dinas Pariwisata | | 1 | 1 | | |
| **TUJUAN 13 : MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN** | | | | | | | |
| **13.2 : Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.** | | | | | | | |
| **13.2.1 (a)** | Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). | **DLH** | | 1 | 1 | | |
| **TUJUAN 15 : MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI** | | | | | | | |
| **15.9 : Pada tahun 2020, mengitegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.** | | | | | | | |
| **15.9.1 (a)** | Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati. | **DLH** | | 2 | 2 | | |

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | TAHUN 2024 | | STATUS CAPAIAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET | REALISASI | | |
| **TUJUAN 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN** | | | | | | | |
| 16.2 : Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. | | | | | | | |
| 16.2.3.a | Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun | DP3A | % | 100% | 100% |  | |
| 16.2.1.b | Prevalensi kekerasan terhadap anak lakilaki dan anak perempuan. | DP3A | % | 100% | 100% |  | |
| 16.3 : Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua | | | | | | | |
| 16.3.1.(b) | Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi. | HUKUM & HAM | Perkara | 12 Perkara | 6 Perkara |  | |
| 16.5 : Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya. | | | | | | | |
| 16.5.1.(a) | Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). | Inspektorat | Laporan | 21 Laporan | 23 |  | |
| 16.6 : Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. | | | | | | | |

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | TAHUN 2024 | | STATUS CAPAIAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET | REALISASI | | |
| 16.6.1.(A) | Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). | BPKAD | WTP | WTP | WTP |  | |
| 16.6.1. (D) | Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). | BKPSDMD | % | 62 | 76,8 |  | |
| 16.7 : Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan. | | | | | | | |
| 16.7.2.(a) | Indeks Lembaga Demokrasi. | Kesbangpol | % | | | | |
| 16.9 : Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran. | | | | | | | |
| 16.9.1* | Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil | Dukcapil | % | 99 | 98,68 |  | |
| 16.9.1 (a) | Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah | Dukcapil | % | 99 | 98,68 |  | |

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | TAHUN 2024 | | STATUS CAPAIAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET | REALISASI | | |
| 16.9.1 (b) | Persentase anak yang memiliki akta kelahiran | Dukcapil | % | 99 | 98,68 |  | |
| 16.10 : Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional. | | | | | | | |
| 16.10.2.(a) | Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | DISKOMINFO | | 800 | 24 |  | |
| 16.b : Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan. | | | | | | | |
| 16.b.1.(a) | Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. | Satpol PP | % | 100% | 100% |  | |
| **TUJUAN 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN** | | | | | | | |
| **17.1 : Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.** | | | | | | | |

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | TAHUN 2024 | | STATUS CAPAIAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET | REALISASI | | |
| 17.1.1* | Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. | BAPENDA | Rp. | Rp 4.997.480.596.068,00 | Rp 4.205.629.621.340,50 | ▶ | |
| 17.1.1.(a) | Rasio penerimaan pajak terhadap PDB. | BAPENDA | Rp. | Rp 1.730.000.000.000,00 | Rp 1.401.378.637.369,17 | ▶ | |
| **17.5 : Mengadopsi dan melaksanakan pemerintahan yang mempromosikan investasi bagi negara kurang berkembang** | | | | | | | |
| 17.5.1 | Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara-negara kurang berkembang | PTSP | | 720 Investor dan Rp. 2.734.750.000.000 | 90 Investor PMA & 280 Investor PMDN,Rp.1,8 Triliun dan US$ 28,4 Juta | ▶ | |

**KETERANGAN:**

● Target Tahun Berjalan Dapat Tercapai

▶ Tren capaian naik dari tahun sebelumnya walaupun belum mencapai target tahun berjalan

▼ Tren capaian turun dari tahun sebelumnya dan target tahun berjalan tidak tercapai

## 2.3. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Dengan Prioritas Nasional Tahun 2024

### 2.3.1. Prioritas Nasional

#### 2.3.1.1. Penguatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kesehatan

Sumber Daya Manusia bidang pendidikan adalah kompetensi fungsional yang dimiliki tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya, dalam melaksanakan tugasnya SDM dituntut untuk mengaktualisasikan kemampuannya baik daya fikir maupun daya fisik. Sumber daya manusia dalam pendidikan sangat penting dan menjadi hal utama yang harus mendapat perhatian dari semua pemegang kebijakan.jika mutu pendidikan ingin mencapai tingkat pencapaian terbaik maka sumber daya manusia pun harus ditingkatkan, SDM didalam pendidikan terdiri dari pendidik dan tenaga kependidikan, menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa pendidik adalah tenaga profesional, merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing, melatih, meneliti dan mengabdi kepada masyarakat.

Pengembangan sumber daya manusia dalam pendidikan adalah proses peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan (guru, staf) melalui berbagai kegiatan pendidikan formal, pelatihan dan pengembangan karier yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan produktifitas dalam mencapai tujuan pendidikan. Penguatan dan pengembangan SDM pendidikan merupakan kunci dalam keberhasilan proses belajar mengajar. Selain itu, manfaat yang dapat diperoleh dari penguatan dan pengembangan SDM dalam pendidikan diantaranya adalah peningkatan kualitas proses belajar mengajar, peningkatan kinerja tenaga kependidikan, meningkatkan citra lembaga pendidikan, meningkatkan produktivitas dan lainnya.

Sumber Daya manusia Kesehatan adalah semua tenaga kerja yang terlibat dalam pelayanan kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, ahli gizi, apoteker dan tenaga kesehatan lainnya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2012 tentang sistem kesehatan nasional dijelaskan bahwa untuk melaksanakan upaya kesehatan diperlukan sumber daya manusia kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya serta terdistribusi secara adil merata.

Penguatan Sumber Daya Manusia kesehatan merupakan proses untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan yang dapat dilakukan berbagai upaya termasuk pendidikan, pelatihan, pengembangan karier dan peningkatan infrastruktur kesehatan. Ada berbagai cara untuk penguatan SDM kesehatan adalah pendidikan dan pelatihan. Pendidikan formal diberbagai tingkatan yaitu SMA, D3, S1, S2 dan S3. Untuk mempersiapkan tenaga kesehatan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Pendidikan dan Pelatihan lanjutan seperti workshop, training dan seminar dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan terkini sesuai kebutuhan. Mengikuti magang difasilitasi kesehatan untuk mendapatkan pengalaman praktis. Dan berikutnya adalah pengembangan karier dapat dilakukan seperti rotasi kerja antar fasilitas kesehatan untuk meningkatkan pengalaman dan pengetahuan, peningkatan jabatan dan tanggung jawab sesuai dengan kompetensi. Pembangunan atau Peningkatan infrastruktur dan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit serta pengadaan alat kesehatan yang memadai juga penting untuk mendukung penguatan Sumber daya manusia kesehatan.

Dinas Kesehatan Kota Makassar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh 1.355 orang pegawai yang tersebar di Dinas Kesehatan, 47 puskesmas, 1 gudang farmasi. Jumlah tenaga lingkup Dinas Kesehatan Kota Makassar secara umum

cukup memadai dan jika merujuk pada standar Permenkes nomor 77 tahun 2014 maka jumlah ketenagaan sudah memenuhi standar.
Untuk rumah sakit umum daerah yang dimiliki Kota Makassar hanya satu dan Pada tahun 2024 rasio dokter adalah 0,48 dokter perawat 100.000 penduduk, adapun rasio ideal dokter terhadap penduduk adalah1:2500 artinya satu orang dokter melayani 2500 penduduk.
Jumlah sarana kesehatan Kota Makassar tahun 2024 adalah puskesmas 47 Puskesmas Pembantu 35, puskesmas keliling 45, rumah sakit 1 dan gudang farmasi 1.

#### 2.3.1.2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program Makan Bergizi (MBG) dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN), yang merupakan lembaga pemerintah nonkementerian. BGN ditunjuk melalui Perpres Nomor 83 Tahun 2024 untuk melaksanakan pemenuhan gizi nasional. Di lapangan, program ini diimplementasikan oleh Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG), yang di bawah pengawasan BGN. Program MBG dijalankan dengan memperhatikan aspek kerja sama lintas sektor, yaitu adanya kolaborasi antara BGN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dikdasmen, Kementerian Sosial, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya untuk implementasi program yang efektif dan berkelanjutan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Prabowo Subianto ditargetkan berlangsung sampai akhir tahun 2029 untuk mencakup 100% penerima manfaat. Pada tahap awal (2025), program ini ditargetkan menjangkau sekitar 40% penerima, dan akan terus bertambah hingga mencapai 80% pada tahun 2026. Pada akhir tahun 2025, pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat mencapai 17 juta orang.

Program MBG resmi dimulai pada 6 Januari 2025. Implementasinya dilakukan secara bertahap hingga mencakup seluruh jenjang pendidikan, dimulai dari PAUD hingga SMA/sederajat di semua wilayah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kesinambungan fiskal. Dalam pelaksanaannya, bahan makan yang diolah juga menggunakan sumber pangan lokal. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah bergulir di berbagai sekolah di Indonesia. MBG merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi bagi anak sekolah. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memberdayakan UMKM dan ekonomi kerakyatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas BGN diarahkan kepada empat kelompok yaitu. 1) peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren. 2) anak usia di bawah lima tahun. Kelompok ini termasuk menjadi sasaran utama program makan bergizi gratis lantaran balita merupakan periode kritis dalam tumbuh kembang anak. Kekurangan gizi pada masa periode pertumbuhan ini dapat menyebabkan dampak yang tidak dapat dipulihkan. 3) ibu hamil. Pemenuhan gizi pada ibu hamil juga sangat penting. Gizi yang baik selama kehamilan memberi perlindungan bagi ibu hamil dan janin sebab dapat mencegah komplikasi kehamilan, kelahiran prematur, serta stunting pada bayi. Keempat, ibu menyusui. Gizi yang cukup pada ibu menyusui penting untuk produksi ASI yang berkualitas dan tumbuh kembang bayi yang optimal. Oleh sebab itu, kelompok ibu menyusui juga penting untuk diperhatikan dan menjadi sasaran program pemenuhan gizi oleh pemerintah.

Pemerintah Kota Makassar akan memberi dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden dalam upaya

intervensi stunting di Indonesia. Pemerintah Kota Makassar sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat akan berkontribusi dalam pelaksanaan MBG ini dan akan menugaskan satu orang perwakilan di setiap kecamatan untuk mengoordinasikan pelaksanaannya. Koordinasi ini rencananya akan dilakukan oleh sekretaris camat, yang sekaligus akan dijadikan sebagai Satuan Tugas (Satgas) MBG. Pemerintah Kota Makassar akan membuat aturan terkait pelaksanaan MBG, termasuk dalam pembangunan dapur Satuan Pelaksana Program Gizi. sejalan dengan visi Makassar sebagai kota yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan, di mana setiap warganya memiliki akses terhadap layanan dasar, termasuk pemenuhan gizi yang layak.

Di Makassar sudah ada tujuh titik lokasi dapur MBG yang sedang dalam proses pembangunan. Ini merupakan bagian dari total 80 titik kuota yang ditetapkan untuk Kota Makassar dan akan tersebar di beberapa kecamatan seluruh proses yang dilalui telah mengikuti pedoman dari pemerintah pusat. Mulai dari registrasi ke Badan Gizi Nasional, kesiapan lahan, hingga kepatuhan pada standar minimum investasi. setiap lokasi juga disesuaikan agar berada maksimal 30 menit dari titik distribusi, untuk menjamin ketepatan dan efisiensi layanan. Koordinasi akan dilaksanakan secara menyeluruh, dari tingkat kecamatan hingga RT/RW. Pemerintah Kota Makassar juga telah menginstruksikan seluruh OPD untuk mendukung kebutuhan teknis dan administratif demi kesuksesan program MBG. Mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, hingga Dinas Sosial akan bersinergi dalam menyusun strategi distribusi dan pendataan agar tepat sasaran.

Dukungan Pemerintah Kota Makassar tidak hanya responsif terhadap kebijakan pusat, tetapi juga proaktif menciptakan sistem pelaksanaan yang akuntabel, transparan, dan tepat sasaran. mencerminkan keseriusan dan sinergitas lintas OPD di lingkup Pemkot Makassar demi terwujudnya program MBG secara utuh dan tepat sasaran. Di Makassar sudah ada tujuh titik lokasi dapur MBG yang sedang dalam proses pembangunan. Ini merupakan bagian dari total 80 titik kuota yang ditetapkan untuk Kota Makassar dan akan tersebar di beberapa kecamatan.

Uji coba program MBG berlangsung serentak pada Senin (6/1/2025). di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Manggala dan Kecamatan Mamajang dengan menyasar 10.000 siswa, sepuluh (10) sekolah yang terpilih di Makassar yakni SMAN 3 Makassar, SMAN 10 Makassar, SMPN 1 Makassar, SMPN 23 Makassar, SMPN 17 Makassar, SDN Cendrawasih, SDI Sambung Jawa, KB-TKIT Wihdatul Ummah, SDI Tamajene, dan SDI Tamamaung IV. Dengan adanya program MBG diharapkan dapat Meningkatkan status gizi siswa**,** Meningkatkan kualitas Pendidikan dan dapat menurunkan angka stunting serta menguruangi angka kemiskinan di Kota Makassar.

### 2.3.1.3. Pencegahan *Stunting* dan Kemiskinan ekstrim

**Pencegahan *Stunting***

Stunting adalah masalah gizi yang serius yang dapat mempengaruhi masa depan anak. Menurut data dari World Health Organization (WHO), stunting disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang memadai, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi sosial yang baik. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan fisik anak, tetapi juga perkembangan kognitif mereka. Mencegah stunting sejak dini adalah langkah penting yang dapat memastikan masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak. Pencegahan stunting dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari memenuhi kebutuhan gizi saat

hamil, memberikan ASI eksklusif, memastikan anak mendapatkan makanan pendamping ASI (MPASI) yang bergizi, hingga menjaga kebersihan lingkungan.

Pemberdayaan Masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan. Masyarakat perlu didorong untuk mengidentifikasi faktor risiko stunting di lingkungan masing-masing dan berperan aktif dalam pencegahan. Pemerintah memiliki peran penting dalam memimpin, menginisiasi, dan memfasilitasi gerakan pencegahan stunting memastikan keterlibatan dan koordinasi antara semua sektor kunci yang bertanggung jawab atas pelaksanaan intervensi gizi. Dengan menerapkan berbagai upaya pencegahan stunting secara terpadu, diharapkan angka stunting di Kota Makassar dapat ditekan dan generasi penerus bangsa dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Stunting mulai terjadi saat masih berada dalam kandungan dan terlihat saat mereka memasuki usia dua tahun akibat kurangnya asupan gizi, di mana dalam jangka pendek dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisik pada anak, sehingga dalam jangka panjang mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak.

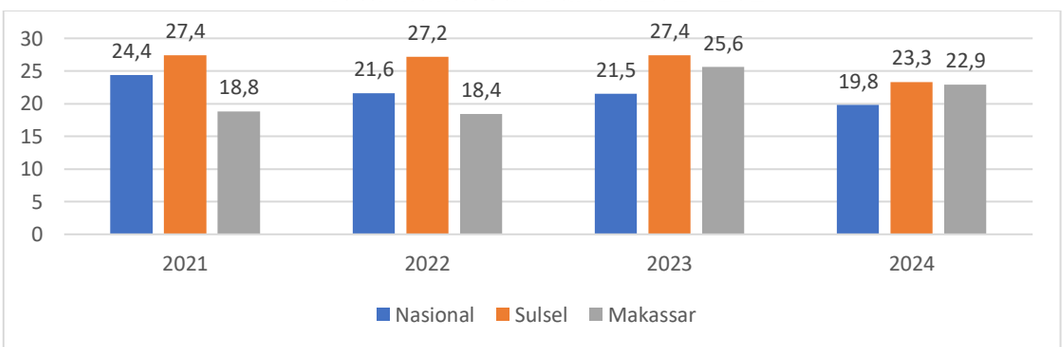
Berdasarkan data Survei Status Gizi Nasional (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di Indonesia di angka 21,6%. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 24,4%. Di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan juga mengalami penurunan angka prevalensi stunting pada tahun 2021 di angka 27,4 turun pada tahun 2022 menjadi 27,2 , demikian halnya di Kota Makassar angka prevalensi stunting hasil survey SSGI dari tahun 2021 di angka 18,8 mengalami penurunan menjadi 18,4. Tahun 2023 secara nasional prevalensi stunting turun dari 21,6 menjadi 21,5, namun Provinsi Sulawesi Selatan mengalami kenaikan menjadi 27,4 dari 27,2% yang paling meningkat angka stuntingnya adalah Kota Makassar yaitu dari 18,4 menjadi 25,6% Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.34.**
**Hasil Survey Status Gizi (SSGI)**
**Stunting Tingkat Nasional, Provinsi dan Kota**

| No | Uraian | 2021 (%) | 2022 (%) | 2023 (%) | 2024 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Makassar | 18,8 | 18,4 | 25,6% | 22,9 |
| 2 | Sulawesi Selatan | 27,4 | 27,2 | 27,4% | 23,3 |
| 3 | Nasional | 24,4 | 21,6 | 21,5 | 19,8 |

*Sumber : Survei status Gizi Indonesia Tahun 2024*

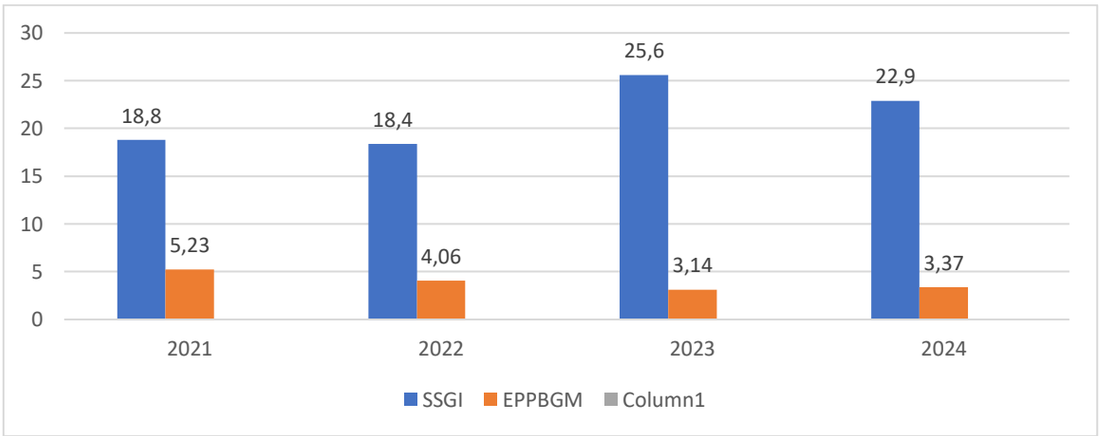
**Grafik II.18.**
**Prevalensi stunting Nasional, Sulawesi Selatan dan Kota Makassar Tahun 2021-2024**




*Sumber: Survei status Gizi Indonesia Tahun 2024*

Perhitungan prevelensi stunting menggunakan dua metode pengukuran berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM). Perbandingan data SSGI dan ePPGBM Kota Makassar Tahun 2021-2024 dapat dilihat grafik dibawah ini

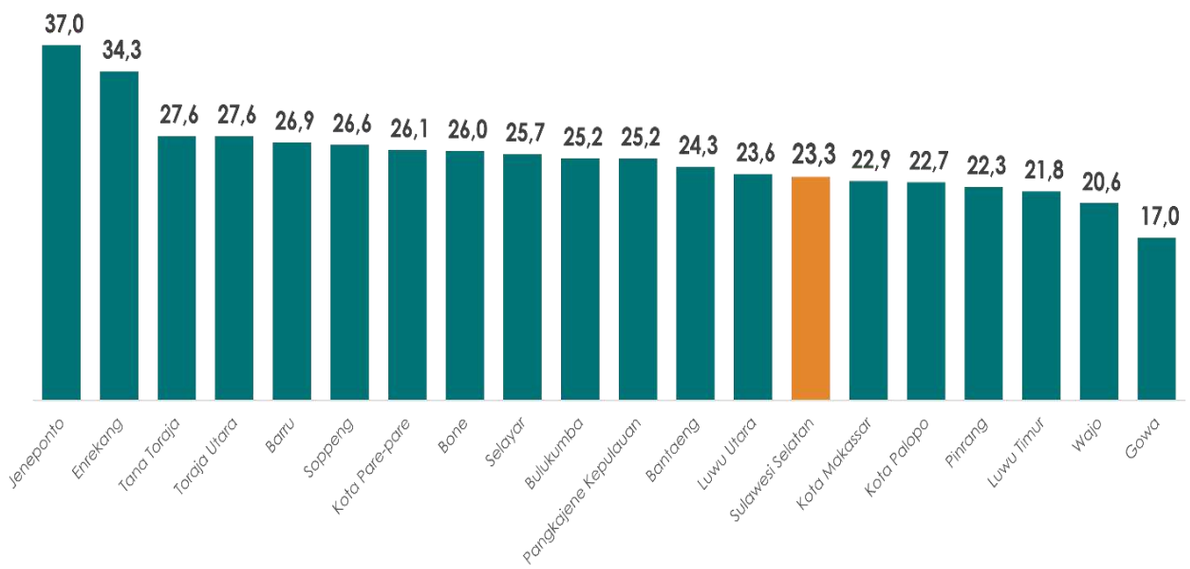
**Grafik II.19.**
**Perbandingan data SSGI dan EPPGBM terhadap Prevalensi Stunting**
**Kota Makassar Tahun 2021-2024**




*Sumber: Survei status Gizi Indonesia Tahun 2024dan Dinas Kesehatan Kota Makassar, Tahun 2025 (diolah)*

Untuk tahun 2024 perhitungan prevelensi stunting seluruh kab/kota se Sulawesi Selatan hasil SSGI Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Grafik II.20.**
**Perbandingan Prevalensi Stunting Kabupaten/Kota**
**se Sulawesi Selatan Tahun 2024**




*Sumber: Survei status Gizi Indonesia Tahun 2024*

**Kemiskinan Ekstrim**

Dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Kemiskinan

ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB, 1996). Berdasarkan Bank Dunia, Penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity), atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan (Bank Dunia, 2022). Secara sederhana apabila dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), maka jika kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya di bawah Rp1.288.680 per keluarga/bulan, maka keluarga tersebut termasuk kategori miskin ekstrem

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem untuk mengarahkan upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Indonesia bertujuan untuk menghapus kemiskinan ekstrem di seluruh Indonesia pada tahun 2024 melalui keterpaduan program dan kerja sama antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Inpres ini mengamanatkan kepada 22 kementerian, 6 lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Inpres tersebut ditindaklanjuti Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Data yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengidentifikasi dan menyasar keluarga miskin atau rentan dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Data P3KE merupakan pelengkap dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan digunakan untuk menentukan penerima bantuan sosial, terutama untuk program penghapusan kemiskinan ekstrem. Menko PMK) menetapkan tiga strategi utama untuk mengurangi kemiskinan ekstrem: pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pemetaan wilayah kantong kemiskinan. Keputusan ini memberikan pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan dan program yang mendukung P3KE secara terarah.

Kemiskinan ekstrim Kota Makassar sesuai dengan data yang ada dari tahun 2022 sampai 2024 mengalami penurunan seperti dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tahun 2022 miskin ekstrim berjumlah 85.461 jiwa dengan jumlah keluarga 15.653 turun menjadi 47.407 jiwa atau 7.860 keluarga. Tahun 2024 belum ada data yang dirilis baik dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan maupun Hasil Verval Data P3KE Desil 1, sehingga data yang digunakan adalah data Tahun 2023. Tahun 2022 kemiskinan ekstrim terbanyak di Kecamatan Tallo dengan jumlah keluarga 2.907 atau 15.844 jiwa. Urutan kedua adalah Kecamatan Tamalate dengan jumlah keluarga 2.348 atau 12.791 jiwa dan urutan ketiga adalah Kecamatan Panakkukang jumlah keluarga 1.916 atau 10.328 jiwa. Sementara tahun 2023 terbesar di Kecamatan Makassar dengan jumlah keluarga 1.391 atau 8.562 jiwa. Urutan kedua adalah Kecamatan Tallo dengan jumlah keluarga 1.245 atau 7.570 jiwa.

**Tabel II.35.**
**Data Kemiskinan Ekstrim Kota Makassar Tahun 2022-2024**

| No. | Kecamatan | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Keluarga | Jiwa | Keluarga | Jiwa | Keluarga | Jiwa |
| 1 | Biringkanaya | 905 | 5.130 | 669 | 4.132 | 669 | 4.132 |
| 2 | Tamalanrea | 640 | 3.475 | 210 | 1.262 | 210 | 1.262 |

| No. | Kecamatan | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Keluarga | Jiwa | Keluarga | Jiwa | Keluarga | Jiwa |
| 3 | Manggala | 656 | 3.763 | 134 | 854 | 134 | 854 |
| 4 | Rappocini | 826 | 4.610 | 594 | 3.636 | 594 | 3.636 |
| 5 | Tamalate | 2.348 | 12.791 | 1.204 | 6.995 | 1.204 | 6.995 |
| 6 | Makassar | 1.842 | 9.712 | 1.391 | 8.562 | 1.391 | 8.562 |
| 7 | Mamajang | 528 | 2.966 | 227 | 1.469 | 227 | 1.469 |
| 8 | Ujung Tanah | 886 | 4.768 | 418 | 2.606 | 418 | 2.606 |
| 9 | Ujung Pandang | 52 | 318 | 35 | 225 | 35 | 225 |
| 10 | Tallo | 2.907 | 15.844 | 1.245 | 7.570 | 1.245 | 7.570 |
| 11 | Bontoala | 617 | 3.573 | 339 | 2.094 | 339 | 2.094 |
| 12 | Mariso | 1.202 | 6.452 | 561 | 2.962 | 561 | 2.962 |
| 13 | Panakukkang | 1.916 | 10.328 | 630 | 3.828 | 630 | 3.828 |
| 14 | Wajo | 60 | 342 | 22 | 140 | 22 | 140 |
| 15 | Sangkarrang | 268 | 1.389 | 181 | 1.072 | 181 | 1.072 |
| **Jumlah** | | **15.653** | **85.461** | **7.860** | **47.407** | **7.860** | **47.407** |

*Sumber: Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Data P3KE Desil 1), Tahun 2022 dan Hasil Verval Data P3KE Desil 1 tahun 2023.*

**Grafik II.21.**
**Jumlah Keluarga Dan Jiwa Miskin Ekstrim**
**Kota Makassar Tahun 2022-2024**




*Sumber: 1. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Data P3KE Desil 1), Tahun 2022 dan Hasil Verval Data P3KE Desil 1 tahun 2023*

### 2.3.1.4. Pengendalian Inflasi Di Daerah

Perekonomian Indonesia dengan tren inflasi nasional yang menunjukkan penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Fenomena ini tentu membawa angin segar setelah sebelumnya masyarakat dan pemerintah dihadapkan pada tekanan harga yang cukup signifikan. Penurunan inflasi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia, stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, hingga terkendalinya harga komoditas global dan domestik. Efek musiman pasca hari-hari besar juga turut memberikan kontribusi dalam meredam tekanan inflasi. Tren penurunan inflasi nasional memiliki korelasi yang positif dan signifikan terhadap misi Kota Makassar untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja di tahun 2025. Inflasi yang terkendali menciptakan iklim ekonomi yang lebih stabil dan baik bagi pelaku usaha di Makassar. Dengan biaya produksi yang lebih stabil, perusahaan-perusahaan di berbagai sektor, mulai dari

perdagangan, pariwisata, hingga industri kecil dan menengah (IKM), dapat merencanakan investasi dan ekspansi usaha dengan lebih percaya diri. Hal ini berpotensi meningkatkan kapasitas produksi, menarik investasi baru, dan pada akhirnya menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat Makassar. Daya saing ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh stabilitas harga. Inflasi yang rendah menjaga daya beli masyarakat Makassar tetap kuat, sehingga permintaan terhadap barang dan jasa lokal terjaga. Ini memberikan insentif bagi bisnis lokal untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, dengan inflasi yang terkendali, biaya hidup di Makassar menjadi lebih terjaga, yang dapat menarik talenta dan tenaga kerja berkualitas untuk datang dan bekerja di kota ini, sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mendukung daya saing ekonomi.

Pemerintah Kota Makassar dapat memanfaatkan momentum penurunan inflasi nasional ini dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Misalnya, dengan memberikan insentif bagi investasi di sektor-sektor unggulan, mempermudah perizinan usaha, meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung bisnis, serta mengembangkan program-program pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Sinergi antara stabilitas ekonomi makro yang didukung oleh tren penurunan inflasi nasional dan kebijakan proaktif di tingkat daerah akan menjadi kunci keberhasilan Makassar dalam mencapai misinya untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan di tahun 2025. Stabilitas harga dan biaya yang lebih terkendali akan sangat mendukung efektivitas program pemberian akses modal usaha UMKM. Dengan inflasi yang rendah, nilai modal yang diberikan akan lebih terjaga, dan UMKM penerima bantuan akan memiliki kepastian yang lebih besar dalam perencanaan keuangan dan pengembangan usaha mereka. Risiko tergerusnya modal akibat kenaikan harga bahan baku atau biaya operasional yang tidak terduga juga akan berkurang. Pembentukan Gerai UMKM yang direncanakan di 153 kelurahan akan semakin optimal dalam kondisi inflasi yang terkendali. Masyarakat dengan daya beli yang stabil cenderung lebih tertarik untuk berbelanja produk-produk UMKM lokal yang tersedia di gerai-gerai tersebut. Selain itu, biaya operasional gerai, seperti biaya sewa tempat (jika ada) dan biaya pemasaran bisa lebih ditekan. Ini akan membantu keberlanjutan gerai dan meningkatkan potensi penjualan produk UMKM, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di tingkat kelurahan. Dengan harga kebutuhan pokok yang lebih stabil, PKL dapat menawarkan produk dengan harga yang lebih kompetitif dan menarik bagi konsumen. Lokasi yang strategis dan mudah diakses, ditambah dengan stabilitas harga, akan meningkatkan potensi pendapatan PKL dan menciptakan lapangan kerja informal yang signifikan. Pemerintah Kota Makassar dapat memanfaatkan momentum ini dengan memastikan regulasi yang mendukung keberadaan PKL di titik-titik akses tersebut, sekaligus memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan PKL.

#### 2.3.1.5 Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah

Peningkatan pertumbuhan perekonomian Kota Makassar pada tahun 2024 diarahkan agar selaras dengan Prioritas Nasional, khususnya yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, yaitu penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Sebagai kota metropolitan di Kawasan Timur Indonesia, Makassar memiliki posisi strategis dalam menopang pusat pertumbuhan ekonomi regional. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Makassar menetapkan arah kebijakan yang fokus pada penguatan

sektor produktif, peningkatan investasi, serta penciptaan lapangan kerja sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu langkah konkret adalah pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 sebesar Rp 5,7 triliun yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur publik, termasuk revitalisasi fasilitas umum dan pengembangan pusat pelayanan pemerintahan seperti *Makassar Government Center*. Pembangunan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi juga diharapkan menciptakan efek berantai terhadap perekonomian lokal, seperti peningkatan aktivitas UMKM, perdagangan, dan jasa konstruksi yang menjadi sektor andalan dalam menciptakan lapangan kerja. Di sisi lain, Pemerintah Kota Makassar juga merumuskan kebijakan yang berpihak pada peningkatan kualitas tenaga kerja dan produktivitas ekonomi lokal. Melalui penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) 2025–2029 dan penguatan program pelatihan vokasi, kota ini menargetkan penurunan tingkat pengangguran terbuka, terutama di kalangan usia produktif. Penguatan konektivitas antara dunia pendidikan dan dunia usaha juga menjadi prioritas dalam rangka mencetak SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan nasional.

Dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan Prioritas Nasional, Kota Makassar berupaya tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Melalui sinergi antara pembangunan fisik dan pengembangan sumber daya manusia, diharapkan Makassar dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mendukung pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia Timur.

#### 2.3.1.6 Dukungan swasembada pangan

Dukungan swasembada pangan Kota Makassar pada tahun 2024 diarahkan untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan masyarakat perkotaan, sebagai bagian dari upaya mendukung Prioritas Nasional dalam mewujudkan ketahanan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah pusat melalui RPJMN 2020–2024 menempatkan swasembada pangan sebagai salah satu fokus strategis untuk menjamin ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan nasional. Sebagai kota metropolitan yang memiliki tingkat konsumsi tinggi, Makassar berperan penting dalam memperkuat sistem distribusi pangan dan pengembangan produksi lokal, terutama melalui pendekatan urban farming dan pemanfaatan lahan terbatas di lingkungan perkotaan, masyarakat diarahkan untuk memanfaatkan pekarangan rumah dan ruang terbuka kota sebagai sumber produksi pangan lokal. Selain itu, penggunaan teknologi pertanian seperti hidroponik, vertikultur, dan akuaponik terus diperluas untuk mengatasi keterbatasan lahan dan meningkatkan hasil pertanian.

Pemerintah Kota Makassar juga memperkuat kemitraan antar daerah dalam skema kerja sama antardaerah (KAD), terutama dengan wilayah-wilayah penyangga seperti Kabupaten Gowa, Maros, dan Takalar yang berperan sebagai lumbung pangan. Kolaborasi ini penting untuk memastikan kelancaran pasokan beras, sayuran, dan komoditas penting lainnya ke Makassar, sekaligus menjaga kestabilan harga di tingkat konsumen. Upaya ini juga didukung oleh peningkatan kapasitas pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di sektor pertanian dan pangan. Pemerintah memberikan pelatihan, akses permodalan, serta fasilitasi pemasaran agar produk pangan lokal bisa bersaing dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang holistik dan partisipatif, kebijakan swasembada pangan Kota Makassar pada tahun 2024 bukan hanya mendukung pencapaian Prioritas Nasional, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat serta ketahanan sosial di tengah dinamika ekonomi global dan perubahan iklim.

#### 2.3.1.7 Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pengembangan industri kerajinan dan fasilitasi promosi serta pemasaran hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar selaras dengan prioritas nasional tahun 2024 dalam upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah yang inklusif dan memberdayakan masyarakat. Industri kerajinan memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi lokal karena mampu menciptakan nilai tambah dari sumber daya lokal, melestarikan warisan budaya, dan menyerap tenaga kerja, terutama di tingkat komunitas. Prioritas nasional tahun 2024 yang menekankan pada penguatan UMKM dan ekonomi kreatif menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sektor ini di Makassar.

Kebijakan pengembangan industri kerajinan di Makassar dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan kualitas produk melalui pelatihan desain dan teknik produksi, fasilitasi akses terhadap bahan baku yang berkelanjutan, hingga dukungan dalam pembentukan kelompok atau koperasi pengrajin untuk meningkatkan skala ekonomi dan daya tawar. Selain itu, inovasi dalam desain dan pemanfaatan teknologi juga perlu didorong agar produk kerajinan Makassar dapat bersaing di pasar yang lebih luas. Fasilitasi promosi dan pemasaran merupakan kunci untuk memastikan produk kerajinan UMKM dapat menjangkau konsumen yang lebih luas. Pemerintah Kota Makassar dapat berperan aktif dalam menciptakan platform promosi, baik secara daring maupun luring. Pembentukan galeri atau pusat pameran kerajinan, partisipasi dalam pameran tingkat regional dan nasional, serta pemanfaatan platform *e-commerce* dan media sosial dapat menjadi strategi efektif. Program pendampingan dalam branding, pengemasan, dan strategi pemasaran digital juga akan sangat membantu UMKM kerajinan untuk meningkatkan daya saing produk mereka. Sinergi dengan sektor pariwisata juga dapat dimanfaatkan dengan menjadikan produk kerajinan sebagai souvenir khas Makassar yang menarik bagi wisatawan. Dengan memprioritaskan pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi promosi serta pemasaran UMKM kerajinan, Kota Makassar tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tetapi juga melestarikan kekayaan budaya lokal dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Kebijakan ini sejalan dengan semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penguatan sektor UMKM yang menjadi fokus prioritas nasional tahun 2024, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kota Makassar secara keseluruhan.

## 2.4. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai Triwulan ke I

Perubahan RKPD Tahun 2025 menggunakan data capaian kinerja dan pendanaan sampai dengan triwulan I pada tahun berjalan yang dapat dijadikan sebagai bahan analisis pencapaian target anggaran dan kinerja. Dalam analisis ini menggunakan 3 (tiga) kategori capaian yaitu : Kategori Rendah dengan capaian 0-8 %, Kategori Sedang dengan capaian 8-16%, dan Kategori Tinggi yaitu lebih dari 16 %.

### 2.4.1. Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan I Tahun 2025

Informasi Pada sub bab ini akan disajikan persentase realisasi pendanaan dan realisasi fisik sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 yang diurutkan mulai dari realisasi tertinggi hingga terendah,

## Tabel II.36.
## Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Kota Makassar
## Tahun 2025 Hingga Triwulan I

| No | Nama OPD | APBD (Rp) | Realisasi Keuangan | | (%) Fisik |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (Rp) | (%) | |
| 1 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | Rp 28,050,644,842 | Rp 5,288,776,538 | 18.85 | 18.85 |
| 2 | Kecamatan Ujung Pandang | Rp 43,453,650,652 | Rp 7,689,598,209 | 17.70 | 17.70 |
| 3 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Rp 20,683,923,868 | Rp 3,518,808,758 | 17.01 | 19.35 |
| 4 | Kecamatan Tamalate | Rp 57,414,944,990 | Rp 9,713,878,343 | 16.92 | 16.92 |
| 5 | Kecamatan Rappocini | Rp 56,203,141,520 | Rp 9,479,246,250 | 16.87 | 16.87 |
| 6 | Kecamatan Panakkukang | Rp 57,703,073,803 | Rp 9,468,076,596 | 16.41 | 16.41 |
| 7 | Dinas Pemadam Kebakaran | Rp 54,529,935,454 | Rp 8,936,046,865 | 16.39 | 18.87 |
| 8 | Kecamatan Manggala | Rp 49,290,054,588 | Rp 7,900,850,152 | 16.03 | 17.74 |
| 9 | Kecamatan Mamajang | Rp 46,186,565,105 | Rp 7,370,027,046 | 15.96 | 20.69 |
| 10 | Satuan Polisi Pamong Praja | Rp 46,982,529,144 | Rp 7,500,100,787 | 15.96 | 15.96 |
| 11 | Kecamatan Ujung Tanah | Rp 33,676,066,823 | Rp 5,369,099,878 | 15.94 | 16.02 |
| 12 | Kecamatan Wajo | Rp 32,077,578,745 | Rp 5,062,662,761 | 15.78 | 15.78 |
| 13 | Dinas Perikanan dan Pertanian | Rp 42,682,113,787 | Rp 6,640,344,656 | 15.56 | 15.56 |
| 14 | Dinas Pendidikan | Rp 1,372,529,076,418 | Rp 204,781,177,824 | 14.92 | 14.95 |
| 15 | Kecamatan Tallo | Rp 54,497,795,230 | Rp 8,096,430,120 | 14.86 | 15.44 |
| 16 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp 42,069,049,553 | Rp 6,155,827,722 | 14.63 | 19.08 |
| 17 | Kecamatan Tamalanrea | Rp 46,127,643,769 | Rp 6,714,350,528 | 14.56 | 15.27 |
| 18 | Kecamatan Bontoala | Rp 40,770,128,835 | Rp 5,847,824,449 | 14.34 | 17.23 |
| 19 | Kecamatan Mariso | Rp 36,927,063,261 | Rp 5,260,669,474 | 14.25 | 14.25 |
| 20 | Kecamatan Makassar | Rp 57,505,235,307 | Rp 8,049,521,225 | 14.00 | 17.30 |
| 21 | Kecamatan Biringkanaya | Rp 57,055,955,671 | Rp 7,732,775,299 | 13.55 | 13.55 |
| 22 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Rp 18,721,283,227 | Rp 2,535,639,419 | 13.54 | 13.54 |
| 23 | Kecamatan Kepulauan Sangkarrang | Rp 14,617,140,004 | Rp 1,968,125,515 | 13.46 | 13.46 |
| 24 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Rp 22,721,782,335 | Rp 3,040,173,813 | 13.38 | 13.40 |
| 25 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | Rp 10,575,936,007 | Rp 1,372,825,268 | 12.98 | 19.05 |
| 26 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Rp 24,940,893,837 | Rp 3,215,672,422 | 12.89 | 14.36 |
| 27 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Rp 19,013,845,961 | Rp 2,419,613,941 | 12.73 | 12.73 |
| 28 | Dinas Perpustakaan | Rp 13,244,940,038 | Rp 1,654,008,224 | 12.49 | 12.49 |
| 29 | Dinas Perhubungan | Rp 143,419,942,130 | Rp 17,512,082,221 | 12.21 | 12.23 |
| 30 | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian | Rp 24,592,368,110 | Rp 2,971,129,291 | 12.08 | 19.41 |
| 31 | Dinas Sosial | Rp 23,882,326,011 | Rp 2,866,306,432 | 12.00 | 12.00 |
| 32 | Dinas Kearsipan | Rp 10,693,755,038 | Rp 1,274,297,377 | 11.92 | 19.85 |
| 33 | Dinas Kesehatan | Rp 647,025,321,335 | Rp 73,487,475,911 | 11.36 | 11.44 |
| 34 | Dinas Ketenagakerjaan | Rp 25,185,364,383 | Rp 2,837,529,525 | 11.27 | 11.27 |
| 35 | Dinas Penataan Ruang | Rp 28,333,310,797 | Rp 2,877,729,708 | 10.16 | 12.62 |
| 36 | Sekretariat DPRD | Rp 222,794,884,191 | Rp 21,141,158,344 | 9.49 | 9.54 |
| 37 | Dinas Pariwisata | Rp 41,375,201,106 | Rp 3,842,207,298 | 9.29 | 9.68 |
| 38 | Inspektorat Daerah | Rp 55,358,466,984 | Rp 5,024,276,934 | 9.08 | 9.08 |
| 39 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Rp 96,114,035,159 | Rp 8,020,421,372 | 8.34 | 13.89 |
| 40 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Rp 27,022,735,931 | Rp 2,233,767,984 | 8.27 | 9.02 |
| 41 | Dinas Kebudayaan | Rp 21,438,163,439 | Rp 1,741,669,705 | 8.12 | 8.47 |
| 42 | Sekretariat Daerah | Rp 300,791,053,452 | Rp 22,207,861,297 | 7.38 | 8.41 |

| No | Nama OPD | APBD (Rp) | Realisasi Keuangan | | (%) Fisik |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (Rp) | (%) | |
| 43 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Rp 41,621,763,080 | Rp 3,026,181,208 | 7.27 | 15.99 |
| 44 | Badan Pendapatan Daerah | Rp 135,979,929,182 | Rp 9,680,094,129 | 7.12 | 11.71 |
| 45 | Dinas Ketahanan Pangan | Rp 25,222,054,297 | Rp 1,715,114,854 | 6.80 | 10.27 |
| 46 | Dinas Pertanahan | Rp 18,298,143,854 | Rp 954,802,154 | 5.22 | 5.40 |
| 47 | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | Rp 60,607,389,655 | Rp 2,663,683,956 | 4.39 | 4.39 |
| 48 | Dinas Lingkungan Hidup | Rp 232,315,957,881 | Rp 9,713,523,688 | 4.18 | 4.47 |
| 49 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Rp 79,653,132,678 | Rp 3,294,132,675 | 4.14 | 4.81 |
| 50 | Dinas Pemuda dan Olahraga | Rp 120,627,842,078 | Rp 2,327,805,579 | 1.93 | 1.93 |
| 51 | Dinas Pekerjaan Umum | Rp 898,215,404,750 | Rp 14,817,569,062 | 1.65 | 1.65 |
| **JUMLAH** | | **Rp 5,680,820,538,295** | **Rp 579,012,972,786** | **10.19** | **10.84** |

Sumber : E-monev Bappeda Kota Makassar, 2025.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran dalam APBD untuk pelaksanaan kegaiatan pembanngunan di Kota Makassar tahjun 2025 adalah sebesar Rp.5.680.820.538.295 dengan total realisasi anggaran tersebut sebesar Rp.579.012.972 atau sebesar 70.19 persen. Adapun persentase realisasi fisiknya sebesar 10,84 persen.

Kondisi ini menunjukkan capaian keseluruhan dari 51 SKPD berada pada kategori sedang baik fisik dan keuangannya. Akan tetapi jika dilihat pada masing-masing perangkat daerah sebagian besar penyerapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan hingga triwulan I adalah sebagai beriku :

a. Adapun SKPD yang termasuk dalam kategori rendah (0-8%) sebanyak 8 SKPD,
b. Kategori sedang (8-16%) sebanyak 33 SKPD, dan
c. Sisanya sebanyak 10 SKPD termasuk dalam kategori Tinggi (>16%).

### 2.4.2 Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan RKPD Tahun 2024.

Pada sub bab ini akan dibahas tentang capaian kinerja pada masing-masing level program dan kegiatan yang terdapat pada masing-masing perangkat daerah. Persentase realisasi capaian kinerja dikategorikan menjadi 3 (Tiga) Kelompok yaitu : Kategori Rendah dengan capaian 0-8 %, Kategori Sedang dengan capaian 8-16%, dan Kategori Tinggi yaitu lebih dari 16 %. Kondisi ideal yang seharusnya dicapai adalah sebesar 25 persen, namun kondisi yang terjadi hingga triwulan satu ini belum ada perangkat daerah yang realisasinya mencapai 25 persen, sehingga kategori tersebut disesuaikan dengan kondisi yang ada pada Kota Makassar. Berikut merupakan penjelasannya.

#### 1. Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada Level Program

Evaluasi capaian kinerja pada level program dapat digambarkan pada tabel berikut.

**Tabel II.37.**
**Tabel Rekapitulasi Capaian berdasarkan Kinerja Triwulan I Level Program**

| No | Perangkat daerah | Jumlah Program | Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | <8% | 8-16% | >16% |
| | | | (R) | (S) | (T) |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* |
| 1 | Dinas Pendidikan | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 5 | 0 | 0 | 5 |

| No | Perangkat daerah | Jumlah Program | Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | <8% | 8-16% | >16% |
| | | | (R) | (S) | (T) |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 4 | Dinas Penataan Ruang | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | Satuan Polisi Pamong Praja | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Dinas Pemadam Kebakaran | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Dinas Sosial | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Dinas Ketenagakerjaan | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 11 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 7 | 3 | 0 | 4 |
| 12 | Dinas Ketahanan Pangan | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | Dinas Pertanahan | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | Dinas Lingkungan Hidup | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 15 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 16 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 17 | Dinas Perhubungan | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 19 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 8 | 5 | 0 | 3 |
| 20 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 21 | Dinas Pemuda dan Olahraga | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 22 | Dinas Kebudayaan | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 23 | Dinas Perpustakaan | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 24 | Dinas Kearsipan | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | Dinas Perikanan dan Pertanian | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 26 | Dinas Pariwisata | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 27 | Dinas Perdagangan | 10 | 4 | 0 | 6 |
| 28 | Sekretariat Daerah | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | Sekretariat DPRD | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 31 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 32 | Badan Pendapatan Daerah | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | 3 | 0 | 0 | 3 |

| No | Perangkat daerah | Jumlah Program | Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | <8% | 8-16% | >16% |
| | | | (R) | (S) | (T) |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* |
| 34 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Inspektorat Daerah | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 36 | Kecamatan Biringkanaya | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 37 | Kecamatan Bontoala | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 38 | Kecamatan Makassar | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 39 | Kecamatan Mamajang | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 40 | Kecamatan Manggala | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 41 | Kecamatan Mariso | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 42 | Kecamatan Panakkukang | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 43 | Kecamatan Rappocini | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 44 | Kecamatan Tallo | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 45 | Kecamatan Tamalanrea | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 46 | Kecamatan Tamalate | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 47 | Kecamatan Ujung Pandang | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 48 | Kecamatan Ujung Tanah | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 49 | Kecamatan Wajo | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 50 | Kecamatan Kepulauan Sangkarrang | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 51 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 5 | 1 | 0 | 4 |
| | **Jumlah** | **245** | **94** | **24** | **119** |
| | **Total** | | **245** | | |

*Sumber : Bappeda Kota Makassar, 2025.*

Tabel yang ada menunjukkan bahwa terdapat 245 jumlah program berdasarkan capaian kinerja keluaran kegiatan yang telah terealisasi, yang terdiri atas kategori rendah (<8%) yakni sebanyak 94 program, sementara untuk kategori sedang (8-16%) yakni sebanyak 24 program dan untuk capaian yang dalam kategori tinggi (>16%) yakni sebanyak 119 program.

## 2. Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada Level Kegiatan

Evaluasi capaian kinerja pada level kegiatan dapat digambarkan pada tabel berikut.

**Tabel II.38.**
**Tabel Rekapitulasi Capaian berdasarkan Kinerja Triwulan I Level Kegiatan**

| No | Perangkat daerah | Jumlah Kegiatan | Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | <8% | 8-16% | >16% |
| | | | (R) | (S) | (T) |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* |
| 1 | Dinas Pendidikan | 13 | 6 | 5 | 2 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 24 | 4 | 0 | 18 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum | 16 | 11 | 0 | 5 |
| 4 | Dinas Penataan Ruang | 11 | 2 | 0 | 9 |
| 5 | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | 13 | 9 | 0 | 4 |

| No | Perangkat daerah | Jumlah Kegiatan | Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | <8% | 8-16% | >16% |
| | | | (R) | (S) | (T) |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* |
| 6 | Satuan Polisi Pamong Praja | 9 | 7 | 0 | 2 |
| 7 | Dinas Pemadam Kebakaran | 9 | 4 | 2 | 3 |
| 8 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 11 | 5 | 2 | 4 |
| 9 | Dinas Sosial | 16 | 7 | 1 | 8 |
| 10 | Dinas Ketenagakerjaan | 18 | 9 | 2 | 7 |
| 11 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 20 | 12 | 1 | 7 |
| 12 | Dinas Ketahanan Pangan | 13 | 7 | 1 | 5 |
| 13 | Dinas Pertanahan | 9 | 5 | 0 | 6 |
| 14 | Dinas Lingkungan Hidup | 19 | 14 | 0 | 5 |
| 15 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 14 | 4 | 1 | 9 |
| 16 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 14 | 9 | 1 | 4 |
| 17 | Dinas Perhubungan | 15 | 2 | 4 | 9 |
| 18 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 12 | 2 | 0 | 10 |
| 19 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 15 | 15 | 0 | 1 |
| 20 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 12 | 7 | 1 | 4 |
| 21 | Dinas Pemuda dan Olahraga | 14 | 7 | 3 | 4 |
| 22 | Dinas Kebudayaan | 15 | 11 | 2 | 2 |
| 23 | Dinas Perpustakaan | 10 | 7 | 1 | 2 |
| 24 | Dinas Kearsipan | 15 | 6 | 3 | 6 |
| 25 | Dinas Perikanan dan Pertanian | 27 | 10 | 4 | 14 |
| 26 | Dinas Pariwisata | 14 | 7 | 0 | 8 |
| 27 | Dinas Perdagangan | 20 | 4 | 0 | 16 |
| 28 | Sekretariat Daerah | 20 | 5 | 2 | 13 |
| 29 | Sekretariat DPRD | 17 | 6 | 1 | 10 |
| 30 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 13 | 5 | 2 | 6 |
| 31 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 14 | 7 | 0 | 7 |
| 32 | Badan Pendapatan Daerah | 8 | 3 | 3 | 2 |
| 33 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | 11 | 2 | 1 | 8 |
| 34 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | 10 | 4 | 0 | 6 |
| 35 | Inspektorat Daerah | 12 | 2 | 0 | 10 |
| 36 | Kecamatan Biringkanaya | 11 | 3 | 0 | 8 |
| 37 | Kecamatan Bontoala | 12 | 1 | 0 | 11 |

| No | Perangkat daerah | Jumlah Kegiatan | Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | <8% | 8-16% | >16% |
| | | | (R) | (S) | (T) |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* |
| 38 | Kecamatan Makassar | 14 | 3 | 0 | 11 |
| 39 | Kecamatan Mamajang | 11 | 4 | 0 | 7 |
| 40 | Kecamatan Manggala | 12 | 2 | 0 | 10 |
| 41 | Kecamatan Mariso | 11 | 4 | 3 | 4 |
| 42 | Kecamatan Panakkukang | 11 | 3 | 0 | 8 |
| 43 | Kecamatan Rappocini | 12 | 9 | 3 | 0 |
| 44 | Kecamatan Tallo | 11 | 1 | 0 | 10 |
| 45 | Kecamatan Tamalanrea | 13 | 8 | 2 | 3 |
| 46 | Kecamatan Tamalate | 12 | 7 | 2 | 3 |
| 47 | Kecamatan Ujung Pandang | 11 | 4 | 2 | 5 |
| 48 | Kecamatan Ujung Tanah | 12 | 4 | 0 | 8 |
| 49 | Kecamatan Wajo | 10 | 4 | 0 | 6 |
| 50 | Kecamatan Kepulauan Sangkarrang | 12 | 4 | 0 | 8 |
| 51 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 11 | 1 | 1 | 9 |
| | **Jumlah** | **689** | **289** | **56** | **345** |
| | **Total** | | **689** | | |

*Sumber : Bappeda Kota Makassar, 2025.*

Tabel yang ada menunjukkan bahwa jumlah kegiatan yang terealisasi adalah 689 kegiatan, yang terdiri atas kategori rendah (<8%) yakni sebanyak 289 kegiatan, kategori tinggi (8-16%) yakni sebanyak 56 kegiatan dan kategori sangat tinggi (>16%) yakni sebanyak 345 kegiatan.

### 2.4.3. Evaluasi Standar Pelayanan (SPM)

Evaluasi terhadap pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) memberikan gambaran pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Makassar menerapkan sebanyak 29 jenis pelayanan dasar yang terbagi dalam 6 bidang urusan dan dilaksanakan oleh 8 Perangkat Daerah yang terkait Pelayanan Dasar. Pencapaian penerapan SPM Kota Makassar hingga triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel II.39.**
**Evaluasi Pencapaian SPM**
**Kota Makassar Triwulan I Tahun 2025**

| No | Bidang Urusan/Jenis Pelayanan Dasar | Target RKPD 2025 | Indikator Kinerja dan Realisasi | | | | Capaian Tahun 2025 | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penerima Layanan (80%) | | Mutu Minimal Layanan (20%) | | | |
| | | | Indikator | Realisasi | Indikator | Realisasi | | |
| **I** | **Bidang Urusan Pendidikan** | | | | | | | |

| No | Bidang Urusan/Jenis Pelayanan Dasar | Target RKPD 2025 | Indikator Kinerja dan Realisasi | | | | Capaian Tahun 2025 | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penerima Layanan (80%) | | Mutu Minimal Layanan (20%) | | | |
| | | | Indikator | Realisasi | Indikator | Realisasi | | |
| 1 | Pendidikan Dasar | 100% | Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | 73,29% | Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia | 20% | **93,29%** | Dinas Pendidikan |
| | | Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya | Rata-Rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional | | | | | |
| 2 | Pendidikan Kesetaraan | 100% | Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 73,50% | Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia | 20% | **93,50%** | Dinas Pendidikan |
| | | Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya | Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional | | | | | |
| 3 | Pendidikan Anak Usia Dini | 100% | Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD | 48,88% | Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia | 10,77% | **68,88%** | Dinas Pendidikan |
| **II** | **Bidang Urusan Kesehatan** | | | | | | | |
| 1 | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 100% | Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 18,73% | Jumlah barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan tatacara pemenuhan | 11,89% | **30,62%** | Dinas Kesehatan |
| 2 | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 100% | Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 18,47% | Jumlah barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan tatacara pemenuhan | 14,87% | **33,34%** | Dinas Kesehatan |
| 3 | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 100% | Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 24,19% | Jumlah barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan tatacara pemenuhan | 13,50% | **32,86%** | Dinas Kesehatan |
| 4 | Pelayanan kesehatan balita | 100% | Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 15,36% | Jumlah barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan tatacara pemenuhan | 10,24% | **25,60%** | Dinas Kesehatan |

| No | Bidang Urusan/Jenis Pelayanan Dasar | Target RKPD 2025 | Indikator Kinerja dan Realisasi | | | | Capaian Tahun 2025 | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penerima Layanan (80%) | | Mutu Minimal Layanan (20%) | | | |
| | | | Indikator | Realisasi | Indikator | Realisasi | | |
| 5 | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | 100% | Jumlah anak pada usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 17,85% | Jumlah barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan tatacara pemenuhan | 13,09% | **30,95%** | Dinas Kesehatan |
| 6 | Pelayanan kesehatan pada usia produktif | 100% | Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 16,36% | Jumlah barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan tatacara pemenuhan | 16,68% | **33,04%** | Dinas Kesehatan |
| 7 | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut | 100% | Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 18,85% | Jumlah barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan tatacara pemenuhan | 16,47% | **35,33%** | Dinas Kesehatan |
| 8 | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | 100% | Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 16,63% | Jumlah barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan tatacara pemenuhan | 17,36% | **33,99%** | Dinas Kesehatan |
| 9 | Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus | 100% | Jumlah Warga Negara penderita *diabetes mellitus* usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 29,76% | Jumlah barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan tatacara pemenuhan | 16,86% | **46,62%** | Dinas Kesehatan |
| 10 | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat | 100% | Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 4,64% | Jumlah barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan tatacara pemenuhan | 13,72% | **18,36%** | Dinas Kesehatan |
| 11 | Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis | 100% | Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 23,24% | Jumlah barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan tatacara pemenuhan | 14,32% | **37,56%** | Dinas Kesehatan |
| 12 | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan | 100% | Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 19,12% | Jumlah barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan tatacara pemenuhan | 15,43% | **34,56%** | Dinas Kesehatan |
| **III** | **Bidang Urusan Pekerjaan Umum** | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari | 100% | Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari | 0% | Jumlah barang dan jasa | 0% | **0%** | Dinas Pekerjaan Umum |

| No | Bidang Urusan/Jenis Pelayanan Dasar | Target RKPD 2025 | Indikator Kinerja dan Realisasi | | | | Capaian Tahun 2025 | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penerima Layanan (80%) | | Mutu Minimal Layanan (20%) | | | |
| | | | Indikator | Realisasi | Indikator | Realisasi | | |
| 2 | Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik | 100% | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | 4,01% | Jumlah barang dan jasa | 1,05% | **5,06%** | Dinas Pekerjaan Umum |
| **IV** | **Bidang Urusan Perumahan Rakyat** | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/Kota | 100% | Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | 12,80% | Jumlah barang dan jasa | 11,43% | **24,23%** | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 2 | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota | 100% | Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | 0% | Jumlah barang dan jasa | 0% | **0%** | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| **V** | **Bidang Urusan Ketenteraman. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat** | | | | | | | |
| 1 | Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum | 100% | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada Kabupaten/Kota | 80% | Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia | 14,93% | **94,33%** | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 2 | Pelayanan informasi rawan bencana | 100% | Jumlah Warga Negara yang Memperoleh layanan informasi rawan bencana | 25% | Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia | 14,89% | **34,89%** | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 3 | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100% | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 25% | Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia | 15,61% | **35,61%** | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 4 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100% | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 19,38% | Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia | 96,67% | **99,39%** | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 5 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota | 100% | Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | 36,96% | Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia | 9,42% | **46,38%** | Dinas Pemadam Kebakaran |
| **VI** | **Bidang Urusan Sosial** | | | | | | | |

| No | Bidang Urusan/Jenis Pelayanan Dasar | Target RKPD 2025 | Indikator Kinerja dan Realisasi | | | | Capaian Tahun 2025 | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penerima Layanan (80%) | | Mutu Minimal Layanan (20%) | | | |
| | | | Indikator | Realisasi | Indikator | Realisasi | | |
| 1 | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti | 100% | Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | 41,47% | Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia | 6,54% | **48,01%** | Dinas Sosial |
| 2 | Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti | 100% | Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | 20,80% | Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia | 4,68% | **25,48%** | Dinas Sosial |
| 3 | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti | 100% | Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | 21,33% | Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia | 4,67% | **26%** | Dinas Sosial |
| 4 | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti | 100% | Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti | 8,00% | Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia | 1,67% | **9,67%** | Dinas Sosial |
| 5 | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota | 100% | Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota | 80,00% | Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia | 16,00% | **80,00%** | Dinas Sosial |

*Sumber: Bappeda Kota Makassar Tahun 2025. data diolah*

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 29 jenis pelayanan dasar, sebanyak 16 jenis layanan terlaksana dengan capaian >50% bahkan 2 jenis layanan telah mencapai 100% sesuai target yang ditetapkan. Dan sebanyak 13 jenis layanan pencapaiannya <50% dan terdapat 1 layanan dengan realisasi 0%.

Urusan SPM Bidang Pendidkan, capaian SPM terendah triwulan 1 pada pelayanan pendidikan anak usia dini dengan capaian 68,88%, dimana penduduk usia 5-6 yang berpartisipasi pada pendidikan usia dini yang harus terlayani sebesar 51.903 orang sementara yang belum terlayani sebesar 20.188 orang tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dan berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

SPM Bidang Kesehatan pada triwulan 1 untuk capaian tertinggi pada pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sebesar 46,62 % dengan jumlah yang harus dilayani 26.974 orang dan yang sudah terlayani sebesar 10.033 orang. Sementara capaian terendah pada pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dengan capaian 18,36%. Jumlah ODGJ yang harus dilayani sebesar 3.380 orang dan yang baru terlayani sebesar 196 orang pada triwulan 1. Hal ini disebabkan karena

sumberdaya tenaga kesehatan yang belum optimal berdasarkan jenis dan profesi serta system pencatatan dan pelaporan SPM yang belum terintegrasi.

Pada SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dari tabel tersebut dapat diuraikan capaian SPM Bidang Trantibumlinmas yaitu Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dengan indikator PersentaseWarga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dan dengan target tahun 2025 sebesar 100%. Alokasi anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang berkaitan dengan penerapan SPM tersebut sebesar Rp. 27.421.692.700,- (dua puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) yang bersumber dari APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2025.

Dalam penerapan SPM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, telah melaksanakan pendataan terkait data dukung pelaksanaan SPM, Daftar relawan, dan data warga negara yang menjadi korban kebakaran. Telah melaksanakan perhitungan kebutuhan pencapaian SPM, penyusunan rencana dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Berdasarkan hasil perhitungan ditargetkan sebanyak 1.000 orang yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran baik korban jiwa, luka fisik, trauma dan dampak sosial akibat kebakaran. Hingga triwulan I telah terlayani sebanyak 462 orang dari 25 kejadian kebakaran.

Dalam pemenuhan mutu layanan didukung pencapaian waktu tanggap *(response time),* tersedia SOP, sarana dan prasarana pemadam kebakaran, serta kapasitas aparatur pemadam kebakaran. Pada pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas yang dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan teridentifikasi beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan SPM, sebagai berikut:

- Belum ada Sistem Informasi untuk identifikasi data kebakaran dan bencana lainnya;
- Belum ada pusat data dan kendali operasi penanggulangan kebakaran;
- Jumlah personil, kualitas dan kuantitas peralatan dan jumlah mobil pemadam belum mencukupi sesuai kebutuhan;
- Belum seluruh kelurahan/kecamatan memiliki posko pemadam dan keterbatasan lahan Pemerintah Kota untuk membangun pos pembantu dalam cakupan wilayah manajemen kebakaran;
- Kapasitas personil pemadam kebakaran yang memiliki keterampilan pemadaman belum optimal.

Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat melalui rehabilitasi rumah korban bencana dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah tidak dilaksanakan karena terkendala penyiapan data valid korban bencana yang akan menerima layanan dan tidak terdapat program pemerintah yang membutuhkan relokasi rumah warga. Terkait bantuan bagi korban bencana, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pada triwulan I telah diberikan bantuan material untuk 11unit rumah korban bencana dan bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana sebanyak 35 unit rumah. Kendala dalam pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat yaitu pada penyiapan data rumah korban bencana dan kebutuhan SK penetapan bencana. Hal tersebut berdampak pada lemahnya perhitungan kebutuhan, perencanaan dan penganggaran, serta pemenuhan layanan yaitu rehabilitasi rumah korban bencana.

SPM Bidang Trantibumlinmas terdiri dari 5 jenis layanan, pada pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dalam pencapaian target terdapat kendala pada jumlah posko pemadam di wilayah kelurahan dan kecamatan serta belum ada pusat data dan kendali operasi penanggulangan kebakaran. Selain itu masih

rendahnya jumlah unit kendaraan pemadam yang jumlahnya hanya sekitar 37,5% dari standar yang ditetapkan.

Untuk pelayanan yang terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) capaian SPM 94,33% dengan jumlah yang terlani sebesar 299 0rang atau sebesar 100% dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kota Makassar. Hal ini di dukung dengan aktifnya satpol PP dalam melaksanakan patrol rutin di seluruh wilayah Kota Makassar untuk mengantisipasi gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Namun kendala yang dihadapi juga dalam melakukan pelayanan standar minimal ini tidak semua warga negara yang berada di radius 0-50 meter dari Lokasi penegakan perda yang memberikan data-data lengkap baik NIK dan KK

Untuk SPM pada bidang penanggulangan bencana capaian tertinggi pada triwulan 1 yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan capaian sebesar 99,39 % dimana jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebesar 3.169 orang atau terlayani 100% Hal ini di dukung dengan adanya respon cepat darurat bencana, aktivasi system komando penanganan darurat bencana yang terorganisir dengan baik.

Untuk SPM Bidang Sosial, pada triwulan 1 capaian tertinggi pada perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota dengan capaian sebesar 96,00%, dengan jumlah total yang terlayani sebesar 5.801 orang atau 100 % dengan lima layanan pelayanan dasar. Faktor yang mempengaruhi capaian ini yaitu karena data masih berproses sehingga pelayanan rehabilitasi sosial juga masih berjalan dan untuk memaksimalkan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar di tahun 2025, maka akan memperbaiki identifikasi permasalahan dan kebutuhan bagi anak terlantar terutama hasil penjangkauan.

Dari tabel tersebut dapat diuraikan capaian SPM Bidang Trantibumlinmas yaitu Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dengan indikator PersentaseWarga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dan dengan target tahun 2025 sebesar 100%. Alokasi anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang berkaitan dengan penerapan SPM tersebut sebesar Rp. 27.421.692.700,- (dua puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) yang bersumber dari APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2025.

Dalam penerapan SPM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, telah melaksanakan pendataan terkait data dukung pelaksanaan SPM, Daftar relawan, dan data warga negara yang menjadi korban kebakaran. Telah melaksanakan perhitungan kebutuhan pencapaian SPM, penyusunan rencana dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Berdasarkan hasil perhitungan ditargetkan sebanyak 1.000 orang yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran baik korban jiwa, luka fisik, trauma dan dampak sosial akibat kebakaran. Hingga triwulan I telah terlayani sebanyak 462 orang dari 25 kejadian kebakaran.

Dalam pemenuhan mutu layanan didukung pencapaian waktu tanggap *(response time),* tersedia SOP, sarana dan prasarana pemadam kebakaran, serta kapasitas aparatur pemadam kebakaran. Pada pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas yang dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan teridentifikasi beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan SPM, sebagai berikut:

- Belum ada Sistem Informasi untuk identifikasi data kebakaran dan bencana lainnya;

- Belum ada pusat data dan kendali operasi penanggulangan kebakaran dan Jumlah personil, kualitas dan kuantitas peralatan dan jumlah mobil pemadam belum mencukupi sesuai kebutuhan;
- Belum seluruh kelurahan/kecamatan memiliki posko pemadam dan keterbatasan lahan Pemerintah Kota untuk membangun pos pembantu dalam cakupan wilayah manajemen kebakaran;
- Kapasitas personil pemadam kebakaran yang memiliki keterampilan pemadaman belum optimal.

## 2.5. Hambatan, Upaya Pencapaian, Dan Rekomendasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 Triwulan I

Ada beberapa hal yang menjadi alasan masih rendahnya realisasi belanja daerah pada sejumlah perangkat daerah sampai dengan triwulan I tahun 2025, yaitu:

1. Penggunaan anggaran masih sebatas pemenuhan gaji dan tunjangan ASN serta belanja kebutuhan rutin setiap perangkat daerah;
2. Penguasaan lahan objek pembangunan infrastruktur belum jelas kepemilikannya dan belum tercatat sebagai asset pemerintah Kota makassar, sehingga beberapa kegiatan belum dapat dijalankan;
3. Terlambatnya penyusunan perencanaan seperti *Feasibility Study* (FS), *Detail Engineering Design* (DED), kajian lingkungan, dan Analisa dampak lalu lintas, sehingga kontrak pembangunan fisik belum dapat dilaksanakan, termasuk kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK);
4. Terkendalanya proses pengadaan barang dan jasa karena adanya perubahan/peraliahan aplikasi sistem e-catalog dari versi 5 (V5) ke versi 6 (V6) sehingga proses pengadaan masih menunggu kesiapan system;
5. Keterlambatan pelaksanaan lelang yang disebabkan beberapa penempatan rekening belanja tidak tepat;
6. Pengajuan tagihan di akhir tahun setelah pekerjaaan fisik selesai 100 persen dan bukan berdasarkan termin yang diatur dalam perjanjian;
7. Adanya efisiensi anggaran dan menyesuaikan dengan visi misi kepala daerah sehingga beberapa kegiatan berubah rincian anggaran dan kegiatan pada sub kegiatan;
8. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan kewenangan karena beberapa jabatan pimpinan tinggi pratama masih dijabat oleh pelaksana tugas;
9. Kurangnya pemahaman aparatur dalam penerapan regulasi di bidang penatausahaan, akuntansi, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah.
10. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sebelumnya menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan rencana awal sehingga perlu dilakukan perubahan untuk perbaikan.

Berdasarkan upaya pencapaian kinerja di triwulan I tahun 2025, dapat disampaikan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan capaian target pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), Rencana Operasional Kegiatan (ROK), dan Rencana Arus Kas (RAK) yang telah disusun;
2. Mengoptimalkan capaian target indikator kinerja makro pemerintah daerah Kota Makassar tahun 2025 yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka (TPT), ketimpangan pendapatan (diukur dari gini ratio),

indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK).

3. Mengoptimalkan capaian target indikator kinerja utama (IKU) pembangunan Kota Makassar sebagai ukuran pencapaian pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Makassar Tahun 2025 berdasarkan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih.
4. Mengoptimalkan capaian target indikator standar pelayanan minimal (SPM) pemerintah Kota Makassar tahun 2025 yang terbagi dalam bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaam umum, perumahan rakyat, sosial, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, memberikan gambaran pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
5. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara Tim TAPD dengan SKPD dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran utamanya dalam penggunaan SIPD sebagai alat bantu dalam proses penyusunan dokumen baik pada tahapan Perencanaan maupun tahapan penganggaran;
6. Meningkatkan kapasitas aparatur utamanya pada bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah melalui Bimtek-Bimtek dan Diklat-Diklat Secara konsisten dan kontinyu;
7. Pembentukan Tim terpadu yang melibatkan Pemerintah Kota, BPN dan pihak terkait lainya dalam upaya percepatan sertifikasi aset aset tidak bergerak pemerintah kota, termasuk pengamanan secara fisik di lapangan terhadap aset-aset tidak bergerak milik pemerintah kota;
8. Mengintegrasikan berbagai aplikasi yang ada dalam rangka perencanaan dan evaluasi pembangunan untuk mengefisienkan pekerjaan di bidang perencanaan seperti pemenuhan SSH, SBU, ASB dan HSPK sebagai prasyarat dalam menyusun rincian komponen belanja dalam rangka penyusunan RKPD dan Renja SKPD.
9. Melakukan konsultasi dan Koordinasi internal (Inspektorat Kota, Inspektorat Provinsi dan BPKP) maupun Eksternal (BPK dan Kejaksaan) dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan terutama konstruksi dan program strategis guna mengantisipasi mal administrasi dan bermasalah hukum di kemudian hari.
10. Meningkatkan kualitas dan intensitas kegiatan monitoring evaluasi dan pengendalian kinerja, baik terkait pelaksanaan kegiatan maupun pendapatan dengan mengutamakan dipimpin langsung oleh Walikota dengan melibatkan TAPD, Inspektorat, Para Asisten dan Tim Ahli Walikota.



# BAB III

# KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH



# BAB. III
# KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional tahun 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025-2029.

## 3.1 Kebijakan Ekonomi Daerah

### 3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2025 merupakan strategi pemerintah untuk memperkuat daya saing, menanggulangi ketimpangan, dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Arah kebijakan ekonomi tahun 2025 menjadi instrumen utama untuk memulai fase transformasi struktural ekonomi nasional. Berikut ini adalah beberapa arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2025.

1. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan.
   Pemerintah akan fokus pada pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan, dengan melibatkan semua lapisan masyarakat dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
2. Penurunan Tingkat Kemiskinan.
   Pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6-7% pada tahun 2025, dengan berbagai program perlindungan sosial yang diarahkan untuk membantu kelompok masyarakat yang rentan.
3. Penurunan Tingkat Pengangguran.
   Pemerintah juga menargetkan penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,5-5% pada tahun 2025, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan lapangan kerja.
4. Kualitas Belanja Negara.
   Kebijakan belanja negara tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja, sehingga lebih efektif dalam mendukung agenda pembangunan.
5. Prioritas Bidang Kesehatan dan Perlindungan Sosial.
   Pemerintah akan melanjutkan berbagai program perlindungan sosial seperti PKH, Kartu Sembako, dan penyaluran subsidi, serta meningkatkan efektivitas program JKN dan memperkuat intervensi stunting.

Arah kebijakan Ekonomi makro secara nasional ditujukan terutama untuk mendukung prioritas pembangunan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dengan fokus belanja untuk peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan (pertanian dan perikanan), pariwisata, jaring pengaman sosial, dunia usaha, dan UMKM. Interaksi arah kebijakan ini merupakan faktor penting guna menjamin efektifitas pendanaan dalam pencapaian sasaran perekonomian daerah dan sasaran pembangunan nasional melalui pendekatan secara holistik ini akan lebih terfokus pada penyelesaian permasalahan permasalahan perekonomian regional dan nasional, sehingga dampak yang dihasilkan dan manfaat yang diperoleh dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

### 3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan

Arah kebijakan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 difokuskan pada transformasi struktural yang berkelanjutan, dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, ketahanan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Kebijakan ini dirancang untuk mendukung visi pembangunan jangka panjang 2025–2045, yang mencakup tahapan transformasi, akselerasi, ekspansi global, dan perwujudan Indonesia Emas.

Berikut adalah beberapa arah kebijakan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025:

**1. Penguatan Sektor Unggulan Daerah**

Sulawesi Selatan menargetkan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi hasil pertanian dan perikanan. Kebijakan ini menekankan transformasi ekonomi berbasis sumber daya lokal. Pengembangan kawasan industri seperti Pusat Pergudangan dan Logistik Makassar (PPLM), serta Industri Perikanan di Bone dan Wajo, menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

**2. Perluasan Kesempatan Kerja dan Pemberdayaan UMKM**

Kebijakan ini menekankan pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja. Sulawesi Selatan akan mengembangkan Kawasan Ekonomi Kreatif di kota/kabupaten, serta memperluas akses pembiayaan dan pasar bagi UMKM melalui digitalisasi dan kemitraan.

**3. Peningkatan Kemandirian Fiskal Daerah**

Kemandirian fiskal menjadi dasar utama untuk menopang pembangunan ekonomi. Sulawesi Selatan mendorong pemanfaatan sistem digital PAD secara penuh dan peningkatan kerja sama pembiayaan dengan sektor swasta dalam skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Ini sejalan dengan RPJMN yang mendorong reformasi fiskal daerah.

**4. Penguatan Infrastruktur Ekonomi dan Konektivitas Wilayah**

Untuk mempercepat pemerataan ekonomi, Sulawesi Selatan mengembangkan konektivitas darat–laut–udara. Pembangunan Bendungan Pamukkulu dan peningkatan Pelabuhan Garongkong merupakan contoh proyek strategis daerah. Hal ini mendukung arahan nasional dalam memperkuat infrastruktur produktif yang mendukung transformasi ekonomi.

**5. Ketahanan Pangan dan Ekonomi Hijau**

Kebijakan ini menjawab tantangan kerentanan pangan dan perubahan iklim. Sulawesi Selatan mengintegrasikan pengelolaan cadangan pangan berbasis data serta mendorong penerapan energi baru terbarukan, sejalan dengan nasional yang menempatkan ketahanan pangan dan lingkungan sebagai prioritas nasional.

**6. Peningkatan Kualitas SDM dan Literasi Ekonomi**

Transformasi ekonomi memerlukan SDM adaptif. Sulawesi Selatan menargetkan pengembangan SDM melalui sinkronisasi antara dunia pendidikan dan dunia industri, serta penyediaan pelatihan kerja untuk sektor pertanian modern, industri kreatif, dan pariwisata.

**7. Mendorong Iklim Investasi dan Kerja Sama Ekonomi**

Sulawesi Selatan mendorong terbentuknya Sulsel Investment Forum untuk memfasilitasi investor serta membuka peluang kerja sama dengan pusat dan luar negeri. Ini konsisten dengan Nasional yang menargetkan percepatan transformasi investasi berkualitas tinggi di daerah.

Secara keseluruhan, kebijakan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah melalui transformasi struktural, penguatan sektor strategis, dan penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

### 3.1.3 Kondisi dan Perubahan Target Ekonomi Makro

Kondisi dan perubahan ekonomi makro Kota Makassar dapat dilihat dari penjabaran indikator-indikator ekonomi makro berikut.

#### 3.1.3.1 Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

**a. Pertumbuhan Ekonomi Nasional**

Pertumbuhan Ekonomi Nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel III.1.**
**Realisasi dan target Pertumbuhan Ekonomi Nasional**

| Pertumbuhan Ekonomi (%,) | Realisasi | | Target | |
|---|---|---|---|---|
| | 2024 | Tw I 2025 | RPJMN 2025 | RKP 2025 |
| Indonesia | 5,03 | 4,87 | 5,3 - 5,6 | 5,3 - 5,6 |

*Sumber : BPS dan Bappeda Kota Makassar, Tahun 2025*

Di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat dengan ketidakpastian yang tinggi, ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan dan menunjukkan prospek yang baik. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi Indonesia tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03% (c-to-c), melambat dibanding capaian tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,05%.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,87% (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,52%. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,78%.

Selanjutnya pada pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 5,3-5,6% didukung oleh stabilitas ekonomi makro yang diupayakan terus menguat dengan memastikan indikator makro fiskal tetap berkinerja baik untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka menengah-panjang.

**b. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan**

Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel III.2.**
**Realisasi dan target Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan**

| Pertumbuhan Ekonomi (%) | Realisasi | | Target | |
|---|---|---|---|---|
| | 2024 | Tw I 2025 | RPJMD 2025 | RKPD 2025 |
| Sulawesi Selatan | 5,02 | 5,78 | 5,50-6,30 | 4,5-5,8 |

*Sumber : BPS dan Bappeda Kota Makassar, Tahun 2025*

Ekonomi Sulawesi Selatan kumulatif selama tahun 2024 terhadap tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,02% (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan

terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 14,57%. Sementara dari sisi pengeluaran semua komponen tumbuh positif, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 19,52%.

Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,78% (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 16,56%. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,61%. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,61%.

### c. Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar

Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel III.3.**
**Realisasi dan target Pertumbuhan Ekonomi Makassar**

| Pertumbuhan Ekonomi (%) | Realisasi | | | | | Target | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | RPJMD Sulsel (2025) | RPJMD Makassar (2025) | RKPD 2025 | Perubahan RKPD 2025 |
| Kota Makassar | -1,27 | 4,47 | 5,4 | 5,31 | 5,56 | 5,73 | 5,37 | 6.06 | 5,73 |

*Sumber : BPS dan Bappeda Kota Makassar, Tahun 2025*

Pada tahun 2024, perekonomian Kota Makassar menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sebesar 5,56%. Angka ini melampaui capaian tahun sebelumnya, 2023, yang hanya mencatat pertumbuhan sebesar 5,31%. Peningkatan ini menandakan adanya akselerasi dalam aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata regional dan nasional. Sebagai perbandingan, Sulawesi Selatan mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02%, sementara pertumbuhan ekonomi nasional berada di angka 5,03%. Data ini menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi yang dibahas berada di atas kinerja umum, baik di tingkat provinsi maupun di seluruh Indonesia.

Pertumbuhan Ekonomi Makassar tahun 2024 terjadi pada 15 kategori lapangan usaha dari 17 lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Lainnya sebesar 15,14%. Ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan sektor pariwisata yang ditandai dengan beberapa fenomena diantaranya pembukaan kembali tempat-tempat hiburan, akomodasi dan fasilitas publik setelah masa pandemi yang mendongkrak jumlah pengunjung dan mempercepat pemulihan ekonomi.

Lapangan usaha jasa Kesehatan dan kegiatan sosial yang juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi berikutnya sebesar 13,79%. Ini disebabkan oleh diantaranya peresmian Rumah Sakit Kemenkes sebagai pusat layanan Kesehatan Kawasan timur Indonesia yang meningkatkan akses Kesehatan Masyarakat. Selain itu berbagai program sosial seperti sunat massal gratis, pasar murah, dan Makassar Great Sale 2024 turut menjadi salah satu indikator meningkatnya perkembangan sektor jasa Kesehatan.

Selain itu, terdapat tiga lapangan usaha lainnya memiliki pertumbuhan positif antara 7 hingga 10%. Selanjutnya 12 lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan positif kurang dari 7%, dan 1 kategori lapangan usaha tumbuh minus 0,1%. Tren positif

pertumbuhan ekonomi ini merupakan kondisi yang baik serta mengindikasikan pulih dan stabilnya perekonomian Kota Makassar pada tahun 2024.

Jika diperbandingkan pertumbuhan ekonomi di level nasional dan provinsi, perekonomian Kota Makassar mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan memasuki tahun 2025 tepatnya di triwulan I kondisi perekonomian masing-masing di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional tumbuh di angka 5,78% dan 4,87%. Pada saat yang sama ekonomi Kota Makassar triwulan I tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 4,53% dibanding triwulan I tahun 2024. Pertumbuhan positif terjadi pada seluruh sektor lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah sektor primer, yakni sebesar 7,12%. Selanjutnya diikuti oleh sektor tersier sebesar 5,99% dan sektor sekunder sebesar 1,54%.

Hingga akhir tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar ditargetkan mencapai 5,73%. Beberapa faktor yang menjadi faktor pendukung perekonomian Kota Makassar seperti kinerja industri makanan dan minuman, perdagangan, konstruksi, serta potensi ekonomi kreatif, diperkirakan akan mendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. Tetapi faktor cuaca yang ekstrem, juga tensi geopolitik dan konflik Timur Tengah tetap menjadi tantangan dan perhitungan yang dapat membuat lambatnya pertumbuhan ekonomi bergerak dibanding tahun sebelumnya.

### 3.1.3.2 Pendapatan (PDRB) Per Kapita

Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel III.4.**
**Realisasi dan Target PDRB Per Kapita Kota Makassar**

| PDRB Per Kapita (juta) | Realisasi | | | | | Target | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | RPJMD Sulsel (2025) | RPJMD Makassar (2025) | RKPD 2025 | Perubahan RKPD 2025 |
| Kota Makassar | 125,31 | 132,68 | 144,60 | 155,95 | 165,95 | 175,46 | 175,46 | 143,35 | 184,71 |

*Sumber : BPS dan Bappeda Kota Makassar, Tahun 2025*

Realisasi perkembangan PDRB Per Kapita Kota Makassar selama lima tahun terakhir menunjukkan trend positif, seiring dengan pertumbuhan ekonominya. Tahun 2020, PDRB Per Kapita Kota Makassar hanya sebesar Rp.125,31 juta, hingga tahun Tahun 2024 PDRB per Kapita Kota Makassar telah mencapai Rp.165,95 juta atau tumbuh sebesar 4,86% dari tahun 2023 dengan nilai Rp.155,95 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh penguatan sektor pariwisata dan even internasional yang digelar di Kota Makassar yang dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata dan mendorong roda perekonomian, juga pemerintah daerah mendorong perkembangan sektor teknologi digital yang memacu inovasi bisnis di Kota Makassar. Kota Makassar berhasil memposisikan sebagai pusat ekonomi Sulawesi Selatan dengan daya Tarik investasi yang kuat.

Pada tahun 2025, PDRB per Kapita Kota Makassar ditargetkan mencapai Rp.184,71 juta dengan asumsi bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kota Makassar mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai per kapita setiap tahunnya. Semakin tinggi pendapatan per kapita suatu daerah, maka akan menjelaskan semakin tinggi kemakmuran penduduk daerah tersebut.

### 3.1.3.3 Inflasi

Perkembangan Inflasi Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel III.5.**
**Realisasi dan Target Inflasi Kota Makassar**

| Inflasi (%) | Realisasi | | | | | Target | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Mei) | RPJMD Makassar (2025) | RKPD 2025 | Perubahan RKPD 2025 |
| Kota Makassar | 2,26 | 5,09 | 2,89 | 1,19 | 1,96 | 1,52 | 1,95 | 2,0 ± 1 |

*Sumber : BPS dan Bappeda Kota Makassar, Tahun 2025*

Data menunjukkan perkembangan inflasi year on year (y-on-y) di Kota Makassar setiap bulan Desember mengalami fluktuasi dengan tren menurun dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun sempat meningkat di tahun 2022 karena kenaikan harga tiket pesawat yang tidak terkendali pada momen natal dan tahun baru, tingkat inflasi kembali stabil dan melanjutkan tren penurunan.

Di tahun 2024 laju inflasi di Kota Makassar sebesar 1,19%. Inflasi ini terjadi di sembilan kelompok pengeluaran, dimana perawatan pribadi dan jasa lainnya merupakan kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi sepanjang tahun 2024 sebesar 5,91%. Selain itu, terdapat dua kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu transportasi (-0,52%) serta informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (-0,35%).

Komoditas utama yang memberikan sumbangan terbesar terjadinya inflasi sepanjang tahun 2024 di Kota Makassar adalah emas perhiasan, sigaret kretek mesin (SKM), kontrak rumah, ikan layang/ ikan benggol, cumi-cumi, bawang merah, udang basah, minyak goreng, tarif kendaraan roda 2 online, nasi dengan lauk, ayam goreng, daging ayam ras, kopi bubuk, bawang putih, upah asisten rumah tangga, telur ayam ras, pisang, gado-gado, mobil, biskuit, tarif rumah sakit, martabak, gula pasir, ikan kembung/ikan gembung/ ikan banyar/ikan gembolo/ ikan aso-aso, ikan bandeng/ikan bolu, bedak, tahu mentah, sigaret putih mesin (SPM), sekolah dasar, akademi/perguruan tinggi, sewa rumah, kue basah, sepeda motor, sigaret kretek tangan (SKT), apel, pasta gigi, daun kemangi, dan soto.

Selain itu, komoditas utama yang memberikan sumbangan terbesar dalam terjadinya deflasi adalah cabai rawit, beras, angkutan udara, cabai merah, ikan teri, bensin, labu siam/jipang, ikan cakalang/ ikan sisik, kacang panjang, kentang, daun bawang, telepon seluler, air kemasan, sawi hijau, wortel, dan daun seledri.

Hal ini mengindikasikan bahwa inflasi, khususnya terkait dengan kebutuhan pokok masyarakat, seperti makanan dan minuman, masih tetap terkendali. Berdasarkan kondisi tersebut, menunjukkan bahwa Tim TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) telah bekerja secara konsolidatif dan bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, sehingga angka inflasi Kota Makassar jauh lebih rendah dibandingkan level nasional.

Di bulan Mei tahun 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kota Makassar sebesar 1,96% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,00. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,26%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,54%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,68%; kelompok kesehatan sebesar 1,32%; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,15%; kelompok pendidikan sebesar

0,93%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,53%; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 9,06%.

Pada tahun 2025 angka Inflasi diperkirakan mencapai 2,0 ± 1 %. Hal tersebut berdasarkan pada asumsi bahwa permintaan barang/jasa pada beberapa aktivitas ekonomi, seperti transportasi, akomodasi, penyediaan makan dan minum akan meningkat. Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah daerah harus menjaga ketersediaan stock barang/jasa yang menjadi pemicu inflasi sehingga harga tetap terkendali.

### 3.1.3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel III.6.**
**Realisasi dan Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Makassar**

| Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | Realisasi | | | | | Target | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | RPJMD Sulsel (2025) | RPJMD Makassar (2025) | RKPD 2025 | Perubahan RKPD 2025 |
| Kota Makassar | 15,92 | 13,18 | 11,82 | 10,6 | 9,71 | 9,62 | 9,62 | 10,05 | 9,62 |

*Sumber : BPS dan Bappeda Kota Makassar, Tahun 2025*

Selama lima tahun terakhir, Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Makassar mengalami penurunan dari 15,92% pada tahun 2020 menjadi 9,71% pada tahun 2024. Penurunan ini merupakan indikasi positif dari perbaikan kondisi ketenagakerjaan Kota Makassar selama periode tersebut. Perubahan tersebut tentunya tidak terjadi secara otomatis, akan tetapi disebabkan adanya pemulihan ekonomi yang berdampak terhadap membaiknya sektor bisnis formal dan informal di Kota Makassar, selain itu upaya pemerintah dalam melakukan pelatihan interprenuer yang dapat meningkatkan kesempatan kerja pada sektor informal serta boomingnya startup di Kota Makassar yang memberi efek pada perputaran ekonomi di sektor informal sehingga dapat menurunkan angka pengangguran.

Sementara untuk tahun 2025, tingkat pengangguran terbuka di targetkan sebesar 9,62%. Hal ini mengindikasikan tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 lebih baik dari capaian tahun 2024. Untuk mencapai target penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT), tentu membutuhkan berbagai upaya yang harus dilakukan pemerintah Kota Makassar.

### 3.1.3.5 Tingkat Kemiskinan

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel III.7.**
**Realisasi dan Target Tingkat Kemiskinan Kota Makassar**

| Tingkat Kemiskinan (%) | Realisasi | | | | | Target | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | RPJMD Sulsel (2025) | RPJMD Makassar (2025) | RKPD 2025 | Perubahan RKPD 2025 |
| Kota Makassar | 4,54 | 4,82 | 4,58 | 5,07 | 4,97 | 3,03 | 3,03 | 4,10 | 4,77` |

*Sumber : BPS dan Bappeda Kota Makassar, Tahun 2025*

Persentase penduduk miskin di Kota Makassar dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang beragam, hal ini dipengaruhi oleh berbagai dinamika ekonomi, sosial, dan kebijakan. Capaian tingkat kemiskinan tahun 2024 di Kota Makassar sebesar 4,97% mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 5,07%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 Pemerintah Kota Makassar berfokus pada penanganan kemiskinan ekstrem. Hal ini dilakukan dengan 3 strategi yaitu: (1) pengurangan beban pengeluaran, (2) peningkatan pendapatan masyarakat, (3) serta pengurangan kantong kemiskinan. Jika Pemerintah Kota Makassar berhasil menurunkan jumlah masyarakat miskin ekstrem, maka angka kemiskinan di Kota Makassar akan turun signifikan, sehingga pada tahun 2025 Kota Makassar menargetkan angka kemiskinan sebesar 4,77%.

### 3.1.3.6 Gini Ratio

Perkembangan Gini Ratio Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel III.8.**
**Realisasi dan Target Gini Ratio Kota Makassar**

| Gini Ratio | Realisasi | | | | | Target | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | RPJMD Sulsel (2025) | RPJMD Makassar (2025) | RKPD 2025 | Perubahan RKPD 2025 |
| Kota Makassar | 0,400 | 0,400 | 0,395 | 0,387 | 0,372 | 0,366 | 0,372 | 0,388 | 0,370 |

*Sumber : BPS dan Bappeda Kota Makassar, Tahun 2025*

Perkembangan nilai Gini Ratio Kota Makassar mengalami penurunan yang konsisten dari tahun ke tahun. Dimulai dari angka 0,4 pada tahun 2020, Gini Rasio terus menurun menjadi 0,372 pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran di Kota Makassar semakin berkurang berarti kesenjangan antara kelompok pendapatan tinggi dan kelompok pendapatan rendah di Kota Makassar semakin menyempit. Ini adalah indikator positif bagi pemerataan ekonomi dan sosial. Dalam konteks Bank Dunia, nilai Gini Rasio 0,372 (di bawah 0,4) umumnya dikategorikan sebagai tingkat ketimpangan yang relatif rendah atau moderat. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai kebijakan pemerintah daerah yang berorientasi pada pemerataan ekonomi pada berbagai sektor diantaranya : peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan terutama masyarakat miskin yang terjangkau dapat meningkatkan peluang mendapatkan pendapatan yang lebih baik, selain itu penciptaan lapangan kerja pada sektor ekonomi yang padat karya menyerap lebih banyak tenaga kerja, terutama dari kelompok berpendapatan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya pemerintah daerah dalam mengurangi ketimpangan pendapatan/pengeluaran mulai membuahkan hasil. Keberhasilan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di

masa depan. Penting untuk terus mempertahankan dan memperkuat kebijakan-kebijakan yang telah terbukti efektif dalam mengurangi ketimpangan ini.

## 3.2. Tantangan Perekonomian Daerah

### 3.2.1. Aspek Eksternal

Tahun 2025 diproyeksikan menjadi periode yang penuh tantangan bagi perekonomian global, menuntut kebijakan adaptif dan kerja sama internasional untuk mengatasi berbagai risiko dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Tantangan ini bersumber dari berbagai faktor yang saling terkait, menciptakan ketidakpastian dan potensi perlambatan ekonomi. Salah satu isu krusial adalah ketidakpastian geopolitik dan perang dagang, khususnya antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Ketegangan terkait tarif dan kontrol ekspor berpotensi mengganggu rantai pasok global dan menurunkan kepercayaan investor. Sebagai contoh, pembatasan ekspor mineral penting oleh Tiongkok dapat menghambat produksi kendaraan listrik di AS, sementara kebijakan proteksionis AS dapat memicu resesi dan mengurangi peran dolar dalam perdagangan internasional.

Selain itu, perlambatan pertumbuhan ekonomi global menjadi perhatian utama. Lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan OECD memproyeksikan pertumbuhan yang moderat pada tahun 2025, melambat sekitar 2,8 hingga 3,2%, lebih rendah dari rata-rata sebelum pandemi. Konflik geopolitik, inflasi yang tinggi, suku bunga yang masih ketat, dan peningkatan utang publik menjadi penyebab utama perlambatan ini. Tantangan lain yang signifikan adalah fragmentasi ekonomi dan risiko utang. Tingginya tingkat utang, terutama di negara berkembang, ditambah dengan fragmentasi ekonomi akibat kebijakan nasional yang beragam, meningkatkan risiko ketidakstabilan finansial. Kondisi ini dapat menghambat upaya pemulihan ekonomi dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Terakhir, krisis iklim dan transisi energi juga menghadirkan tantangan baru yang kompleks. Upaya menuju energi bersih membutuhkan investasi besar dan berisiko mengganggu sektor-sektor tertentu. Ketegangan dalam rantai pasok mineral penting untuk teknologi hijau juga menjadi perhatian utama. Bersamaan dengan itu, ketidakpastian kebijakan dan fragmentasi global semakin memperburuk situasi. Pergeseran aliansi global dan inkonsistensi dalam kebijakan ekonomi menciptakan tantangan tambahan dalam koordinasi kebijakan dan stabilitas pasar global, yang semuanya berkontribusi pada lanskap ekonomi 2025 yang penuh ketidakpastian.

Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2025 akan menghadapi beberapa tantangan signifikan. Meskipun pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berkisar antara 4,8% hingga 5,8%, efisiensi anggaran pemerintah menjadi krusial. Realisasi program pembangunan dan investasi daerah bisa terpengaruh jika efisiensi anggaran tidak optimal. Selain itu, dampak ketidakpastian global juga menjadi ancaman nyata; konflik geopolitik dan perlambatan inflasi global diperkirakan akan memperlambat pertumbuhan ekonomi di tahun 2025, yang pada gilirannya dapat memengaruhi ekspor dan investasi di Sulawesi Selatan.

Tantangan lain yang tak kalah penting adalah ketergantungan tinggi pada sektor pertanian. Struktur ekonomi Sulawesi Selatan yang masih sangat bergantung pada sektor ini menjadikannya rentan terhadap perubahan iklim dan fluktuasi harga komoditas. Hal ini dapat secara langsung memengaruhi pendapatan petani dan stabilitas ekonomi daerah secara keseluruhan. Menghadapi berbagai tantangan ini, diperlukan strategi kebijakan yang adaptif dan kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, serta masyarakat. Sinergi ini penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Sulawesi Selatan.

### 3.2.2. Aspek Internal

Kota Makassar di tahun 2025 akan menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang kompleks, dipicu oleh pertumbuhan populasi, urbanisasi pesat, dan dinamika global. Salah satu isu utama adalah ketimpangan ekonomi dan disparitas pendapatan, meskipun pertumbuhan ekonomi positif. Ini diperparah oleh dominasi sektor informal yang diperkirakan sekitar 60 pekerja pekerja yang minim perlindungan sosial dan akses pelatihan, membatasi peningkatan produktivitas. Selain itu, ketergantungan ekonomi Makassar pada konsumsi pemerintah dan sektor informal masih tinggi, seperti belanja pegawai dan bantuan sosial, yang mencerminkan lemahnya kontribusi sektor swasta dan rendahnya produktivitas sektor formal. Hal ini menghambat diversifikasi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja berkualitas. Tantangan lain termasuk ketahanan pangan dan stabilitas harga, mengingat ketergantungan kota pada pasokan beras dari luar daerah, serta minimnya cadangan pangan lokal yang bisa mengancam kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.

Makassar juga dihadapkan pada keterbatasan kapasitas fiskal dan efisiensi investasi. Sumber daya fiskal yang terbatas menjadi hambatan dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah Kota perlu meningkatkan efisiensi investasi publik melalui penghitungan *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) untuk menilai efektivitas anggaran, memprioritaskan proyek berdampak besar, menghindari pemborosan, menarik investasi swasta, dan meningkatkan transparansi. Tantangan lainnya adalah dampak perubahan iklim terhadap sektor ekonomi, di mana cuaca ekstrem seperti banjir dan kekeringan dapat mengganggu produksi pangan dan merusak infrastruktur, memengaruhi stabilitas ekonomi. Kesenjangan infrastruktur dan aksesibilitas antarwilayah juga menghambat pemerataan pembangunan, dengan wilayah pinggiran yang tertinggal dalam akses jalan dan fasilitas umum, berdampak pada produktivitas dan kualitas hidup.

Transformasi digital dan ekonomi kreatif menghadapi kendala kesenjangan akses internet dan kurangnya keterampilan digital di UMKM, yang menghambat inovasi. Kota Makassar juga masih bergantung pada sektor ekonomi tradisional seperti perdagangan dan jasa, dengan kontribusi manufaktur dan teknologi tinggi yang rendah, menuntut diversifikasi ekonomi. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam pendidikan dan keterampilan kerja, serta keterbatasan akses pembiayaan bagi UMKM menjadi hambatan dalam pertumbuhan dan inovasi sektor ini yang sebenarnya berpotensi besar menyerap tenaga kerja. Menghadapi tantangan-tantangan ini, Pemerintah Kota Makassar harus mengadopsi pendekatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada diversifikasi ekonomi, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan kapasitas fiskal. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil adalah kunci dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang efektif untuk menjawab tantangan ekonomi kota di tahun 2025.

### 3.2.3 Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

Dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta menyinergikan kebijakan Asta Cita Presiden dan Wakil Presien, maka Pemerintah Kota Makassar melakukan perubahan terhadap kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

Arah kebijakan ekonomi Pemerintah Kota Makassar tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 difokuskan pada pencapaian visi “Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan.” Kebijakan ini dirancang untuk selaras dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menekankan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan serta peningkatan daya saing daerah. Adapun arah kebijakan perkonomian Kota Makassar tahun 2025 sebagai berikut :

**1. Peningkatan Produktivitas Sektor Industri dan Perdagangan**

Pemerintah Kota Makassar berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas sektor industri dan perdagangan melalui pengembangan kawasan industri terpadu, modernisasi pasar tradisional, dan pemanfaatan teknologi digital. Langkah ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing produk daerah di pasar nasional dan internasional.

**2. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Pendapatan Masyarakat**

Strategi ini difokuskan pada penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan sektor-sektor potensial seperti pariwisata, ekonomi kreatif, dan industri kecil menengah. Program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat juga akan diperkuat untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal dan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.

**3. Peningkatan Kemandirian Fiskal Daerah**

Untuk meningkatkan kemandirian fiskal, Pemerintah Kota Makassar akan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, serta peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Diversifikasi sumber pendapatan juga akan dilakukan dengan mendorong investasi dan kemitraan publik-swasta.

**4. Terwujudnya Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan**

Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan meningkatkan ketahanan pangan melalui penguatan sistem distribusi pangan, pengembangan lumbung pangan daerah, dan dukungan terhadap petani lokal. Program ini juga mencakup pengendalian inflasi dan perlindungan konsumen.

**5. Peningkatan Realisasi Investasi Daerah**

Pemerintah Kota Makassar akan menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan menyederhanakan perizinan, menyediakan insentif bagi investor, dan membangun infrastruktur pendukung. Promosi potensi investasi daerah juga akan ditingkatkan untuk menarik investor domestik dan asing.

**6. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Ekonomi Kreatif**

Pengembangan ekonomi kreatif akan difokuskan pada peningkatan kapasitas pelaku industri kreatif melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pemasaran produk. Pemerintah juga akan menyediakan ruang kreatif dan fasilitas pendukung untuk mendorong inovasi dan kolaborasi antar pelaku ekonomi kreatif.

**7. Penurunan Disparitas Pendapatan**

Untuk mengurangi kesenjangan pendapatan, Pemerintah Kota Makassar akan melaksanakan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial.

**8. Pengembangan Ekonomi Syariah**

Pengembangan ekonomi syariah ini berfokus pada pengembangan dan penguatan sektor ekonomi dan keuangan syariah, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam ekonomi syariah seperti pengembangan industri produk halal, industri jasa keuangan syariah, dana sosial syariah, serta bisnis dan kewirausahaan syariah. Pemerintah Kota Makassar akan melaksanakan program-program diantaranya literasi dan edukasi syariah dalam rangka peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang ekonomi syariah seperti mengadakan sosialisasi dan pelatihan, pengembangan produk dan

layanan keuangan syariah, serta penguatan infrastruktur ekonomi syariah seperti dengan menyediakan Rumah Potong Hewan (RPH) yang tersertifikasi halal.

**9. Pengembangan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru**

Pemerintah Kota Makassar akan lebih menekankan pada penerapan ekonomi hijau dan biru dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan ini akan berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya laut secara bijaksana. Kebijakan ekonomi hijau akan mendorong sektor-sektor ekonomi yang berkelanjutan, seperti energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dan ekonomi sirkular. Kebijakan ekonomi biru akan mendorong pemanfaatan sumber daya laut secara bijaksana, termasuk pengembangan sektor perikanan dan pariwisata bahari yang berkelanjutan. Integrasi kedua konsep ini akan menjadi kunci dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di Kota Makassar, dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

Dengan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Makassar berharap dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## 3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

### 3.3.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kota Makassar pada tahun 2025 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi yang telah dicapai pada tahun sebelumnya.

Selain itu, dengan dilantiknya Kepala Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kota Makassar juga telah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2025–2029 sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas kepala daerah terpilih. Dokumen RPJMD tersebut menjadi landasan utama dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, termasuk dalam penyusunan dan penyesuaian anggaran tahunan. Oleh karena itu, dilakukan perubahan anggaran untuk menyesuaikan program dan kegiatan agar selaras dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD baru.

Perubahan anggaran ini bertujuan untuk menyesuaikan program dan kegiatan prioritas agar mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih, dan mengakomodasi program strategis baru yang muncul dalam RPJMD dan belum terakomodasi dalam APBD sebelumnya. Perubahan ini juga memperhatikan kondisi realisasi anggaran tahun berjalan, dinamika kebutuhan masyarakat, serta kondisi ekonomi, sosial, dan fiskal daerah yang berkembang.

### 3.3.2. Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2025

#### 3.3.2.1 Perubahan Pendapatan Asli Daerah

Secara Umum APBD Kota Makassar Tahun 2025 berjalan, Realisasi Pendapatan Daerah mengalami perlambatan hingga Triwulan I Tahun 2025. Dari target Pendapatan Daerah sebesar Rp. 5,384,607,633,732.00 pada APBD Pokok Tahun 2025, pencapaian dibukukan pada triwulan I sebesar Rp. 1,010,739,190,915.95 atau 18,77%.

Untuk kinerja dan performa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar pada Triwulan I yang ditargetkan pada Tahun 2025 sebesar Rp. 2,484,325,936,732.00 hanya mampu membukukan realisasi senilai Rp. 377,317,627,171.95 atau 15,19% dengan rincian realisasi Pendapatan Pajak Daerah mencapai senilai Rp. 329,760,400,027.10 atau 15,52%, Pendapatan Retribusi Daerah mencapai senilai Rp. 34,277,488,420.88 atau sebesar 14,32%,. Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencapai senilai Rp. 5,253,612,336.36 atau sebesar 10,30% dan Lain–lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mencapai senilai Rp. 8,026,126,387.61 atau sebesar 11,70%. Melihat kondisi pencapaian tersebut, untuk Perubahan Pendapatan Daerah pada Postur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar Tahun 2025 mengalami beberapa penyesuaian dalam hal penetapan target.

Dalam Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2025, Pendapatan Asli Daerah dilakukan penyesuaian dengan beberapa pertimbangan khususnya kemampuan realisasi pada Triwulan I di Tahun 2025. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari beberapa sumber mengalami penyesuaian. Pajak Daerah berkurang Rp. 249,197,559,000.00 atau sebesar 11,73% dari target APBD Pokok Tahun 2025 menjadi Rp. 205,591,102,446.80. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menjadi Rp. 1,876,102,441,000.00. Retribusi Daerah berkurang Rp. 33,785,948,097.20 atau sebesar 14,11%, dari target APBD Pokok Tahun 2025 menjadi Rp. 205,591,102,446.80. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menjadi Rp. 24,368,548,085.07 atau sebesar 52,24% dari target APBD Pokok Tahun 2025 menjadi Rp. 51,027,054,575.00. Adapun untuk Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah juga mengalami pengurangan sebesar Rp. 23,781,664,166.00 atau sebesar 34,66% dari target APBD Pokok Tahun 2025 menjadi Rp. 68,621,831,613.00.

Berdasarkan hal tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Perubahan RKPD Tahun 2025 ditetapkan menjadi Rp. 2,150,902,258,978.87 atau turun senilai Rp. 333,423,677,753.13 atau sebesar 13,42%.

### 3.3.2.2. Perubahan Pendapatan Transfer

Pencapaian Pendapatan Transfer hingga Triwulan I tahun 2025 pada keseluruhannya membukukan senilai Rp. 633,421,563,744.00 atau sebesar 21,84% dari target sebesar Rp. 2,900,281,697,000.00 dengan rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat senilai Rp. 602,778,418,958.00 atau sebesar 24,68% dan Pendapatan Transfer antar Daerah senilai Rp. 30,643,144,786.00 atau sebesar 6,69%.

Dalam Perubahan APBD Kota Makassar tahun 2025, Pendapatan Transfer juga mengalami penurunan walaupun Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat meningkat. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat terdiri dari dana perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Peningkatan pendapatan ini sebesar 1,13% atau Rp. 27,526,819,000.00 mencerminkan adanya penambahan alokasi dana dari pusat untuk mendukung program dan kegiatan di Kota Makassar.

Pendapatan Transfer Antar Daerah mencakup dana yang ditransfer antara pemerintah daerah. Transfer Antar Daerah/Pemerintah Provinsi mengalami penurunan target pendapatan sebesar Rp. 180,000,000,000.00 atau sebesar 39,30% menjadi Rp. 278,000,000,000.00 dari Rp. 458,000,000,000.00.

Berdasarkan hal tersebut maka Pendapatan Transfer pada Perubahan RKPD Tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp. 152,473,181,000.00 atau sebesar 5,26%.

### 3.3.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pada Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Makassar sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2025 belum terealisasi. Rencana Perubahan Target Pendapatan Daerah, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

## Tabel III.9.
## Target Perubahan Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025

| NO | URAIAN | TARGET RPJMD TAHUN 2025 | APBD POKOK TAHUN 2025 | TARGET PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 | BERTAMBAH / (BERKURANG) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5-4) | 7 |
| **4.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **2,628,662,524,289.00** | **2,484,325,936,732.00** | **2,150,902,258,978.87** | **- 333,423,677,753.13** | **- 13.42** |
| 4.1.1 | Pajak daerah | 2,183,442,262,423.00 | 2,125,300,000,000.00 | 1,876,102,441,000.00 | - 249,197,559,000.00 | - 11.73 |
| 4.1.2 | Retribusi daerah | 230,559,156,411.00 | 239,377,050,544.00 | 205,591,102,446.80 | - 33,785,948,097.20 | - 14.11 |
| 4.1.3 | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | 64,829,688,455.00 | 51,027,054,575.00 | 24,368,548,085.07 | - 26,658,506,489.93 | - 52.24 |
| 4.1.4 | Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | 149,831,417,000 | 68,621,831,613.00 | 44,840,167,447.00 | - 23,781,664,166.00 | - 34.66 |
| **4.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **2,094,348,462,000.00** | **2,900,281,697,000.00** | **2,747,808,516,000.00** | **- 152,473,181,000.00** | **- 5.26** |
| 4.2.1 | Transfer Pemerintah Pusat | 1,737,892,462,000.00 | 2,442,281,697,000.00 | 2,469,808,516,000.00 | 27,526,819,000.00 | 1.13 |
| 4.2.2 | Transfer Antar Daerah | 356,456,000,000.00 | 458,000,000,000.00 | 278,000,000,000.00 | - 180,000,000,000.00 | - 39.30 |
| **4.3** | **LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **182,405,400,000.00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4.3.1 | Hibah | 36,000,000,000.00 | - | - | - | - |
| 4.3.2 | Dana darurat | - | - | - | - | - |
| 4.3.3 | Lain Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | 146,405,400,000.00 | - | - | - | - |
| **TOTAL PENDAPATAN DAERAH** | | **4,905,416,386,289.00** | **5,384,607,633,732.00** | **4,898,710,774,978.87** | **- 485,896,858,753.13** | **- 9.02** |

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar, Tahun 2025*

### 3.3.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Menindaklanjuti Visi Kepala Daerah Tahun 2025–2029, yaitu "Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan", Pemerintah Kota Makassar menetapkan arah kebijakan fiskal yang lebih efisien, terukur, dan berbasis hasil. Efisiensi anggaran menjadi prioritas utama, sebagai respons atas dinamika fiskal serta untuk memastikan efektivitas pemanfaatan sumber daya keuangan daerah. Kebijakan efisiensi tersebut mulai diimplementasikan melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang disusun dengan pendekatan tematik, holistik, dan integratif. Perubahan ini diarahkan untuk menyerap dan mengakomodasi Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita, sekaligus memastikan keterpaduan dengan Program Prioritas Daerah yang dirumuskan dalam RPJMD Kota Makassar Tahun 2025–2029.

Untuk Arah Kebijakan Belanja Daerah, sesuai Peraturan Perundang-Undangan Kebijakan Belanja Daerah Kota Makassar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Belanja wajib dan serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Belanja Prioritas dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah serta belanja penyelenggaraan urusan pemerintah lainnya dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

1. Memprioritaskan Belanja Pada Peningkatan Kapasitas Kelembagaan yang lebih efisien, efektif, dan optimal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan;
2. Penganggaran belanja dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan dalam upaya memenuhi kewajiban daerah;
3. Melakukan analisis mengenai kesesuaian program dan kegiatan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan pertimbangan manfaat yang akan didapatkan bagi masyarakat;
4. Memperioritaskan belanja pada Prgram/Kegiatan yang mendukung Program Pemerintah terutama yang tertinggal dan penyelesaian target kerja yang belum teecapai;
5. Belanja diprioritaskan juga pada Program/Kegiatan yang dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, penguatan kepada pelaku UMKM, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan pendapatan, serta penciptaan lingkungan yang kondusif;
6. Peningkatan Kapasitas Penyediaan Sarana Prasarana Infrastruktur dan Persampahan.

Proyeksi Belanja Daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pada Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Dalam menentukan proyeksi belanja dilakukan berdasarkan metode yang berbeda untuk setiap jenis belanja, sebagai berikut:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi dirinci atas jenis: 1) Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi yang dimaksud diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan / Anggota DPRD, dan Pegawai ASN. 2). Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. 3). Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan

perjanjian pinjaman. 4). Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. 5). Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6). Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Modal di rinci atas jenis :1) Belanja Modal Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 2). Belanja Modal Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. 3). Belanja Modal Gedung dan Pemerintahan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 3). Belanja Modal Jalanan, Irigasi dan Jaringan Air digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 4) Belanja Aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja Transfer terdiri merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Menilik pada Kebijakan Belanja Daerah dengan tetap memperhatikan pencapaian target kinerja dari setiap program dan kegiatan, maka Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 5,128,954,350,000.00 atau turun 9,77% atau senilai Rp. 555,653,283,732.00 dari target Belanja Daerah pada RKPD Pokok Tahun 2025 sebesar Rp 5,684,607,633,732.00.

Komponen Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025, terdiri dari Belanja Operasi turun sebesar 0,33% atau senilai Rp. 13,757,834,428.00 dengan rincian yaitu Belanja Pegawai naik 2,97% atau senilai Rp 58,072,093,496.00, Belanja Barang dan Jasa turun 1,66% atau senilai Rp. 33,605,631,941.00, dan Belanja Hibah turun 19,58% atau senilai Rp. 38,224,295,983.00.

Sementara itu, Belanja Modal secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 36,69% atau senilai Rp. 541,895,449,304.00 dimana hampir semua komponen Belanja Modal mengalami kontraksi kecuali Belanja Modal Tanah dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Kontraksi terbesar terdapat pada komponen Belanja Modal Gedung dan

Bangunan sebesar 61,54% disusul kemudian Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 30,90%, dan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar 28,93%. Sedangkan Belanja Modal Tanah meningkat sebesar 9,39%, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya meningkat sebesar 0,04%.

Pada Perubahan APBD Kota Makassar Tahun 2025, defisit ini disesuiakan dengan Hasil Audit BPK-RI pada komponen pembiayaan sisa lebih pengunaan anggaran tahun sebelumnya (Silpa) dari Rp 300,000,000,000.00 pada APBD Pokok menjadi Rp 230,243,575,021.13 pada APBD Perubahan, yang berarti penurunan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 69,756,424,978.87 atau 23,25%. Pengurangan defisit ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Makassar telah melakukan penyesuaian anggaran yang signifikan untuk mengelola keseimbangan fiskal dengan lebih baik, meskipun tantangan masih ada untuk mencapai anggaran yang sepenuhnya seimbang.

Jika dilihat dari tabel proporsi Belanja Daerah dibawah, Pemerintah Kota Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga keseimbangan fiskal yang sesuai dengan regulasi nasional. Hal ini tercermin dari alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik yang telah disesuaikan dengan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/KM.7/2024, serta tetap memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Meskipun proporsi belanja pegawai dalam Perubahan APBD Tahun 2025 tercatat sebesar 32,77%, hal tersebut masih mencerminkan upaya penyesuaian yang rasional, mengingat perhitungan ini belum termasuk komponen tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, dan tunjangan profesi guru sebagaimana dikecualikan dalam ketentuan pasal 146 ayat (2).

Kebijakan untuk Perubahan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun 2025 meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja daerah diprioritaskan secara konsisten untuk mendukung pencapaian Asta Cita, yang meliputi : a. Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM), b. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, c. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur, d. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, e. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, f. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, g. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, h. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.
2. Penganggaran belanja daerah diprioritaskan untuk secara konsisten melaksanakan amanat peraturan perundang - undangan dengan mengalokasikan anggaran untuk Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan prioritas utama Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar yang meliputi: a.pendidikan, b.kesehatan, c.pekerjaan umum dan penataan ruang, d.perumahan rakyat dan kawaasan Pemukiman, e.ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat, dan f. sosial. Serta Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar: a. tenaga kerja, b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, c. pangan, d. pertanahan, e. lingkungan hidup, f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,

g. pemberdayaan masyarakat dan desa, h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana, i. perhubungan, j. komunikasi dan informatika, k. koperasi, usaha kecil dan menengah, l. penanaman modal, m. kepemudaan dan olahraga, n. statistik, o. persandiaan, p. kebudayaan, q. perpustakaan, dan r. Kearsiapan;

3. Penganggaran belanja daerah diprioritaskan untuk secara konsisten melaksanakan amanat peraturan perundang – undangan dengan mengalokasikan anggaran untuk urusan Pemerintahan Pilihan yang bersifat wajib diselenggarakan sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki meliput: a. kelautan dan perikanan, b. pariwisata, c. pertanian, d. perdagangan, dan e. perindustrian;
4. Penganggaran Belanja Daerah untuk mewujudkan Program Prioritas Kepala Daerah sesuai dengan target kinerja sasaran daerah pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025-2029;
5. Penganggaran Belanja Daerah untuk mengakomodir usulan MUSRENBANG dan Reses (pokok pikiran DPRD);
6. Penganggaran belanja daerah untuk kebutuhan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
7. Efesiensi Pengeluaran Belanja yang bersifat umum pada masing-masing kegiatan di Perangkat Daerah dengan memperhatikan target kinerja, besaran pagu, jumlah personil serta kegiatan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat;
8. Melakukan analisis dan pengendalian secara berkala terhadap Progres Belanja Modal pada masing-masing Perangkat Daerah dengan memperhatikan kesesuaian Dokumen pendukung utama khususnya dokumen Perencanaan, serta Rentan Waktu Pengadaan dan Pelaksanaan sehingga Kegiatan pada Belanja Modal pada masing-masing perangkat Daerah lebih optimal dan Efesiensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Melakukan analisis dan pengendalian secara berkala terhadap Progres Barang dan Jasa pada masing-masing Perangkat Daerah dengan memperhatikan urgensitas, Efektivitas dan Efesiensi pada output dan target kegiatan serta yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat;
10. Penganggaran Belanja Daerah untuk mendukung Program Prioritas Pembentukan Koperasi Merah Putih di 153 Kelurahan sebagai komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional yang diharapkan mampu menggerakkan potensi ekonomi masyarakat secara kolektif dan berkelanjutan
11. Pengembangan Program *Urban Farming* di tiga titik Lokasi yang bertujuan menjadi pusat edukasi, demonstrasi, dan pengembangan sektor pertanian yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan;
12. Membangun *Makassar Creative Hub* sebagai wadah kreatifitas, pengembangan *skill,* dan *Co-Working Space* di setiap Kecamatan;
13. Penganggaran Belanja Daerah untuk Pengadaan Seragam dan Peralatan Sekolah bagi siswa SD, dan Pengadaan *Speed Boat Ambulance* bagi masyarakat pulau; dan
14. Penganggaran Belanja Daerah untuk pelaksanaan peremajaan kawasan permukiman kumuh;
15. Penganggaran Belanja Daerah untuk penambahan anggaran Dana Kelurahan sebagai wujud nyata dan komitmen Pemerintah Daerah terhadap setiap Kelurahan;
16. Penganggaran Belanja Daerah untuk pelaksanaan sarana dan prasarana pelayanan khususnya untuk Kelurahan, Kecamatan, dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP:
17. Penganggaran Belanja Daerah untuk mendukung pembangunan stadion.

Hal diatas dapat kita lihat pada Tabel III.10 di bawah ini :

## Tabel III.10.
## Target Perubahan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025

| NO | URAIAN | TARGET RPJMD TAHUN 2025 | TARGET APBD POKOK TAHUN 2025 | TARGET PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 | BERTAMBAH / (BERKURANG) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5-4) | 7 |
| **02.01** | **BELANJA OPERASI** | **3,539,162,106,452.00** | **4,167,493,949,284.00** | **4,155,936,114,856.00** | **- 11,557,834,428.00** | **- 0.28** |
| 02.01.01 | Belanja Pegawai | 1,514,700,868,259.00 | 1,952,829,349,780.00 | 2,010,901,443,276.00 | 58,072,093,496.00 | 2.97 |
| 02.01.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1,788,633,470,725.00 | 2,019,473,265,410.00 | 1,988,067,633,469.00 | - 31,405,631,941.00 | - 1.56 |
| 02.01.03 | Belanja Bunga | - | - | - | - | - |
| 02.01.04 | Belanja Subsidi | - | - | - | - | - |
| 02.01.05 | Belanja Hibah | 235,057,767,468.00 | 195,191,334,094.00 | 156,967,038,111.00 | - 38,224,295,983.00 | - 19.58 |
| 02.01.06 | Belanja Bantuan Sosial | 770,000,000.00 | - | - | - | - |
| **02.02** | **BELANJA MODAL** | **1,366,254,280,000.00** | **1,477,113,684,448.00** | **933,018,235,144.00** | **- 544,095,449,304.00** | **- 36.84** |
| 02.02.01 | Belanja Modal Tanah | - | 32,318,503,987.00 | 35,352,087,100.00 | 3,033,583,113.00 | 9.39 |
| 02.02.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | - | 332,334,137,315.00 | 229,648,230,481.00 | - 102,685,906,834.00 | - 30.90 |
| 02.02.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | - | 387,928,273,999.00 | 149,203,965,787.00 | - 238,724,308,212.00 | - 61.54 |
| 02.02.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | - | 703,448,545,147.00 | 497,724,099,776.00 | - 205,724,445,371.00 | - 29.25 |
| 02.02.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | - | 13,144,224,000.00 | 13,149,852,000.00 | 5,628,000.00 | 0.04 |
| 02.02.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | - | 7,940,000,000.00 | 7,940,000,000.00 | - | - |
| **02.03** | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **50,000,000,000.00** | **40,000,000,000.00** | **40,000,000,000.00** | **-** | **-** |
| **02.04** | **BELANJA TRANSFER** | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 02.04.01 | Belanja Bagi Hasil | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 02.04.02 | Belanja Bantuan Keuangan | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **JUMLAH BELANJA DAERAH** | | **4,955,416,386,452.00** | **5,684,607,633,732.00** | **5,128,954,350,000.00** | **- 555,653,283,732.00** | **- 9.77** |

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar, Tahun 2025*

## Tabel III.11.
## Belanja Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD
## Kota Makassar Tahun Anggaran 2025

| NO | PERANGKAT DAERAH | APBD POKOK | RKPD PERUBAHAN | BERTAMBAH / (BERKURANG) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan | 1,372,529,076,418.00 | 1,308,137,824,000.00 | - 64,391,252,418.00 | - 4.69 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 647,025,306,772.00 | 677,580,471,000.00 | 30,555,164,228.00 | 4.72 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum | 898,215,404,750.00 | 666,661,300,000.00 | - 231,554,104,750.00 | - 25.78 |
| 4 | Dinas Penataan Ruang | 28,333,310,797.00 | 25,483,800,000.00 | - 2,849,510,797.00 | - 10.06 |
| 5 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 60,607,389,655.00 | 65,195,000,000.00 | 4,587,610,345.00 | 7.57 |
| 6 | Satuan Polisi Pamong Praja | 46,982,529,144.00 | 46,771,526,000.00 | - 211,003,144.00 | - 0.45 |
| 7 | Dinas Pemadam Kebakaran | 54,529,935,454.00 | 54,250,100,000.00 | - 279,835,454.00 | - 0.51 |
| 8 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 24,940,893,837.00 | 26,092,257,000.00 | 1,151,363,163.00 | 4.62 |
| 9 | Dinas Sosial | 23,882,326,011.00 | 24,955,470,000.00 | 1,073,143,989.00 | 4.49 |
| 10 | Dinas Ketenagakerjaan | 25,185,364,383.00 | 24,903,554,000.00 | - 281,810,383.00 | - 1.12 |
| 11 | Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perl. Anak | 18,721,283,227.00 | 18,346,867,000.00 | - 374,416,227.00 | - 2.00 |
| 12 | Dinas Ketahanan Pangan | 25,222,054,297.00 | 15,729,883,000.00 | - 9,492,171,297.00 | - 37.63 |
| 13 | Dinas Pertanahan | 18,298,143,854.00 | 16,612,350,000.00 | - 1,685,793,854.00 | - 9.21 |
| 14 | Dinas Lingkungan Hidup | 232,315,957,881.00 | 114,706,350,000.00 | - 117,609,607,881.00 | - 50.62 |
| 15 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 20,683,923,868.00 | 23,516,680,000.00 | 2,832,756,132.00 | 13.70 |
| 16 | Dinas Pengendalian Penduduk & KB | 27,022,735,931.00 | 36,529,479,000.00 | 9,506,743,069.00 | 35.18 |
| 17 | Dinas Perhubungan | 143,419,942,130.00 | 116,614,150,000.00 | - 26,805,792,130.00 | - 18.69 |
| 18 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 79,653,132,678.00 | 72,908,000,000.00 | - 6,745,132,678.00 | - 8.47 |
| 19 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 19,013,845,961.00 | 19,392,328,000.00 | 378,482,039.00 | 1.99 |
| 20 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 22,721,782,335.00 | 22,373,068,000.00 | - 348,714,335.00 | - 1.53 |
| 21 | Dinas Pemuda dan Olahraga | 120,627,842,078.00 | 67,407,562,000.00 | - 53,220,280,078.00 | - 44.12 |
| 22 | Dinas Kebudayaan | 21,438,163,439.00 | 23,928,360,000.00 | 2,490,196,561.00 | 11.62 |
| 23 | Dinas Perpustakaan | 13,244,940,038.00 | 12,942,414,000.00 | - 302,526,038.00 | - 2.28 |
| 24 | Dinas Kearsipan | 10,693,755,038.00 | 10,023,846,000.00 | - 669,909,038.00 | - 6.26 |
| 25 | Dinas Perikanan dan Pertanian | 42,682,113,787.00 | 44,624,871,000.00 | 1,942,757,213.00 | 4.55 |
| 26 | Dinas Pariwisata | 41,375,201,106.00 | 42,743,507,000.00 | 1,368,305,894.00 | 3.31 |
| 27 | Dinas Perdagangan | 24,592,368,110.00 | 22,241,065,000.00 | - 2,351,303,110.00 | - 9.56 |
| 28 | Sekretariat Daerah | 301,700,773,452.00 | 291,200,592,000.00 | - 10,500,181,452.00 | - 3.48 |
| 29 | Sekretariat DPRD | 222,794,884,191.00 | 184,272,166,000.00 | - 38,522,718,191.00 | - 17.29 |
| 30 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 42,069,049,553.00 | 42,868,819,000.00 | 799,769,447.00 | 1.90 |
| 31 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 96,078,335,159.00 | 90,088,985,000.00 | - 5,989,350,159.00 | - 6.23 |
| 32 | Badan Pendapatan Daerah | 135,979,929,182.00 | 119,557,091,000.00 | - 16,422,838,182.00 | - 12.08 |
| 33 | Badan Kepegawaian & Pengembangan SDMD | 30,704,884,842.00 | 30,678,090,000.00 | - 26,794,842.00 | - 0.09 |
| 34 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | 10,575,936,007.00 | 11,729,303,000.00 | 1,153,366,993.00 | 10.91 |
| 35 | Inspektorat Daerah | 55,358,466,984.00 | 42,703,928,000.00 | - 12,654,538,984.00 | - 22.86 |
| 36 | Kecamatan Biringkanaya | 57,055,955,671.00 | 56,226,900,000.00 | - 829,055,671.00 | - 1.45 |
| 37 | Kecamatan Bontoala | 40,770,128,835.00 | 40,346,500,000.00 | - 423,628,835.00 | - 1.04 |
| 38 | Kecamatan Makassar | 57,505,235,307.00 | 56,126,400,000.00 | - 1,378,835,307.00 | - 2.40 |
| 39 | Kecamatan Mamajang | 46,186,565,105.00 | 45,517,500,000.00 | - 669,065,105.00 | - 1.45 |
| 40 | Kecamatan Manggala | 49,290,054,588.00 | 48,639,700,000.00 | - 650,354,588.00 | - 1.32 |
| 41 | Kecamatan Mariso | 36,927,063,261.00 | 36,516,900,000.00 | - 410,163,261.00 | - 1.11 |
| 42 | Kecamatan Panakkukang | 57,703,073,803.00 | 56,901,700,000.00 | - 801,373,803.00 | - 1.39 |

| NO | PERANGKAT DAERAH | APBD POKOK | RKPD PERUBAHAN | BERTAMBAH / (BERKURANG) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Kecamatan Rappocini | 56,203,141,520.00 | 55,668,300,000.00 | - 534,841,520.00 | - 0.95 |
| 44 | Kecamatan Tallo | 54,497,795,230.00 | 53,486,450,000.00 | - 1,011,345,230.00 | - 1.86 |
| 45 | Kecamatan Tamalanrea | 46,127,643,769.00 | 45,510,300,000.00 | - 617,343,769.00 | - 1.34 |
| 46 | Kecamatan Tamalate | 57,414,944,990.00 | 56,829,450,000.00 | - 585,494,990.00 | - 1.02 |
| 47 | Kecamatan Ujung Pandang | 43,453,650,652.00 | 42,904,300,000.00 | - 549,350,652.00 | - 1.26 |
| 48 | Kecamatan Ujung Tanah | 33,676,066,823.00 | 33,346,900,000.00 | - 329,166,823.00 | - 0.98 |
| 49 | Kecamatan Wajo | 32,336,428,745.00 | 32,634,650,000.00 | 298,221,255.00 | 0.92 |
| 50 | Kecamatan Kepulauan Sangkarrang | 14,617,140,004.00 | 14,539,850,000.00 | - 77,290,004.00 | - 0.53 |
| 51 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 41,621,763,080.00 | 39,987,494,000.00 | - 1,634,269,080.00 | - 3.93 |
| **TOTAL BELANJA** | | **5,684,607,633,732.00** | **5,128,954,350,000.00** | **- 555,653,283,732.00** | **- 4.15** |

*Sumber: Sistem Informasi Manajemen Anggaran & Akuntansi Keuangan Daerah (SIMAKDA), Tahun 2025*

Pada Tabel III.11 dapat dilihat proyeksi besaran Belanja Daerah pada Perangkat Daerah Kota Makassar pada Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp. 555,653,283,732.00 atau sebesar 4,15% dari jumlah Belanja Daerah pada RKPD Pokok Tahun 2025.

### 3.3.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Ketentuan dalam Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Adapun Penerimaan Pembiayaan Daerah dapat bersumber dari:

a. SILPA;
b. pencairan Dana Cadangan;
c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. penerimaan Pinjaman Daerah;
e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 3.3.4.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, Pemerintah Daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pinjaman, maka Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Untuk APBD perubahan Tahun 2025 dilakukan penyesuaian Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA) sesuai dengan Perhitungan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar tahun 2024 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2025 mencatatakan Penerimaan Pembiayaan pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA) senilai Rp. 230.243.575.021,13,-dan ini juga sekaligus merupakan Pembiyaan Netto untuk Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2025.

Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, yang digunakan untuk menutup defisit atau mengelola surplus dalam anggaran. Pada APBD Perubahan Kota Makassar Tahun 2025, jumlah pembiayaan netto mengalami Penurunan sebesar 23,25%, dari Rp 300.000.000.000,00 pada APBD Pokok menjadi Rp. 230.243.575.021,13 Penurunan ini terutama disebabkan oleh Berkurangnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA), yang menurun sebesar Rp 69.756.424.978.87. Tidak ada penerimaan dari sumber lain seperti pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, atau pinjaman daerah, sehingga pembiayaan netto sepenuhnya bergantung pada SILPA. Hal ini mencerminkan kebutuhan untuk penyesuaian anggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih hati-hati untuk menjaga keseimbangan fiskal.

### 3.3.4.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Struktur Pembiayaan daerah pada APBD Kota Makassar pada P-RKPD Tahun 2025 dapat disajikan dalam tabel berikut :

## Tabel III.12.
## Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Makassar Tahun 2025

| NO | URAIAN | TARGET RPJMD TAHUN 2025 | APBD POKOK TAHUN 2025 | TARGET PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025* | BERTAMBAH / (BERKURANG) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5-4) | 7 |
| **6.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **50,000,000,000.00** | **300,000,000,000.00** | **230,243,575,021.13** | **- 69,756,424,978.87** | **- 23.25** |
| 6.1.01 | Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA) | 50,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 | 230,243,575,021.13 | - 69,756,424,978.87 | - 23.25 |
| 6.1.02 | Pencairan Dana Cadangan | - | - | - | - | - |
| 6.1.03 | Hasil Penjualan Kekayaan daerah Yang dipisahkan | - | - | - | - | - |
| 6.1.04 | Penerimaan Pinjaman Daerah | - | - | - | - | - |
| 6.1.05 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | - | - | - | - | - |
| 6.1.06 | Penerimaan Pembiayaan lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang udangan | - | - | - | - | - |
| **6.2** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 6.2.01 | Pembentukan Dana Cadangan | - | - | - | - | - |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | - | - | - | - | - |
| 6.2.03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo | - | - | - | - | - |
| 6.2.04 | Pemberian Pinjaman Daerah | - | - | - | - | - |
| 6.2.05 | Pengeluaran Pembiayaan lainya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan | - | - | - | - | - |
| 6.2.01 | Belanja Modal Aset Lainnya | - | - | - | - | - |
| **JUMLAH PEMBIYAAN NETTO** | | **50,000,000,000.00** | **300,000,000,000.00** | **230,243,575,021.13** | **- 69,756,424,978.87** | **- 23.25** |

*Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar, 2025*

# BAB IV

# PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH



# BAB IV
# SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

Pembangunan Daerah Kota Makassar tahun 2025 memegang peran penting dalam membangun fondasi awal sasaran dan prioritas Pembangunan kota Makassar untuk lima tahun ke depan. Sebagai tahun pertama dari periode Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025-2029, tahun ini menjadi titik tolak pelaksanaan visi misi pembangunan jangka menengah daerah yang akan menentukan pencapaian keberhasilan tujuan dan sasaran Pembangunan daerah secara keseluruhan.

Prioritas dan sasaran pembangunan yang merupakan dasar utama untuk menentukan strategi dan arah kebijakan untuk tahun 2025 sangat menentukan capaian kinerja akhir RPJMD. Demikian juga menentukan program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan target kinerja dan besaran anggaran.

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, khususnya di Bab III tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Pasal 9 Ayat 2 yang menyebutkan “Perumusan perubahan RKPD Tahun 2025 perlu memperhatikan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih dan memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara kepala daerah dan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS, maka perubahan RKPD tahun 2025 menerapkan sesuai dengan sasaran dan prioritas Pembangunan berdasarkan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029. Selain itu ada edaran nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025.

Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang berlaku dan menjaga kesinambungan Pembangunan daerah, maka rumusan sasaran dan prioritas Pembangunan daerah kota makassar pada Perubahan RKPD Tahun 2025 mengacu dan memperhatikan: (1) RPJPD Kota Makassar tahun 2024-2045; (2) RTRW Kota Makassar tahun 2024-2043; (3) Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025; (4) Isu Strategis Pembangnan Berkelanjutan dalam KLHS RPJMD (5) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026, (6) Rancangan Akhir RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 serta evaluasi RKPD sampai dengan triwulan satu tahun 2025.

## 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program Perangkat Daerah. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Adapun Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa

sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran yang merupakan pengejawantahan visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Pembangunan menjadi arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mewujudkan visi dan mendukung pelaksanaan misi Pembangunan daerah tahun 2025-2029. Kedudukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Kota Makassar tahun 2025 merupakan tahun pertama dari proses pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Makassar tahun 2025-2029 dalam rangka mencapai visi pemerintah Kota Makassar Tahun 2025-2029 "**Makassar Unggul, Inklusif, Aman dan Berkelanjutan**".

Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar yang hendak dilaksanakan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah, dan Penciptaan Lapangan Kerja
Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Misi 3: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang Kota Yang Berkeadilan
Misi 4: Mengembangkan Pusat Inovasi, Seni Budaya, dan Pariwisata
Misi 5: Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Berdaya Saing, Serta Menegakkan Ketertiban Umum
Misi 6: Meningkatkan Akses Pelayanan dan Perlindungan Perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas, Serta Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga
Misi 7: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Bencana

Tujuan dan sasaran Pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program Pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan program Pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran tercapainya indikator, dalam rangka mencapai misi. Tujuan dan sasaran Pembangunan menjadi dasar dalam mengukur kinerja Pembangunan secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran Pembangunan pada tahun 2025 sesuai RPJMD 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Kota Makassar Dengan Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi.
   Tujuan ini dijabarkan ke dalam 2 sasaran sebagai berikut:
   a. Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri dan Perdagangan
   b. Meningkatnya Kesempatan Kerja. dan Pendapatan Masyarakat
2. Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah
   Tujuan ini dijabarkan ke dalam 3 sasaran sebagai berikut:
   a. Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah
   b. Terwujudnya Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan
   c. Meningkatnya Realisasi Investasi di Kota Makassar
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing
   Tujuan ini dijabarkan ke dalam 3 sasaran sebagai berikut:
   a. Meningkatnya Kualitas Dan Aksesibilitas Pendidikan
   b. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
   c. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat
4. Meningkatnya Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas dan Merata.
   Tujuan ini dijabarkan ke dalam 2 sasaran sebagai berikut:
   a. Tersedianya Infrastruktur Sarana dan Prasarana Terintegrasi

b. Meningkatnya Pengendalian dan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

5. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah
   Tujuan ini dijabarkan ke dalam 2 sasaran sebagai berikut:
   a. Meningkatnya Penguasaan IPTEK
   b. Meningkatnya Kuantitas Inovasi Seluruh Bidang Pembangunan
6. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata
   Tujuan ini dijabarkan ke dalam 3 sasaran sebagai berikut:
   a. Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Kunjungan Wisatawan
   b. Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Budaya
   c. Meningkatnya Kuantitas Industri Ekonomi Kreatif
7. Meningkatnya Kualitas Birokrasi Yang Berintegritas Dan Adaptif
   Tujuan ini dijabarkan ke dalam 1 sasaran sebagai berikut:
   a. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
8. Meningkatnya Kualitas Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum.
   Tujuan ini dijabarkan ke dalam 1 sasaran sebagai berikut:
   a. Meningkatnya Kualitas Keamanan Masyarakat
9. Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender
   Tujuan ini dijabarkan ke dalam 3 sasaran sebagai berikut:
   a. Menurunnya Ketimpangan Gender.
   b. Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak
   c. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Olahraga
10. Meningkatnya Perlindungan Sosial Yang Adaptif Dan Tepat Sasaran
    Tujuan ini dijabarkan ke dalam 2 sasaran sebagai berikut:
    a. Menurunnya Disparitas Pendapatan
    b. Meningkatnya Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas
11. Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari
    Tujuan ini dijabarkan ke dalam 1 sasaran sebagai berikut:
    a. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
12. Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
    Tujuan ini dijabarkan ke dalam 1 sasaran sebagai berikut:
    a. Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

Dari *cascading* visi dan misi menjadi tujuan dan sasaran, dapat diketahui bahwa visi dan misi pemerintah Kota Makassar diturunkan menjadi 12 (dua belas) tujuan dengan 12 (dua belas) indikator tujuan dan 25 (dua puluh lima) sasaran dengan 38 (tiga puluh delapan) indikator sasaran. Adapun *Cascading* tujuan, sasaran dan indikator serta target pembangunan daerah tahun 2025, dapat dilihat pada tabel IV.1.

Tujuan dan sasaran Pembangunan dalam Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2025 berpedoman pada rancangan akhir RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan capaian pada tahun 2024, disajikan pada tabel IV.1 berikut:

**Tabel IV.1.**
**Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Daerah Kota Makassar Tahun 2025**

| Tujuan/Sasaran | | | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran | | Capaian Tahun 2024 | Target Kinerja Perubahan RKPD Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tujuan 1 | Terwujudnya Kota Makassar Dengan Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi. | | 1 | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,56 | 5,73 |
| | Sasaran 1 | Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri dan Perdagangan | 2 | Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) | 18,17 | 19,29 |
| | | | 3 | Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor (%) | 20,03 | 20,10 |
| | Sasaran 2 | Meningkatnya Kesempatan Kerja. dan Pendapatan Masyarakat | 4 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) | 9,71 | 9,62 |
| | | | 5 | PDRB Per Kapita (Juta Rupiah Per Kapita/Tahun) | 165.95 | 175.46 |
| Tujuan 2 | Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah | | 6 | Indeks Daya Saing Daerah | 4,10 | 4,17 |
| | Sasaran 3 | Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah | 7 | Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (%) | 0,58 | 0,59 |
| | Sasaran 4 | Terwujudnya Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan. | 8 | Tingkat Inflasi (%) | 1,19 | 1,52 |
| | | | 9 | Indeks Ketahanan Pangan | 83,86 | 89,28 |
| | Sasaran 5 | Meningkatnya Realisasi Investasi di Kota Makassar | 10 | Persentase Peningkatan Investasi Daerah (%) | -50,26 | 8,75 |
| Tujuan 3 | Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | 11 | Indeks Pembangunan Manusia | 85,23 | 85,46 |
| | Sasaran 6 | Meningkatnya Kualitas Dan Aksesibilitas Pendidikan | 12 | Indeks Pendidikan | 81,96 | 82,03 |

| Tujuan/Sasaran | | | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran | | Capaian Tahun 2024 | Target Kinerja Perubahan RKPD Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | Sasaran 7 | Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat | 13 | Usia Harapan Hidup (Tahun) | 75,33 | 75,51 |
| | Sasaran 9 | Meningkatnya Daya Beli Masyarakat | 14 | Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah/Per Kapita/Tahun) | 18.386 | 19.301 |
| Tujuan 4 | Meningkatnya Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas dan Merata. | | 15 | Indeks Layanan Infrastruktur | 74,25 | 78,69 |
| | Sasaran 10 | Tersedianya Infrastruktur Sarana dan Prasarana Terintegrasi | 16 | Indeks Layanan Infrastruktur Kebinamargaan | 35,40 | 37,17 |
| | | | 17 | Indeks Layanan Infrastruktur Keciptakaryaan | 49,39 | 51,86 |
| | Sasaran 11 | Meningkatnya Pengendalian dan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | 18 | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Rencana Tata Ruang (%) | 100 | 100 |
| | | | 19 | Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) (%) | 10 | 10 |
| Tujuan 5 | Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah | | 20 | Indeks Inovasi Daerah | 76,56 | 77,59 |
| | Sasaran 12 | Meningkatnya Penguasaan IPTEK | 21 | Indeks Kapabilitas Inovasi | 4,46 | 4,51 |
| | Sasaran 13 | Meningkatnya Kuantitas Inovasi Seluruh Bidang Pembangunan | 22 | Persentase Peningkatan Inovasi Pembangunan Daerah (%) | 101 Inovasi | 2 |
| Tujuan 6 | Meningkatnya Daya Saing Pariwisata | | 23 | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum (%) | 2,18 | 2,23 |
| | Sasaran 14 | Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Kunjungan Wisatawan | 24 | Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara | 5.684.295 | 6.247.812 |
| | | | 25 | Jumlah Daya Tarik Pariwisata Yang Di fasilitasi | 1 Lokasi | 1 Lokasi |
| | Sasaran 15 | Meningkatnya Pengelolaan dan | 26 | Persentase Peningkatan Karya | N.A | 33.3 |

| Tujuan/Sasaran | | | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran | | Capaian Tahun 2024 | Target Kinerja Perubahan RKPD Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pelestarian Budaya | | Budaya Terdaftar Dalam Warisan Budaya Tak benda (%) | | |
| | | | 27 | Persentase cagar budaya yang dilindungi dan dimanfaatkan (%) | N.A | 12 |
| | Sasaran 16 | Meningkatnya Kuantitas Industri Ekonomi Kreatif | 28 | Jumlah Industri Ekonomi Kreatif di Kota Makassar (Industri) | 4,220 | 4.350 |
| Tujuan 7 | Meningkatnya Kualitas Birokrasi Yang Berintegritas Dan Adaptif | | 29 | Indeks Reformasi Birokrasi | 78,64 | 79,97 |
| | Sasaran 17 | Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah | 30 | Predikat Akuntabilitas Pemerintahan Daerah | B | B |
| | | | 31 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 4,01 | 4,02 |
| | | | 32 | Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK | 87,00 | 87,48 |
| Tujuan 8 | Meningkatnya Kualitas Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum. | | 33 | Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | NA | 75 |
| | Sasaran 18 | Meningkatnya Kualitas Keamanan Masyarakat | 34 | Persentase Tindak Kriminal Yang Ditangani (%) | 54,03 | 55,03 |
| Tujuan 9 | Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender | | 35 | Indeks Pembangunan Keluarga | 63,13 | 63,14 |
| | Sasaran 19 | Menurunnya Ketimpangan Gender | 36 | Indeks Ketimpangan Gender | 0,183 | 0,179 |
| | Sasaran 20 | Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak | 37 | Indeks Perlindungan Anak | 68,30 | 69,44 |
| | Sasaran 21 | Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Olahraga | 38 | Indeks Pembangunan Pemuda | 57,67 | 59,00 |
| | | | 39 | Indeks Pembangunan Keolahragaan | 0,476 | 0,497 |

| Tujuan/Sasaran | | | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran | | Capaian Tahun 2024 | Target Kinerja Perubahan RKPD Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tujuan 10 | Meningkatnya Perlindungan Sosial Yang Adaptif Dan Tepat Sasaran | | 40 | Tingkat Kemiskinan (%) | 4,97 | 3,62-3,03 |
| | Sasaran 22 | Menurunnya Disparitas Pendapatan | 41 | Gini Rasio | 0,372 | 0,366 |
| | Sasaran 23 | Meningkatnya Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas | 42 | Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%) | 41,1 | 41,81 |
| Tujuan 11 | Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari | | 43 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 61,41 | 66,17 |
| | Sasaran 24 | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | 44 | Indeks Kualitas Air | 58,70 | 73,95 |
| | | | 45 | Indeks Kualitas Udara | 81,51 | 75,22 |
| | | | 46 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | 28,92 | 36,06 |
| | | | 47 | Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%) | 3,18 | 35 |
| Tujuan 12 | Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim | | 48 | Indeks Risiko Bencana | 113,71 | 110 |
| | Sasaran 25 | Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim | 49 | Indeks Ketahanan Daerah | 0,46 | 0,47 |
| | | | 50 | Penurunan Emisi GRK Tahunan (%) | NA | 32,46% |

## 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Prioritas pembangunan Kota Makassar Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Pasal 9 ayat 3 Bahwa :

1. Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya pada tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian, meliputi:
   a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asurnsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan; dan/atau
   b. keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan-anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan, yang menimbulkan penarnbahan dan latau pengurangan program, kegiatan dan/ atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2025.
2. Perumusan perubahan RKPD Tahun 2025 perlu mernperhatikan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih dan mernperhatikan hasil kesepakatan bersarna antara kepala daerah dan ketua DPRD tentang penarnbahan kegiatan darr/ atau sub kegiatan baru pada KUAdan PPAS.
3. Penambahan dan /atau pengurangan kegiatan dan/ atau sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memperhatikan. visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam perubahan perubahan RKPD Tahun 2025, ditindaklanjuti dan/atau penambahan dengan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

### 4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

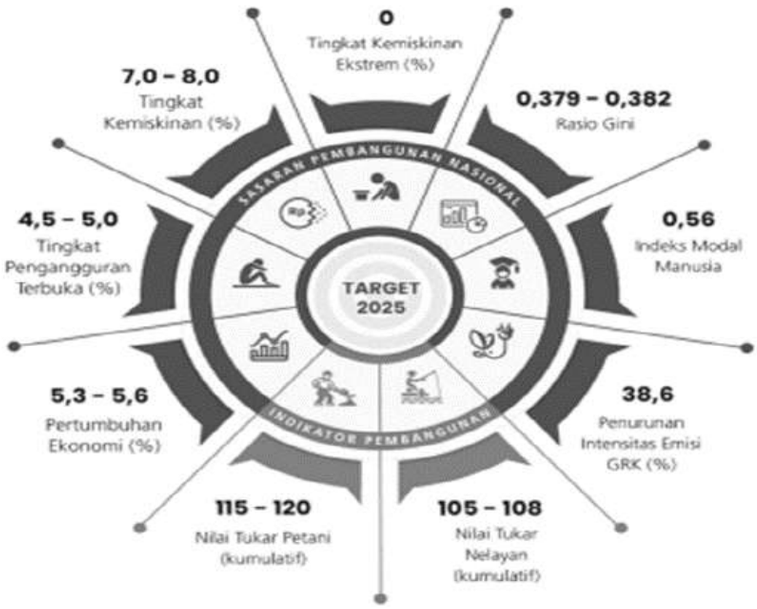
**Gambar IV.1.**
**Tema Pembanguan RKP tahun 2025**
**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**




*Sumber: RKP Tahun 2025.*

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan nasional tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut:

**Gambar IV.2.**
**Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025**




*Sumber: RKP Tahun 2025.*

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan nasional tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

**Gambar IV.3.**
**Prioritas Nasional**




*Sumber: RKP Tahun 2025.*

### 4.2.2. Tema dan Sasaran Pembangunan Wilayah Sulawesi Selatan

Tahun 2025 merupakan gerbang awal menuju pencapaian visi Indonesia Emas 2045, sebuah cita-cita luhur untuk membangun bangsa yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Salah satu tujuan utama pembangunan nasional yaitu mengurangi kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia - Kawasan Timur Indonesia. Untuk mencapai tujuan pengurangan kesenjangan antarwilayah, kebijakan pembangunan kewilayahan dan sarana prasarana akan difokuskan pada pengembangan wilayah yang lebih merata dan berkeadilan, termasuk keselarasan pembangunan perkotaan, sebagai pusat aglomerasi kegiatan dan pertumbuhan, serta perdesaan, sebagai lokus pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan. Hal ini juga didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas danramah lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, ditetapkan tema, target pertumbuhan dan kontribusi per wilayah pulau untuk Tahun 2025 sebagaimana termuat pada infografis di bawahini. Penetapan ini menjadi landasan strategis dalam membangun fondasi yang kokoh bagiIndonesia Emas 2045.

**Gambar IV.4.**
**Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan**




*Sumber: RKP Tahun 2025*

### 4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari Rancangan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 2029 dan mengacu pada prioritas nasional yang termuat pada RPJMN tahun 2025-2029 dan RKP Tahun 2025. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tema pembangunan daerah tahun 2025 yaitu “Peningkatan Perekonomian Daerah dan Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing”. Dalam rangka operasionalisasi tema pembangunan Tahun 2025 sebagai tahun awal RPJMD Tahun 2025-2029, terdapat 8 prioritas pembangunan yang menjadi pijakan dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi

2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal
3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru
4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing
5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan
6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani
7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan
8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi

Perubahan Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

**Tabel IV.2.**
**Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025**

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan/Sasaran Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan | Satuan | Capaian 2024 | Target RPJMD | Target P_RKPD 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi | T.1. Meningkatnya kualitas Modal Manusia | Indeks Modal Manusia | Angka | n.a | 0,52 | 0,52 |
| | | S.1. Meningkatnya kualitas kesehatan secara merata | Usia Harapan Hidup | Tahun | 73,83 | 73,95* | 73,95* |
| | | S.2. Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif | Rata rata lama sekolah | Tahun | 8,86 | 9,47 | 9,47 |
| | | | Harapan lama sekolah | Tahun | 13,55 | 13,80-13,81 | 13,80-13,81 |
| | | | Persentase siswa yang terserap di perguruan tinggi | Persen | 23,04 | 24,11 | 24,11 |
| 2 | Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif denganmemperhatikan pelibatan kelompok marjinal | T.2. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat yang adaptif | Indeks Ketahanan Nasiona | Angka | 2,87 | 3,04 | 3,04 |
| | | S.3. Meningkatnya Kualitas Demokrasi | Indeks Demokrasi Provinsi | Angka | 76,43 (2023) | 82,36 | 82,36 |
| | | S.4. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan pemajuan kebudayaan | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Persen | 79,04 | 79,08 | 79,08 |
| | | | Indeks Pembangunan Kebudayaan | Skor | 55,26 (2023) | 56,43–56,51 | 56,43–56,51 |
| | | S.5. Meningkatnya kualitas generasi | Indeks Perlindungan Anak | Angka | 60,74 (2023) | 61,37-63,48 | 61,37-63,48 |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan/Sasaran Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan | Satuan | Capaian 2024 | Target RPJMD | Target P_RKPD 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | muda dan kesetaraan gender | Indeks Pembangunan Pemuda | Angka | 56,67 (2023) | 56,78 | 56,78 |
| | | | Indeks Ketimpangan Gender | Angka | 0,366 (2023) | 0,348-0,344 | 0,348-0,344 |
| 3 | Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru | T.3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif | Lajuj Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 5,02 | 5,2-5,8 | 5,2-5,8 |
| | | Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas | Rasio Gini | Angka | 0,363 | 0,360 | 0,360 |
| | | | Indeks Ekonomi Biru | Skor | 80,86(data tahun 2023) | 82,02* | 82,02* |
| | | | Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB | Persen | 13,02 | 13,05 | 13,05 |
| | | S.6. Meningkatnya produktivitas ekonomi dan swasembada pangan | Rasio Volume usaha Kopersasi terhadap PDRB (%) | Persen | 0,90 | 0,95 | 0,95 |
| | | | Prevalensi Ketidakcukupan Komsumsi pangan | Persen | 6,99 | 7,05 | 7,05 |
| | | | Indeks Ketahanan Pangan | Angka | 83,82 | 85,02 | 85,02 |
| | | | Persentase Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB | Persen | 9,68 | 10,5* | 10,5* |
| 4 | Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing | S.7. Meningkatnya Integrasi ekonomi regional dan global | Tingkat Inflasi | Persen | 1,23 | 3,2 -3,8 | 3,2 -3,8 |
| | | S.8. Meningkatnya Stabilitas Fiskal dan Ekonomi Makro Daerah | Inklusi Keuangan | Persen | 75,02 | 80 | 80 |
| | | | Persentase Desa Mandiri | Persen | 32,88 | 33,09* | 33,09* |
| 5 | Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan | S.9. Meningkatnya Pembangunan Perdesaan | Tingkat Kemiskinan | Persen | 7,77 | 7,30-7,89 | 7,30-7,89 |
| | | S.10. Menurunnya pengangguran | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 4,19 (Agt) | 3,80 – 4,10 | 3,80 – 4,10 |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan/Sasaran Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan | Satuan | Capaian 2024 | Target RPJMD | Target P_RKPD 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) | Nilai | 54,43 (2022) | 55,37 | 55,37 |
| 6. | Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani | T.4. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital | Nilai Pilar Infrastruktur ITDN | Nilai | 59,93 (2022) | 61,66 | 61,66 |
| | | S.11. Meningkatnya pembangunan infrastruktur teknologi | Nilai Pilar Keterampilan Masyarakat ITDN) | Nilai | 53,92 (2022) | 61,66 | 61,66 |
| | | S.12. Meningkatnya ketrampilan digital masyarakat | Indeks Reformasi Birokrasi | Poin | 81,74 | 81,80 | 81,80 |
| | | T.5. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, inovatif dan responsif | Nilai SAKIP | Angka | 69,02 | 69,27 | 69,27 |
| | | S.11. Terwujudnya akuntabilitas pemerintah daerah | Indeks SPBE | Poin | 3,94 | 4,01 | 4,01 |
| | | S12. Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Pelayanan Publik | Poin | 4,12 | 4,41 | 4,41 |
| | | | Indeks Inovasi Daerah | Angka | 59,66 | 60 | 60 |
| | | S.13. Meningkatnya inovasi pembangunan daerah | Indeks Williamson | Angka | n.a | 0,55 | 0,55 |
| 7. | Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan. | T.6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yg merata dan lingkungan yang berkelanjutan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Angka | 75,69 | 77,61 | 77,61 |
| | | | Penurunan Intensitas Emisi GRK | Angka | n.a | 29,70 | 29,70 |
| | | | Indeks Layanan Infrastruktur | Persen | 85,64 | 88,39 | 88,39 |
| | | S.14. Meningkatnya Kualitas infrastruktur | Indeks Resiko Bencana | Poin | 140,76 | 135,46 | 135,46 |
| 8 | Peningkatan mitigasi dan ketahanan menghadapi situasi bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi | S.15. Meningkatnya ketangguhan adaptasi dan mitigasi | | | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan/Sasaran Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan | Satuan | Capaian 2024 | Target RPJMD | Target P_RKPD 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | bencana dan perubahan iklim | | | | | |

### 4.2.3.1. Pembangunan Kawasan Makassar

Pembangunan kawasan Makassar dilakukan dalam rangkamengoptimalkan peran Kawasan Makassar yang merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai pusat orientasi pelayanan berskala internasional dan sentra pengolahan komoditas sumber daya alam. Pembangunan kawasan Makassar memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dengan kontribusi rata-rata 49.63 persen pertahun, yang didominasi oleh lapangan usaha perdagangan dan jasa dengan kontribusi sebesar 17,51 persen, lapangan usaha konstruksi dengan kontribusi sebesar 17,17 persen dan lapangan usaha industry pengolahan dengan kontribusi sebesar 16,23 persen yang mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan, sebagaimana peran kawasan Makassar sebagai pusat perdagangan dan jasa regional di Kawasan Timur Indonesia yang memacu tumbuhnya investasi rata-rata sebesar 7,15 persen per tahun atau rata rata investasi sebesar Rp. 97,36 triliun (atas dasar harga berlaku). Pencapaian kinerja pembangunan makro di Kawasan Makassar dapat digambarkan berdasarkan beberapa indikator pembangunan sebagaimana table berikut:

**Tabel IV.3.**
**Terget dan Capaian Pembangunan pada**
**Kawasan Makassar dan Sekitarnya Tahun 2025**

| Kab/Kota | Indikator Pembangunan | Satuan | Target RPJMD 2024 | Capaian 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Makassar | Pertumbuhan Ekonomi | % | 5,73 | 5,56 |
| | Tingkat Kemiskinan | % | 3,62-3,03 | 4,97 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 9,71 | 9,62 |
| | Gini Ratio | Nilai | 0,366 | 0,372 |
| | IPM | Nilai | 85,23 | 85,46 |

*Sumber: RKPD Provinsi Sulawesi Selatan, 2025*

### 4.2.3.2. Sasaran Pembangunan Kawasan Makassar

Kawasan Makassar sebagai pusat pertumbuhan Sulawesi Selatan diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dengan mengoptimalkan keunggulan wilayah sebagai kawasan wisata berbasis kepulauan dan geopark serta potensi komoditas pertanian dan perikanan melalui pengembangan industry pengolahan hasil pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan pemasaran produk, pengembangan wisata bahari yang didukung oleh penguatan peran lembaga masyarakat serta usaha kecil dan menengah. Optimalisasi peran Kawasan Makassar sebagai pusat pertumbuhan wilayah, pusat pelayanan jasa dan sentra pengolahan komoditas sumber daya alam diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja investasi dan meningkatkan kembali *share* ekspor Sulawesi Selatan.

Walaupun nilai IPM kabupaten di Kawasan Makassar menunjukkan peningkatan, namun perlu untuk lebih mengoptimalkan pencapaian indeks pendidikan di kabupaten Pangkejene Kepulauan, kabupaten Takalar dan kabupaten Maros dan dan Indeks

Kesehatan di kabupaten Takalar, kabupaten Gowa, kabupaten Maros dan kabupaten Pangkajene Kepulauan, meningkatkan pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi yang layak khususnya di kawasan pesisir dan kepulauan. Selain itu, Kawasan Makassar merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Mamminasata, yang merupakan target utama penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui peningkatan penggunaan system angkutan massal perkotaan. Sedangkan pembangunan berketahanan bencana diprioritaskan pada penanganan bencana hidrometeorologi berupa bahaya banjir, cuaca ekstrim, dan bahaya gelombang tinggi dan abrasi dengan kelas bahaya tinggi.

Sasaran utama pembangunan wilayah Kawasan Makassar tahun 2025 adalah meningkatnya kualitas dan penyerapan tenaga kerja, menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan pada kawasan perkotaan, serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang kompetitif dan inklusif dengan target sebagai berikut.

**Tabel IV.4.**
**Sasaran Pembangunan Pada Kawasan Pembangunan Makassar**
**Tahun 2025**

| Indikator Pembangunan | Satuan | Target RKPD 2025 |
|---|---|---|
| Pertumbuhan Ekonomi | % | 6,06 |
| Tingkat Kemiskinan (Sept.) | % | 3,65 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | % | 10,05 |
| Rasio Gini | Nilai | 0,378 |
| Indeks Pembangunan Manusia | Nilai | 84,50 |

*Sumber: RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025*

### 4.2.4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Makassar Tahun 2025

Prioritas pembangunan daerah Kota Makassar tahun 2025 menggambarkan fokus penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMD. Secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam perumusan prioritas dan sasaran prioritas pembangunan daerah Kota Makassar mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut diperlukan untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Memperhatikan kondisi-kondisi tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2025 yaitu: **"Percepatan Pembangunan Yang Inklusif dan Berkelanjutan"** yang kemudian dijabarkan melalui prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Penguatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang *Sombere'* dan *Smart*;
3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
4. Penguatan ketahanan ekonomi masyarakat dan peningkatan peluang kerja dan peluang bisnis baru;
5. Percepatan pembangunan infrastruktur kota yang berkualitas dan pengelolaan lingkungan hidup serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Kota Makassar tahun 2025 difokuskan pada sasaran dan target kinerja pembangunan sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel IV.5.**
**Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Makassar Tahun 2025**

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan dan Sasaran Prioritas | Indikator Kinerja Pembangunan | Satuan | Realisasi 2024 | Target | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RKPD 2025 | RPJMD |
| 1 | Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Angka | 85,23 | 84,05 | 84,05 |
| | | Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan | Indeks Pendidikan | Angka | 0,819 | 0,865 | 0,865 |
| | | Meningkatnya Daya Beli Masyarakat | Pengeluaran Per kapita | Juta Rupiah | 18.386 | 18,91 jt | 18,91 jt |
| 2 | Penguatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang *Sombere'* dan *Smart* | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif | Indeks Reformasi Birokrasi | Angka | 78,64 | 66,03 | 66,03 |
| | | Terwujudnya Pelayanan Publik yang *Sombere'* dan *Smart* | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Angka | 86,2 | 81 | 81 |
| | | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) | Predikat | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi |
| 3 | Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial | Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Mitigasi Sosial | Indeks Kesehatan | Angka | 0,849 | 0.81 | 0.81 |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan | Usia Harapan Hidup | Angka | 75,33 | 72.4 | 72.4 |
| | | Meningkatnya | Angka Kemiskinan | Persen | 4,97 | 4.10 | 4.10 |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan dan Sasaran Prioritas | Indikator Kinerja Pembangunan | Satuan | Realisasi 2024 | Target | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RKPD 2025 | RPJMD |
| | | Perlindungan Masyarakat Miskin | | | | | |
| 4 | Penguatan ketahanan ekonomi masyarakat dan peningkatan peluang kerja dan peluang bisnis baru | Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Secara Merata | Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 5,56 | 6.7 | 6.7 |
| | | Tersedianya Kemudahan Akses Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Persen | 9,71 | 10.50% | 10.50% |
| | | | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | Persen | 58,72 (thn 2023) | 61.81% | 61.81% |
| | | Terwujudnya Gerakan Masyarakat Memperkuat Ketahanan Ekonomi | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita | Juta Rupiah | 165,95 jt | 143.35 jt | 143.35 jt |
| | | | Rasio Gini | Angka | 0,387 | 0.388 | 0.388 |
| 5 | Percepatan pembangunan infrastruktur kota yang berkualitas dan pengelolaan lingkungan hidup serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim | Mewujudkan Makassar Menjadi "*Livable City*" dan "*Resilient City*" | Indeks Kota Nyaman *(Livable City Index)* | Angka | 67,3 (thn 2022) | 60.22 | 60.22 |
| | | Tersedianya Infrastruktur Menuju Kota Nyaman | Indeks Layanan Infrastruktur | Angka | 73,51 | 77.21 | 77.21 |
| | | Meningkatkan Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Lestari | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Angka | 61,41 | 59.47 | 59.47 |

Prioritas Pembangunan Tahun 2025 tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Makassar pada tahun sebelumnya dan isu strategis daerah. Sinkronisasi permasalahan dan isu strategis terhadap prioritas pembangunan tahun 2025, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

**Tabel IV.6.**
**Hubungan Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis Terhadap Prioritas Pembangunan Tahun 2025**

| No | Permasalahan Pembangunan | Isu Strategis Daerah | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan dan Sasaran Prioritas | Indikator Kinerja Pembangunan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belum maksimalnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul | Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) |
| | | | | Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan | Indeks Pendidikan |
| | | | | Meningkatnya Daya Beli Masyarakat | Pengeluaran Per kapita |
| 2 | Belum maksimalnya tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi | Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul | Penguatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang *Sombere'* dan *Smart* | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif | Indeks Reformasi Birokrasi |
| | | | | Terwujudnya Pelayanan Publik yang *Sombere'* dan *Smart* | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |
| | | | | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) |
| 3 | Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial masyarakat | Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul | Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial | Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Mitigasi Sosial | Indeks Kesehatan |
| | | | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan | Usia Harapan Hidup |
| | | | | Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Miskin | Angka Kemiskinan |
| 4 | Melambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi daerah | Peningkatan ekonomi yang kuat | Penguatan ketahanan ekonomi masyarakat dan peningkatan peluang kerja dan peluang bisnis baru | Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Secara Merata | Pertumbuhan Ekonomi |
| | | | | Tersedianya Kemudahan Akses Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) |
| | | | | | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) |
| | | | | Terwujudnya Gerakan Masyarakat Memperkuat | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per |

| No | Permasalahan Pembangunan | Isu Strategis Daerah | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan dan Sasaran Prioritas | Indikator Kinerja Pembangunan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ketahanan Ekonomi | Kapita |
| | | | | | Rasio Gini |
| 5 | Menurunnya kualitas infrastruktur perkotaan | Cadangan Air Baku, Air Bersih dan Sanitasi Layak | Percepatan pembangunan infrastruktur kota yang berkualitas dan pengelolaan lingkungan hidup serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim | Mewujudkan Makassar Menjadi "*Livable City*" dan "*Resilient City*" | Indeks Kota Nyaman *(Livable City Index)* |
| | | Transportasi | | Tersedianya Infrastruktur Menuju Kota Nyaman | Indeks Layanan Infrastruktur |
| | | Persampahan | | Meningkatkan Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Lestari | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) |
| | | Ruang Terbuka Hijau | | | |

#### 4.2.4.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Makassar Tahun 2025

Untuk mencapai sasaran pembangunan Tahun 2025, perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan yang diperlukan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, yang menjadi perhatian dengan terpilihnya kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah periodisasi ini merupakan transisi pemerintahan untuk melanjutkan pembangunan dengan memperhatikan Visi dan Misi terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, berdasarkan Pemendagri Nomor 12 Tahun 2024 bahwa Penambahan dan /atau pengurangan kegiatan dan/ atau sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memperhatikan. visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam perubahan perubahan RKPD Tahun 2025, ditindaklanjuti dan/atau penambahan dengan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah, untuk memenuhi hal tersebut dilakukan strategi sebagai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sarana, prasarana, kurikulum dan tenaga pendidik baik pada tingkatan usia dini, maupun pada tingkatan dasar, disertai dengan upaya pemerataan layanan, dengan Arah Kebijakan dan Prioritas:
   - Pemantapan ketersediaan sarana prasarana pendidikan
   - Peningkatan aksesibilitas pendidikan melalui Pemberian Seragam Gratis Untuk siswa SD dan SMP.
   - Pemenuhan SDM pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas
   - Urusan Pendidikan merupakan urusan wajib yang masuk pelayanan dasar, sehingga jenis pelayanan dan indikator kinerjanya telah diatur dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan target kinerja harus 100%.
   - Peningkatan kualitas sarana, prasarana, kurikulum dan tenaga pendidik, disertai dengan upaya pemerataan layanan untuk PAUD dan Pendidikan Dasar guna menjamin semua anak bersekolah. Upaya mengembalikan Anak Tidak Sekolah dengan melibatkan elemen masyarakat dengan memanfaatkan TIK. Peningkatan aksesibilitas pendidikan di Pulau-pulau di Kota Makassar berupa Peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan berupa meningkatan sarana Utilitas sekolah.
2. Pengendalian inflasi serta peningkatan kesempatan berusaha dengan melibatkan dunia usaha melalui *link and match* dunia industri serta menciptakan iklim investasi yang kondusif, dengan Arah Kebijakan dan Prioritas:
   - Optimalisasi jaringan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri serta

lembaga pelatihan kerja

- Salah satu tantangan perekonomian di Kota adalah pengendalian inflasi, guna menjaga daya beli masyarakat. Inflasi juga menjadi *concern* dari pemerintah pusat sehingga daerah wajib menjadikan hal ini sebagai prioritas. Daya saing UMKM), dan juga menyiapkan *Incubator Center* UMKM untuk meningkatkan daya saing produk UMKM., serta pengembangan pertanian perkotaan *(Uban Farming).*
- Pengendalian inflasi juga perlu dilakukan melalui pantau langsung harga di lapangan serta mengintesifkan intervensi Pemerintah melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang berperan untuk melakukan koordinasi bersama unsur pemangku kepentingan terkait. Untuk meningkatkan ketersediaan pangan akan dibentuk Tokomoditi di setiap kelurahan serta intervensi melalui pasar murah. Sedangkan dari sisi distribusi perlu revitalisasi pasar-pasar tradisional di Kota Makassar.
- Pemberian pendidikan dan Pelatihan kepada penduduk usia kerja dalam proses lapangan pekerjaan melalui *Makassar Creative Hub.*

3. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, utamanya di kecamatan dan kelurahan, melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan standar layanan, dengan Arah Kebijakan dan Prioritas:
   - Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan
   - Peningkatan Kapasitas SDM aparatur pemerintahan melalui Diklat PPNS (Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP dan Badan Pendapatan Daerah)
   - Peningkatan kapasitas SDM aparatur pemerintahan dan standarisasi layanan publik
   - Optimalisasi pelayanan publik berbasis e-government.
   - Melaksanakan promosi jabatan berbasis meritokrasi.
   - Pemerintah Kota Makassar bertekad menjadi pusat pelayanan publik Layanan digital yang terintegrasi melalui *Makassar Super Apps*
4. Penguatan agenda reformasi birokrasi, keuangan daerah dan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dengan Arah Kebijakan dan Prioritas:
   - Belanja Media
   - Penyusunan road map reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas asesor internal
   - Peningkatan kapasitas perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah
   - Peningkatan kapabilitas SDM serta digitalisasi pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah
   - melalui pemanfaatan TIK, penggalian sumber PAD dan peningkatan kualitas pengelolaan sistem manajemen aparatur.
   - Perbaikan tata Kelola pemerintahan menjadi salah satu sasaran kunci Pemerintah Kota Makassar, yang dilakukan mulai dari peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran yang lebih baik.
5. Penguatan upaya promotif dan preventif kesehatan melalui gerakan masyarakat perkuatan imunitas (*Makassar Recover*) serta peningkatan kapasitas dan pemerataan tenaga medis, dengan Arah Kebijakan dan Prioritas:
   - Permasalahan kesehatan yang menjadi prioritas pemerintah pusat seperti *stunting*, TB, AKI, AKB, juga akan menjadi prioritas dengan terus berupaya meningkatkan pelayanan di puskesmas dan RSUD serta peningkatan rasio tenaga Kesehatan
   - Peningkatan kualitas layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit umum

daerah
- Peningkatan Kapasitas dan Kualitas serta pemerataan tenaga medis dengan memberikan insetif kepada tenaga Kesehatan dan Paramedis pada fasilitas kesehatan di Pulau-Pulau.
- Penyediaan Layanan Ambulance secara Gratis.
- Layanan Gratis pemeriksaan dan Pengantaran obat pasien rawat jalan dari rumah sakit ke rumah pasien.
- Peningkatan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif perlu terus ditingkatkan, guna pencapaian target-target SPM.

6. Perluasan perlindungan bagi masyarakat miskin melalui kepesertaan jaminan sosial, jaminan kesehatan dan jaminan pendidikan yang tepat sasaran, dengan Arah Kebijakan dan Prioritas:
   - Bantuan iuran kesehatan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
   - Penyediaan peluang kerja dan peluang bisnis baru bagi masyarakat miskin serta perluasan perlindungan sosial melalui kepesertaan jaminan sosial, jaminan kesehatan dan jaminan melalui MULIA BERJASA.
   - Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin akan terus ditingkatkan kualitasnya terutama melalui ketersediaan data penduduk miskin yang *update* dan valid dengan melibatkan unsur masyarakat dalam verifikasi dan validasi data sampai pada tingkat kelurahan dalam musyawarah kelurahan setiap enam bulan.
   - Upaya mengembalikan ke sekolah untuk Anak Tidak Sekolah (ATS) dari kalangan tidak mampu dengan melibatkan elemen masyarakat dengan memanfaatkan TIK. Peningkatan aksesibilitas pendidikan melalui pemberian beasiswa berkolaborasi dengan dunia usaha
7. Pemulihan ekonomi melalui perluasan lapangan usaha berbasis kewirausahaan dan ekonomi digital, dengan Arah Kebijakan dan Prioritas:
   - Pengembangan ekonomi kreatif dan usaha rintisan (startup) melalui *Makassar Creative Hub*
   - Guna mendukung upaya pemulihan ekonomi daerah, Pemerintah Kota Makassar berupaya untuk meningkatkan iklim usaha melalui kemudahan Pelayanan perizinan berusaha melalui optimalisasi *Online Single Submission* (OSS), guna memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Untuk pengembangan UMKM mendapatkan akses pinjaman perbankan, serta penyediaan dengan kemudahan akses peluang kerja dan peluang bisnis baru, dibentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD). Perekonomian juga diharapkan akan bertumbuh bila banyak orang yang berkunjung ke Makassar pelaksanaan event dan festival yang berskala nasional maupun internasional. Untuk mendorong wirausaha muda dan generasi millennial akan disediakan berbagai layanan pelatihan *skill training* secara gratis diberbagai bidang usaha kreatif dan *incubator center*, dimana produksinya dapat difasilitasi akses pemasarannya sampai keluar daerah melalui MARVEC (*Makassar Virtual Economic Center*)
8. Penguatan aktivitas ekonomi dan sosial pada sektor-sektor utama penunjang ekonomi daerah Kota Makassar, dengan Arah Kebijakan dan Prioritas:
   - Makassar Investment Forum (MIF)
   - Perekonomian Kota Makassar utamanya ditunjang oleh beberapa sektor esensial seperti Perdagangan, Industri, Retail, dan Jasa-jasa, sehingga menjaga iklim investasi yang kondusif penting untuk dilakukan. Menjaga kenyamanan kota dari sisi keamanan dan ketenteraman, juga penyediaan infrastruktur penunjang perkotaan seperti perbaikan jalan dan pedestrian.

- Pelaksanaan event dan festival yang berskala nasional maupun internasional diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan.

9. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan dan fasilitas pemerintahan yang modern, dengan Arah Kebijakan dan Prioritas:
   - Perencanaan Pembangunan Infarstruktur Stadion Bertaraf Internasional di Keluarahan Untia Kecamatan Biringkanaya.
   - Pengadaaan transportasi Listrik.
   - Pembangunan Kantor Camat dan Rehabilitasi Kantor Lurah.
   - Perencanaan Pembangunan Gelanggang Remaja dan *Sport Centre* di Setiap Kecamatan
10. Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang adaptif dan berkelanjutan serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dengan Arah Kebijakan dan Prioritas:
    - Penyediaan layanan air bersih gratis
    - Pembangunan/Rehab Taman Kota dan Jalur Hijau

Sejumlah strategi yang disusun tersebut kemudian dijabarkan dalam Prioritas Program tahun 2025 yang dijabarkan dalam Perubahan RKPD tahun 2025 dengan memperhatikan Visi dan Misi Wali kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih singkat sebagai berikut:

**Tabel IV.7.**
**Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Makassar mendukung Visi dan Misi Walikota Periode 2025-2029**
**Kota Makassar Tahun 2025**

| No | Perangkat Daerah | Program Prioritas) | indikator Program | Satuan | Realisasi 2024 | Target | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RKPD 2025 | P-RKPD 2025 |
| 1 | Dinas Pendidikan | **Pengelolaan Pendidikan** | Jumlah Penerima Beasiswa "Anak Lorong Berprestasi" | Orang | 400 | 400 | 400 |
| | | | Angka Harapan Lama Sekolah | Tahun | 16,56 | 16,56 | 16,56 |
| | | | Angka Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| | | | Angka Partisipasi Murni (PAUD, SD Dan SMP | Persen<br>Persen<br>Persen | PAUD: 59.63<br>SD: 100<br>SMP: 100 | PAUD: 59.63<br>SD: 100<br>SMP: 100 | PAUD: 59.63<br>SD: 100<br>SMP: 100 |
| | | | Angka Partisipasi Kasar (PAUD, SD Dan SMP | Persen<br>Persen<br>Persen | PAUD: 65.52<br>SD: 100<br>SMP: 100 | PAUD: 65.52<br>SD: 100<br>SMP: 100 | PAUD: 65.52<br>SD: 100<br>SMP: 100 |
| | | | Sarana Dan Prasarana Pendidikan (PAUD, SD, SMP) Dalam Kondisi Baik | Persen<br>Persen<br>Persen | PAUD: 78%<br>SD: 78%<br>SMP: 92% | PAUD: 78%<br>SD: 78%<br>SMP: 92% | PAUD: 78%<br>SD: 78%<br>SMP: 92% |
| | | | Persentase Ketuntasan Pendidikan Kesetaraan (A,B, C) | Rasio | 94,26% | 94,26% | 94,26% |
| 2 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Program Aplikasi dan Informatika | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang Terhubung dengan Akses Internet yang | Persen | 100 | 100 | 100 |

| No | Perangkat Daerah | Program Prioritas) | indikator Program | Satuan | Realisasi 2024 | Target | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RKPD 2025 | P-RKPD 2025 |
| | | | Disediakan oleh Dinas Kominfo | | | | |
| | | | Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi | Persen | 95,89 | 95,89 | 95,89 |
| 3 | Dinas Pemuda dan Olahraga | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Cakupan Pembinaan Olahraga | Persen | Persen | 57.80 | 57.80 |
| | | | Cakupan Pembinaan Atlet Muda | Persen | Persen | 67.16 | 67.16 |
| | | | Peningkatan Prestasi Olahraga | Atlet | Atlet<br>Cabor | 406 atlet<br>37 Cabor | 406 atlet<br>37 Cabor |
| | | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Persen | 90 | 90 | 90 |
| | | | Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan | Persen | 86.07 | 86.07 | 86.07 |
| 4 | Dinas Lingkungan Hidup | Program Pengelolaan Persampahan | Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kota Makassar | Persen | 100 | 100 | 100 |

| No | Perangkat Daerah | Program Prioritas) | indikator Program | Satuan | Realisasi 2024 | Target | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RKPD 2025 | P-RKPD 2025 |
| | | | Persentase Sampah Yang Terkurangi melalui 3R | Persen | 30 | 30 | 30 |
| 5 | Dinas Perhubungan | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Rasio Konektivitas Kota | | | | |
| | | | Pemasangan Rambu-Rambu | Persen | 14.28 | 14.28 | 14.28 |
| | | | Persentase Layanan Angkutan Darat | Persen | 15 | 15 | 15 |
| | | | Rasio Panjang Jalan Per jumlah Kendaraan | Persen | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 6. | Dinas Pekerjaan Umum | Program Penataan Bangunan Gedung | Persentase Kebutuhan Gedung Pemerintah yang Terbangun | Persen | 88.83 | 88.83 | 88.83 |
| 7. | Dinas Kesehatan | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil | Persen | 100 | 100 | 100 |
| | | | Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan | Persen | 100 | 100 | 100 |
| | | | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bai baru lahir | Persen | 100 | 100 | 100 |
| | | | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | Persen | 100 | 100 | 100 |

| No | Perangkat Daerah | Program Prioritas) | indikator Program | Satuan | Realisasi 2024 | Target | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RKPD 2025 | P-RKPD 2025 |
| | | | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar | Persen | 100 | 100 | 100 |
| | | | Persentase orang usia 15-29 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar | Persen | 100 | 100 | 100 |
| | | | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar | Persen | 100 | 100 | 100 |
| | | | Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar | Persen | 100 | 100 | 100 |
| | | | Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar | Persen | 100 | 100 | 100 |
| | | | Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | Persen | 100 | 100 | 100 |

| No | Perangkat Daerah | Program Prioritas) | indikator Program | Satuan | Realisasi 2024 | Target | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RKPD 2025 | P-RKPD 2025 |
| | | | Persentase orang dengan risiko Tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan | Persen | 100 | 100 | 100 |
| | | | Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Dinas Sosial | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Dinas Tenaga Kerja | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | Persen | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| | | | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | Persen | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| | | | Jumlah Peserta Pelatihan *Skill Training* Gratis Sektor Ketenagakerjaan | Orang | 1230 orang | 1230 orang | 1230 orang |
| 10. | Dinas Pariwisata | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Jumlah Peserta Pelatihan *Skill Training* Gratis Sektor Pariwisata | Orang | 900 | 900 | 900 |

| No | Perangkat Daerah | Program Prioritas) | indikator Program | Satuan | Realisasi 2024 | Target | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RKPD 2025 | P-RKPD 2025 |
| | | | Persentase SDM Pariwisata Yang Mendapat Sertifikasi | Persen | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| | | | Persentase SDM Ekonomi Kreatif yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | Persen | 10 | 10 | 10 |
| 11. | Dinas Tenaga Kerja | Program Hubungan Industrial | Angka Sengketa Perusahaan Pekerja Pertahun | Persen | 4,67% | 3,27 | 3,27 |
| | | | Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama | Persen | 72,38% | 84% | 84% |
| | | | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak | Persen | 31,53% | 51,01% | 51,01% |

### 4.2.4.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Makassar Tahun 2025

Program pembangunan daerah atau program prioritas daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara spesifik langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam menentukan program pembangunan, Pemerintah Kota Makassar juga harus memperhatikan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) seperti yang diamanatkan dalam pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bahwa pemenuhan SPM merupakan prioritas belanja daerah, dimana SPM merupakan urusan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri atas: Bidang Urusan Pendidikan, Bidang Urusan Kesehatan, Bidang Urusan Pekerjaan Umum, Bidang Urusan Perumahan Rakyat, Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Bidang Urusan Sosial. Adapun program terkait pelaksanaan SPM Kota Makassar Tahun 2025, tercantum pada tabel berikut:

**Tabel IV.8.**
**Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Makassar**

| No | Bidang Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Nomenklatur Program Pembangunan SKPD | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|
| **I** | **Bidang Urusan Pendidikan** | | | |
| 1 | Pendidikan Dasar | Persentase warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs) | Program pengelolaan pendidikan | Dinas Pendidikan |
| | | Rata-Rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional | | |
| 2 | Pendidikan Kesetaraan | Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | Program pengelolaan pendidikan | Dinas Pendidikan |
| | | Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional | | |
| 3 | Pendidikan Anak Usia Dini | Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD | Program pengelolaan pendidikan | Dinas Pendidikan |
| **II** | **Bidang Urusan Kesehatan** | | | |
| 1 | Pelayanan kesehatan ibu hamil | Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Dinas Kesehatan |
| 2 | Pelayanan kesehatan ibu bersalin | Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Dinas Kesehatan |

| No | Bidang Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Nomenklatur Program Pembangunan SKPD | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Dinas Kesehatan |
| 4 | Pelayanan kesehatan balita | Persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Dinas Kesehatan |
| 5 | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Dinas Kesehatan |
| 6 | Pelayanan kesehatan pada usia produktif | Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Dinas Kesehatan |
| 7 | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut | Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Dinas Kesehatan |
| 8 | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | Persentase warga negara penderita *hipertensi* yang mendapatkan layanan kesehatan | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Dinas Kesehatan |
| 9 | Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus | Persentase warga negara penderita *diabetes mellitus* yang mendapatkan layanan kesehatan | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Dinas Kesehatan |
| 10 | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat | Persentase warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Dinas Kesehatan |
| 11 | Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis | Persentase warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Dinas Kesehatan |
| 12 | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko | Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human* | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan | Dinas Kesehatan |

| No | Bidang Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Nomenklatur Program Pembangunan SKPD | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|
| | terinfeksi virus yang melemahkan | *Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan layanan kesehatan | upaya kesehatan masyarakat | |
| **III** | **Bidang Urusan Pekerjaan Umum** | | | |
| 1 | Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari | Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari | Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum | Dinas Pekerjaan Umum |
| 2 | Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah | Dinas Pekerjaan Umum |
| **IV** | **Bidang Urusan Perumahan Rakyat** | | | |
| 1 | Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | Program pengembangan perumahan | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 2 | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | Program pengembangan perumahan | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| **V** | **Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat** | | | |
| 1 | Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum | Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada | Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 2 | Pelayanan informasi rawan bencana | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | Program penanggulangan bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 3 | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Program penanggulangan bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 4 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Program penanggulangan bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 5 | Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran | Dinas Pemadam Kebakaran |
| **VI** | **Bidang Urusan Sosial** | | | |
| 1 | Rehabilitasi sosial dasar penyandang | Persentase warga negara penyandang disabilitas yang | Program rehabilitasi sosial | Dinas Sosial |

| No | Bidang Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Nomenklatur Program Pembangunan SKPD | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|
| | disabilitas terlantar di luar panti | memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | | |
| 2 | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti | Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | Program rehabilitasi sosial | Dinas Sosial |
| 3 | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti | Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | Program rehabilitasi sosial | Dinas Sosial |
| 4 | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti | Persentase warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti | Program rehabilitasi sosial | Dinas Sosial |
| 5 | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota | Persentase warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota | Program perlindungan dan jaminan sosial | Dinas Sosial |

Selain dalam rangka menjawab isu strategis daerah, program pembangunan daerah juga dilaksanakan untuk menjawab program prioritas kepala daerah yang telah disampaikan pada proses politik. Program pembangunan daerah Kota Makassar Tahun 2025, merupakan sekumpulan program prioritas yang secara spesifik langsung terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran, program untuk menjawab prioritas kepala daerah yang telah disampaikan pada proses politik dan program yang terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Adapun Program Prioritas Kota Makassar Tahun 2025, tercantum pada tabel berikut:

**Tabel IV.9.**
**Program Prioritas Pembangunan Kota Makassar Tahun 2025**

| No | Prioritas Pembangunan Kota Makassar | Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja *Impact / Outcome* | Satuan | Target Tahun 2025 | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing | Tujuan: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Angka | 84,05 | |
| | | Sasaran: Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan | Indeks Pendidikan | Nilai | 0,865 | |
| | | Program Pengelolaan Pendidikan | Jumlah Penerima Beasiswa "Anak Lorong | Orang | 400 org | Dinas Pendidikan |

| No | Prioritas Pembangunan Kota Makassar | Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja *Impact / Outcome* | Satuan | Target Tahun 2025 | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Berprestasi" | | | |
| | | | Angka Harapan Lama Sekolah | Tahun | 16,56 | |
| | | | Angka Rata-Rata Lama Sekolah | Tahun | 12,2 | |
| | | | Angka Partisipasi Murni (PAUD, SD Dan SMP) | Persen | PAUD: 59.63 | |
| | | | | Persen | SD: 100 | |
| | | | | Persen | SMP: 100 | |
| | | | Angka Partisipasi Kasar (PAUD, SD Dan SMP) | Persen | PAUD: 65.52 | |
| | | | | Persen | SD: 100 | |
| | | | | Persen | SMP: 100 | |
| | | | Persentase Sarana Dan Prasarana Pendidikan (PAUD, SD, SMP) Dalam Kondisi Baik | Persen | PAUD: 78% | |
| | | | | Persen | SD: 78% | |
| | | | | Persen | SMP: 92% | |
| | | | Persentase Ketuntasan Pendidikan Kesetaraan (A,B, C) | Rasio | 94,26% | |
| | | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Rasio Guru-Murid (PAUD, SD, SMP) | Rasio | (PAUD) 1 : 18 | Dinas Pendidikan |
| | | | | Rasio | (SD) 1 : 30 | |
| | | | | Rasio | (SMP) 1 : 32 | |
| | | | Persentase Guru Yang Bersertifikasi (PAUD, SD, SMP) | Persen | PAUD: 39,49 | |
| | | | | Persen | SD: 47,83 | |
| | | | | Persen | SMP: 47,88 | |
| | | Program Pembinaan Perpustakaan | Angka Budaya Baca Kota Makassar | Persen | 65 | Dinas Perpustakaan |
| | | | Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per tahun | Orang | 560.000 orang/tahun | |
| | | | Jumlah Koleksi Judul Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah | Buku | 32.212 | |
| | | | Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat | Orang | 27 Pustakawan, 147 Tenaga Teknis | |
| | | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter | Persentase Kelompok Masyarakat Yang Mendapat | Persen | 80% | Badan Kesatuan Bangsa dan Poitik |

| No | Prioritas Pembangunan Kota Makassar | Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja *Impact / Outcome* | Satuan | Target Tahun 2025 | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kebangsaan | Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | | | |
| | | Sasaran:<br>Meningkatnya Daya Beli Masyarakat | Pengeluaran Per kapita | Juta Rupiah | 18,91 jt | |
| | | Program Pelayanan Penanaman Modal | Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pelayanan Perizinan | Persen | 100 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP |
| | | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal | Kelompok Pedagang / Usaha Informal | 500 | Dinas Perdagangan |
| | | Program Pengembangan UMKM | Persentase Usaha Mikro dan Kecil | Persen | 81 | Dinas Koperasi UKM |
| | | | Jumlah Wirausaha Baru (*Start-Up*) | UMKM Baru | 10 UMKM | |
| | | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap | Ton | 20,713 Ton | Dinas Perikanan dan Pertanian |
| | | | Cakupan Bina Kelompok Nelayan | Persen | 18,9 | |
| 2 | Penguatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang *Sombere'* dan *Smart* | Tujuan:<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif | Indeks Reformasi Birokrasi | Angka | 66.03 | |
| | | Sasaran:<br>Terwujudnya Pelayanan Publik yang "Sombere' dan Smart" | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Angka | 81 | |
| | | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo | Persen | 100 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | Persentase Layanan | Persen | 95,89 | |

| No | Prioritas Pembangunan Kota Makassar | Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja *Impact / Outcome* | Satuan | Target Tahun 2025 | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Publik yang Diselenggarakan secara *Online* dan Terintegrasi | | | |
| | | Program Pendaftaran Penduduk | Persentase Anak Usia 1-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari Yang Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) | Persen | 80 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk | Persen | 100 | |
| | | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan | Persen | 100 | Seluruh Kecamatan |
| | | Sasaran:<br>Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) (3,4216) | Predikat | Sangat Tinggi | |
| | | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan | Persen | 100 | Seluruh Kecamatan |
| | | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang Telah Ditetapkan dengan Perda | Dokumen | Ada | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah | Dokumen | Ada | |

| No | Prioritas Pembangunan Kota Makassar | Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja *Impact / Outcome* | Satuan | Target Tahun 2025 | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (RKPD) Yang Telah Ditetapkan dengan Perkada | | | |
| | | | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD | Dokumen | Ada | |
| | | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan | Predikat | WTP | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Rasio Pendapatan Asli Daerah | Persen | 53,04 | Badan Pendapatan Daerah |
| | | | Persentase (Deviasi) Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Persen | 100 | |
| 3 | Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial | Tujuan: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Mitigasi Sosial | Indeks Kesehatan | Nilai | 0,81 | |
| | | Sasaran: Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan | Usia Harapan Hidup | Tahun | 72,4 | |
| | | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil | Persen | 100 | Dinas Kesehatan |
| | | | Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan | Persen | 100 | |
| | | | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | Persen | 100 | |
| | | | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | Persen | 100 | |
| | | | Persentase anak usia | Persen | 100 | |

| No | Prioritas Pembangunan Kota Makassar | Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja *Impact / Outcome* | Satuan | Target Tahun 2025 | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar | | | |
| | | | Persentase orang usia 15-29 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar | Persen | 100 | |
| | | | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar | Persen | 100 | |
| | | | Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar | Persen | 100 | |
| | | | Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar | Persen | 100 | |
| | | | Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | Persen | 100 | |
| | | | Persentase orang dengan risiko Tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan | Persen | 100 | |
| | | | Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan | Persen | 100 | |

| No | Prioritas Pembangunan Kota Makassar | Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja *Impact / Outcome* | Satuan | Target Tahun 2025 | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | deteksi dini HIV sesuai standar | | | |
| | | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Cakupan Bayi Mendapat ASI Eksklusif | Persen | 100 | Dinas Kesehatan |
| | | | Persentase Posyandu Aktif | Persen | 60 | |
| | | Sasaran: Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat Miskin | Angka Kemiskinan | Persen | 4,10 | |
| | | Program Rehabilitasi Sosial | Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | Persen | 100 | Dinas Sosial |
| | | | Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | Persen | 100 | |
| | | | Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | Persen | 100 | |
| | | | Persentase gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tuna sosial di luar panti | Persen | 100 | |
| | | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persen | 100 | Dinas Sosial |
| | | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Persentase Kelurahan Ramah Anak | Persen | 84.97 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA |
| | | Program Penanganan Kerawanan | Persentase Penanganan Daerah Rawan | Persen | 11,76 | Dinas Ketahanan Pangan |

| No | Prioritas Pembangunan Kota Makassar | Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja *Impact / Outcome* | Satuan | Target Tahun 2025 | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pangan | Pangan | | | |
| | | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan | Persen | 90 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan | Persen | 100 | |
| | | | Persentase SKPD Yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah | Persen | 100 | |
| | | | Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Kota Makassar | Persen | 94.93 | |
| 4 | Penguatan ketahanan ekonomi masyarakat dan peningkatan peluang kerja dan peluang bisnis baru | Tujuan: Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Secara Merata | Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 6,7% | |
| | | Sasaran: Tersedianya Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Persen | 10,50% | |
| | | | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | Persen | 61,81% | |
| | | Program Penempatan Tenaga Kerja | Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota Makassar | Persen | 65 | Dinas Ketenagakerjaan |
| | | | Jumlah Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru | Usaha | 975 | |
| | | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | Persen | 1,03 | Dinas Ketenagakerjaan |
| | | | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | Persen | 22,5 | |
| | | | Jumlah Peserta Pelatihan *Skill Training* Gratis Sektor | Orang | 1230 orang | |

| No | Prioritas Pembangunan Kota Makassar | Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja *Impact / Outcome* | Satuan | Target Tahun 2025 | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ketenagakerjaan | | | |
| | | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri | Persen | 90 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan | Persen | 86.07 | |
| | | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha | Persen | 91,99 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah |
| | | | Jumlah Peserta Pelatihan *Skill Training* Gratis Sektor UMKM | UMKM | 1260 | |
| | | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Jumlah Peserta Pelatihan *Skill Training* Gratis Sektor Pariwisata | Orang | 900 | Dinas Pariwisata |
| | | | Persentase SDM Pariwisata Yang Mendapat Sertifikasi | Persen | 6,4 | |
| | | | Persentase SDM Ekonomi Kreatif yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | Persen | 10 | |
| | | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | Persentase Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang mendapat Pemberdayaan | Persen | 81,67 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA |
| | | Program Perekonomian dan | Persentase Jumlah Total Proyek | Persen | 20 | Sekretariat Daerah |

| No | Prioritas Pembangunan Kota Makassar | Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja *Impact / Outcome* | Satuan | Target Tahun 2025 | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pembangunan | Konstruksi yang Dibawa Ke Tahun Berikutnya yang Ditandatangani pada Kuartal Pertama | | | |
| | | | Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif | Persen | 100 | |
| | | | Persentase Perusahaan Daerah yang Berkinerja Baik | Persen | 100 | |
| | | | Persentase Penyerapan Realisasi Anggaran melalui Sistem Monitoring Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (SISMONTEPRA) | Persen | 100 | |
| | | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan | Cagar Budaya | 32 | Dinas Kebudayaan |
| | | Program Pengelolaan Permuseuman | Persentase Koleksi Museum Kota Makassar yang Terawat dengan Baik | Koleksi | 56 | Dinas Kebudayaan |
| | | | Jumlah Pengunjung Museum Kota Makassar | Orang | 5.800 orang | |
| | | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Tingkat Hunian Akomodasi | Persen | 54 | Dinas Pariwisata |
| | | | Jumlah Destinasi Wisata yang berstandar Nasional | Destinasi | 1 | |
| | | Sasaran: Terwujudnya Gerakan Masyarakat Memperkuat | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per kapita | Juta Rupiah | 143,35 jt | |

| No | Prioritas Pembangunan Kota Makassar | Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja *Impact / Outcome* | Satuan | Target Tahun 2025 | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ketahanan Ekonomi | Rasio Gini | Angka | 0,388 | |
| | | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kota Makassar | IKM | 360 | Dinas Perdagangan |
| | | | Jumlah Peserta Pelatihan *Skill Training* Gratis Sektor Perindustrian | Orang | 250 | |
| | | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | PAD Sektor Ekonomi Kreatif | Persen | 17.15 | Dinas Pariwisata |
| | | | Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Difasilitasi Mendapatkan HAKI | Orang (Usaha) | 150 | |
| | | Program Pengembangan Kebudayaan | Cakupan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan | Persen | 53.3 | Dinas Kebudayaan |
| | | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB | Persen | 0,1 | Dinas Perikanan dan Pertanian |
| | | | Produktivitas Pertanian Per Hektar Per tahun | Ton/Hektar | 7,1 | |
| | | | Cakupan Pengawasan Mutu Pakan dan Produksi Benih/Bibit Ternak | Persen | 450 Sampel | |
| | | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Ketersediaan Energi dan Protein Per kapita | Kilo Kalori | Energi: 2700 Protein: 128 | Dinas Ketahanan Pangan |
| | | | Jumlah Lorong Garden dan Lorong Wisata | Lorong | 500 | |
| | | | Skor Pola Pangan Harapan | Angka | 88 | |
| 5 | Percepatan pembangunan infrastruktur kota dan | Tujuan: Mewujudkan Makassar menjadi "Livable | Indeks Kota Nyaman (*Livable City Index*) | Angka | 60,22 | |

| No | Prioritas Pembangunan Kota Makassar | Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja *Impact / Outcome* | Satuan | Target Tahun 2025 | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | pengelolaan lingkungan hidup | City" dan "Resilient City" | | | | |
| | | Sasaran: Tersedianya Infrastruktur Menuju Kota Nyaman | Indeks Layanan Infrastruktur | Angka | 77,21 | |
| | | Program Penyelenggaraan Jalan | Tingkat Kemantapan Jalan Kota | Persen | 96.01 | Dinas Pekerjaan Umum |
| | | | Persentase Panjang Trotoar terhadap Panjang Jalan | Persen | 6 | |
| | | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat Akses Terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kota | Persen | 100 | Dinas Pekerjaan Umum |
| | | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kota | Persen | 95.00 | Dinas Pekerjaan Umum |
| | | | Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi Erosi Dan Akresi yang Terlindungi oleh Infrastruktur | Persen | 98.37 | |

| No | Prioritas Pembangunan Kota Makassar | Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja *Impact / Outcome* | Satuan | Target Tahun 2025 | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengaman Pantai di Wilayah Sungai Kewenangan Kota | | | |
| | | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | Persentase Drainase dalam Kondisi Baik | Persen | 94.85 | Dinas Pekerjaan Umum |
| | | | Persentase Titik Genangan yang Dikurangi | Persen | 94.71 | |
| | | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik | Persen | 100 | Dinas Pekerjaan Umum |
| | | Program Pengelolaan Persampahan | Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kota Makassar | Persen | 100 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | Persentase Sampah Yang Terkurangi melalui 3R | Persen | 30 | |
| | | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha di Kota Makassar yang ditangani | Persen | 80 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Program Pengembangan Perumahan | Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni | Persen | 100 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | | Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang | Persen | 100 | |

| No | Prioritas Pembangunan Kota Makassar | Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja *Impact / Outcome* | Satuan | Target Tahun 2025 | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Layak Huni | | | |
| | | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | Persen | 46.09 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Rasio Konektivitas Kota | Persen | 80 | Dinas Perhubungan |
| | | | Pemasangan Rambu-Rambu | Persen | 14.28 | |
| | | | Persentase Layanan Angkutan Darat | Persen | 15 | |
| | | | Rasio Panjang Jalan Per jumlah Kendaraan | Persen | 0,13 | |
| | | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Ketaatan terhadap RTRW | Persen | 90 | Dinas Penataan Ruang |
| | | Program Penataan Bangunan Gedung | Persentase Kebutuhan Gedung Pemerintah yang Terbangun | Persen | 88.83 | Dinas Pekerjaan Umum |
| | | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Cakupan Pembinaan Olahraga | Persen | 57.80 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | Cakupan Pembinaan Atlet Muda | Persen | 67.16 | |
| | | | Peningkatan Prestasi Olahraga | Atlet Cabor | 406 atlet 37 Cabor | |
| | | Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada | Orang | 100 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang | Persen | 100 | |

| No | Prioritas Pembangunan Kota Makassar | Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja *Impact / Outcome* | Satuan | Target Tahun 2025 | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dapat Diselesaikan | | | |
| | | | Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan | Persen | 100 | |
| | | Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan yang Dapat Diselesaikan | Persen | 100 | Seluruh Kecamatan |
| | | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | Orang | 100 | Dinas Pemadam Kebakaran |
| | | | Waktu Tanggap *(response time)* Penanganan Kebakaran | Menit | 15 | |
| | | Program Penanggulangan Bencana | Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana | Orang | 100 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Orang | 100 | |
| | | | Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Orang | 100 | |

| No | Prioritas Pembangunan Kota Makassar | Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja *Impact / Outcome* | Satuan | Target Tahun 2025 | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Sarana dan Prasarana Lingkup Kelurahan dalam Kondisi Baik | Persen | 95 | Seluruh Kecamatan |
| | | | Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang Mendapat Pemberdayaan | Persen | 100 | |
| | | Sasaran:<br>Meningkatkan Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Lestari | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Makassar | Angka | 59,58 | |
| | | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara | Angka<br>Angka | IKA = 59,6<br>IKU = 79.72 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan | Angka | 22.29 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Kota Makassar | Angka | 22 | Dinas Lingkungan Hidup |

### 4.2.5. Kesesuaian Prioritas Pembangunan Kota Makassar dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Nasional Tahun 2025

Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah

merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Prioritas Pembangunan, tujuan dan sasaran Kota Makassar tahun 2025 telah selaras dengan prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Nasional tahun 2025, seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IV.10.**
**Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Prioritas Pembangunan Kota Makassar Tahun 2025**

| Prioritas Nasional (PN) | | Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan | | Prioritas Pembangunan Kota Makassar | |
|---|---|---|---|---|---|
| PN 1 | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | PD 1 | Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif | Penguatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang *Sombere'* dan *Smart* | PD 2 |
| PN 7 | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba | | | | |
| PN 2 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | PD 5 | Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigari perubahan iklim | Percepatan pembangunan infrastruktur kota yang berkualitas dan pengelolaan lingkungan hidup serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim | PD 5 |
| PN 8 | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | | | | |
| PN 6 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan | PD 2 | Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata | | |
| PN 3 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan | PD 3 | Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah | Penguatan ketahanan ekonomi masyarakat dan peningkatan peluang kerja dan peluang bisnis baru | PD 4 |

| Prioritas Nasional (PN) | | Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan | | Prioritas Pembangunan Kota Makassar | |
|---|---|---|---|---|---|
| | industri kreatif serta mengembangkan agromaritim Industri di sentra produksi melalui Peran aktif koperasi | | | | |
| PN 4 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas | PD 4 | Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata | Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing | PD 1 |
| | | | | Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial | PD 3 |
| PN 5 | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | | | | |

Memperhatikan tema dan sasaran pembangunan tahun 2025, maka arah kebijakan Provinsi yang ditetapkan dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan adalah Pemanfaatan Potensi dan Sumber Daya Alam dan Kebangkitan Ekonomi sedangkan arah kebijakan Nasional dalam RKP Tahun 2025 pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Sekaitan dengan arah kebijakan tersebut, maka rencana prioritas pembangunan Kota Makassar tahun 2025 dilihat dari keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Makassar dengan sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan dengan Prioritas Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IV.11.**
**Kesesuaian Prioritas Nasional dengan**
**Sasaran Pembangunan Provinsi Sul-Sel dan Kota Makassar Tahun 2025**

| Prioritas Nasional (PN) | Sasaran Pembangunan Provinsi Sul-Sel | Sasaran Pembangunan Kota Makassar | Indikator Kinerja Sasaran Kota Makassar |
|---|---|---|---|
| Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)<br>(PN 1) | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah | Terwujudnya Pelayanan Publik yang *"Sombere' dan Smart"* | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |
| Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba<br>(PN 7) | Optimalnya kualitas pelayanan publik | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) |
| Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru<br>(PN 2) | Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim | Tersedianya Infrastruktur Menuju Kota Nyaman | Indeks Layanan Infrastruktur |
| Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur<br>(PN 8) | | | |
| Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan<br>(PN 6) | Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah | Meningkatkan Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Lestari | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Makassar |

| Prioritas Nasional (PN) | Sasaran Pembangunan Provinsi Sul-Sel | Sasaran Pembangunan Kota Makassar | Indikator Kinerja Sasaran Kota Makassar |
|---|---|---|---|
| Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim<br>Industri di sentra produksi melalui<br>Peran aktif koperasi<br>(PN 3) | Meningkatnya petumbuhan perekonomian daerah yang berkualitas | Tersedianya kemudahan akses peluang kerja dan peluang bisnis baru | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) |
| | | | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) |
| | | Terwujudnya gerakan masyarakat memperkuat ketahanan ekonomi | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per kapita |
| | | | Rasio Gini |
| Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas<br>(PN 4) | Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja | Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan | Indeks Pendidikan |
| | Menurunya angka kemiskinan | Meningkatnya Daya Beli Masyarakat | Pengeluaran Per kapita |
| Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri<br>(PN 5) | Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif dan Inklusif | Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan | Indeks Kesehatan |
| | Meningkatnya Kualitas dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan | Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat Miskin | Angka Kemiskinan |

Sebagai dukungan terhadap Program dan Kegiatan yang menunjang Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Nasional tahun 2025, maka Pemerintah Kota Makassar menetapkan program pembangunan daerah yang juga sinkron dan menjadi pendukung prioritas provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Nasional, sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel IV.12.**
**Kesesuaian Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Sulawesi-Selatan Dengan Sasaran dan Program Prioritas Pemerintah Kota Makassar Tahun 2025**

| Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan | Prioritas Pembangunan Kota Makassar | Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Kota Makassar |
|---|---|---|---|---|
| Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas (PN 4) | Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata (PD 4) | Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing (PD1) | Tujuan: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) |
| | | | Sasaran: Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan | Indeks Pendidikan |
| | | | Program Pengelolaan Pendidikan | Jumlah Penerima Beasiswa "Anak Lorong Berprestasi" |
| | | | | Angka Harapan Lama Sekolah |
| | | | | Angka Rata-Rata Lama Sekolah |
| | | | | Angka Partisipasi Murni (PAUD, SD dan SMP) |
| | | | | Angka Partisipasi Kasar (PAUD, SD Dan SMP) |
| | | | | Persentase Sarana Dan Prasarana Pendidikan (PAUD, SD, SMP) Dalam Kondisi Baik |
| | | | | Persentase Ketuntasan Pendidikan Kesetaraan (A, B, C) |
| | | | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Rasio Guru-Murid (PAUD, SD, SMP) |
| | | | | Persentase Guru Yang Bersertifikasi (PAUD, SD, SMP) |
| | | | Program Pembinaan Perpustakaan | Angka Budaya Baca Kota Makassar |
| | | | | Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per tahun |
| | | | | Jumlah Koleksi Judul Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah |

| Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan | Prioritas Pembangunan Kota Makassar | Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Kota Makassar |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat |
| | | | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Persentase Kelompok Masyarakat Yang Mendapat Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan |
| | | | Sasaran:<br>Meningkatnya Daya Beli Masyarakat | Pengeluaran Per kapita |
| | | | Program Pelayanan Penanaman Modal | Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pelayanan Perizinan |
| | | | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal |
| | | | Program Pengembangan UMKM | Persentase Usaha Mikro Dan Kecil |
| | | | | Jumlah Wirausaha Baru (Start-Up) |
| | | | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap |
| | | | | Cakupan Bina Kelompok Nelayan |
| Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri (PN 5) | | Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial (PD 3) | Tujuan:<br>Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Mitigasi Sosial | Usia Harapan Hidup |
| | | | Sasaran:<br>Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan | Indeks Kesehatan |
| | | | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil |
| | | | | Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan |

| Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan | Prioritas Pembangunan Kota Makassar | Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Kota Makassar |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir |
| | | | | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar |
| | | | | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar |
| | | | | Persentase orang usia 15-29 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar |
| | | | | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar |
| | | | | Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar |
| | | | | Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar |
| | | | | Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar |
| | | | | Persentase orang dengan risiko Tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan |
| | | | | Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar |
| | | | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Cakupan Bayi Mendapat Asi Eksklusif |
| | | | | Persentase Posyandu Aktif |
| | | | Sasaran: Meningkatnya Kualitas | Angka Kemiskinan |

| Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan | Prioritas Pembangunan Kota Makassar | Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Kota Makassar |
|---|---|---|---|---|
| | | | Perlindungan Masyarakat Miskin | |
| | | | Program Rehabilitasi Sosial | Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti |
| | | | | Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti |
| | | | | Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti |
| | | | | Persentase gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tuna sosial di luar panti |
| | | | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial |
| | | | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Persentase Kelurahan Ramah Anak |
| | | | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan |
| | | | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan |
| | | | | Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan |
| | | | | Persentase SKPD yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah |
| | | | | Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Kota Makassar |
| | Peningkatan tata kelola penyelenggaraan | Penguatan kinerja penyelenggaraan | Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola | Indeks Reformasi Birokrasi |

| Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan | Prioritas Pembangunan Kota Makassar | Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Kota Makassar |
|---|---|---|---|---|
| Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) (PN 1) | pemerintahan yang akuntabel dan inovatif (PD 1) | pemerintahan dan pelayanan publik yang *Sombere'* dan *Smart* (PD 2) | Pemerintahan Yang Bersih dan Efektif | |
| | | | Sasaran: Terwujudnya Pelayanan Publik yang *"Sombere' dan Smart"* | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |
| | | | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (Opd) Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo |
| Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba (PN 7) | | | | Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi |
| | | | Program Pendaftaran Penduduk | Persentase Anak Usia 1-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari Yang Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) |
| | | | | Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk |
| | | | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Di Tingkat Kecamatan |
| | | | Sasaran: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) (3,4216) |
| | | | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di Kecamatan |
| | | | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda |

| Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan | Prioritas Pembangunan Kota Makassar | Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Kota Makassar |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada |
| | | | | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Ke dalam RKPD |
| | | | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan |
| | | | | Ketepatan Waktu Penetapan APBD |
| | | | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Rasio Pendapatan Asli Daerah |
| | | | | Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru<br>(PN 2) | Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigari perubahan iklim<br>(PD 5) | Percepatan pembangunan infrastruktur kota yang berkualitas dan pengelolaan lingkungan hidup serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.<br>(PD 5) | Tujuan:<br>Mewujudkan Makassar menjadi "*Livable City*" dan "*Resilient City*" | Indeks Kota Nyaman (*Livable City Index*) |
| | | | Sasaran:<br>Tersedianya Infrastruktur Menuju Kota Nyaman | Indeks Layanan Infrastruktur |
| Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan<br>(PN 6) | | | Program Penyelenggaraan Jalan | Tingkat Kemantapan Jalan Kota |
| | | | | Persentase Panjang Trotoar terhadap Panjang Jalan |
| | | | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapat Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kota |

| Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan | Prioritas Pembangunan Kota Makassar | Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Kota Makassar |
|---|---|---|---|---|
| | | | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kota |
| | | | | Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi Erosi Dan Akresi Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengaman Pantai Di Wilayah Sungai Kewenangan Kota |
| | | | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | Persentase Drainase dalam Kondisi Baik |
| Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur (PN 8) | | | | Persentase Titik Genangan Yang Dikurangi |
| | | | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik |
| | | | Program Pengelolaan Persampahan | Terlaksananya Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kota Makassar |
| | | | | Persentase Sampah Yang Terkurangi Melalui 3R |
| | | | | Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan |
| | | | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Di bawah 10 Ha Di Kota Makassar Yang Ditangani |
| | | | Program Pengembangan Perumahan | Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni |
| | | | | Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni |

| Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan | Prioritas Pembangunan Kota Makassar | Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Kota Makassar |
|---|---|---|---|---|
| | | | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) |
| | | | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Rasio Konektivitas Kota |
| | | | | Pemasangan Rambu-Rambu |
| | | | | Persentase Layanan Angkutan Darat |
| | | | | Rasio Panjang Jalan Per jumlah Kendaraan |
| | | | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Ketaatan terhadap RTRW |
| | | | Program Penataan Bangunan Gedung | Persentase Kebutuhan Gedung Pemerintah Yang Terbangun |
| | | | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada |
| | | | | Persentase Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Yang Dapat Diselesaikan |
| | | | | Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan |
| | | | Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan Yang Dapat Diselesaikan |
| | | | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran |
| | | | | Waktu tanggap *(response time)* penanganan kebakaran |

| Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan | Prioritas Pembangunan Kota Makassar | Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Kota Makassar |
|---|---|---|---|---|
| | | | Program Penanggulangan Bencana | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana |
| | | | | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana |
| | | | | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana |
| | | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik |
| | | | | Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan |
| | | | Sasaran: Meningkatkan Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Lestari | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Makassar |
| | | | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Prioritas) | Indeks Kualitas Air Dan Indeks Kualitas Udara |
| | | | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan |
| | | | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Ketaatan Penanggung jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kota Makassar |

| Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan | Prioritas Pembangunan Kota Makassar | Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Kota Makassar |
|---|---|---|---|---|
| Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi (PN 3) | Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah (PD 3) | Penguatan ketahanan ekonomi masyarakat dan peningkatan peluang kerja dan peluang bisnis baru (PD 4) | Tujuan: Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Secara Merata | Pertumbuhan Ekonomi |
| | | | Sasaran: Tersedianya kemudahan akses peluang kerja dan peluang bisnis baru | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) |
| | | | | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) |
| | | | Program Penempatan Tenaga Kerja | Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota Makassar |
| | | | | Jumlah Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru |
| | | | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi |
| | | | | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja |
| | | | | Jumlah Peserta Pelatihan *Skill Training* Gratis Sektor Ketenagakerjaan |
| | | | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri |
| | | | | Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan |
| | | | | Persentase Wirausaha Muda |
| | | | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Meningkatnya Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha |
| | | | | Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor UMKM |
| | | | | Jumlah Peserta Pelatihan *Skill Training* Gratis Sektor Pariwisata |

| Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan | Prioritas Pembangunan Kota Makassar | Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Kota Makassar |
|---|---|---|---|---|
| | | | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Persentase SDM Pariwisata yang Mendapat Sertifikasi |
| | | | | Persentase SDM Ekonomi Kreatif yang Mendapat Peningkatan Kapasitas |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | Persentase Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang mendapat pemberdayaan |
| | | | Program Perekonomian Dan Pembangunan | Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang Dibawa Ke Tahun Berikutnya yang Ditandatangani Pada Kuartal Pertama |
| | | | | Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif |
| | | | | Persentase Perusahaan Daerah yang Berkinerja Baik |
| | | | | Persentase Penyerapan realisasi anggaran melalui Sistem Monitoring Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (SISMONTEPRA) |
| | | | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan |
| | | | Program Pengelolaan Permuseuman | Persentase Koleksi Museum Kota Makassar yang Terawat dengan Baik |
| | | | | Jumlah Pengunjung Museum Kota Makassar |
| | | | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Tingkat Hunian Akomodasi |
| | | | | Jumlah Destinasi Wisata yang berstandar Nasional |
| | | | Sasaran: Terwujudnya gerakan | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per kapita |

| Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan | Prioritas Pembangunan Kota Makassar | Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Kota Makassar |
|---|---|---|---|---|
| | | | masyarakat memperkuat ketahanan ekonomi | Rasio Gini |
| | | | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kota Makassar |
| | | | | Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri |
| | | | | Jumlah Peserta Pelatihan *Skill Training* Gratis Sektor Perindustrian |
| | | | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | PAD Sektor Ekonomi Kreatif |
| | | | | Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang difasilitasi Mendapatkan HAKI |
| | | | Program Pengembangan Kebudayaan | Cakupan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan |
| | | | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB |
| | | | | Produktivitas Pertanian Per Hektar Per tahun |
| | | | | Cakupan Pengawasan Mutu Pakan dan Produksi Benih/Bibit Ternak |
| | | | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Ketersediaan Energi Dan Protein Per kapita |
| | | | | Jumlah Lorong Garden dan Lorong Wisata |
| | | | | Skor Pola Pangan Harapan |

## 4.3. Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan Rencana RPJPD dan RPJMD, dan RKPD mengamanatkan bahwa PokokPokok Pikiran (Pokir) DPRD berdasarkan hasil reses dari penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh anggota DPRD menjadi salah satu bahan dalam Penyusunan RKPD. Pokok-Pokok Pikiran DPRD tersebut diintegrasikan ke dalam aplikasi SIPD Kemendagri yang terintegrasi pada penyusunan dokumen rancangan awal RKPD. Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang diusulkan oleh 50 anggota DPRD Kota Makassar untuk perencanaan tahun 2025 yang disetujui sebanyak 406 (empat ratus enam) usulan yang ditujukan kepada 16 (enam belas) SKPD Lingkup Pemerintah Kota Makassar. Secara garis besar Pokok-Pokok Pikiran DPRD dapat dikelompokkan atas beberapa hal-hal sebagai berikut:

a. Pembangunan dan rehabilitasi Infrastruktur (Drainase, Jalan (aspal/beton), Jembatan, Sarana Air Bersih/Air Siap Minum, Sarana dan Prasarana Sekolah, Sumur Bor, Dermaga Kayu, Jalan Lingkungan (paving blok), Tanggul Pemecah Ombak atau Talud);
b. Fasilitasi UMKM/Pelatihan dan pemberdayaan, Kemudahan Perizinan, Modal Usaha/kemitraan, dan Pelatihan keterampilan);
c. Bantuan yang diserahkan ke masyarakat (Masjid dan Rumah Ibadah Lainnya, peralatan mandi jenazah dan Bibit Pohon/Tanaman Penghijauan);
d. Pelatihan keterampilan dan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda (Kecantikan/Tatarias/Pangkas Rambut/Menjahit Tingkat Dasar, Pemasaran secara Online, Keterampilan Ekonomi Kreatif, Pembuatan Kemasan);
e. Pembangunan/Rehab Gedung Pemerintah Kantor Lurah/Kantor Camat;
f. Pengadaan Prasarana Lingkungan (CCTV, Alat Pemadam Kebakaran, Papan Nama Jalan dan Marka Jalan);
g. Pengadaan dan Perbaikan Lampu Jalan LED dan Lampu Lorong;
h. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Miskin;
i. Fasilitasi Informasi Lapangan Kerja/Pekerjaan di Masyarakat;
j. Pelayanan Penyemprotan (FOGGING) Demam Berdarah Dengue (DBD);
k. Pengadaan Tempat sampah di Ruang Publik dan Penanganan Sampah (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah);
l. Penertiban Parkir yang Menggunakan Bahu Jalan;
m. Pengembangan Objek Wisata Lokal dan Lorong Wisata;
n. Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
o. Rehabilitasi Pasar Tradisional;
p. Penyediaan Sembako Murah.

Jika dilihat dari SKPD yang dituju untuk pengusulan Pokir DPRD dapat diurut dari yang terbanyak adalah Dinas Pekerjaan Umum 213 (dua ratus tiga belas) usulan, Dinas Perhubungan 84 delapan puluh empat) usulan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 38 (tiga puluh delapan) usulan, Dinas Komunikasi dan Informatika 17 (tuh belas) usulan, Dinas Lingkungan Hidup 11 (sebelas) usulan, Sekretariat Daerah 10 (sepuluh) Usulan, Dinas Pariwisata 7 (tujuh) Usulan, Dinas Ketenagakerjaan 6 (enam) Usulan, Dinas Perdagangan 5 (lima) Usulan, Dinas Pendidikan 4 (empat) usulan, Dinas Pemuda dan Olahraga 3 (tiga) usulan, Dinas Perikanan dan Pertanian 3 (tiga) usulan, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman 3 (tiga) usulan, Dinas Pemadam Kebakaran 2 (dua) usulan, Dinas Sosial 2 (dua) Usulan, Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil 1 (satu) usulan, dan Dinas Kesehatan 1 (satu) usulan. Secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel IV.13.**
**Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Makassar Tahun 2025**

| No. | Nama Perangkat Daerah | Usulan yang disetujui |
|---|---|---|
| 1. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1 |
| 2. | Dinas Kesehatan | 1 |
| 3. | Dinas Ketenagakerjaan | 6 |
| 4. | Dinas Komunikasi dan Informatika | 17 |
| 5. | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 38 |
| 6. | Dinas Lingkungan Hidup | 11 |
| 7. | Dinas Pariwisata | 7 |
| 8. | Dinas Pekerjaan Umum | 213 |
| 9. | Dinas Pemadam Kebakaran | 2 |
| 10. | Dinas Pemuda dan Olahraga | 3 |
| 11. | Dinas Perdagangan | 5 |
| 12. | Dinas Perhubungan | 84 |
| 13. | Dinas Perikanan dan Pertanian | 3 |
| 14. | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman | 3 |
| 15. | Dinas Sosial | 2 |
| 16. | Sekretariat Daerah | 10 |
| **TOTAL** | | **406** |

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa pada Musrenbang tahun 2024 usulan sebanyak 406, dan sebanyak 248 usulan yang di Akomodir dalam DPA SKPD dan sebanyak 122 usulan tidak diakomodir dalam DPA 2025. Dari perkembangan tersebut karena adanya kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi dan kebijakan pemerintah daerah terkait pengendalian belanja-belanja yang tidak dapat direalisasi sampai akhir tahun.

# BAB V

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025



# BAB V
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
# PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

## 5.1 Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2025

Kerangka pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2025, disusun berdasarkan analisis kerangka pendanaan yang bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program dan kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2025. Perhitungan kapasitas riil keuangan daerah disusun dengan memperhatikan sumber – sumber riil penerimaan daerah yang terdiri dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Mengacu pada kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah yang telah disusun, dimana Penerimaan Daerah pada Perubahan RKPD tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp.5.128.954.350.000,- yang terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp.4.898.710.774.978,87 dan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 230.243.575.021,13. Penerimaan Daerah pada perubahan RKPD Tahun 2025 digunakan untuk membiayai Belanja Daerah sebesar Rp. 5.128.954.350.000,-.

Rincian kerangka pendanaan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel V.1.**
**Rincian Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2025**

| Kode | URAIAN | RKPD 2025 | APBD 2025 | TARGET PERUBAHAN 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **4** | **PENDAPATAN DAERAH** | **4.882.407.900.000,00** | **5.384.607.633.732,00** | **4.898.710.774.978,87** |
| **4.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **2.412.075.347.212,00** | **2.484.325.936.732,00** | **2.150.902.258.978,87** |
| 4.1.1 | Pajak Daerah | 2.100.000.000.000,00 | 2.125.300.000.000,00 | 1.876.102.441.000,00 |
| 4.1.2 | Retribusi daerah | 98.358.705.400,00 | 239.377.050.544,00 | 205.591.102.446,80 |
| 4.1.3 | Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan | 51.027.054.575,00 | 51.027.054.575,00 | 24.368.548.085,07 |
| 4.1.4 | Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah | 162.689.587.237,00 | 68.621.831.613,00 | 44.840.167.447,00 |
| **4.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **2.443.381.963.268,00** | **2.900.281.697.000,00** | **2.747.808.516.000,00** |
| 4.2.1 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT | 2.091.501.963.268,00 | 2.442.281.697.000,00 | 2.469.808.516.000,00 |
| 4.2.2 | TRANSFER ANTAR-DAERAH | 351.880.000.000,00 | 458.000.000.000,00 | 278.000.000.000,00 |
| **4.3** | **LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **26.950.589.520,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah | | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.2 | Dana darurat | | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.3 | Lain Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan | | | |

| Kode | URAIAN | RKPD 2025 | APBD 2025 | TARGET PERUBAHAN 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | peraturan perundang-undangan | 26.950.589.520,00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Jumlah Pendapatan Daerah** | **4.882.407.900.000,00** | **5.384.607.633.732,00** | **4.898.710.774.978,87** |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | **5.684.607.633.732,00** | **5.128.954.350.000,00** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **3.706.646.825.832,00** | **4.167.493.949.284,00** | **4.155.936.114.856,00** |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.713.872.583.195,00 | 1.952.829.349.780,00 | 2.010.901.443.276,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.813.105.909.567,00 | 2.019.473.265.410,00 | 1.988.067.633.469,00 |
| 5.1.03 | Belanja Bunga | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 179.668.333.070,00 | 195.191.334.094,00 | 156.967.038.111,00 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.07 | Belanja Imbalan | | 0.00 | 0.00 |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | **1.355.761.074.168,00** | **1.477.113.684.448,00** | **933.018.235.144,00** |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 22.066.050.000,00 | 32.318.503.987,00 | 35.352.087.100,00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 192.062.747.563,00 | 332.334.137.315,00 | 229.648.230.481,00 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 326.850.947.138,00 | 387.928.273.999,00 | 149.203.965.787,00 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 805.773.609.467,00 | 703.448.545.147,00 | 497.724.099.776,00 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 6.007.720.000,00 | 13.144.224.000,00 | 13.149.852.000,00 |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 3.000.000.000,00 | 7.940.000.000,00 | 7.940.000.000,00 |
| **5.3** | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **40.000.000.000,00** | **40.000.000.000,00** | **40.000.000.000,00** |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 40.000.000.000,00 | 40.000.000.000,00 | 40.000.000.000,00 |
| **5.4** | **BELANJA TRANSFER** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5.4.1 | Transfer Hasil Pendapatan Ke Kabupaten/Kota | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.2 | Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Jumlah Belanja Daerah** | **5.102.407.900.000,00** | **5.684.607.633.732,00** | **5.128.954.350.000,00** |
| | **Total Surplus/ (Defisit)** | | **(300.000.000.000,00)** | **(230.243.575.021,13)** |
| **6** | **PEMBIAYAAN DAERAH** | **220.000.000.000,00** | **300.000.000.000,00** | **230.243.575.021,13** |

| Kode | URAIAN | RKPD 2025 | APBD 2025 | TARGET PERUBAHAN 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **6.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **220.000.000.000,00** | **300.000.000.000,00** | **230.243.575.021,13** |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2021 | 220.000.000.000,00 | 300.000.000.000,00 | 230.243.575.021,13 |
| 6.1.02 | Pencairan Dana Cadangan | | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.03 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.04 | Penerimaan Pinjaman Daerah | | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.05 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.06 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan | | 0.00 | 0.00 |
| | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **220.000.000.000,00** | **300.000.000.000,00** | **230.243.575.021,13** |
| **6.2** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| | Pembentukan Dana Cadangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Penyertaan Modal Daerah | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Pemberian Pinjaman Daerah | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Jumlah Pengeluaran Pembiayaan** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| | **Pembiayaan Netto** | **220.000.000.000,00** | **300.000.000.000,00** | **230.243.575.021,13** |

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar, Tahun 2025 (Data diolah)*

## 5.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2025

Pelaksanaan proses penyusunan penatapan program prioritas telah melalui tahapan dan prosdur perencanaan yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan menjadi dasar acuan dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran Pembangunan

daerah untuk Perubahan Tahun 2025, Perumusan Program Prioritas Pembangunan Daerah pada RKPD Perubahan Tahun 2025 terdiri 5 (lima) Prioritas Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran Prioritas yaitu :
   a. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan;
   b. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat
2. Penguatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang *Sombere'* dan *Smart,* dengan sasaran prioritas yaitu :
   a. Terwujudnya Pelayanan Publik yang *Sombere'* dan *Smart;*
   b. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dengan sasaran Prioritas yaitu :
   a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan;
   b. Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Miskin.
4. Penguatan ketahanan ekonomi masyarakat dan peningkatan peluang kerja dan peluang bisnis baru, dengan sasaran prioritas yaitu:
   a. Tersedianya Kemudahan Akses Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru;
   b. Terwujudnya Gerakan Masyarakat Memperkuat Ketahanan Ekonomi.
5. Percepatan pembangunan infrastruktur kota yang berkualitas dan pengelolaan lingkungan hidup serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dengan sasaran prioritas yaitu :
   a. Tersedianya Infrastruktur Menuju Kota Nyaman;
   b. Meningkatkan Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Lestari.

Secara keseluruhan Prioritas Pembangunan pada Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2025 dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel V.2.**
**Program Prioritas Pembangunan Daerah Pada Perubahan RKPD 2025**

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Peningkatan dan pemerataan kesempatan kerja, dan lapangan berusaha melalui pemberdayaan masyarakat dan mendorong penerapan ekonomi hijau dan biru | Tujuan 1.1:<br>Terwujudnya Kota Makassar Dengan Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah Di Kota Makassar | 360 IKM | 5.838.799.120,00 | Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah Di Kota Makassar | 360 IKM | 4.108.382.120,00 | Dinas Perdagangan<br>(Bidang Industri) |
| | | Sasaran 1.1.1:<br>Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri dan Perdagangan | | Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri | 60% | | Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri | 60% | | |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Perindustrian | 250 orang | | Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Perindustrian | 250 orang | | |
| | | | Program Pengembangan Ekspor | Peningkatan Hasil ekspor | 724.027.781 US$ | 629,750,680.00 | Peningkatan Hasil ekspor | 75% | 999.791.840 | |
| | | | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal | 500 Kelompok | 272.024.456 | Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal | 500 Kelompok | 651.494.456 | Dinas Perdagangan (Bidang Perdagangan) |
| | | | Program Pengembangan UMKM | Persentase Usaha Mikro dan Kecil | 81% (12.609/1 | 2,384.933.000,00 | Persentase Usaha Mikro dan Kecil | 81% | 3.038.452.000,00 | Dinas Koperasi UMKM |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 5.377x100 ) | | | | | |
| | | | | Jumlah Wirausaha Baru (Start-Up) | 10 UMKM | | Jumlah Wirausaha Baru (Start-Up) | 10 UMKM | | |
| | | Sasaran 1.1.2:<br>Meningkatnya Kesempatan Kerja. dan Pendapatan Masyarakat | | | | | | | | |
| 2 | Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui perbaikan iklim investasi dan peningkatan | | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | 1,03% | 1.587.007.500 | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | 1,03% | 2.748.079.400 | Dinas Ketenagakerjaan<br>(Bidang Tenaga Kerja) |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | kemandirian fiskal daerah | | | | | | | | | |
| | | | | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | 22,50% | | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | 22,50% | | |
| | | | | Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Ketenagakerjaan | 1230 orang | | Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Ketenagakerjaan | 1230 orang | | |
| | | | | Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya | 20.49% | | Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya | 20.49% | | |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Program Penempatan Tenaga Kerja | Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota Makassar | 65% | 909.458.920 | Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota Makassar | 65% | 1.053.481.660 | |
| | | | | Jumlah Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru | 975 | | Jumlah Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru | 975 | | |
| | | | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap | 20.713 Ton | 449,891,000.00 | Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap | 20.713 Ton | 986.289.680,00 | Dinas Perikanan dan Pertanian (Bidang Perikanan) |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | Cakupan Bina Kelompok Nelayan | 18,9% (153 Kelompok) | | | | | |
| | | | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Pariwisata | 900 Orang | 1.794.642.400,00 | Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Pariwisata | 900 Orang | 2.753.325.000 | Dinas Pariwisata<br>(Bidang Pariwisata) |
| | | | | Persentase SDM Pariwisata Yang Mendapat Sertifikasi | 6,4% = (400/6.165) x 100% | | Persentase SDM Pariwisata Yang Mendapat Sertifikasi | 6,4% = (400/6.165) x 100% | | |
| | | | | Persentase SDM Ekonomi Kreatif Yang Mendapat | 10% = (100/1000) x 100% | | Persentase SDM Ekonomi Kreatif Yang Mendapat | 10% = (100/1000) x 100% | | |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | Peningkatan Kapasitas | | | Peningkatan Kapasitas | | | |
| | | | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri | 90% | 4.481.430.000 | Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri | 90% | 9.149.463.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga<br>(Bidang Pemuda dan Olahraga) |
| | | | | Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan | 86,07% | | Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan | 86,07% | | |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Tujuan 1.2:<br>Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Rasio Pendapatan Asli Daerah | 53,04% | 36,504.024.575,00 | Rasio Pendapatan Asli Daerah | 53,04% | 31.841.474.856 | Badan Pendapatan Daerah<br>(Unsur Keuangan. Sub Unsur Pengelolaan Keuangan Daerah) |
| | | Sasaran 1.2.1:<br>Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah | | Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 100% | | Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 100% | | |
| | | Sasaran 1.2.2:<br>Terwujudnya Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Persentase Barang Penting Dengan Harga Stabil | 33.33 % | 988,543,640.00 | Persentase Barang Penting Dengan Harga Stabil | 33.33 % | 946.223.640 | Bidang Perdagangan |
| | | | | Persentase Barang Kebutuhan | 33.33 % | | Persentase Barang Kebutuhan | 33.33 % | | |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | Pokok Dengan Harga Stabil | | | Pokok Dengan Harga Stabil | | | |
| | | | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase Penggelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 100 | 13,090,200.00 | Persentase Penggelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 85% | 22.562.000 | |
| | | | | Masyarakat yang mendapat pembinaan Jumlah Pasar Rakyat Standar Nasional Indonesia (SNI) | 1 | | Masyarakat yang mendapat pembinaan Jumlah Pasar Rakyat Standar Nasional Indonesia (SNI) | 1 | | |
| | | | Program Penyediaan dan Pengembang | Persentase Kontribusi Sektor Pertanian | 0,1% (213,36 Milyar) | 2.095.667.820 | Persentase Kontribusi Sektor Pertanian | 0,1% (213,36 Milyar) | 5.477.531.732 | Dinas Perikanan |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | an Sarana Pertanian | Terhadap PDRB | | | Terhadap PDRB | | | dan Pertanian<br>(Bidang Pertanian) |
| | | | | Produktivitas Pertanian Per Hektar Per tahun | 7,1 Ton Per Hektar | | Produktivitas Pertanian Per Hektar Per tahun | 7,1 Ton Per Hektar | | |
| | | | | Cakupan Pengawasan Mutu Pakan dan Produksi Benih/Bibit Ternak | 450 sampel (38%) ; 350 ekor (0,96) | | Cakupan Pengawasan Mutu Pakan dan Produksi Benih/Bibit Ternak | 450 sampel (38%) ; 350 ekor (0,96) | | |
| | | | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan | Ketersediaan Energi Dan Protein Per kapita | Energi: 2.700<br>Protein: 128 | 10.923.363.640 | Ketersediaan Energi Dan Protein Per kapita | Energi: 2.700<br>Protein: 128 | 4.735.914.076 | Dinas Ketahanan Pangan<br>Bidang Pangan |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Pangan Masyarakat | Jumlah Lorong Garden dan Lorong Wisata | 500 Lorong Garden dan Lorong Wisata | | Jumlah Lorong Garden dan Lorong Wisata | 500 Lorong Garden dan Lorong Wisata | | |
| | | | | Skor Pola Pangan Harapan | 88 Energi | | Skor Pola Pangan Harapan | 88 Energi | | |
| | | | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya | 1.559 Ton | 758.145.000 | Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya | 1.559 Ton | 1.010.083.000 | Bidang Perikanan |
| | | | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan | 11,76% | 247.718.200 | Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan | 1,31 % | 528.700.000 | Dinas Ketahanan Pangan (Bidang Pangan) |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Sasaran 1.2.3:<br>Meningkatnya Realisasi Investasi di Kota Makassar | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Persentase Jumlah Investor serta Investasi PMA dan PMDN Berskala Nasional | 100 Persen | 411,682,000.00 | Persentase Jumlah Investor serta Investasi PMA dan PMDN Berskala Nasional | 100 Persen | 555.136.300 | (Bidang Penanaman Modal) |
| | | | Program Pelayanan Penanaman Modal | Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pelayanan Perizinan | 100% | 1.155.480.400 | Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pelayanan Perizinan | 100% | 1.295.015.400 | Bidang Penanaman Modal |
| | | | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Cakupan Pembinaan dan Pelayanan Kegiatan Keagamaan | 100 | 38.192.607.020 | Cakupan Pembinaan dan Pelayanan Kegiatan Keagamaan | 100 | 45.487.501.980 | Unsur Sekretariat Daerah |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | Cakupan Penataan Administrasi Tata Pemerintahan | Sangat Tinggi | | Cakupan Penataan Administrasi Tata Pemerintahan | Sangat Tinggi | | |
| | | Tujuan 2.1:<br>Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | | | | | | |
| | | Sasaran 2.1.1:<br>Meningkatnya Kualitas Dan Aksesibilitas Pendidikan | | | | | | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | Program Pengelolaan Pendidikan | Jumlah penerima beasiswa "Anak Lorong Berprestasi" | 400 orang | 229.245.988.508 | Jumlah penerima beasiswa "Anak Lorong Berprestasi" | 400 orang | 302.251.637.120 | Dinas Pendidikan<br>(Bidang Pendidikan) |
| | | | | Angka Harapan Lama Sekolah | 16,56 Tahun | | Angka Harapan Lama Sekolah | 16,56 Tahun | | |
| | | | | Angka Rata-Rata Lama Sekolah | 12,2 tahun | | Angka Rata-Rata Lama Sekolah | 12,2 tahun | | |
| | | | | Angka Partisipasi Murni | PAUD = 56,93 % | | Angka Partisipasi Murni | PAUD = 56,93 % | | |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | SD = 100% | | | SD = 100% | | |
| | | | | | SMP = 100% | | | SMP = 100% | | |
| | | | | Angka Partisipasi Kasar | PAUD = 65,52% | | Angka Partisipasi Kasar | PAUD = 65,52% | | |
| | | | | | SD = 100% | | | SD = 100% | | |
| | | | | | SMP = 100% | | | SMP = 100% | | |
| | | | | Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Kondisi Baik | PAUD = 78% | | Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Kondisi Baik | PAUD = 78% | | |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | SD = 100% | | | SD = 100% | | |
| | | | | | SMP = 100% | | | SMP = 100% | | |
| | | | | Persentase Ketuntasan Pendidikan Kesetaraan (A, B, C) | 94,26% | | Persentase Ketuntasan Pendidikan Kesetaraan (A, B, C) | 94,26% | | |
| | | | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Rasio Guru-Murid (PAUD, SD, SMP) | PAUD = 1 : 18 | 95.680.000 | Rasio Guru-Murid (PAUD, SD, SMP) | PAUD = 1 : 18 | 11.680.000 | |
| | | | | | SD = 1 : 30 | | | SD = 1 : 30 | | |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | SMP = 1 : 32 | | | SMP = 1 : 32 | | |
| | | | | Persentase Guru yang Bersertifikasi (PAUD, SD, SMP) | PAUD = 39.49% | | Persentase Guru yang Bersertifikasi (PAUD, SD, SMP) | PAUD = 39.49% | | |
| | | | | | SD = 47.83% | | | SD = 47.83% | | |
| | | | | | SMP = 47.88% | | | SMP = 47.88% | | |
| | | | Program Pembinaan Perpustakaan | Angka Budaya Baca Kota Makassar | 65% | 521.351.776 | Angka Budaya Baca Kota Makassar | 65% | 4.681.335.096 | Dinas Pendidikan (Bidang Perpustakaan) |
| | | | | Jumlah Pengunjung | 560.000 orang/tahun | | Jumlah Pengunjung | 560.000 orang/tahun | | |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | Perpustakaan per Tahun | | | Perpustakaan per Tahun | | | |
| | | | | Jumlah Koleksi Judul yang Tersedia di Perpustakaan Daerah | 32.212 | | Jumlah Koleksi Judul yang Tersedia di Perpustakaan Daerah | 32.212 | | |
| | | | | Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang Memiliki Sertifikat | 27 Pustakawan, 147 Tenaga Teknis | | Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang Memiliki Sertifikat | 27 Pustakawan, 147 Tenaga Teknis | | |
| | | Sasaran 2.1.2:<br>Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya | Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan | 100% | 266.638.729.109 | Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan | 100% | 339.404.404.589 | Dinas Kesehatan |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Kesehatan Masyarakat | | | | | | | |
| | | | | Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan | 100% | | Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan | 100% | | |
| | | | | Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan bayi baru lahir | 100% | | Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan bayi baru lahir | 100% | | |
| | | | | Jumlah Balita yang mendapatkan | 100% | | Jumlah Balita yang mendapatkan | 100% | | |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | layanan kesehatan | | | layanan kesehatan | | | |
| | | | | Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan | 100% | | Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan | 100% | | |
| | | | | Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan | 100% | | Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan | 100% | | |
| | | | | Persentase warga negara usia lanjut yang | 100% | | Persentase warga negara usia lanjut yang | 100% | | |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | mendapatkan layanan kesehatan | | | mendapatkan layanan kesehatan | | | |
| | | | | Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan | 100% | | Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan | 100% | | |
| | | | | Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan | 100% | | Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan | 100% | | |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan | 100% | | Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan | 100% | | |
| | | | | Persentase Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan | 100% | | Persentase Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan | 100% | | |
| | | | | Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan | 100% | | Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan | 100% | | |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan | | | daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan | | | |
| | | Sasaran 2.1.3:<br>Meningkatnya Daya Beli Masyarakat | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Persentase Jumlah Investor serta Investasi PMA dan PMDN Berskala Nasional | 100% | 411.682.000 | Persentase Jumlah Investor serta Investasi PMA dan PMDN Berskala Nasional | 100% | 555.136.300 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | Program Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil dan Usaha | | | | | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Mikro (UMKM) | | | | | | | |
| | | | Program Penempatan Tenaga Kerja | Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kota Makassar | 65% | 909.458.920 | Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kota Makassar | 65% | 1.053.481.660 | Dinas Ketenagakerjaan |
| | | | | Jumlah Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru | 9.745 | | Jumlah Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru | 9.745 | | |
| | | Tujuan 3.1:<br>Meningkatnya Infrastruktur Perkotaan Yang | | | | | | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Berkualitas dan Merata | | | | | | | | |
| | | Sasaran 3.1.1:<br>Tersedianya Infrastruktur Sarana dan Prasarana Terintegrasi | | | | | | | | |
| 4 | Meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan dan penataan ruang secara berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas, pemerataan dan kemudahan akses layanan infrastruktur | | Program Penyelenggaraan Jalan | Tingkat Kemantapan Jalan Kota | 96,01% | 648.157.034.641 | Tingkat Kemantapan Jalan Kota | 96,01% | 309.770.860.909 | Dinas Pekerjaan Umum<br>( Bidang Pekerjaan Umum dan PR. Sub Bidang Pekerjaan Umum) |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah | | | | | | | | | |
| | | | | Persentase Panjang Trotoar terhadap Panjang Jalan | 6% | | Persentase Panjang Trotoar terhadap Panjang Jalan | 6% | | |
| | | | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Di bawah 10 Ha Di Kota Makassar Yang Ditangani | 80% (3000 unit) | 233.892.000 | Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Di bawah 10 Ha Di Kota Makassar Yang Ditangani | 80% (3000 unit) | 986.743.600 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman<br>( Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman) |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan | 80% | | Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan | 80% | | |
| | | | | Persentase Penataan Kawasan Kampung Nelayan Berbasis Rumah Tradisional | 100 % | | Persentase Penataan Kawasan Kampung Nelayan Berbasis Rumah Tradisional | 100 % | | |
| | | | | Berkurangnya jumlah unit rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh | 1050 Unit | | Berkurangnya jumlah unit rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh | 1050 Unit | | |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | Persentase orang/badan yang mendapat pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai standar | 20% | | Persentase orang/badan yang mendapat pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai standar | 20% | | |
| | | | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian | 95,00% | 7.915.391.500 | Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian | 95,00% | 6.485.724.099 | |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | Banjir Di Wilayah Sungai Kewenangan Kota | | | Banjir Di Wilayah Sungai Kewenangan Kota | | | |
| | | | | Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi Erosi Dan Akresi Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengaman Pantai Di Wilayah Sungai Kewenangan Kota | 98,37% | | Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi Erosi Dan Akresi Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengaman Pantai Di Wilayah Sungai Kewenangan Kota | 98,37% | | |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapat Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kota | 100% | 47.805.679.300 | Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapat Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kota | 100% | 34.744.441.630 | Dinas Pekerjaan Umum<br>(Bidang Pekerjaan Umum dan PR. Sub Bidang Pekerjaan Umum) |
| | | | Program Pengelolaan dan Pengembang | Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang | 100% | 29,177,603,500.00 | Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang | 100% | 35.535.633.399 | Dinas Pekerjaan Umum (Bidang |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | an Sistem Air Limbah | Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik | | | Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik | | | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sub Bidang Pekerjaan Umum) |
| | | | Program Penataan Bangunan Gedung | Persentase Kebutuhan Gedung Pemerintah Yang Terbangun | 88,83% | 209.180.613.422 | Persentase Kebutuhan Gedung Pemerintah Yang Terbangun | 88,83% | 101.014.914.302 | |
| | | | Program Pengadaaan Tanah Untuk Kepentingan Umum | | | | | | | |
| | | Sasaran 3.1.2:<br>Meningkatnya Pengendalian dan | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Ketaatan terhadap RTRW | 90% | 1.841.864.180 | Ketaatan terhadap RTRW | 90% | 9.310.505.380 | |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | | | | | | | | |
| | | Tujuan 4.1:<br>Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah | | | | | | | | |
| | | Sasaran 4.1.1:<br>Meningkatnya Penguasaan IPTEK | | | | | | | | |
| 5 | Peningkatan daya saing sektor pariwisata melalui penguatan dan inovasi industri ekonomi kreatif berbasis | Sasaran 4.1.2:<br>Meningkatnya Kuantitas Inovasi Seluruh Bidang Pembangunan | Program Riset dan Inovasi Daerah | | | | | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | kekayaan seni budaya lokal | | | | | | | | | |
| | | Tujuan 4.2:<br>Meningkatnya Daya Saing Pariwisata | | | | | | | | |
| | | Sasaran 4.2.1:<br>Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Kunjungan Wisatawan | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Tingkat Hunian Akomodasi | 54% = (2.245.638/4.158.588) x 100% | 4.580.418.785,00 | Tingkat Hunian Akomodasi | 54% = (2.245.638/4.158.588) x 100% | 6.928.898.574 | Dinas Pariwisata<br>(Bidang Pariwisata) |
| | | | | Jumlah Destinasi Wisata yang berstandar Nasional | 1 destinasi | | Jumlah Destinasi Wisata yang berstandar Nasional | 1 destinasi | | |
| | | | | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wiasatawan | 5% | | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wiasatawan | 5% | | |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Sasaran 4.2.2:<br>Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Budaya | Program Pengembangan Kebudayaan | Cakupan Objek Pemajuan Kebudayaan Yang dilestarikan | 55.5 % | 1,858,788,400.00 | Cakupan Objek Pemajuan Kebudayaan Yang dilestarikan | 55.5 % | 4.244.998.800,00 | Dinas Kebudayaan<br>(Bidang Kebudayaan) |
| | | | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya | 4 Festival | 4,282,131,000.00 | Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya | 4 Festival | 4.258.416.000,00 | |
| | | Sasaran 4.2.3:<br>Meningkatnya Kuantitas | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan | PAD Sektor Ekonomi Kreatif | 17.15% = (381.449.850.193/2.224.225.997.905) x 100% | 4.608.881.100 | PAD Sektor Ekonomi Kreatif | 17.15% = (381.449.850.193/2.224.225.997.905) x 100% | 12.818.873.672,00 | Dinas Pariwisata<br>(Bidang Pariwisata) |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Hak Kekayaan Intelektual | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang difasilitasi Mendapatkan HAKI | 150 Usaha | | Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang difasilitasi Mendapatkan HAKI | 150 Usaha | | |
| | | Tujuan 5.1:<br>Meningkatnya Kualitas Birokrasi Yang Berintegritas Dan Adaptif | | | | | | | | |
| | | Sasaran 5.1.1:<br>Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah | | | | | | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Berintegritas dan Adaptif melalui penguatan meritokrasi serta penguatan pemanfaatan teknologi digital untuk transformasi layanan pemerintahan | | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD | 100 Persen | 4,939,838,744.00 | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD | 100 Persen | 3.964.221.744,00 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah | Ada | | Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah | Ada | | |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | (RPJMD) yang Telah Ditetapkan dengan Perda | | | (RPJMD) yang Telah Ditetapkan dengan Perda | | | |
| | | | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat | 100% | 1,237,023,900.00 | Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat | 100% | 2.322.149.500,00 | Inspektorat Daerah (Unsur Pengawasan) |
| | | | | Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) | 3 Level | | Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) | 3 Level | | |
| | | | | Persentase Tindak Lanjut Temuan | 75,60% | | Persentase Tindak Lanjut Temuan | 75,60% | | |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Program Pemerintahaan dan Kesejahteraan Rakyat | Cakupan Penataan Administrasi Tata Pemerintahan | 100% | 38.192.607.020,00 | Cakupan Penataan Administrasi Tata Pemerintahan | 100% | 45.487.501.980,00 | Unsur Sekretariat Daerah |
| | | | | Cakupan Pembinaan dan Pelayanan Kegiatan Keagama | Sangat Tinggi | | Cakupan Pembinaan dan Pelayanan Kegiatan Keagama | Sangat Tinggi | | |
| | | | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Ketepatan Waktu Penetapan APBD Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan | Tepat Waktu WTP | 58,500,340,256.00 | Ketepatan Waktu Penetapan APBD Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan | Tepat Waktu WTP | 51.315.947.840,00 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah<br>Unsur Keuangan. Sub Unsur Pengelolaan Keuangan |
| | | | | | | | Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan | 29,69% | | |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | Guru yang Dialokasikan melalui TKD | | | |
| | | | | | | | Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik | 40,58% | | |
| | | | | | | | Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar | 85% | | |
| | | | | | | | Persentase Penurunan SILPA | 15% | | |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | Persentase laporan keuangan tepat waktu | 100% | | |
| | | | Program Kepegawaian Daerah | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi Dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan) | 64,48% | 3,644,391,760.00 | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi Dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan) | 64,48% | 2.811.361.960,00 | Unsur Kepegawaian |
| | | | | Rasio Pegawai Fungsional (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan) | 8,56% | | Rasio Pegawai Fungsional (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan) | 8,56% | | |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Program Aplikasi Informatika | | | | | | | Bidang Komunikasi dan Informatika |
| | | Tujuan 5.2:<br>Meningkatnya Kualitas Keamanan. Ketentraman. dan Ketertiban Umum | | | | | | | | |
| | | Sasaran 5.2.1:<br>Meningkatnya Kualitas Keamanan Masyarakat | | | | | | | | |
| 7 | Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui | | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | Bidang Trantibum Linmas. Sub Bidang Trantibum |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama | | | | | | | | | |
| | | | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan Yang Dapat Diselesaikan | 100% | 132.000.000 | Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan Yang Dapat Diselesaikan | 100% | 132.000.000 | Seluruh Kecamatan<br>Unsur Kewilayahan (Seluruh Kecamatan) |
| | | | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional | Persentase Kelompok Masyarakat yang | 100% | 21.142.889.320,00 | Persentase Kelompok Masyarakat yang | 100% | 20.880.499.600,00 | Unsur Pemerintahan Umum |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | mendapat Pemahaman terhadap Pencegahan Konflik Sosial | | | mendapat Pemahaman terhadap Pencegahan Konflik Sosial | | | |
| | | Tujuan 6.1:<br>Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender | | | | | | | | |
| | | Sasaran 6.1.1:<br>Menurunnya Ketimpangan Gender | | | | | | | | |
| 8 | Penguatan lingkungan sosial yang sehat dan budaya maju | | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdaya | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja | 80% | 371,175,000.00 | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja | 80% | 1.003.833.000,00 | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan PA |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | dengan memperhatikan pelibatan pemberdayaan kelompok marjinal melalui pembangunan keluarga, Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dan keolahragaan | | an Perempuan | langsung APBD | | | langsung APBD | | | |
| | | | Program Perlindungan Perempuan | Rasio kekerasan terhadap perempuan-termasuk TPPO-per 100.000 | 79.56 % | 1,569,784,000.00 | Rasio kekerasan terhadap perempuan-termasuk TPPO-per 100.000 | 79.56 % | 2.692.164.000,00 | |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | penduduk perempuan | | | penduduk perempuan | | | |
| | | Sasaran 6.1.2:<br>Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | | | 331.960.000 | | | 563.059.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Bidang Pemberdayaan Perempuan dan PA) |
| | | | Program Perlindungan Khusus Anak | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait | 97.84 % | 1,452,351,620.00 | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait | 97.84 % | 2.151.315.192,00 | |
| | | Sasaran 6.1.3:<br>Meningkatnya Kualitas Pembangunan | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan | 86.07% | 4,481,430,000.00 | Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan | 86.07% | 9.149.463.000,00 | Bidang Pemuda dan Olahraga |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Pemuda dan Olahraga | | Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan | | | Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan | | | |
| | | | | Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri | 90% | | Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri | 90% | | |
| | | | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Peningkatan Prestasi Olahraga | 406 atlet berprestasi 37 cabang olahraga Atlet Cabang Olahraga | 218,445,500,100.00 | Peningkatan Prestasi Olahraga | 406 atlet berprestasi 37 cabang olahraga Atlet Cabang Olahraga | 44.934.883.000,00 | |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | Cakupan Pembinaan Olahraga | 57.8 % | | Cakupan Pembinaan Olahraga | 57.8 % | | |
| | | | | Cakupan Pembinaan Atlet Muda | 67.16 % | | Cakupan Pembinaan Atlet Muda | 67.16 % | | |
| | | Tujuan 6.2:<br>Meningkatnya Perlindungan Sosial Yang Adaptif Dan Tepat Sasaran | | | | | | | | |
| | | Sasaran 6.2.1:<br>Menurunnya Disparitas Pendapatan | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persentase Fakir Miskin yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial | 100% | 1.671.169.200 | Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial | 100% | 2.939.480.200,00 | Dinas Sosial<br>(Bidang Sosial) |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Sasaran 6.2.2:<br>Meningkatnya Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas | Program Penempatan Tenaga Kerja | Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota Makassar | 65% | 909.458.920 | Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota Makassar | 65% | 1.053.481.660,00 | Dinas Ketenagakerjaan<br>(Bidang Tenaga Kerja) |
| | | | | Jumlah Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru | 9.745 | | Jumlah Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru | 9.745 | | |
| | | | Program Rehabilitasi Sosial | Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | 100% | 3.610.251.200 | Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | 100% | 4.498.230.608,00 | Dinas Sosial<br>(Bidang Sosial) |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | 100% | | Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | 100% | | |
| | | | | Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | 100% | | Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | 100% | | |
| | | | | Persentase gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tuna sosial di luar panti | 100% | | Persentase gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tuna sosial di luar panti | 100% | | |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Tujuan 7.1:<br>Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari | | | | | | | | |
| | | Sasaran 7.1.1:<br>Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | | | | | | | | |
| 9 | Pelestarian lingkungan hidup melalui penguatan mitigasi dampak lingkungan serta peningkatan Kapasitas Penanganan Bencana dan Ketangguhan | | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara | IKA = 59,6<br>IKU = 79.72 | 1.421.562.540,00 | Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara | IKA = 59,6<br>IKU = 79.72 | 1.181.678.420,00 | (Bidang Lingkungan Hidup) |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim | | | | | | | | | |
| | | Tujuan 7.2:<br>Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan | 22,29 | 14,008,286,855.00 | Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan | 22,29 | 22.815.731.520,00 | Dinas Lingkungan Hidup<br>(Bidang Lingkungan Hidup) |
| | | Sasaran 7.2.1:<br>Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim | Program Pengelolaan Persampahan | Terlaksananya Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kota Makassar | 100% | 36.951.155.590,00 | Terlaksananya Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kota Makassar | 100% | 35.648.216.650,00 | |
| | | | | Persentase Sampah Yang Dikurangi Melalui 3R | 30% | | Persentase Sampah Yang Dikurangi Melalui 3R | | | |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | Ketaatan Penanggung jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kota Makassar | 23% | 412.453.920 | Ketaatan Penanggung jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kota Makassar | 23% | 639,652,920.00 | |
| | | | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan | 100% | 16.851.482.402,00 | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan | 100% | 17.125.925.400,00 | Seluruh Kecamatan<br>(Unsur Kewilayahan) |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | Publik di Kecamatan | | | Publik di Kecamatan | | | |
| | | | | Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang Telah Ditetapkan dengan Perda | Ada | 4.939.838.744 | Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang Telah Ditetapkan dengan Perda | Ada | | |
| | | | | Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang Telah Ditetapkan | Ada | | Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang Telah Ditetapkan | Ada | | |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | dengan Perkada | | | dengan Perkada | | | |
| | | | | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD | Ada | | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD | Ada | | |
| | | | Program Penanggulangan Bencana | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 100% | 5.425.566.100 | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 100% | 9.098.200.100,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah<br>(Bidang Trantibum Linmas. Sub Bidang Penanggulangan Bencana) |
| | | | | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan | 100% | | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan | 100% | | |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | terhadap bencana pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | | | terhadap bencana pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | | | |
| | | | | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100% | | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100% | | |
| | | | Program Penanganan Bencana | Persentase Korban Bencana Alam/Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan | 100% | 1.845.705.100 | Persentase Korban Bencana Alam/Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan | 100% | 2.427.970.100 | Bidang Sosial |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kota | | | Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kota | | | |
| | | | Program Pencegahan. Penanggulangan. Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran | 100% | 19.618.082.900 | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran | 100% | 25.232.363.731 | Dinas Pemdam Kebakaran<br>(Bidang Trantibum Linmas. Sub Bidang Penanggulangan Bencana) |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran | 15 menit | | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran | 15 menit | | |
| | | | Program Pengelolaan Persampahan | Terlaksananya Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kota Makassar | 100% | 36.951.155.590,00 | Terlaksananya Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kota Makassar | 100% | 35.648.216.650,00 | Dinas Lingkungan Hidup (Bidang Lingkungan Hidup) |
| | | | | Ketaatan Penanggung jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh | 23% | 412.453.920 | | 23% | 639,652,920.00 | |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Tujuan / Sasaran Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Pokok RPKD 2025 | | | Perubahan RKPD 2025 | | | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | Indikator Sasaran & Kinerja Program | Target | | |
| | | | | | Kinerja | Anggaran | | Kinerja | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | Pemerintah Kota Makassar | | | | | | |
| | | | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Rasio Konektivitas Kota | 80% Jaringan lalu lintas | 24.308.097.253,00 | Rasio Konektivitas Kota | 60% Jaringan lalu lintas | 24.207.561.416,00 | Dinas Perhubungan (Bidang Perhubungan) |
| | | | | Pemasangan Rambu-Rambu | 14.28% | | Pemasangan Rambu-Rambu | 14.28% | | |
| | | | | Persentase Layanan Angkutan Darat | 15% | | Persentase Layanan Angkutan Darat | 15 % | | |
| | | | | Rasio Panjang Jalan Per jumlah Kendaraan | 0,13% | | Rasio Panjang Jalan Per jumlah Kendaraan | 0,13% | | |

### 5.3 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025

Perumusan Rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan sebuah produk perencanaan sistematis yang disusun berdasarkan usulan yang bersumber dari tahapan-tahapan perencanaan kemudian dijabarkan ke dalam 6 (enam) urusan pemerintahan wajib pelayan dasar yaitu:

a. Pendidikan;
b. Kesehatan;
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; serta
f. Sosial.

Untuk urusan pemerintahan wajib tidak terkait pelayanan dasar ada 17 (tujuh belas) urusan yaitu:

a. Tenaga kerja;
b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
c. Pangan;
d. Pertanahan;
e. Lingkungan Hidup;
f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
i. Perhubungan;
j. Komunikasi dan Informatika;
k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
l. Penanaman Modal;
m. Kepemudaan dan Olah Raga;
n. Statistik;
o. Persandian;
p. Kebudayaan;
q. Perpustakaan; dan
r. Kearsipan.

Sementara itu, urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar yaitu:

a. Kelautan dan Perikanan;
b. Pariwisata;
c. Pertanian;
d. Perdagangan; dan
e. Perindustrian.

Fungsi penunjang urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar yaitu:

a. Fungsi Perencanaan;
b. Fungsi Keuangan;
c. Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; serta
d. Fungsi Penelitian dan Pengembangan.

Unsur Pendukung

a. Sekretariat Daerah;

b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Unsur Pengawas: Inspektorat Daerah

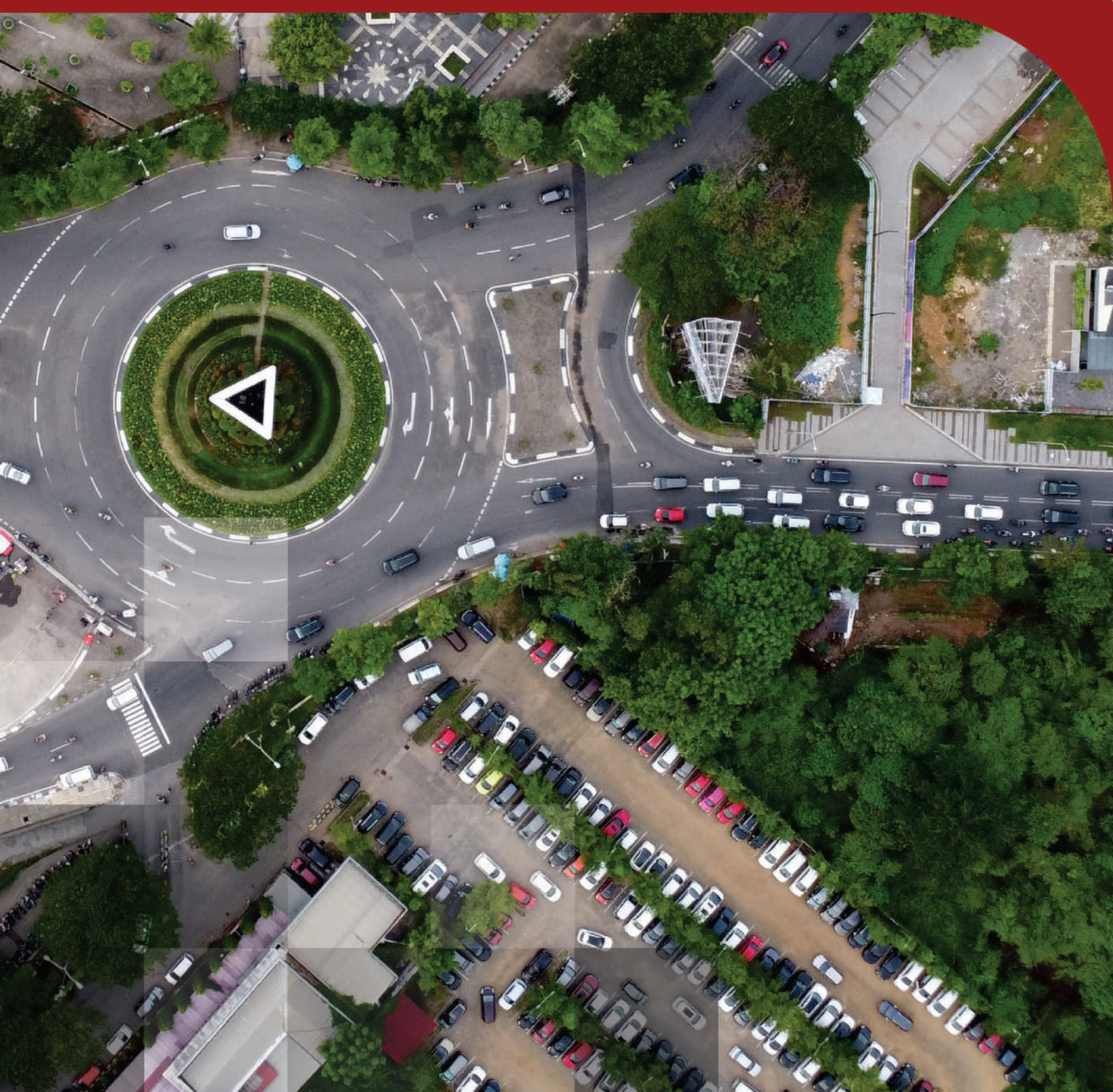
Urusan Kewilayahan : Kecamatan

Urusan Pemerintahan Umum : Kesatuan Bangsa

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub-kegiatan dari setiap urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Makassar lengkap dapat dilihat pada halaman lampiran.

# BAB VI

## KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH



# BAB VI
# KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Makassar dimana Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, maka Pemerintah Kota Makassar harus berupaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berasaskan akuntabilitas dan profesionalitas dengan target-target kinerja yang terukur. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan. Untuk mendapatkan ukuran sejauh mana pencapaian kinerja yang telah direncanakan, keberhasilan maupun kegagalannya dalam periode waktu tertentu perlu ditetapkan suatu indikator kinerja.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi pemerintah kota. Indikator kinerja Kota Makassar terdiri dari Indikator Kinerja Utama (termasuk indikator kinerja makro daerah), Indikator Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD) serta indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

## 6.1. INDIKATOR KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro pembangunan daerah merupakan bagian dari amanah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana kinerja makro merupakan bagian dari kinerja penyelengaraan pemerintahan daerah yang merupakan hasil kerja dari suatu keluaran dan harus dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024, Indikator kinerja makro pemerintah daerah Kota Makassar terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terubuka (TPT), ketimpangan pendapatan (diukur dari gini ratio), Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat kemiskinan, dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses meningkatnya kapasitas produksi suatu negara yang ditandai dengan kenaikan output barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar dalam lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang signifikan, dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal. Pada tahun 2019, sebelum pandemi COVID-19, ekonomi Makassar tumbuh dengan kuat di kisaran 8,79, Namun pada tahun 2020 menjadi periode sulit dengan kontraksi ekonomi sebesar minus 1,27%, akibat pembatasan aktivitas yang menghantam sektor perdagangan dan pariwisata. Memasuki tahun 2021, ekonomi mulai pulih dimana ketiga wilayah menunjukkan pertumbuhan positif. Makassar mencapai 4,47%, Sulsel 4,65%, dan Indonesia 3,69%. Tren pertumbuhan ini terus berlanjut pada tahun 2022 dengan pertumbuhan Makassar mencapai 5,40%, Sulsel 5,49%, dan Indonesia 5,31%, yang

menunjukkan bahwa perekonomian secara bertahap kembali mendekati kondisi sebelum pandemi. Stabilitas pertumbuhan semakin terlihat pada tahun 2023 dan 2024, di mana Makassar mencatat pertumbuhan 5,31% pada Tahun 2023 dan 5,56% pada Tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi Makassar lebih volatil dibandingkan Sulsel dan Indonesia, terlihat dari lonjakan tajam sebelum pandemi dan kontraksi yang lebih dalam saat pandemi.

Pertumbuhan ekonomi Makassar lebih volatil dibandingkan Sulsel dan Indonesia karena ketergantungan pada sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata yang sensitif terhadap daya beli dan kebijakan pembatasan. Sebagai hub logistik Indonesia Timur, gangguan rantai pasok dan fluktuasi harga komoditas turut berkontribusi pada ketidakstabilan ekonomi. Pemulihan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir didorong oleh meningkatnya mobilitas, stimulus pemerintah, serta digitalisasi dan industri kreatif. Sektor perdagangan, jasa, dan investasi infrastruktur kembali tumbuh, menstabilkan pertumbuhan ekonomi di 5.56% pada 2024 menandakan bahwa perekonomian telah kembali ke jalur pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.

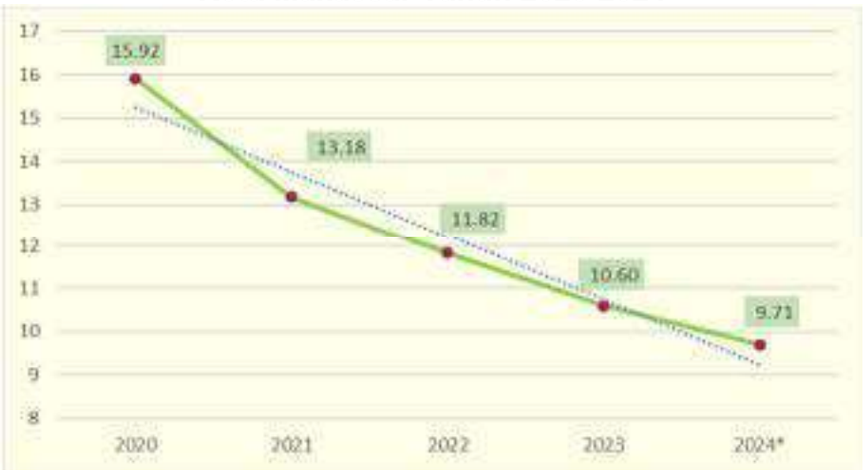
**Grafik VI. 1**
**Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024**




*Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2025*

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator penting yang menggambarkan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja dalam suatu wilayah. Pengangguran terbuka mencakup mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang mempersiapkan usaha, individu yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkannya, serta mereka yang sudah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja. Faktor ekonomi memberikan kontribusi signifikan terhadap TPT, mencakup pertumbuhan ekonomi, tingkat investasi dan penciptaan lapangan kerja, kondisi upah dan produktivitas, serta tingkat inflasi yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Kondisi pasar tenaga kerja juga menjadi indikator krusial, termasuk kesenjangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, ketersediaan informasi pasar kerja, kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri, serta tingkat fleksibilitas pasar kerja.

**Grafik VI. 2**
**Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka**
**Kota Makassar Tahun 2020-2024**




*Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Tahun 2025*

Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Makassar pada lima tahun terakhir di atas menunjukkan tren penurunan yang konsisten dari 15,92% pada 2020 menjadi 9,71% pada 2024. Penurunan ini mencerminkan pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19 yang dimulai pada 2021, seiring dibukanya kembali sektor-sektor ekonomi, pertumbuhan UMKM dan Ekonomi Kreatif, peningkatan investasi di sektor properti, pelabuhan dan pembangunan infrastruktur jalan, serta peran kebijakan pemerintah menjalankan program pelatihan keterampilan, Pendidikan Vokasi, dan Inkubasi Bisnis bagi usahawan muda.

**Grafik VI. 3**
**Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Makassar dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024**




*Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2025*

Perkembangan pengangguran Kota Makassar meski mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir namun, masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 4,19 persen dan tingkat nasional sebesar 4,91 persen. Terindikasi bahwa berbagai sarana dan prasarana yang lebih memadai dan berkualitas adalah menjadi pilihan tenaga kerja yang berasal dari kabupaten maupun kota di

sekitarnya untuk mencari pekerjaan di Kota Makassar. Arus urbanisasi tenaga kerja dari desa ke kota yang pada umumnya tidak selalu didukung oleh tingkat pendidikan yang memadai. Jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak seimbang dengan banyaknya angkatan kerja yang tersedia setiap tahunnya.

Perkembangan nilai Indeks Gini Kota Makassar dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami penurunan. Selama kurun waktu 5 tahun menunjukkan angka di kisaran 0,3 - 0,4 yang tergolong dalam kategori sedang. Tahun 2020 dan 2021 indeks gini Kota Makassar sebesar 0,400 dan tahun 2022 angkanya turun ke 0,395 tahun 2023 menjadi 0,388 dan tahun 2024 menurun hingga menjadi 0,372. Meski turun, nilai indeks gini Kota Makassar masih lebih tinggi dari Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, tingkat pemerataan distribusi pendapatan perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Makassar agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang dapat berakibat pada kesenjangan sosial dan menimbulkan konflik karena tujuan akhir dari Pembangunan ekonomi adalah rakyat sejahtera.

**Grafik VI. 4**
**Perbandingan Indeks Gini Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia Tahun 2020-2024**




*Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2025*

Kota Makassar termasuk daerah yang mencatat angka pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi meski dalam beberapa tahun melambat. Kota Makassar menguasai lebih dari 1/3 perekonomian Sulawesi Selatan yang membuat daerah ini menjadi daya tarik bagi angkatan kerja daerah lain untuk mencari pekerjaan. Meski begitu, implikasi dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu dilihat lebih mendalam karena data menunjukkan alih-alih mensejahterakan semua kelompok masyarakat, ketimpangan pendapatan di Kota Makassar masih sangat tajam. Pemerintah kota dalam jangka panjang perlu fokus pada kualitas pertumbuhan ekonomi, tidak semata-mata mendorong angka pertumbuhan. Masih tingginya ketimpangan pendapatan di Kota Makassar, disebabkan oleh empat faktor, yaitu adanya ketimpangan peluang, pekerjaan yang tidak merata, tingginya konsentrasi kekayaan, dan ketahanan ekonomi rendah. Ketimpangan peluang berkaitan dengan anak-anak miskin seringkali tidak memiliki kesempatan awal yang adil dalam hidup, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk sukses di masa depan. Setidaknya sepertiga ketimpangan disebabkan faktor-faktor di luar kendali individu. Saat anak-anak miskin memasuki pasar tenaga kerja, mereka kemungkinan akan bekerja pada pekerjaan yang berketerampilan rendah dan berupah rendah. Orang

kaya akan menumpuk kekayaan mereka dengan berbagai instrumen, misalnya investasi, sementara kelompok miskin sulit untuk melakukan akumulasi kekayaan. Alih-alih berinvestasi untuk mengakumulasi kekayaan, rumah tangga miskin hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup subsisten mereka dan ditambah dengan rumah tangga yang rentan miskin, yang sangat rawan terhadap guncangan. Empat faktor ini bisa menjadi fokus pemerintah Kota Makassar dalam jangka panjang untuk mempersempit ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat.

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks harapan hidup, indeks Pendidikan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah) dan Standar Hidup Layak (Pengeluaran perkapita). IPM Kota Makassar secara konsisten mengalami peningkatan dalam empat tahun terakhir, dimana tahun 2021 telah mencapai 82,66. IPM Makassar lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan maupun secara nasional yang masih pada angka 70. Program-program di sektor Pendidikan, Kesehatan maupun upaya peningkatan pendapatan masyarakat sangatlah penting untuk meningkatkan IPM suatu daerah. IPM Makassar secara konsisten mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, dimana tahun 2020 mencapai 81,73 dan pada Tahun 2024 meningkat menjadi 85,23 atau mengalami pertumbuhan 3,50 poin dalam lima tahun. Pertumbuhan IPM Kota Makassar juga lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 sebesar 71,93 meningkat menjadi 75,18 pada tahun 2024, artinya pertumbuhan IPM provinsi Sulawesi Selatan hanya mengalami pertumbuhan sebesar 3,25 dalam lima tahun. Demikian pula secara nasional IPM pada tahun 2020 berada pada angka 71,94 menjadi 75,02 di Tahun 2024 atau meningkat hanya 3,08 dalam lima tahun. Program-program di sektor Pendidikan, kesehatan maupun upaya peningkatan pendapatan masyarakat sangatlah penting untuk meningkatkan IPM suatu daerah. Perbandingan Indek Pembangunan Manusia Kota Makassar dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, dapat dilihat pada grafik berikut :

**Grafik VI. 5**
**Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia Tahun 2020-2024**




*Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar, Tahun 2024*

Analisis komparasi dengan tingkat nasional dan Provinsi Sulawesi selatan, menunjukkan bahwa perkembangan IPM Kota Makassar mengalami peningkatan dengan nilai yang lebih tinggi dari IPM tingkat nasional dan Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Makassar relatif lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Sebagai kota metropolitan, maka sudah selayaknya IPM Kota Makassar berada di atas level provinsi

dan nasional. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar secara berkelanjutan dilakukan melalui perbaikan kualitas kehidupan dan penghidupan di segala bidang untuk mengupayakan dapat tetap mempertahankan tingkat daya saing yang semakin dinamis.

Badan Program Pembangunan PBB. UNDP adalah jaringan pembangunan global PBB yang bekerja untuk membantu negara-negara mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). UNDP bekerja di berbagai bidang, termasuk pemberantasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Menurut standar United Nations Development Program (UNDP), terdiri dari 4 kriteria, yakni IPM >80 kategori sangat tinggi, IPM 70-79 kategori tinggi. serta IPM 60-69 kategori sedang. Berdasarkan standar ini maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Makassar berada pada kategori sangat tinggi dan Sulawesi Selatan dan Nasional masih berada pada kategori tinggi.

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks, baik faktor penyebab maupun dampaknya, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait dan mempengaruhi satu dengan lainnya. Kemiskinan menjadi salah satu indikator yang sangat diperhatikan oleh Pemerintah karena menjadi salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat. Persentase penduduk miskin di Kota Makassar dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang beragam, hal ini dipengaruhi oleh berbagai dinamika ekonomi, sosial, dan kebijakan. Pada tahun 2020 pandemi COVID19 memberikan dampak besar terhadap perekonomian nasional dan daerah, termasuk Kota Makassar. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan, terutama di sektor informal. Akibatnya, persentase penduduk miskin meningkat di masa pandemi. Bantuan sosial dari Pemerintah, meskipun masif, tidak sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak.

Badan pusat statistik merilis jumlah penduduk miskin di Kota Makassar tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 74,69 ribu orang dibandingkan tahun 2020 sebesar 69,98 ribu orang dan mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 71,83 ribu jiwa. Namun angka ini mengalami lonjakan pada tahun 2023 sebesar 8,49 ribu orang sehingga jumlah penduduk miskin Kota Makassar menjadi 80,32 ribu orang dan pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan sebesar 79,53 ribu orang.

**Grafik VI. 6**
**Jumlah Penduduk Miskin Kota Makassar Tahun 2020-2024**




*Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar, Tahun 2024*

Selama kurun waktu 2020 hingga tahun 2024 Kemiskinan Kota Makassar selalu berada dibawah rata-rata Angka Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan. Angka kemiskinan Kota Makassar masih relatif stabil, diperkirakan berada di kisaran 4-5%.

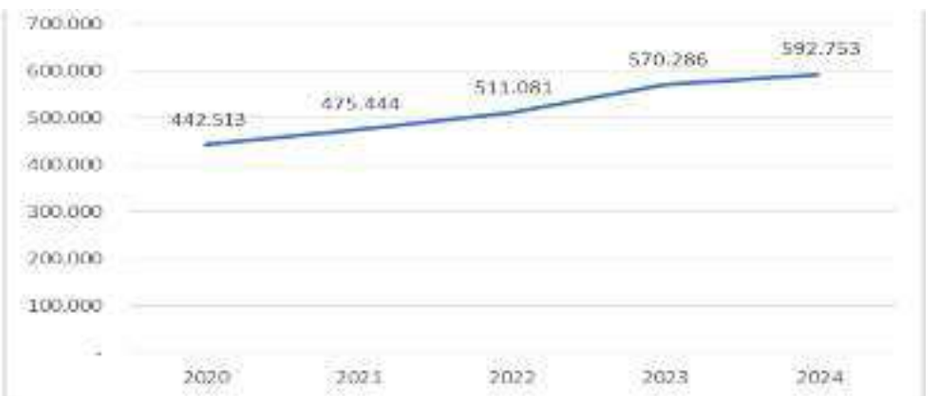
**Grafik VI. 7**
**Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024**




*Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2025*

Tahun 2025 rilis data BPS menunjukkan persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari tahun 2023 yang 5,07 persen turun menjadi 4,97 persen. Angka tersebut masih tinggi dalam 5 tahun terakhir walaupun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, bahkan angka tersebut masih tinggi dibandingkan pada saat pandemi Covid-19 yang hanya 4,54 persen tahun 2020 dan 4,82 persen tahun 2022. Faktor utama penyebab kenaikan tingkat kemiskinan Kota Makassar adalah kenaikan signifikan pada garis kemiskinan. Kenaikan garis kemiskinan tahun 2024 adalah termasuk kenaikan tertinggi dalam lima tahun terakhir. Saat pandemi Covid-19, garis kemiskinan hanya naik 7,44 persen dari Rp. 442.513 per kapita/bulan menjadi Rp. 475.444 per kapita/bulan. Tahun 2023, angkanya naik sampai 11,58 persen hingga menyentuh angka Rp. 570.286 per kapita/bulan dan Tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi Rp. 592.753 per kapita/bulan. Umumnya penyebab utama kenaikan garis kemiskinan adalah inflasi. Namun data menunjukkan inflasi secara umum di Kota Makassar ternyata melambat dari 5,77 persen tahun 2022 menjadi 2,89 persen tahun 2023 (yoy). Meski begitu perlu dilihat lebih detail perubahan garis kemiskinan akibat perubahan inflasi.

**Grafik VI. 8**
**Garis Kemiskinan Kota Makassar Tahun 2020-2024**

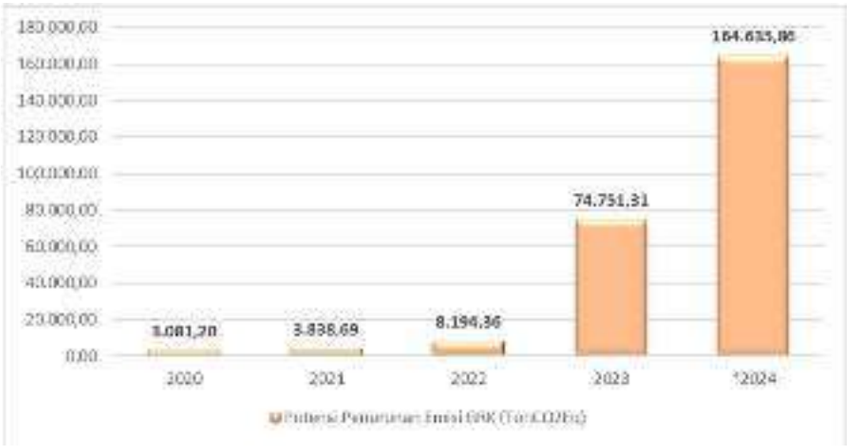



*Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar, Tahun 2025*

Berdasarkan hasil pelaporan Pemerintah Kota Makassar melalui Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Rencana Aksi Nasional Rendah Karbon (AKSARA), potensi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagai gambaran upaya pemerintah

kota dalam menerapkan strategi pembangunan rendah karbon dalam 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan.

**Grafik VI. 9**
**Potensi Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)**
**Kota Makassar Tahun 2020-2024**




*Sumber : Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Rencana Aksi Nasional Rendah Karbon (AKSARA), Tahun 2025*

Pada tahun 2020 potensi penurunan emisi tercatat sebesar 3.081,198 Ton CO2 Eq dan terus meningkat menjadi 8.194,355 Ton CO2 Eq pada tahun 2022. Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan potensi penurunan emisi mencapai 74.751,31 Ton CO2 Eq. Lonjakan signifikan ini mengindikasikan adanya optimalisasi berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Makassar dan berkontribusi aktif berbagai sektor untuk mengurangi emisi GRK. Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan 52 kegiatan aksi pembangunan rendah karbon yang berkontribusi terhadap penurunan emisi GRK seperti pengelolaan limbah, efisiensi energi serta peningkatan transportasi berkelanjutan. Capaian potensi penurunan emisi GRK menempatkan Kota Makassar sebagai salah satu kontributor penurunan emisi GRK di Provinsi Sulawesi Selatan dengan kontribusi sebesar 2,5% dari total capaian provinsi. Meskipun belum masuk dalam kategori daerah dengan potensi penurunan emisi yang tinggi seperti Kabupaten Sidrap, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Selayar, Kota Makassar memiliki pengaruh signifikan karena perannya sebagai ibukota provinsi dan pusat aktivitas perekonomian di Sulawesi Selatan.

Untuk data penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca di Kota Makassar datanya tidak tersedia atau tidak adanya pengukuran intesitas Gas Rumah Kaca yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya sehingga data penurunan emisi GRK untuk tahun 2024 tidak diketahui atau *Not available.*

## 6.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama (IKU) didefinisikan sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi serta pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Selain itu penentuan target IKU untuk Tahun 2025 harus menyesuaikan dengan target-target arah kebijakan pembangunan yang berdasarkan visi

misi kepala daerah terpilih dan Asta Cita Presiden Prabowo, hal ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor No.900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025, sehingga target IKU pembangunan Kota Makassar sendiri merupakan ukuran pencapaian dari pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Makassar Tahun 2025 berdasarkan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih. IKU Kota Makassar ditetapkan berdasarkan RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 dan pada P-RKPD Tahun 2025 tercantum dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel VI.1**
**Penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU)**
**Kota Makassar P-RKPD Tahun 2025**

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Realisasi/ Baseline 2024 | Target | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPD 2025 | P-RKPD 2025 | RPJMD 2025 |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 5,56 | 6,70 | 5,73 | 5,73 |
| 2 | Rasio PDRB Industri Pengolahan | % | 18,17 | - | 19,29 | 19,29 |
| 3 | Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor | % | 20,03 | - | 20,10 | 20,10 |
| 4 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Persen | 9,71 | 10,50 | 9,62 | 9,62 |
| 5 | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita | Juta Rupiah | 165,95 | 143,35 | 175,46 | 175,46 |
| 6 | Indeks Daya Saing Daerah | Indeks | 4,10 | - | 4,17 | 4,17 |
| 7 | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB | % | 0,58 | - | 0,59 | 0,59 |
| 8 | Tingkat Inflasi | % | 1,19 | 1,95 | 1,52 | 1,52 |
| 9 | Indeks Ketahanan Pangan | Indeks | 83,86 | - | 89,28 | 89,28 |
| 10 | Persentase Peningkatan Investasi Daerah | % | -50,26 | - | 8,75 | 8,75 |
| 11 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks | 85,23 | 84,05 | 85,46 | 85,46 |
| 12 | Indeks Pendidikan | Indeks | 81,96 | 0,865 | 82,03 | 82,03 |
| 13 | Usia Harapan Hidup | Tahun | 75,33 | 72,4 | 75,51 | 75,51 |
| 14 | Pengeluaran Perkapita | Juta Rupiah | 18.386 | 18.91 | 19.301 | 19.301 |
| 15 | Indeks Layanan Infrastruktur | Indeks | 74,25 | 77,21 | 78,69 | 78,69 |
| 16 | Indeks Layanan Infrastruktur Kebinamargaan | Indeks | 35,40 | - | 37,17 | 37,17 |
| 17 | Indeks Layanan Infrastruktur Keciptakaryaan | Indeks | 49,39 | - | 51,86 | 51,86 |
| 18 | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang | % | 100 | - | 100 | 100 |
| 19 | Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) | % | 10 | - | 10 | 10 |
| 20 | Indeks Inovasi Daerah | Indeks | 76,56 | - | 77,59 | 77,59 |
| 21 | Indeks Kapabiltas Inovasi | Indeks | 4,46 | - | 4,51 | 4,51 |
| 22 | Persentase Peningkatan Inovasi Pembangunan Daerah | % | 101 Inovasi | - | 2 | 2 |
| 23 | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum | % | 2,18 | - | 2,23 | 2,23 |

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Realisasi/ Baseline 2024 | Target | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPD 2025 | P-RKPD 2025 | RPJMD 2025 |
| 24 | Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara | Orang | 5.684.295 | - | 6.247.812 | 6.247.812 |
| 25 | Jumlah Daya Tarik Pariwisata yang difasilitasi | Lokasi | 1 | - | 1 | 1 |
| 26 | Persentase Peningkatan Karya Budaya Terdaftar dalam Warisan Budaya Tak Benda | % | N.a | - | 33,3 | 33,3 |
| 27 | Persentase Cagar Budaya yang Dilindungi dan Dimanfaatkan | % | N.a | - | 12 | 12 |
| 28 | Jumlah Industri Ekonomi Kreatif di Kota Makassar | Usaha | 4.220 | - | 4.350 | 4.350 |
| 29 | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | 78,64 | 66,03 | 79,97 | 79,97 |
| 30 | Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah | Predikat | B | - | B | B |
| 31 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Indeks | 4,01 | - | 4,02 | 4,02 |
| 32 | Nilai *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK | Nilai | 86,97 | - | 87,48 | 87,48 |
| 33 | Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Indeks | N.a | - | 75 | 75 |
| 34 | Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani | % | 54,03 | - | 55,03 | 55,03 |
| 35 | Indeks Pembangunan Keluarga | Indeks | 63,13 | - | 63,14 | 63,14 |
| 36 | Indeks Ketimpangan Gender | Indeks | 8,183 | - | 0,179 | 0,179 |
| 37 | Indeks Perlindungan Anak | Indeks | 67,04 | - | 69,44 | 69,44 |
| 38 | Indeks Pembangunan Pemuda | Indeks | 57,67 | - | 59,00 | 59,00 |
| 39 | Peningkatan Prestasi Olahraga | % | 5,82 | - | 6,20 | 6,20 |
| 40 | Tingkat Kemiskinan | Persen | 4,97 | 4,10 | 3,62-3,03 | 3,62-3,03 |
| 41 | Gini Rasio | Angka | 0,372 | 0,388 | 0,366 | 0,366 |
| 42 | Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal | % | 41,1 | - | 41,81 | 41,81 |
| 43 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Indeks | 61,41 | 59,47 | 66,17 | 66,17 |
| 44 | Indeks Kualitas Air | Indeks | 58,70 | - | 73,95 | 73,95 |
| 45 | Indeks Kualitas Udara | Indeks | 81,51 | Ada | 75,22 | 75,22 |
| 46 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | Indeks | 28,92 | 22,19 | 36,06 | 36,06 |
| 47 | Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah | % | 3,18 | - | 35 | 35 |
| 48 | Indeks Resiko Bencana | Indeks | 113,71 | - | 110 | 110 |
| 49 | Indeks Ketahanan Daerah | Indeks | 0,46 | - | 0,47 | 0,47 |
| 50 | Penurunan Intesitas Emisi GRK | % | N.a | - | 32,464 | 32,464 |

*Sumber: Bappeda Kota Makassar Tahun 2025. data diolah*

## 6.3. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Penentuan target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui indikator kinerja daerah (IKD). IKD membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yaitu Pemerintah Kota Makassar. Target IKD Kota Makassar untuk Tahun 2025 tercantum pada tabel berikut:

**Tabel VI.2**
**Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah**
**Kota Makassar P-RKPD Tahun 2025**

| No | Indikator Kinerja Daerah / Aspek | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Target | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPD 2025 | P-RKPD 2025 | RPJMD 2025 |
| **I** | **ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI** | | | | | |
| **1.1** | **Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan** | | | | | |
| 1 | Konsumsi Listrik Per-kapita | KwH | 1.565 | - | 1.627 | 1.627 |
| 2 | Prevalansi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan | % | 3,97 | - | 3,96 | 3,96 |
| 3 | Indeks Ketahanan Pangan | Indeks | 83,86 | - | 89,28 | 89,28 |
| 4 | Skor Pola Pangan Harapan | Nilai | 89,73 | 88 | 89,74 | 89,74 |
| 5 | Kapasitas Air Baku | $M^3$/detik | 3.36 | - | 4.04 | 4.04 |
| 6 | Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan | % | 9.15 | - | 30 | 30 |
| **1.2** | **Lingkungan Hidup Berkualitas** | | | | | |
| 7 | Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Kimia | % | 8,98 | - | 13,66 | 13,66 |
| 8 | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | Ton | 1519,8 | - | 1559 | 1559 |
| 9 | Angka Konsumsi Ikan | Kg/Kapita | 48,55 | - | 48,74 | 48,74 |
| 10 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | 61,41 | 59,47 | 66,17 | 66,17 |
| 11 | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman | % | 5,7 | - | 43 | 43 |
| 12 | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah | % | 1,9 | - | 6 | 6 |
| 13 | Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Pengumpulan Sampah | % | 3,18 | - | 35 | 35 |
| 14 | Indeks Resiko Bencana | Indeks | 113,71 | - | 110 | 110 |
| 15 | Penurunan Emisi GRK Tahunan | % | N.a | - | 1,17 | 1,17 |
| 16 | Penurunan Emisi GRK Kumulatif | % | N.a | - | 0,23 | 0,23 |
| 17 | Penurunan Intensitas Emisi GRK | % | N.a | - | 32,464 | 32,464 |
| **II** | **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | | | |
| **2.1** | **Kesejahteraan Ekonomi** | | | | | |
| 18 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 5,56 | 6,70 | 5,73 | 5,73 |
| 19 | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita | Juta Rupiah | 165,95 | 143,35 | 175,46 | 175,46 |
| 20 | PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha | Triliun | 243,06 | - | 265,79 | 265,79 |
| 21 | Pengeluaran Perkapita | Juta Rupiah | 18.386 | 18.91 | 19.301 | 19.301 |
| **2.2** | **Kesehatan Untuk Semua** | | | | | |
| 22 | Usia Harapan Hidup | Tahun | 75,33 | 72,4 | 75,51 | 75,51 |
| 23 | Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) | Angka | 71,53 | 21,87 | 69,09 | 69,09 |
| 24 | Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan | % | 100 | - | 100 | 100 |
| 25 | Prevalensi Stunting pada Balita | % | 21,6 | - | 20,88 | 20,88 |
| 26 | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis | % | 100 | - | 100 | 100 |
| 27 | Angka keberhasilan Tuberkulosis | % | 82 | - | 82,5 | 82,5 |
| 28 | Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional | % | 99,10 | - | 100 | 100 |
| **2.3** | **Pendidikan Berkualitas yang Merata** | | | | | |
| 29 | Literasi | % | SD = 62,86 SMP = 71,66 | - | SD = 65,86 SMP = 72,66 | SD = 65,86 SMP = 72,66 |

| No | Indikator Kinerja Daerah / Aspek | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Target | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPD 2025 | P-RKPD 2025 | RPJMD 2025 |
| 30 | Numerasi | % | SD = 54,38 SMP = 62,85 | - | SD = 55,38 SMP = 63,85 | SD = 55,38 SMP = 63,85 |
| 31 | Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 Tahun | Tahun | 11,57 | 13,03 | 11,58 | 11,58 |
| 32 | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 15,62 | - | 15,63 | 15,63 |
| 33 | Proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi | % | 21,91 | - | 22,91 | 22,91 |
| 34 | Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan | % | 15,03 | - | 29,63 | 29,63 |
| 35 | Angka Putus Sekolah | % | 1,54 | - | 1,29 | 1,29 |
| **2.4** | **Perlindungan Sosial yang Adaptif** | | | | | |
| 36 | Tingkat Kemiskinan | Persen | 4,97 | 4,10 | 3,62-3,03 | 3,62-3,03 |
| 37 | Indeks Gini | Indeks | 0,372 | 0,388 | 0,366 | 0,366 |
| 38 | Persentase penyandang Disabilitas bekerja di sektor formal | % | 41,1 | - | 41,81 | 41,81 |
| 39 | Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | % | 56,19 | - | 61,81 | 61,81 |
| **2.5** | **Beragama Maslahat dan Berkebudayaan maju** | | | | | |
| 40 | Indeks Kota Toleran | Indeks | 4,9 | - | 5,0 | 5,0 |
| 41 | Persentase Benda Bangunan Struktur dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi | % | 23 | - | 14,51 | 14,51 |
| 42 | Persentase kegiatan keagamaan yang mendapat dukungan fasilitasi | % | 0,50 | - | 1,15 | 1,15 |
| **2.6** | **Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif** | | | | | |
| 43 | Indeks Pembangunan Keluarga | Indeks | 63,13 | - | 63,14 | 63,14 |
| 44 | Indeks Perlindungan Anak | Indeks | 67,04 | - | 69,44 | 69,44 |
| 45 | Indeks Pembangunan Gender | Indeks | 94,92 | - | 95,18 | 95,18 |
| 46 | Indeks Pemberdayaan Gender | Indeks | 78,64 | - | 79,14 | 79,14 |
| 47 | Indeks Ketimpangan Gender | Indeks | 8,183 | - | 0,179 | 0,179 |
| 48 | Indeks Pembangunan Pemuda | Indeks | 57,67 | - | 59,00 | 59,00 |
| **III** | **ASPEK DAYA SAING DAERAH** | | | | | |
| **3.1** | **Daya Saing Sumber Daya Manusia** | | | | | |
| 49 | Indeks Pembangunan Manusia | Indeks | 85,23 | 84,05 | 85,46 | 85,46 |
| 50 | Angka Ketergantungan | % | 42,52 | 38,31 | 42,49 | 42,49 |
| **3.2** | **Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi** | | | | | |
| 51 | Rasio PDRB Industri Pengolahan | % | 18,17 | - | 19,29 | 19,29 |
| 52 | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum | % | 2,18 | - | 2,23 | 2,23 |
| 53 | Jumlah Tamu Wisatawan Domestik | Orang | 5.524.000 | - | 5.531.025 | 5.531.025 |
| 54 | Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara | Orang | 95.596 | - | 95.632 | 95.632 |
| 56 | Jumlah Industri Ekonomi Kreatif di Kota Makassar | Usaha | 4.220 | - | 4.350 | 4.350 |
| 57 | Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kota Makassar | Industri | 24.815 | - | 24.915 | 24.915 |
| 58 | Persentase Koperasi Sehat | % | 26,96 | - | 27,24 | 27,24 |
| 59 | Return on Assets (ROA) BUMD | Nilai | 1,41 | - | 1,60 | 1,60 |
| 60 | Produktivitas Padi | Ton/Ha | 6,48 | - | 6,77 | 6,77 |
| 61 | Produktivitas Perikanan Tangkap | Ton | 1,2 | - | 1,25 | 1,25 |
| 62 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | % | 9,71 | 10,50 | 9,62 | 9,62 |
| 63 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | % | 62,04 | 61,81 | 62,27 | 62,27 |
| 64 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | % | 47,06 | - | 47,23 | 47,23 |
| 65 | Indeks Kapabiltas Inovasi | Indeks | 4,46 | - | 4,51 | 4,51 |
| **3.3** | **Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru** | | | | | |

| No | Indikator Kinerja Daerah / Aspek | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Target | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPD 2025 | P-RKPD 2025 | RPJMD 2025 |
| 66 | Indeks Ekonomi Hijau | Indeks | 55,1 | - | 51,4 | 51,4 |
| 67 | Indeks Ekonomi Biru Indonesia | Indeks | 78 | - | 101,4 | 101,4 |
| **3.4** | **Transformasi Digital** | | | | | |
| 68 | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | % | 49 | - | 49,25 | 49,25 |
| **3.5** | **Integrasi Ekonomi Domestik dan Global** | | | | | |
| 69 | Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok | % | 90 | - | 90 | 90 |
| 70 | Pembentukan Modal Tetap Bruto | % PDRB | 44,97 | - | 45,11 | 45,11 |
| 71 | Net Ekspor Barang dan Jasa | US $ | 34.700.607,67 | - | 47.488.263,30 | 47.488.263,30 |
| **3.6** | **Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi** | | | | | |
| 72 | Proporsi Kontribusi PDRB Kota Makassar Terhadap PDB Nasional | % | 1,10 | - | 1,12 | 1,12 |
| 73 | Proporsi Kontribusi PDRB Kota Makassar Terhadap Provinsi Sulawesi Selatan | % | 34,91 | - | 35,04 | 35,04 |
| 74 | Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak Terjangkau dan Berkelanjutan | % | 74,25 | - | 78,69 | 78,69 |
| 75 | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur | Indeks | 74,25 | 77,21 | 78,69 | 78,69 |
| **3.7** | **Stabilitas Ekonomi Makro Daerah** | | | | | |
| 76 | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB | % | 0,58 | - | 0,59 | 0,59 |
| 77 | Tingkat Inflasi Gabungan | % | 1,19 | - | 1,52 | 1,52 |
| 78 | Pertumbuhan Investasi Daerah | % | -50,26 | - | 8,75 | 8,75 |
| 79 | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | Indeks | B | - | B | B |
| **IV** | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | | | |
| **4.1** | **Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif dan Inovatif** | | | | | |
| 80 | Indeks Reformasi Hukum | Indeks | 97.72 | - | 98.02 | 98.02 |
| 81 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Indeks | 4.01 | - | 4.02 | 4.02 |
| 82 | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | 78.64 | 66,03 | 79.97 | 79.97 |
| 83 | Indeks Pelayanan Publik | Indeks | 3.21 | - | 4.28 | 4.28 |
| 84 | Indeks Survey Penilaian Integritas | Indeks | 62.33 | - | 75.55 | 75.55 |
| 85 | Nilai *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK | Nilai | 86.97 | - | 87.48 | 87.48 |
| 86 | Indeks Maturitas SPIP | Indeks | 3.10 | - | 3.42 | 3.42 |
| **4.2** | **Ketaatan Hukum. Ketertiban dan Keamanan Tangguh Serta Demokrasi Substansial** | | | | | |
| 87 | Persentase Gangguan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan | % | 100 | - | 100 | 100 |
| 88 | Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah | % | 100 | 91,89 | 100 | 100 |
| 89 | Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani | % | 54.03 | - | 55,03 | 55,03 |
| 90 | Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD | % | 16.00 | - | 16,00 | 16,00 |
| 91 | Proporsi Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD (Perda) | Perda | 9 | - | 9 | 9 |
| 92 | Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik | % | 31,1 | - | 31,6 | 31,6 |
| **4.3** | **Daya Saing Daerah Tinggi** | | | | | |
| 93 | Jumlah Kerja Sama Dengan Pemerintah Daerah Lainnya (Sister City) (PKS) | PKS | 1 | - | 1 | 1 |
| 94 | Indeks Daya Saing Daerah | Indeks | 4,10 | - | 4,17 | 4,17 |
| 95 | Indeks Inovasi Daerah | Indeks | 76,56 | - | 77,59 | 77,59 |

*Sumber: Bappeda Kota Makassar Tahun 2025. data diolah*

## 6.4. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk mengetahui capaian indikator kinerja menurut bidang

urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pada dokumen P-RKPD Tahun 2025 Indikator Kinerja Kunci disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

**Tabel VI.3**
**Penetapan Target Indikator Kinerja Kunci**
**Kota Makassar P-RKPD Tahun 2025**

| No | Indikator Kinerja Kunci / Urusan | Satuan | Realisasi/ Baseline 2024 | Target | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPD 2025 | P-RKPD 2025 | RPJMD 2025 |
| **1** | **Pendidikan** | | | | | |
| 1.1 | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | % | 61,10 | - | 100 | 100 |
| 1.2 | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | % | 89,93 | - | 100 | 100 |
| 1.3 | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama | % | 94,93 | - | 100 | 100 |
| 1.4 | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | % | 44,50 | - | 100 | 100 |
| **2** | **Kesehatan** | | | | | |
| 2.1 | Rasio daya tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk | Rasio | 1 : 207 | - | 1 : 207 | 1 : 207 |
| 2.2 | Persentase RS Rujukan Kota Makassar yang terakreditasi | % | 100 | - | 100 | 100 |
| 2.3 | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | % | 100 | - | 100 | 100 |
| 2.4 | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | % | 100 | - | 100 | 100 |
| 2.5 | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | % | 100 | - | 100 | 100 |
| 2.6 | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | % | 100 | - | 100 | 100 |
| 2.7 | Persentase anak usia pendidikan dasar yang Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 82,88 | - | 100 | 100 |
| 2.8 | Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | % | 93,61 | - | 100 | 100 |
| 2.9 | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | % | 83,56 | - | 100 | 100 |
| 2.10 | Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 100 | - | 100 | 100 |
| 2.11 | Persentase penderita DM yang | % | 100 | - | 100 | 100 |

| No | Indikator Kinerja Kunci / Urusan | Satuan | Realisasi/ Baseline 2024 | Target | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPD 2025 | P-RKPD 2025 | RPJMD 2025 |
| | mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | | | | |
| 2.12 | Persentase ODGJ berat Yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | % | 100 | - | 100 | 100 |
| 2.13 | Persentase orang terduga TBC Mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | % | 100 | - | 100 | 100 |
| 2.14 | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | % | 100 | - | 100 | 100 |
| **3** | **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | | | | |
| 3.1 | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota Makassar | % | 89,15 | - | 52,47 | 52,47 |
| 3.2 | Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota Makassar | % | 54,45 | - | 54,45 | 54,45 |
| 3.3 | Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kota Makassar | % | 82,96 | - | 83,66 | 83,66 |
| 3.4 | Persentase Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | % | 89,63 | - | 91,48 | 91,48 |
| 3.5 | Rasio kepatuhan IMB Kota Makassar | % | 100 | - | 100 | 100 |
| 3.6 | Tingkat Kemantapan Jalan kota Makassar | % | 98,00 | - | 98,25 | 98,25 |
| 3.7 | Rasio Tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat Kompetensi | % | 100 | - | 100 | 100 |
| 3.8 | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | % | 100 | - | 100 | 100 |
| **4** | **Perumahan dan Kawasan Permukiman** | | | | | |
| 4.1 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kota Makassar | % | 100 | - | 100 | 100 |
| 4.2 | Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kota Makassar | % | 100 | - | 100 | 100 |
| 4.3 | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kota Makassar yang ditangani | % | 10 | - | 10 | 10 |
| 4.4 | Berkurangnya Jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) | Unit | 0% | - | 150 unit | 150 unit |
| 4.5 | Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, | Jumlah | 20 | - | 20 | 20 |

| No | Indikator Kinerja Kunci / Urusan | Satuan | Realisasi/ Baseline 2024 | Target | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPD 2025 | P-RKPD 2025 | RPJMD 2025 |
| | Sarana dan Utilitas Umum) | | | | | |
| **5** | **Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat** | | | | | |
| 5.1 | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | % | 100 | - | 100 | 100 |
| 5.2 | Persentase Perda dan Perkada Yang ditegakkan | % | 100 | - | 100 | 100 |
| 5.3 | Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan informasi rawan bencana | % | 100 | - | 100 | 100 |
| 5.4 | Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | % | 100 | - | 100 | 100 |
| 5.5 | Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | % | 100 | - | 100 | 100 |
| 5.6 | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | % | 100 | - | 100 | 100 |
| 5.7 | Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran (menit) | Menit | 15 Menit | - | 15 Menit | 15 Menit |
| **6** | **Sosial** | | | | | |
| 6.1 | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar yang terpenuhi dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | % | 100 | - | 100 | 100 |
| 6.2 | Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota | % | 100 | - | 100 | 100 |
| **7** | **Tenaga Kerja** | | | | | |
| 7.1 | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja | % | 96,67 | - | 97,50 | 97,50 |
| 7.2 | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | % | 1,40 | - | 1,45 | 1,45 |
| 7.3 | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | % | 23,52 | - | 24,05 | 24,05 |
| 7.4 | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | % | 40,26 | - | 40,50 | 40,50 |
| 7.5 | Persentase Tenaga kerja Yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota Makassar | % | 60,05 | - | 60,50 | 60,50 |
| **8** | **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** | | | | | |
| 8.1 | Persentase ARG pada belanja langsung APBD | % | 71 | - | 75 | 75 |
| 8.2 | Persentase anak korban | % | 100 | - | 100 | 100 |

| No | Indikator Kinerja Kunci / Urusan | Satuan | Realisasi/ Baseline 2024 | Target | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPD 2025 | P-RKPD 2025 | RPJMD 2025 |
| | kekerasan Yang ditangani instansi terkait kabupaten | | | | | |
| 8.3 | Rasio Kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100,000 Penduduk perempuan) | % | 1,05 | - | 1,04 | 1,04 |
| **9** | **Pangan** | | | | | |
| 9.1 | Persentase ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) | % | 90 | - | 90 | 90 |
| **10** | **Pertanahan** | | | | | |
| 10.1 | Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum | % | 90 | - | 90 | 90 |
| **11** | **Lingkungan Hidup** | | | | | |
| 11.1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Makassar | Indeks | 61,41 | 59,47 | 66,17 | 66,17 |
| 11.2 | Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kota Makassar | % | 2,01 | - | 3 | 3 |
| 11.3 | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Makassar | % | 24,59 | - | 69,20 | 69,20 |
| **12** | **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | | | | | |
| 12.1 | Perekaman KTP Elektronik | % | 96,05 | - | 96,2 | 96,2 |
| 12.2 | Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA kepemilikan akta kelahiran | % | 72 | - | 74,3 | 74,3 |
| 12.3 | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama | % | 20 | - | 20 | 20 |
| **13** | **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | | | | | |
| 13.1 | TFR (Angka Kelahiran Total) | Angka | 2 ,01 | 2,07 | 2,010 | 2,010 |
| 13.2 | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern *(Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)* | % | 59,80 | - | 59,80 | 59,80 |
| 13.3 | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi *(unmet need)* | % | 12 | - | 12 | 12 |
| **14** | **Perhubungan** | | | | | |
| 14.1 | Rasio Konektivitas Kota Makassar | Rasio | 63,2 | - | 64 | 64 |
| 14.2 | Kinerja lalu lintas Kota Makassar | Kinerja | 0,48 | - | 0,47 | 0,47 |
| **15** | **Komunikasi dan Informatika** | | | | | |
| 15.1 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | % | 100 | - | 100 | 100 |
| 15.2 | Persentase Layanan Publik Yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | % | 49 | - | 49,25 | 49,25 |
| 15.3 | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah | % | 82,50 | - | 85,00 | 85,00 |

| No | Indikator Kinerja Kunci / Urusan | Satuan | Realisasi/ Baseline 2024 | Target | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPD 2025 | P-RKPD 2025 | RPJMD 2025 |
| | daerah Kota Makassar | | | | | |
| **16** | **Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah** | | | | | |
| 16.1 | Meningkatnya Koperasi Yang berkualitas | % | 10,02 | - | 10,97 | 10,97 |
| 16.2 | Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha | % | 3,10 | - | 3,37 | 3,37 |
| **17** | **Penanaman Modal** | | | | | |
| 17.1 | Persentase peningkatan investasi di Kota Makassar | % | -50,26 | - | 8,75 | 8,75 |
| **18** | **Kepemudaan dan Olahraga** | | | | | |
| 18.1 | Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | % | 17,07 | - | 17,44 | 17,44 |
| 18.2 | Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | % | 11,69 | - | 12,69 | 12,69 |
| 18.3 | Peningkatan prestasi olahraga | % | 5,82 | - | 6,20 | 6,20 |
| **19** | **Statistik** | | | | | |
| 19.1 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | % | 76 | - | 100 | 100 |
| 19.2 | Persentase OPD yang menggunakan Data statistik Dalam melakukan Evaluasi pembangunan daerah | % | 76 | - | 100 | 100 |
| **20** | **Persandian** | | | | | |
| 20.1 | Tingkat Keamanan informasi pemerintah | % | 41 | - | 46 | 46 |
| **21** | **Kebudayaan** | | | | | |
| 21.1 | Terlestarikannya Cagar Budaya (Unit) | Unit | 23 | - | 20 | 20 |
| **22** | **Perpustakaan** | | | | | |
| 22.1 | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | % | 84,52 | - | 84,60 | 84,60 |
| 22.2 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Indeks | 78,99 | - | 80 | 80 |
| **23** | **Kearsipan** | | | | | |
| 23.1 | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional | % | 99,24 | - | 99,24 | 99,24 |
| 23.2 | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | % | 100 | - | 100 | 100 |
| **24** | **Kelautan dan Perikanan** | | | | | |
| 24.1 | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kota Makassar | Ton | 22123,48 | - | 22960 | 22960 |
| **25** | **Pariwisata** | | | | | |
| 25.1 | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota | % | 25,13 | - | 5 | 5 |
| 25.2 | Tingkat hunian Akomodasi (Hari) | Hari | 1,6 | - | 1,62 | 1,62 |

| No | Indikator Kinerja Kunci / Urusan | Satuan | Realisasi/ Baseline 2024 | Target | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPD 2025 | P-RKPD 2025 | RPJMD 2025 |
| 25.3 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku | % | 2,14 | - | 2,15 | 2,15 |
| 25.4 | Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD | % | 25,53 | 27,07 | 25,55 | 25,55 |
| **26** | **Pertanian** | | | | | |
| 26.1 | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | Ton/Ha | 12,14 | - | 12,47 | 12,47 |
| 26.2 | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | % | 35,40 | - | 65 | 65 |
| **29** | **Perdagangan** | | | | | |
| 29.1 | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan | % | 75 | - | 80 | 80 |
| 29.2 | Persentase kinerja realisasi pupuk | % | N.a | - | 100 | 100 |
| 29.3 | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | % | 80 | - | 90 | 90 |
| **30** | **Perindustrian** | | | | | |
| 30.1 | Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kota Makassar (Industri) | Industri | 24,815 | - | 24,915 | 24,915 |
| 30.2 | Persentase pencapaian Sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP | % | N.a | - | 40 | 40 |
| 30.3 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | % | 2,42 | - | 1,05 | 1,05 |
| 30.4 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | % | 100 | - | 100 | 100 |
| 30.5 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kota Makassar | % | 100 | - | 100 | 100 |
| 30.6 | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini | % | 100 | - | 100 | 100 |
| **32** | **Perencanaan dan Keuangan** | | | | | |
| 32.1 | Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan | % | 11,70 | - | 9,51 | 9,51 |
| 32.2 | Rasio PAD | % | 38,17 | - | 42,30 | 42,30 |
| 32.3 | Opini Laporan Keuangan | Predikat | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 32.4 | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Nilai | 3,10 | - | 3,42 | 3,42 |
| 32.5 | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | | 3,04 | - | 3,084 | 3,084 |
| 32.6 | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi | % | 76,73 | - | 69,88 | 69,88 |

| No | Indikator Kinerja Kunci / Urusan | Satuan | Realisasi/ Baseline 2024 | Target | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPD 2025 | P-RKPD 2025 | RPJMD 2025 |
| | transfer expenditures) | | | | | |
| **33** | **Pengadaan** | | | | | |
| 33.1 | Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama | % | N.a | - | 2 Proyek | 2 Proyek |
| 33.2 | Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif | % | 53,51 | - | 55,24 | 55,24 |
| 33.3 | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan | % | 59,01 | - | 61,91 | 61,91 |
| **34** | **Kepegawaian** | | | | | |
| 34.1 | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | % | 64,69 | - | 80 | 80 |
| 34.2 | Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | % | 8,24 | - | 73,5 | 73,5 |
| 34.3 | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | % | 8,24 | - | 26,5 | 26,5 |
| **35** | **Manajemen Keuangan** | | | | | |
| 35.1 | Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD | % | 26 | - | 23 | 23 |
| 35.2 | Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Manajemen Aset | % | 26,01 | - | 25,00 | 25,00 |
| 35.3 | Manajemen Aset | Ya/tidak | Ya | - | Ya | Ya |
| 35.4 | Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya | % | 6,53 | - | 4,75 | 4,75 |
| **36** | **Transparansi dan Partisipasi Publik** | | | | | |
| 36.1 | Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan | % | 100 | - | 100 | 100 |
| 36.2 | Akses publik terhadap informasi Keuangan daerah | % | 100 | - | 100 | 100 |

*Sumber: Bappeda Kota Makassar Tahun 2025. data diolah*

## 6.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Evaluasi terhadap pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) memberikan gambaran pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Makassar menerapkan sebanyak 29 jenis pelayanan dasar yang terbagi dalam 6 bidang urusan dan dilaksanakan oleh 8 Perangkat Daerah yang terkait Pelayanan Dasar. Pencapaian penerapan SPM Kota Makassar hingga **triwulan I Tahun 2025** disajikan pada tabel berikut:

# Tabel VI.4
# Evaluasi Pencapaian SPM
# Kota Makassar Triwulan I Tahun 2025

| No | Bidang Urusan/Jenis Pelayanan Dasar | Target P-RKPD 2025 | Indikator Kinerja dan Realisasi | | | | Capaian Triwulan I Tahun 2025 | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penerima Layanan (80%) | | Mutu Minimal Layanan (20%) | | | |
| | | | Indikator | Realisasi | Indikator | Realisasi | | |
| **I** | **Bidang Urusan Pendidikan** | | | | | | | |
| 1 | Pendidikan Dasar | 100% | Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | 73,29% | Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia | 20% | **93,29 %** | Dinas Pendidikan |
| | | Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya | Rata-Rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional | | | | | |
| 2 | Pendidikan Kesetaraan | 100% | Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 73,50% | Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia | 20% | **93,50%** | Dinas Pendidikan |
| | | Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya | Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional | | | | | |
| 3 | Pendidikan Anak Usia Dini | 100% | Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD | 48,88% | Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia | 10,77% | **68,88%** | Dinas Pendidikan |
| **II** | **Bidang Urusan Kesehatan** | | | | | | | |
| 1 | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 100% | Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 18,73% | Jumlah barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan tatacara pemenuhan | 11,89% | **30,62%** | Dinas Kesehatan |
| 2 | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 100% | Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 18,47% | Jumlah barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan tatacara pemenuhan | 14,87% | **33,34%** | Dinas Kesehatan |
| 3 | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 100% | Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 24,19% | Jumlah barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan tatacara pemenuhan | 13,50% | **32,86%** | Dinas Kesehatan |
| 4 | Pelayanan kesehatan balita | 100% | Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 15,36% | Jumlah barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan tatacara pemenuhan | 10,24% | **25,60%** | Dinas Kesehatan |
| 5 | Pelayanan kesehatan | 100% | Jumlah anak pada usia Pendidikan | 17,85% | Jumlah barang dan/atau jasa, | 13,09% | **30,95%** | Dinas Kesehatan |

| No | Bidang Urusan/Jenis Pelayanan Dasar | Target P-RKPD 2025 | Indikator Kinerja dan Realisasi | | | | Capaian Triwulan I Tahun 2025 | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penerima Layanan (80%) | | Mutu Minimal Layanan (20%) | | | |
| | | | Indikator | Realisasi | Indikator | Realisasi | | |
| | pada usia pendidikan dasar | | Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan | | sumberdaya manusia dan tatacara pemenuhan | | | |
| 6 | Pelayanan kesehatan pada usia produktif | 100% | Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 16,36% | Jumlah barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan tatacara pemenuhan | 16,68% | **33,04%** | Dinas Kesehatan |
| 7 | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut | 100% | Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 18,85% | Jumlah barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan tatacara pemenuhan | 16,47% | **35,33%** | Dinas Kesehatan |
| 8 | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | 100% | Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 16,63% | Jumlah barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan tatacara pemenuhan | 17,36% | **33,99%** | Dinas Kesehatan |
| 9 | Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus | 100% | Jumlah Warga Negara penderita *diabetes mellitus* usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 29,76% | Jumlah barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan tatacara pemenuhan | 16,86% | **46,62%** | Dinas Kesehatan |
| 10 | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat | 100% | Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 4,64% | Jumlah barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan tatacara pemenuhan | 13,72% | **18,36 %** | Dinas Kesehatan |
| 11 | Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis | 100% | Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 23,24% | Jumlah barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan tatacara pemenuhan | 14,32% | **37,56%** | Dinas Kesehatan |
| 12 | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan | 100% | Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 19,12% | Jumlah barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan tatacara pemenuhan | 15,43% | **34,56%** | Dinas Kesehatan |
| **III** | **Bidang Urusan Pekerjaan Umum** | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari | 100% | Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari | 0% | Jumlah barang dan jasa | 0% | **0%** | Dinas Pekerjaan Umum |
| 2 | Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah | 100% | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan | 4,01% | Jumlah barang dan jasa | 1,05% | **5,06%** | Dinas Pekerjaan Umum |

| No | Bidang Urusan/Jenis Pelayanan Dasar | Target P-RKPD 2025 | Indikator Kinerja dan Realisasi | | | | Capaian Triwulan I Tahun 2025 | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penerima Layanan (80%) | | Mutu Minimal Layanan (20%) | | | |
| | | | Indikator | Realisasi | Indikator | Realisasi | | |
| | Domestik | | pengolahan air limbah domestik | | | | | |
| **IV** | **Bidang Urusan Perumahan Rakyat** | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/Kota | 100% | Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | 12,80% | Jumlah barang dan jasa | 11,43% | **24,23%** | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 2 | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota | 100% | Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | 0% | Jumlah barang dan jasa | 0% | **0%** | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| **V** | **Bidang Urusan Ketenteraman. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat** | | | | | | | |
| 1 | Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum | 100% | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada Kabupaten/Kota | 80% | Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia | 14,93% | **94,33%** | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 2 | Pelayanan informasi rawan bencana | 100% | Jumlah Warga Negara yang Memperoleh layanan informasi rawan bencana | 25% | Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia | 14,89% | **34,89%** | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 3 | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100% | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 25% | Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia | 15,61% | **35,61%** | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 4 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100% | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 19,38% | Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia | 96,67% | **99,39%** | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 5 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota | 100% | Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | 36,96% | Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia | 9,42% | **46,38%** | Dinas Pemadam Kebakaran |
| **VI** | **Bidang Urusan Sosial** | | | | | | | |
| 1 | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti | 100% | Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | 41,47% | Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia | 6,54% | **48,01%** | Dinas Sosial |

| No | Bidang Urusan/Jenis Pelayanan Dasar | Target P-RKPD 2025 | Indikator Kinerja dan Realisasi | | | | Capaian Triwulan I Tahun 2025 | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penerima Layanan (80%) | | Mutu Minimal Layanan (20%) | | | |
| | | | Indikator | Realisasi | Indikator | Realisasi | | |
| 2 | Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti | 100% | Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | 20,80% | Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia | 4,68% | **25,48%** | Dinas Sosial |
| 3 | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti | 100% | Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | 21,33% | Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia | 4,67% | **26%** | Dinas Sosial |
| 4 | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti | 100% | Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti | 8,00% | Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia | 1,67% | **9,67%** | Dinas Sosial |
| 5 | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota | 100% | Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota | 80,00% | Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia | 16,00% | **80,00%** | Dinas Sosial |

*Sumber: Bappeda Kota Makassar Triwulan I Tahun 2025. data diolah*

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 29 jenis pelayanan dasar, sebanyak 16 jenis layanan terlaksana dengan capaian >50% bahkan 2 jenis layanan telah mencapai 100% sesuai target yang ditetapkan. Dan sebanyak 13 jenis layanan pencapaiannya <50% dan terdapat 1 layanan dengan realisasi 0%.

Urusan SPM Bidang Pendidkan, capaian SPM terendah triwulan 1 pada pelayanan pendidikan anak usia dini dengan capaian 68,88%, dimana penduduk usia 5-6 yang berpartisipasi pada pendidikan usia dini yang harus terlayani sebesar 51.903 orang sementara yang belum terlayani sebesar 20.188 orang tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dan berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

SPM Bidang Kesehatan pada triwulan 1 untuk capaian tertinggi pada pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sebesar 46,62 % dengan jumlah yang harus dilayani 26.974 orang dan yang sudah terlayani sebesar 10.033 orang. Sementara capaian terendah pada pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dengan capaian 18,36%. Jumlah ODGJ yang harus dilayani sebesar 3.380 orang dan yang baru terlayani sebesar 196 orang pada triwulan 1. Hal ini disebabkan karena sumberdaya tenaga kesehatan yang belum optimal berdasarkan jenis dan profesi serta system pencatatan dan pelaporan SPM yang belum terintegrasi.

Pada SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dari tabel tersebut dapat diuraikan capaian SPM Bidang Trantibumlinmas yaitu Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dengan indikator PersentaseWarga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dan dengan target

tahun 2025 sebesar 100%. Alokasi anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang berkaitan dengan penerapan SPM tersebut sebesar Rp. 27.421.692.700,- (dua puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) yang bersumber dari APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2025.

Dalam penerapan SPM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, telah melaksanakan pendataan terkait data dukung pelaksanaan SPM, Daftar relawan, dan data warga negara yang menjadi korban kebakaran. Telah melaksanakan perhitungan kebutuhan pencapaian SPM, penyusunan rencana dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Berdasarkan hasil perhitungan ditargetkan sebanyak 1.000 orang yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran baik korban jiwa, luka fisik, trauma dan dampak sosial akibat kebakaran. Hingga triwulan I telah terlayani sebanyak 462 orang dari 25 kejadian kebakaran.

Dalam pemenuhan mutu layanan didukung pencapaian waktu tanggap *(response time),* tersedia SOP, sarana dan prasarana pemadam kebakaran, serta kapasitas aparatur pemadam kebakaran. Pada pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas yang dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan teridentifikasi beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan SPM, sebagai berikut:

- Belum ada Sistem Informasi untuk identifikasi data kebakaran dan bencana lainnya;
- Belum ada pusat data dan kendali operasi penanggulangan kebakaran;
- Jumlah personil, kualitas dan kuantitas peralatan dan jumlah mobil pemadam belum mencukupi sesuai kebutuhan;
- Belum seluruh kelurahan/kecamatan memiliki posko pemadam dan keterbatasan lahan Pemerintah Kota untuk membangun pos pembantu dalam cakupan wilayah manajemen kebakaran;
- Kapasitas personil pemadam kebakaran yang memiliki keterampilan pemadaman belum optimal.

Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat melalui rehabilitasi rumah korban bencana dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah tidak dilaksanakan karena terkendala penyiapan data valid korban bencana yang akan menerima layanan dan tidak terdapat program pemerintah yang membutuhkan relokasi rumah warga. Terkait bantuan bagi korban bencana, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pada triwulan I telah diberikan bantuan material untuk 11 unit rumah korban bencana dan bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana sebanyak 35 unit rumah. Kendala dalam pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat yaitu pada penyiapan data rumah korban bencana dan kebutuhan SK penetapan bencana. Hal tersebut berdampak pada lemahnya perhitungan kebutuhan, perencanaan dan penganggaran, serta pemenuhan layanan yaitu rehabilitasi rumah korban bencana

SPM Bidang Trantibumlinmas terdiri dari 5 jenis layanan, pada pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dalam pencapaian target terdapat kendala pada jumlah posko pemadam di wilayah kelurahan dan kecamatan serta belum ada pusat data dan kendali operasi penanggulangan kebakaran. Selain itu masih rendahnya jumlah unit kendaraan pemadam yang jumlahnya hanya sekitar 37,5% dari standar yang ditetapkan.

Untuk pelayanan yang terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) capaian SPM 94,33% dengan jumlah yang terlani sebesar 299 orang atau sebesar 100% dengan indikator jumlah warga

negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kota Makassar. Hal ini di dukung dengan aktifnya satpol PP dalam melaksanakan patrol rutin di seluruh wilayah Kota Makassar untuk mengantisipasi gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Namun kendala yang dihadapi juga dalam melakukan pelayanan standar minimal ini tidak semua warga negara yang berada di radius 0-50 meter dari Lokasi penegakan perda yang memberikan data-data lengkap baik NIK dan KK

Untuk SPM pada bidang penanggulangan bencana capaian tertinggi pada triwulan 1 yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan capaian sebesar 99,39 % dimana jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebesar 3.169 orang atau terlayani 100% Hal ini di dukung dengan adanya respon cepat darurat bencana, aktivasi system komando penanganan darurat bencana yang terorganisir dengan baik.

Untuk SPM Bidang Sosial, pada triwulan 1 capaian tertinggi pada perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota dengan capaian sebesar 96,00%, dengan jumlah total yang terlayani sebesar 5.801 orang atau 100 % dengan lima layanan pelayanan dasar. Faktor yang mempengaruhi capaian ini yaitu karena data masih berproses sehingga pelayanan rehabilitasi sosial juga masih berjalan dan untuk memaksimalkan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar di tahun 2025, maka akan memperbaiki identifikasi permasalahan dan kebutuhan bagi anak terlantar terutama hasil penjangkauan.

Dari tabel tersebut dapat diuraikan capaian SPM Bidang Trantibumlinmas yaitu Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dengan indikator Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dan dengan target tahun 2025 sebesar 100%. Alokasi anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang berkaitan dengan penerapan SPM tersebut sebesar Rp. 27.421.692.700,- (dua puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) yang bersumber dari APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2025.

Dalam penerapan SPM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, telah melaksanakan pendataan terkait data dukung pelaksanaan SPM, Daftar relawan, dan data warga negara yang menjadi korban kebakaran. Telah melaksanakan perhitungan kebutuhan pencapaian SPM, penyusunan rencana dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Berdasarkan hasil perhitungan ditargetkan sebanyak 1.000 orang yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran baik korban jiwa, luka fisik, trauma dan dampak sosial akibat kebakaran. Hingga triwulan I telah terlayani sebanyak 462 orang dari 25 kejadian kebakaran.

Dalam pemenuhan mutu layanan didukung pencapaian waktu tanggap *(response time),* tersedia SOP, sarana dan prasarana pemadam kebakaran, serta kapasitas aparatur pemadam kebakaran. Pada pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas yang dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan teridentifikasi beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan SPM, sebagai berikut:

- Belum ada Sistem Informasi untuk identifikasi data kebakaran dan bencana lainnya;
- Belum ada pusat data dan kendali operasi penanggulangan kebakaran dan Jumlah personil, kualitas dan kuantitas peralatan dan jumlah mobil pemadam belum mencukupi sesuai kebutuhan;
- Belum seluruh kelurahan/kecamatan memiliki posko pemadam dan keterbatasan lahan Pemerintah Kota untuk membangun pos pembantu dalam cakupan wilayah manajemen kebakaran;

- Kapasitas personil pemadam kebakaran yang memiliki keterampilan pemadaman belum optimal.

## 6.6. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan komitmen global yang tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* dan di selaraskan dengan RPJMN melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan amanah dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. dimana dalam pelaksanaanya perlu ada keselarasan dengan Rencana Pembangunan di daerah. TPB/SDGs merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yang terdiri dari:

1. *No Poverty* – Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun;
2. *Zero Hunger* – Menghilangkan kelaparan. mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik. serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. *Good Health and Well-being* – Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua;
4. *Quality Education* – Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. *Gender Equality* – Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. *Clean Water and Sanitation* – Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. *Affordable and Clean Energy* – Menjamin akses energi yang terjangkau. andal. berkelanjutan. dan modern untuk semua;
8. *Decent Work and Economic Growth* – Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh. serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. *Industry. Innovation and Infrastructure* – Membangun infrastruktur yang tangguh. meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan. serta mendorong inovasi;
10. *Reduced Inequalities* – Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
11. *Sustainable Cities and Communities* – Menjadikan kota dan permukiman inklusif. aman. tangguh. dan berkelanjutan;
12. *Responsible Consumption and Production* – Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. *Climate Action* – Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. *Life Below Water* – Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
15. *Life on Land* – Melindungi. merestorasi. dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan. mengelola hutan secara lestari. menghentikan penggurunan. memulihkan degradasi lahan. serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. *Peace. Justice and Strong Institutions* – Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan. menyediakan akses keadilan untuk semua. dan membangun kelembagaan yang efektif. akuntabel. dan inklusif di semua tingkatan;

17. *Partnerships for the Goals* – Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Dalam pencapaian TPB secara global terdapat 241 indikator yang kemudian diterjemahkan dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. hingga terdapat total 319 indikator yang menjadi tolok ukur ketercapaian TPB di Indonesia dari 94 target/sasaran global dan 17 goals. Dari 319 indikator TPB Indonesia 21 indikator bersifat khusus untuk daerah tertentu dan 298 indikator bersifat umum. Setiap wilayah administrasi memiliki tanggung jawab untuk melakukan analisis TPB dengan jumlah indikator yang berbeda sesuai dengan kewenangan dan kondisi wilayahnya. Apabila ditelaah lebih lanjut berdasarkan pembagian kewenangannya antara pemerintah pusat dan daerah. pemerintah pusat memiliki kewenangan terhadap 303 indikator, pemerintah provinsi 235 indikator, pemerintah kabupaten 220 indikator dan pemerintah kota 222 indikator. Dari 222 indikator tersebut kemudian dikaji lebih lanjut lagi untuk melihat relevansi indikator dengan wilayah Kota Makassar. Berdasarkan buku metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia yang dikeluarkan oleh Bappenas Tahun 2017 dari 222 indikator hanya 154 indikator yang relevan dengan kewenangan Kota Makassar. Adapun target indikator TPB Kota Makassar untuk P-RKPD Tahun 2025. dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 6.6.1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Tujuan 1 dari TPB menekankan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga tidak ada lagi penduduk yang masuk dalam kategori miskin. Untuk menjalankan upaya tersebut. Pemerintah Kota Makassar menetapkan 5 (lima) target. yang diturunkan ke dalam 14 (empat belas) indikator sebagaimana pada tabel di bawah ini:

**Tabel VI.5**
**Target Indikator TPB Tujuan 1**
**Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun**
**P-RKPD Kota Makassar Tahun 2025**

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Target Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | RKPD 2025 | P-RKPD 2025 | RAD TPB 2025 |
| | Target 1.2: Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. | | | | | | |
| 1.2.1 | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | Dinas Sosial | % | 4,97 | 4,24 | 4,24 | 4,24 |
| | | Dinas Kesehatan | % | 4,97 | 4,24 | 4,24 | 4,24 |
| | Target 1.3 : Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan | | | | | | |
| 1.3.1.(a) | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. | BPS | % | 99,10 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3.1.(d) | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan. | Dinas Sosial | KK | 31596 | 24000 | 24000 | 24000 |
| | Target 1.4: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. | | | | | | |
| 1.4.1.(a) | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. | Dinas Kesehatan | % | 100 | 99 | 99 | 99 |
| 1.4.1.(c) | Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. | DP2KB | % | 70,20 | 68,45 | 68,45 | 68,45 |
| 1.4.1.(d) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan | Dinas PU | % | 82,96 | 100 | 100 | 100 |

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Target Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | RKPD 2025 | P-RKPD 2025 | RAD TPB 2025 |
| | berkelanjutan. | | | | | | |
| 1.4.1.(e) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. | Dinas PU | % | 89,63 | 56,70 | 56,70 | 56,70 |
| 1.4.1.(g) | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat. | Dinas Pendidikan | % | 85,36 | 99,70 | 99,70 | 99,70 |
| 1.4.1.(h) | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat. | Dinas Pendidikan | % | 73,99 | 91,29 | 91,29 | 91,29 |
| 1.4.1.(j) | Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. | Disdukcapil | % | 98,68 | 100 | 100 | 100 |
| | Target 1.5: Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. | | | | | | |
| 1.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | Damkar | Kejadian | 150 Kejadian | 150 Kejadian | 150 Kejadian | 150 Kejadian |
| | | BPBD | % | 96,94 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5.1.(b) | Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial | Dinas Sosial | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5.1.(c) | Pendampingan psikososial korban bencana sosial | Dinas Sosial | jiwa | 137 | 100 | 100 | 100 |
| | Target 1.a: Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi. | | | | | | |
| 1.a.1* | Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan. | Dinas Ketahanan Pangan | klp | 283 | 500 | 500 | 500 |

*Sumber: Bappeda Kota Makassar Tahun 2025. data diolah*

### 6.6.2. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Tujuan 2 dari TPB menekankan pada pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang sesuai standar gizi. serta mengupayakan perbaikan sisi *supply* pangan melalui pengembangan sektor pertanian secara produktif dan berkelanjutan. Untuk menjalankan upaya tersebut. Pemerintah Kota Makassar menetapkan 4 (empat) target yang diturunkan ke dalam 9 (sembilan) indikator sebagaimana pada tabel di bawah ini:

**Tabel VI.6**
**Target Indikator SDGS Tujuan 2**
**Menghilangkan Kelaparan. Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik. serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan**
**P-RKPD Kota Makassar Tahun 2025**

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Target Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | RKPD 2025 | P-RKPD 2025 | RAD TPB 2025 |
| | Target 2.1: Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. | | | | | | |
| 2.1.1.(a) | Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita. | Dinas Kesehatan | % | 100 | 4,98 | 4,98 | 4,98 |
| 2.1.2* | Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan | Dinas Kesehatan | % | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 |
| | Target 2.2: Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. | | | | | | |
| 2.2.1* | Prevalansi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah lima tahun/balita | Dinas Ketahanan Pangan | Klp | 283 | 500 | 500 | 500 |
| | | DP2KB | % | 6,12 | 71,09 | 71,09 | 71,09 |

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Target Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | RKPD 2025 | P-RKPD 2025 | RAD TPB 2025 |
| 2.2.2 | Prevalensi malnutrisi (wasting/obesitas) pada anak balita | Dinas Kesehatan | % | 12,07 | 4,98 | 4,98 | 4,98 |
| 2.2.2.(b) | Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. | Dinas Kesehatan | % | 78,81 | 60 | 60 | 60 |
| 2.2.2.(c) | Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai ; dan tingkat konsumsi ikan | Dinas Ketahanan Pangan | Skor | 89,73 | 88 | 88 | 88 |
| | Target 2.c : Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim | | | | | | |
| 2.c.1 | Indikator anomali harga pangan | Dinas Ketahanan Pangan | Energi/Protein | Energi: 2.812 Protein: 88,21 | Energi: 2700 Protein: 128 | Energi: 2700 Protein: 128 | Energi: 2700 Protein: 128 |
| | Target 2.3 : Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan,masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan,termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumberdaya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasakeuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non pertanian | | | | | | |
| 2.3.1* | NilaiTambah Pertanian di bagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah pertenaga kerja). | Dinas Perikanan dan Pertanian | Ton | 6,5 Ton Perhektar Pertahun | 7,1 Ton Perhektar Pertahun | 7,1 Ton Perhektar Pertahun | 7,1 Ton Perhektar Pertahun |
| 2.3.2 | Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut jenis dan status adat | Dinas Perikanan dan Pertanian | Ton | 6,5 Ton Perhektar Pertahun | 7,1 Ton Perhektar Pertahun | 7,1 Ton Perhektar Pertahun | 7,1 Ton Perhektar Pertahun |

*Sumber: Bappeda Kota Makassar Tahun 2025. data diolah*

### 6.6.3. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Tujuan 3 TPB menekankan pada perwujudan masyarakat yang sehat. Untuk menjalankan upaya tersebut. Pemerintah Kota Makassar menetapkan 9 (sembilan) target. yang diturunkan ke dalam 17 (tujuh belas) indikator sebagaimana Tabel di bawah ini:

**Tabel VI.7**
**Target Indikator Tujuan SDGS 3**
**Menjamin Kehidupan yang Sehat dan**
**Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia**
**P-RKPD Kota Makassar Tahun 2025**

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Target Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | RKPD 2025 | P-RKPD 2025 | RAD TPB 2025 |
| | Target 3.1: Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. | | | | | | |
| 3.1.1 | Angka Kematian Ibu (AKI) | Dinas Kesehatan | Angka/ Nilai | 76,43 | 21,87 | 21,87 | 21,87 |
| 3.1.2* | Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. | Dinas Kesehatan | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1.2.(a) | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. | Dinas Kesehatan | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Target 3.2: Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000 | | | | | | |
| 3.2.1 | Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000 Kelahiran Hidup | Dinas Kesehatan | Angka/Nilai | 0,08 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 3.2.2 | Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 Kelahiran Hidup | Dinas Kesehatan | Angka/Nilai | 5,18 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Target Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | RKPD 2025 | P-RKPD 2025 | RAD TPB 2025 |
| 3.2.2 (a) | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup | Dinas Kesehatan | Angka/Nilai | 0,80 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| | Target 3.3: Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. | | | | | | |
| 3.3.1.(a) | Prevalensi HIV pada populasi dewasa | Dinas Kesehatan | % | 0,06 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 3.3.2.(a) | Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk | Dinas Kesehatan | % | 0,06 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 3.3.3* | Kejadian Malaria per 1000 orang. | Dinas Kesehatan | % | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| | Target 3.4: Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. | | | | | | |
| 3.4.1.(a) | Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun. | Dinas Kesehatan | % | N/A | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.4.1.(b) | Prevalensi tekanan darah tinggi. | Dinas Kesehatan | % | 18,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 3.4.2.(a) | Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa | Dinas Kesehatan | unit | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Target 3.7 : Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional | | | | | | |
| 3.7.1 | Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. | DP2KB | % | 31,23 | 68,45 | 68,45 | 68,45 |
| | Target 3.8: Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. | | | | | | |
| 3.8.2.(a) | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan | Dinas Kesehatan | % | 99,1 | 100 | 100 | 100 |
| | Target 3.a: Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat. | | | | | | |
| 3.a.1* | Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun. | Dinas Kesehatan | % | 0,36 | 19,59 | 19,59 | 19,59 |
| | Target 3.b: Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua. | | | | | | |
| 3.b.1.(a) | Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. | Dinas Kesehatan | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Target 3.c: Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil. | | | | | | |
| 3.c.1* | Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. | Dinas Kesehatan | % | 0,07 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |

*Sumber: Bappeda Kota Makassar Tahun 2025 data diolah*

### 6.6.4. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Tujuan 4 fokus pada penciptaan pendidikan yang berkualitas dan merata untuk seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan merupakan pondasi untuk menciptakan kehidupan manusia yang sejahtera. Melalui pendidikan transformasi kehidupan bisa terjadi. tidak hanya pada individu itu semata. tapi juga pada keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Mengingat strategisnya peran pendidikan. pemerintah berkewajiban untuk memastikan seluruh warganya dapat mengenyam pendidikan hingga tingkat tertentu. Untuk menjalankan upaya tersebut. Pemerintah Kota Makassar menetapkan 7 (tujuh) target. yang diturunkan menjadi 13 (tiga belas) indikator sebagaimana tabel di bawah ini:

# Tabel VI.8
# Target Indikator SDGS Tujuan 4
# Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
# P-RKPD Kota Makassar Tahun 2025

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Target Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | RKPD 2025 | P-RKPD 2025 | RAD TPB 2025 |
| | Target 4.1: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. | | | | | | |
| 4.1.1.(a) | Persentase SD/MI berakreditasi minimal B | Dinas Pendidikan | % | 86,47 | 85 | 85 | 85 |
| 4.1.1.(b) | Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B | Dinas Pendidikan | % | 72,50 | 77,50 | 77,50 | 77,50 |
| 4.1.1.(d) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat. | Dinas Pendidikan | % | 93,09 | 100 | 100 | 100 |
| 4.1.1.(e) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat. | Dinas Pendidikan | % | 86,32 | 100 | 100 | 100 |
| 4.1.1.(g) | Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun. | Dinas Pendidikan | Tahun | 11,57 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| | Target 4.2: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini,pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. | | | | | | |
| 4.2.2.(a) | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). | Dinas Pendidikan | % | 34,29 | 65,52 | 65,52 | 65,52 |
| | Target 4.4: Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. | | | | | | |
| 4.4.1* | Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). | Dispora | | 520 | 150 | 150 | 150 |
| | Target 4.5: Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan. | | | | | | |
| 4.5.1 | Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat;(2) SMP/MTs/sederajat. | Dinas Pendidikan | | SD/MI: 100,49 SMP/MTs: 105,500 | 100 | 100 | 100 |
| | Target 4.6: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi. | | | | | | |
| 4.6.1 | Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin | Dinas Pendidikan | % | 78,99 | 65 | 65 | 65 |
| 4.6.1.(a) | Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun. | Dinas Pendidikan | % | 98,84 | 100 | 100 | 100 |
| 4.6.1.(b) | Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun. | Dinas Pendidikan | % | 15-24=100 | 100 | 100 | 100 |
| | Target 4.a : Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dangender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua | | | | | | |
| 4.a.1* | Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH) | Dinas Pendidikan | | (a) listrik=100% (b) internet untuk tujuan pengajaran =98,14%, (c) komputer untuk tujuan pengajaran = 73,93%, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas=8 ,6%, (e) air minum layak=100% | (a) listrik=97 % (b) internet untuk tujuan pengajara n=92%, (c) komputer untuk tujuan pengajara n= 35%, (d) infrastrukt ur dan materi memadai bagi siswa | (a) listrik=97 % (b) internet untuk tujuan pengajara n=92%, (c) komputer untuk tujuan pengajara n= 35%, (d) infrastrukt ur dan materi memadai bagi siswa | (a) listrik=97% (b) internet untuk tujuan pengajaran =92%, (c) komputer untuk tujuan pengajaran = 35%, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas= 4, (e) air minum layak=83%, (f) fasilitas sanitasi |

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Target Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | RKPD 2025 | P-RKPD 2025 | RAD TPB 2025 |
| | | | | , (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin=93,27%, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)=100% | disabilitas=4, (e) air minum layak=83%, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin=70%, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)= 25% | disabilitas=4, (e) air minum layak=83%, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin=70%, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)= 25% | dasar per jenis kelamin=70%, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)=25% |
| | Target 4.c: Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil. | | | | | | |
| 4.c.1* | Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik. | Dinas Pendidikan | % | PAUD: PAUD= 34,46% SD= 35,23% SMP= 41,33% | PAUD= 40.5% SD= 50% SMP= 48.73% | PAUD= 40.5% SD= 50% SMP= 48.73% | PAUD= 40.5% SD= 50% SMP= 48.73% |

*Sumber: Bappeda Kota Makassar Tahun 2025. data diolah*

### 6.6.5. Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Isu pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender satu dari sekian banyak masalah pembangunan yang menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah. Hasil pembangunan dan produk kebijakan dianggap oleh para aktivitas perempuan sebagai produk kaum laki-laki sehingga lebih banyak menguntungkan lak-laki dan mengabaikan hak-hak perempuan. Oleh karena itu mewujudkan tujuan SDGS kelima yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan merupakan menjadi relevan dan penting bagi Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar menetapkan 4 (empat) target pencapaian arah kebijakan. yang diturunkan menjadi 6 (enam) indikator sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel VI.9**
**Target Indikator SDGS Tujuan 5**
**Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan**
**P-RKPD Kota Makassar Tahun 2025**

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Target Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | RKPD 2025 | P-RKPD 2025 | RAD TPB 2025 |
| | Target 5.1 : Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dimanapun. | | | | | | |
| 5.1.1 | Jumlah kebijakan yang responsive gender mendukung pemberdayaan perempuan | DP3A | Kebijakan | 100 | 95 | 95 | 95 |
| | Target 5.2 : Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya | | | | | | |

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Target Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | RKPD 2025 | P-RKPD 2025 | RAD TPB 2025 |
| 5.2.1.(a) | Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan | DP3A | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.2.2 | Proporsi Perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 Tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir | DP3A | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.2.2.(a) | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif | DP3A | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat | | | | | | |
| 5.5.1 | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah. | DP3A | % | 13 | | | |
| | Target 5.6 : Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut. | | | | | | |
| 5.6.1* | Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi. | DP2KB | % | 5,25 | 68,45 | 68,45 | 68,45 |

*Sumber: Bappeda Kota Makassar Tahun 2025. data diolah*

### 6.6.6. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Sebagai kota metropolitan. Kota Makassar masih diperhadapkan dengan berbagai permasalah berkaitan dengan air bersih dan sanitasi layak. Sebagian penduduk. khususnya wilayah pinggiran kota masih kesulitan mengakses air bersih dan hidup di tengah kondisi sanitasi buruk. Agar semua penduduk dapat mengakses air bersih dan kondisi sanitasi layak. maka pemerintah Kota Makassar menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan yang merupakan tujuan ke enam SDGS. Untuk menjalankan upaya tersebut. Pemerintah Kota Makassar menetapkan 3 (tiga) target ke dalam 11 (sebelas) sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel VI.10**
**Target Indikator SDGS Tujuan 6**
**Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan**
**Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan**
**P-RKPD Kota Makassar Tahun 2025**

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Target Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | RKPD 2025 | P-RKPD 2025 | RAD TPB 2025 |
| | Target 6.1 : Pada Tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. | | | | | | |
| 6.1.1.(a) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak | Dinas PU | % | 82,96 | 100 | 100 | 100 |
| | | Dinas Kesehatan | % | 83,49 | 100 | 100 | 100 |
| 6.1.1.(b) | Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau | Dinas PU | % | 83,49 | 100 | 100 | 100 |
| 6.1.1.(c) | Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan | Dinas PU | % | 83,49 | 100 | 100 | 100 |

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Target Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | RKPD 2025 | P-RKPD 2025 | RAD TPB 2025 |
| | Target 6.2 : Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan | | | | | | |
| 6.2.1.(a) | Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air | Dinas Kesehatan | % | 81,62 | 100 | 100 | 100 |
| 6.2.1.(b) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak | Dinas PU | % | 89,63 | 56,70 | 56,70 | 56,70 |
| 6.2.1.(c) | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). | Dinas Kesehatan | % | 92,24 | 100 | 100 | 100 |
| 6.2.1.(e) | Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal | Dinas PU | % | 89,63 | 56,70 | 56,70 | 56,70 |
| 6.2.1.(f) | Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat. | Dinas PU | % | 89,63 | 56,70 | 56,70 | 56,70 |
| | Target 6.3 : Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. | | | | | | |
| 6.3.1.(a) | Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). | Dinas PU | % | - | 56,70 | 56,70 | 56,70 |
| 6.3.1.(b) | Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja. | Dinas PU | % | 60,70 | 56,70 | 56,70 | 56,70 |
| 6.3.2.(b) | Kualitas air sungai sebagai sumber air baku. | Dinas Lingkungan Hidup | % | 58,70 | - | - | - |

*Sumber: Bappeda Kota Makassar Tahun 2025. data diolah*

### 6.6.7. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Indonesia berdasarkan hasil penelitian Bank Dunia termasuk negara yang pertumbuhan ekonominya cenderung eksklusif karena hanya menguntungkan sebagian kecil kelompok terkaya. sementara kelompok miskin. Eksklusifitas pertumbuhan Indonesia ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi impresif tapi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan juga semakin parah. Umumnya kondisi semacam ini terjadi di daerah yang aktivitas ekonomi lebih beragam seperti Kota Makassar. Di Kota Makassar sebagian masyarakat bekerja di jenis pekerjaan bergaji tinggi. sementara sebagian lagi bekerja di sektor informal yang upahnya bahkan jauh dibawah UMR. Dikotomi sektor ekonomi (bergaji tinggi dan bergaji rendah) semakin mempertajam kesenjangan pendapatan antara masyarakat. sehingga penting bagi pemerintah kota untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh. serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Arah kebijakan untuk mencapai tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh. serta pekerjaan yang layak untuk semua diharapkan bisa mencapai sasaran yang ditentukan yang dijabarkan ke dalam 4 (empat) target dan 8 (delapan) indikator yang berada dalam tabel berikut ini:

**Tabel VI.11**
**Target Indikator Tujuan SDGS 8**
**Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh. serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua P-RKPD Kota Makassar Tahun 2025**

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Target Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | RKPD 2025 | P-RKPD 2025 | RAD TPB 2025 |
| Target 8.1 : Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan. khususnya. setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang. | | | | | | | |
| 8.1.1. | Laju pertumbuhan PDB per kapita. | PTSP | % | 68,81 | 100 | 100 | 100 |
| Target 8.3 : Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif. penciptaan lapangan kerja layak. kewirausahaan. kreativitas dan inovasi. dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro. kecil. dan menengah. termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan | | | | | | | |
| 8.3.1.(a) | Persentase tenaga kerja formal. | Disnaker | % | 59,70 | 70,50 | 70,50 | 70,50 |
| 8.3.1.(c) | Persentase akses UMKM (Usaha Mikro. Kecil. dan Menengah) ke layanan keuangan. | Dinas Koperasi. UKM | % | 21 | 28,17 | 28,17 | 28,17 |
| Target 8.5 : Pada tahun 2030. mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki. termasuk bagi pemuda dan penyandang disabilitas. dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. | | | | | | | |
| 8.5.2. | Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. | Disnaker | % | 9,71 | 8,31 | 8,31 | 8,31 |
| Target 8.9 : Pada tahun 2030. menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. | | | | | | | |
| 8.9.1* | Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB | Dinas Pariwisata | % | 2,16 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| 8.9.1.(a) | Jumlah wisatawan mancanegara. | Dinas Pariwisata | Orang | 160.295 | 34.694 | 34.694 | 34.694 |
| 8.9.1.(b) | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. | Dinas Pariwisata | Orang | 5.684.295 | 2.069.040 | 2.069.040 | 2.069.040 |
| | | Dinas Kebudayaan | % | 11000 | 100 | 100 | 100 |
| 8.9.2. | Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja. | Dinas Pariwisata | Orang | 6.165 | 6.165 | 6.165 | 6.165 |

*Sumber: Bappeda Kota Makassar Tahun 2025. data diolah*

### 6.6.8. Tujuan 9 Industri. Inovasi dan Infrastruktur

Sektor industri merupakan satu dari empat sektor yang menjadi kontributor tertinggi terhadap perekonomian Kota Makassar. Namun dua tahun terakhir. peranan industri tergantikan oleh sektor perdagangan. salah satu sebabnya karena inovasi yang dilakukan oleh pelaku usaha lebih lambat dibandingkan sektor perdagangan. sehingga nilai tambah perdagangan naik lebih tinggi dibandingkan industri. Untuk memastikan industrialisasi di Kota Makassar berjalan efektif dan menyerap tenaga kerja lebih besar maka dibutuhkan pembangunan Infrastruktur yang tangguh. meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan. serta mendorong inovasi. Diharapkan arah kebijakan yang sudah ditentukan bisa mencapai sasaran dengan 3 (tiga) target dan 4 (empat) indikator yang berada dalam tabel berikut:

**Tabel VI.12**
**Target Indikator SDGS Tujuan 9**
**Membangun Infrastruktur yang Tangguh. Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan. serta Mendorong Inovasi**
**P-RKPD Kota Makassar Tahun 2025**

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Target Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | RKPD 2025 | P-RKPD 2025 | RAD TPB 2025 |
| | Target 9.1 : Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. | | | | | | |

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Target Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | RKPD 2025 | P-RKPD 2025 | RAD TPB 2025 |
| 9.1.2.(b) | Jumlah dermaga penyeberangan | Dishub | Dermaga | 2 | 10 | 10 | 10 |
| | Target 9.5 : Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan | | | | | | |
| 9.5.1. | Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB | Balitbangda | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9.5.2. | Jumlah peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk | Balitbangda | % | 100 | 90 | 90 | 90 |
| | Target 9.b : Mendukung pengembangan teknologi domestic, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industry dan peningkatan nilai tambah komoditas | | | | | | |
| 9.b.1. | Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah | Balitbangda | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: Bappeda Kota Makassar Tahun 2025. data diolah*

### 6.6.9. Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

Tujuan 11 dari TPB fokus pada menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Untuk menjalankan upaya tersebut, Pemerintah Kota Makassar menetapkan 6 (enam) target selanjutnya diturunkan ke dalam 7 (tujuh) indikator sebagaimana pada tabel dibawah ini.

**Tabel VI.13**
**Target Pencapaian SDGS Tujuan 11**
**Membangun kota dan pemukiman yang inklusif.**
**aman. tangguh dan berkelanjutan**
**P-RKPD Kota Makassar Tahun 2025**

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Target Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | RKPD 2025 | P-RKPD 2025 | RAD TPB 2025 |
| | Target 11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh. | | | | | | |
| 11.1.1 (a) | Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau | Dinas Perumahan | % | 95 | 100 | 100 | 100 |
| | | Kec. Panakukkang | % | 74,97 | 72 | 72 | 72 |
| | | Kec. Manggala | % | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | | Kec. Tallo | % | 70 | 72 | 72 | 72 |
| | | Kec. Biringkanaya | % | 70 | 72 | 72 | 72 |
| | | Kec. Tamalanrea | % | 65 | 72 | 72 | 72 |
| | | Kec. Ujung Tanah | % | 60 | 100 | 100 | 100 |
| | | Kec. Wajo | % | 17,8 | 72 | 72 | 72 |
| | | Kec. Mariso | % | 80 | 72 | 72 | 72 |
| | | Kec. Mamajang | % | | 72 | 72 | 72 |
| | | Kec. Ujung Pandang | % | 70 | 72 | 72 | 72 |
| | | Kec. Makassar | % | 26 | 72 | 72 | 72 |
| | | Kec. Bontoala | % | 74,97 | 72 | 72 | 72 |
| | | Kec. Rappocini | % | 65 | 72 | 72 | 72 |
| | | Kec. Tamalate | % | | 72 | 72 | 72 |
| | | Kec. Sangkarrang | % | 70 | 72 | 72 | 72 |
| 11.1.1 (b) | Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP) | Dinas Pertanahan | | N/A | 75 | 75 | 75 |
| | Target 11.2. Pada tahun 2030, menyediakan akses pada sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan jalan, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang rentan, wanita, anak-anak, penyandang disabilitas dan orang tua. | | | | | | |
| 11.2.1.(a) | Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan | Dinas Perhubungan | % | 4,7 | 5 | 5 | 5 |
| | Target 11.4. Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia. | | | | | | |

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Target Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | RKPD 2025 | P-RKPD 2025 | RAD TPB 2025 |
| 11.4.1.(a) | Jumlah Kota Pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil | Dinas Kebudayaan | % | 55 | 100 | 100 | 100 |
| | Target 11.5. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana yang berhubungan dengan air, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan. | | | | | | |
| 11.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | BPBD | % | 96,94 | 100 | 100 | 100 |
| | Target 11.6. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara dan penanganan sampah kota. | | | | | | |
| 11.6.1.(a) | Persentase sampah perkotaan yang tertangani | DLH | % | 76,7 | 70 | 70 | 70 |
| | | Kec. Panakukkang | % | 85 | 90 | 90 | 90 |
| | | Kec. Manggala | % | 84 | 98 | 98 | 98 |
| | | Kec. Tallo | % | 85 | 90 | 90 | 90 |
| | | Kec. Biringkanaya | % | 85 | 90 | 90 | 90 |
| | | Kec. Tamalanrea | % | 82 | 90 | 90 | 90 |
| | | Kec. Ujung Tanah | % | 98 | 100 | 100 | 100 |
| | | Kec. Wajo | % | 96,67 | 90 | 90 | 90 |
| | | Kec. Mariso | % | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | | Kec. Mamajang | % | | 90 | 90 | 90 |
| | | Kec. Ujung Pandang | % | 85 | 90 | 90 | 90 |
| | | Kec. Makassar | % | 79 | 90 | 90 | 90 |
| | | Kec. Bontoala | % | 85 | 90 | 90 | 90 |
| | | Kec. Rappocini | % | 94,80 | 90 | 90 | 90 |
| | | Kec. Sangkarrang | % | 85 | 90 | 90 | 90 |
| | | Kec. Tamalate | % | 95 | 99 | 99 | 99 |
| | Target 11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas. | | | | | | |
| 11.7.1 (a) | Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang | Dinas Tata Ruang | % | 13,92 | 15,926 | 15,926 | 15,926 |
| | | DLH | | | | | |

*Sumber: Bappeda Kota Makassar Tahun 2025. data diolah*

### 6.6.10. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Konsumsi dan produksi merupakan kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempertahankan keberlanjutan kehidupan. Namun seringkali karena dorongan motif ekonomi yang terlalu ambisius. aspek lingkungan menjadi terabaikan. Untuk itu TPB 12 fokus pada upaya untuk mengarahkan kegiatan konsumsi dan produksi yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Untuk menjalankan upaya tersebut Pemerintah Kota Makassar menetapkan 3 (tiga) target dan 3 (tiga) indikator sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel VI.14**
**Target Indikator SDGS Tujuan 12 Memastikan Pola Konsumsi Dan Produksi Yang BerkelanjutanP-RKPD Kota Makassar Tahun 2025**

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Target Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | RKPD 2025 | P-RKPD 2025 | RAD TPB 2025 |
| Target 12.4 : Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. | | | | | | | |
| 12.4.2.(a) | Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). | DLH | Ton | 6.476,34 Ton | Limbah B3 = 9.690,62 | Limbah B3 = 9.690,62 | Limbah B3 = 9.690,62 |

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Target Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | RKPD 2025 | P-RKPD 2025 | RAD TPB 2025 |
| | | | | | Ton B3 = 1.690.62 4,0 0 Ton | Ton B3 = 1.690.62 4,0 0 Ton | Ton B3 = 1.690.62 4,0 0 Ton |
| Target 12.5 : Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. | | | | | | | |
| 12.5.1.(a) | Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. | DLH | Ton | 7601,7 Ton | 65.549 Ton | 65.549 Ton | 65.549 Ton |
| Target 12.b : Mengembangan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. | | | | | | | |
| 12.b.1. | Jumlah strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan dan pelaksanaan rencana aksi, dengan perangkat monitoring dan evaluasi yang telah disepakati. | Dinas Pariwisata | | 1 | 1 | 1 | 1 |

*Sumber: Bappeda Kota Makassar Tahun 2025. data diolah*

### 6.6.11. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

Tujuan 13 dari TPB terkait dengan perubahan iklim menekankan pada pengambilan tidak yang cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Untuk menjalankan upaya tersebut. Pemerintah Kota Makassar menetapkan target yakni. memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. Adapun target tersebut diturunkan ke dalam 1 (satu) indikator sebagaimana pada tabel di bawah:

**Tabel VI.15**
**Target Indikator SDGS Tujuan 13**
**Mengambil Aksi Segera Untuk Memerangi Perubahan Iklim Dan Dampaknya**
**P-RKPD Kota Makassar Tahun 2025**

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Target Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | RKPD 2025 | P-RKPD 2025 | RAD TPB 2025 |
| Target 13.2. Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional | | | | | | | |
| 13.2.1.(a) | Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) | DLH | Dok | 1 | 1 | 1 | 1 |

*Sumber: Bappeda Kota Makassar Tahun 2025. data diolah*

### 6.6.12. Tujuan 15 Ekosistem Daratan

Tujuan 15 dari TPB yaitu melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem daratan. TPB ke 15 juga bertujuan untuk mengelola hutan secara berkelanjutan, menghentikan penggurunan, dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Kota Makassar menetapkan 1 target yang diturunkan kedalam 1 indikator sebagaimana pada tabel di bawah :

**Tabel VI.16**
**Target Indikator SDGS Tujuan 15 Memastikan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati P-RKPD Kota Makassar Tahun 2025**

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Target Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | RKPD 2025 | P-RKPD 2025 | RAD TPB 2025 |
| Target 15.9. Pada tahun 2020, mengitegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan | | | | | | | |
| 15.9.1.(a) | Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati | DLH | Dok | 2 | 2 | 2 | 2 |

*Sumber: Bappeda Kota Makassar Tahun 2025. data diolah*

### 6.6.13. Tujuan 16 Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Tujuan 16 dari TPB terkait dengan pembangunan hukum dan tata kelola yang menekankan pada penguatan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan. menyediakan akses keadilan untuk semua. dan membangun kelembagaan yang efektif. akuntabel. dan inklusif di semua tingkatan. Untuk menjalankan upaya tersebut. Pemerintah Kota Makassar menetapkan 8 (delapan) target yang diturunkan ke dalam 12 (dua belas) indikator sebagaimana pada tabel di bawah:

**Tabel VI.17**
**Target Indikator SDGS Tujuan 16**
**Mendukung Masyarakat Yang Damai Dan Inklusif**
**Untuk Pembangunan Berkelanjutan. Menyediakan Akses**
**Terhadap Keadilan Bagi Semua Dan Membangun Institusi-Institusi**
**Yang Efektif. Akuntabel Dan Inklusif Di Semua Level**
**P-RKPD Kota Makassar Tahun 2025**

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Target Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | RKPD 2025 | P-RKPD 2025 | RAD TPB 2025 |
| Target 16.2. Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. | | | | | | | |
| 16.2.1.(b) | Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. | DP3A | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16.2.3.(a) | Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. | DP3A | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Target 16.3. Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan Internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua. | | | | | | | |
| 16.3.1.(b) | Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi. | Hukum dan HAM | Perkara | 6 perkara | 12 perkara | 12 perkara | 12 perkara |
| Target 16.5. Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya. | | | | | | | |
| 16.5.1.(a) | Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). | Inspektorat | Laporan | 23 Laporan | 21 Laporan | 21 Laporan | 21 Laporan |
| | Target 16.6. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. | | | | | | |
| 16.6.1.(a) | Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) | BPKAD | Predikat | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 16.6.1.(d) | Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). | BKPSDMD | Indeks | 76,8 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
| Target 16.7. Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan. | | | | | | | |
| 16.7.2.(a) | Indeks Lembaga Demokrasi. | Kesbangpol | Indeks | | | | |
| Target 16.9. Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran | | | | | | | |
| 16.9.1* | Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur. | Disdukcapil | % | 98.68 | 100 | 100 | 100 |
| 16.9.1.(a) | Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah | Disdukcapil | % | 98.68 | 100 | 100 | 100 |
| 16.9.1.(b) | Persentase anak yang memiliki akta kelahiran. | Disdukcapil | % | 98.68 | 100 | 100 | 100 |
| Target 16.10. Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional | | | | | | | |
| 16.10.2.(a) | Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Diskominfo | | 24 | 800 | 800 | 800 |
| Target 16 b. Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan | | | | | | | |
| 16.b.1.(a) | Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan | Satpol PP | | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Target Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | RKPD 2025 | P-RKPD 2025 | RAD TPB 2025 |
| | larangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. | | | | | | |

*Sumber: Bappeda Kota Makassar Tahun 2025. data diolah*

### 6.6.14. Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Fokus dari tujuan TPB 17 yakni menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Untuk menjalankan upaya tersebut. Pemerintah Kota Makassar menetapkan 2 target ke dalam 3 indikator sebagaimana pada tabel di bawah ini:

**Tabel VI.18**
**Target Indikator SDGS Tujuan 17**
**Menguatkan Ukuran Implementasi Dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan**
**P-RKPD Kota Makassar Tahun 2025**

| Kode Indikator | Nama Indikator SDGS | Sumber Data | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Target Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | RKPD 2025 | P-RKPD 2025 | RAD TPB 2025 |
| Target 17.1. Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas local bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya | | | | | | | |
| 17.1.1* | Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya | Bapenda | Rupiah | Rp.4.205.629.621.340,50 | Rp 4.905.416.386.289,00 | Rp 4.905.416.386.289,00 | Rp 4.905.416.386.289,00 |
| 17.1.1.(a) | Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDB | Bapenda | Rupiah | Rp.1.401.378.637.369,17 | Rp 2.183.442.262.423,00 | Rp 2.183.442.262.423,00 | Rp 2.183.442.262.423,00 |
| Target 17.5. Mengadopsi dan melaksanakan pemerintahan yang mempromosikan investasi bagi negara kurang berkembang. | | | | | | | |
| 17.5.1. | Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara-negara kurang berkembang. | PTSP | Investasi | 90 Investor PMA & 280 Investor PMDN,Rp.1,8 Triliun dan US$ 28,4 Juta | 870 Investor dan Rp. 2.734.750.000.000 | 870 Investor dan Rp. 2.734.750.000.000 | 870 Investor dan Rp. 2.734.750.000.000 |

*Sumber: Bappeda Kota Makassar Tahun 2025. data diolah*



# BAB VI

# PENUTUP



# BAB VII
# P E N U T U P

Bab Penutup Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Makassar Tahun 2025 terbagi menjadi 2 (dua) sub bab yaitu : Kaidah Pelaksanaan dan Kesimpulan.

## 7.1 Kaidah Pelaksanaan

Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Makassar Tahun 2025 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain sebagai pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Makassar untuk semester akhir Tahun 2025. Penyusunan Perubahan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Dalam proses Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 ini berorientasi pada proses dengan pendekatan, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politis dan atas bawah dan/atau bawah atas. Serta memperhatikan substansi pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial.

Perubahan RKPD Tahun 2025 ini akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Kota Makassar Tahun Anggaran 2025. Selain itu, dokumen Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2025 ini menjadi instrumen utama bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar dan stakeholder terkait dalam meningkatkan kinerja pembangunan melalui pembenahan administrasi pemerintahan, peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 juga menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Tahun 2025 dengan melihat arah kebijakan pembangunan daerah dalam satu tahun. Dokumen ini juga akan memberikan kepastian arah kebijakan dan program prioritas yang menjadi komitmen Pemerintah Kota Makassar dengan pemangku kepentingan.

Dengan tersusunnya Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2025, kiranya dapat menjadi bahan rujukan untuk memperkuat kinerja Perangkat Daerah, dan diharapkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub-kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai sasaran dan target pembangunan daerah. Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan pembangunan, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, perkiraan maju dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab yang wajib dilaksanakan Pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (P-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah Dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja PD;
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

## 7.2. Kesimpulan

1. Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2025 penyusunannya dilakukan karena adanya perubahan dan penyesuaian terhadap kebijakan daerah yang baru, hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sebelumnya yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan RKPD ini juga dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, serta untuk mengakomodasi anggaran yang belum terencana di RKPD awal.
2. Dalam rangka penyusunan Perubahan APBD Kota Makassar Tahun 2025, P-RKPD merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Perubahan Prioritas dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS).
3. Untuk mencapai target sasaran sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Kota Makassar tahun 2025, dan untuk mengawal pencapaian tersebut berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan maka evaluasi dan analisis harus dilakukan sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian.

4. Untuk mencapai Program Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development), beberapa sumber pendanaan berpotensi untuk disinergikan oleh pemerintah Kota Makassar sesuai pada peraturan perundangan-undangan; Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), *Corporate Social Responsibility* (CSR) & Program Kemitraaan, Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
5. Dalam mendukung kelancaran pencapaian tujuan, sasaran dan target pembangunan daerah diperlukan kerja keras, komitmen, semangat, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku kepentingan pembangunan sesuai peran dan tanggung jawabnya masing-masing.
6. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2025 akan ditentukan oleh koordinasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah, serta pengendalian dan evaluasi yang cermat dan akurat. Oleh sebab itu, seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar harus melakukan langkah-langkah penyempurnaan perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sehingga bermanfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemajuan daerah menuju Makassar yang Mulia kotanya, Mulia warganya.

**WALI KOTA MAKASSAR,**

**MUNAFRI ARIFUDDIN**

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
# KOTA MAKASSAR
# TAHUN 2025

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | **DINAS PENDIDIKAN** | | | | | | | **1.065.108.600.000,00** | **1.372.529.076.418,00** | **1.308.137.824.000,00** | **243.029.224.000,00** | | | | | | | **1.191.688.417.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **1.065.108.600.000,00** | **1.372.529.076.418,00** | **1.308.137.824.000,00** | **243.029.224.000,00** | | | | | | | **1.191.688.417.000,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **1.065.108.600.000,00** | **1.372.529.076.418,00** | **1.308.137.824.000,00** | **243.029.224.000,00** | | | | | | | **1.191.688.417.000,00** | |
| 1. | **1.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah**<br>**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik** | | | | **100**<br>**90 Persen Persen** | **100**<br>**90 Persen Persen** | **835.688.701.492,00** | **938.434.971.058,00** | **1.005.807.126.880,00** | **10.556.482.508,00** | | | | | | | **846.245.184.000,00** | |
| | 1.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 174.553.000,00 | 251.553.000,00 | 265.653.000,00 | 91.100.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | Dinas Pendidikan | | 1.043.544.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 60.213.000,00 | 64.213.000,00 | 23.313.000,00 | -36.900.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 310.342.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.045.000,00 | 20.795.000,00 | 13.795.000,00 | 1.750.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 36.546.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.160.000,00 | 11.460.000,00 | 4.460.000,00 | -1.700.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 63.685.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 13.390.000,00 | 23.865.000,00 | 16.865.000,00 | 3.475.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 39.188.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.520.000,00 | 18.555.000,00 | 11.555.000,00 | 2.035.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 76.029.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 47.000.000,00 | 41.400.000,00 | 39.800.000,00 | -7.200.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 125.880.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 26.225.000,00 | 71.265.000,00 | 155.865.000,00 | 129.640.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 391.874.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 831.164.892.532,00 | 933.992.262.098,00 | 998.815.763.720,00 | 167.650.871.188,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | ASN dan Non ASN Dinas Pendidikan | | 834.959.567.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 6773 Orang /bulan | 6773 Orang /bulan | 826.641.510.732,00 | 926.429.040.298,00 | 991.726.821.920,00 | 165.085.311.188,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAK NON FISIK-TPG PNSD<br>DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 826.096.780.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3.573.645.000,00 | 6.507.885.000,00 | 6.384.045.000,00 | 2.810.400.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 2.611.787.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 931.926.800,00 | 1.037.526.800,00 | 701.086.800,00 | -230.840.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 733.134.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 12 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 5.329.943.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 17.810.000,00 | 17.810.000,00 | 3.810.000,00 | -14.000.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 187.923.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 108.320.000,00 | 166.000.000,00 | 168.000.000,00 | 59.680.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | Pegawai Lingkup Dinas Pendidikan | | 775.865.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 280 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 254.874.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 4 Dokumen | 0 Dokumen | 12.320.000,00 | 28.000.000,00 | 0,00 | -12.320.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 264.436.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 25 Orang | 14 Orang | 96.000.000,00 | 138.000.000,00 | 168.000.000,00 | 72.000.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 256.555.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Capaian Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 640.263.960,00 | 547.443.960,00 | 796.523.960,00 | 156.260.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Makassar | | 1.511.055.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 1 Paket | 360.000,00 | 2.520.000,00 | 2.520.000,00 | 2.160.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 9.457.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 32 Paket | 3 Paket | 25.267.560,00 | 27.867.560,00 | 27.867.560,00 | 2.600.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 70.808.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 125.872.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 9 Paket | 1 Paket | 20.048.400,00 | 20.048.400,00 | 20.048.400,00 | 0,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 198.496.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 1 Paket | 30.888.000,00 | 30.888.000,00 | 30.888.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 24.583.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 123.040.000,00 | 157.120.000,00 | 146.200.000,00 | 23.160.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 112.062.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 440.000.000,00 | 309.000.000,00 | 569.000.000,00 | 129.000.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 797.886.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 4 Dokumen | 0 Dokumen | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | -660.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 171.891.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.940.000,00 | 0,00 | 2.271.384.200,00 | 2.269.444.200,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Makassar | | 1.402.610.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 7 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 279.678.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 35 Unit | 35 Unit | 1.940.000,00 | 0,00 | 2.271.384.200,00 | 2.269.444.200,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 1.122.932.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Capaian Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 3.241.932.000,00 | 3.120.912.000,00 | 3.172.912.000,00 | -69.020.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Makassar | | 1.666.417.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 0 Laporan | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 357.502.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 4 Laporan | 3 Laporan | 1.111.872.000,00 | 976.452.000,00 | 976.452.000,00 | -135.420.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 797.089.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 2.129.460.000,00 | 2.144.460.000,00 | 2.196.460.000,00 | 67.000.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 511.826.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 356.800.000,00 | 356.800.000,00 | 316.890.000,00 | -39.910.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | Kendaraan Dinas dan Mesin Lainnya | | 1.037.792.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 286.800.000,00 | 286.800.000,00 | 246.890.000,00 | -39.910.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 461.188.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 64.138.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 63.496.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 64.138.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 384.832.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.13 | Penataan Organisasi | *Jumlah Organisasi yang Dikelola* | | | | 0 Organisasi | 0 Organisasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | - | | 3.848.334.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.13.0004 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 3.848.334.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| 2. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **Angka Rata-Rata Lama Sekolah<br>Angka Harapan Lama Sekolah<br>Jumlah Penerima Beasiswa "Anak Lorong Berprestasi"<br>Angka Partisipasi Murni (PAUD, SD Dan SMP)<br>Angka Partisipasi Kasar (PAUD, SD Dan SMP)<br>Persentase Sarana Dan Prasanan Pendidikan (PAUD, SD, SMP) Dalam Kondisi Baik<br>Persentase Ketuntasan Pendidikan Kesetaraan (A, B, C)** | | | | **12,2<br>16,56<br>400<br>56,93;100;100<br>65,52 ;100 ;100<br>78 ;78 ;92<br>94,26<br>Tahun<br>Tahun<br>Orang<br>%<br>%<br>%<br>%** | **12,2<br>16,56<br>400<br>56,93;100;100<br>65,52 ;100 ;100<br>78 ;78 ;92<br>94,26<br>Tahun<br>Tahun<br>Orang<br>%<br>%<br>%<br>%** | **229.245.988.508,00** | **433.920.195.360,00** | **302.251.637.120,00** | **115.875.438.492,00** | | | | | | | **345.121.427.000,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Sekolah Dasar yang Dikelola* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 106.242.021.328,00 | 261.796.760.780,00 | 164.186.059.540,00 | 57.944.038.212,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | SD Sekota Makassar | | 188.347.231.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun* | | | | 2 Ruang | 1 Ruang | 507.691.600,00 | 507.691.600,00 | 495.191.600,00 | -12.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 768.756.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 3 Ruang | 1 Ruang | 545.405.140,00 | 324.008.640,00 | 273.243.140,00 | -272.162.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 921.510.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 2 Ruang | 0 Ruang | 466.420.460,00 | 0,00 | 0,00 | -466.420.460,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 695.209.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 20 Unit | 134 Unit | 1.301.127.700,00 | 109.368.203.940,00 | 969.536.200,00 | -331.591.500,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 3.282.704.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0009 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 4 Ruang | 3 Ruang | 486.337.000,00 | 734.548.000,00 | 723.548.000,00 | 237.211.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 948.871.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0010 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 0 Ruang | 0 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0011 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 4 Ruang | 0 Ruang | 22.865.640,00 | 0,00 | 0,00 | -22.865.640,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 1.087.489.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0014 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia* | | | | 5 Paket | 5 Paket | 1.678.067.000,00 | 5.498.252.000,00 | 7.076.226.000,00 | 5.398.159.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 3.694.253.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik* | | | | 950 Peserta Didik | 950 Peserta Didik | 253.691.800,00 | 299.163.000,00 | 256.163.000,00 | 2.471.200,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 1.001.543.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0026 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar* | | | | 1250 Orang | 1250 Orang | 7.469.128.400,00 | 7.491.748.400,00 | 7.491.748.400,00 | 22.620.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 35.452.315.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi* | | | | 4100 Orang | 942 Orang | 733.200.000,00 | 733.200.000,00 | 749.640.000,00 | 16.440.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 1.889.264.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah* | | | | 240 Satuan Pendidikan | 240 Satuan Pendidikan | 167.539.000,00 | 164.130.000,00 | 113.130.000,00 | -54.409.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 187.948.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | 465 Satuan Pendidikan | 465 Satuan Pendidikan | 79.340.090.268,00 | 118.165.100.000,00 | 118.165.100.000,00 | 38.825.009.732,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 110.354.903.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0030 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar* | | | | 465 Orang | 465 Orang | 221.760.000,00 | 149.417.000,00 | 69.417.000,00 | -152.343.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 104.059.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0038 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan* | | | | 429 Dokumen | 8 Dokumen | 274.004.000,00 | 243.169.000,00 | 179.169.000,00 | -94.835.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 247.751.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0046 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah* | | | | 23 Ruang | 15 Ruang | 4.688.414.200,00 | 8.712.199.800,00 | 8.692.449.800,00 | 4.004.035.600,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 13.273.892.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 349.127.640,00 | 0,00 | 2.917.518.000,00 | 2.568.390.360,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 1.035.973.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar* | | | | 430 Satuan Pendidikan | 430 Satuan Pendidikan | 103.178.080,00 | 86.855.800,00 | 6.623.655.800,00 | 6.520.477.720,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 434.121.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 60 Ruang | 25 Ruang | 5.017.775.000,00 | 5.727.092.000,00 | 5.700.842.000,00 | 683.067.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 10.276.532.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 12150 Peserta Didik | 12150 Peserta Didik | 543.003.800,00 | 645.793.000,00 | 566.793.000,00 | 23.789.200,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 378.853.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia* | | | | 5 Paket | 5 Paket | 2.073.194.600,00 | 2.946.188.600,00 | 3.122.688.600,00 | 1.049.494.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 2.311.285.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | *Persentase Sekolah Menengah Pertama yang Dikelola* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 86.260.903.020,00 | 133.680.600.020,00 | 101.258.628.620,00 | 14.997.725.600,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | SMP Sekota Makassar | | 115.090.820.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun* | | | | 2 Ruang | 1 Ruang | 594.499.440,00 | 594.999.440,00 | 579.014.440,00 | -15.485.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 1.073.937.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 0 Ruang | 0 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 0 Ruang | 0 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0006 | Pembangunan Laboratorium | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun* | | | | 3 Ruang | 1 Ruang | 880.873.600,00 | 880.873.600,00 | 868.373.600,00 | -12.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 3.021.497.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0007 | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun* | | | | 0 Ruang | 0 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 9 Unit | 56 Unit | 1.022.768.400,00 | 43.318.382.400,00 | 1.494.682.500,00 | 471.914.100,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 2.781.104.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 4 Ruang | 14 Ruang | 1.758.303.740,00 | 4.348.842.740,00 | 4.325.342.740,00 | 2.567.039.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 11.140.719.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0017 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 2 Ruang | 1 Ruang | 4.785.000,00 | 4.785.000,00 | 4.785.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 232.245.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0018 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 3 Ruang | 1 Ruang | 97.562.300,00 | 799.632.300,00 | 786.632.300,00 | 689.070.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 627.554.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 3 Unit | 4 Unit | 328.761.500,00 | 328.761.500,00 | 2.521.871.000,00 | 2.193.109.500,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 560.135.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0025 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia* | | | | 15 Paket | 4 Paket | 1.440.072.400,00 | 2.020.636.400,00 | 4.040.020.400,00 | 2.599.948.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 3.480.009.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 8400 Peserta Didik | 8400 Peserta Didik | 672.226.000,00 | 635.855.000,00 | 616.355.000,00 | -55.871.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 110.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik* | | | | 945 Peserta Didik | 945 Peserta Didik | 503.720.000,00 | 537.812.000,00 | 488.812.000,00 | -14.908.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 988.387.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0039 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama* | | | | 700 Orang | 700 Orang | 6.145.452.000,00 | 6.164.052.000,00 | 6.153.252.000,00 | 7.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 9.154.548.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0040 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi* | | | | 3500 Orang | 650 Orang | 336.970.000,00 | 336.970.000,00 | 685.170.000,00 | 348.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 2.002.212.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan* | | | | 190 Satuan Pendidikan | 190 Satuan Pendidikan | 166.088.000,00 | 172.080.000,00 | 111.080.000,00 | -55.008.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 86.586.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS* | | | | 222 Satuan Pendidikan | 222 Satuan Pendidikan | 66.032.300.000,00 | 65.555.507.000,00 | 65.555.507.000,00 | -476.793.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 49.462.306.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0043 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama* | | | | 222 Orang | 222 Orang | 121.615.000,00 | 76.175.000,00 | 28.175.000,00 | -93.440.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 57.810.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0051 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan* | | | | 222 Dokumen | 9 Dokumen | 262.380.000,00 | 228.515.000,00 | 174.515.000,00 | -87.865.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 130.169.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0058 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar* | | | | 8500 Satuan Pendidikan | 8500 Satuan Pendidikan | 103.077.000,00 | 115.955.000,00 | 4.956.455.000,00 | 4.853.378.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 289.863.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah* | | | | 8 Ruang | 6 Ruang | 2.905.761.640,00 | 2.905.761.640,00 | 2.897.261.640,00 | -8.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 24.846.770.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0064 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 3 Ruang | 6 Ruang | 1.071.749.000,00 | 3.037.466.000,00 | 3.020.466.000,00 | 1.948.717.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 537.218.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0067 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia* | | | | 15 Paket | 1 Paket | 1.811.938.000,00 | 1.617.538.000,00 | 1.950.858.000,00 | 138.920.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 4.507.751.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | *Persentase Pendidikan Anak Usia DIni (PAUD) yang Dikelola* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 30.198.381.280,00 | 30.555.993.680,00 | 28.970.108.080,00 | -1.228.273.200,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | PAUD Sekota Makassar | | 35.256.683.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun* | | | | 0 Unit | 20 Unit | 499.500.000,00 | 2.751.240.280,00 | 3.517.464.080,00 | 3.017.964.080,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0007 | Pengadaan Mebel PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0015 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD* | | | | 16 Orang | 16 Orang | 316.627.200,00 | 317.587.200,00 | 317.587.200,00 | 960.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 323.863.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi* | | | | 2670 Orang | 450 Orang | 2.065.992.000,00 | 2.065.992.000,00 | 5.279.092.000,00 | 3.213.100.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 2.965.496.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen* | | | | 672 Satuan Pendidikan | 600 Satuan Pendidikan | 229.781.000,00 | 241.309.400,00 | 241.309.400,00 | 11.528.400,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 124.004.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP* | | | | 672 Satuan Pendidikan | 666 Satuan Pendidikan | 12.180.000.000,00 | 12.541.793.000,00 | 12.541.793.000,00 | 361.793.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 11.368.123.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0019 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD* | | | | 672 Orang | 500 Orang | 113.633.000,00 | 113.633.000,00 | 61.133.000,00 | -52.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0025 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan* | | | | 672 Dokumen | 4 Dokumen | 269.815.000,00 | 260.515.000,00 | 202.915.000,00 | -66.900.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 248.868.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0030 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah* | | | | 6 Ruang | 2 Ruang | 5.227.424.000,00 | 5.190.584.000,00 | 113.474.600,00 | -5.113.949.400,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 19.785.427.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0047 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar* | | | | 22750 Satuan Pendidikan | 22750 Satuan Pendidikan | 9.295.609.080,00 | 7.073.339.800,00 | 6.695.339.800,00 | -2.600.269.280,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 440.902.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.04 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | *Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dikelola* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 6.544.682.880,00 | 7.886.840.880,00 | 7.836.840.880,00 | 1.292.158.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | PKBM Sekota Makassar | | 6.426.693.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.04.0016 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen* | | | | 44 Satuan Pendidikan | 36 Satuan Pendidikan | 84.360.000,00 | 84.518.000,00 | 79.518.000,00 | -4.842.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 272.625.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP* | | | | 48 Satuan Pendidikan | 36 Satuan Pendidikan | 6.083.302.000,00 | 7.421.702.000,00 | 7.376.702.000,00 | 1.293.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 4.899.028.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.04.0027 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan* | | | | 44 Dokumen | 5 Dokumen | 179.810.000,00 | 183.410.000,00 | 183.410.000,00 | 3.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD\|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 361.214.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.04.0041 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 345.852.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.04.0046 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar* | | | | 5870 Peserta Didik | 5870 Peserta Didik | 197.090.880,00 | 197.090.880,00 | 197.090.880,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 510.557.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.04.0048 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia* | | | | 8 Paket | 8 Paket | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 37.417.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| 3. | **1.01.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | **Persentase Kebutuhan Kurikulum yang Dikembangkan** | | | | **90 Persen** | **90 Persen** | **46.048.000,00** | **46.048.000,00** | **41.198.000,00** | **61.862.000,00** | | | | | | | **107.910.000,00** | |
| | 1.01.03.2.02 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | *Jumlah Kurikulum yang Dikembangkan* | | | | 3 Kurikulum | 3 Kurikulum | 46.048.000,00 | 46.048.000,00 | 41.198.000,00 | -4.850.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | PAUD DAN PNF Kota Makassar | | 107.910.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.03.2.02.0006 | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 46.048.000,00 | 46.048.000,00 | 41.198.000,00 | -4.850.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 107.910.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| 4. | **1.01.04** | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | **Rasio Guru-Murid (PAUD,SD,SMP)<br>Persentase Guru Yang Bersertifikasi (PAUD, SD, SMP)** | | | | **1:18 ; 1:30 ; 1:32<br>39.49; 47.83; 47.88 Guru /Murid<br>Persen** | **1:18 ; 1:30 ; 1:32<br>39.49; 47.83; 47.88 Guru /Murid<br>Persen** | **95.680.000,00** | **95.680.000,00** | **11.680.000,00** | **23.087.000,00** | | | | | | | **118.767.000,00** | |
| | 1.01.04.2.01 | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | *Jumlah Kegiatan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Dilaksanakan* | | | | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 95.680.000,00 | 95.680.000,00 | 11.680.000,00 | -84.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekota Makassar | | 118.767.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.04.2.01.0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 47.840.000,00 | 47.840.000,00 | 5.840.000,00 | -42.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 38.117.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.04.2.01.0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 47.840.000,00 | 47.840.000,00 | 5.840.000,00 | -42.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 80.650.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| 5. | **1.01.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN** | **Persentase Lembaga Pendidikan Yang Diawasi Perizinannya** | | | | **38,15 %** | **38,15 %** | **32.182.000,00** | **32.182.000,00** | **26.182.000,00** | **62.947.000,00** | | | | | | | **95.129.000,00** | |
| | 1.01.05.2.02 | Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | *Jumlah Izin PAUD yang diterbitkan* | | | | 133 Lembaga | 133 Lembaga | 32.182.000,00 | 32.182.000,00 | 26.182.000,00 | -6.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | PAUD DAN PNF Kota Makassar | | 95.129.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.05.2.02.0003 | Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat* | | | | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 32.182.000,00 | 32.182.000,00 | 26.182.000,00 | -6.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan<br>PD|3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan | | | 95.129.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | | **DINAS KESEHATAN** | | | | | | | **466.569.492.024,00** | **528.988.136.645,00** | **560.807.284.744,00** | **94.237.792.720,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **466.569.492.024,00** | **528.988.136.645,00** | **560.807.284.744,00** | **94.237.792.720,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **466.569.492.024,00** | **528.988.136.645,00** | **560.807.284.744,00** | **94.237.792.720,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**<br>**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik** | | | | **100**<br>**90 %**<br>**%** | **100**<br>**90 %**<br>**%** | **191.431.319.195,00** | **210.193.406.838,00** | **210.571.308.875,00** | **-191.431.319.195,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 128.851.180,00 | 214.232.680,00 | 121.832.680,00 | -7.018.500,00 | | | - | -<br>- | Dinas Kesehatan | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 50.800.000,00 | 91.424.000,00 | 46.524.000,00 | -4.276.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.878.900,00 | 8.488.400,00 | 7.288.400,00 | -590.500,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.452.640,00 | 5.638.640,00 | 4.438.640,00 | -14.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.927.200,00 | 8.091.200,00 | 6.891.200,00 | 1.964.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.027.440,00 | 7.897.440,00 | 6.697.440,00 | 1.670.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 12.600.000,00 | 49.828.000,00 | 8.328.000,00 | -4.272.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 43.165.000,00 | 42.865.000,00 | 41.665.000,00 | -1.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun* | | | | 59 Dokumen | 59 Dokumen | 185.779.503.215,00 | 202.941.210.778,00 | 202.941.272.127,00 | 17.161.768.912,00 | | | - | -<br>- | Dinas Kesehatan dan Puskesmas | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 1816 Orang /bulan | 1816 Orang /bulan | 183.802.223.215,00 | 200.564.558.778,00 | 200.564.620.127,00 | 16.762.396.912,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 13 Dokumen | 13 Dokumen | 1.971.840.000,00 | 1.968.744.000,00 | 1.968.744.000,00 | -3.096.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.440.000,00 | 407.908.000,00 | 407.908.000,00 | 402.468.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Jumlah puskesmas yang dibina pengelolaan aset* | | | | 47 Puskesmas | 47 Puskesmas | 108.000.000,00 | 108.000.000,00 | 108.000.000,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | Dinas Kesehatan dan Puskesmas | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 108.000.000,00 | 108.000.000,00 | 108.000.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah penyediaan adminsitrasi perkantoran yang dilaksanakan* | | | | 3 Jenis | 3 Jenis | 599.700.000,00 | 770.145.000,00 | 998.145.000,00 | 398.445.000,00 | | | - | -<br>- | Dinas Kesehatan | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 190 Paket | 190 Paket | 199.200.000,00 | 133.845.000,00 | 133.845.000,00 | -65.355.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 52 Orang | 52 Orang | 292.500.000,00 | 528.300.000,00 | 864.300.000,00 | 571.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 108.000.000,00 | 108.000.000,00 | 0,00 | -108.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah pelayanan administrasi umum yang disediakan* | | | | 7 Jenis | 7 Jenis | 651.810.760,00 | 1.473.506.960,00 | 1.409.506.960,00 | 757.696.200,00 | | | - | -<br>- | Dinas Kesehatan | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 35.646.000,00 | 35.646.000,00 | 35.646.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 27.874.760,00 | 913.280.960,00 | 913.280.960,00 | 885.406.200,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 14 Paket | 14 Paket | 67.410.000,00 | 253.700.000,00 | 253.700.000,00 | 186.290.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 20.880.000,00 | 20.880.000,00 | 20.880.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 105 Laporan | 105 Laporan | 500.000.000,00 | 250.000.000,00 | 186.000.000,00 | -314.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | Dinas Kesehatan | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan* | | | | 10 Jenis | 10 Jenis | 2.700.354.040,00 | 3.232.887.420,00 | 3.174.528.108,00 | 474.174.068,00 | | | - | -<br>- | Dinas Kesehatan | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | -18.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 735.240.000,00 | 760.403.500,00 | 760.396.188,00 | 25.156.188,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 137.434.040,00 | 218.121.520,00 | 217.769.520,00 | 80.335.480,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.809.680.000,00 | 2.236.362.400,00 | 2.196.362.400,00 | 386.682.400,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Barang milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan* | | | | 10 Jenis | 10 Jenis | 1.463.100.000,00 | 1.453.424.000,00 | 1.393.404.000,00 | -69.696.000,00 | | | - | -<br>- | Dinas Kesehatan | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 44.380.000,00 | 44.380.000,00 | 40.880.000,00 | -3.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 286 Unit | 286 Unit | 1.091.330.000,00 | 999.460.000,00 | 942.940.000,00 | -148.390.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 222 Unit | 222 Unit | 225.390.000,00 | 208.680.000,00 | 208.680.000,00 | -16.710.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 102.000.000,00 | 200.904.000,00 | 200.904.000,00 | 98.904.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **266.638.729.109,00** | **309.059.828.727,00** | **339.404.404.589,00** | **-266.638.729.109,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Kota Makassar yang disediakan* | | | | 45 & 3 PKM & RS | 45 & 3 PKM & RS | 36.740.078.873,00 | 46.979.310.537,00 | 60.124.043.037,00 | 23.383.964.164,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0001 | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0002 | Pembangunan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 6.795.910.423,00 | 12.900.988.475,00 | 12.900.988.475,00 | 6.105.078.052,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.01.0003 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun* | | | | 13 Unit | 13 Unit | 28.410.500,00 | 582.080.400,00 | 582.080.400,00 | 553.669.900,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan* | | | | 534 Unit | 534 Unit | 3.153.950,00 | 1.335.981.950,00 | 1.335.981.950,00 | 1.332.828.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0015 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center* | | | | 2310 Unit | 2310 Unit | 384.674.000,00 | 506.528.000,00 | 482.980.000,00 | 98.306.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0022 | Pengembangan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000.000,00 | 10.035.036.800,00 | 10.110.036.700,00 | 110.036.700,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan* | | | | 7 Paket | 7 Paket | 19.218.246.000,00 | 21.315.116.712,00 | 34.467.397.312,00 | 15.249.151.312,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0026 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan* | | | | 7 Paket | 7 Paket | 309.684.000,00 | 303.578.200,00 | 244.578.200,00 | -65.105.800,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan puskesmas dan RSUD* | | | | 83 % | 83 % | 229.409.142.096,00 | 259.510.775.050,00 | 274.915.373.412,00 | 45.506.231.316,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 27619 Orang | 27619 Orang | 73.386.000,00 | 683.886.000,00 | 680.386.000,00 | 607.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 26358 Orang | 26358 Orang | 867.364.000,00 | 2.071.364.000,00 | 2.067.114.000,00 | 1.199.750.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 25102 Orang | 25102 Orang | 260.901.000,00 | 423.501.000,00 | 419.001.000,00 | 158.100.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 105306 Orang | 105306 Orang | 119.154.000,00 | 119.154.000,00 | 114.454.000,00 | -4.700.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 182595 Orang | 182595 Orang | 533.276.420,00 | 597.639.460,00 | 579.639.460,00 | 46.363.040,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 973237 Orang | 973237 Orang | 155.898.000,00 | 1.415.898.000,00 | 1.384.178.000,00 | 1.228.280.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 133953 Orang | 133953 Orang | 34.800.000,00 | 34.800.000,00 | 21.900.000,00 | -12.900.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 318249 Orang | 318249 Orang | 21.155.000,00 | 21.835.000,00 | 11.035.000,00 | -10.120.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 25980 Orang | 25980 Orang | 9.159.000,00 | 9.839.000,00 | 9.839.000,00 | 680.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 3367 Orang | 3367 Orang | 22.547.600,00 | 22.547.600,00 | 22.547.600,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 80448 Orang | 80448 Orang | 78.114.600,00 | 78.114.600,00 | 59.114.600,00 | -19.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 50770 Orang | 50770 Orang | 339.850.000,00 | 339.850.000,00 | 324.850.000,00 | -15.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 19.680.000,00 | 19.830.000,00 | 17.330.000,00 | -2.350.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 8.937.101.960,00 | 3.335.314.960,00 | 2.147.314.960,00 | -6.789.787.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 136.896.000,00 | 136.896.000,00 | 120.846.000,00 | -16.050.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK<br>DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 367.951.000,00 | 661.551.000,00 | 615.551.000,00 | 247.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.302.800,00 | 12.302.800,00 | 230.627.800,00 | 218.325.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK<br>DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 79.801.000,00 | 79.801.000,00 | 79.801.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 45.311.800,00 | 44.711.800,00 | 43.011.800,00 | -2.300.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK<br>DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 240 Orang | 240 Orang | 33.800.000,00 | 33.800.000,00 | 28.050.000,00 | -5.750.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 54 Orang | 54 Orang | 43.814.000,00 | 43.814.000,00 | 38.314.000,00 | -5.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0024 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 19.249.000,00 | 19.249.000,00 | 19.249.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 3.176.352.000,00 | 3.176.532.000,00 | 3.785.510.700,00 | 609.158.700,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 102.219.225.600,00 | 102.154.321.600,00 | 118.154.608.000,00 | 15.935.382.400,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah* | | | | 800 Orang | 800 Orang | 16.852.000,00 | 16.852.000,00 | 14.102.000,00 | -2.750.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* | | | | 50 Paket | 50 Paket | 9.624.000,00 | 8.632.000,00 | 8.632.000,00 | -992.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0029 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat* | | | | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 886.372.600,00 | 806.124.600,00 | 672.824.600,00 | -213.548.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0030 | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas* | | | | 47 Unit | 47 Unit | 2.447.939.000,00 | 2.468.537.400,00 | 1.484.137.400,00 | -963.801.600,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 78.236.183.116,00 | 113.341.159.940,00 | 130.494.163.240,00 | 52.257.980.124,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 47 Dokumen | 47 Dokumen | 21.903.145.000,00 | 19.314.081.690,00 | 5.267.556.902,00 | -16.635.588.098,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.502.040.000,00 | 6.502.040.000,00 | 4.302.040.000,00 | -2.200.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0035 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota* | | | | 20 Unit | 20 Unit | 1.020.000.000,00 | 784.800.000,00 | 344.800.000,00 | -675.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 49.507.200,00 | 48.867.200,00 | 31.667.200,00 | -17.840.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah* | | | | 52 Dokumen | 52 Dokumen | 19.030.000,00 | 19.030.000,00 | 14.330.000,00 | -4.700.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 14898 Orang | 14898 Orang | 170.854.000,00 | 170.854.000,00 | 136.704.000,00 | -34.150.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1083 Orang | 1083 Orang | 211.265.000,00 | 209.960.000,00 | 202.460.000,00 | -8.805.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 135 Orang | 135 Orang | 86.866.000,00 | 85.561.000,00 | 64.961.000,00 | -21.905.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0043 | Pengelolaan Kawasan tanpa rokok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok* | | | | 47 Tatanan | 47 Tatanan | 170.583.400,00 | 168.783.400,00 | 123.083.400,00 | -47.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0045 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 71.790.000,00 | 28.939.000,00 | 28.939.000,00 | -42.851.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 110.800.000,00 | 110.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK<br>DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | *Jumlah Puskesmas yang menerapkan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 45 Puskesmas | 45 Puskesmas | 83.900.000,00 | 2.084.851.000,00 | 1.996.296.000,00 | 1.912.396.000,00 | | | - | -<br>- | Dinas Kesehatan dan Puskesmas | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 83.900.000,00 | 2.084.851.000,00 | 1.991.151.000,00 | 1.907.251.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah perizinan RS Kelas C dan D yang mendapatkan pengendalian dan pengawasan* | | | | 28 RS | 28 RS | 405.608.140,00 | 484.892.140,00 | 2.368.692.140,00 | 1.963.084.000,00 | | | - | -<br>- | Rumah Sakit | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.04.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya* | | | | 28 Unit | 28 Unit | 42.145.140,00 | 18.145.140,00 | 18.145.140,00 | -24.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.04.0002 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar* | | | | 28 Unit | 28 Unit | 54.822.000,00 | 54.822.000,00 | 45.822.000,00 | -9.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.04.0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan* | | | | 28 Unit | 28 Unit | 293.403.000,00 | 314.482.000,00 | 2.207.282.000,00 | 1.913.879.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.04.0004 | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.238.000,00 | 97.443.000,00 | 97.443.000,00 | 82.205.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | **Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Mendapat Pendidikan Dan Pelatihan Teknis** | | | | **100 %** | **100 %** | **420.011.800,00** | **309.538.160,00** | **1.118.441.160,00** | **-420.011.800,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.03.2.01 | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | *Persentase perizinan praktek tenaga kesehatan yang mendapatkan pengendalian dan pengawasan* | | | | 100 % | 100 % | 174.052.800,00 | 148.757.160,00 | 80.957.160,00 | -93.095.640,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.01.0002 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 174.052.800,00 | 148.757.160,00 | 80.957.160,00 | -93.095.640,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | *Jumlah pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan* | | | | 10 Kegiatan | 10 Kegiatan | 47.636.000,00 | 49.832.000,00 | 172.055.000,00 | 124.419.000,00 | | | - | -<br>- | Tenaga Kesehatan | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.02.0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 47.636.000,00 | 49.832.000,00 | 172.055.000,00 | 124.419.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK<br>DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase sumber daya manusia kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi* | | | | 100 % | 100 % | 198.323.000,00 | 110.949.000,00 | 865.429.000,00 | 667.106.000,00 | | | - | -<br>- | Tenaga Kesehatan | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.03.0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya* | | | | 162 Orang | 162 Orang | 198.323.000,00 | 110.949.000,00 | 865.429.000,00 | 667.106.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK<br>DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 4. | **1.02.04** | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | **Persentase Ketersediaan Kebutuhan Farmasi Pada RSUD Dan Puskesmas<br>Persentase Ketersediaan Kebutuhan Alat Kesehatan Pada RSUD** | | | | **100 66 %<br>%** | **100 66 %<br>%** | **674.420.320,00** | **528.820.320,00** | **725.844.320,00** | **-674.420.320,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.04.2.01 | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | *Persentase apotik, toko obat, toko alkes dan optikal serta UMOT yang mendapatkan pengawasan/pemantauan izin* | | | | 100 % | 100 % | 247.823.000,00 | 122.909.000,00 | 125.309.000,00 | -122.514.000,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.01.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 247.823.000,00 | 122.909.000,00 | 125.309.000,00 | -122.514.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK<br>DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.04.2.02 | Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | *Jumlah PKRT kelas 1 yang mengendalian dan pengawasan* | | | | 10 PKRT | 10 PKRT | 117.862.000,00 | 100.162.000,00 | 51.522.000,00 | -66.340.000,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.02.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 117.862.000,00 | 100.162.000,00 | 51.522.000,00 | -66.340.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.03 | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | *Persentase Sarana PIRT baru yang diawasi* | | | | 100 % | 100 % | 231.752.000,00 | 228.766.000,00 | 296.165.000,00 | 64.413.000,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.03.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 231.752.000,00 | 228.766.000,00 | 296.165.000,00 | 64.413.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.04 | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | *Jumlah sertifikat laik hygiene TPM, Rumah Makan, DAMIU, Jasa Boga yang dipantau* | | | | 3265 sarana | 3265 sarana | 9.300.320,00 | 9.300.320,00 | 9.300.320,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.04.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 9.300.320,00 | 9.300.320,00 | 9.300.320,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.05 | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | *Jumlah stiker pembinaan makanan jajanan dan sentra makanan jajanan* | | | | 3288 Stiker | 3288 Stiker | 50.040.000,00 | 50.040.000,00 | 50.040.000,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.05.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 50.040.000,00 | 50.040.000,00 | 50.040.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.06 | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | *Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga* | | | | 8 Kegiatan | 8 Kegiatan | 17.643.000,00 | 17.643.000,00 | 193.508.000,00 | 175.865.000,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.06.0001 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan* | | | | 8 Unit | 8 Unit | 17.643.000,00 | 17.643.000,00 | 193.508.000,00 | 175.865.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 5. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **Persentase Posyandu Aktif Cakupan Bayi Mendapat Asi Eksklusif** | | | | **100<br>60 %<br>%** | **100<br>60 %<br>%** | **7.405.011.600,00** | **8.896.542.600,00** | **8.987.285.800,00** | **-7.405.011.600,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah posyanduyang menerima bantuan biaya operasional* | | | | 1012 Posyandu | 1012 Posyandu | 7.268.113.040,00 | 8.759.644.040,00 | 8.734.844.040,00 | 1.466.731.000,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 7.268.113.040,00 | 8.759.644.040,00 | 8.734.844.040,00 | 1.466.731.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.02 | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah kegiatan promosi kegiatan dan gerakan hidup bersih dan sehat yang diselenggarakan* | | | | 12 Kegiatan | 12 Kegiatan | 136.898.560,00 | 136.898.560,00 | 127.241.760,00 | -9.656.800,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.02.0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 136.898.560,00 | 136.898.560,00 | 127.241.760,00 | -9.656.800,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan Upaya Keseahtan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan* | | | | 12 Kegiatan | 12 Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 125.200.000,00 | 125.200.000,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 120.500.000,00 | 120.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK<br>DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA | - | -<br>- | | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS ANDALAS** | | | | | | | **1.400.202.000,00** | **1.502.233.200,00** | **1.499.093.200,00** | **98.891.200,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **1.400.202.000,00** | **1.502.233.200,00** | **1.499.093.200,00** | **98.891.200,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **1.400.202.000,00** | **1.502.233.200,00** | **1.499.093.200,00** | **98.891.200,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **806.640.000,00** | **806.640.000,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 0,00 | 806.640.000,00 | 806.640.000,00 | 806.640.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | - | 1 Unit Kerja | 0,00 | 806.640.000,00 | 806.640.000,00 | 806.640.000,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS | - | -<br>- | | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.375.202.000,00** | **689.750.600,00** | **686.610.600,00** | **-1.375.202.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 1.374.394.962,00 | 689.750.600,00 | 686.610.600,00 | -687.784.362,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 291 Orang | 291 Orang | 15.400.000,00 | 27.200.000,00 | 27.200.000,00 | 11.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 260 Orang | 260 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 4686 Orang | 4686 Orang | 32.200.000,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | -14.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 35 Orang | 0,00 | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 694 Orang | 694 Orang | 6.000.000,00 | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | 8.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 22.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -22.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 143.428.960,00 | 150.855.000,00 | 150.855.000,00 | 7.426.040,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.800.000,00 | 8.450.000,00 | 8.450.000,00 | -350.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 40.860.000,00 | 16.106.000,00 | 16.106.000,00 | -24.754.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 100 Orang | 0,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 80.400.000,00 | 78.150.000,00 | 78.150.000,00 | -2.250.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 956.826.002,00 | 321.837.600,00 | 318.697.600,00 | -638.128.402,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS<br>PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.580.000,00 | 3.704.000,00 | 3.704.000,00 | 1.124.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | -900.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 14.400.000,00 | 16.048.000,00 | 16.048.000,00 | 1.648.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 23.000.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | -21.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 807.038,00 | 0,00 | 0,00 | -807.038,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 807.038,00 | 0,00 | 0,00 | -807.038,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **25.000.000,00** | **5.842.600,00** | **5.842.600,00** | **-25.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 25.000.000,00 | 5.842.600,00 | 5.842.600,00 | -19.157.400,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | 5.842.600,00 | 5.842.600,00 | -19.157.400,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS ANTANG** | | | | | | | **2.725.440.080,00** | **2.731.208.663,00** | **2.724.330.263,00** | **-1.109.817,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **2.725.440.080,00** | **2.731.208.663,00** | **2.724.330.263,00** | **-1.109.817,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **2.725.440.080,00** | **2.731.208.663,00** | **2.724.330.263,00** | **-1.109.817,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **1.891.260.000,00** | **1.891.260.000,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 0,00 | 1.891.260.000,00 | 1.891.260.000,00 | 1.891.260.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | - | 0 Unit Kerja | 0,00 | 1.891.260.000,00 | 1.891.260.000,00 | 1.891.260.000,00 | Kota Makassar, Manggala, Antang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.708.840.080,00** | **839.948.663,00** | **833.070.263,00** | **-2.708.840.080,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 2.708.825.080,00 | 839.948.663,00 | 833.070.263,00 | -1.875.754.817,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 632 Orang | 30 Orang | 32.000.000,00 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 48.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 4303 Orang | 4303 Orang | 48.200.000,00 | 18.400.000,00 | 18.400.000,00 | -29.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 0 Orang | 0,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 665 Orang | 665 Orang | 18.150.000,00 | 18.600.000,00 | 18.600.000,00 | 450.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 100 Orang | 0 Orang | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 217.333.000,00 | 164.016.031,00 | 164.016.031,00 | -53.316.969,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 17.400.000,00 | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | -10.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 72.400.000,00 | 43.600.000,00 | 43.600.000,00 | -28.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 0 Orang | 0,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 75.900.000,00 | 87.526.000,00 | 87.526.000,00 | 11.626.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 2.060.452.080,00 | 348.883.632,00 | 342.005.232,00 | -1.718.446.848,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.500.000,00 | 4.931.000,00 | 4.931.000,00 | 431.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | -450.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 6 Orang | 6 Orang | 24.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -24.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.100.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 16.440.000,00 | 43.600.000,00 | 43.600.000,00 | 27.160.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 103.300.000,00 | 3.592.000,00 | 3.592.000,00 | -99.708.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **16.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-16.600.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 16.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -16.600.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 16.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -16.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS ANTANG PERUMNAS** | | | | | | | **2.774.890.240,00** | **2.677.907.780,00** | **2.674.823.780,00** | **-100.066.460,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **2.774.890.240,00** | **2.677.907.780,00** | **2.674.823.780,00** | **-100.066.460,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **2.774.890.240,00** | **2.677.907.780,00** | **2.674.823.780,00** | **-100.066.460,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **1.756.218.780,00** | **1.756.218.780,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 0,00 | 1.756.218.780,00 | 1.756.218.780,00 | 1.756.218.780,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | - | 1 Unit Kerja | 0,00 | 1.756.218.780,00 | 1.756.218.780,00 | 1.756.218.780,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.687.362.240,00** | **910.289.000,00** | **907.205.000,00** | **-2.687.362.240,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 2.686.769.240,00 | 910.289.000,00 | 907.205.000,00 | -1.779.564.240,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 600 Orang | 600 Orang | 24.600.000,00 | 84.000.000,00 | 84.000.000,00 | 59.400.000,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 492 Orang | 492 Orang | 7.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 2820 Orang | 2820 Orang | 52.500.000,00 | 26.400.000,00 | 26.400.000,00 | -26.100.000,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 24 Orang | 0,00 | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1020 Orang | 1020 Orang | 6.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 3.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 252.260.000,00 | 161.318.000,00 | 161.318.000,00 | -90.942.000,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 18.100.000,00 | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | -5.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 28.400.000,00 | 26.600.000,00 | 26.600.000,00 | -1.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 96.550.000,00 | 130.634.000,00 | 130.634.000,00 | 34.084.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 2.071.769.240,00 | 348.471.000,00 | 345.387.000,00 | -1.726.382.240,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS<br>PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.710.000,00 | 5.632.000,00 | 5.632.000,00 | 922.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 36.680.000,00 | 58.684.000,00 | 58.684.000,00 | 22.004.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 67.800.000,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | -66.750.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 30.600.000,00 | 30.600.000,00 | 30.600.000,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 593.000,00 | 0,00 | 0,00 | -593.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 593.000,00 | 0,00 | 0,00 | -593.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **87.528.000,00** | **11.400.000,00** | **11.400.000,00** | **-87.528.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 87.528.000,00 | 11.400.000,00 | 11.400.000,00 | -76.128.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 87.528.000,00 | 11.400.000,00 | 11.400.000,00 | -76.128.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS ANTARA** | | | | | | | **1.702.542.240,00** | **1.541.193.000,00** | **1.528.501.199,00** | **-174.041.041,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **1.702.542.240,00** | **1.541.193.000,00** | **1.528.501.199,00** | **-174.041.041,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **1.702.542.240,00** | **1.541.193.000,00** | **1.528.501.199,00** | **-174.041.041,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **669.060.000,00** | **669.060.000,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 0,00 | 669.060.000,00 | 669.060.000,00 | 669.060.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | - | 1 Unit Kerja | 0,00 | 669.060.000,00 | 669.060.000,00 | 669.060.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.593.742.240,00** | **863.133.000,00** | **850.441.199,00** | **-1.593.742.240,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 1.593.669.240,00 | 863.133.000,00 | 850.441.199,00 | -743.228.041,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 248 Orang | 248 Orang | 13.500.000,00 | 72.900.000,00 | 72.900.000,00 | 59.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 229 Orang | 229 Orang | 20.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.100.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1606 Orang | 1606 Orang | 51.300.000,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | -35.300.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 31 Orang | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 397 Orang | 397 Orang | 7.200.000,00 | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | 7.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 12 Orang | 12 Orang | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 220.890.000,00 | 180.382.000,00 | 180.382.000,00 | -40.508.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.150.000,00 | 5.900.000,00 | 5.900.000,00 | -1.250.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 53.456.000,00 | 32.560.000,00 | 32.560.000,00 | -20.896.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 1000 Orang | 0,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 89.930.000,00 | 110.727.000,00 | 110.727.000,00 | 20.797.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 981.183.240,00 | 349.172.000,00 | 336.480.199,00 | -644.703.041,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS<br>PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.860.000,00 | 5.194.000,00 | 5.194.000,00 | 334.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 40 Orang | 40 Orang | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 27.000.000,00 | 48.098.000,00 | 48.098.000,00 | 21.098.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 92.500.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | -91.700.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 1000 Dokumen | 0,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | -73.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | -73.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **108.800.000,00** | **9.000.000,00** | **9.000.000,00** | **-108.800.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 108.800.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | -99.800.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 108.800.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | -99.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS BALLAPARANG** | | | | | | | **2.379.282.800,00** | **2.232.270.632,00** | **2.222.252.232,00** | **-157.030.568,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **2.379.282.800,00** | **2.232.270.632,00** | **2.222.252.232,00** | **-157.030.568,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **2.379.282.800,00** | **2.232.270.632,00** | **2.222.252.232,00** | **-157.030.568,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **1.490.796.000,00** | **1.490.796.000,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 0,00 | 1.490.796.000,00 | 1.490.796.000,00 | 1.490.796.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | - | 0 Unit Kerja | 0,00 | 1.490.796.000,00 | 1.490.796.000,00 | 1.490.796.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.338.032.800,00** | **735.794.632,00** | **725.776.232,00** | **-2.338.032.800,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 2.337.676.800,00 | 735.794.632,00 | 725.776.232,00 | -1.611.900.568,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 597 Orang | 597 Orang | 36.000.000,00 | 58.365.000,00 | 58.365.000,00 | 22.365.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 597 Orang | 597 Orang | 9.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.960.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 4310 Orang | 4310 Orang | 27.200.000,00 | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | 10.300.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 0 Orang | 0,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 900 Orang | 900 Orang | 18.000.000,00 | 21.600.000,00 | 21.600.000,00 | 3.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 170.420.000,00 | 125.924.000,00 | 125.924.000,00 | -44.496.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.900.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | -2.900.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.700.000,00 | 12.634.000,00 | 12.634.000,00 | 6.934.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 0 Orang | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 123.000.000,00 | 88.060.000,00 | 88.060.000,00 | -34.940.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 1.805.656.800,00 | 339.030.632,00 | 329.012.232,00 | -1.476.644.568,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.840.000,00 | 3.981.000,00 | 3.981.000,00 | 141.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 900 Orang | 900 Orang | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 23.600.000,00 | 20.400.000,00 | 20.400.000,00 | -3.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.200.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | -99.700.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 0 Dokumen | 0,00 | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 356.000,00 | 0,00 | 0,00 | -356.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 356.000,00 | 0,00 | 0,00 | -356.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **41.250.000,00** | **5.680.000,00** | **5.680.000,00** | **-41.250.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 41.250.000,00 | 5.680.000,00 | 5.680.000,00 | -35.570.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 41.250.000,00 | 5.680.000,00 | 5.680.000,00 | -35.570.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS BANGKALA** | | | | | | | **2.061.554.400,00** | **2.001.100.000,00** | **1.997.791.800,00** | **-63.762.600,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **2.061.554.400,00** | **2.001.100.000,00** | **1.997.791.800,00** | **-63.762.600,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **2.061.554.400,00** | **2.001.100.000,00** | **1.997.791.800,00** | **-63.762.600,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **1.092.192.000,00** | **1.092.192.000,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 0,00 | 1.092.192.000,00 | 1.092.192.000,00 | 1.092.192.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | - | 0 Unit Kerja | 0,00 | 1.092.192.000,00 | 1.092.192.000,00 | 1.092.192.000,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.040.825.400,00** | **893.208.000,00** | **889.899.800,00** | **-2.040.825.400,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 2.040.825.400,00 | 893.208.000,00 | 889.899.800,00 | -1.150.925.600,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 641 Orang | 641 Orang | 17.160.000,00 | 83.640.000,00 | 83.640.000,00 | 66.480.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 641 Orang | 641 Orang | 31.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | -31.900.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 3670 Orang | 3670 Orang | 57.200.000,00 | 14.800.000,00 | 14.800.000,00 | -42.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 0 Orang | 0,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 2926 Orang | 2926 Orang | 21.600.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 8.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 220.360.000,00 | 191.683.000,00 | 191.683.000,00 | -28.677.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 0 Dokumen | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 13.100.000,00 | 17.400.000,00 | 17.400.000,00 | 4.300.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 33.958.000,00 | 28.181.000,00 | 28.181.000,00 | -5.777.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 0 Orang | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 149.600.000,00 | 80.600.000,00 | 80.600.000,00 | -69.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 1.355.057.400,00 | 354.417.000,00 | 351.108.800,00 | -1.003.948.600,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.650.000,00 | 5.452.000,00 | 5.452.000,00 | 802.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 2926 Orang | 2926 Orang | 15.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 21.600.000,00 | 24.035.000,00 | 24.035.000,00 | 2.435.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 96.240.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | -95.040.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 0 Dokumen | 0,00 | 28.800.000,00 | 28.800.000,00 | 28.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi* | | | | - | 0 Dokumen | 0,00 | 18.200.000,00 | 18.200.000,00 | 18.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **20.729.000,00** | **15.700.000,00** | **15.700.000,00** | **-20.729.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 20.729.000,00 | 15.700.000,00 | 15.700.000,00 | -5.029.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.729.000,00 | 15.700.000,00 | 15.700.000,00 | -5.029.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS BARA-BARAYA** | | | | | | | **4.415.560.680,00** | **3.845.191.000,00** | **3.844.256.600,00** | **-571.304.080,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **4.415.560.680,00** | **3.845.191.000,00** | **3.844.256.600,00** | **-571.304.080,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **4.415.560.680,00** | **3.845.191.000,00** | **3.844.256.600,00** | **-571.304.080,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **3.222.000.000,00** | **3.222.000.000,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 0,00 | 3.222.000.000,00 | 3.222.000.000,00 | 3.222.000.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | - | 1 Unit Kerja | 0,00 | 3.222.000.000,00 | 3.222.000.000,00 | 3.222.000.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **4.411.724.680,00** | **620.167.000,00** | **619.232.600,00** | **-4.411.724.680,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 4.411.722.680,00 | 620.167.000,00 | 619.232.600,00 | -3.792.490.080,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 717 Orang | 717 Orang | 32.400.000,00 | 40.320.000,00 | 40.320.000,00 | 7.920.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 678 Orang | 678 Orang | 3.729.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.729.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 4751 Orang | 4751 Orang | 8.100.000,00 | 10.300.000,00 | 10.300.000,00 | 2.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 1 Orang | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 100 Orang | 0,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Bara Baraya | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 7 Orang | 7 Orang | 8.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.100.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 108.796.000,00 | 111.471.000,00 | 111.471.000,00 | 2.675.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 100 Dokumen | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Bara Baraya | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.600.000,00 | 9.300.000,00 | 9.300.000,00 | 700.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.810.000,00 | 16.800.000,00 | 16.800.000,00 | -4.010.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 1 Orang | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 83.600.000,00 | 26.300.000,00 | 26.300.000,00 | -57.300.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.047.947.680,00 | 328.906.000,00 | 327.971.600,00 | -3.719.976.080,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.490.000,00 | 2.970.000,00 | 2.970.000,00 | 480.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 400 Orang | 400 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 82.250.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -81.250.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 100 Dokumen | 0,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Bara Baraya | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi* | | | | - | 0 Dokumen | 0,00 | 33.100.000,00 | 33.100.000,00 | 33.100.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **3.836.000,00** | **3.024.000,00** | **3.024.000,00** | **-3.836.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 3.836.000,00 | 3.024.000,00 | 3.024.000,00 | -812.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.836.000,00 | 3.024.000,00 | 3.024.000,00 | -812.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS BAROMBONG** | | | | | | | **2.207.716.040,00** | **2.248.346.632,00** | **2.248.155.232,00** | **40.439.192,00** | | | | | | | **0,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **2.207.716.040,00** | **2.248.346.632,00** | **2.248.155.232,00** | **40.439.192,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **2.207.716.040,00** | **2.248.346.632,00** | **2.248.155.232,00** | **40.439.192,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **1.271.748.000,00** | **1.271.748.000,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 0,00 | 1.271.748.000,00 | 1.271.748.000,00 | 1.271.748.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | - | 0 Unit Kerja | 0,00 | 1.271.748.000,00 | 1.271.748.000,00 | 1.271.748.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.152.266.040,00** | **962.948.632,00** | **962.757.232,00** | **-2.152.266.040,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 2.151.206.040,00 | 962.948.632,00 | 962.757.232,00 | -1.188.448.808,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 349 Orang | 349 Orang | 15.600.000,00 | 141.960.000,00 | 141.960.000,00 | 126.360.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 349 Orang | 349 Orang | 26.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | -26.640.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 7606 Orang | 7606 Orang | 39.600.000,00 | 8.800.000,00 | 8.800.000,00 | -30.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 0 Orang | 0,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Barombong | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1358 Orang | 1358 Orang | 23.400.000,00 | 33.600.000,00 | 33.600.000,00 | 10.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 253.288.000,00 | 183.474.000,00 | 183.474.000,00 | -69.814.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 0 Dokumen | 0,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Barombong | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.500.000,00 | 12.890.000,00 | 12.890.000,00 | 2.390.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 63.300.000,00 | 30.180.000,00 | 30.180.000,00 | -33.120.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 0 Orang | 0,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Barombong | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 145.500.000,00 | 114.600.000,00 | 114.600.000,00 | -30.900.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 1.445.818.040,00 | 362.172.632,00 | 361.981.232,00 | -1.083.836.808,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.160.000,00 | 6.072.000,00 | 6.072.000,00 | 912.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1358 Orang | 1358 Orang | 15.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.600.000,00 | 23.400.000,00 | 23.400.000,00 | -2.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 78.600.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | -78.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 0 Dokumen | 0,00 | 20.400.000,00 | 20.400.000,00 | 20.400.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Barombong | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 1.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.060.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.060.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **55.450.000,00** | **13.650.000,00** | **13.650.000,00** | **-55.450.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 55.450.000,00 | 13.650.000,00 | 13.650.000,00 | -41.800.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 55.450.000,00 | 13.650.000,00 | 13.650.000,00 | -41.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS BARRANG LOMPO** | | | | | | | **2.638.083.200,00** | **2.258.352.604,00** | **2.258.352.604,00** | **-379.730.596,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **2.638.083.200,00** | **2.258.352.604,00** | **2.258.352.604,00** | **-379.730.596,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **2.638.083.200,00** | **2.258.352.604,00** | **2.258.352.604,00** | **-379.730.596,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **1.359.840.000,00** | **1.359.840.000,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 0,00 | 1.359.840.000,00 | 1.359.840.000,00 | 1.359.840.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | - | 1 Unit Kerja | 0,00 | 1.359.840.000,00 | 1.359.840.000,00 | 1.359.840.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.618.323.200,00** | **892.252.604,00** | **892.252.604,00** | **-2.618.323.200,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 2.611.891.200,00 | 892.252.604,00 | 892.252.604,00 | -1.719.638.596,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 188 Orang | 188 Orang | 86.400.000,00 | 154.980.000,00 | 154.980.000,00 | 68.580.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 195 Orang | 195 Orang | 4.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.640.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 4992 Orang | 4992 Orang | 57.000.000,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | -41.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 300 Orang | 0,00 | 10.889.000,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 0 Orang | 0,00 | 17.400.000,00 | 17.400.000,00 | 17.400.000,00 | Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 417 Orang | 417 Orang | 16.200.000,00 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 5.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 276.708.000,00 | 169.292.000,00 | 169.292.000,00 | -107.416.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 0 Dokumen | 0,00 | 7.100.000,00 | 7.100.000,00 | 7.100.000,00 | Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 28.700.000,00 | 22.951.000,00 | 22.951.000,00 | -5.749.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.100.000,00 | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | -2.100.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 0 Orang | 0,00 | 8.100.000,00 | 8.100.000,00 | 8.100.000,00 | Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 203.500.000,00 | 120.900.000,00 | 120.900.000,00 | -82.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 1.770.443.200,00 | 289.360.604,00 | 289.360.604,00 | -1.481.082.596,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | - | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 417 Orang | 417 Orang | 10.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.500.000,00 | 22.280.000,00 | 22.280.000,00 | 12.780.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 116.100.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | -113.100.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 10.889.000,00 | 10.889.000,00 | Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 6.432.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.432.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.432.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.432.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **19.760.000,00** | **6.260.000,00** | **6.260.000,00** | **-19.760.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 19.760.000,00 | 6.260.000,00 | 6.260.000,00 | -13.500.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 19.760.000,00 | 6.260.000,00 | 6.260.000,00 | -13.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS BATUA** | | | | | | | **4.200.050.000,00** | **4.335.793.000,00** | **4.335.743.000,00** | **135.693.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **4.200.050.000,00** | **4.335.793.000,00** | **4.335.743.000,00** | **135.693.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **4.200.050.000,00** | **4.335.793.000,00** | **4.335.743.000,00** | **135.693.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **3.308.868.000,00** | **3.308.868.000,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 0,00 | 3.308.868.000,00 | 3.308.868.000,00 | 3.308.868.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | - | 1 Unit Kerja | 0,00 | 3.308.868.000,00 | 3.308.868.000,00 | 3.308.868.000,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **4.133.257.000,00** | **1.020.745.000,00** | **1.020.695.000,00** | **-4.133.257.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 4.133.173.000,00 | 1.020.745.000,00 | 1.020.695.000,00 | -3.112.478.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1067 Orang | 1067 Orang | 25.200.000,00 | 83.520.000,00 | 83.520.000,00 | 58.320.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 980 Orang | 980 Orang | 8.160.000,00 | 8.160.000,00 | 8.160.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 4360 Orang | 4360 Orang | 54.200.000,00 | 37.800.000,00 | 37.800.000,00 | -16.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 130 Orang | 0,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 601 Orang | 601 Orang | 11.000.000,00 | 21.800.000,00 | 21.800.000,00 | 10.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 288.276.000,00 | 266.843.000,00 | 266.843.000,00 | -21.433.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 5.250.000,00 | 5.250.000,00 | 5.250.000,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 26.900.000,00 | 19.800.000,00 | 19.800.000,00 | -7.100.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 47.700.000,00 | 23.132.000,00 | 23.132.000,00 | -24.568.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 130 Orang | 0,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 154.800.000,00 | 155.750.000,00 | 155.750.000,00 | 950.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3.304.737.000,00 | 293.198.000,00 | 293.148.000,00 | -3.011.589.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.000.000,00 | 6.871.000,00 | 6.871.000,00 | 871.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 601 Orang | 601 Orang | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 46.800.000,00 | 34.321.000,00 | 34.321.000,00 | -12.479.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 129.900.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | -126.300.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | -84.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | -84.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **66.793.000,00** | **6.180.000,00** | **6.180.000,00** | **-66.793.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 66.793.000,00 | 6.180.000,00 | 6.180.000,00 | -60.613.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 66.793.000,00 | 6.180.000,00 | 6.180.000,00 | -60.613.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS BIRA** | | | | | | | **2.751.545.000,00** | **2.523.676.672,00** | **2.520.536.672,00** | **-231.008.328,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **2.751.545.000,00** | **2.523.676.672,00** | **2.520.536.672,00** | **-231.008.328,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **2.751.545.000,00** | **2.523.676.672,00** | **2.520.536.672,00** | **-231.008.328,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **1.217.688.000,00** | **1.217.688.000,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 0,00 | 1.217.688.000,00 | 1.217.688.000,00 | 1.217.688.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | - | 1 Unit Kerja | 0,00 | 1.217.688.000,00 | 1.217.688.000,00 | 1.217.688.000,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.691.995.000,00** | **1.299.508.672,00** | **1.296.368.672,00** | **-2.691.995.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 2.691.788.000,00 | 1.299.508.672,00 | 1.296.368.672,00 | -1.395.419.328,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 417 Orang | 417 Orang | 88.560.000,00 | 147.840.000,00 | 147.840.000,00 | 59.280.000,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Parang Loe Kota Makassar, Tamalanrea, Bira | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 407 Orang | 407 Orang | 4.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.190.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1937 Orang | 1937 Orang | 84.840.000,00 | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | -60.840.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 200 Orang | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 441 Orang | 441 Orang | 13.000.000,00 | 32.400.000,00 | 32.400.000,00 | 19.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 371.068.000,00 | 274.537.000,00 | 274.537.000,00 | -96.531.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 43.500.000,00 | 43.500.000,00 | 43.500.000,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 13.200.000,00 | 20.100.000,00 | 20.100.000,00 | 6.900.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 24.280.000,00 | 24.539.000,00 | 24.539.000,00 | 259.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 80 Orang | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 307.430.000,00 | 200.600.000,00 | 200.600.000,00 | -106.830.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 1.565.540.000,00 | 436.630.672,00 | 433.490.672,00 | -1.132.049.328,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.040.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 441 Orang | 441 Orang | 9.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 39.000.000,00 | 71.202.000,00 | 71.202.000,00 | 32.202.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 162.240.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | -161.680.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 207.000,00 | 0,00 | 0,00 | -207.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 207.000,00 | 0,00 | 0,00 | -207.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **59.550.000,00** | **6.480.000,00** | **6.480.000,00** | **-59.550.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 59.550.000,00 | 6.480.000,00 | 6.480.000,00 | -53.070.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 59.550.000,00 | 6.480.000,00 | 6.480.000,00 | -53.070.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS BULUROKENG** | | | | | | | **1.886.769.960,00** | **2.107.538.864,00** | **2.104.207.464,00** | **217.437.504,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **1.886.769.960,00** | **2.107.538.864,00** | **2.104.207.464,00** | **217.437.504,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **1.886.769.960,00** | **2.107.538.864,00** | **2.104.207.464,00** | **217.437.504,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **1.142.520.000,00** | **1.142.520.000,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 0,00 | 1.142.520.000,00 | 1.142.520.000,00 | 1.142.520.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | - | 1 Unit Kerja | 0,00 | 1.142.520.000,00 | 1.142.520.000,00 | 1.142.520.000,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.861.809.960,00** | **965.018.864,00** | **961.687.464,00** | **-1.861.809.960,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 1.861.155.960,00 | 965.018.864,00 | 961.687.464,00 | -899.468.496,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 365 Orang | 365 Orang | 39.360.000,00 | 139.680.000,00 | 139.680.000,00 | 100.320.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 4.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.640.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 46.150.000,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | -30.150.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 0 Orang | 0,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1465 Orang | 1465 Orang | 21.600.000,00 | 31.200.000,00 | 31.200.000,00 | 9.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 243.316.000,00 | 196.972.000,00 | 196.972.000,00 | -46.344.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 0 Dokumen | 0,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 32.900.000,00 | 13.450.000,00 | 13.450.000,00 | -19.450.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 59.920.000,00 | 48.222.000,00 | 48.222.000,00 | -11.698.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 0 Orang | 0,00 | 7.600.000,00 | 7.600.000,00 | 7.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 139.100.000,00 | 95.980.000,00 | 95.980.000,00 | -43.120.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.088.849.960,00 | 371.683.864,00 | 368.352.464,00 | -720.497.496,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.320.000,00 | 5.990.000,00 | 5.990.000,00 | 670.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 825 Orang | 825 Orang | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.800.000,00 | 19.041.000,00 | 19.041.000,00 | 11.241.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 159.000.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | -156.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 0 Dokumen | 0,00 | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 654.000,00 | 0,00 | 0,00 | -654.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 654.000,00 | 0,00 | 0,00 | -654.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **24.960.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-24.960.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 24.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | -24.960.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 24.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | -24.960.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS CENDRAWASIH** | | | | | | | **2.622.343.000,00** | **2.620.327.000,00** | **2.617.531.000,00** | **-4.812.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **2.622.343.000,00** | **2.620.327.000,00** | **2.617.531.000,00** | **-4.812.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **2.622.343.000,00** | **2.620.327.000,00** | **2.617.531.000,00** | **-4.812.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **1.829.184.000,00** | **1.829.184.000,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 0,00 | 1.829.184.000,00 | 1.829.184.000,00 | 1.829.184.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | - | 0 Unit Kerja | 0,00 | 1.829.184.000,00 | 1.829.184.000,00 | 1.829.184.000,00 | Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.580.523.000,00** | **791.143.000,00** | **788.347.000,00** | **-2.580.523.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 2.580.416.000,00 | 791.143.000,00 | 788.347.000,00 | -1.792.069.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 740 Orang | 740 Orang | 44.520.000,00 | 29.800.000,00 | 29.800.000,00 | -14.720.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 635 Orang | 635 Orang | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 2331 Orang | 2331 Orang | 37.400.000,00 | 10.400.000,00 | 10.400.000,00 | -27.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 735 Orang | 735 Orang | 12.000.000,00 | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | 2.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 196.120.000,00 | 185.771.000,00 | 185.771.000,00 | -10.349.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 0 Dokumen | 0,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 44.200.000,00 | 27.600.000,00 | 27.600.000,00 | -16.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.900.000,00 | 8.233.000,00 | 8.233.000,00 | -667.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 0 Orang | 0,00 | 19.200.000,00 | 19.200.000,00 | 19.200.000,00 | Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 91.300.000,00 | 67.570.000,00 | 67.570.000,00 | -23.730.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 2.047.266.000,00 | 345.150.000,00 | 342.354.000,00 | -1.704.912.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.890.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.890.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 735 Orang | 735 Orang | 7.200.000,00 | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 2.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.300.000,00 | 38.419.000,00 | 38.419.000,00 | 32.119.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 76.320.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | -75.120.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 0 Dokumen | 0,00 | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi* | | | | - | 0 Dokumen | 0,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | -107.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | -107.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **41.820.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-41.820.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 41.820.000,00 | 0,00 | 0,00 | -41.820.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 41.820.000,00 | 0,00 | 0,00 | -41.820.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS DAHLIA** | | | | | | | **2.283.648.040,00** | **2.100.295.720,00** | **2.100.295.720,00** | **-183.352.320,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **2.283.648.040,00** | **2.100.295.720,00** | **2.100.295.720,00** | **-183.352.320,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **2.283.648.040,00** | **2.100.295.720,00** | **2.100.295.720,00** | **-183.352.320,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **1.420.200.000,00** | **1.420.200.000,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 0,00 | 1.420.200.000,00 | 1.420.200.000,00 | 1.420.200.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | - | 1 Unit Kerja | 0,00 | 1.420.200.000,00 | 1.420.200.000,00 | 1.420.200.000,00 | Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.229.198.040,00** | **670.045.720,00** | **670.045.720,00** | **-2.229.198.040,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 2.225.445.040,00 | 670.045.720,00 | 670.045.720,00 | -1.555.399.320,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 390 Orang | 390 Orang | 8.800.000,00 | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 19.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 294 Orang | 294 Orang | 15.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 2136 Orang | 2136 Orang | 13.000.000,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 5.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 0 Orang | 0,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1768 Orang | 1768 Orang | 9.600.000,00 | 11.600.000,00 | 11.600.000,00 | 2.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 157.892.000,00 | 114.402.000,00 | 114.402.000,00 | -43.490.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 0 Dokumen | 0,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 13.600.000,00 | 4.732.000,00 | 4.732.000,00 | -8.868.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 44.600.000,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | -40.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 0 Orang | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 80.400.000,00 | 92.870.000,00 | 92.870.000,00 | 12.470.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 1.799.053.040,00 | 322.688.720,00 | 322.688.720,00 | -1.476.364.320,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 177 Orang | 177 Orang | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 33.100.000,00 | 17.803.000,00 | 17.803.000,00 | -15.297.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 44.600.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | -42.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 0 Dokumen | 0,00 | 45.600.000,00 | 45.600.000,00 | 45.600.000,00 | Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 3.753.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.753.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.753.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.753.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **54.450.000,00** | **10.050.000,00** | **10.050.000,00** | **-54.450.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 54.450.000,00 | 10.050.000,00 | 10.050.000,00 | -44.400.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 54.450.000,00 | 10.050.000,00 | 10.050.000,00 | -44.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS DAYA** | | | | | | | **1.721.520.000,00** | **1.079.434.750,00** | **0,00** | **-1.721.520.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **1.721.520.000,00** | **1.079.434.750,00** | **0,00** | **-1.721.520.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **1.721.520.000,00** | **1.079.434.750,00** | **0,00** | **-1.721.520.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **424.620.000,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 0,00 | 424.620.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | - | 0 Unit Kerja | 0,00 | 424.620.000,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Daya | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.721.520.000,00** | **650.114.750,00** | **0,00** | **-1.721.520.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 1.721.520.000,00 | 644.969.750,00 | 0,00 | -1.721.520.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 21.700.000,00 | 69.840.000,00 | 0,00 | -21.700.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 13.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 51.991.000,00 | 5.600.000,00 | 0,00 | -51.991.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 0 Orang | 0,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Daya | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 12.600.000,00 | 10.800.000,00 | 0,00 | -12.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 255.280.000,00 | 134.961.000,00 | 0,00 | -255.280.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 0 Dokumen | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Daya | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 24.000.000,00 | 18.100.000,00 | 0,00 | -24.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.580.000,00 | 13.840.000,00 | 0,00 | -30.580.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 0 Orang | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Daya | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 124.150.000,00 | 70.530.000,00 | 0,00 | -124.150.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 1.187.719.000,00 | 289.208.750,00 | 0,00 | -1.187.719.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 3.590.000,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 11.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 0 Dokumen | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Daya | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 0,00 | 5.145.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 5.145.000,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **4.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 4.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 4.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **PUSKESMAS JONGAYA** | | | | | | | **3.236.105.400,00** | **3.117.390.000,00** | **3.117.198.600,00** | **-118.906.800,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **3.236.105.400,00** | **3.117.390.000,00** | **3.117.198.600,00** | **-118.906.800,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **3.236.105.400,00** | **3.117.390.000,00** | **3.117.198.600,00** | **-118.906.800,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **2.294.580.000,00** | **2.294.580.000,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 0,00 | 2.294.580.000,00 | 2.294.580.000,00 | 2.294.580.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | - | 0 Unit Kerja | 0,00 | 2.294.580.000,00 | 2.294.580.000,00 | 2.294.580.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **3.183.995.400,00** | **820.360.000,00** | **820.168.600,00** | **-3.183.995.400,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 3.183.033.400,00 | 820.360.000,00 | 820.168.600,00 | -2.362.864.800,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 769 Orang | 769 Orang | 23.250.000,00 | 51.120.000,00 | 51.120.000,00 | 27.870.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 657 Orang | 657 Orang | 22.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -22.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 2011 Orang | 2011 Orang | 32.000.000,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | -14.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 1 Orang | 0,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 2216 Orang | 2216 Orang | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 360.460.000,00 | 173.748.000,00 | 173.748.000,00 | -186.712.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 4.850.000,00 | 4.850.000,00 | 4.850.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 23.600.000,00 | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | -6.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 34.680.000,00 | 15.907.000,00 | 15.907.000,00 | -18.773.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 1 Orang | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 117.850.000,00 | 90.830.000,00 | 90.830.000,00 | -27.020.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 2.464.973.400,00 | 375.263.000,00 | 375.071.600,00 | -2.089.901.800,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.460.000,00 | 4.434.000,00 | 4.434.000,00 | -26.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 222 Orang | 222 Orang | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 23.760.000,00 | 25.208.000,00 | 25.208.000,00 | 1.448.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | -49.700.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 21.600.000,00 | 21.600.000,00 | 21.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 962.000,00 | 0,00 | 0,00 | -962.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 962.000,00 | 0,00 | 0,00 | -962.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **52.110.000,00** | **2.450.000,00** | **2.450.000,00** | **-52.110.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 52.110.000,00 | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | -49.660.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 52.110.000,00 | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | -49.660.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS JUMPANDANG BARU** | | | | | | | **4.903.272.000,00** | **3.515.167.688,00** | **3.464.576.288,00** | **-1.438.695.712,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **4.903.272.000,00** | **3.515.167.688,00** | **3.464.576.288,00** | **-1.438.695.712,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **4.903.272.000,00** | **3.515.167.688,00** | **3.464.576.288,00** | **-1.438.695.712,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **2.990.760.000,00** | **2.990.760.000,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 0,00 | 2.990.760.000,00 | 2.990.760.000,00 | 2.990.760.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | - | 1 Unit Kerja | 0,00 | 2.990.760.000,00 | 2.990.760.000,00 | 2.990.760.000,00 | Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **4.896.072.000,00** | **524.407.688,00** | **473.816.288,00** | **-4.896.072.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 4.895.618.000,00 | 524.407.688,00 | 473.816.288,00 | -4.421.801.712,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 463 Orang | 463 Orang | 10.500.000,00 | 22.100.000,00 | 22.100.000,00 | 11.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 509 Orang | 509 Orang | 7.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.310.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 6862 Orang | 6862 Orang | 16.000.000,00 | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | -1.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 6 Orang | 0,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 15 Orang | 0,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 111.568.000,00 | 111.260.000,00 | 111.260.000,00 | -308.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 2 Dokumen | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.500.000,00 | 16.748.000,00 | 16.748.000,00 | 4.248.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 17.700.000,00 | 5.580.000,00 | 5.580.000,00 | -12.120.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 65.000.000,00 | 45.450.000,00 | 45.450.000,00 | -19.550.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.581.520.000,00 | 283.072.688,00 | 232.481.288,00 | -4.349.038.712,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.220.000,00 | 2.549.000,00 | 2.549.000,00 | 329.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1352 Orang | 1352 Orang | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 500.000,00 | 6.048.000,00 | 6.048.000,00 | 5.548.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 52.300.000,00 | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | -47.900.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 454.000,00 | 0,00 | 0,00 | -454.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 454.000,00 | 0,00 | 0,00 | -454.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **7.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-7.200.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.200.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS KALUKU BODOA** | | | | | | | **4.457.506.000,00** | **4.560.853.000,00** | **4.560.853.000,00** | **103.347.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **4.457.506.000,00** | **4.560.853.000,00** | **4.560.853.000,00** | **103.347.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **4.457.506.000,00** | **4.560.853.000,00** | **4.560.853.000,00** | **103.347.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **3.767.004.000,00** | **3.767.004.000,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 0,00 | 3.767.004.000,00 | 3.767.004.000,00 | 3.767.004.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | - | 1 Unit Kerja | 0,00 | 3.767.004.000,00 | 3.767.004.000,00 | 3.767.004.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **4.427.001.000,00** | **778.769.000,00** | **778.769.000,00** | **-4.427.001.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 4.426.941.000,00 | 778.769.000,00 | 778.769.000,00 | -3.648.172.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1455 Orang | 1455 Orang | 9.840.000,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 8.160.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1280 Orang | 1280 Orang | 22.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | -22.080.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 3730 Orang | 3730 Orang | 27.300.000,00 | 16.400.000,00 | 16.400.000,00 | -10.900.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 1 Orang | 0,00 | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 2172 Orang | 2172 Orang | 11.000.000,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 5.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 178.680.000,00 | 172.477.000,00 | 172.477.000,00 | -6.203.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 11.150.000,00 | 22.585.000,00 | 22.585.000,00 | 11.435.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 61.384.000,00 | 15.844.000,00 | 15.844.000,00 | -45.540.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 1 Orang | 0,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 105.650.000,00 | 87.350.000,00 | 87.350.000,00 | -18.300.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.888.287.000,00 | 338.442.000,00 | 338.442.000,00 | -3.549.845.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.810.000,00 | 4.384.000,00 | 4.384.000,00 | 574.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 2172 Orang | 2172 Orang | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 17.980.000,00 | 42.087.000,00 | 42.087.000,00 | 24.107.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 67.880.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | -67.780.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 13.800.000,00 | 13.800.000,00 | 13.800.000,00 | Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **30.505.000,00** | **15.080.000,00** | **15.080.000,00** | **-30.505.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 30.505.000,00 | 15.080.000,00 | 15.080.000,00 | -15.425.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.505.000,00 | 15.080.000,00 | 15.080.000,00 | -15.425.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS KAPASA** | | | | | | | **1.801.018.600,00** | **1.721.774.820,00** | **1.715.494.820,00** | **-85.523.780,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **1.801.018.600,00** | **1.721.774.820,00** | **1.715.494.820,00** | **-85.523.780,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **1.801.018.600,00** | **1.721.774.820,00** | **1.715.494.820,00** | **-85.523.780,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **897.300.000,00** | **897.300.000,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 0,00 | 897.300.000,00 | 897.300.000,00 | 897.300.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | - | 1 Unit Kerja | 0,00 | 897.300.000,00 | 897.300.000,00 | 897.300.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.801.018.600,00** | **822.186.820,00** | **815.906.820,00** | **-1.801.018.600,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 1.801.018.600,00 | 822.186.820,00 | 815.906.820,00 | -985.111.780,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 0,00 | 26.240.000,00 | 26.240.000,00 | 26.240.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 0,00 | 35.600.000,00 | 35.600.000,00 | 35.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 0,00 | 25.800.000,00 | 25.800.000,00 | 25.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 0,00 | 183.468.000,00 | 183.468.000,00 | 183.468.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | 19.800.000,00 | 19.800.000,00 | 19.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 0,00 | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 1 Orang | 0,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 0,00 | 84.439.000,00 | 84.439.000,00 | 84.439.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.801.018.600,00 | 336.893.820,00 | 330.613.820,00 | -1.470.404.780,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 51.600.000,00 | 51.600.000,00 | 51.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 0,00 | 546.000,00 | 546.000,00 | 546.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 22.800.000,00 | 22.800.000,00 | 22.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **2.288.000,00** | **2.288.000,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 2.288.000,00 | 2.288.000,00 | 2.288.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 0,00 | 2.288.000,00 | 2.288.000,00 | 2.288.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS KARUWISI** | | | | | | | **2.233.845.442,00** | **2.104.910.400,00** | **2.103.768.600,00** | **-130.076.842,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **2.233.845.442,00** | **2.104.910.400,00** | **2.103.768.600,00** | **-130.076.842,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **2.233.845.442,00** | **2.104.910.400,00** | **2.103.768.600,00** | **-130.076.842,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **1.329.552.000,00** | **1.329.552.000,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 0,00 | 1.329.552.000,00 | 1.329.552.000,00 | 1.329.552.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | - | 1 Unit Kerja | 0,00 | 1.329.552.000,00 | 1.329.552.000,00 | 1.329.552.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.103.645.442,00** | **775.358.400,00** | **774.216.600,00** | **-2.103.645.442,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 2.083.709.442,00 | 775.358.400,00 | 774.216.600,00 | -1.309.492.842,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 440 Orang | 440 Orang | 14.400.000,00 | 54.800.000,00 | 54.800.000,00 | 40.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 351 Orang | 351 Orang | 13.840.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.840.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 7591 Orang | 7591 Orang | 7.200.000,00 | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | -1.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 0 Orang | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1041 Orang | 1041 Orang | 2.000.000,00 | 22.200.000,00 | 22.200.000,00 | 20.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 176.110.000,00 | 138.512.000,00 | 138.512.000,00 | -37.598.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 0 Dokumen | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.750.000,00 | 15.050.000,00 | 15.050.000,00 | 8.300.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 52.930.000,00 | 19.793.000,00 | 19.793.000,00 | -33.137.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 0 Orang | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 58.772.000,00 | 83.010.000,00 | 83.010.000,00 | 24.238.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.644.707.442,00 | 339.782.400,00 | 338.640.600,00 | -1.306.066.842,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.900.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1041 Orang | 1041 Orang | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 28.500.000,00 | 81.061.000,00 | 81.061.000,00 | 52.561.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 72.600.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | -72.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 0 Dokumen | 0,00 | 12.450.000,00 | 12.450.000,00 | 12.450.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 19.936.000,00 | 0,00 | 0,00 | -19.936.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 19.936.000,00 | 0,00 | 0,00 | -19.936.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **130.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-130.200.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 130.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -130.200.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 130.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -130.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS KASSI-KASSI** | | | | | | | **5.168.948.080,00** | **4.108.613.000,00** | **4.108.397.200,00** | **-1.060.550.880,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **5.168.948.080,00** | **4.108.613.000,00** | **4.108.397.200,00** | **-1.060.550.880,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **5.168.948.080,00** | **4.108.613.000,00** | **4.108.397.200,00** | **-1.060.550.880,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **3.011.748.000,00** | **3.011.748.000,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 0,00 | 3.011.748.000,00 | 3.011.748.000,00 | 3.011.748.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | - | 1 Unit Kerja | 0,00 | 3.011.748.000,00 | 3.011.748.000,00 | 3.011.748.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **5.019.428.080,00** | **1.068.065.000,00** | **1.067.849.200,00** | **-5.019.428.080,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 5.019.280.080,00 | 1.068.065.000,00 | 1.067.849.200,00 | -3.951.430.880,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1510 Orang | 1510 Orang | 0,00 | 118.080.000,00 | 118.080.000,00 | 118.080.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1293 Orang | 1293 Orang | 31.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -31.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 3257 Orang | 3257 Orang | 51.600.000,00 | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | -43.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 0 0 | 0,00 | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | - | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1085 Orang | 1085 Orang | 12.000.000,00 | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | 1.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 292.398.000,00 | 222.708.000,00 | 222.708.000,00 | -69.690.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 19.200.000,00 | 19.800.000,00 | 19.800.000,00 | 600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 80.800.000,00 | 21.400.000,00 | 21.400.000,00 | -59.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 1 Orang | 0,00 | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 87.400.000,00 | 156.400.000,00 | 156.400.000,00 | 69.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.276.512.080,00 | 416.201.000,00 | 415.985.200,00 | -3.860.526.880,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS<br>PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.050.000,00 | 6.388.000,00 | 6.388.000,00 | 338.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1196 Orang | 1196 Orang | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.720.000,00 | 42.888.000,00 | 42.888.000,00 | 12.168.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 111.600.000,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | -107.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | -148.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | -148.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **149.520.000,00** | **28.800.000,00** | **28.800.000,00** | **-149.520.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 149.520.000,00 | 28.800.000,00 | 28.800.000,00 | -120.720.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 149.520.000,00 | 28.800.000,00 | 28.800.000,00 | -120.720.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS LAYANG** | | | | | | | **2.632.181.080,00** | **2.911.091.864,00** | **2.909.950.064,00** | **277.768.984,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **2.632.181.080,00** | **2.911.091.864,00** | **2.909.950.064,00** | **277.768.984,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **2.632.181.080,00** | **2.911.091.864,00** | **2.909.950.064,00** | **277.768.984,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **2.168.448.000,00** | **2.168.448.000,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 0,00 | 2.168.448.000,00 | 2.168.448.000,00 | 2.168.448.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | - | 1 Unit Kerja | 0,00 | 2.168.448.000,00 | 2.168.448.000,00 | 2.168.448.000,00 | Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.566.171.080,00** | **723.243.864,00** | **722.102.064,00** | **-2.566.171.080,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 2.566.058.080,00 | 723.243.864,00 | 722.102.064,00 | -1.843.956.016,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 619 Orang | 619 Orang | 22.960.000,00 | 47.440.000,00 | 47.440.000,00 | 24.480.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 530 Orang | 530 Orang | 19.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -19.250.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 503 Orang | 503 Orang | 39.000.000,00 | 15.200.000,00 | 15.200.000,00 | -23.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 1 Orang | 0,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | Kota Makassar, Bontoala, Layang | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1428 Orang | 1428 Orang | 16.100.000,00 | 0,00 | 24.300.000,00 | 8.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 184.820.000,00 | 176.300.000,00 | 176.300.000,00 | -8.520.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Bontoala, Layang | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 11.600.000,00 | 6.100.000,00 | 6.100.000,00 | -5.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 11.030.000,00 | 11.150.000,00 | 11.150.000,00 | 120.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 1 Orang | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | Kota Makassar, Bontoala, Layang | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 73.400.000,00 | 85.845.000,00 | 85.845.000,00 | 12.445.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.105.458.080,00 | 323.526.864,00 | 322.385.064,00 | -1.783.073.016,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.630.000,00 | 4.008.000,00 | 4.008.000,00 | 378.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1428 Orang | 1428 Orang | 3.850.000,00 | 24.300.000,00 | 0,00 | -3.850.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | - | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.200.000,00 | 1.574.000,00 | 1.574.000,00 | -1.626.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 70.960.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | -70.560.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | Kota Makassar, Bontoala, Layang | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Bontoala, Layang | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | -113.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | -113.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **66.010.000,00** | **19.400.000,00** | **19.400.000,00** | **-66.010.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 66.010.000,00 | 19.400.000,00 | 19.400.000,00 | -46.610.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 66.010.000,00 | 19.400.000,00 | 19.400.000,00 | -46.610.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS MACCINI SAWAH** | | | | | | | **2.101.699.080,00** | **2.110.248.692,00** | **2.103.871.792,00** | **2.172.712,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **2.101.699.080,00** | **2.110.248.692,00** | **2.103.871.792,00** | **2.172.712,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **2.101.699.080,00** | **2.110.248.692,00** | **2.103.871.792,00** | **2.172.712,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **1.390.860.000,00** | **1.390.860.000,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 0,00 | 1.390.860.000,00 | 1.390.860.000,00 | 1.390.860.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | - | 0 Unit Kerja | 0,00 | 1.390.860.000,00 | 1.390.860.000,00 | 1.390.860.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.063.749.080,00** | **715.988.692,00** | **709.611.792,00** | **-2.063.749.080,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 2.063.062.080,00 | 715.988.692,00 | 709.611.792,00 | -1.353.450.288,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 455 Orang | 455 Orang | 11.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.700.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 0 Orang | 0,00 | 23.040.000,00 | 23.040.000,00 | 23.040.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 429 Orang | 429 Orang | 6.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.300.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 3168 Orang | 3168 Orang | 13.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.300.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 3168 Orang | 0,00 | 34.200.000,00 | 34.200.000,00 | 34.200.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 0 Orang | 0,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 246 Orang | 246 Orang | 30.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | - | 0 Orang | 0,00 | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 165.036.000,00 | 0,00 | 0,00 | -165.036.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 158.852.000,00 | 158.852.000,00 | 158.852.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 0 Dokumen | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 11.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 22.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | -22.680.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 25.762.000,00 | 25.762.000,00 | 25.762.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 0 Orang | 0,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 55.740.000,00 | 55.740.000,00 | 55.740.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.668.036.080,00 | 0,00 | 0,00 | -1.668.036.080,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 325.797.692,00 | 319.420.792,00 | 319.420.792,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.480.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 3.912.000,00 | 3.912.000,00 | 3.912.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 246 Orang | 246 Orang | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | - | 246 Orang | 0,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 26.580.000,00 | 0,00 | 0,00 | -26.580.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 97.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | -97.550.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 20.485.000,00 | 20.485.000,00 | 20.485.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 687.000,00 | 0,00 | 0,00 | -687.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 687.000,00 | 0,00 | 0,00 | -687.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **37.950.000,00** | **3.400.000,00** | **3.400.000,00** | **-37.950.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 37.950.000,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | -34.550.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 37.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | -37.950.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS MACCINI SOMBALA** | | | | | | | **3.323.794.000,00** | **2.684.019.750,00** | **2.679.248.600,00** | **-644.545.400,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **3.323.794.000,00** | **2.684.019.750,00** | **2.679.248.600,00** | **-644.545.400,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **3.323.794.000,00** | **2.684.019.750,00** | **2.679.248.600,00** | **-644.545.400,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **1.819.848.000,00** | **1.819.848.000,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 0,00 | 1.819.848.000,00 | 1.819.848.000,00 | 1.819.848.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | - | 1 Unit Kerja | 0,00 | 1.819.848.000,00 | 1.819.848.000,00 | 1.819.848.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **3.210.694.000,00** | **857.771.750,00** | **853.000.600,00** | **-3.210.694.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 3.209.965.000,00 | 857.771.750,00 | 853.000.600,00 | -2.356.964.400,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 658 Orang | 658 Orang | 55.200.000,00 | 84.700.000,00 | 84.700.000,00 | 29.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 658 Orang | 658 Orang | 17.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -17.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 7606 Orang | 7606 Orang | 11.300.000,00 | 6.400.000,00 | 6.400.000,00 | -4.900.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 1 Orang | 0,00 | 11.400.000,00 | 11.400.000,00 | 11.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 458 Orang | 458 Orang | 7.200.000,00 | 16.800.000,00 | 16.800.000,00 | 9.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 207.224.000,00 | 168.842.000,00 | 168.842.000,00 | -38.382.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 0 Dokumen | 0,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.400.000,00 | 8.417.800,00 | 8.417.800,00 | 6.017.800,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 42.000.000,00 | 33.331.200,00 | 33.331.200,00 | -8.668.800,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 1 Orang | 0,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 76.300.000,00 | 90.850.000,00 | 90.850.000,00 | 14.550.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 2.684.341.000,00 | 353.095.750,00 | 348.324.600,00 | -2.336.016.400,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.300.000,00 | 5.113.000,00 | 5.113.000,00 | 813.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.600.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | -1.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 458 Orang | 458 Orang | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.900.000,00 | 41.622.000,00 | 41.622.000,00 | 25.722.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 69.600.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | -63.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 729.000,00 | 0,00 | 0,00 | -729.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 729.000,00 | 0,00 | 0,00 | -729.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **113.100.000,00** | **6.400.000,00** | **6.400.000,00** | **-113.100.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 113.100.000,00 | 6.400.000,00 | 6.400.000,00 | -106.700.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 113.100.000,00 | 6.400.000,00 | 6.400.000,00 | -106.700.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS MAKKASAU** | | | | | | | **2.102.396.560,00** | **2.239.728.780,00** | **2.232.850.380,00** | **130.453.820,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **2.102.396.560,00** | **2.239.728.780,00** | **2.232.850.380,00** | **130.453.820,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **2.102.396.560,00** | **2.239.728.780,00** | **2.232.850.380,00** | **130.453.820,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **1.456.140.000,00** | **1.456.140.000,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 0,00 | 1.456.140.000,00 | 1.456.140.000,00 | 1.456.140.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | - | 1 0 | 0,00 | 1.456.140.000,00 | 1.456.140.000,00 | 1.456.140.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.056.396.560,00** | **775.988.780,00** | **769.110.380,00** | **-2.056.396.560,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 2.055.666.560,00 | 775.988.780,00 | 769.110.380,00 | -1.286.556.180,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 480 Orang | 480 Orang | 12.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 28.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 432 Orang | 432 Orang | 18.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -18.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 3034 Orang | 3034 Orang | 52.800.000,00 | 19.200.000,00 | 19.200.000,00 | -33.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 10 Orang | 0,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 524 Orang | 524 Orang | 6.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 3.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 216.760.000,00 | 197.410.000,00 | 197.410.000,00 | -19.350.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 6 Dokumen | 0,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 38.000.000,00 | 25.800.000,00 | 25.800.000,00 | -12.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 37.320.000,00 | 23.400.000,00 | 23.400.000,00 | -13.920.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 7 Orang | 0,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 109.000.000,00 | 82.680.000,00 | 82.680.000,00 | -26.320.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.428.446.560,00 | 333.548.780,00 | 326.670.380,00 | -1.101.776.180,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.540.000,00 | 4.450.000,00 | 4.450.000,00 | -90.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 524 Orang | 524 Orang | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.400.000,00 | 6.400.000,00 | 6.400.000,00 | 5.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 112.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | -111.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 15 Dokumen | 0,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 | -730.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 | -730.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **46.000.000,00** | **7.600.000,00** | **7.600.000,00** | **-46.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 46.000.000,00 | 7.600.000,00 | 7.600.000,00 | -38.400.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 46.000.000,00 | 7.600.000,00 | 7.600.000,00 | -38.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS MALIMONGAN BARU** | | | | | | | **2.059.272.000,00** | **2.035.928.968,00** | **2.029.057.568,00** | **-30.214.432,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **2.059.272.000,00** | **2.035.928.968,00** | **2.029.057.568,00** | **-30.214.432,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **2.059.272.000,00** | **2.035.928.968,00** | **2.029.057.568,00** | **-30.214.432,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **1.322.520.000,00** | **1.322.520.000,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 0,00 | 1.322.520.000,00 | 1.322.520.000,00 | 1.322.520.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | - | 1 Unit Kerja | 0,00 | 1.322.520.000,00 | 1.322.520.000,00 | 1.322.520.000,00 | Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.032.632.000,00** | **710.458.968,00** | **703.587.568,00** | **-2.032.632.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 2.032.508.000,00 | 710.458.968,00 | 703.587.568,00 | -1.328.920.432,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 448 Orang | 448 Orang | 18.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 2.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 430 Orang | 430 Orang | 13.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.440.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 3447 Orang | 3447 Orang | 16.300.000,00 | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | -7.900.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 1 Orang | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1504 Orang | 1504 Orang | 18.000.000,00 | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 6.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 174.460.000,00 | 166.411.000,00 | 166.411.000,00 | -8.049.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 18.000.000,00 | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | -5.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 18.000.000,00 | 11.746.000,00 | 11.746.000,00 | -6.254.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 1 Orang | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 103.100.000,00 | 73.200.000,00 | 73.200.000,00 | -29.900.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.553.268.000,00 | 328.922.968,00 | 322.051.568,00 | -1.231.216.432,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.490.000,00 | 3.830.000,00 | 3.830.000,00 | 340.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1504 Orang | 1504 Orang | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 27.500.000,00 | 37.549.000,00 | 37.549.000,00 | 10.049.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 64.800.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | -64.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | -124.000,00 | | | - | - - | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | -124.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **26.640.000,00** | **2.950.000,00** | **2.950.000,00** | **-26.640.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 26.640.000,00 | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | -23.690.000,00 | | | - | - - | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 26.640.000,00 | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | -23.690.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS MAMAJANG** | | | | | | | **2.855.757.000,00** | **2.481.226.570,00** | **2.481.178.500,00** | **-374.578.500,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **2.855.757.000,00** | **2.481.226.570,00** | **2.481.178.500,00** | **-374.578.500,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **2.855.757.000,00** | **2.481.226.570,00** | **2.481.178.500,00** | **-374.578.500,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **1.818.480.000,00** | **1.818.480.000,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 0,00 | 1.818.480.000,00 | 1.818.480.000,00 | 1.818.480.000,00 | | | - | - - | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | - | 0 Unit Kerja | 0,00 | 1.818.480.000,00 | 1.818.480.000,00 | 1.818.480.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.838.607.000,00** | **662.746.570,00** | **662.698.500,00** | **-2.838.607.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 2.838.237.000,00 | 662.746.570,00 | 662.698.500,00 | -2.175.538.500,00 | | | - | - - | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 370 Orang | 370 Orang | 25.200.000,00 | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | -10.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 370 Orang | 370 Orang | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.900.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1686 Orang | 1686 Orang | 41.400.000,00 | 23.600.000,00 | 23.600.000,00 | -17.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 0 Orang | 0,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1857 Orang | 1857 Orang | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 164.400.000,00 | 135.074.000,00 | 135.074.000,00 | -29.326.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 0 Dokumen | 0,00 | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 17.600.000,00 | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 | -6.100.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 26.800.000,00 | 15.919.000,00 | 15.919.000,00 | -10.881.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 0 Orang | 0,00 | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 101.400.000,00 | 65.500.000,00 | 65.500.000,00 | -35.900.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 2.369.417.000,00 | 333.077.570,00 | 333.029.500,00 | -2.036.387.500,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.290.000,00 | 3.364.000,00 | 3.364.000,00 | 74.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1857 Orang | 1857 Orang | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.030.000,00 | 14.812.000,00 | 14.812.000,00 | 2.782.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 57.600.000,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | -50.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 0 Dokumen | 0,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | -370.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | -370.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **17.150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-17.150.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 17.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -17.150.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 17.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -17.150.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS MANGASA** | | | | | | | **2.598.212.280,00** | **2.343.594.236,00** | **2.340.269.836,00** | **-257.942.444,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **2.598.212.280,00** | **2.343.594.236,00** | **2.340.269.836,00** | **-257.942.444,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **2.598.212.280,00** | **2.343.594.236,00** | **2.340.269.836,00** | **-257.942.444,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **1.345.740.000,00** | **1.345.740.000,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 0,00 | 1.345.740.000,00 | 1.345.740.000,00 | 1.345.740.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | - | 0 Unit Kerja | 0,00 | 1.345.740.000,00 | 1.345.740.000,00 | 1.345.740.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.538.812.280,00** | **997.854.236,00** | **994.529.836,00** | **-2.538.812.280,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 2.488.033.280,00 | 997.854.236,00 | 994.529.836,00 | -1.493.503.444,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 653 Orang | 653 Orang | 12.600.000,00 | 86.400.000,00 | 86.400.000,00 | 73.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 889 Orang | 889 Orang | 17.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -17.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1729 Orang | 1729 Orang | 88.300.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | -76.300.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 25 Orang | 0,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1176 Orang | 1176 Orang | 24.000.000,00 | 34.000.000,00 | 34.000.000,00 | 10.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 294.448.000,00 | 199.388.000,00 | 199.388.000,00 | -95.060.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 27.600.000,00 | 27.600.000,00 | 27.600.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.750.000,00 | 14.100.000,00 | 14.100.000,00 | -16.650.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 53.420.000,00 | 20.383.000,00 | 20.383.000,00 | -33.037.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 20 Orang | 0,00 | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 161.500.000,00 | 123.800.000,00 | 123.800.000,00 | -37.700.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 1.707.595.280,00 | 393.852.236,00 | 390.527.836,00 | -1.317.067.444,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.740.000,00 | 5.987.000,00 | 5.987.000,00 | 247.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1176 Orang | 1176 Orang | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.200.000,00 | 49.744.000,00 | 49.744.000,00 | 45.544.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 70.080.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | -67.080.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 22 Dokumen | 0,00 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 50.779.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.779.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.779.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.779.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **59.400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-59.400.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 59.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -59.400.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 59.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -59.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS MARADEKAYA** | | | | | | | **1.860.946.000,00** | **1.674.628.056,00** | **1.671.088.056,00** | **-189.857.944,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **1.860.946.000,00** | **1.674.628.056,00** | **1.671.088.056,00** | **-189.857.944,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **1.860.946.000,00** | **1.674.628.056,00** | **1.671.088.056,00** | **-189.857.944,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **932.148.000,00** | **932.148.000,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 0,00 | 932.148.000,00 | 932.148.000,00 | 932.148.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | - | 1 Unit Kerja | 0,00 | 932.148.000,00 | 932.148.000,00 | 932.148.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | - | 1 Unit Kerja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.842.696.000,00** | **732.480.056,00** | **728.940.056,00** | **-1.842.696.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 1.842.544.000,00 | 732.480.056,00 | 728.940.056,00 | -1.113.603.944,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 412 Orang | 412 Orang | 10.500.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 9.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 351 Orang | 351 Orang | 10.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 6,709 Orang | 6,709 Orang | 0,00 | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 612 Orang | 0,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 479 Orang | 479 Orang | 6.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 6.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 11.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 162.110.000,00 | 173.611.000,00 | 173.611.000,00 | 11.501.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 21.300.000,00 | 22.800.000,00 | 22.800.000,00 | 1.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 22.580.000,00 | 15.200.000,00 | 15.200.000,00 | -7.380.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 58 Orang | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 107.000.000,00 | 77.900.000,00 | 77.900.000,00 | -29.100.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.348.204.000,00 | 326.841.056,00 | 323.301.056,00 | -1.024.902.944,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.450.000,00 | 4.065.000,00 | 4.065.000,00 | 615.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 479 Orang | 479 Orang | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | - | 2 Orang | 0,00 | 1.222.000,00 | 1.222.000,00 | 1.222.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | 10.041.000,00 | 10.041.000,00 | 5.041.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 126.000.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | -125.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | -152.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | -152.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **18.250.000,00** | **10.000.000,00** | **10.000.000,00** | **-18.250.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 18.250.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | -8.250.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 18.250.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | -8.250.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS MINASA UPA** | | | | | | | **2.490.384.000,00** | **2.275.198.560,00** | **2.275.181.760,00** | **-215.202.240,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **2.490.384.000,00** | **2.275.198.560,00** | **2.275.181.760,00** | **-215.202.240,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **2.490.384.000,00** | **2.275.198.560,00** | **2.275.181.760,00** | **-215.202.240,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **1.487.448.000,00** | **1.487.448.000,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 0,00 | 1.487.448.000,00 | 1.487.448.000,00 | 1.487.448.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | - | 1 Unit Kerja | 0,00 | 1.487.448.000,00 | 1.487.448.000,00 | 1.487.448.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.490.384.000,00** | **787.750.560,00** | **787.733.760,00** | **-2.490.384.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 2.490.139.000,00 | 787.750.560,00 | 787.733.760,00 | -1.702.405.240,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 471 Orang | 471 Orang | 6.000.000,00 | 23.400.000,00 | 23.400.000,00 | 17.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 426 Orang | 426 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1,972 Orang | 1,972 Orang | 53.200.000,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | -39.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 10 Orang | 0,00 | 19.200.000,00 | 19.200.000,00 | 19.200.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1585 Orang | 1585 Orang | 6.600.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | -2.100.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 215.736.000,00 | 165.511.000,00 | 165.511.000,00 | -50.225.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 17.400.000,00 | 17.747.400,00 | 17.747.400,00 | 347.400,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 64.380.000,00 | 30.583.600,00 | 30.583.600,00 | -33.796.400,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 18 Orang | 0,00 | 7.400.000,00 | 7.400.000,00 | 7.400.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 131.500.000,00 | 80.830.000,00 | 80.830.000,00 | -50.670.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 1.913.853.000,00 | 367.832.560,00 | 367.815.760,00 | -1.546.037.240,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.870.000,00 | 4.223.000,00 | 4.223.000,00 | 353.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1585 Orang | 1585 Orang | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.900.000,00 | 38.123.000,00 | 38.123.000,00 | 34.223.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 64.200.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | -63.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | -245.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | -245.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS PACCERAKKANG** | | | | | | | **3.200.564.080,00** | **3.201.083.600,00** | **3.201.079.400,00** | **515.320,00** | | | | | | | **55.600.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **3.200.564.080,00** | **3.201.083.600,00** | **3.201.079.400,00** | **515.320,00** | | | | | | | **55.600.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **3.200.564.080,00** | **3.201.083.600,00** | **3.201.079.400,00** | **515.320,00** | | | | | | | **55.600.000,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **2.086.620.000,00** | **2.086.620.000,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 0,00 | 2.086.620.000,00 | 2.086.620.000,00 | 2.086.620.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | - | 0 Unit Kerja | 0,00 | 2.086.620.000,00 | 2.086.620.000,00 | 2.086.620.000,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **3.031.812.080,00** | **1.097.821.600,00** | **1.097.817.400,00** | **-2.976.212.080,00** | | | | | | | **55.600.000,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 3.031.246.080,00 | 1.097.821.600,00 | 1.097.817.400,00 | -1.933.428.680,00 | | | - | -<br>- | - | | 55.600.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1107 Orang | 1107 Orang | 18.720.000,00 | 31.860.000,00 | 31.860.000,00 | 13.140.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1107 Orang | 1107 Orang | 43.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -43.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 2931 Orang | 2931 Orang | 42.200.000,00 | 32.600.000,00 | 32.600.000,00 | -9.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 0 Orang | 0,00 | 19.600.000,00 | 19.600.000,00 | 19.600.000,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 19.600.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 395 Orang | 395 Orang | 16.200.000,00 | 31.800.000,00 | 31.800.000,00 | 15.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 300.432.000,00 | 259.036.000,00 | 259.036.000,00 | -41.396.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 0 Dokumen | 0,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 18.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 23.200.000,00 | 25.800.000,00 | 25.800.000,00 | 2.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 70.080.000,00 | 44.247.500,00 | 44.247.500,00 | -25.832.500,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 0 Orang | 0,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 7.200.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 84.900.000,00 | 122.459.500,00 | 122.459.500,00 | 37.559.500,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 2.248.204.080,00 | 394.405.600,00 | 394.401.400,00 | -1.853.802.680,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.390.000,00 | 7.005.000,00 | 7.005.000,00 | 615.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 395 Orang | 395 Orang | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 63.360.000,00 | 87.284.000,00 | 87.284.000,00 | 23.924.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 99.360.000,00 | 5.724.000,00 | 5.724.000,00 | -93.636.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 0 Dokumen | 0,00 | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 10.800.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 566.000,00 | 0,00 | 0,00 | -566.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 566.000,00 | 0,00 | 0,00 | -566.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **168.752.000,00** | **16.642.000,00** | **16.642.000,00** | **-168.752.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 168.752.000,00 | 16.642.000,00 | 16.642.000,00 | -152.110.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 168.752.000,00 | 16.642.000,00 | 16.642.000,00 | -152.110.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS PAMPANG** | | | | | | | **3.630.048.584,00** | **3.163.459.824,00** | **3.157.179.824,00** | **-472.868.760,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **3.630.048.584,00** | **3.163.459.824,00** | **3.157.179.824,00** | **-472.868.760,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **3.630.048.584,00** | **3.163.459.824,00** | **3.157.179.824,00** | **-472.868.760,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **2.145.600.000,00** | **2.145.600.000,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 0,00 | 2.145.600.000,00 | 2.145.600.000,00 | 2.145.600.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | - | 0 Unit Kerja | 0,00 | 2.145.600.000,00 | 2.145.600.000,00 | 2.145.600.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **3.535.268.584,00** | **998.409.824,00** | **992.129.824,00** | **-3.535.268.584,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 3.534.878.584,00 | 998.409.824,00 | 992.129.824,00 | -2.542.748.760,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 891 Orang | 891 Orang | 16.800.000,00 | 41.440.000,00 | 41.440.000,00 | 24.640.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 805 Orang | 805 Orang | 42.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -42.300.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 2269 Orang | 2269 Orang | 41.800.000,00 | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | -31.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | - | 0,00 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1296 Orang | 1296 Orang | 5.800.000,00 | 18.150.000,00 | 18.150.000,00 | 12.350.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 249.424.000,00 | 240.710.000,00 | 240.710.000,00 | -8.714.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 0 Dokumen | 0,00 | 6.700.000,00 | 6.700.000,00 | 6.700.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.600.000,00 | 28.400.000,00 | 28.400.000,00 | 2.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 64.290.000,00 | 26.600.000,00 | 26.600.000,00 | -37.690.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 0 Orang | 0,00 | 14.850.000,00 | 14.850.000,00 | 14.850.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 128.200.000,00 | 129.390.000,00 | 129.390.000,00 | 1.190.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 2.862.674.584,00 | 378.494.824,00 | 372.214.824,00 | -2.490.459.760,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.440.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 130 Orang | 130 Orang | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 22.000.000,00 | 34.320.000,00 | 34.320.000,00 | 12.320.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 62.450.000,00 | 2.405.000,00 | 2.405.000,00 | -60.045.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 0 Dokumen | 0,00 | 55.150.000,00 | 55.150.000,00 | 55.150.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | -390.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | -390.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **94.780.000,00** | **19.450.000,00** | **19.450.000,00** | **-94.780.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 94.780.000,00 | 19.450.000,00 | 19.450.000,00 | -75.330.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 94.780.000,00 | 19.450.000,00 | 19.450.000,00 | -75.330.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS PANAMBUNGAN** | | | | | | | **1.553.711.000,00** | **1.663.007.570,00** | **1.659.399.570,00** | **105.688.570,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **1.553.711.000,00** | **1.663.007.570,00** | **1.659.399.570,00** | **105.688.570,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **1.553.711.000,00** | **1.663.007.570,00** | **1.659.399.570,00** | **105.688.570,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **936.960.000,00** | **936.960.000,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 0,00 | 936.960.000,00 | 936.960.000,00 | 936.960.000,00 | | | - | - - | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | - | 1 Unit Kerja | 0,00 | 936.960.000,00 | 936.960.000,00 | 936.960.000,00 | Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.498.711.000,00** | **726.047.570,00** | **722.439.570,00** | **-1.498.711.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 1.498.337.000,00 | 726.047.570,00 | 722.439.570,00 | -775.897.430,00 | | | - | - - | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 390 Orang | 390 Orang | 24.750.000,00 | 65.340.000,00 | 65.340.000,00 | 40.590.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 338 Orang | 338 Orang | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 8195 Orang | 8195 Orang | 9.000.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | -4.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 330 Orang | 0,00 | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 492 Orang | 492 Orang | 8.400.000,00 | 16.700.000,00 | 16.700.000,00 | 8.300.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 169.362.000,00 | 137.888.000,00 | 137.888.000,00 | -31.474.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.800.000,00 | 8.100.000,00 | 8.100.000,00 | 300.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 33.850.000,00 | 14.204.000,00 | 14.204.000,00 | -19.646.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 88.400.000,00 | 86.500.000,00 | 86.500.000,00 | -1.900.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 1.017.605.000,00 | 331.771.570,00 | 328.163.570,00 | -689.441.430,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.510.000,00 | 3.950.000,00 | 3.950.000,00 | 440.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | - - | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 61.220.000,00 | 16.494.000,00 | 16.494.000,00 | -44.726.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 47.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | -47.040.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 19.800.000,00 | 19.800.000,00 | 19.800.000,00 | Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 374.000,00 | 0,00 | 0,00 | -374.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 374.000,00 | 0,00 | 0,00 | -374.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **55.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-55.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 55.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 55.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS PATTINGALLOANG** | | | | | | | **3.708.429.400,00** | **2.763.695.800,00** | **2.763.695.800,00** | **-944.733.600,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **3.708.429.400,00** | **2.763.695.800,00** | **2.763.695.800,00** | **-944.733.600,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **3.708.429.400,00** | **2.763.695.800,00** | **2.763.695.800,00** | **-944.733.600,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **2.160.000.000,00** | **2.160.000.000,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 0,00 | 2.160.000.000,00 | 2.160.000.000,00 | 2.160.000.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | - | 1 Unit Kerja | 0,00 | 2.160.000.000,00 | 2.160.000.000,00 | 2.160.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **3.698.429.400,00** | **595.645.800,00** | **595.645.800,00** | **-3.698.429.400,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 3.698.209.400,00 | 595.645.800,00 | 595.645.800,00 | -3.102.563.600,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 4.800.000,00 | 33.600.000,00 | 33.600.000,00 | 28.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 4.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.480.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 4.800.000,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 2.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 1 Orang | 0,00 | 18.600.000,00 | 18.600.000,00 | 18.600.000,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 14.400.000,00 | 19.200.000,00 | 19.200.000,00 | 4.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | -450.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 145.384.000,00 | 92.607.000,00 | 92.607.000,00 | -52.777.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 0 Dokumen | 0,00 | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 26.400.000,00 | 10.600.000,00 | 10.600.000,00 | -15.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 17.000.000,00 | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | -10.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 1 Orang | 0,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 72.800.000,00 | 56.700.000,00 | 56.700.000,00 | -16.100.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 3.313.435.400,00 | 314.630.800,00 | 314.630.800,00 | -2.998.804.600,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS<br>PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.660.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 28.800.000,00 | 19.208.000,00 | 19.208.000,00 | -9.592.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 57.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -57.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | -220.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | -220.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.000.000,00** | **8.050.000,00** | **8.050.000,00** | **-10.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 10.000.000,00 | 8.050.000,00 | 8.050.000,00 | -1.950.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 10.000.000,00 | 8.050.000,00 | 8.050.000,00 | -1.950.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS PERTIWI** | | | | | | | **2.020.372.040,00** | **1.824.186.952,00** | **1.824.186.952,00** | **-196.185.088,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **2.020.372.040,00** | **1.824.186.952,00** | **1.824.186.952,00** | **-196.185.088,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **2.020.372.040,00** | **1.824.186.952,00** | **1.824.186.952,00** | **-196.185.088,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **1.174.236.000,00** | **1.174.236.000,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 0,00 | 1.174.236.000,00 | 1.174.236.000,00 | 1.174.236.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | - | 1 Unit Kerja | 0,00 | 1.174.236.000,00 | 1.174.236.000,00 | 1.174.236.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.996.572.040,00** | **649.950.952,00** | **649.950.952,00** | **-1.996.572.040,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 1.996.441.040,00 | 649.950.952,00 | 649.950.952,00 | -1.346.490.088,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 7.200.000,00 | 5.120.000,00 | 5.120.000,00 | -2.080.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 41.900.000,00 | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | -4.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 1 Orang | 0,00 | 26.400.000,00 | 26.400.000,00 | 26.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 12.000.000,00 | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 12.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 3 Orang | 3 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 161.900.000,00 | 137.026.000,00 | 137.026.000,00 | -24.874.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 3.200.000,00 | 12.100.000,00 | 12.100.000,00 | 8.900.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 9.130.000,00 | 12.416.000,00 | 12.416.000,00 | 3.286.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 1 Orang | 0,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 106.600.000,00 | 50.420.000,00 | 50.420.000,00 | -56.180.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 1.567.131.040,00 | 297.334.952,00 | 297.334.952,00 | -1.269.796.088,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.060.000,00 | 3.553.000,00 | 3.553.000,00 | 493.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 6 Orang | 6 Orang | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.920.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | -920.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 56.800.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | -56.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 20.281.000,00 | 20.281.000,00 | 20.281.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 13.300.000,00 | 13.300.000,00 | 13.300.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | -131.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | -131.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **23.800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-23.800.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 23.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -23.800.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 23.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -23.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS PULAU KODINGARENG** | | | | | | | **1.747.123.000,00** | **1.532.548.916,00** | **1.532.548.916,00** | **-214.574.084,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **1.747.123.000,00** | **1.532.548.916,00** | **1.532.548.916,00** | **-214.574.084,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **1.747.123.000,00** | **1.532.548.916,00** | **1.532.548.916,00** | **-214.574.084,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **697.440.000,00** | **697.440.000,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 0,00 | 697.440.000,00 | 697.440.000,00 | 697.440.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | - | 1 Unit Kerja | 0,00 | 697.440.000,00 | 697.440.000,00 | 697.440.000,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.706.323.000,00** | **825.548.916,00** | **825.548.916,00** | **-1.706.323.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 1.700.531.000,00 | 825.548.916,00 | 825.548.916,00 | -874.982.084,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 102 Orang | 102 Orang | 8.750.000,00 | 80.640.000,00 | 80.640.000,00 | 71.890.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 89 Orang | 89 Orang | 14.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -14.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 3501 Orang | 3501 Orang | 31.700.000,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | -17.700.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 11 Orang | 0,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Ujung Tanah | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 99 Orang | 99 Orang | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 225.552.000,00 | 152.030.000,00 | 152.030.000,00 | -73.522.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 15.200.000,00 | 15.200.000,00 | 15.200.000,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Ujung Tanah | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 36.000.000,00 | 25.062.000,00 | 25.062.000,00 | -10.938.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 69.950.000,00 | 29.712.000,00 | 29.712.000,00 | -40.238.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 11 Orang | 0,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Ujung Tanah | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 113.200.000,00 | 79.990.000,00 | 79.990.000,00 | -33.210.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 1.009.569.000,00 | 286.885.916,00 | 286.885.916,00 | -722.683.084,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 64.260.000,00 | 73.200.000,00 | 73.200.000,00 | 8.940.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 98.150.000,00 | 329.000,00 | 329.000,00 | -97.821.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 21.600.000,00 | 21.600.000,00 | 21.600.000,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Ujung Tanah | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Ujung Tanah | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 5.792.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.792.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.792.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.792.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **40.800.000,00** | **9.560.000,00** | **9.560.000,00** | **-40.800.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 40.800.000,00 | 9.560.000,00 | 9.560.000,00 | -31.240.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 40.800.000,00 | 9.560.000,00 | 9.560.000,00 | -31.240.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS RAPPOKALLING** | | | | | | | **3.185.128.000,00** | **3.031.007.600,00** | **3.029.985.200,00** | **-155.142.800,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **3.185.128.000,00** | **3.031.007.600,00** | **3.029.985.200,00** | **-155.142.800,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **3.185.128.000,00** | **3.031.007.600,00** | **3.029.985.200,00** | **-155.142.800,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **2.266.908.000,00** | **2.266.908.000,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 0,00 | 2.266.908.000,00 | 2.266.908.000,00 | 2.266.908.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | - | 0 Unit Kerja | 0,00 | 2.266.908.000,00 | 2.266.908.000,00 | 2.266.908.000,00 | Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **3.151.778.000,00** | **764.099.600,00** | **763.077.200,00** | **-3.151.778.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 3.151.327.000,00 | 764.099.600,00 | 763.077.200,00 | -2.388.249.800,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 847 Orang | 847 Orang | 39.200.000,00 | 42.560.000,00 | 42.560.000,00 | 3.360.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 2 Orang | 2 Orang | 6.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.100.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 8.250.000,00 | 8.800.000,00 | 8.800.000,00 | 550.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 0 Orang | 0,00 | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 763 Orang | 763 Orang | 12.000.000,00 | 20.400.000,00 | 20.400.000,00 | 8.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 46667 Orang | 46667 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 171.438.000,00 | 198.465.000,00 | 198.465.000,00 | 27.027.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 0 Dokumen | 0,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 20.400.000,00 | 17.200.000,00 | 17.200.000,00 | -3.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 18.600.000,00 | 12.210.000,00 | 12.210.000,00 | -6.390.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 0 Orang | 0,00 | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 101.200.000,00 | 83.580.000,00 | 83.580.000,00 | -17.620.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 2.664.659.000,00 | 344.914.600,00 | 343.892.200,00 | -2.320.766.800,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS<br>PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.480.000,00 | 4.170.000,00 | 4.170.000,00 | 690.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 76 Orang | 76 Orang | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 46667 Orang | 46667 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 102.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | -100.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 0 Dokumen | 0,00 | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 451.000,00 | 0,00 | 0,00 | -451.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 451.000,00 | 0,00 | 0,00 | -451.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **33.350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-33.350.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 33.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | -33.350.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 33.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | -33.350.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS SUDIANG** | | | | | | | **4.032.830.000,00** | **3.782.660.620,00** | **3.782.192.620,00** | **-250.637.380,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **4.032.830.000,00** | **3.782.660.620,00** | **3.782.192.620,00** | **-250.637.380,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **4.032.830.000,00** | **3.782.660.620,00** | **3.782.192.620,00** | **-250.637.380,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **2.211.168.000,00** | **2.211.168.000,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 0,00 | 2.211.168.000,00 | 2.211.168.000,00 | 2.211.168.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | - | 1 Unit Kerja | 0,00 | 2.211.168.000,00 | 2.211.168.000,00 | 2.211.168.000,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **3.846.230.000,00** | **1.549.652.620,00** | **1.549.184.620,00** | **-3.846.230.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 3.845.304.000,00 | 1.549.652.620,00 | 1.549.184.620,00 | -2.296.119.380,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 90.000.000,00 | 210.000.000,00 | 210.000.000,00 | 120.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 16.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | -16.640.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 57.600.000,00 | 46.400.000,00 | 46.400.000,00 | -11.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 0 Orang | 0,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 6 Orang | 6 Orang | 60.000.000,00 | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | -18.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 6 Orang | 6 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 531.606.000,00 | 375.108.000,00 | 375.108.000,00 | -156.498.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 10 Dokumen | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 34.100.000,00 | 36.500.000,00 | 36.500.000,00 | 2.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 50.650.000,00 | 54.356.000,00 | 54.356.000,00 | 3.706.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 1 Orang | 0,00 | 20.200.000,00 | 20.200.000,00 | 20.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 203.000.000,00 | 151.680.000,00 | 151.680.000,00 | -51.320.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 2.557.778.000,00 | 465.118.620,00 | 464.650.620,00 | -2.093.127.380,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.870.000,00 | 10.859.000,00 | 10.859.000,00 | 989.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 6 Orang | 6 Orang | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 22.860.000,00 | 35.231.000,00 | 35.231.000,00 | 12.371.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 198.000.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | -195.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 10 Dokumen | 0,00 | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi* | | | | - | 10 Dokumen | 0,00 | 60.800.000,00 | 60.800.000,00 | 60.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 926.000,00 | 0,00 | 0,00 | -926.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 926.000,00 | 0,00 | 0,00 | -926.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **186.600.000,00** | **21.840.000,00** | **21.840.000,00** | **-186.600.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 186.600.000,00 | 21.840.000,00 | 21.840.000,00 | -164.760.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 186.600.000,00 | 21.840.000,00 | 21.840.000,00 | -164.760.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS SUDIANG RAYA** | | | | | | | **2.994.732.760,00** | **3.256.426.720,00** | **3.256.426.720,00** | **261.693.960,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **2.994.732.760,00** | **3.256.426.720,00** | **3.256.426.720,00** | **261.693.960,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **2.994.732.760,00** | **3.256.426.720,00** | **3.256.426.720,00** | **261.693.960,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **1.881.444.000,00** | **1.881.444.000,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 0,00 | 1.881.444.000,00 | 1.881.444.000,00 | 1.881.444.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | - | 1 Unit Kerja | 0,00 | 1.881.444.000,00 | 1.881.444.000,00 | 1.881.444.000,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.942.412.760,00** | **1.285.680.720,00** | **1.285.680.720,00** | **-2.942.412.760,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 2.941.625.760,00 | 1.285.680.720,00 | 1.285.680.720,00 | -1.655.945.040,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1038 Orang | 1038 Orang | 9.840.000,00 | 32.800.000,00 | 32.800.000,00 | 22.960.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 11.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.720.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 763 Orang | 763 Orang | 54.000.000,00 | 39.200.000,00 | 39.200.000,00 | -14.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 82 Orang | 82 Orang | 15.600.000,00 | 21.600.000,00 | 21.600.000,00 | 6.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 466 Orang | 466 Orang | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 260.954.000,00 | 238.169.000,00 | 238.169.000,00 | -22.785.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 36.000.000,00 | 63.800.000,00 | 63.800.000,00 | 27.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 47.320.000,00 | 14.722.000,00 | 14.722.000,00 | -32.598.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 142.800.000,00 | 140.577.000,00 | 140.577.000,00 | -2.223.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 2.165.851.760,00 | 449.086.720,00 | 449.086.720,00 | -1.716.765.040,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.540.000,00 | 9.326.000,00 | 9.326.000,00 | 3.786.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.600.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | -2.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 825 Orang | 825 Orang | 15.600.000,00 | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | -1.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 46667 Orang | 46667 Orang | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 53.760.000,00 | 77.200.000,00 | 77.200.000,00 | 23.440.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 111.840.000,00 | 183.600.000,00 | 183.600.000,00 | 71.760.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 787.000,00 | 0,00 | 0,00 | -787.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 787.000,00 | 0,00 | 0,00 | -787.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **52.320.000,00** | **89.302.000,00** | **89.302.000,00** | **-52.320.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 52.320.000,00 | 89.302.000,00 | 89.302.000,00 | 36.982.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 52.320.000,00 | 89.302.000,00 | 89.302.000,00 | 36.982.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS TABARINGAN** | | | | | | | **1.771.667.000,00** | **1.679.970.292,00** | **1.679.970.292,00** | **-91.696.708,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **1.771.667.000,00** | **1.679.970.292,00** | **1.679.970.292,00** | **-91.696.708,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **1.771.667.000,00** | **1.679.970.292,00** | **1.679.970.292,00** | **-91.696.708,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **963.900.000,00** | **963.900.000,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 0,00 | 963.900.000,00 | 963.900.000,00 | 963.900.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | - | 1 Unit Kerja | 0,00 | 963.900.000,00 | 963.900.000,00 | 963.900.000,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.672.067.000,00** | **712.870.292,00** | **712.870.292,00** | **-1.672.067.000,00** | | | | | | | **0,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 1.671.497.000,00 | 712.870.292,00 | 712.870.292,00 | -958.626.708,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 10.200.000,00 | 44.460.000,00 | 44.460.000,00 | 34.260.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 2 Orang | 2 Orang | 44.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -44.250.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 9.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | -4.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 34 Orang | 0,00 | 6.100.000,00 | 6.100.000,00 | 6.100.000,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 6.000.000,00 | 13.800.000,00 | 13.800.000,00 | 7.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 3 Orang | 3 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 178.504.000,00 | 161.073.000,00 | 161.073.000,00 | -17.431.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 6.000.000,00 | 8.300.000,00 | 8.300.000,00 | 2.300.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 96.100.000,00 | 8.100.000,00 | 8.100.000,00 | -88.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 34 Orang | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 62.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -62.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 97.110.000,00 | 97.110.000,00 | 97.110.000,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 1.218.613.000,00 | 311.007.292,00 | 311.007.292,00 | -907.605.708,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.730.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.730.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | - | 1 Orang | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 3 Orang | 3 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 11.800.000,00 | 21.020.000,00 | 21.020.000,00 | 9.220.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 17.700.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | -16.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 20.400.000,00 | 20.400.000,00 | 20.400.000,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | -570.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | -570.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **99.600.000,00** | **3.200.000,00** | **3.200.000,00** | **-99.600.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 99.600.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | -96.400.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 99.600.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | -96.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS TAMALANREA** | | | | | | | **2.430.847.280,00** | **2.145.790.000,00** | **2.139.510.000,00** | **-291.337.280,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **2.430.847.280,00** | **2.145.790.000,00** | **2.139.510.000,00** | **-291.337.280,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **2.430.847.280,00** | **2.145.790.000,00** | **2.139.510.000,00** | **-291.337.280,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **1.222.116.000,00** | **1.222.116.000,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 0,00 | 1.222.116.000,00 | 1.222.116.000,00 | 1.222.116.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | - | 1 Unit Kerja | 0,00 | 1.222.116.000,00 | 1.222.116.000,00 | 1.222.116.000,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.350.207.280,00** | **921.274.000,00** | **914.994.000,00** | **-2.350.207.280,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 2.349.765.280,00 | 921.274.000,00 | 914.994.000,00 | -1.434.771.280,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 27.720.000,00 | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 47.280.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 4.840.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.840.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 58.500.000,00 | 41.200.000,00 | 41.200.000,00 | -17.300.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 0 Orang | 0,00 | 4.050.000,00 | 4.050.000,00 | 4.050.000,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 5.500.000,00 | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 1.100.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 246.708.000,00 | 206.358.000,00 | 206.358.000,00 | -40.350.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 0 Dokumen | 0,00 | 8.200.000,00 | 8.200.000,00 | 8.200.000,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 15.800.000,00 | 16.700.000,00 | 16.700.000,00 | 900.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 29.370.000,00 | 37.736.000,00 | 37.736.000,00 | 8.366.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 0 Orang | 0,00 | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 142.800.000,00 | 108.680.000,00 | 108.680.000,00 | -34.120.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 1.671.637.280,00 | 370.853.000,00 | 364.573.000,00 | -1.307.064.280,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.130.000,00 | 5.527.000,00 | 5.527.000,00 | 397.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 2.200.000,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 3.300.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.080.000,00 | 13.900.500,00 | 13.900.500,00 | 3.820.500,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 127.280.000,00 | 2.469.500,00 | 2.469.500,00 | -124.810.500,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 13.800.000,00 | 13.800.000,00 | 13.800.000,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 442.000,00 | 0,00 | 0,00 | -442.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 442.000,00 | 0,00 | 0,00 | -442.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **80.640.000,00** | **2.400.000,00** | **2.400.000,00** | **-80.640.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 80.640.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | -78.240.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 80.640.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | -78.240.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS TAMALANREA JAYA** | | | | | | | **1.726.697.040,00** | **1.505.073.992,00** | **1.495.055.592,00** | **-231.641.448,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **1.726.697.040,00** | **1.505.073.992,00** | **1.495.055.592,00** | **-231.641.448,00** | | | | | | | **0,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **1.726.697.040,00** | **1.505.073.992,00** | **1.495.055.592,00** | **-231.641.448,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **687.384.000,00** | **687.384.000,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 0,00 | 687.384.000,00 | 687.384.000,00 | 687.384.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | - | 1 Unit Kerja | 0,00 | 687.384.000,00 | 687.384.000,00 | 687.384.000,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea Jaya | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.697.897.040,00** | **809.795.992,00** | **799.777.592,00** | **-1.697.897.040,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 1.697.397.040,00 | 809.795.992,00 | 799.777.592,00 | -897.619.448,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 309 Orang | 309 Orang | 16.740.000,00 | 63.000.000,00 | 63.000.000,00 | 46.260.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 309 Orang | 309 Orang | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 2231 Orang | 2231 Orang | 11.800.000,00 | 11.600.000,00 | 11.600.000,00 | -200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 1 Orang | 0,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 451 Orang | 451 Orang | 14.400.000,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 3.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 216.040.000,00 | 184.923.000,00 | 184.923.000,00 | -31.117.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 17.200.000,00 | 17.200.000,00 | 17.200.000,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | -7.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 64.250.000,00 | 20.952.000,00 | 20.952.000,00 | -43.298.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 1 Orang | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 112.650.000,00 | 88.200.000,00 | 88.200.000,00 | -24.450.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 1.059.947.040,00 | 338.065.992,00 | 328.047.592,00 | -731.899.448,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.500.000,00 | 4.746.000,00 | 4.746.000,00 | 246.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 451 Orang | 451 Orang | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 14.220.000,00 | 17.309.000,00 | 17.309.000,00 | 3.089.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 122.850.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | -121.050.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea Jaya | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **28.800.000,00** | **7.894.000,00** | **7.894.000,00** | **-28.800.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 28.800.000,00 | 7.894.000,00 | 7.894.000,00 | -20.906.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 28.800.000,00 | 7.894.000,00 | 7.894.000,00 | -20.906.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS TAMALATE** | | | | | | | **3.567.251.390,00** | **3.851.257.144,00** | **3.851.257.144,00** | **284.005.754,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **3.567.251.390,00** | **3.851.257.144,00** | **3.851.257.144,00** | **284.005.754,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **3.567.251.390,00** | **3.851.257.144,00** | **3.851.257.144,00** | **284.005.754,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **2.990.880.000,00** | **2.990.880.000,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 0,00 | 2.990.880.000,00 | 2.990.880.000,00 | 2.990.880.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | - | 1 Unit Kerja | 0,00 | 2.990.880.000,00 | 2.990.880.000,00 | 2.990.880.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **3.533.241.390,00** | **857.177.144,00** | **857.177.144,00** | **-3.533.241.390,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 3.532.818.390,00 | 857.177.144,00 | 857.177.144,00 | -2.675.641.246,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 15.600.000,00 | 41.760.000,00 | 41.760.000,00 | 26.160.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 8.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.240.000,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 60.000.000,00 | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | -36.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 2 Orang | 0,00 | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 16.800.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | -1.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 222.696.000,00 | 220.634.000,00 | 220.634.000,00 | -2.062.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 16.800.000,00 | 16.800.000,00 | 16.800.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 35.000.000,00 | 31.175.000,00 | 31.175.000,00 | -3.825.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 17.840.000,00 | 20.400.000,00 | 20.400.000,00 | 2.560.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 2 Orang | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 115.200.000,00 | 92.540.000,00 | 92.540.000,00 | -22.660.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.865.082.390,00 | 357.719.144,00 | 357.719.144,00 | -2.507.363.246,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.760.000,00 | 4.949.000,00 | 4.949.000,00 | 189.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 29.400.000,00 | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | -16.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 110.400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | -110.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 423.000,00 | 0,00 | 0,00 | -423.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 423.000,00 | 0,00 | 0,00 | -423.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **34.010.000,00** | **3.200.000,00** | **3.200.000,00** | **-34.010.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 34.010.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | -30.810.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 34.010.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | -30.810.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS TAMAMAUNG** | | | | | | | **3.011.276.480,00** | **2.623.956.596,00** | **2.621.536.196,00** | **-389.740.284,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **3.011.276.480,00** | **2.623.956.596,00** | **2.621.536.196,00** | **-389.740.284,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **3.011.276.480,00** | **2.623.956.596,00** | **2.621.536.196,00** | **-389.740.284,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **1.722.600.000,00** | **1.722.600.000,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 0,00 | 1.722.600.000,00 | 1.722.600.000,00 | 1.722.600.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | - | 0 Unit Kerja | 0,00 | 1.722.600.000,00 | 1.722.600.000,00 | 1.722.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.978.776.480,00** | **892.956.596,00** | **890.536.196,00** | **-2.978.776.480,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 2.978.170.480,00 | 892.956.596,00 | 890.536.196,00 | -2.087.634.284,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 16.080.000,00 | 54.240.000,00 | 54.240.000,00 | 38.160.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 4 Orang | 4 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 53.000.000,00 | 71.300.000,00 | 71.300.000,00 | 18.300.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 70 Orang | 0,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 3 Orang | 70 Orang | 0,00 | 22.400.000,00 | 22.400.000,00 | 22.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 221.788.000,00 | 209.413.000,00 | 209.413.000,00 | -12.375.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 19.650.000,00 | 17.447.000,00 | 17.447.000,00 | -2.203.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 51.420.000,00 | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 | -18.420.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 0 Orang | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 135.550.000,00 | 97.600.000,00 | 97.600.000,00 | -37.950.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 2.278.612.480,00 | 357.523.596,00 | 355.103.196,00 | -1.923.509.284,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.950.000,00 | 5.330.000,00 | 5.330.000,00 | 380.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 30.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 2 Orang | 2 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 65.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | -65.280.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 101.240.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | -100.040.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 0 Dokumen | 0,00 | 4.203.000,00 | 4.203.000,00 | 4.203.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 606.000,00 | 0,00 | 0,00 | -606.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 606.000,00 | 0,00 | 0,00 | -606.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **32.500.000,00** | **8.400.000,00** | **8.400.000,00** | **-32.500.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 32.500.000,00 | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | -24.100.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 32.500.000,00 | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | -24.100.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS TAMANGAPA** | | | | | | | **2.141.660.280,00** | **2.369.187.000,00** | **2.368.935.000,00** | **227.274.720,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **2.141.660.280,00** | **2.369.187.000,00** | **2.368.935.000,00** | **227.274.720,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **2.141.660.280,00** | **2.369.187.000,00** | **2.368.935.000,00** | **227.274.720,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **1.350.888.000,00** | **1.350.888.000,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 0,00 | 1.350.888.000,00 | 1.350.888.000,00 | 1.350.888.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | - | 1 Unit Kerja | 0,00 | 1.350.888.000,00 | 1.350.888.000,00 | 1.350.888.000,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.095.060.280,00** | **1.011.939.000,00** | **1.011.687.000,00** | **-2.095.060.280,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 2.089.344.280,00 | 1.011.939.000,00 | 1.011.687.000,00 | -1.077.657.280,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 78.720.000,00 | 187.024.000,00 | 187.024.000,00 | 108.304.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 2 Orang | 2 Orang | 15.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.750.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 29.550.000,00 | 11.600.000,00 | 11.600.000,00 | -17.950.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 1 Orang | 0,00 | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 28.800.000,00 | 20.400.000,00 | 20.400.000,00 | -8.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 247.852.000,00 | 181.791.000,00 | 181.791.000,00 | -66.061.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 31.450.000,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | -18.450.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 76.600.000,00 | 45.049.000,00 | 45.049.000,00 | -31.551.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 1 Orang | 0,00 | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 120.300.000,00 | 125.200.000,00 | 125.200.000,00 | 4.900.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 1.311.282.280,00 | 379.375.000,00 | 379.123.000,00 | -932.159.280,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.520.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 9.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 19.200.000,00 | 21.600.000,00 | 21.600.000,00 | 2.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 111.120.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | -110.520.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 5.716.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.716.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.716.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.716.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **46.600.000,00** | **6.360.000,00** | **6.360.000,00** | **-46.600.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 46.600.000,00 | 6.360.000,00 | 6.360.000,00 | -40.240.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 46.600.000,00 | 6.360.000,00 | 6.360.000,00 | -40.240.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS TARAKAN** | | | | | | | **1.590.634.240,00** | **1.934.740.000,00** | **1.931.516.000,00** | **340.881.760,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **1.590.634.240,00** | **1.934.740.000,00** | **1.931.516.000,00** | **340.881.760,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **1.590.634.240,00** | **1.934.740.000,00** | **1.931.516.000,00** | **340.881.760,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **1.213.296.000,00** | **1.213.296.000,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 0,00 | 1.213.296.000,00 | 1.213.296.000,00 | 1.213.296.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | - | 1 Unit Kerja | 0,00 | 1.213.296.000,00 | 1.213.296.000,00 | 1.213.296.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.539.034.240,00** | **720.244.000,00** | **717.020.000,00** | **-1.539.034.240,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 1.536.236.240,00 | 720.244.000,00 | 717.020.000,00 | -819.216.240,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 33.600.000,00 | 43.800.000,00 | 43.800.000,00 | 10.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 9.300.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | -3.300.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 10 Orang | 0,00 | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 4.400.000,00 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 6.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 16.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -16.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 160.282.000,00 | 133.374.000,00 | 133.374.000,00 | -26.908.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 6.700.000,00 | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | -400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 24.310.000,00 | 6.483.000,00 | 6.483.000,00 | -17.827.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 1 Orang | 0,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 66.400.000,00 | 96.900.000,00 | 96.900.000,00 | 30.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 1.063.644.240,00 | 342.283.000,00 | 339.059.000,00 | -724.585.240,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS<br>PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.360.000,00 | 3.828.000,00 | 3.828.000,00 | 468.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | -550.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 21.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | -21.450.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 6 Orang | 6 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 59.400.000,00 | 45.576.000,00 | 45.576.000,00 | -13.824.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 59.840.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | -58.490.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 2.798.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.798.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.798.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.798.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **51.600.000,00** | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | **-51.600.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 51.600.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | -50.400.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 51.600.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | -50.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS TODDOPULI** | | | | | | | **1.616.250.200,00** | **2.019.873.600,00** | **2.009.855.200,00** | **393.605.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **1.616.250.200,00** | **2.019.873.600,00** | **2.009.855.200,00** | **393.605.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **1.616.250.200,00** | **2.019.873.600,00** | **2.009.855.200,00** | **393.605.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **1.277.100.000,00** | **1.277.100.000,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | - | | | | - | - | 0,00 | 1.277.100.000,00 | 1.277.100.000,00 | 1.277.100.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | - | 1 Unit Kerja | 0,00 | 1.277.100.000,00 | 1.277.100.000,00 | 1.277.100.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.561.350.200,00** | **742.773.600,00** | **732.755.200,00** | **-1.561.350.200,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 1.560.953.200,00 | 742.773.600,00 | 732.755.200,00 | -828.198.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 278 Orang | 278 Orang | 7.150.000,00 | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 650.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 4436 Orang | 4436 Orang | 18.400.000,00 | 11.200.000,00 | 11.200.000,00 | -7.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | - | 15 Orang | 0,00 | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 382 Orang | 382 Orang | 2.000.000,00 | 11.200.000,00 | 11.200.000,00 | 9.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 169.130.000,00 | 157.833.000,00 | 157.833.000,00 | -11.297.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | - | 20 Dokumen | 0,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 13.400.000,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 54.050.000,00 | 31.732.000,00 | 31.732.000,00 | -22.318.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | - | 15 Orang | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 82.600.000,00 | 72.250.000,00 | 72.250.000,00 | -10.350.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 1.057.313.200,00 | 335.505.600,00 | 325.487.200,00 | -731.826.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.720.000,00 | 4.103.000,00 | 4.103.000,00 | 383.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 382 Orang | 382 Orang | 8.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | - | 10 Orang | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 64.640.000,00 | 52.800.000,00 | 52.800.000,00 | -11.840.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 74.250.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | -74.050.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | - | 10 Dokumen | 0,00 | 23.100.000,00 | 23.100.000,00 | 23.100.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 397.000,00 | 0,00 | 0,00 | -397.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 397.000,00 | 0,00 | 0,00 | -397.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **54.900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-54.900.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 54.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | -54.900.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 54.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | -54.900.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **DINAS PEKERJAAN UMUM** | | | | | | | **1.070.178.254.940,00** | **871.730.059.790,00** | **640.190.486.040,00** | **-429.987.768.900,00** | | | | | | | **974.074.812.682,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **1.070.178.254.940,00** | **871.730.059.790,00** | **640.190.486.040,00** | **-429.987.768.900,00** | | | | | | | **974.074.812.682,00** | |
| | **1.03** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | **1.070.178.254.940,00** | **871.730.059.790,00** | **640.190.486.040,00** | **-429.987.768.900,00** | | | | | | | **974.074.812.682,00** | |
| 1. | **1.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**<br>**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik** | | | | **100**<br>**90 %**<br>**%** | **100**<br>**90 %**<br>**%** | **36.227.195.343,00** | **36.807.802.584,00** | **52.046.349.675,00** | **19.422.364.157,00** | | | | | | | **55.649.559.500,00** | |
| | 1.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun* | | | | 100 % | 100 % | 571.930.870,00 | 495.794.750,00 | 284.194.750,00 | -287.736.120,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Masyarakat Kota Makassar | | 1.490.682.500,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 339.992.995,00 | 303.048.875,00 | 182.448.875,00 | -157.544.120,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 472.505.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 18.433.000,00 | 15.193.000,00 | 11.693.000,00 | -6.740.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 166.375.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 18.453.000,00 | 15.011.000,00 | 11.511.000,00 | -6.942.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 159.720.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.346.000,00 | 9.346.000,00 | 5.846.000,00 | -6.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 166.375.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.375.000,00 | 9.375.000,00 | 5.875.000,00 | -6.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 159.720.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 24 Laporan | 24 Laporan | 88.195.200,00 | 77.340.200,00 | 35.340.200,00 | -52.855.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 166.337.500,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 82.135.675,00 | 66.480.675,00 | 31.480.675,00 | -50.655.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 199.650.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun* | | | | 100 % | 100 % | 28.706.991.373,00 | 27.920.175.934,00 | 27.184.475.025,00 | -1.522.516.348,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | Masyarakat Kota Makassar | | 38.150.840.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 173 Orang/ bulan | 160 Orang/ bulan | 24.947.280.083,00 | 24.197.975.644,00 | 24.198.074.735,00 | -749.205.348,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 34.100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 2.704.371.800,00 | 2.710.906.800,00 | 2.094.106.800,00 | -610.265.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 2.541.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 764.478.450,00 | 756.063.450,00 | 756.063.450,00 | -8.415.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 900.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 49.865.000,00 | 63.305.000,00 | 21.305.000,00 | -28.560.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 118.580.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 44.972.000,00 | 42.867.000,00 | 21.867.000,00 | -23.105.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 123.420.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 55.328.640,00 | 44.707.640,00 | 23.707.640,00 | -31.621.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 108.900.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 93.762.000,00 | 77.817.000,00 | 49.817.000,00 | -43.945.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 84.700.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 46.933.400,00 | 26.533.400,00 | 19.533.400,00 | -27.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 174.240.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Jumlah jasa administrasi umum yang tersedia* | | | | 100 % | 100 % | 537.899.200,00 | 136.984.200,00 | 59.984.200,00 | -477.915.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | Masyarakat Kota Makassar | | 328.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.03.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 74.274.000,00 | 57.464.000,00 | 15.464.000,00 | -58.810.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 463.625.200,00 | 79.520.200,00 | 44.520.200,00 | -419.105.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 328.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah jasa administrasi kepegawaian yang tersedia* | | | | 100 % | 100 % | 221.715.000,00 | 1.589.615.000,00 | 1.166.115.000,00 | 944.400.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Masyarakat Kota Makassar | | 423.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 260.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 117.084.000,00 | 674.284.000,00 | 324.284.000,00 | 207.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 58.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 104.631.000,00 | 915.331.000,00 | 841.831.000,00 | 737.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 105.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah jasa administrasi umum yang tersedia* | | | | 100 % | 100 % | 1.466.171.000,00 | 1.404.171.000,00 | 1.309.171.000,00 | -157.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | Masyarakat Kota Makassar | | 3.803.900.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 448 Paket | 448 Paket | 64.000.000,00 | 64.000.000,00 | 64.000.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 58.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1219 Paket | 1219 Paket | 119.171.000,00 | 119.171.000,00 | 119.171.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 56.900.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 19 Dokumen | 19 Dokumen | 268.000.000,00 | 268.000.000,00 | 268.000.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 1.753.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 160 Laporan | 160 Laporan | 1.015.000.000,00 | 953.000.000,00 | 858.000.000,00 | -157.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 1.936.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah barang milik daerah yang diadakan/disediakan* | | | | 100 % | 100 % | 0,00 | 0,00 | 17.259.238.000,00 | 17.259.238.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | Dinas Pekerjaan Umum | | 7.510.047.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 671.397.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.01.2.07.0003 | Pengadaan Alat Besar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 13.088.000.000,00 | 13.088.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 3.961.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 100 Unit | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 78.650.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 39 Unit | 0,00 | 0,00 | 3.971.238.000,00 | 3.971.238.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 2.799.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.03.01.2.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah jasa penunjang kantor yang disediakan* | | | | 100 % | 100 % | 3.927.647.900,00 | 4.625.751.700,00 | 4.540.351.700,00 | 612.703.800,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Masyarakat Kota Makassar | | 3.345.090.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 80.357.900,00 | 63.357.900,00 | 28.357.900,00 | -52.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 21.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.696.380.000,00 | 1.709.233.800,00 | 1.709.233.800,00 | 12.853.800,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 1.729.090.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.150.910.000,00 | 2.853.160.000,00 | 2.802.760.000,00 | 651.850.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 1.595.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkanpemeliharaan* | | | | 100 % | 100 % | 794.840.000,00 | 635.310.000,00 | 242.820.000,00 | -552.020.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Masyarakat Kota Makassar | | 598.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 1400 Unit | 362 Unit | 794.840.000,00 | 635.310.000,00 | 242.820.000,00 | -552.020.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 598.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.03.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 2. | **1.03.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | **Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir Di Wilayah Sungai Kewenangan Kota<br>Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi Erosi Dan Akresi Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengaman Pantai Di Wilayah Sungai Kewenangan Kota** | | | | **95<br>98.37 %<br>%** | **95<br>98.37 %<br>%** | **7.915.391.500,00** | **7.646.240.599,00** | **6.485.724.099,00** | **8.972.512.102,00** | | | | | | | **16.887.903.602,00** | |
| | 1.03.02.2.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalamKota Makassar yang dikelola* | | | | 50 % | 50 % | 7.915.391.500,00 | 7.646.240.599,00 | 6.485.724.099,00 | -1.429.667.401,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Masyarakat Kota Makassar | | 16.887.903.602,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.02.2.01.0100 | Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 1.518.723.400,00 | 1.373.974.500,00 | 1.338.974.500,00 | -179.748.900,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 1.260.039.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.02.2.01.0102 | Pembangunan Breakwater | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Breakwater yang Dibangun* | | | | 0.2 KM | 0.2 KM | 119.600.400,00 | 0,00 | 0,00 | -119.600.400,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 6.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.02.2.01.0117 | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun* | | | | 0,2 KM | 0,2 KM | 4.019.685.400,00 | 3.954.833.500,00 | 216.217.000,00 | -3.803.468.400,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 7.001.734.600,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.02.2.01.0119 | Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun* | | | | 30 Titik | 50 Titik | 1.633.444.400,00 | 1.941.256.599,00 | 1.906.256.599,00 | 272.812.199,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 2.526.130.002,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.02.2.01.0120 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 623.937.900,00 | 376.176.000,00 | 3.024.276.000,00 | 2.400.338.100,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.03.02.2.01.0127 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 3. | **1.03.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | **Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapat Akses Terhadap Air Minum Melalui Spam Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kota** | | | | **100 %** | **100 %** | **47.805.679.300,00** | **35.365.796.970,00** | **34.744.441.630,00** | **-19.164.505.300,00** | | | | | | | **28.641.174.000,00** | |
| | 1.03.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah sistem penyediaan air minum (SPAM) didaerah kota Makassar yang dikelola dan dikembangkan* | | | | 50,351 % | 50,351 % | 47.805.679.300,00 | 35.365.796.970,00 | 34.744.441.630,00 | -13.061.237.670,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Masyarakat Kota Makassar | | 28.641.174.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.03.2.01.0022 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.03.2.01.0023 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya* | | | | 150 Lembaga | 24 Lembaga | 268.549.000,00 | 269.149.000,00 | 162.899.000,00 | -105.650.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 220.355.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.03.2.01.0025 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 682.733.200,00 | 1.174.733.200,00 | 1.189.733.200,00 | 507.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 192.590.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.03.2.01.0026 | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan* | | | | 7,2 Liter/Detik | 4,8 Liter/Detik | 4.702.652.000,00 | 5.137.622.670,00 | 4.866.855.070,00 | 164.203.070,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 4.797.887.702,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.03.2.01.0028 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun* | | | | 9,6 Liter/Detik | 24 Liter/Detik | 23.875.156.000,00 | 23.961.223.700,00 | 23.164.784.050,00 | -710.371.950,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 11.615.972.677,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.03.2.01.0029 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara* | | | | 5 Unit | 6 Unit | 4.797.551.500,00 | 1.830.135.400,00 | 1.381.370.760,00 | -3.416.180.740,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 2.528.866.212,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.03.2.01.0030 | Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 220.523.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.03.2.01.0031 | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.03.2.01.0032 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan* | | | | 4030 SR | 200 SR | 13.479.037.600,00 | 2.992.933.000,00 | 3.978.799.550,00 | -9.500.238.050,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 9.064.979.409,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.03.2.01.0033 | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 4. | **1.03.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | **Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik** | | | | **100 %** | **100 %** | **29.177.603.500,00** | **36.563.595.263,00** | **35.535.633.399,00** | **-11.738.953.500,00** | | | | | | | **17.438.650.000,00** | |
| | 1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah sistem air limbah domestik dalam daerah kota Makassar yang dikelola dan dikembangkan* | | | | 91,486 % | 91,486 % | 29.177.603.500,00 | 36.563.595.263,00 | 35.535.633.399,00 | 6.358.029.899,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Masyarakat Kota Makassar | | 17.438.650.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.05.2.01.0021 | Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan* | | | | 0 $M^3$/Hari | 0 $M^3$/Hari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 2.057.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.05.2.01.0022 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun* | | | | 0 M³/Hari | 0 M³/Hari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 3.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.05.2.01.0024 | Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 188.525.000,00 | 180.525.000,00 | 95.025.000,00 | -93.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK AIR TANAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 441.650.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.05.2.01.0025 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun* | | | | 1000 M³/Hari | 480 M³/Hari | 18.286.166.500,00 | 20.604.978.263,00 | 20.733.882.399,00 | 2.447.715.899,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 3.900.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.05.2.01.0029 | Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 163.330.000,00 | 155.330.000,00 | 72.330.000,00 | -91.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK AIR TANAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 160.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.05.2.01.0036 | Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun* | | | | 0 M³/Hari | 0 M³/Hari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 2.480.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.05.2.01.0037 | Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 1.800.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.05.2.01.0039 | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar* | | | | 1640 Rumah Tangga | 1100 Rumah Tangga | 9.853.667.000,00 | 14.448.047.000,00 | 13.600.681.000,00 | 3.747.014.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 3.300.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.05.2.01.0041 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 685.915.000,00 | 1.174.715.000,00 | 1.033.715.000,00 | 347.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 300.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 5. | **1.03.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | **Persentase Titik Genangan Yang Dikurangi Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik** | | | | **94.71<br>94.85 %<br>%** | **94.71<br>94.85 %<br>%** | **89.765.533.234,00** | **97.516.950.330,00** | **98.952.338.026,00** | **24.182.163.767,00** | | | | | | | **113.947.697.001,00** | |
| | 1.03.06.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Kota Makassar yang dikelola dan dikembangkan* | | | | 2 kanal | 2 kanal | 89.765.533.234,00 | 97.516.950.330,00 | 98.952.338.026,00 | 9.186.804.792,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat Kota Makassar | | 113.947.697.001,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.06.2.01.0024 | Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan* | | | | 21 Sistem Drainase Perkotaan | 2 Sistem Drainase Perkotaan | 2.052.887.720,00 | 2.052.887.720,00 | 2.009.663.720,00 | -43.224.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 1.993.010.664,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.06.2.01.0028 | Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi* | | | | 75 Sistem Drainase Perkotaan | 35 Sistem Drainase Perkotaan | 31.181.449.964,00 | 43.750.794.512,00 | 44.036.623.208,00 | 12.855.173.244,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 26.370.476.099,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.06.2.01.0029 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun* | | | | 75 Sistem Drainase Perkotaan | 20 Sistem Drainase Perkotaan | 21.465.474.400,00 | 24.400.265.468,00 | 25.311.651.468,00 | 3.846.177.068,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 40.629.741.306,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.06.2.01.0030 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun* | | | | 16 Dokumen | 1 Dokumen | 11.344.880.000,00 | 3.634.816.600,00 | 3.283.016.600,00 | -8.061.863.400,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 7.822.862.079,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.06.2.01.0031 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara* | | | | 100 Sistem Drainase Perkotaan | 50 Sistem Drainase Perkotaan | 23.720.841.150,00 | 23.678.186.030,00 | 24.311.383.030,00 | 590.541.880,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 37.131.606.853,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 6. | **1.03.08** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | **Persentase Kebutuhan Gedung Pemerintah Yang Terbangun** | | | | **88.83 %** | **88.83 %** | **209.180.613.422,00** | **279.596.115.612,00** | **101.014.914.302,00** | **152.606.637.578,00** | | | | | | | **361.787.251.000,00** | |
| | 1.03.08.2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | *Jumlah Infrastruktur pada pemukiman di Kota Makassar yang dilaksanakan* | | | | 10 unit | 10 unit | 209.180.613.422,00 | 279.596.115.612,00 | 101.014.914.302,00 | -108.165.699.120,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Masyarakat Kota Makassar | | 361.787.251.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.08.2.01.0014 | Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)* | | | | 0 Bangunan Gedung Negara | 0 Bangunan Gedung Negara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 132.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.08.2.01.0015 | Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan* | | | | 0 Bangunan Gedung Cagar Budaya | 0 Bangunan Gedung Cagar Budaya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.08.2.01.0017 | Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan* | | | | 20 Bangunan Gedung | 15 Bangunan Gedung | 11.381.263.390,00 | 27.863.319.998,00 | 25.294.381.898,00 | 13.913.118.508,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 27.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.08.2.01.0018 | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala* | | | | 25 Bangunan Gedung | 20 Bangunan Gedung | 751.568.000,00 | 2.451.903.920,00 | 2.170.844.360,00 | 1.419.276.360,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 2.152.431.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.08.2.01.0020 | Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota* | | | | 0 Bantuan Teknis | 0 Bantuan Teknis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 292.820.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.08.2.01.0021 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 15 Dokumen | 2 Dokumen | 197.047.782.032,00 | 249.280.891.694,00 | 73.549.688.044,00 | -123.498.093.988,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 332.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.08.2.01.0022 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 210.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 7. | **1.03.10** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | **Persentase Panjang Trotoar terhadap Panjang Jalan Tingkat Kemantapan Jalan Kota** | | | | **6 96.01 % %** | **6 96.01 % %** | **648.157.034.641,00** | **376.283.334.432,00** | **309.770.860.909,00** | **-269.596.555.062,00** | | | | | | | **378.560.479.579,00** | |
| | 1.03.10.2.01 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | *Jumlah penyelenggaraan jalan kota Makassar yang dilaksanakan* | | | | 90 % | 90 % | 648.157.034.641,00 | 376.283.334.432,00 | 309.770.860.909,00 | -338.386.173.732,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | Masyarakat Kota Makassar | | 378.560.479.579,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.10.2.01.0029 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun* | | | | 20 Dokumen | 0 Dokumen | 7.527.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.527.450.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 19.234.051.535,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.10.2.01.0030 | Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya* | | | | 0 KM | 0 KM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.10.2.01.0032 | Pembangunan Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Panjang Jalan yang Dibangun* | | | | 50 KM | 104,57 KM | 601.963.544.175,00 | 197.086.144.592,00 | 156.742.272.867,00 | -445.221.271.308,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 214.767.374.055,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.10.2.01.0038 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin* | | | | 0 Jembatan | 0 Jembatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 10.544.855.805,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.10.2.01.0039 | Rehabilitasi Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi* | | | | 0 Jembatan | 0 Jembatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.10.2.01.0040 | Pembangunan Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Jembatan yang Dibangun* | | | | 5 Jembatan | 1 Jembatan | 3.236.263.856,00 | 2.427.326.720,00 | 1.909.032.717,00 | -1.327.231.139,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PKB | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 12.274.932.995,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.10.2.01.0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya* | | | | 1.500 KM | 1.500 KM | 669.057.280,00 | 444.057.280,00 | 244.057.280,00 | -425.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 909.090.436,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.10.2.01.0044 | Rehabilitasi Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan yang Direhabilitasi* | | | | 25 KM | 88,23 KM | 9.407.460.330,00 | 149.469.174.200,00 | 131.775.219.285,00 | 122.367.758.955,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>OPSEN PKB | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 75.327.099.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.10.2.01.0046 | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin* | | | | 20 KM | 20 KM | 25.353.259.000,00 | 26.856.631.640,00 | 19.100.278.760,00 | -6.252.980.240,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | OPSEN PKB | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 45.503.075.753,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 8. | **1.03.11** | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | **Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi** | | | | **33.44 %** | **33.44 %** | **1.949.204.000,00** | **1.950.224.000,00** | **1.640.224.000,00** | **-787.106.000,00** | | | | | | | **1.162.098.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.03.11.2.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | *Jumlah penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi* | | | | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 887.810.200,00 | 887.810.200,00 | 498.810.200,00 | -389.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Masyarakat Kota Makassar | | 714.098.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.11.2.01.0010 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi* | | | | 200 Orang | 200 Orang | 363.871.200,00 | 363.871.200,00 | 268.871.200,00 | -95.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 139.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.11.2.01.0011 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 150 Lembaga | 150 Lembaga | 75.885.000,00 | 75.885.000,00 | 93.285.000,00 | 17.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 400.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.11.2.01.0014 | Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.11.2.01.0015 | Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 50.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.11.2.01.0016 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih* | | | | 150 Orang | 150 Orang | 448.054.000,00 | 448.054.000,00 | 136.654.000,00 | -311.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 125.098.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.11.2.02 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah sistem informasi jasa konstruksi yang diselenggarakan* | | | | 1 sistem | 1 sistem | 1.006.415.800,00 | 1.007.435.800,00 | 1.007.435.800,00 | 1.020.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Dinas Pekerjaan Umum | | 223.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.11.2.02.0013 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.980.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.03.11.2.02.0014 | Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 90.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.11.2.02.0015 | Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan* | | | | 1 Layanan Informasi | 1 Layanan Informasi | 1.004.435.800,00 | 1.007.435.800,00 | 1.007.435.800,00 | 3.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 133.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.11.2.04 | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | *Jumlah pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi yang dilaksanakan* | | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 54.978.000,00 | 54.978.000,00 | 133.978.000,00 | 79.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Dinas Pekerjaan Umum | | 225.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.11.2.04.0004 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan* | | | | 1 Paket Pekerjaan | 1 Paket Pekerjaan | 54.978.000,00 | 54.978.000,00 | 133.978.000,00 | 79.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 150.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.11.2.04.0008 | Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 75.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | | **UPT PERBENGKELAN DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT** | | | | | | | **20.594.296.000,00** | **22.655.198.000,00** | **22.902.667.000,00** | **2.308.371.000,00** | | | | | | | **16.721.061.420,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **20.594.296.000,00** | **22.655.198.000,00** | **22.902.667.000,00** | **2.308.371.000,00** | | | | | | | **16.721.061.420,00** | |
| | **1.03** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | **20.594.296.000,00** | **22.655.198.000,00** | **22.902.667.000,00** | **2.308.371.000,00** | | | | | | | **16.721.061.420,00** | |
| 1. | **1.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**<br>**Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas** | | | | **100**<br>**90 %**<br>**%** | **100**<br>**90 %**<br>**%** | **20.594.296.000,00** | **22.655.198.000,00** | **22.902.667.000,00** | **-3.873.234.580,00** | | | | | | | **16.721.061.420,00** | |
| | 1.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkanpemeliharaan* | | | | 100 % | 100 % | 20.594.296.000,00 | 22.655.198.000,00 | 22.902.667.000,00 | 2.308.371.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Masyarakat Kota Makassar | | 16.721.061.420,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 32.112.000,00 | 32.112.000,00 | 32.112.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 77.511.420,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 700 Unit | 585 Unit | 16.960.805.772,00 | 19.511.307.772,00 | 20.228.405.772,00 | 3.267.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 13.310.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.01.2.09.0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya* | | | | 80 Unit | 61 Unit | 3.578.878.228,00 | 3.089.278.228,00 | 2.642.149.228,00 | -936.729.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 3.333.550.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.01.2.09.0004 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya* | | | | 8 Unit | 0 Unit | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 | 0,00 | -22.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | | **UPT PENGELOLAAN AIR LIMBAH** | | | | | | | **3.851.749.060,00** | **3.830.146.960,00** | **3.568.146.960,00** | **-283.602.100,00** | | | | | | | **3.670.308.560,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **3.851.749.060,00** | **3.830.146.960,00** | **3.568.146.960,00** | **-283.602.100,00** | | | | | | | **3.670.308.560,00** | |
| | **1.03** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | **3.851.749.060,00** | **3.830.146.960,00** | **3.568.146.960,00** | **-283.602.100,00** | | | | | | | **3.670.308.560,00** | |
| 1. | **1.03.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | **Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik** | | | | **100 %** | **100 %** | **3.851.749.060,00** | **3.830.146.960,00** | **3.568.146.960,00** | **-181.440.500,00** | | | | | | | **3.670.308.560,00** | |
| | 1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah sistem air limbah domestik dalam daerah kota Makassar yang dikelola dan dikembangkan* | | | | 91,486 % | 91,486 % | 3.851.749.060,00 | 3.830.146.960,00 | 3.568.146.960,00 | -283.602.100,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | Masyarakat Kota Makassar | | 3.670.308.560,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.05.2.01.0019 | Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 455.356.400,00 | 456.119.000,00 | 443.619.000,00 | -11.737.400,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK AIR TANAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.05.2.01.0026 | Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama* | | | | 120 Unit | 120 Unit | 47.323.600,00 | 47.323.600,00 | 37.323.600,00 | -10.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK AIR TANAH | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 275.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.05.2.01.0033 | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja* | | | | 2.000 Rumah Tangga | 1.500 Rumah Tangga | 1.682.434.000,00 | 1.729.850.900,00 | 1.729.850.900,00 | 47.416.900,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 1.460.470.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.05.2.01.0035 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya* | | | | 12 Penyelenggara | 12 Penyelenggara | 216.389.600,00 | 187.589.600,00 | 110.789.600,00 | -105.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 320.971.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.05.2.01.0038 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara* | | | | 50 Unit | 50 Unit | 1.223.692.660,00 | 1.224.511.060,00 | 1.196.511.060,00 | -27.181.600,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 783.867.560,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | 1.03.05.2.01.0040 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)* | | | | 540 Orang | 540 Orang | 226.552.800,00 | 184.752.800,00 | 50.052.800,00 | -176.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 330.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| | | **DINAS PENATAAN RUANG** | | | | | | | **18.704.200.000,00** | **28.333.310.797,00** | **25.483.800.000,00** | **6.779.600.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **18.704.200.000,00** | **28.333.310.797,00** | **25.483.800.000,00** | **6.779.600.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **1.03** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | **18.704.200.000,00** | **28.333.310.797,00** | **25.483.800.000,00** | **6.779.600.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **1.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**<br>**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik** | | | | **100**<br>**90 %**<br>**%** | **100**<br>**90 %**<br>**%** | **15.387.643.020,00** | **15.842.629.817,00** | **15.250.819.020,00** | **-15.387.643.020,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 62.161.000,00 | 63.210.000,00 | 33.210.000,00 | -28.951.000,00 | | | - | -<br>- | Dinas Penataan Ruang Kota Makassar | | 0,00 | DINAS PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 5 Dokumen | 33.224.400,00 | 28.845.400,00 | 10.845.400,00 | -22.379.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.300.000,00 | 8.439.000,00 | 5.439.000,00 | -861.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.691.000,00 | 7.937.000,00 | 4.937.000,00 | -2.754.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.465.600,00 | 8.553.600,00 | 5.553.600,00 | -1.912.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.480.000,00 | 9.435.000,00 | 6.435.000,00 | -1.045.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan)* | | | | 90 % | 90 % | 10.539.678.020,00 | 12.494.019.817,00 | 12.127.089.020,00 | 1.587.411.000,00 | | | - | -<br>- | Dinas Penataan Ruang Kota Makassar | | 0,00 | DINAS PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 55 Orang/bulan | 60 Orang/bulan | 9.946.025.020,00 | 11.908.939.817,00 | 11.560.489.020,00 | 1.614.464.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 320.160.000,00 | 319.920.000,00 | 322.440.000,00 | 2.280.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 273.493.000,00 | 265.160.000,00 | 244.160.000,00 | -29.333.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik* | | | | 90 % | 90 % | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | Dinas Penataan Ruang Kota Makassar | | 0,00 | DINAS PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik* | | | | 90 % | 90 % | 243.105.000,00 | 225.000.000,00 | 138.000.000,00 | -105.105.000,00 | | | - | -<br>- | Dinas Penataan Ruang Kota Makassar | | 0,00 | DINAS PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 10 Orang | 9 Orang | 243.105.000,00 | 225.000.000,00 | 138.000.000,00 | -105.105.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas* | | | | 90 % | 90 % | 733.532.200,00 | 549.095.200,00 | 755.255.200,00 | 21.723.000,00 | | | - | -<br>- | Dinas Penataan Ruang Kota Makassar | | 0,00 | DINAS PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 5 Paket | 41.072.200,00 | 46.215.200,00 | 46.215.200,00 | 5.143.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 5 Paket | 21.668.000,00 | 21.668.000,00 | 21.668.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 23.760.000,00 | 23.760.000,00 | 23.760.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 65 Laporan | 647.032.000,00 | 457.452.000,00 | 663.612.000,00 | 16.580.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik* | | | | 90 % | 90 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | Dinas Penataan Ruang Kota Makassar | | 0,00 | DINAS PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PENATAAN RUANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan)* | | | | 90 % | 90 % | 3.192.966.800,00 | 1.892.854.800,00 | 1.616.854.800,00 | -1.576.112.000,00 | | | - | -<br>- | Dinas Penataan Ruang Kota Makassar | | 0,00 | DINAS PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.275.758.000,00 | 893.214.000,00 | 893.214.000,00 | -1.382.544.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 219.808.800,00 | 250.240.800,00 | 250.240.800,00 | 30.432.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 697.400.000,00 | 749.400.000,00 | 473.400.000,00 | -224.000.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik* | | | | 90 % | 90 % | 568.200.000,00 | 570.450.000,00 | 532.410.000,00 | -35.790.000,00 | | | - | -<br>- | Dinas Penataan Ruang Kota Makassar | | 0,00 | DINAS PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 42.130.000,00 | 44.380.000,00 | 40.880.000,00 | -1.250.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 7 Unit | 65 Unit | 450.970.000,00 | 450.970.000,00 | 416.430.000,00 | -34.540.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 120 Unit | 110 Unit | 75.100.000,00 | 75.100.000,00 | 75.100.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PENATAAN RUANG |
| 2. | **1.03.08** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | **Rasio Kepatuhan IMB Kota** | | | | **65 %** | **65 %** | **1.474.692.800,00** | **1.646.135.600,00** | **922.475.600,00** | **-1.474.692.800,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.03.08.2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | *Persentase Bangunan Gedung Yang Tertata* | | | | 65 % | 65 % | 1.474.692.800,00 | 1.646.135.600,00 | 922.475.600,00 | -552.217.200,00 | | | - | -<br>- | Dinas Penataan Ruang Kota Makassar | | 0,00 | DINAS PENATAAN RUANG |
| | 1.03.08.2.01.0023 | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG* | | | | 12 Dokumen | 800 Dokumen | 1.474.692.800,00 | 1.646.135.600,00 | 922.475.600,00 | -552.217.200,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PENATAAN RUANG |
| 3. | **1.03.12** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | **Ketaatan Terhadap RTRW**<br>**Ketaatan terhadap RTRW** | | | | **85**<br>**90 %**<br>**%** | **85**<br>**90 %**<br>**%** | **1.841.864.180,00** | **10.844.545.380,00** | **9.310.505.380,00** | **-1.841.864.180,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.03.12.2.01 | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | *Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang* | | | | 80 % | 80 % | 964.941.000,00 | 7.513.341.000,00 | 6.816.651.000,00 | 5.851.710.000,00 | | | - | -<br>- | Dinas Penataan Ruang Kota Makassar | | 0,00 | DINAS PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.01.0003 | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 210.549.000,00 | 5.310.549.000,00 | 5.257.349.000,00 | 5.046.800.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.01.0010 | Penetapan RDTR Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 574.968.000,00 | 1.947.968.000,00 | 1.471.668.000,00 | 896.700.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.01.0013 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.* | | | | 1 Laporan | 6 Laporan | 179.424.000,00 | 254.824.000,00 | 87.634.000,00 | -91.790.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang* | | | | 80 % | 80 % | 285.131.000,00 | 1.706.499.800,00 | 699.149.800,00 | 414.018.800,00 | | | - | -<br>- | Dinas Penataan Ruang Kota Makassar | | 0,00 | DINAS PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.03.0004 | Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku* | | | | 10 Layanan | 300 Layanan | 190.150.000,00 | 611.518.800,00 | 599.968.800,00 | 409.818.800,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.03.0007 | Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang* | | | | 5 Sistem Informasi | 1 Sistem Informasi | 94.981.000,00 | 1.094.981.000,00 | 99.181.000,00 | 4.200.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PENATAAN RUANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.03.12.2.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang* | | | | 80 % | 80 % | 591.792.180,00 | 1.624.704.580,00 | 1.794.704.580,00 | 1.202.912.400,00 | | | - | -<br>- | Dinas Penataan Ruang Kota Makassar | | 0,00 | DINAS PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.04.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 363.656.620,00 | 463.656.620,00 | 723.656.620,00 | 360.000.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.04.0005 | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 228.135.560,00 | 1.161.047.960,00 | 1.071.047.960,00 | 842.912.400,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PENATAAN RUANG |
| | | **DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | **13.826.000.000,00** | **58.469.084.455,00** | **63.105.144.800,00** | **49.279.144.800,00** | | | | | | | **21.448.082.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **13.826.000.000,00** | **58.469.084.455,00** | **63.105.144.800,00** | **49.279.144.800,00** | | | | | | | **21.448.082.000,00** | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | **13.826.000.000,00** | **58.469.084.455,00** | **63.105.144.800,00** | **49.279.144.800,00** | | | | | | | **21.448.082.000,00** | |
| 1. | **1.04.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik<br>Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan)** | | | | **100 %<br>90 %** | **100 %<br>90 %** | **12.705.115.200,00** | **18.980.875.655,00** | **19.159.159.800,00** | **4.194.366.800,00** | | | | | | | **16.899.482.000,00** | |
| | 1.04.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerahyang disusun* | | | | 100 % | 100 % | 91.417.000,00 | 89.893.500,00 | 61.393.500,00 | -30.023.500,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Bidang dalam lingkungan OPD Dinas Perumahan | | 304.700.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 28.778.500,00 | 43.412.000,00 | 36.412.000,00 | 7.633.500,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 152.750.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.659.000,00 | 10.022.000,00 | 6.522.000,00 | -2.137.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 25.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 13.766.600,00 | 9.180.000,00 | 5.680.000,00 | -8.086.600,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 27.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.852.000,00 | 7.211.500,00 | 3.711.500,00 | -6.140.500,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 19.250.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.733.000,00 | 8.647.000,00 | 5.147.000,00 | -5.586.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 25.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.212.900,00 | 4.626.000,00 | 1.126.000,00 | -2.086.900,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 20.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 16.415.000,00 | 6.795.000,00 | 2.795.000,00 | -13.620.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 35.200.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase dokumen administrasi keuangan yang disusun* | | | | 100 % | 100 % | 11.446.967.900,00 | 14.370.833.955,00 | 14.370.958.565,00 | 2.923.990.665,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | ASN | | 12.634.250.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 160 Orang/ bulan | 160 Orang/ bulan | 11.113.115.900,00 | 13.788.984.955,00 | 13.789.109.565,00 | 2.675.993.665,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 12.000.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 299.730.000,00 | 413.400.000,00 | 413.400.000,00 | 113.670.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 350.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 32.880.000,00 | 144.805.000,00 | 144.805.000,00 | 111.925.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 254.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 690.000,00 | 6.783.000,00 | 6.783.000,00 | 6.093.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 15.125.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 552.000,00 | 16.861.000,00 | 16.861.000,00 | 16.309.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 15.125.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun* | | | | 100 % | 100 % | 96.000.000,00 | 684.000.000,00 | 676.500.000,00 | 580.500.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | ASN pada OPD | | 255.750.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 120 Paket | 120 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 135.750.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 15 Orang | 15 Orang | 96.000.000,00 | 684.000.000,00 | 676.500.000,00 | 580.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 120.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase dokumen administrasi umum perangkat daerah yang disusun* | | | | 100 % | 100 % | 489.428.300,00 | 2.346.165.000,00 | 2.585.167.003,00 | 2.095.738.703,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | ASN | | 848.606.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 5 Paket | 5.340.000,00 | 13.059.000,00 | 13.059.000,00 | 7.719.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 15.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 5 Paket | 49.854.800,00 | 1.467.358.000,00 | 1.824.218.003,00 | 1.774.363.203,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 235.250.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.04.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 38.378.500,00 | 82.097.000,00 | 82.097.000,00 | 43.718.500,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 88.356.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 62.355.000,00 | 86.765.000,00 | 86.733.000,00 | 24.378.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 35.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 222.500.000,00 | 312.060.000,00 | 312.060.000,00 | 89.560.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 220.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 10 Laporan | 10 Laporan | 111.000.000,00 | 384.826.000,00 | 267.000.000,00 | 156.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 255.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang di adakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | ASN | | 1.219.613.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 325.613.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 20 Unit | 20 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 894.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang di sediakan* | | | | 2 Orang, 3 Jenis | 2 Orang, 3 Jenis | 467.040.000,00 | 1.225.823.200,00 | 1.178.130.732,00 | 711.090.732,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Sarana dan Prasarana Aparatur | | 876.913.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.04.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 200.892.000,00 | 230.540.200,00 | 230.540.200,00 | 29.648.200,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 359.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 134.148.000,00 | 141.288.000,00 | 141.295.532,00 | 7.147.532,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 475.413.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 132.000.000,00 | 853.995.000,00 | 806.295.000,00 | 674.295.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 42.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara* | | | | 22 Unit, 4 Jenis | 22 Unit, 4 Jenis | 114.262.000,00 | 264.160.000,00 | 287.010.000,00 | 172.748.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Sarana dan Prasarana Aparatur | | 759.650.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 30.362.000,00 | 44.380.000,00 | 40.880.000,00 | 10.518.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 52.400.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 22 Unit | 22 Unit | 82.680.000,00 | 159.480.000,00 | 185.830.000,00 | 103.150.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 465.275.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 75 Unit | 75 Unit | 1.220.000,00 | 60.300.000,00 | 60.300.000,00 | 59.080.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 64.975.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 177.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 2. | **1.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | **Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni** | | | | **100 %** | **100 %** | **250.852.800,00** | **2.630.103.000,00** | **2.504.603.000,00** | **2.264.147.200,00** | | | | | | | **2.515.000.000,00** | |
| | 1.04.02.2.01 | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | *Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota Makassar yang didata* | | | | 100 % | 100 % | 36.250.000,00 | 629.776.000,00 | 518.276.000,00 | 482.026.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah | | 200.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.02.2.01.0002 | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 11.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.250.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 50.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.02.2.01.0006 | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 10.000.000,00 | 629.776.000,00 | 518.276.000,00 | 508.276.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 100.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.02.2.01.0008 | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 50.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.02.2.03 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | *Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni*<br>*Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Kota Makassar yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni* | | | | 100 % | 100 % | 200.602.800,00 | 2.000.327.000,00 | 1.986.327.000,00 | 1.785.724.200,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Rumah Korban bencana | | 2.215.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.02.2.03.0001 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi* | | | | 100 Unit Rumah | 100 Unit Rumah | 178.102.800,00 | 17.286.000,00 | 17.286.000,00 | -160.816.800,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 1.000.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.02.2.03.0007 | Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah* | | | | 5 Rumah Tangga | 5 Rumah Tangga | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 500.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.02.2.03.0011 | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota* | | | | 1 Unit Rumah | 1 Unit Rumah | 15.000.000,00 | 1.983.041.000,00 | 1.969.041.000,00 | 1.954.041.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 715.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.02.2.07 | Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) | *Jumlah Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) yang diterbitkan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -14.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | Pemilik bangunan gedung | | 100.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.02.2.07.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -14.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 100.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 3. | **1.04.03** | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | **Persentase penataan kawasan kampung nelayan berbasis Rumah Tradfinisional**<br>**Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan** | | | | **100**<br>**20 %**<br>**%** | **100**<br>**20 %**<br>**%** | **278.892.000,00** | **17.732.945.500,00** | **22.603.191.700,00** | **371.108.000,00** | | | | | | | **650.000.000,00** | |
| | 1.04.03.2.02 | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | *Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang di tata* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | 281.990.600,00 | 1.286.030.600,00 | 1.271.030.600,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | Kawasan Permukiman | | 100.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.03.2.02.0014 | Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | 281.990.600,00 | 1.286.030.600,00 | 1.271.030.600,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 100.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.03.2.03 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | *Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang mendapat yang mendapat Pemeliharaan / peningkatan* | | | | 100 % | 100 % | 263.892.000,00 | 17.450.954.900,00 | 21.317.161.100,00 | 21.053.269.100,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | Kawasan kumuh | | 550.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.03.2.03.0003 | Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 233.892.000,00 | 0,00 | 0,00 | -233.892.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 300.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.03.2.03.0009 | Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan* | | | | 10 Ha | 10 Ha | 30.000.000,00 | 17.450.954.900,00 | 21.317.161.100,00 | 21.287.161.100,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 250.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 4. | **1.04.04** | **PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** | **Persentase Penataan Kawasan Kampung Nelayan Berbasis Rumah Tradisional<br>Berkurangnya jumlah unit rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh<br>Persentase orang/badan yang mendapat pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai standar<br>Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan** | | | | **100<br>1050<br>20<br>80 %<br>Unit<br>%<br>%** | **100<br>1050<br>20<br>80 %<br>Unit<br>%<br>%** | **233.892.000,00** | **1.051.893.600,00** | **986.743.600,00** | **43.108.000,00** | | | | | | | **277.000.000,00** | |
| | 1.04.04.2.01 | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | *Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Makassar* | | | | 100 % | 100 % | 233.892.000,00 | 1.051.893.600,00 | 986.743.600,00 | 752.851.600,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | Kawasan kumuh | | 277.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.04.2.01.0001 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki* | | | | 100 Unit Rumah | 100 Unit Rumah | 233.892.000,00 | 1.051.893.600,00 | 986.743.600,00 | 752.851.600,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 277.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 5. | **1.04.05** | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | **-** | | | | **-** | **-** | **357.248.000,00** | **18.073.266.700,00** | **17.851.446.700,00** | **749.352.000,00** | | | | | | | **1.106.600.000,00** | |
| | 1.04.05.2.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | - | | | | - | - | 357.248.000,00 | 18.073.266.700,00 | 17.851.446.700,00 | 17.494.198.700,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | PSU | | 1.106.600.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.05.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian* | | | | 1 Lokasi | 1 Lokasi | 25.000.000,00 | 17.153.675.000,00 | 17.093.675.000,00 | 17.068.675.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 100.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.05.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan* | | | | 20 Laporan | 20 Laporan | 292.248.000,00 | 366.207.100,00 | 386.067.100,00 | 93.819.100,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 300.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.05.2.01.0010 | Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang* | | | | 20 Laporan | 20 Laporan | 40.000.000,00 | 553.384.600,00 | 371.704.600,00 | 331.704.600,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 706.600.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | **UPT RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA)** | | | | | | | **2.140.000.000,00** | **2.138.305.200,00** | **2.089.855.200,00** | **-50.144.800,00** | | | | | | | **1.169.500.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **2.140.000.000,00** | **2.138.305.200,00** | **2.089.855.200,00** | **-50.144.800,00** | | | | | | | **1.169.500.000,00** | |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | **2.140.000.000,00** | **2.138.305.200,00** | **2.089.855.200,00** | **-50.144.800,00** | | | | | | | **1.169.500.000,00** | |
| 1. | **1.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | **Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni** | | | | **100 %** | **100 %** | **2.140.000.000,00** | **2.138.305.200,00** | **2.089.855.200,00** | **-970.500.000,00** | | | | | | | **1.169.500.000,00** | |
| | 1.04.02.2.05 | Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | *Jumlah Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus yang dibina* | | | | 3 Lokasi | 3 Lokasi | 2.140.000.000,00 | 2.138.305.200,00 | 2.089.855.200,00 | -50.144.800,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | Masyarakat Berpenghasilan Rendah | | 1.169.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.02.2.05.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.088.818.000,00 | 2.042.789.200,00 | 2.042.789.200,00 | -46.028.800,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 814.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | 1.04.02.2.05.0002 | Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 51.182.000,00 | 95.516.000,00 | 47.066.000,00 | -4.116.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 355.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA** | | | | | | | **37.308.900.000,00** | **46.982.529.144,00** | **46.771.526.000,00** | **9.462.626.000,00** | | | | | | | **41.730.889.205,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **37.308.900.000,00** | **46.982.529.144,00** | **46.771.526.000,00** | **9.462.626.000,00** | | | | | | | **41.730.889.205,00** | |
| | **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | **37.308.900.000,00** | **46.982.529.144,00** | **46.771.526.000,00** | **9.462.626.000,00** | | | | | | | **41.730.889.205,00** | |
| 1. | **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah** | | | | **100 %** | **100 %** | **9.601.703.720,00** | **18.131.956.864,00** | **18.144.098.720,00** | **4.619.259.225,00** | | | | | | | **14.220.962.945,00** | |
| | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerag* | | | | 16 Dok | 16 Dok | 127.769.620,00 | 134.769.620,00 | 84.009.620,00 | -43.760.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR | | 372.480.151,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 72.316.080,00 | 79.316.080,00 | 51.256.080,00 | -21.060.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 161.884.226,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.193.500,00 | 9.193.500,00 | 6.113.500,00 | -3.080.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 20.812.912,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.241.000,00 | 9.241.000,00 | 4.621.000,00 | -4.620.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 20.812.912,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.661.440,00 | 8.661.440,00 | 7.121.440,00 | -1.540.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 20.812.912,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.062.400,00 | 8.062.400,00 | 6.522.400,00 | -1.540.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 20.812.912,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 20.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 20.295.200,00 | 20.295.200,00 | 8.375.200,00 | -11.920.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 107.344.277,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 90 % | 90 % | 7.804.819.740,00 | 16.220.802.884,00 | 16.248.523.740,00 | 8.443.704.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar | | 11.437.303.871,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 53 Orang/bulan | 53 Orang/bulan | 7.224.286.660,00 | 15.648.829.804,00 | 15.648.830.660,00 | 8.424.544.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 10.775.087.003,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.05.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 333.720.000,00 | 329.806.000,00 | 357.526.000,00 | 23.806.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 364.124.610,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 180.000.000,00 | 180.914.000,00 | 180.914.000,00 | 914.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 180.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 12.452.000,00 | 8.892.000,00 | 8.892.000,00 | -3.560.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 11.817.842,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 16.874.480,00 | 16.874.480,00 | 16.874.480,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 20.258.135,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 18.714.600,00 | 18.714.600,00 | 18.714.600,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 50.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 14 Laporan | 14 Laporan | 18.772.000,00 | 16.772.000,00 | 16.772.000,00 | -2.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 22.510.176,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 13.506.105,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.05.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah* | | | | 90 % | 90 % | 11.251.960,00 | 11.251.960,00 | 9.651.960,00 | -1.600.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar | | 27.877.998,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.916.000,00 | 4.916.000,00 | 4.916.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 7.877.998,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 10.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.335.960,00 | 6.335.960,00 | 4.735.960,00 | -1.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 10.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 90 % | 90 % | 121.540.000,00 | 190.540.000,00 | 178.455.000,00 | 56.915.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar | | 315.061.057,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 80.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 8 Orang | 11 Orang | 96.000.000,00 | 165.000.000,00 | 161.915.000,00 | 65.915.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 135.061.057,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.05.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 100 Orang | 50 Orang | 25.540.000,00 | 25.540.000,00 | 16.540.000,00 | -9.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 50.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 50.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Terpenuhinya Administrasi umum Perangkat daerah* | | | | 90 % | 90 % | 299.668.400,00 | 303.688.400,00 | 470.432.400,00 | 170.764.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar | | 490.603.714,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 20 Paket | 1 Paket | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 8.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 5 Paket | 74.636.400,00 | 56.494.400,00 | 285.914.400,00 | 211.278.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 150.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 1 Paket | 13.538.000,00 | 13.538.000,00 | 13.538.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 45.324.000,00 | 45.324.000,00 | 45.324.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 70.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 7.560.000,00 | 7.560.000,00 | 7.560.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 14.991.777,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 28.137.720,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 28 Laporan | 28 Laporan | 150.000.000,00 | 172.162.000,00 | 109.486.000,00 | -40.514.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 219.474.217,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah* | | | | 90 % | 90 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 90 % | 90 % | 145.864.000,00 | 195.864.000,00 | 170.916.000,00 | 25.052.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar | | 132.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 35.664.000,00 | 35.664.000,00 | 8.916.000,00 | -26.748.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 32.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 4 Laporan | 110.200.000,00 | 160.200.000,00 | 162.000.000,00 | 51.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 100.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah* | | | | 90 % | 90 % | 1.090.790.000,00 | 1.075.040.000,00 | 982.110.000,00 | -108.680.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar | | 1.445.636.154,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 45.130.000,00 | 45.130.000,00 | 41.630.000,00 | -3.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 61.381.648,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 63 Unit | 63 Unit | 1.027.810.000,00 | 1.012.060.000,00 | 916.630.000,00 | -111.180.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 1.384.254.506,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 25 Unit | 25 Unit | 17.850.000,00 | 17.850.000,00 | 23.850.000,00 | 6.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 2. | **1.05.02** | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan** | | | | **100 %** | **100 %** | **27.707.196.280,00** | **28.850.572.280,00** | **28.627.427.280,00** | **-197.270.020,00** | | | | | | | **27.509.926.260,00** | |
| | 1.05.02.2.01 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Jumlah Data Potensi Gangguan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat* | | | | 83 % | 83 % | 27.189.383.880,00 | 28.335.743.880,00 | 28.228.700.280,00 | 1.039.316.400,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Masyarakat Kota Makassar | | 26.878.879.428,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 136.250.600,00 | 135.450.600,00 | 82.390.600,00 | -53.860.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 122.994.622,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0004 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | | | | 1 Dokumen | 12 Dokumen | 3.986.811.040,00 | 3.986.011.040,00 | 3.983.211.040,00 | -3.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 1.012.957.929,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0005 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 770 Orang | 352 Orang | 535.848.040,00 | 505.848.040,00 | 505.848.040,00 | -30.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 662.655.692,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0008 | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0015 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan* | | | | 300 laporan | 300 laporan | 10.052.539.000,00 | 11.204.339.000,00 | 11.204.339.000,00 | 1.151.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 10.381.813.800,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0016 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan* | | | | 25 Laporan | 25 Laporan | 12.461.355.200,00 | 12.482.715.200,00 | 12.261.167.600,00 | -200.187.600,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 14.245.887.804,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0017 | Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 16.580.000,00 | 21.380.000,00 | 18.680.000,00 | 2.100.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 12.500.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0018 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia* | | | | 0 Unit | 24 Unit | 0,00 | 0,00 | 173.064.000,00 | 173.064.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 440.069.581,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.02 | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | *Persentase Jumlah Perda Kota Makassar dan Peraturan Walikota Makassar yang ditegakkan* | | | | 87 % | 87 % | 517.812.400,00 | 514.828.400,00 | 398.727.000,00 | -119.085.400,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | Masyarakat Kota Makassar | | 546.633.672,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.05.02.2.02.0010 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 76.821.800,00 | 73.637.800,00 | 40.041.800,00 | -36.780.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 81.823.368,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.02.0011 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 345.572.800,00 | 345.772.800,00 | 255.772.800,00 | -89.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 394.475.008,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.02.0012 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 95.417.800,00 | 95.417.800,00 | 102.912.400,00 | 7.494.600,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 70.335.296,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.03 | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | *Peningkatan SDA yang mengikuti Diklat PPNS* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | ASN SATPOL PP Kota Makassar | | 84.413.160,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.03.0006 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 84.413.160,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | **DINAS PEMADAM KEBAKARAN** | | | | | | | **40.829.300.000,00** | **54.529.935.454,00** | **54.250.100.000,00** | **13.420.800.000,00** | | | | | | | **58.018.151.436,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **40.829.300.000,00** | **54.529.935.454,00** | **54.250.100.000,00** | **13.420.800.000,00** | | | | | | | **58.018.151.436,00** | |
| | **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | **40.829.300.000,00** | **54.529.935.454,00** | **54.250.100.000,00** | **13.420.800.000,00** | | | | | | | **58.018.151.436,00** | |
| 1. | **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**<br>**Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas** | | | | **100**<br>**90 %**<br>**%** | **100**<br>**90 %**<br>**%** | **21.211.217.100,00** | **27.108.242.754,00** | **26.948.199.000,00** | **6.261.240.036,00** | | | | | | | **27.472.457.136,00** | |
| | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Tersedianya Dokumen Laporan Perencanaan* | | | | 7 dokumen | 1 dokumen | 89.035.000,00 | 115.088.000,00 | 56.048.000,00 | -32.987.000,00 | | | - | -<br>- | Dinas Pemadam Kebakaran | | 128.617.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 27.258.000,00 | 41.590.000,00 | 28.650.000,00 | 1.392.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 60.700.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.229.000,00 | 8.845.000,00 | 5.345.000,00 | -1.884.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 11.746.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.308.000,00 | 7.108.000,00 | 3.608.000,00 | -2.700.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 15.817.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.019.000,00 | 9.619.000,00 | 6.119.000,00 | -2.900.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 14.468.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.031.000,00 | 8.834.000,00 | 5.334.000,00 | -2.697.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 14.522.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 31.190.000,00 | 39.092.000,00 | 6.992.000,00 | -24.198.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 11.364.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 122 orang | 122 orang | 17.079.000.484,00 | 22.612.058.128,00 | 22.612.085.274,00 | 5.533.084.790,00 | | | - | -<br>- | Dinas Pemadam Kebakaran | | 16.154.100.652,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 122 Orang/ bulan | 122 Orang/ bulan | 16.801.080.484,00 | 22.077.338.128,00 | 22.077.365.274,00 | 5.276.284.790,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 15.620.100.652,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 277.920.000,00 | 534.720.000,00 | 534.720.000,00 | 256.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 534.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | Dinas Pemadam Kebakaran | | 486.250.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 486.250.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 424.952.180,00 | 361.591.190,00 | 421.571.390,00 | -3.380.790,00 | | | - | -<br>- | Dinas Pemadam Kebakaran | | 2.054.591.178,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 11.760.000,00 | 12.080.990,00 | 12.080.990,00 | 320.990,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 72.240.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 1.021.640.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 9 Paket | 253.742.180,00 | 290.060.200,00 | 290.040.400,00 | 36.298.220,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 208.571.178,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 31.250.000,00 | 31.250.000,00 | 31.250.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 133.920.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 116.200.000,00 | 16.200.000,00 | 76.200.000,00 | -40.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 11.520.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 10.200.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 596.500.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Tersedianya Barang Milik Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | Dinas Pemadam Kebakaran | | 5.141.051.500,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 5.141.051.500,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia* | | | | 12 bulan | 12 bulan | 1.689.338.336,00 | 1.452.078.336,00 | 1.280.078.336,00 | -409.260.000,00 | | | - | -<br>- | Dinas Pemadam Kebakaran | | 810.721.456,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 727.343.536,00 | 766.943.536,00 | 766.943.536,00 | 39.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 731.321.936,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 961.994.800,00 | 685.134.800,00 | 513.134.800,00 | -448.860.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 79.399.520,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Operational* | | | | 61 unit | 61 unit | 1.928.891.100,00 | 2.567.427.100,00 | 2.578.416.000,00 | 649.524.900,00 | | | - | -<br>- | Dinas Pemadam Kebakaran | | 2.697.125.350,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 51 Unit | 51 Unit | 1.902.291.100,00 | 2.535.587.100,00 | 2.546.576.000,00 | 644.284.900,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 2.278.515.350,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 40 Unit | 40 Unit | 26.600.000,00 | 31.840.000,00 | 31.840.000,00 | 5.240.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 185.250.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 233.360.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| 2. | **1.05.04** | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | **Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran**<br>**Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran** | | | | **100**<br>**15 %**<br>**menit** | **100**<br>**15 %**<br>**menit** | **19.618.082.900,00** | **27.421.692.700,00** | **27.301.901.000,00** | **10.927.611.400,00** | | | | | | | **30.545.694.300,00** | |
| | 1.05.04.2.01 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun* | | | | 150 kejadian | 150 kejadian | 19.207.510.800,00 | 27.040.448.800,00 | 26.992.598.800,00 | 7.785.088.000,00 | | | - | -<br>- | Dinas Pemadam Kebakaran | | 25.723.024.200,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.04.2.01.0001 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya* | | | | 12 Dokumen | 4 Dokumen | 17.232.000,00 | 7.472.000,00 | 7.472.000,00 | -9.760.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 107.886.600,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.04.2.01.0002 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 16.979.502.800,00 | 18.394.182.800,00 | 18.349.432.800,00 | 1.369.930.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 16.912.836.400,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.04.2.01.0003 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.258.880.000,00 | 1.262.480.000,00 | 1.224.380.000,00 | -34.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 1.205.905.600,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.04.2.01.0007 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran* | | | | 459 Orang | 459 Orang | 104.594.000,00 | 862.594.000,00 | 897.594.000,00 | 793.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 783.995.600,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.04.2.01.0017 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait* | | | | 117 Unit | 191 Unit | 847.302.000,00 | 6.513.720.000,00 | 6.513.720.000,00 | 5.666.418.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 6.712.400.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.04.2.02 | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | *Jumlah Bangunan Gedung yang Handal dengan peralatan proteksi kebakaran maksimal* | | | | 200 Kegiatan | 200 Kegiatan | 6.700.000,00 | 8.080.000,00 | 8.080.000,00 | 1.380.000,00 | | | - | -<br>- | Dinas Pemadam Kebakaran | | 224.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.04.2.02.0002 | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.700.000,00 | 8.080.000,00 | 8.080.000,00 | 1.380.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 224.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.04.2.04 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | *Persentase masyarakat yang memperoleh layanan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran* | | | | 100 % | 100 % | 338.814.100,00 | 281.326.900,00 | 220.141.200,00 | -118.672.900,00 | | | - | -<br>- | Dinas Pemadam Kebakaran | | 3.131.026.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.04.2.04.0001 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya* | | | | 300 Orang | 90 Orang | 310.692.750,00 | 255.401.550,00 | 220.141.200,00 | -90.551.550,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 3.104.400.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.04.2.04.0002 | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya* | | | | 53 Desa/Kelurahan | 53 Desa/Kelurahan | 28.121.350,00 | 25.925.350,00 | 0,00 | -28.121.350,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 26.626.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.04.2.05 | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | *Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia* | | | | 12 bulan | 12 bulan | 65.058.000,00 | 91.837.000,00 | 81.081.000,00 | 16.023.000,00 | | | - | -<br>- | Dinas Pemadam Kebakaran | | 1.467.644.100,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.04.2.05.0001 | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 13.449.000,00 | 18.097.000,00 | 14.611.000,00 | 1.162.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 43.706.800,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.04.2.05.0002 | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 18.384.000,00 | 18.384.000,00 | 18.384.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 16.049.200,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.04.2.05.0004 | Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 17.270.000,00 | 17.270.000,00 | 10.000.000,00 | -7.270.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 25.000.000,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| | 1.05.04.2.05.0005 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis* | | | | 36 Unit | 56 Unit | 15.955.000,00 | 38.086.000,00 | 38.086.000,00 | 22.131.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 1.382.888.100,00 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
| | | **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** | | | | | | | **15.428.500.000,00** | **24.940.893.837,00** | **26.092.257.000,00** | **10.663.757.000,00** | | | | | | | **17.762.954.600,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **15.428.500.000,00** | **24.940.893.837,00** | **26.092.257.000,00** | **10.663.757.000,00** | | | | | | | **17.762.954.600,00** | |
| | **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | **15.428.500.000,00** | **24.940.893.837,00** | **26.092.257.000,00** | **10.663.757.000,00** | | | | | | | **17.762.954.600,00** | |
| 1. | **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**<br>**Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas** | | | | **100**<br>**90 %**<br>**%** | **100**<br>**90 %**<br>**%** | **10.002.933.900,00** | **15.506.543.737,00** | **16.994.056.900,00** | **2.427.332.700,00** | | | | | | | **12.430.266.600,00** | |
| | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 115.012.760,00 | 120.987.760,00 | 75.727.760,00 | -39.285.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Pegawai BPBD Kota Makassar | | 482.352.700,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 70.043.000,00 | 69.651.000,00 | 49.791.000,00 | -20.252.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 85.282.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.085.000,00 | 7.085.000,00 | 3.585.000,00 | -3.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 46.983.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.513.500,00 | 6.513.500,00 | 3.013.500,00 | -3.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 24.237.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.221.000,00 | 7.221.000,00 | 3.721.000,00 | -3.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 2.423.700,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.600.500,00 | 6.600.500,00 | 3.100.500,00 | -3.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 23.286.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.536.260,00 | 10.536.260,00 | 3.536.260,00 | -7.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 20.141.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 7.013.500,00 | 13.380.500,00 | 8.980.500,00 | 1.967.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 280.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Tersusun* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 6.208.143.040,00 | 10.136.541.877,00 | 10.122.142.190,00 | 3.913.999.150,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | Pegawai BPBD Kota Makassar | | 6.285.834.800,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 29 Orang/bulan | 29 Orang/bulan | 5.580.034.480,00 | 9.498.488.317,00 | 9.498.488.630,00 | 3.918.454.150,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 5.614.788.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 349.698.000,00 | 359.298.000,00 | 344.898.000,00 | -4.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 500.914.200,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.05.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 270.000.000,00 | 270.345.000,00 | 270.345.000,00 | 345.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 135.500.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 17.821.500,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.194.000,00 | 4.194.000,00 | 4.194.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 1.405.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 1.188.100,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.216.560,00 | 4.216.560,00 | 4.216.560,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 1.718.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 12.500.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Jasa Administrasi Kepegawaian yang Tersedia* | | | | 7 Jenis | 7 Jenis | 250.000.000,00 | 657.980.000,00 | 584.660.000,00 | 334.660.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Pegawai BPBD Kota Makassar | | 550.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 250.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 20 Orang | 20 Orang | 250.000.000,00 | 657.980.000,00 | 584.660.000,00 | 334.660.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 300.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersedia* | | | | 4 Jenis | 4 Jenis | 474.596.200,00 | 653.859.500,00 | 541.633.500,00 | 67.037.300,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Pegawai BPBD Kota Makassar | | 1.020.667.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 23.110.000,00 | 23.110.000,00 | 23.110.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 29.371.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 64.900.600,00 | 67.203.900,00 | 67.203.900,00 | 2.303.300,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 195.853.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 17.304.600,00 | 17.304.600,00 | 17.304.600,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 39.460.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 13.176.000,00 | 13.176.000,00 | 13.176.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 38.850.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 15.145.000,00 | 15.145.000,00 | 15.145.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 32.375.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 55.042.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 39.858.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 14.960.000,00 | 14.960.000,00 | 14.960.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 39.858.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 143.000.000,00 | 319.960.000,00 | 240.734.000,00 | 97.734.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 300.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 183.000.000,00 | 183.000.000,00 | 150.000.000,00 | -33.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 250.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan* | | | | 15 Unit | 15 Unit | 11.191.500,00 | 593.655.000,00 | 2.463.438.350,00 | 2.452.246.850,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | Pegawai BPBD Kota Makassar | | 1.545.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 500,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 500.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 500,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 850.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.07.0003 | Pengadaan Alat Besar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.05.01.2.07.0004 | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 11.190.000,00 | 529.869.000,00 | 2.426.395.000,00 | 2.415.205.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 150.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 500,00 | 63.785.000,00 | 37.043.350,00 | 37.042.850,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 45.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan* | | | | 4 Jenis | 4 Jenis | 1.644.662.900,00 | 1.854.582.100,00 | 1.771.181.600,00 | 126.518.700,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Pegawai BPBD Kota Makassar | | 1.314.873.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 560.282.400,00 | 687.681.600,00 | 687.681.600,00 | 127.399.200,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 600.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 499.380.000,00 | 499.380.000,00 | 499.380.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 581.873.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 500,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 45.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 585.000.000,00 | 667.520.000,00 | 584.120.000,00 | -880.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 88.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan* | | | | 4 Jenis | 4 Jenis | 1.299.327.500,00 | 1.488.937.500,00 | 1.435.273.500,00 | 135.946.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Pegawai BPBD Kota Makassar dan Masysrakat | | 1.231.539.100,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 46.380.000,00 | 46.380.000,00 | 42.880.000,00 | -3.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 35.954.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 52 Unit | 52 Unit | 947.361.500,00 | 944.121.500,00 | 893.957.500,00 | -53.404.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 894.398.100,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09.0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09.0004 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 65 Unit | 65 Unit | 43.450.000,00 | 43.450.000,00 | 43.450.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 70.797.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 262.086.000,00 | 454.936.000,00 | 454.936.000,00 | 192.850.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 180.254.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 50.136.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 2. | **1.05.03** | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | **Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana** | | | | **100 %** | **100 %** | **5.425.566.100,00** | **9.434.350.100,00** | **9.098.200.100,00** | **-92.878.100,00** | | | | | | | **5.332.688.000,00** | |
| | 1.05.03.2.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | *Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana* | | | | 100 % | 100 % | 24.196.500,00 | 228.196.000,00 | 224.446.000,00 | 200.249.500,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | Pegawai BPBD Kota Makassar, Relawan, Masysrakat | | 430.978.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.01.0007 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun* | | | | 150 Orang | 150 Orang | 24.196.000,00 | 28.196.000,00 | 24.446.000,00 | 250.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 280.978.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.01.0008 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 500,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 199.999.500,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 150.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | *Jumlah Warga Negara uang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana* | | | | 100 % | 100 % | 3.691.134.300,00 | 4.916.753.800,00 | 4.797.653.800,00 | 1.106.519.500,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | Pegawai BPBD Kota Makassar, Relawan, Masysrakat | | 988.551.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0013 | Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani* | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 23.351.000,00 | 23.351.000,00 | 20.351.000,00 | -3.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0015 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 500,00 | 194.400.000,00 | 194.400.000,00 | 194.399.500,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 350.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0018 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota* | | | | 225 Orang | 225 Orang | 31.561.000,00 | 31.561.000,00 | 27.561.000,00 | -4.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 136.250.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0019 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam* | | | | 0 Keluarga | 0 Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0020 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana* | | | | 15 Kawasan | 15 Kawasan | 20.495.000,00 | 117.295.000,00 | 59.395.000,00 | 38.900.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 179.397.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0021 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana* | | | | 122 Orang | 122 Orang | 37.592.800,00 | 396.012.800,00 | 396.012.800,00 | 358.420.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0022 | Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 200.000.000,00 | -50.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0023 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0026 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya* | | | | 12 laporan | 12 laporan | 3.249.633.000,00 | 3.825.633.000,00 | 3.825.633.000,00 | 576.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0027 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 57.551.000,00 | 57.551.000,00 | 55.851.000,00 | -1.700.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 126.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0028 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana* | | | | 15 Kawasan | 15 Kawasan | 20.950.000,00 | 20.950.000,00 | 18.450.000,00 | -2.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 196.904.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | - | | | | - | - | 851.207.500,00 | 1.659.932.500,00 | 1.583.682.500,00 | 732.475.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Pegawai BPBD Kota Makassar, Relawan, Masysrakat | | 1.817.866.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0001 | Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 23.425.000,00 | 23.425.000,00 | 17.175.000,00 | -6.250.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 42.554.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0002 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 701.423.000,00 | 827.423.000,00 | 809.923.000,00 | 108.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 85.254.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana* | | | | 20 Orang | 20 Orang | 34.925.000,00 | 34.925.000,00 | 26.175.000,00 | -8.750.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 207.614.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0007 | Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0008 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.05.03.2.03.0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana* | | | | 1000 Orang | 1000 Orang | 51.501.500,00 | 737.476.500,00 | 702.476.500,00 | 650.975.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 1.428.339.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0010 | Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0012 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 39.933.000,00 | 36.683.000,00 | 27.933.000,00 | -12.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 54.105.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | *JUmlah Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang ditata* | | | | 100 % | 100 % | 859.027.800,00 | 2.629.467.800,00 | 2.492.417.800,00 | 1.633.390.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | Pegawai BPBD Kota Makassar, Relawan, Masysrakat | | 2.095.293.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0001 | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 100.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0003 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0004 | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0005 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0007 | Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0008 | Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0010 | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan* | | | | 7 Kegiatan | 7 Kegiatan | 859.027.800,00 | 2.629.467.800,00 | 2.492.417.800,00 | 1.633.390.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 1.995.293.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0011 | Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal* | | | | 0 Lembaga | 0 Lembaga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0012 | Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0014 | Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0015 | Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0016 | Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | **DINAS SOSIAL** | | | | | | | **18.366.100.000,00** | **23.882.326.011,00** | **24.955.470.000,00** | **6.589.370.000,00** | | | | | | | **19.659.924.856,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **18.366.100.000,00** | **23.882.326.011,00** | **24.955.470.000,00** | **6.589.370.000,00** | | | | | | | **19.659.924.856,00** | |
| | **1.06** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | | | **18.366.100.000,00** | **23.882.326.011,00** | **24.955.470.000,00** | **6.589.370.000,00** | | | | | | | **19.659.924.856,00** | |
| 1. | **1.06.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik** | | | | **100<br>90 %<br>%** | **90 %** | **9.974.112.700,00** | **13.925.323.611,00** | **13.868.815.860,00** | **730.421.205,00** | | | | | | | **10.704.533.905,00** | |
| | 1.06.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 105.040.000,00 | 120.696.500,00 | 86.196.500,00 | -18.843.500,00 | | | - | -<br>- | Dokumen Perencanaan dan Pelaporan | | 131.771.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 64.013.000,00 | 70.213.000,00 | 57.713.000,00 | -6.300.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 42.933.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.640.000,00 | 6.320.000,00 | 3.320.000,00 | -1.320.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 9.695.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.207.000,00 | 5.887.000,00 | 2.887.000,00 | -1.320.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 7.666.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.985.000,00 | 9.665.000,00 | 6.665.000,00 | -1.320.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 12.717.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.355.000,00 | 9.035.000,00 | 6.035.000,00 | -1.320.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 9.387.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 5.055.000,00 | 7.836.500,00 | 2.836.500,00 | -2.218.500,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 24.796.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 11.785.000,00 | 11.740.000,00 | 6.740.000,00 | -5.045.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 24.577.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Tersusunnya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah* | | | | 100 % | 100 % | 7.812.882.328,00 | 11.542.626.939,00 | 11.542.627.424,00 | 3.729.745.096,00 | | | - | -<br>- | Dokumen Administrasi Keuangan | | 7.819.799.180,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 53 Orang/bulan | 95 Orang/bulan | 7.362.762.328,00 | 11.068.386.939,00 | 11.068.387.424,00 | 3.705.625.096,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 7.373.039.180,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br><br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 450.120.000,00 | 474.240.000,00 | 474.240.000,00 | 24.120.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 446.760.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Tersedianya layanan Admininstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 84.000.000,00 | 69.000.000,00 | 31.500.000,00 | -52.500.000,00 | | | - | -<br>- | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 258.600.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 131 Paket | 131 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 78.600.000,00 | DINAS SOSIAL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.06.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 0 Orang | 7 Orang | 84.000.000,00 | 69.000.000,00 | 31.500.000,00 | -52.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 180.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah* | | | | 100 % | 100 % | 469.231.082,00 | 357.193.840,00 | 421.118.240,00 | -48.112.842,00 | | | - | -<br>- | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 651.497.350,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 3.405.000,00 | 1.305.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 4.184.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 5 Paket | 95.449.240,00 | 95.449.240,00 | 95.449.240,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 135.801.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 1 Paket | 7.857.642,00 | 4.820.400,00 | 8.475.000,00 | 617.358,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 29.968.750,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 2 Paket | 51.909.000,00 | 51.909.000,00 | 44.740.400,00 | -7.168.600,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 55.523.600,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 1 Paket | 19.488.200,00 | 19.488.200,00 | 18.908.200,00 | -580.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 43.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 9 Dokumen | 12 Dokumen | 3.960.000,00 | 3.960.000,00 | 3.960.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 10.620.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 12 Laporan | 16.467.000,00 | 16.467.000,00 | 16.180.400,00 | -286.600,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 15.400.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 0 Laporan | 24 Laporan | 272.000.000,00 | 163.000.000,00 | 230.000.000,00 | -42.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 357.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Tersedianya layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 9.370.800,00 | 9.370.800,00 | 13.558.000,00 | 4.187.200,00 | | | - | -<br>- | Barang Milik Daerah | | 51.592.375,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 7 Unit | 7 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 15.368.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 15 Unit | 1 Unit | 9.370.800,00 | 9.370.800,00 | 13.558.000,00 | 4.187.200,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 36.224.375,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tersedianya layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 724.037.490,00 | 789.807.532,00 | 806.798.696,00 | 82.761.206,00 | | | - | -<br>- | Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 972.623.800,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 120.342.690,00 | 183.172.732,00 | 146.770.896,00 | 26.428.206,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 192.029.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Laporan | 12 Laporan | 603.694.800,00 | 606.634.800,00 | 660.027.800,00 | 56.333.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 780.594.800,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tersedianya layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 769.551.000,00 | 1.036.628.000,00 | 967.017.000,00 | 197.466.000,00 | | | - | -<br>- | Barang Milik Daerah | | 818.650.200,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 4 Unit | 1 Unit | 42.130.000,00 | 42.130.000,00 | 38.630.000,00 | -3.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 36.163.200,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 0 Unit | 47 Unit | 341.768.000,00 | 324.198.000,00 | 381.508.000,00 | 39.740.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 501.017.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 4 Unit | 60 Unit | 40.440.000,00 | 40.440.000,00 | 40.440.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 41.470.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 0 Unit | 2 Unit | 345.213.000,00 | 629.860.000,00 | 506.439.000,00 | 161.226.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 240.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 2. | **1.06.02** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | **Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pemberdayaan Sosial** | | | | **70 %** | **70 %** | **792.714.200,00** | **928.418.400,00** | **698.810.232,00** | **117.161.200,00** | | | | | | | **909.875.400,00** | |
| | 1.06.02.2.02 | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Pengumpulan Sumbangan dalam Kota* | | | | 30 Kegiatan | 30 Kegiatan | 41.040.000,00 | 44.188.000,00 | 38.788.000,00 | -2.252.000,00 | | | - | -<br>- | Pelaksana Pengumpulan Sumbangan | | 57.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.02.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang* | | | | 30 Dokumen | 30 Dokumen | 41.040.000,00 | 44.188.000,00 | 38.788.000,00 | -2.252.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 57.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kota Makassar yang Dikembangkan* | | | | 103 PSKS | 103 PSKS | 751.674.200,00 | 884.230.400,00 | 660.022.232,00 | -91.651.968,00 | | | - | -<br>- | Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial | | 852.875.400,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.03.0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 200 Orang | 100 Orang | 307.355.200,00 | 233.345.400,00 | 191.777.232,00 | -115.577.968,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 393.950.400,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.03.0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 15 Orang | 15 Orang | 221.779.000,00 | 335.756.000,00 | 200.756.000,00 | -21.023.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.03.0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 100 Lembaga | 100 Lembaga | 203.800.000,00 | 281.922.000,00 | 234.282.000,00 | 30.482.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 429.080.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.02.2.03.0005 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 100 Sertifikat | 100 Sertifikat | 18.740.000,00 | 33.207.000,00 | 33.207.000,00 | 14.467.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 29.845.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 3. | **1.06.04** | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | **Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti** | | | | **100 %** | **100 %** | **3.610.251.200,00** | **3.638.075.700,00** | **4.498.230.608,00** | **765.012.951,00** | | | | | | | **4.375.264.151,00** | |
| | 1.06.04.2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | *Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti*<br>*Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti*<br>*Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti*<br>*Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial*<br>*Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti* | | | | 100 % | 100 % | 3.094.524.200,00 | 3.090.242.700,00 | 3.731.318.108,00 | 636.793.908,00 | | | - | -<br>- | Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis | | 3.561.043.732,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0001 | Penyediaan Permakanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1270 Orang | 250 Orang | 682.511.000,00 | 688.015.000,00 | 324.494.000,00 | -358.017.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 240.520.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0002 | Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 250 Orang | 250 Orang | 84.360.000,00 | 84.360.000,00 | 93.760.000,00 | 9.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 86.014.750,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0003 | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 100 Orang | 25 Orang | 80.229.000,00 | 80.229.000,00 | 80.629.000,00 | 400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 137.878.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0004 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 100 Orang | 40 Orang | 119.368.000,00 | 97.170.000,00 | 72.656.000,00 | -46.712.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 38.968.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 810 Orang | 250 Orang | 396.000.000,00 | 477.600.000,00 | 988.505.908,00 | 592.505.908,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 1.063.091.856,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0006 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 200 Orang | 200 Orang | 101.046.000,00 | 101.246.000,00 | 101.246.000,00 | 200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 136.788.501,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0007 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 48 Orang | 40 Orang | 2.000.000,00 | 2.718.000,00 | 2.718.000,00 | 718.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 9.600.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0008 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 100 Orang | 50 Orang | 1.500.000,00 | 2.218.000,00 | 3.718.000,00 | 2.218.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 270.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0009 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 200 Orang | 250 Orang | 123.517.200,00 | 125.817.200,00 | 118.532.200,00 | -4.985.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 83.467.200,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0010 | Pemberian Layanan Kedaruratan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 200 Orang | 250 Orang | 1.097.055.000,00 | 1.021.213.500,00 | 1.535.911.000,00 | 438.856.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 1.327.740.100,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0011 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 5 Orang | 40 Orang | 1.000.000,00 | 1.718.000,00 | 2.338.000,00 | 1.338.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 5.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.01.0012 | Pemberian Layanan Rujukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 25 Orang | 40 Orang | 405.938.000,00 | 407.938.000,00 | 406.810.000,00 | 872.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 161.475.325,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.02 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | *Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial* | | | | 100 % | 100 % | 515.727.000,00 | 547.833.000,00 | 766.912.500,00 | 251.185.500,00 | | | - | -<br>- | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | | 814.220.419,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.02.0001 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 100 Orang | 50 Orang | 98.946.000,00 | 100.246.000,00 | 100.246.000,00 | 1.300.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 42.399.600,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.02.0002 | Pemberian Layanan Kedaruratan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 40 Orang | 20 Orang | 226.336.000,00 | 259.325.000,00 | 43.325.000,00 | -183.011.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 274.020.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.02.0003 | Penyediaan Permakanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 50 Orang | 680 Orang | 54.060.000,00 | 52.925.000,00 | 400.082.500,00 | 346.022.500,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 118.005.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.02.0006 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 200 Orang | 200 Orang | 1.319.000,00 | 1.319.000,00 | 1.319.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 2.278.795,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.02.0007 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 40 Orang | 40 Orang | 98.946.000,00 | 99.946.000,00 | 99.946.000,00 | 1.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 241.217.024,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.02.0010 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 20 Orang | 50 Orang | 500.000,00 | 638.000,00 | 1.138.000,00 | 638.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 36.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.02.0012 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 20 Orang | 25 Orang | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 44.318.000,00 | 20.318.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 56.600.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.04.2.02.0013 | Pemberian Layanan Rujukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 40 Orang | 14 Orang | 11.620.000,00 | 9.434.000,00 | 76.538.000,00 | 64.918.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 43.700.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 4. | **1.06.05** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | **Persentase Fakir Miskin Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial** | | | | **100 %** | **100 %** | **1.671.169.200,00** | **2.871.929.200,00** | **2.939.480.200,00** | **130.730.400,00** | | | | | | | **1.801.899.600,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.06.05.2.01 | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | *Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Perlindungan/Pemeliharaan* | | | | 200 Orang | 200 Orang | 327.835.200,00 | 328.195.200,00 | 329.795.200,00 | 1.960.000,00 | | | - | -<br>- | Anak-Anak Terlantar | | 272.013.600,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.2.01.0003 | Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 200 Orang | 200 Orang | 327.835.200,00 | 328.195.200,00 | 329.795.200,00 | 1.960.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 272.013.600,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Data Fakir Miskin Kota Makassar yang Dikelola* | | | | 30000 KK | 30000 KK | 1.343.334.000,00 | 2.543.734.000,00 | 2.609.685.000,00 | 1.266.351.000,00 | | | - | -<br>- | Data Fakir Miskin | | 1.529.886.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.2.02.0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata* | | | | 30000 Orang | 30000 Orang | 755.838.000,00 | 756.738.000,00 | 756.738.000,00 | 900.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 595.755.200,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.2.02.0002 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota* | | | | 30000 Keluarga | 30000 Keluarga | 122.336.000,00 | 427.856.000,00 | 223.977.000,00 | 101.641.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 102.320.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.2.02.0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 100 Keluarga | 1130 Keluarga | 280.260.000,00 | 1.174.240.000,00 | 1.430.120.000,00 | 1.149.860.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 409.420.400,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.05.2.02.0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 184.900.000,00 | 184.900.000,00 | 198.850.000,00 | 13.950.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 422.390.400,00 | DINAS SOSIAL |
| 5. | **1.06.06** | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | **Persentase Korban Bencana Alam/Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kota** | | | | **100 %** | **100 %** | **1.845.705.100,00** | **2.004.656.100,00** | **2.427.970.100,00** | **-437.343.700,00** | | | | | | | **1.408.361.400,00** | |
| | 1.06.06.2.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | *Jumlah Korban Bencana Alam/Sosial yang Mendapat Perlindungan/Penanganan* | | | | 4000 Jiwa | 7000 Jiwa | 1.741.705.100,00 | 1.421.806.100,00 | 2.013.620.100,00 | 271.915.000,00 | | | - | -<br>- | Korban Bencana Alam dan Sosial | | 1.272.170.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.01.0001 | Penyediaan Makanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 4000 Orang | 7000 Orang | 879.286.600,00 | 820.627.600,00 | 1.412.441.600,00 | 533.155.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 1.099.400.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.01.0002 | Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 250 Orang | 7000 Orang | 180.379.600,00 | 173.181.600,00 | 173.181.600,00 | -7.198.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 65.500.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.01.0003 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 184.367.600,00 | 134.147.600,00 | 134.147.600,00 | -50.220.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 22.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.01.0004 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 200 Orang | 1500 Orang | 386.498.800,00 | 259.596.800,00 | 259.596.800,00 | -126.902.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 80.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.01.0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 300 Orang | 300 Orang | 111.172.500,00 | 34.252.500,00 | 34.252.500,00 | -76.920.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 5.270.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.02 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | *Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota* | | | | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 104.000.000,00 | 582.850.000,00 | 414.350.000,00 | 310.350.000,00 | | | - | -<br>- | Taruna Siaga Bencana | | 136.191.400,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.06.2.02.0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 104.000.000,00 | 582.850.000,00 | 414.350.000,00 | 310.350.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 136.191.400,00 | DINAS SOSIAL |
| 6. | **1.06.07** | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | **Jumlah Taman Makam Pahlawan Yang Mendapat Pengelolaan Secara Baik** | | | | **1 Lokasi** | **1 Lokasi** | **472.147.600,00** | **513.923.000,00** | **522.163.000,00** | **-12.157.200,00** | | | | | | | **459.990.400,00** | |
| | 1.06.07.2.01 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | *Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kota Makassar yang Mendapat Pemeliharaan* | | | | 1 Lokasi | 1 Lokasi | 472.147.600,00 | 513.923.000,00 | 522.163.000,00 | 50.015.400,00 | | | - | -<br>- | Taman Makam Pahlawan | | 459.990.400,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1.06.07.2.01.0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Makam | 1 Makam | 472.147.600,00 | 513.923.000,00 | 522.163.000,00 | 50.015.400,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 459.990.400,00 | DINAS SOSIAL |
| | | **DINAS KETENAGAKERJAAN** | | | | | | | **14.144.800.000,00** | **25.185.364.383,00** | **24.903.554.000,00** | **10.758.754.000,00** | | | | | | | **2.488.661.680,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **14.144.800.000,00** | **25.185.364.383,00** | **24.903.554.000,00** | **10.758.754.000,00** | | | | | | | **2.488.661.680,00** | |
| | **2.07** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | | **14.144.800.000,00** | **25.185.364.383,00** | **24.903.554.000,00** | **10.758.754.000,00** | | | | | | | **2.488.661.680,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | **2.07.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur** | | | | **100 90 % %** | **100 90 % %** | **10.702.071.376,00** | **12.914.186.323,00** | **12.772.899.040,00** | **-10.702.071.376,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 2.07.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 13 Dokumen 15 Dokumen | 15 Dokumen | 98.065.000,00 | 96.465.000,00 | 54.385.000,00 | -43.680.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Perangkat Daerah | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 3 Dokumen | 61.260.000,00 | 60.780.000,00 | 41.400.000,00 | -19.860.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.345.000,00 | 5.825.000,00 | 2.825.000,00 | -3.520.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.920.000,00 | 5.620.000,00 | 2.620.000,00 | -3.300.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.105.000,00 | 4.805.000,00 | 1.805.000,00 | -3.300.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.105.000,00 | 5.105.000,00 | 1.805.000,00 | -3.300.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 7.130.000,00 | 7.130.000,00 | 1.130.000,00 | -6.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 2 Laporan | 4 Laporan | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 2.800.000,00 | -4.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 12 Bulan 12 Dokumen | 12 Dokumen | 8.942.428.612,00 | 10.765.288.205,00 | 10.765.288.890,00 | 1.822.860.278,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Perangkat Daerah | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 61 Orang/bulan | 79 Orang/bulan | 8.488.576.612,00 | 10.305.808.205,00 | 10.305.808.890,00 | 1.817.232.278,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 271.320.000,00 | 276.948.000,00 | 276.948.000,00 | 5.628.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 182.532.000,00 | 182.532.000,00 | 182.532.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 42.488.600,00 | 42.668.600,00 | 42.668.600,00 | 180.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Perangkat Daerah | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 42.488.600,00 | 42.668.600,00 | 42.668.600,00 | 180.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 12 Dokumen | 100 % 12 Dokumen | 259.844.000,00 | 498.944.000,00 | 368.103.800,00 | 108.259.800,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Perangkat Daerah | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 110 Paket | 110 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 199.844.000,00 | 200.444.000,00 | 137.103.800,00 | -62.740.200,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 20 Orang | 73 Orang | 60.000.000,00 | 298.500.000,00 | 231.000.000,00 | 171.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Jenis Jasa Adminitrasi Umum yang Tersedia* | | | | 7 Jenis | 7 Jenis | 496.078.880,00 | 531.308.680,00 | 384.868.680,00 | -111.210.200,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Perangkat Daerah | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 9.936.000,00 | 9.936.000,00 | 9.936.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 5 Paket | 60.189.080,00 | 60.411.080,00 | 60.411.080,00 | 222.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 28.413.800,00 | 76.431.600,00 | 76.431.600,00 | 48.017.800,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 25.200.000,00 | 25.200.000,00 | 25.200.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 26.100.000,00 | 26.100.000,00 | 26.100.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 312.040.000,00 | 316.430.000,00 | 172.390.000,00 | -139.650.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 34.200.000,00 | 16.800.000,00 | 14.400.000,00 | -19.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Unit Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 86 Unit | 86 Unit | 0,00 | 0,00 | 59.208.000,00 | 59.208.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Perangkat Daerah | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 25 Unit | 25 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | - | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 59.208.000,00 | 59.208.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 60 Unit | 60 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.01.2.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*<br>*Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 12 Laporan | 100 %<br>12 Laporan | 600.136.284,00 | 648.605.838,00 | 570.311.070,00 | -29.825.214,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Perangkat Daerah | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 199.409.000,00 | 200.009.000,00 | 200.009.000,00 | 600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 326.992.084,00 | 331.596.838,00 | 248.802.070,00 | -78.190.014,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 73.735.200,00 | 117.000.000,00 | 121.500.000,00 | 47.764.800,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 49 Unit | 118 Unit | 263.030.000,00 | 330.906.000,00 | 528.065.000,00 | 265.035.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | Perangkat Daerah | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 44.380.000,00 | 44.380.000,00 | 40.880.000,00 | -3.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 16 Unit | 16 Unit | 204.440.000,00 | 249.586.000,00 | 248.830.000,00 | 44.390.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 30 Unit | 54 Unit | 14.210.000,00 | 36.940.000,00 | 42.940.000,00 | 28.730.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | - | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 195.415.000,00 | 195.415.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| 2. | **2.07.02** | **PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA** | **Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja** | | | | **96.77 %** | **96,67 %** | **105.621.000,00** | **137.571.000,00** | **95.071.000,00** | **40.496.000,00** | | | | | | | **146.117.000,00** | |
| | 2.07.02.2.01 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | *Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja* | | | | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 105.621.000,00 | 137.571.000,00 | 95.071.000,00 | -10.550.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Pemerintah dan Perusahaan | | 146.117.000,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.02.2.01.0001 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 62.700.000,00 | 69.050.000,00 | 42.550.000,00 | -20.150.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 99.855.360,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.02.2.01.0003 | Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro* | | | | 40 Orang | 50 Orang | 42.921.000,00 | 68.521.000,00 | 52.521.000,00 | 9.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 46.261.640,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| 3. | **2.07.03** | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | **Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi<br>Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Ketenagakerjaan<br>Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya<br>Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja** | | | | **1.03 %** | **1.03<br>1230<br>20.49<br>22.50 %<br>orang<br>%<br>%** | **1.587.007.500,00** | **2.674.887.000,00** | **2.748.079.400,00** | **755.537.180,00** | | | | | | | **2.342.544.680,00** | |
| | 2.07.03.2.01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | *Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan<br>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun* | | | | 416 Orang | 176 Orang<br>240 Orang | 634.974.700,00 | 1.162.999.400,00 | 1.352.999.400,00 | 718.024.700,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Pencari Kerja | | 2.342.544.680,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.03.2.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n* | | | | 560 Orang | 176 Orang | 631.982.200,00 | 1.160.720.400,00 | 1.350.720.400,00 | 718.738.200,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 2.142.138.840,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.03.2.01.0002 | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n* | | | | 20 Lembaga | 20 Lembaga | 2.992.500,00 | 2.279.000,00 | 2.279.000,00 | -713.500,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 200.405.840,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.03.2.02 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | *Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina* | | | | 20 Lembaga | 50 Lembaga | 765.300,00 | 10.341.800,00 | 10.341.800,00 | 9.576.500,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.03.2.02.0001 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina* | | | | 20 Lembaga | 50 Lembaga | 765.300,00 | 10.341.800,00 | 10.341.800,00 | 9.576.500,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.07.03.2.03 | Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja | *Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi* | | | | 12 Perizinan | 12 Perizinan | 196.265.100,00 | 183.327.400,00 | 138.217.000,00 | -58.048.100,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.03.2.03.0001 | Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi* | | | | 12 Perizinan | 12 Perizinan | 196.265.100,00 | 183.327.400,00 | 138.217.000,00 | -58.048.100,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.03.2.04 | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | *Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas* | | | | - | 100 Perusahaan<br>600 Perusahaan | 334.498.800,00 | 395.438.800,00 | 323.741.600,00 | -10.757.200,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Perusahaan Kecil | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.03.2.04.0001 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas* | | | | 250 Perusahaan | 100 Perusahaan | 334.498.800,00 | 395.438.800,00 | 323.741.600,00 | -10.757.200,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.03.2.05 | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah* | | | | 1 Dokumen<br>1 Kali | 1 Dokumen | 420.503.600,00 | 922.779.600,00 | 922.779.600,00 | 502.276.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Tenaga Kerja dan Perusahaan | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.03.2.05.0001 | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 420.503.600,00 | 922.779.600,00 | 922.779.600,00 | 502.276.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| 4. | **2.07.04** | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | **Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota Makassar<br>Jumlah Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru** | | | | **65<br>9.745 %** | **65<br>9.745 %** | **909.458.920,00** | **1.278.345.360,00** | **1.053.481.660,00** | **-909.458.920,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 2.07.04.2.01 | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Tenaga kerja yang Ditempatkan, Diberdayakan dan Fasilitasi Layanan* | | | | 4383 Orang | 4383 Orang | 570.296.720,00 | 830.427.560,00 | 687.715.860,00 | 117.419.140,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Perusahaan dan Pencari Kerja | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.04.2.01.0001 | Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.04.2.01.0002 | Pelayanan antar Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL* | | | | 4000 Orang | 4000 Orang | 215.757.240,00 | 214.518.960,00 | 201.368.960,00 | -14.388.280,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan* | | | | 0 Orang | 100 Orang | 40.346.000,00 | 134.478.600,00 | 67.478.600,00 | 27.132.600,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.04.2.01.0004 | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.04.2.01.0004 | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD* | | | | - | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 39.455.300,00 | 39.455.300,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.04.2.01.0005 | Perluasan Kesempatan Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja* | | | | 183 Orang | 140 Orang | 314.193.480,00 | 481.430.000,00 | 379.413.000,00 | 65.219.520,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.04.2.02 | Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi* | | | | - | 5 Lembaga<br>6 Lembaga | 91.357.400,00 | 92.477.400,00 | 84.897.400,00 | -6.460.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.04.2.02.0001 | Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi* | | | | 6 Lembaga | 6 Lembaga | 42.698.400,00 | 42.818.400,00 | 42.818.400,00 | 120.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.04.2.02.0002 | Pengawasan dan Pengendalian LPTKS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku* | | | | 4 Lembaga | 4 Lembaga | 48.659.000,00 | 49.659.000,00 | 42.079.000,00 | -6.580.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.04.2.03 | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | *Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)* | | | | 8000 Orang | 8000 Orang | 115.724.800,00 | 115.964.800,00 | 115.964.800,00 | 240.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | Perusahaan dan Pencari Kerja | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.04.2.03.0001 | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 42.698.400,00 | 42.818.400,00 | 42.818.400,00 | 120.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.04.2.03.0002 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)* | | | | 8000 Orang | 8000 Orang | 73.026.400,00 | 73.146.400,00 | 73.146.400,00 | 120.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.04.2.03.0003 | Job Fair/Bursa Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja* | | | | 1000 Orang | 1000 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.04.2.04 | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah PMI yang Mendapatkan Perlindungan dan Pemberdayaan* | | | | 140 Orang 240 Orang | 190 Orang | 132.080.000,00 | 239.475.600,00 | 164.903.600,00 | 32.823.600,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | Pekerja Migran Indonesia | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.04.2.04.0001 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya* | | | | 100 Orang | 150 Orang | 41.398.000,00 | 36.609.600,00 | 35.109.600,00 | -6.288.400,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.04.2.04.0003 | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan* | | | | 40 Orang | 40 Orang | 90.682.000,00 | 202.866.000,00 | 129.794.000,00 | 39.112.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 5. | **2.07.05** | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | **Angka sengketa perusahaan-pekerja per tahun**<br>**Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak**<br>**Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama** | | | | **3.27**<br>**51.01**<br>**84 %**<br>**%**<br>**%** | **3.27**<br>**51.01**<br>**84 %**<br>**%**<br>**%** | **840.641.204,00** | **8.180.374.700,00** | **8.234.022.900,00** | **-840.641.204,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 2.07.05.2.01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Pelayanan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama*<br>*Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama* | | | | 105 Perusahaan<br>12 Bulan | 105 Perusahaan<br>12 Bulan | 0,00 | 0,00 | 40.325.400,00 | 40.325.400,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Perusahaan dan Tenaga Kerja | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.05.2.01.0001 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online* | | | | 100 Perusahaan | 100 Perusahaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.05.2.01.0002 | Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama* | | | | 5 Perusahaan | 5 Perusahaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.05.2.01.0003 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.05.2.01.0003 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan* | | | | - | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 40.325.400,00 | 40.325.400,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.05.2.02 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Perkara Perselisihan yang diselesaikan* | | | | - | 100 Persen | 840.641.204,00 | 8.180.374.700,00 | 8.193.697.500,00 | 7.353.056.296,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Perusahaan dan Tenaga Kerja | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.05.2.02.0001 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perselisihan yang Dicegah* | | | | 60 Perkara | 60 Perkara | 274.087.200,00 | 377.420.400,00 | 467.320.400,00 | 193.233.200,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.05.2.02.0002 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan* | | | | 200 Perkara | 200 Perkara | 130.688.200,00 | 221.048.200,00 | 159.671.000,00 | 28.982.800,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.05.2.02.0003 | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi* | | | | 12 Asosiasi dan Serikat Pekerja | 12 Asosiasi dan Serikat Pekerja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.05.2.02.0004 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah LKS Tripartit yang Dibina* | | | | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 231.708.000,00 | 232.578.000,00 | 226.578.000,00 | -5.130.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | 2.07.05.2.02.0005 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja* | | | | 150 Orang | 34722 Orang | 204.157.804,00 | 7.349.328.100,00 | 7.340.128.100,00 | 7.135.970.296,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| | | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | **12.005.500.000,00** | **18.721.283.227,00** | **18.346.867.000,00** | **6.341.367.000,00** | | | | | | | **17.246.187.403,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **12.005.500.000,00** | **18.721.283.227,00** | **18.346.867.000,00** | **6.341.367.000,00** | | | | | | | **17.246.187.403,00** | |
| | **2.08** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | **12.005.500.000,00** | **18.721.283.227,00** | **18.346.867.000,00** | **6.341.367.000,00** | | | | | | | **17.246.187.403,00** | |
| 1. | **2.08.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah**<br>**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik** | | | | **100**<br>**90 Persen Persen** | **100**<br>**90 Persen Persen** | **7.762.554.780,00** | **11.783.185.035,00** | **11.290.005.208,00** | **800.036.220,00** | | | | | | | **8.562.591.000,00** | |
| | 2.08.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | 100 Persen | - | 161.392.400,00 | 144.933.580,00 | 100.873.580,00 | -60.518.820,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | ASN DP3A | | 229.600.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 76.455.000,00 | 57.680.000,00 | 51.520.000,00 | -24.935.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 93.022.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.665.000,00 | 11.900.500,00 | 8.400.500,00 | -264.500,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 21.025.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.605.000,00 | 12.520.000,00 | 9.020.000,00 | 415.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 17.428.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.605.000,00 | 8.615.000,00 | 5.115.000,00 | -3.490.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 19.529.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.545.000,00 | 8.360.000,00 | 4.860.000,00 | -3.685.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 19.845.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 31.847.400,00 | 26.158.080,00 | 12.158.080,00 | -19.689.320,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 33.247.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 18.670.000,00 | 19.700.000,00 | 9.800.000,00 | -8.870.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 25.504.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 6.285.706.480,00 | 8.720.447.655,00 | 8.706.447.828,00 | 2.420.741.348,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | ASN/NON ASN | | 5.809.690.174,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 31 Orang/bulan | 31 Orang/bulan | 5.744.321.480,00 | 8.162.327.707,00 | 8.162.327.880,00 | 2.418.006.400,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 5.277.094.174,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.08.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 518.640.000,00 | 537.240.000,00 | 537.240.000,00 | 18.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 505.440.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.520.000,00 | 5.520.000,00 | 5.520.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 12.105.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 17.225.000,00 | 15.359.948,00 | 1.359.948,00 | -15.865.052,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 15.051.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Presentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 84.000.000,00 | 573.000.000,00 | 246.000.000,00 | 162.000.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 220.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 15 Orang | 15 Orang | 84.000.000,00 | 573.000.000,00 | 246.000.000,00 | 162.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 220.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 333.555.200,00 | 1.315.341.000,00 | 1.276.661.400,00 | 943.106.200,00 | | | - | -<br>- | ASN DP3A | | 1.160.824.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 10 Paket | 10 Paket | 121.675.200,00 | 1.132.461.000,00 | 1.132.781.400,00 | 1.011.106.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 64.224.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 18 Dokumen | 18 Dokumen | 79.880.000,00 | 79.880.000,00 | 70.880.000,00 | -9.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 36.600.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 34 Laporan | 34 Laporan | 132.000.000,00 | 103.000.000,00 | 73.000.000,00 | -59.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 1.060.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 100 persen | 100 persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | - | | 246.700.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 7 Unit | 7 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 246.700.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.08.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 persen | 100 persen | 634.436.700,00 | 663.266.800,00 | 607.568.400,00 | -26.868.300,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | ASN DP3A | | 601.080.826,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 573.886.800,00 | 575.626.800,00 | 535.928.400,00 | -37.958.400,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 517.577.186,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 18.667.500,00 | 21.690.000,00 | 21.690.000,00 | 3.022.500,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 61.635.640,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 41.882.400,00 | 65.950.000,00 | 49.950.000,00 | 8.067.600,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 21.868.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 263.464.000,00 | 366.196.000,00 | 352.454.000,00 | 88.990.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Kendaraan Dinas OPD | | 294.196.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 8 Unit | 8 Unit | 241.784.000,00 | 344.516.000,00 | 330.774.000,00 | 88.990.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 233.296.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 27 Unit | 27 Unit | 21.680.000,00 | 21.680.000,00 | 21.680.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 60.900.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2. | **2.08.02** | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | **Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD** | | | | **80 Persen** | **80 Persen** | **371.175.000,00** | **756.255.000,00** | **1.003.833.000,00** | **3.633.690.000,00** | | | | | | | **4.004.865.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.08.02.2.01 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | *Jumlah pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah kewenangan kota makassar yang dilaksanakan* | | | | 17 Kegiatan | 17 Kegiatan | 214.715.000,00 | 284.265.000,00 | 68.143.000,00 | -146.572.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Masyarakat/OPD/Lembaga Terkait/Ormas | | 917.256.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 41.643.000,00 | 84.793.000,00 | 16.193.000,00 | -25.450.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 192.993.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.02.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 93.150.000,00 | 119.550.000,00 | 37.150.000,00 | -56.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 122.350.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.02.2.01.0006 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG* | | | | 51 Orang | 51 Orang | 46.650.000,00 | 46.650.000,00 | 14.800.000,00 | -31.850.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 132.657.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.02.2.01.0008 | Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota* | | | | 51 Orang | 51 Orang | 33.272.000,00 | 33.272.000,00 | 0,00 | -33.272.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 469.256.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.02.2.02 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 30.600.000,00 | 336.600.000,00 | 850.200.000,00 | 819.600.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Lembaga/organisasi perempuan/parpol | | 1.583.170.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.02.2.02.0001 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 83.170.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.02.2.02.0002 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 6 Organisasi | 6 Organisasi | 30.600.000,00 | 336.600.000,00 | 850.200.000,00 | 819.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 1.500.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.08.02.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | *Tercapainya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kota Makassar yang dilaksanaka* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 125.860.000,00 | 135.390.000,00 | 85.490.000,00 | -40.370.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 1.504.439.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.02.2.03.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan* | | | | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 25.100.000,00 | 25.100.000,00 | 17.300.000,00 | -7.800.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 371.365.500,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.02.2.03.0003 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 37.920.000,00 | 47.450.000,00 | 47.450.000,00 | 9.530.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 162.193.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.02.2.03.0005 | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/ Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP tingkat kab/kota* | | | | 15 Orang | 15 Orang | 62.840.000,00 | 62.840.000,00 | 20.740.000,00 | -42.100.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 970.880.500,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 3. | **2.08.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | **Rasio kekerasan terhadap perempuan-termasuk TPPO-per 100.000 penduduk perempuan** | | | | **79.56 %** | **79.56 %** | **1.569.784.000,00** | **2.160.477.000,00** | **2.692.164.000,00** | **-62.184.000,00** | | | | | | | **1.507.600.000,00** | |
| | 2.08.03.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | *Capaian Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga* | | | | 0 Persen | 0 Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Masyarakat/OPD/Lembaga Terkait/Ormas | | 57.767.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.03.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 20.772.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.03.2.01.0002 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 51 Perangkat Daerah | 51 Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 36.995.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.03.2.02 | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 1.323.765.000,00 | 1.320.965.000,00 | 1.395.252.000,00 | 71.487.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Masyarakat/OPD/Lembaga Terkait/Ormas | | 859.676.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.03.2.02.0001 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan* | | | | 400 Orang | 400 Orang | 1.323.765.000,00 | 1.320.965.000,00 | 1.287.065.000,00 | -36.700.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 824.332.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.03.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Layanan | 1 Layanan | 0,00 | 0,00 | 108.187.000,00 | 108.187.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - | | | | 35.344.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.03.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 246.019.000,00 | 839.512.000,00 | 1.296.912.000,00 | 1.050.893.000,00 | | | - | - | - | | 590.157.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.03.2.03.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 114.450.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 66.328.000,00 | 537.428.000,00 | 529.128.000,00 | 462.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 111.647.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.03.2.03.0003 | Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 109.350.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.03.2.03.0004 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 40 Dokumen | 40 Dokumen | 179.691.000,00 | 302.084.000,00 | 767.784.000,00 | 588.093.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 254.710.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 4. | **2.08.04** | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | **-** | | | | **-** | **-** | **423.824.600,00** | **602.535.000,00** | **603.440.600,00** | **863.131.403,00** | | | | | | | **1.286.956.003,00** | |
| | 2.08.04.2.01 | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 63.074.000,00 | 153.374.000,00 | 38.574.000,00 | -24.500.000,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | - - | Masyarakat/OPD/Lembaga Terkait/Ormas | | 376.379.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.04.2.01.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 153 Perangkat Daerah | 153 Perangkat Daerah | 33.374.000,00 | 33.374.000,00 | 20.974.000,00 | -12.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | - - | | | 182.572.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.04.2.01.0002 | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 29.700.000,00 | 120.000.000,00 | 17.600.000,00 | -12.100.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | - - | | | 26.295.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.04.2.01.0003 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | - - | | | 167.512.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.04.2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 53.400.000,00 | 83.100.000,00 | 214.600.000,00 | 161.200.000,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | - - | Masyarakat/OPD/Lembaga Terkait/Ormas | | 752.589.003,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.04.2.02.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan* | | | | 3 Lembaga | 3 Lembaga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | - - | | | 159.036.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.04.2.02.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 29.700.000,00 | 59.400.000,00 | 197.300.000,00 | 167.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | - - | | | 112.353.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.08.04.2.02.0003 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 23.700.000,00 | 23.700.000,00 | 17.300.000,00 | -6.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | - - | | | 481.200.003,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.04.2.03 | Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | *meningkatnya Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 307.350.600,00 | 366.061.000,00 | 350.266.600,00 | 42.916.000,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | - - | Masyarakat/OPD/Lembaga Terkait/Ormas | | 157.988.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.04.2.03.0001 | Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia* | | | | 2 Layanan | 2 Layanan | 307.350.600,00 | 366.061.000,00 | 350.266.600,00 | 42.916.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | - - | | | 157.988.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 5. | **2.08.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** | **Persentase data komponen Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang tersedia Persentase data indikator Pengarus Utamaan Gender yang Tersedia Persentase data komponen Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang tersedia** | | | | **83,9 89,57 94,55 Persen Persen Persen** | **83,9 89,57 94,55 Persen Persen Persen** | **93.850.000,00** | **77.850.000,00** | **43.050.000,00** | **222.503.000,00** | | | | | | | **316.353.000,00** | |
| | 2.08.05.2.01 | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *MeningkatnyaPengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 93.850.000,00 | 77.850.000,00 | 43.050.000,00 | -50.800.000,00 | | | - | - - | OPD/Lembaga | | 316.353.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.05.2.01.0001 | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 42.830.000,00 | 42.830.000,00 | 24.930.000,00 | -17.900.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 132.347.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.05.2.01.0002 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 51.020.000,00 | 35.020.000,00 | 18.120.000,00 | -32.900.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 184.006.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 6. | **2.08.06** | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | **-** | | | | **-** | **-** | **331.960.000,00** | **933.259.000,00** | **563.059.000,00** | **281.458.400,00** | | | | | | | **613.418.400,00** | |
| | 2.08.06.2.01 | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 33.035.000,00 | 121.004.000,00 | 73.104.000,00 | 40.069.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | - - | Masyarakat/OPD/Dunia Usaha, Ormas | | 18.391.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.06.2.01.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha* | | | | 1 Organisasi | 1 Organisasi | 33.035.000,00 | 121.004.000,00 | 73.104.000,00 | 40.069.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | - - | | | 18.391.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.06.2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | *Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 298.925.000,00 | 812.255.000,00 | 489.955.000,00 | 191.030.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Masyarakat/OPD/Lembaga Terkait/Ormas | | 595.027.400,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.06.2.02.0001 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 48 Orang | 48 Orang | 61.955.000,00 | 93.155.000,00 | 118.755.000,00 | 56.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 36.864.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.06.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 110.200.000,00 | 92.100.000,00 | 84.100.000,00 | -26.100.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 137.918.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.06.2.02.0003 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 116.670.000,00 | 618.100.000,00 | 279.700.000,00 | 163.030.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 401.683.200,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.06.2.02.0004 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.100.000,00 | 8.900.000,00 | 7.400.000,00 | -2.700.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 18.562.200,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 7. | **2.08.07** | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | **Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait** | | | | **97.84 %** | **97.84 %** | **1.452.351.620,00** | **2.407.722.192,00** | **2.151.315.192,00** | **-497.947.620,00** | | | | | | | **954.404.000,00** | |
| | 2.08.07.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | *Meningkatnya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 242.480.000,00 | 394.483.000,00 | 411.833.000,00 | 169.353.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Masyarakat/OPD/Lembaga Terkait/Ormas | | 545.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.07.2.01.0004 | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA* | | | | 300 Orang | 300 Orang | 242.480.000,00 | 394.483.000,00 | 411.833.000,00 | 169.353.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 545.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.07.2.02 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 1.160.651.620,00 | 1.365.902.192,00 | 1.520.345.192,00 | 359.693.572,00 | | | - | - - | - | | 139.404.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.07.2.02.0007 | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan* | | | | 15 Layanan | 15 Layanan | 1.160.651.620,00 | 1.365.902.192,00 | 1.520.345.192,00 | 359.693.572,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 139.404.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.07.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 49.220.000,00 | 647.337.000,00 | 219.137.000,00 | 169.917.000,00 | | | - | - - | - | | 270.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.07.2.03.0006 | Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK* | | | | 80 Orang | 80 Orang | 36.704.000,00 | 634.821.000,00 | 206.621.000,00 | 169.917.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 150.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | 2.08.07.2.03.0008 | Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus* | | | | 30 Orang | 30 Orang | 12.516.000,00 | 12.516.000,00 | 12.516.000,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 120.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| | | **DINAS KETAHANAN PANGAN** | | | | | | | **20.065.600.000,00** | **25.222.054.297,00** | **15.729.883.000,00** | **-4.335.717.000,00** | | | | | | | **22.917.656.223,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **20.065.600.000,00** | **25.222.054.297,00** | **15.729.883.000,00** | **-4.335.717.000,00** | | | | | | | **22.917.656.223,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **2.09** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | | **20.065.600.000,00** | **25.222.054.297,00** | **15.729.883.000,00** | **-4.335.717.000,00** | | | | | | | **22.917.656.223,00** | |
| 1. | **2.09.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur** | | | | **100 90 90 % % %** | **100 90 % %** | **8.576.451.760,00** | **11.752.795.669,00** | **10.086.456.724,00** | **-1.141.357.660,00** | | | | | | | **7.435.094.100,00** | |
| | 2.09.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang selesai tepat waktu* | | | | 12 Dokumen | 100 % | 194.232.500,00 | 209.483.500,00 | 125.503.500,00 | -68.729.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Meningkatnya akuntabilitas, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah. | | 320.621.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 12 Dokumen | 4 Dokumen | 125.432.000,00 | 146.112.000,00 | 90.532.000,00 | -34.900.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 159.520.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 8.638.000,00 | 8.864.000,00 | 5.364.000,00 | -3.274.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 9.984.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 8.684.000,00 | 8.684.000,00 | 5.184.000,00 | -3.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 9.161.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 8.953.000,00 | 8.953.000,00 | 5.453.000,00 | -3.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 9.595.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 8.889.500,00 | 8.889.500,00 | 5.389.500,00 | -3.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 9.005.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 17.765.000,00 | 17.765.000,00 | 7.765.000,00 | -10.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 22.141.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 2 Laporan | 4 Laporan | 15.871.000,00 | 10.216.000,00 | 5.816.000,00 | -10.055.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 101.215.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun* | | | | 100 Persen | 100 % | 6.792.641.260,00 | 8.171.243.557,00 | 8.212.284.012,00 | 1.419.642.752,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Meningkatnya akuntabilitas, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah. | | 6.093.944.700,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 33 Orang/bulan | 74 Orang/bulan | 6.370.151.260,00 | 7.719.593.557,00 | 7.719.594.012,00 | 1.349.442.752,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 5.764.049.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 240.120.000,00 | 269.280.000,00 | 310.320.000,00 | 70.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 134.640.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.09.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 1 Dokumen | 182.370.000,00 | 182.370.000,00 | 182.370.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 168.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 18.329.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 8.926.700,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana* | | | | 100 Persen | 100 % | 72.000.000,00 | 945.000.000,00 | 186.000.000,00 | 114.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Meningkatnya akuntabilitas, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah. | | 290.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 70 Orang | 15 Orang | 72.000.000,00 | 945.000.000,00 | 186.000.000,00 | 114.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 290.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Pesentase penyediaan layanan umum kantor* | | | | 100 Persen | 100 % | 885.497.600,00 | 1.585.214.612,00 | 935.592.612,00 | 50.095.012,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | Meningkatnya akuntabilitas, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah. | | 313.467.400,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 4 Paket | 133.573.800,00 | 434.844.600,00 | 70.684.600,00 | -62.889.200,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 10.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 213.539.800,00 | 227.399.800,00 | 227.399.800,00 | 13.860.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 21.600.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 14.330.000,00 | 7.822.212,00 | 7.822.212,00 | -6.507.788,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 5.867.400,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 40 Laporan | 25 Laporan | 280.514.000,00 | 422.608.000,00 | 225.096.000,00 | -55.418.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 173.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 3 Dokumen | 1 Dokumen | 243.540.000,00 | 492.540.000,00 | 404.590.000,00 | 161.050.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 103.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Tersedianya BMD Penunjang Urusan PD* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | Meningkatnya akuntabilitas, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah. | | 10.980.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 10.980.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase penyediaan jasa penunjang perangkat daerah* | | | | 100 Persen | 100 % | 446.332.400,00 | 599.784.000,00 | 424.346.600,00 | -21.985.800,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | Meningkatnya akuntabilitas, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah. | | 72.215.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 55.800.000,00 | 55.800.000,00 | 55.800.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 59.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 390.532.400,00 | 543.984.000,00 | 368.546.600,00 | -21.985.800,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 13.215.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara* | | | | 100 Persen | 80 % | 185.748.000,00 | 242.070.000,00 | 202.730.000,00 | 16.982.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | Meningkatnya akuntabilitas, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah. | | 333.866.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 43.630.000,00 | 43.630.000,00 | 40.880.000,00 | -2.750.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 89.284.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 12 Unit | 10 Unit | 89.448.000,00 | 145.770.000,00 | 115.890.000,00 | 26.442.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 187.392.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 19 Unit | 57 Unit | 52.670.000,00 | 52.670.000,00 | 45.960.000,00 | -6.710.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 57.190.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 2. | **2.09.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN** | **Persentase Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Persentase Ketersediaan Pangan Utama** | | | | **93 %** | **100<br>93 %<br>%** | **8.000.000,00** | **225.247.940,00** | **0,00** | **197.570.000,00** | | | | | | | **205.570.000,00** | |
| | 2.09.02.2.01 | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 15 Kecamatan | 1 Dokumen | 8.000.000,00 | 225.247.940,00 | 0,00 | -8.000.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | Masyarakat ; Kelompok Masyarakat | | 205.570.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.02.2.01.0003 | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia* | | | | 1 Unit | 2 Unit | 8.000.000,00 | 225.247.940,00 | 0,00 | -8.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 205.570.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 3. | **2.09.03** | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | **Tingkat Konsumsi Energi Berdasarkan Angka Kecukupan Energi Tingkat Ketersediaan Energi Berdasarkan Angka Kecukupan Energi** | | | | **500 88 "Energi: 2.700 Protein: 128" Lorong** | **2100 2400 Kkal / Kapita kkal/kapita** | **10.923.363.640,00** | **10.670.565.488,00** | **4.735.914.076,00** | **3.236.917.783,00** | | | | | | | **14.160.281.423,00** | |
| | 2.09.03.2.01 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | *Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang terlaksana* | | | | 1 Dokumen | 91 % | 376.762.840,00 | 568.771.408,00 | 1.672.802.396,00 | 1.296.039.556,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | - - | Meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat dengan menjaga ketersediaan pangan dan meningkatkan konsumsi pangan yang bergizi seimbang dan aman. | | 1.050.187.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya* | | | | 12 Laporan | 2 Laporan | 129.156.800,00 | 169.256.340,00 | 1.381.761.840,00 | 1.252.605.040,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | - - | | | 234.587.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.01.0007 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga* | | | | - | 150 Keluarga | 0,00 | 0,00 | 23.356.048,00 | 23.356.048,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Camba Berua | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | - - | | | 30.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.01.0008 | Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota* | | | | - | 3 laporan | 0,00 | 0,00 | 66.275.488,00 | 66.275.488,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | - - | | | 80.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.01.0014 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis* | | | | 15 Laporan | 1 Laporan | 145.000.000,00 | 197.665.048,00 | 75.960.000,00 | -69.040.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | - - | | | 352.800.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.01.0016 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 102.606.040,00 | 201.850.020,00 | 125.449.020,00 | 22.842.980,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | - - | | | 352.800.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.02 | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota* | | | | - | 1 Dokumen | 110.868.600,00 | 84.993.000,00 | 0,00 | -110.868.600,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | - - | Meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat dengan menjaga ketersediaan pangan dan meningkatkan konsumsi pangan yang bergizi seimbang dan aman | | 90.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.02.0003 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota* | | | | 20 Ton | 5 Ton | 110.868.600,00 | 84.993.000,00 | 0,00 | -110.868.600,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | - - | | | 90.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | *Persentase Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi* | | | | 1 Kota Makassar | 90 % | 10.435.732.200,00 | 10.016.801.080,00 | 3.063.111.680,00 | -7.372.620.520,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | - - | Meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat dengan menjaga ketersediaan pangan dan meningkatkan konsumsi pangan yang bergizi seimbang dan aman | | 13.020.094.423,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.04.0001 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.300.000,00 | 123.009.000,00 | 92.059.000,00 | 79.759.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | - - | | | 103.504.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal* | | | | 20 Laporan | 2 Laporan | 10.283.317.200,00 | 9.530.364.080,00 | 2.506.205.680,00 | -7.777.111.520,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | - - | | | 12.763.622.569,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.09.03.2.04.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun* | | | | 4 Laporan | 3 Laporan | 140.115.000,00 | 363.428.000,00 | 464.847.000,00 | 324.732.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | | | 152.967.854,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 4. | **2.09.04** | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | **Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan** | | | | **11.76 %** | **1,31 %** | **247.718.200,00** | **1.282.429.800,00** | **528.700.000,00** | **181.813.800,00** | | | | | | | **429.532.000,00** | |
| | 2.09.04.2.01 | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | *Persentase Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan Kota* | | | | 1 Laporan | 100 % | 110.011.200,00 | 106.177.000,00 | 154.609.000,00 | 44.597.800,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | Meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat dengan menjaga ketersediaan pangan dan meningkatkan konsumsi pangan yang bergizi seimbang dan aman. | | 252.482.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.04.2.01.0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 110.011.200,00 | 106.177.000,00 | 154.609.000,00 | 44.597.800,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | | | 252.482.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.04.2.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | *Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan KabupatenKota yang terlaksana* | | | | 1 Laporan | 100 % | 137.707.000,00 | 1.176.252.800,00 | 374.091.000,00 | 236.384.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | Meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat dengan menjaga ketersediaan pangan dan meningkatkan konsumsi pangan yang bergizi seimbang dan aman. | | 177.050.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 79.258.000,00 | 735.113.800,00 | 225.744.000,00 | 146.486.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | | | 73.637.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.04.2.02.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota* | | | | 2 Laporan | 3 Laporan | 58.449.000,00 | 441.139.000,00 | 136.189.000,00 | 77.740.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | | | 88.413.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.04.2.02.0005 | Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 12.158.000,00 | 12.158.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | | | 15.000.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 5. | **2.09.05** | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | **Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar** | | | | **96 %** | **80 %** | **310.066.400,00** | **1.291.015.400,00** | **378.812.200,00** | **377.112.300,00** | | | | | | | **687.178.700,00** | |
| | 2.09.05.2.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar yang terlaksana* | | | | 1 Laporan | 80 % | 310.066.400,00 | 1.291.015.400,00 | 378.812.200,00 | 68.745.800,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | Meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat dengan menjaga ketersediaan pangan dan meningkatkan konsumsi pangan yang bergizi seimbang dan aman. | | 687.178.700,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.05.2.01.0004 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 26.839.000,00 | 230.958.000,00 | 13.528.000,00 | -13.311.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 341.605.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.05.2.01.0007 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 266.131.600,00 | 953.550.600,00 | 337.713.800,00 | 71.582.200,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 193.772.500,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.05.2.01.0009 | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan* | | | | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 17.095.800,00 | 106.506.800,00 | 27.570.400,00 | 10.474.600,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 151.801.200,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | | **DINAS PERTANAHAN** | | | | | | | **10.163.800.000,00** | **18.298.143.854,00** | **16.612.350.000,00** | **6.448.550.000,00** | | | | | | | **14.521.094.020,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **10.163.800.000,00** | **18.298.143.854,00** | **16.612.350.000,00** | **6.448.550.000,00** | | | | | | | **14.521.094.020,00** | |
| | **2.10** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | | | | **10.163.800.000,00** | **18.298.143.854,00** | **16.612.350.000,00** | **6.448.550.000,00** | | | | | | | **14.521.094.020,00** | |
| 1. | **2.10.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**<br>**Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas** | | | | **100**<br>**90 %**<br>**%** | **100**<br>**90 %**<br>**%** | **5.989.359.760,00** | **8.031.465.114,00** | **7.527.121.260,00** | **2.632.715.697,00** | | | | | | | **8.622.075.457,00** | |
| | 2.10.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun* | | | | 10 dokumen | 10 dokumen | 157.983.360,00 | 177.116.360,00 | 119.616.360,00 | -38.367.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | PD\|4. Meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan dan penataan ruang secara berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas, pemerataan dan kemudahan akses layanan infrastruktur untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah<br>PD\|4. Meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan dan penataan ruang secara berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas, pemerataan dan kemudahan akses layanan infrastruktur untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah | SKPD | | 142.359.666,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 79.196.000,00 | 97.821.000,00 | 77.321.000,00 | -1.875.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | PD\|4. Meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan dan penataan ruang secara berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas, pemerataan dan kemudahan akses layanan infrastruktur untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah<br>PD\|4. Meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan dan penataan ruang secara berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas, pemerataan dan kemudahan akses layanan infrastruktur untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah | | | 60.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 11.670.600,00 | 12.158.600,00 | 8.158.600,00 | -3.512.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | PD\|4. Meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan dan penataan ruang secara berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas, pemerataan dan kemudahan akses layanan infrastruktur untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah<br>PD\|4. Meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan dan penataan ruang secara berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas, pemerataan dan kemudahan akses layanan infrastruktur untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah | | | 18.625.810,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.404.640,00 | 10.904.640,00 | 6.904.640,00 | -3.500.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | PDJ4. Meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan dan penataan ruang secara berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas, pemerataan dan kemudahan akses layanan infrastruktur untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah<br>PDJ4. Meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan dan penataan ruang secara berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas, pemerataan dan kemudahan akses layanan infrastruktur untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah | | | 14.217.777,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.170.000,00 | 12.670.000,00 | 8.670.000,00 | -3.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | | 14.729.505,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.285.000,00 | 10.785.000,00 | 6.785.000,00 | -3.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | | 15.977.830,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 23.675.320,00 | 22.195.320,00 | 4.695.320,00 | -18.980.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | | 13.127.468,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.581.800,00 | 10.581.800,00 | 7.081.800,00 | -3.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | | 5.681.276,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat daerah* | | | | 12 bulan | 12 bulan | 4.304.092.600,00 | 5.597.416.954,00 | 5.587.360.300,00 | 1.283.267.700,00 | | | - | -<br>- | SKPD | | 4.851.798.625,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 12 Orang/bulan | 12 Orang/bulan | 3.857.682.062,00 | 5.101.508.802,00 | 5.101.532.148,00 | 1.243.850.086,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 4.307.948.517,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 216.572.738,00 | 254.395.352,00 | 256.315.352,00 | 39.742.614,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 182.727.055,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 157.360.000,00 | 157.360.000,00 | 157.360.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 105.840.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 38.647.000,00 | 38.647.000,00 | 38.647.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 6.468.924,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 9.345.000,00 | 10.020.000,00 | 6.020.000,00 | -3.325.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 3.337.780,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 24.485.800,00 | 35.485.800,00 | 27.485.800,00 | 3.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 245.476.349,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Jumlah administrasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan* | | | | 50 asset | 50 asset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | SKPD | | 580.145.805,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 300.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 280.145.805,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.2.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | SKPD | | 402.176.255,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.2.04.0002 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.2.04.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah* | | | | 320 Laporan | 320 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 174.647.585,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.2.04.0004 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah* | | | | 60 Dokumen | 60 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 227.528.670,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah pelaksanaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 12 bulan | 12 bulan | 515.923.000,00 | 1.158.828.800,00 | 852.828.800,00 | 336.905.800,00 | | | - | -<br>- | SKPD | | 127.018.728,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 50 Paket | 50 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 39.868.605,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 303.705.000,00 | 338.360.800,00 | 338.360.800,00 | 34.655.800,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 17.644.289,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 116.218.000,00 | 617.968.000,00 | 347.968.000,00 | 231.750.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 44.699.584,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 96.000.000,00 | 202.500.000,00 | 166.500.000,00 | 70.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 24.806.250,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah administrasi umum Perangkat Daerah yang disediakan* | | | | 42 jenis | 42 jenis | 499.746.800,00 | 655.103.000,00 | 562.103.000,00 | 62.356.200,00 | | | - | -<br>- | SKPD | | 502.967.991,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 5 Paket | 35.891.200,00 | 157.451.200,00 | 157.451.200,00 | 121.560.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 21.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 10 Paket | 10 Paket | 14.972.600,00 | 29.768.800,00 | 29.768.800,00 | 14.796.200,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 23.939.639,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 32.483.000,00 | 32.483.000,00 | 32.483.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 32.782.204,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 17.400.000,00 | 17.400.000,00 | 17.400.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 8.682.188,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 13 Laporan | 13 Laporan | 201.000.000,00 | 229.000.000,00 | 175.000.000,00 | -26.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 400.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 198.000.000,00 | 189.000.000,00 | 150.000.000,00 | -48.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 16.563.960,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | SKPD | | 1.450.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 1.250.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 15 Unit | 15 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 200.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia* | | | | 12 bulan | 12 bulan | 40.200.000,00 | 40.200.000,00 | 40.042.800,00 | -157.200,00 | | | - | -<br>- | SKPD | | 27.951.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 40.200.000,00 | 40.200.000,00 | 40.042.800,00 | -157.200,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 27.951.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah barang milik daerah yang terpelihara* | | | | 69 unit | 69 unit | 471.414.000,00 | 402.800.000,00 | 365.170.000,00 | -106.244.000,00 | | | - | -<br>- | SKPD | | 537.657.387,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 56.630.000,00 | 56.630.000,00 | 53.130.000,00 | -3.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 74.657.387,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 11 Unit | 11 Unit | 215.334.000,00 | 157.480.000,00 | 127.350.000,00 | -87.984.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 199.650.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 22 Unit | 22 Unit | 31.450.000,00 | 34.690.000,00 | 34.690.000,00 | 3.240.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 42.350.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara* | | | | 20 Unit | 20 Unit | 168.000.000,00 | 154.000.000,00 | 150.000.000,00 | -18.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 205.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 16.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| 2. | **2.10.04** | **PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN** | **Penanganan Sengketa Tanah Garapan Yang Dilakukan Melalui Mediasi** | | | | **100 %** | **100 %** | **166.961.040,00** | **221.182.340,00** | **190.182.340,00** | **-48.868.958,00** | | | | | | | **118.092.082,00** | |
| | 2.10.04.2.01 | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah mediasi sengketa tanah yang dilaksanakan* | | | | 12 mediasi | 12 mediasi | 166.961.040,00 | 221.182.340,00 | 190.182.340,00 | 23.221.300,00 | | | - | PD\|6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Berintegritas dan Adaptif melalui penguatan meritokrasserta penguatan pemanfaatan teknologi digital untuk transformasi layanan pemerintahan PD\|6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Berintegritas dan Adaptif melalui penguatan meritokrasserta penguatan pemanfaatan teknologi digital untuk transformasi layanan pemerintahan | SKPD | | 118.092.082,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.04.2.01.0004 | Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 12 Berita Acara | 12 Berita Acara | 89.960.000,00 | 100.081.300,00 | 78.081.300,00 | -11.878.700,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | PD\|6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Berintegritas dan Adaptif melalui penguatan meritokrasserta penguatan pemanfaatan teknologi digital untuk transformasi layanan pemerintahan PD\|6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Berintegritas dan Adaptif melalui penguatan meritokrasserta penguatan pemanfaatan teknologi digital untuk transformasi layanan pemerintahan | | | 58.092.082,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.04.2.01.0005 | Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 77.001.040,00 | 121.101.040,00 | 112.101.040,00 | 35.100.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | PD\|6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Berintegritas dan Adaptif melalui penguatan meritokrasserta penguatan pemanfaatan teknologi digital untuk transformasi layanan pemerintahan PD\|6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Berintegritas dan Adaptif melalui penguatan meritokrasserta penguatan pemanfaatan teknologi digital untuk transformasi layanan pemerintahan | | | 60.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| 3. | **2.10.05** | **PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN** | **Persentase Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Yang Diselesaikan** | | | | **25 %** | **25 %** | **658.187.000,00** | **6.406.087.000,00** | **6.151.187.000,00** | **-384.987.000,00** | | | | | | | **273.200.000,00** | |
| | 2.10.05.2.01 | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang diselesaikan* | | | | 5 lokasi | 5 lokasi | 658.187.000,00 | 6.406.087.000,00 | 6.151.187.000,00 | 5.493.000.000,00 | | | - | -<br>- | SKPD | | 273.200.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.05.2.01.0001 | Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 45.492.000,00 | 37.642.000,00 | 16.942.000,00 | -28.550.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 73.700.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.05.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 612.695.000,00 | 6.368.445.000,00 | 6.134.245.000,00 | 5.521.550.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 199.500.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| 4. | **2.10.10** | **PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH** | **-** | | | | **65 73 % %** | **-** | **3.349.292.200,00** | **3.639.409.400,00** | **2.743.859.400,00** | **2.158.434.281,00** | | | | | | | **5.507.726.481,00** | |
| | 2.10.10.2.01 | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah tanah asset Pemerintah Kota yang diamakan* | | | | 160 bidang | 160 bidang | 3.349.292.200,00 | 3.639.409.400,00 | 2.743.859.400,00 | -605.432.800,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | PD\|6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Berintegritas dan Adaptif melalui penguatan meritokrasserta penguatan pemanfaatan teknologi digital untuk transformasi layanan pemerintahan PD\|6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Berintegritas dan Adaptif melalui penguatan meritokrasserta penguatan pemanfaatan teknologi digital untuk transformasi layanan pemerintahan | SKPD | | 5.507.726.481,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.10.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 790.465.600,00 | 840.545.600,00 | 649.045.600,00 | -141.420.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | PD\|6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Berintegritas dan Adaptif melalui penguatan meritokrasserta penguatan pemanfaatan teknologi digital untuk transformasi layanan pemerintahan PD\|6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Berintegritas dan Adaptif melalui penguatan meritokrasserta penguatan pemanfaatan teknologi digital untuk transformasi layanan pemerintahan | | | 152.335.752,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.10.2.01.0002 | Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya* | | | | 75 Dokumen | 75 Dokumen | 840.219.000,00 | 840.219.000,00 | 261.169.000,00 | -579.050.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | PDJ6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Berintegritas dan Adaptif melalui penguatan meritokrasserta penguatan pemanfaatan teknologi digital untuk transformasi layanan pemerintahan PDJ6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Berintegritas dan Adaptif melalui penguatan meritokrasserta penguatan pemanfaatan teknologi digital untuk transformasi layanan pemerintahan | | | 1.255.390.729,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2.10.10.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 85 Dokumen | 85 Dokumen | 1.718.607.600,00 | 1.958.644.800,00 | 1.833.644.800,00 | 115.037.200,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | PDJ6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Berintegritas dan Adaptif melalui penguatan meritokrasserta penguatan pemanfaatan teknologi digital untuk transformasi layanan pemerintahan PDJ6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Berintegritas dan Adaptif melalui penguatan meritokrasserta penguatan pemanfaatan teknologi digital untuk transformasi layanan pemerintahan | | | 4.100.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN |
| | | **DINAS LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | **81.454.022.700,00** | **209.935.048.950,00** | **92.763.323.517,00** | **11.309.300.817,00** | | | | | | | **117.162.465.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **81.454.022.700,00** | **209.935.048.950,00** | **92.763.323.517,00** | **11.309.300.817,00** | | | | | | | **117.162.465.000,00** | |
| | **2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | **81.454.022.700,00** | **209.935.048.950,00** | **92.763.323.517,00** | **11.309.300.817,00** | | | | | | | **117.162.465.000,00** | |
| 1. | **2.11.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **100 90 % %** | **-** | **24.800.543.183,00** | **31.226.541.233,00** | **30.690.351.727,00** | **7.265.192.317,00** | | | | | | | **32.065.735.500,00** | |
| | 2.11.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 5 Dokumen | 9 Dokumen | 244.235.440,00 | 271.835.440,00 | 205.335.440,00 | -38.900.000,00 | | | - | - - | DLH Kota Makassar | | 403.890.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 3 Dokumen | 100.937.040,00 | 150.937.040,00 | 136.937.040,00 | 36.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 148.635.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.063.000,00 | 15.063.000,00 | 11.563.000,00 | -3.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 35.717.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.784.600,00 | 15.784.600,00 | 12.284.600,00 | -3.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 29.381.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 11.285.000,00 | 11.285.000,00 | 7.785.000,00 | -3.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 23.142.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 11.388.800,00 | 11.388.800,00 | 7.888.800,00 | -3.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 22.420.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 24.390.000,00 | 24.390.000,00 | 6.890.000,00 | -17.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 25.828.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 65.387.000,00 | 42.987.000,00 | 21.987.000,00 | -43.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 118.767.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 20.932.446.543,00 | 25.138.212.793,00 | 25.174.563.087,00 | 4.242.116.544,00 | | | - | - - | DLH Kota Makassar | | 28.248.604.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.11.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 165 Orang/ bulan | 165 Orang/ bulan | 20.097.800.383,00 | 24.361.286.633,00 | 24.414.556.927,00 | 4.316.756.544,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 28.212.827.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 519.480.000,00 | 515.760.000,00 | 486.240.000,00 | -33.240.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 287.858.000,00 | 233.858.000,00 | 246.458.000,00 | -41.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 27.308.160,00 | 27.308.160,00 | 27.308.160,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 35.777.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Jumlah Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 24.388.000,00 | 24.388.000,00 | 24.388.000,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | DLH Kota Makassar | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 24.388.000,00 | 24.388.000,00 | 24.388.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 786.000.000,00 | 2.017.500.000,00 | 1.477.917.000,00 | 691.917.000,00 | | | - | -<br>- | DLH Kota Makassar | | 309.545.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 200 Paket | 200 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 259.545.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 20 Orang | 20 Orang | 786.000.000,00 | 2.017.500.000,00 | 1.477.917.000,00 | 691.917.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 50.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 704.479.400,00 | 1.468.006.400,00 | 1.267.113.400,00 | 562.634.000,00 | | | - | -<br>- | DLH Kota Makassar | | 461.738.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 7.478.000,00 | 7.478.000,00 | 7.478.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 33.730.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 101.028.400,00 | 767.198.400,00 | 761.918.400,00 | 660.890.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 55.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 17.023.000,00 | 93.380.000,00 | 139.767.000,00 | 122.744.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 50.578.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 33.110.000,00 | 33.110.000,00 | 33.110.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 21.624.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 106.840.000,00 | 6.840.000,00 | 6.840.000,00 | -100.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 33.275.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 439.000.000,00 | 560.000.000,00 | 318.000.000,00 | -121.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 267.531.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | DLH Kota Makassar | | 650.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 650.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 12 Unit | 12 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 1.211.316.000,00 | 1.539.360.800,00 | 1.985.792.800,00 | 774.476.800,00 | | | - | -<br>- | DLH Kota Makassar | | 740.895.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 624.016.000,00 | 625.816.000,00 | 625.816.000,00 | 1.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 705.895.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 35.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 566.300.000,00 | 892.544.800,00 | 1.338.976.800,00 | 772.676.800,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Barang Milik Daerah Yang Dipelihara* | | | | 100 % | 100 % | 897.677.800,00 | 767.237.800,00 | 555.242.000,00 | -342.435.800,00 | | | - | -<br>- | DLH Kota Makassar | | 1.251.063.500,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 31.112.000,00 | 28.112.000,00 | 28.112.000,00 | -3.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 45.130.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 50 Unit | 50 Unit | 814.565.800,00 | 675.125.800,00 | 463.130.000,00 | -351.435.800,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 937.071.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 55 Unit | 55 Unit | 52.000.000,00 | 64.000.000,00 | 64.000.000,00 | 12.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 33.940.500,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 234.922.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2. | **2.11.02** | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kota Makassar**<br>**Tersusunnya Dokumen RPPLH Kota Makassar** | | | | **Ada**<br>**Ada** | **Ada**<br>**Ada** | **205.205.800,00** | **455.999.900,00** | **455.999.900,00** | **458.656.200,00** | | | | | | | **663.862.000,00** | |
| | 2.11.02.2.01 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | *Tersedianya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 205.205.800,00 | 455.999.900,00 | 455.999.900,00 | 250.794.100,00 | | | - | -<br>- | Kota Makassar | | 513.862.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.02.2.01.0003 | Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 205.205.800,00 | 455.999.900,00 | 455.999.900,00 | 250.794.100,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 513.862.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.02.2.02 | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | *Tersedianya Dokumen KLHS* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | Kota Makassar | | 150.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.02.2.02.0006 | Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 150.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 3. | **2.11.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara** | | | | **IKA = 59.6**<br>**IKU = 79.72** | **IKA = 59.6**<br>**IKU = 79.72** | **1.421.562.540,00** | **2.090.573.420,00** | **1.181.678.420,00** | **476.590.508,00** | | | | | | | **1.898.153.048,00** | |
| | 2.11.03.2.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | *Tersedianya Data Kualitas Air dan Udara* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 948.107.120,00 | 1.622.664.120,00 | 717.469.120,00 | -230.638.000,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat, SKPD, Usaha/Kegiatan di Kota Makassar | | 1.157.817.648,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 429.581.360,00 | 633.923.360,00 | 441.633.360,00 | 12.052.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 837.817.648,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 518.525.760,00 | 988.740.760,00 | 275.835.760,00 | -242.690.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 320.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.02 | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | *Jumlah Instrumen Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup* | | | | 1 Instrumen | 1 Instrumen | 242.405.200,00 | 241.545.200,00 | 237.545.200,00 | -4.860.000,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat, SKPD, Usaha/Kegiatan di Kota Makassar | | 350.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.02.0001 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 242.405.200,00 | 241.545.200,00 | 237.545.200,00 | -4.860.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 350.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.03 | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | *Tersedianya Dokumen Evaluasi Pengendalian dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 231.050.220,00 | 226.364.100,00 | 226.664.100,00 | -4.386.120,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat Kota Makassar | | 390.335.400,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.03.0008 | Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan* | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 115.847.200,00 | 112.642.080,00 | 113.942.080,00 | -1.905.120,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 185.711.400,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.11.03.2.03.0012 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota* | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 115.203.020,00 | 113.722.020,00 | 112.722.020,00 | -2.481.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 204.624.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 4. | **2.11.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | **Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan** | | | | **22.29** | **22.29** | **14.008.286.855,00** | **19.632.283.520,00** | **22.815.731.520,00** | **5.917.898.145,00** | | | | | | | **19.926.185.000,00** | |
| | 2.11.04.2.01 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | *Tertata dan Terkelolanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota* | | | | 10 Titik | 17.36 Persen | 14.008.286.855,00 | 19.632.283.520,00 | 22.815.731.520,00 | 8.807.444.665,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat Kota Makassar | | 19.926.185.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.04.2.01.0001 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 3 Dokumen | 127.395.920,00 | 370.428.520,00 | 350.928.520,00 | 223.532.600,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 200.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.04.2.01.0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 100 Ha | 100 Ha | 9.118.083.920,00 | 14.160.040.640,00 | 17.590.605.640,00 | 8.472.521.720,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 9.000.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.04.2.01.0006 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati* | | | | 20 Orang | 38 Orang | 30.195.920,00 | 422.107.360,00 | 336.907.360,00 | 306.711.440,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 126.185.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.04.2.01.0007 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola* | | | | 68 Unit | 110 Unit | 4.732.611.095,00 | 4.679.707.000,00 | 4.537.290.000,00 | -195.321.095,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 10.600.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 5. | **2.11.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | **Persentase Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Yang Ditangani** | | | | **0.573 %** | **0.573 %** | **759.021.400,00** | **724.539.400,00** | **545.939.400,00** | **179.731.600,00** | | | | | | | **938.753.000,00** | |
| | 2.11.05.2.01 | Penyimpanan sementara Limbah B3 | *Jumlah B3 dan Limbah B3 yang ditangani* | | | | Limbah B3 = 9,690,62 & B3 =1.69 0,624,00 Ton | Limbah B3 = 9.690,62 & B3 =1.69 0,624,00 Ton | 98.164.000,00 | 86.564.000,00 | 59.564.000,00 | -38.600.000,00 | | | - | -<br>- | Usaha/Kegiatan di Kota Makassar | | 325.137.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.05.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik* | | | | 75 Dokumen | 75 Dokumen | 50.509.000,00 | 44.609.000,00 | 27.109.000,00 | -23.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 65.837.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.05.2.01.0002 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3* | | | | 80 Laporan | 80 Laporan | 47.655.000,00 | 41.955.000,00 | 32.455.000,00 | -15.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 259.300.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.05.2.02 | Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Limbah B3 dalam Kota Makassar yang dikumpulkan* | | | | 9.690,62 Ton | 9.690,62 Ton | 660.857.400,00 | 637.975.400,00 | 486.375.400,00 | -174.482.000,00 | | | - | -<br>- | Usaha/Kegiatan di Kota Makassar | | 613.616.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.05.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 660.857.400,00 | 637.975.400,00 | 486.375.400,00 | -174.482.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 613.616.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 6. | **2.11.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | **Ketaatan Penanggungjawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kota Makassar** | | | | **22 %** | **22 %** | **412.453.920,00** | **611.652.920,00** | **639.652.920,00** | **981.597.080,00** | | | | | | | **1.394.051.000,00** | |
| | 2.11.06.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan Oleh Pemerintah Kota Makassar yang dibina dan diawasi* | | | | 165 Usaha | 165 Usaha | 412.453.920,00 | 611.652.920,00 | 639.652.920,00 | 227.199.000,00 | | | - | -<br>- | Usaha/Kegiatan di Kota Makassar | | 1.394.051.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.06.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 261.590.560,00 | 422.760.560,00 | 465.160.560,00 | 203.570.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 470.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.06.2.01.0007 | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya* | | | | 15 Orang | 15 Orang | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 451.060.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.06.2.01.0009 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi* | | | | 65 Badan Usaha | 65 Badan Usaha | 60.863.360,00 | 98.892.360,00 | 84.492.360,00 | 23.629.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 472.991.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 7. | **2.11.08** | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | **Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat Terlaksananya pemberian penghargaan kepada masyarakat** | | | | **6 Ada kali** | **6 Ada kali** | **806.735.920,00** | **777.763.920,00** | **446.463.920,00** | **-234.421.920,00** | | | | | | | **572.314.000,00** | |
| | 2.11.08.2.01 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Mengikuti Diklat Lingkungan Hidup* | | | | 50 Lembaga | 50 Lembaga | 806.735.920,00 | 777.763.920,00 | 446.463.920,00 | -360.272.000,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat, SKPD, Usaha/Kegiatan di Kota Makassar | | 572.314.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.08.2.01.0002 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 507.845.920,00 | 479.036.920,00 | 269.036.920,00 | -238.809.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 134.255.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.08.2.01.0003 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 222.769.000,00 | 222.664.000,00 | 120.164.000,00 | -102.605.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 304.959.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.08.2.01.0005 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH* | | | | 30 Lembaga | 30 Lembaga | 76.121.000,00 | 76.063.000,00 | 57.263.000,00 | -18.858.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 133.100.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 8. | **2.11.10** | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kota Makassar, Lokasi Usaha Dan Dampaknya Di Kota Makassar** | | | | **100 %** | **100 %** | **2.089.057.492,00** | **2.215.369.060,00** | **339.289.060,00** | **1.739.465.508,00** | | | | | | | **3.828.523.000,00** | |
| | 2.11.10.2.01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | *Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti* | | | | 12 Pengaduan | 12 Pengaduan | 2.089.057.492,00 | 2.215.369.060,00 | 339.289.060,00 | -1.749.768.432,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat, SKPD, Usaha/Kegiatan di Kota Makassar | | 3.828.523.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.10.2.01.0004 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani* | | | | 12 Pengaduan | 12 Pengaduan | 2.067.772.672,00 | 2.149.058.440,00 | 272.978.440,00 | -1.794.794.232,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 3.700.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.10.2.01.0005 | Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota* | | | | 2 Perkara | 2 Perkara | 15.418.920,00 | 14.444.720,00 | 14.444.720,00 | -974.200,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 48.100.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.10.2.01.0006 | Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota* | | | | 1 Perkara | 1 Perkara | 5.865.900,00 | 51.865.900,00 | 51.865.900,00 | 46.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 80.423.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 9. | **2.11.11** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | **Terlaksananya Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kota Makassar** | | | | **100 %** | **100 %** | **36.951.155.590,00** | **152.200.325.577,00** | **35.648.216.650,00** | **18.923.732.862,00** | | | | | | | **55.874.888.452,00** | |
| | 2.11.11.2.01 | Pengelolaan Sampah | *Jumlah Sampah yang di Kelola* | | | | 444.112 Ton | 444.112 Ton | 36.338.570.470,00 | 151.527.310.457,00 | 35.030.851.530,00 | -1.307.718.940,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat, SKPD, Usaha/Kegiatan di Kota Makassar | | 55.467.328.452,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0004 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat* | | | | 15 Kelompok | 15 Kelompok | 90.389.820,00 | 87.889.820,00 | 1.919.542.820,00 | 1.829.153.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 107.375.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 59.561.000,00 | 57.061.000,00 | 39.561.000,00 | -20.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 194.987.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir* | | | | 12 Unit | 12 Unit | 32.731.116.300,00 | 147.669.520.287,00 | 27.879.862.360,00 | -4.851.253.940,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 45.000.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0008 | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 233.629.000,00 | 359.552.000,00 | 1.419.352.000,00 | 1.185.723.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 436.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0010 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus Jumlah sampah pada kondisi khusus yang ditangani* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.470.347.000,00 | 1.362.007.000,00 | 1.899.007.000,00 | 428.660.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 8.028.966.452,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.11.11.2.01.0018 | Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.753.527.350,00 | 1.991.280.350,00 | 1.873.526.350,00 | 119.999.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 1.700.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.03 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta | *Jumlah Pengelolaan Sampah Yang Diselenggaakan oleh Pihak Swasta yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan* | | | | 63 % | 63 % | 612.585.120,00 | 673.015.120,00 | 617.365.120,00 | 4.780.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | Masyarakat, SKPD, Usaha/Kegiatan di Kota Makassar | | 407.560.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.03.0002 | Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja* | | | | 70 Unit | 70 Unit | 534.467.200,00 | 597.397.200,00 | 559.247.200,00 | 24.780.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | | | 203.780.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.03.0003 | Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 78.117.920,00 | 75.617.920,00 | 58.117.920,00 | -20.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | | | 203.780.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | **UPT TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) SAMPAH TAMANGAPA** | | | | | | | **9.722.202.200,00** | **10.525.499.531,00** | **10.317.589.531,00** | **595.387.331,00** | | | | | | | **12.000.000.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **9.722.202.200,00** | **10.525.499.531,00** | **10.317.589.531,00** | **595.387.331,00** | | | | | | | **12.000.000.000,00** | |
| | **2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | **9.722.202.200,00** | **10.525.499.531,00** | **10.317.589.531,00** | **595.387.331,00** | | | | | | | **12.000.000.000,00** | |
| 1. | **2.11.11** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | **Terlaksananya Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kota Makassar**<br>**Persentase Sampah Yang Terkurangi Melalui 3R** | | | | **100**<br>**30 %**<br>**%** | **100**<br>**30 %**<br>**%** | **9.722.202.200,00** | **10.525.499.531,00** | **10.317.589.531,00** | **2.277.797.800,00** | | | | | | | **12.000.000.000,00** | |
| | 2.11.11.2.01 | Pengelolaan Sampah | *Jumlah Sampah yang di Kelola* | | | | 444.112 Ton | 444.112 Ton | 9.722.202.200,00 | 10.525.499.531,00 | 10.317.589.531,00 | 595.387.331,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | Masyarakat, SKPD, Usaha/Kegiatan di Kota Makassar | | 12.000.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0020 | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional* | | | | 282.247 Ton | 282.247 Ton | 9.722.202.200,00 | 10.525.499.531,00 | 10.317.589.531,00 | 595.387.331,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | | | 12.000.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | **UPT PEMAKAMAN** | | | | | | | **7.044.363.700,00** | **8.509.991.900,00** | **8.518.289.900,00** | **1.473.926.200,00** | | | | | | | **11.000.000.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **7.044.363.700,00** | **8.509.991.900,00** | **8.518.289.900,00** | **1.473.926.200,00** | | | | | | | **11.000.000.000,00** | |
| | **2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | **7.044.363.700,00** | **8.509.991.900,00** | **8.518.289.900,00** | **1.473.926.200,00** | | | | | | | **11.000.000.000,00** | |
| 1. | **2.11.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | **Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan** | | | | **22.29** | **22.29** | **7.044.363.700,00** | **8.509.991.900,00** | **8.518.289.900,00** | **3.955.636.300,00** | | | | | | | **11.000.000.000,00** | |
| | 2.11.04.2.01 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | *Terkelolanya dan Tertatanya Taman Kota dan Taman Jalur Hijau Kota* | | | | 10 Titik | 10 Titik | 7.044.363.700,00 | 8.509.991.900,00 | 8.518.289.900,00 | 1.473.926.200,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | Masyarakat Kota Makassar | | 11.000.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.04.2.01.0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 200 Ha | 200 Ha | 7.044.363.700,00 | 8.509.991.900,00 | 8.518.289.900,00 | 1.473.926.200,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | | | 11.000.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | **UPT BANK SAMPAH** | | | | | | | **2.905.102.300,00** | **2.905.088.400,00** | **2.790.524.352,00** | **-114.577.948,00** | | | | | | | **3.700.000.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **2.905.102.300,00** | **2.905.088.400,00** | **2.790.524.352,00** | **-114.577.948,00** | | | | | | | **3.700.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | **2.905.102.300,00** | **2.905.088.400,00** | **2.790.524.352,00** | **-114.577.948,00** | | | | | | | **3.700.000.000,00** | |
| 1. | **2.11.11** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | **Terlaksananya Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kota Makassar<br>Persentase Sampah Yang Terkurangi Melalui 3R** | | | | **100<br>30 %<br>%** | **100<br>30 %<br>%** | **2.905.102.300,00** | **2.905.088.400,00** | **2.790.524.352,00** | **794.897.700,00** | | | | | | | **3.700.000.000,00** | |
| | 2.11.11.2.01 | Pengelolaan Sampah | *Jumlah Sampah yang di Kelola* | | | | 444.112 Ton | 444.112 Ton | 2.905.102.300,00 | 2.905.088.400,00 | 2.790.524.352,00 | -114.577.948,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | Masyarakat Kota Makassar | | 3.700.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0019 | Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sampah yang terdaur ulang* | | | | 450 Ton | 450 Ton | 2.905.102.300,00 | 2.905.088.400,00 | 2.790.524.352,00 | -114.577.948,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | | | 3.700.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | **UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN** | | | | | | | **427.409.100,00** | **440.329.100,00** | **316.622.700,00** | **-110.786.400,00** | | | | | | | **2.700.000.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **427.409.100,00** | **440.329.100,00** | **316.622.700,00** | **-110.786.400,00** | | | | | | | **2.700.000.000,00** | |
| | **2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | **427.409.100,00** | **440.329.100,00** | **316.622.700,00** | **-110.786.400,00** | | | | | | | **2.700.000.000,00** | |
| 1. | **2.11.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara** | | | | **IKA = 59.6<br>IKU = 79.72** | **IKA = 59.6<br>IKU = 79.72** | **427.409.100,00** | **440.329.100,00** | **316.622.700,00** | **2.272.590.900,00** | | | | | | | **2.700.000.000,00** | |
| | 2.11.03.2.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | *Tersedianya Data Kualitas Air dan Udara* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 427.409.100,00 | 440.329.100,00 | 316.622.700,00 | -110.786.400,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | Masyarakat Kota Makassar | | 2.700.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 427.409.100,00 | 440.329.100,00 | 316.622.700,00 | -110.786.400,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | | | 2.700.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | **17.130.300.000,00** | **20.683.923.868,00** | **23.516.680.000,00** | **6.386.380.000,00** | | | | | | | **20.913.100.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **17.130.300.000,00** | **20.683.923.868,00** | **23.516.680.000,00** | **6.386.380.000,00** | | | | | | | **20.913.100.000,00** | |
| | **2.12** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | **17.130.300.000,00** | **20.683.923.868,00** | **23.516.680.000,00** | **6.386.380.000,00** | | | | | | | **20.913.100.000,00** | |
| 1. | **2.12.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **persentase ASN PD yang mendapatkan peningkatan kapasitas<br>persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik** | | | | **100<br>90 %<br>%** | **100<br>90 %<br>%** | **12.240.919.040,00** | **16.024.137.968,00** | **18.544.120.885,00** | **2.539.180.960,00** | | | | | | | **14.780.100.000,00** | |
| | 2.12.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *persentase laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja* | | | | 100 % | 100 % | 79.390.240,00 | 71.410.240,00 | 49.910.240,00 | -29.480.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | ASN dukcapil makassar | | 259.600.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 50.184.000,00 | 38.524.000,00 | 33.024.000,00 | -17.160.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 84.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.559.000,00 | 4.079.000,00 | 2.579.000,00 | -1.980.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 3.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.875.000,00 | 4.395.000,00 | 2.895.000,00 | -1.980.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 3.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.139.240,00 | 5.659.240,00 | 4.159.240,00 | -1.980.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 2.700.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.460.000,00 | 5.980.000,00 | 4.480.000,00 | -1.980.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 1.900.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 7.173.000,00 | 12.773.000,00 | 2.773.000,00 | -4.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 165.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *persentase capaian administrasi keuangan perangkat daerah* | | | | 100 % | 100 % | 9.113.037.500,00 | 11.789.574.968,00 | 11.789.589.889,00 | 2.676.552.389,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | ASN dukcapil makassar | | 8.847.500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 50 Orang/bulan | 50 Orang/bulan | 8.670.631.340,00 | 11.342.368.808,00 | 11.342.383.729,00 | 2.671.752.389,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 8.500.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 286.509.160,00 | 291.309.160,00 | 291.309.160,00 | 4.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 230.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 147.717.000,00 | 147.717.000,00 | 147.717.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 112.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 8.180.000,00 | 8.180.000,00 | 8.180.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Rappocini, Rappocini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 5.500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *persentase kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 101.522.000,00 | 98.447.000,00 | 56.847.000,00 | -44.675.000,00 | | | - | - - | ASN dukcapil makassar | | 264.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 157 Paket | 157 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 150.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 10.772.000,00 | 10.047.000,00 | 10.047.000,00 | -725.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 6.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 6 Orang | 6 Orang | 67.500.000,00 | 64.500.000,00 | 42.000.000,00 | -25.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 70.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 23.250.000,00 | 23.900.000,00 | 4.800.000,00 | -18.450.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 38.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.12.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *persentase kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 715.993.500,00 | 982.465.560,00 | 886.359.560,00 | 170.366.060,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | ASN dukcapil makassar | | 1.450.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 30 Paket | 30 Paket | 26.465.880,00 | 16.251.940,00 | 16.251.940,00 | -10.213.940,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 12.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 30 Paket | 30 Paket | 50.082.920,00 | 44.282.920,00 | 84.142.920,00 | 34.060.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 260.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 15 Paket | 15 Paket | 22.099.000,00 | 22.099.000,00 | 22.099.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 24.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 10 Paket | 10 Paket | 43.892.700,00 | 43.892.700,00 | 43.892.700,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 35.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 5 Paket | 46.997.000,00 | 46.997.000,00 | 46.997.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 40.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 15.660.000,00 | 15.660.000,00 | 20.880.000,00 | 5.220.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 23.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 6.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 219.158.000,00 | 301.644.000,00 | 250.458.000,00 | 31.300.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 600.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 1000 Dokumen | 1000 Dokumen | 216.638.000,00 | 216.638.000,00 | 126.638.000,00 | -90.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 200.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 75.000.000,00 | 275.000.000,00 | 275.000.000,00 | 200.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 250.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *persentase capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 174.840.600,00 | 1.065.345.000,00 | 3.399.280.296,00 | 3.224.439.696,00 | | | - | - - | ASN dukcapil makassar | | 2.090.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 0,00 | 0,00 | 498.810.000,00 | 498.810.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 460.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 0,00 | 0,00 | 194.992.000,00 | 194.992.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 230.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 174.840.600,00 | 1.065.345.000,00 | 2.705.478.296,00 | 2.530.637.696,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 1.400.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *persentase capaian layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 1.359.826.000,00 | 1.465.603.200,00 | 1.421.543.900,00 | 61.717.900,00 | | | - | -<br>- | ASN dukcapil makassar | | 1.240.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 328.998.000,00 | 33.390.000,00 | 33.390.000,00 | -295.608.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 380.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 493.428.000,00 | 528.900.000,00 | 563.040.700,00 | 69.612.700,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 500.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 537.400.000,00 | 903.313.200,00 | 825.113.200,00 | 287.713.200,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 360.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 696.309.200,00 | 551.292.000,00 | 940.590.000,00 | 244.280.800,00 | | | - | -<br>- | - | | 629.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 40.682.000,00 | 43.630.000,00 | 40.130.000,00 | -552.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 45.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 38 Unit | 38 Unit | 427.102.000,00 | 270.062.000,00 | 301.160.000,00 | -125.942.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 230.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 200 Unit | 200 Unit | 166.350.000,00 | 237.600.000,00 | 219.300.000,00 | 52.950.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 140.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 62.175.200,00 | 0,00 | 0,00 | -62.175.200,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 15.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 380.000.000,00 | 380.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 199.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2. | **2.12.02** | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | **Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Persentase Anak Usia 1-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari Yang Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)** | | | | **100<br>80 %<br>%** | **100<br>80 %<br>%** | **3.485.316.520,00** | **3.444.802.260,00** | **3.861.615.475,00** | **914.683.480,00** | | | | | | | **4.400.000.000,00** | |
| | 2.12.02.2.01 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | *persentase capaian kinerja pelayanan pendaftaran penduduk<br>Tercapainya target penerbitan dokumen pendaftaran kependudukan dalam satu tahun."* | | | | 95 % | 100 % | 1.526.586.160,00 | 1.371.408.160,00 | 1.283.174.160,00 | -243.412.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | penduduk kota makassar | | 1.800.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.01.0001 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 24.456.240,00 | 15.038.640,00 | 8.038.640,00 | -16.417.600,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Rappocini, Rappocini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 80.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.01.0002 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 398.888.800,00 | 231.983.800,00 | 144.749.800,00 | -254.139.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Rappocini, Rappocini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 370.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.01.0004 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 121.184.320,00 | 79.901.320,00 | 94.901.320,00 | -26.283.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Rappocini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 150.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.01.0007 | Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 982.056.800,00 | 1.044.484.400,00 | 1.035.484.400,00 | 53.427.600,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 1.200.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.02 | Penataan Pendaftaran Penduduk | *persentase capaian penataan pendaftaran penduduk terlaksananya kegiatan penataan pendaftaran penduduk* | | | | 95 % | 100 %<br>95 % | 1.958.730.360,00 | 2.073.394.100,00 | 2.578.441.315,00 | 619.710.955,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | masyarakat kota makassar | | 2.600.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.02.0002 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.958.730.360,00 | 2.073.394.100,00 | 2.578.441.315,00 | 619.710.955,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 2.600.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 3. | **2.12.03** | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | **Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran<br>Rasio Pasangan Berakte Nikah** | | | | **100<br>55 %<br>%** | **100<br>55 %<br>%** | **940.917.400,00** | **854.575.000,00** | **739.885.000,00** | **370.082.600,00** | | | | | | | **1.311.000.000,00** | |
| | 2.12.03.2.01 | Pelayanan Pencatatan Sipil | *persentase capaian kegiatan pelayanan pencatatan sipil tercapaiannya target penyelesaian dokumen pelayanan pencatatan sipil* | | | | 100 % | 100 % | 769.350.320,00 | 755.007.920,00 | 731.067.920,00 | -38.282.400,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | masyarakat kota makassar | | 1.180.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.01.0001 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 577.207.800,00 | 624.215.400,00 | 665.825.400,00 | 88.617.600,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Rappocini, Rappocini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 360.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.01.0002 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan* | | | | 3 Layanan | 3 Layanan | 192.142.520,00 | 130.792.520,00 | 65.242.520,00 | -126.900.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 820.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.02 | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | *persentase capaian pelekasanaan penyelenggaraan pencatatan sipil<br>terlaksananya penyelenggaran pencatatan sipil* | | | | 100 % | 100 % | 171.567.080,00 | 99.567.080,00 | 8.817.080,00 | -162.750.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | masyarakat kota makassar | | 131.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.02.0001 | Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.263.800,00 | 4.263.800,00 | 3.513.800,00 | -750.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 6.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.02.0004 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 167.303.280,00 | 95.303.280,00 | 5.303.280,00 | -162.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 125.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 4. | **2.12.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | **Persentase OPD Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama** | | | | **70 %** | **70 %** | **322.975.600,00** | **267.835.600,00** | **228.485.600,00** | **-975.600,00** | | | | | | | **322.000.000,00** | |
| | 2.12.04.2.01 | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | *Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan* | | | | 70 % | 100 %<br>70 % | 203.644.800,00 | 133.980.800,00 | 132.730.800,00 | -70.914.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | OPD PEMANFAAT DATA KEPENDUDUKAN | | 275.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.01.0001 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 186.514.000,00 | 116.850.000,00 | 116.850.000,00 | -69.664.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 250.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.01.0002 | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 17.130.800,00 | 17.130.800,00 | 15.880.800,00 | -1.250.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 25.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.03 | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | *persentase capaian penyelenggaraan PIAK terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan* | | | | 100 % | 100 % | 119.330.800,00 | 133.854.800,00 | 95.754.800,00 | -23.576.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | kecamatan di makassar | | 47.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.03.0001 | Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 25.470.800,00 | 35.484.800,00 | 34.884.800,00 | 9.414.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 26.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.03.0003 | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 93.860.000,00 | 98.370.000,00 | 60.870.000,00 | -32.990.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 21.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 5. | **2.12.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | **Persentase Profil Kependudukan yang dikelola** | | | | **100 %** | **100 %** | **140.171.440,00** | **92.573.040,00** | **142.573.040,00** | **-40.171.440,00** | | | | | | | **100.000.000,00** | |
| | 2.12.05.2.01 | Penyusunan Profil Kependudukan | *persentase Penyusunan buku Profil Kependudukan tersedianya buku profil kependudukan* | | | | 100 % | 100 % | 140.171.440,00 | 92.573.040,00 | 142.573.040,00 | 2.401.600,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | masyarakat kota makassar | | 100.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.05.2.01.0002 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 140.171.440,00 | 92.573.040,00 | 142.573.040,00 | 2.401.600,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Rappocini, Rappocini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 100.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | | **DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | **19.700.000.000,00** | **27.022.735.931,00** | **36.529.479.000,00** | **16.829.479.000,00** | | | | | | | **35.132.987.979,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **19.700.000.000,00** | **27.022.735.931,00** | **36.529.479.000,00** | **16.829.479.000,00** | | | | | | | **35.132.987.979,00** | |
| | **2.14** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | **19.700.000.000,00** | **27.022.735.931,00** | **36.529.479.000,00** | **16.829.479.000,00** | | | | | | | **35.132.987.979,00** | |
| 1. | **2.14.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**<br>**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik** | | | | **100**<br>**90 %**<br>**%** | **100**<br>**90 %**<br>**%** | **13.176.292.720,00** | **17.119.823.131,00** | **16.424.957.700,00** | **3.009.294.289,00** | | | | | | | **16.185.587.009,00** | |
| | 2.14.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan,penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 155.520.680,00 | 155.520.680,00 | 131.260.680,00 | -24.260.000,00 | | | - | -<br>- | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 205.905.400,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 66.789.640,00 | 66.789.640,00 | 46.929.640,00 | -19.860.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 55.403.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 18.491.000,00 | 18.491.000,00 | 18.491.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 25.300.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 18.491.000,00 | 18.491.000,00 | 18.491.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 17.538.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.461.520,00 | 12.461.520,00 | 12.461.520,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 17.341.900,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.14.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.461.520,00 | 12.461.520,00 | 12.461.520,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 15.725.300,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 10.826.000,00 | 10.826.000,00 | 10.826.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 10.751.500,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 11.600.000,00 | -4.400.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 63.845.700,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 10.839.788.700,00 | 12.179.924.983,00 | 12.233.085.552,00 | 1.393.296.852,00 | | | - | -<br>- | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 10.942.795.609,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 12 Bulan O rang/bulan | 12 Bulan O rang/bulan | 10.201.052.700,00 | 11.583.668.983,00 | 11.583.669.552,00 | 1.382.616.852,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 10.321.697.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 302.040.000,00 | 259.560.000,00 | 312.720.000,00 | 10.680.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 317.240.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 298.936.200,00 | 298.936.200,00 | 298.936.200,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 278.163.809,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.471.000,00 | 20.471.000,00 | 20.471.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 11.344.200,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 17.288.800,00 | 17.288.800,00 | 17.288.800,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 14.350.600,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 13.287.920,00 | 13.287.920,00 | 13.287.920,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | 38.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 13.287.920,00 | 13.287.920,00 | 13.287.920,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 38.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia* | | | | 3 Jenis | 3 Jenis | 75.063.400,00 | 1.101.963.400,00 | 776.463.400,00 | 701.400.000,00 | | | - | -<br>- | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 621.236.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 85.446.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 15.063.400,00 | 29.463.400,00 | 29.463.400,00 | 14.400.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 35.790.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 110 Orang | 110 Orang | 60.000.000,00 | 1.072.500.000,00 | 747.000.000,00 | 687.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 500.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah* | | | | 6 Jenis | 6 Jenis | 359.365.220,00 | 1.379.445.428,00 | 1.183.021.428,00 | 823.656.208,00 | | | - | -<br>- | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 1.043.650.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 55 Paket | 55 Paket | 51.613.720,00 | 774.131.928,00 | 774.131.928,00 | 722.518.208,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 350.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 47.376.000,00 | 47.376.000,00 | 63.696.000,00 | 16.320.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 75.250.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 8 Paket | 8 Paket | 52.775.500,00 | 53.337.500,00 | 53.337.500,00 | 562.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 35.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 9.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 60 Laporan | 60 Laporan | 153.000.000,00 | 338.000.000,00 | 282.000.000,00 | 129.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 500.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 54.600.000,00 | 166.600.000,00 | 9.856.000,00 | -44.744.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 74.400.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia* | | | | 3 Jenis | 3 Jenis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 418.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 35.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 33.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 150.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 200.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 1.050.788.800,00 | 1.637.202.720,00 | 1.417.158.720,00 | 366.369.920,00 | | | - | -<br>- | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 1.916.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 668.676.000,00 | 670.476.000,00 | 670.476.000,00 | 1.800.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 700.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 96.712.800,00 | 134.526.720,00 | 140.982.720,00 | 44.269.920,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 116.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 285.400.000,00 | 832.200.000,00 | 605.700.000,00 | 320.300.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 1.100.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah pemeliharaan barang milik Daerah yang tersedia* | | | | 6 Jenis | 6 Jenis | 682.478.000,00 | 652.478.000,00 | 670.680.000,00 | -11.798.000,00 | | | - | -<br>- | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 1.000.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 44.630.000,00 | 44.630.000,00 | 41.130.000,00 | -3.500.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 45.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 201 Unit | 201 Unit | 381.448.000,00 | 381.448.000,00 | 409.150.000,00 | 27.702.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 450.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 43 Unit | 43 Unit | 77.400.000,00 | 47.400.000,00 | 41.400.000,00 | -36.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 95.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 53.000.000,00 | 53.000.000,00 | 53.000.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 150.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 160.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 12 Unit | 12 Unit | 126.000.000,00 | 126.000.000,00 | 126.000.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 100.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2. | **2.14.02** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | **-** | | | | **-** | **-** | **230.214.800,00** | **1.009.182.200,00** | **859.683.200,00** | **661.555.650,00** | | | | | | | **891.770.450,00** | |
| | 2.14.02.2.01 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | *Jumlah Dokumen Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Kota Makassar Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk yang dipadukan dan disinkronisasi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 91.657.000,00 | 339.845.000,00 | 174.045.000,00 | 82.388.000,00 | | | - | -<br>- | Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | | 245.631.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.01.0002 | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 27.095.000,00 | 26.795.000,00 | 26.795.000,00 | -300.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 48.712.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.01.0009 | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal* | | | | 1 Dokumen Satuan Pendidikan | 1 Dokumen Satuan Pendidikan | 33.457.000,00 | 282.245.000,00 | 116.445.000,00 | 82.988.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 39.919.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.01.0013 | Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan* | | | | 52 Organisasi | 52 Organisasi | 31.105.000,00 | 30.805.000,00 | 30.805.000,00 | -300.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 150.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.01.0017 | Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga* | | | | 0 Kegiatan | 0 Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 7.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kota Makassar* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 138.557.800,00 | 669.337.200,00 | 685.638.200,00 | 547.080.400,00 | | | - | -<br>- | Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | 646.139.450,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0005 | Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kajian Dampak Kependudukan* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 150.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0009 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga* | | | | - | 8 Laporan | 0,00 | 0,00 | 59.981.000,00 | 59.981.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 60.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0011 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya* | | | | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 31.105.000,00 | 529.124.400,00 | 100.584.400,00 | 69.479.400,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 150.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0012 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga* | | | | - | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 152.300.000,00 | 152.300.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 167.639.450,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0013 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 84.490.800,00 | 118.730.800,00 | 351.290.800,00 | 266.800.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 92.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0017 | Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 11.979.000,00 | 10.499.000,00 | 10.499.000,00 | -1.480.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 13.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0020 | Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.983.000,00 | 10.983.000,00 | 10.983.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 13.500.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 3. | **2.14.03** | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | **RATIO AKSEPTOR KELUARGA BERENCANA (KB)<br>PERSENTASE PENGGUNAAN KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)<br>Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi<br>Rasio akseptor KB** | | | | **0<br>0<br>51.48<br>68.45 0<br>undefined<br>%<br>%** | **0<br>0<br>51.48<br>68.45 0<br>undefined<br>%<br>%** | **5.986.888.280,00** | **7.873.213.400,00** | **12.674.926.900,00** | **4.921.352.240,00** | | | | | | **10.908.240.520,00** | |
| | 2.14.03.2.01 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | *Jumlah Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan* | | | | 55 Mitra Kerja | 55 Mitra Kerja | 311.933.280,00 | 281.134.200,00 | 1.077.564.200,00 | 765.630.920,00 | | | - | -<br>- | Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | | 1.151.027.620,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0008 | Pengendalian Program KKBPK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 11.069.000,00 | 11.069.000,00 | 11.069.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 48.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0009 | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 130.255.080,00 | 98.151.000,00 | 98.151.000,00 | -32.104.080,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 185.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 160.559.200,00 | 161.864.200,00 | 570.934.200,00 | 410.375.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 628.027.620,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0011 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)* | | | | 0 Laporan | 10 Laporan | 0,00 | 0,00 | 297.000.000,00 | 297.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 23.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0012 | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 50.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0013 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 200.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0014 | Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja* | | | | 54 Organisasi | 54 Organisasi | 10.050.000,00 | 10.050.000,00 | 100.410.000,00 | 90.360.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 17.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.02 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | *Jumlah Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang didayagunakan* | | | | 153 PKB/PLKB | 153 PKB/PLKB | 5.148.111.200,00 | 5.676.897.200,00 | 5.995.617.200,00 | 847.506.000,00 | | | - | -<br>- | Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | | 6.301.563.600,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.02.0004 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)* | | | | 1155 Orang | 1155 Orang | 4.676.630.000,00 | 5.204.156.000,00 | 5.522.876.000,00 | 846.246.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 6.145.563.600,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.02.0005 | Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB* | | | | 2 Organisasi | 2 Organisasi | 415.573.200,00 | 0,00 | 0,00 | -415.573.200,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 100.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.02.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)* | | | | 153 Laporan | 153 Laporan | 55.908.000,00 | 472.741.200,00 | 472.741.200,00 | 416.833.200,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 56.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Kota Makassar yang dikendalikan dan didistribusikan* | | | | 114 Faskes | 114 Faskes | 387.799.000,00 | 385.999.000,00 | 3.860.462.500,00 | 3.472.663.500,00 | | | - | -<br>- | Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | | 1.491.649.300,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0001 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya* | | | | 112 Laporan | 112 Laporan | 25.418.000,00 | 25.418.000,00 | 25.418.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 30.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)* | | | | 3320 Orang | 3320 Orang | 124.274.000,00 | 124.274.000,00 | 1.871.185.000,00 | 1.746.911.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 497.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0006 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 1.520.512.500,00 | 1.520.512.500,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 50.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0007 | Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB* | | | | 25 Orang | 25 Orang | 27.756.000,00 | 27.756.000,00 | 27.756.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 30.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0008 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya* | | | | 50 Laporan | 50 Laporan | 14.623.000,00 | 14.623.000,00 | 267.863.000,00 | 253.240.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 294.649.300,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0010 | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 230.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0011 | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 124.111.000,00 | 124.411.000,00 | 104.811.000,00 | -19.300.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 165.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0013 | Peningkatan Kesertaan KB Pria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 32.727.000,00 | 30.627.000,00 | 12.027.000,00 | -20.700.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 125.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0015 | Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB* | | | | 250 Orang | 250 Orang | 16.015.000,00 | 16.015.000,00 | 16.015.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 45.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0016 | Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan* | | | | 300 Orang | 300 Orang | 22.875.000,00 | 22.875.000,00 | 14.875.000,00 | -8.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 25.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.04 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | - | | | | - | - | 139.044.800,00 | 1.529.183.000,00 | 1.741.283.000,00 | 1.602.238.200,00 | | | - | -<br>- | Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | | 1.964.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.04.0001 | Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB* | | | | 52 Organisasi | 52 Organisasi | 109.861.800,00 | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 1.390.138.200,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 1.650.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.04.0004 | Pembinaan Terpadu Kampung KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB* | | | | 15 Laporan | 15 Laporan | 29.183.000,00 | 29.183.000,00 | 18.683.000,00 | -10.500.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 211.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.04.0006 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)* | | | | 0 Kampung | 0 Kampung | 0,00 | 0,00 | 222.600.000,00 | 222.600.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 103.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 4. | **2.14.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | **-** | | | | **-** | **-** | **306.604.200,00** | **1.020.517.200,00** | **6.569.911.200,00** | **6.840.785.800,00** | | | | | | | **7.147.390.000,00** | |
| | 2.14.04.2.01 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | - | | | | - | - | 306.604.200,00 | 1.020.517.200,00 | 1.382.311.200,00 | 1.075.707.000,00 | | | - | -<br>- | Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | 1.001.030.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0008 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)* | | | | 25 Laporan | 25 Laporan | 66.357.000,00 | 815.910.000,00 | 237.110.000,00 | 170.753.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 148.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0016 | Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)* | | | | - | 6 Laporan / Dokumen | 0,00 | 0,00 | 76.800.000,00 | 76.800.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PAJAK DAERAH | - | -<br>- | | | 84.480.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0018 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 34.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -34.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 55.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0020 | Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 40.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0021 | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)* | | | | 8 Laporan | 8 Laporan | 40.500.000,00 | 40.500.000,00 | 290.500.000,00 | 250.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 319.550.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0024 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan* | | | | 13 Orang | 13 Orang | 139.209.200,00 | 137.569.200,00 | 751.363.200,00 | 612.154.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 277.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0026 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan* | | | | 34 Kelompok | 34 Kelompok | 26.538.000,00 | 26.538.000,00 | 26.538.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 77.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.02 | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | *Jumlah Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kota Makassar dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan* | | | | 15 Ormas | 15 Ormas | 0,00 | 0,00 | 5.187.600.000,00 | 5.187.600.000,00 | | | - | -<br>- | Terlaksananya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | 6.146.360.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)* | | | | 0 Organisasi | 0 Organisasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 220.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.02.0004 | Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 220.000.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.02.0005 | Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)* | | | | - | 10 laporan | 0,00 | 0,00 | 2.358.000.000,00 | 2.358.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 2.593.800.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.02.0006 | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan* | | | | - | 10 laporan | 0,00 | 0,00 | 2.829.600.000,00 | 2.829.600.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 3.112.560.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | | **DINAS PERHUBUNGAN** | | | | | | | **73.358.903.440,00** | **76.753.148.810,00** | **47.415.442.230,00** | **-25.943.461.210,00** | | | | | | | **106.766.417.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **73.358.903.440,00** | **76.753.148.810,00** | **47.415.442.230,00** | **-25.943.461.210,00** | | | | | | | **106.766.417.000,00** | |
| | **2.15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | | **73.358.903.440,00** | **76.753.148.810,00** | **47.415.442.230,00** | **-25.943.461.210,00** | | | | | | | **106.766.417.000,00** | |
| 1. | **2.15.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **100<br>90 %<br>%** | **-** | **18.583.024.507,00** | **22.308.555.608,00** | **22.262.185.414,00** | **11.582.222.493,00** | | | | | | | **30.165.247.000,00** | |
| | 2.15.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun* | | | | 100 % | 12 Dokumen | 263.686.644,00 | 107.620.644,00 | 85.140.644,00 | -178.546.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | SKPD | | 442.516.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 199.428.760,00 | 58.548.760,00 | 49.928.760,00 | -149.500.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Mangasa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 215.896.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.743.384,00 | 7.223.384,00 | 5.683.384,00 | -5.060.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Mangasa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 26.400.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 11.639.800,00 | 7.285.800,00 | 5.745.800,00 | -5.894.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Mangasa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 16.910.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 11.586.000,00 | 7.226.000,00 | 5.686.000,00 | -5.900.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Mangasa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 23.800.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.891.000,00 | 7.239.000,00 | 5.699.000,00 | -5.192.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Mangasa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 22.300.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 9.164.900,00 | 7.204.900,00 | 5.664.900,00 | -3.500.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Mangasa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 16.910.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.232.800,00 | 12.892.800,00 | 6.732.800,00 | -3.500.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Mangasa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 120.300.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang tersusun* | | | | 100 % | 100 % | 13.475.910.255,00 | 16.675.193.756,00 | 16.777.113.562,00 | 3.301.203.307,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | SKPD | | 20.040.207.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 95 Orang/bulan | 95 Orang/bulan | 12.808.331.255,00 | 15.845.549.756,00 | 15.950.589.562,00 | 3.142.258.307,00 | Kota Makassar, Tamalate, Mangasa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 19.075.500.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 484.800.000,00 | 578.160.000,00 | 575.040.000,00 | 90.240.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Mangasa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 569.400.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 182.779.000,00 | 251.484.000,00 | 251.484.000,00 | 68.705.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Mangasa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 395.307.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Jumlah Pengamanan Kantor yang Tersedia* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 96.000.000,00 | 96.000.000,00 | 96.000.000,00 | 0,00 | | | - | - - | SKPD | | 105.400.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 96.000.000,00 | 96.000.000,00 | 96.000.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Tamalate, Mangasa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 105.400.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.15.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Pelayanan Kesekretariatan untuk Pengadaan Pakaian Dinas dan Peningkatan Kompetensi Aparatur Berdasarkan Tugas dan Fungsi* | | | | 100 % | 100 % | 90.000.000,00 | 75.000.000,00 | 120.000.000,00 | 30.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | SKPD | | 957.100.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Tamalate, Mangasa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 516.500.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 7 Orang | 7 Orang | 90.000.000,00 | 75.000.000,00 | 120.000.000,00 | 30.000.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Mangasa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 440.600.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Jasa Administrasi Umum Yang Tersedia* | | | | 100 % | 100 % | 813.862.600,00 | 1.169.057.000,00 | 1.153.837.000,00 | 339.974.400,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | SKPD | | 1.372.414.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 5 Paket | 59.510.600,00 | 843.794.000,00 | 649.574.000,00 | 590.063.400,00 | Kota Makassar, Tamalate, Mangasa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 176.028.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 74.211.000,00 | 55.623.000,00 | 55.623.000,00 | -18.588.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Mangasa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 10.963.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 114.941.000,00 | 22.640.000,00 | 22.640.000,00 | -92.301.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Mangasa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 299.687.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 5 Paket | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Tamalate, Mangasa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 157.600.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.15.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 297.200.000,00 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | -261.200.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Mangasa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 328.836.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 246.000.000,00 | 189.000.000,00 | 368.000.000,00 | 122.000.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Mangasa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 399.300.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | SKPD | | 353.117.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Tamalate, Mangasa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 60.028.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Tamalate, Mangasa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 293.089.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik* | | | | 100 % | 100 % | 2.735.175.408,00 | 2.656.826.208,00 | 2.620.026.208,00 | -115.149.200,00 | | | - | -<br>- | SKPD | | 4.672.204.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 30.692.000,00 | 13.002.000,00 | 13.002.000,00 | -17.690.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Mangasa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 3.087.602.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.142.342.208,00 | 923.023.008,00 | 925.223.008,00 | -217.119.200,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Tamalate, Mangasa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 1.495.029.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.562.141.200,00 | 1.720.801.200,00 | 1.681.801.200,00 | 119.660.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Mangasa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 89.573.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik* | | | | 100 % | 100 % | 1.108.389.600,00 | 1.528.858.000,00 | 1.410.068.000,00 | 301.678.400,00 | | | - | -<br>- | SKPD | | 2.222.289.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 42.130.000,00 | 42.130.000,00 | 38.630.000,00 | -3.500.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Mangasa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 93.812.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 59 Unit | 59 Unit | 849.260.000,00 | 932.560.000,00 | 844.820.000,00 | -4.440.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Mangasa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 1.685.261.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 27 Unit | 27 Unit | 114.860.000,00 | 82.490.000,00 | 82.490.000,00 | -32.370.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Mangasa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 121.450.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.15.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 102.139.600,00 | 471.678.000,00 | 444.128.000,00 | 341.988.400,00 | Kota Makassar, Tamalate, Mangasa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 321.766.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2. | **2.15.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | **Kinerja Lalu Lintas Kota Rasio Konektivitas Kota** | | | | **0.35 - 0.30 80 %** | **0,40 - 0,35 60 %** | **24.308.097.253,00** | **23.983.198.805,00** | **24.207.561.416,00** | **27.825.154.747,00** | | | | | | | **52.133.252.000,00** | |
| | 2.15.02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | *Jumlah Perlengkapan Jalan yang terpelihara*<br>*Jumlah Perlengkapan Jalan yang tersedia* | | | | 61 %<br>67,66 % | 100 %<br>43,94 % | 5.128.858.893,00 | 4.894.543.495,00 | 4.831.668.856,00 | -297.190.037,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | SKPD | | 23.608.480.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia* | | | | 1210 Unit | 151 Unit | 2.395.396.637,00 | 2.117.153.639,00 | 2.054.318.640,00 | -341.077.997,00 | Kota Makassar, Tamalate, Mangasa | PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 13.000.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.02.0003 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara* | | | | 25070 Unit | 18600 Unit | 2.733.462.256,00 | 2.777.389.856,00 | 2.777.350.216,00 | 43.887.960,00 | Kota Makassar, Tamalate, Mangasa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 10.608.480.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.04 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | *Jumlah Titik Pengawasan dalam Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir* | | | | 80 % | 100 % | 297.982.600,00 | 2.448.187.000,00 | 2.448.187.000,00 | 2.150.204.400,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | SKPD | | 3.269.200.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.04.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 12 Laporan | 2 Laporan | 297.982.600,00 | 2.448.187.000,00 | 2.448.187.000,00 | 2.150.204.400,00 | Kota Makassar, Tamalate, Mangasa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 3.269.200.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | *Jumlah pelanggaran berlalu lintas yang ditindak sesuai aturan yang berlaku* | | | | 100 % | 100 % | 16.922.810.400,00 | 14.494.042.800,00 | 14.494.042.800,00 | -2.428.767.600,00 | | | - | -<br>- | SKPD | | 19.267.196.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06.0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota* | | | | 3 Laporan | 1 Laporan | 13.182.349.600,00 | 109.702.800,00 | 109.702.800,00 | -13.072.646.800,00 | Kota Makassar, Tamalate, Mangasa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 15.470.638.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06.0014 | Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Tamalate, Mangasa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 85.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06.0017 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi* | | | | 12 Laporan | 15 Laporan | 3.740.460.800,00 | 14.384.340.000,00 | 14.384.340.000,00 | 10.643.879.200,00 | Kota Makassar, Tamalate, Mangasa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 3.711.558.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.15.02.2.07 | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | *Jumlah Rekomendasi Andalalin yang dikeluarkan* | | | | 35 Rekomendasi | 50 Rekomendasi | 44.282.200,00 | 23.057.200,00 | 23.057.200,00 | -21.225.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | SKPD | | 225.376.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.07.0008 | Penetapan Dokumen Teknis Andalalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan* | | | | 50 Dokumen | 50 Dokumen | 44.282.200,00 | 23.057.200,00 | 23.057.200,00 | -21.225.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Mangasa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 225.376.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.08 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | *Jumlah kepatuhan perusahaan terhadap standar keselamatan, meningkatkan kualitas layanan, dan melindungi keselamatan penumpang serta operator.* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 21.461.960,00 | 242.570.360,00 | 242.570.360,00 | 221.108.400,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | SKPD | | 635.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.08.0007 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum* | | | | 12 Laporan | 1 Laporan | 15.475.160,00 | 242.570.360,00 | 242.570.360,00 | 227.095.200,00 | Kota Makassar, Tamalate, Mangasa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 380.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.08.0008 | Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 5.986.800,00 | 0,00 | 0,00 | -5.986.800,00 | Kota Makassar, Tamalate, Mangasa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 255.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.09 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Cakupan Layanan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang / atau Barang*<br>*Jumlah Angkutan Transportasi Darat yang tersedia, dioperasionalkan dan dipelihara*<br>*Jumlah Gaji , tunjangan operasional lapangan, asuransi kesehatan dan asuransi ketenagakerjaan yang tersedia* | | | | 5 % | 33 Orang<br>5 %<br>5 Unit | 1.892.701.200,00 | 1.880.797.950,00 | 2.168.035.200,00 | 275.334.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | SKPD | | 5.128.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.09.0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia* | | | | 6 Unit | 5 Unit | 1.892.701.200,00 | 1.880.797.950,00 | 2.168.035.200,00 | 275.334.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Mangasa | OPSEN PKB | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 5.128.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 3. | **2.15.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | **Jumlah Barang Yang Melalui Dermaga Pertahun Jumlah Orang Yang Melalui Dermaga Pertahun** | | | | **5.735.902 60.000 Ton Orang** | **5.735.902 60.000 Ton Orang** | **30.467.781.680,00** | **30.461.394.397,00** | **945.695.400,00** | **-5.999.863.680,00** | | | | | | | **24.467.918.000,00** | |
| | 2.15.03.2.12 | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | *Tersedianya Pengoperasian Dermaga dan Angkutan Laut* | | | | 3 Unit | 1 Unit | 30.467.781.680,00 | 30.461.394.397,00 | 945.695.400,00 | -29.522.086.280,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | SKPD | | 24.467.918.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.15.03.2.12.0002 | Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 30.001.006.280,00 | 29.997.698.997,00 | 482.000.000,00 | -29.519.006.280,00 | Kota Makassar, Tamalate, Mangasa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | | | 5.000.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.03.2.12.0004 | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 466.775.400,00 | 463.695.400,00 | 463.695.400,00 | -3.080.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Mangasa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | | | 19.467.918.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | **UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR** | | | | | | | **2.207.069.160,00** | **2.371.168.960,00** | **2.105.298.960,00** | **-101.770.200,00** | | | | | | | **3.198.000.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **2.207.069.160,00** | **2.371.168.960,00** | **2.105.298.960,00** | **-101.770.200,00** | | | | | | | **3.198.000.000,00** | |
| | **2.15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | | **2.207.069.160,00** | **2.371.168.960,00** | **2.105.298.960,00** | **-101.770.200,00** | | | | | | | **3.198.000.000,00** | |
| 1. | **2.15.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | **Kinerja Lalu Lintas Kota Rasio Konektivitas Kota** | | | | **0.35 - 0.30 80 %** | **0.35 - 0.30 80 %** | **2.207.069.160,00** | **2.371.168.960,00** | **2.105.298.960,00** | **990.930.840,00** | | | | | | | **3.198.000.000,00** | |
| | 2.15.02.2.05 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | *Jumlah Perlengkapan Sarana dan Prasarana Yang Tersedia dan Terpelihara* | | | | 100 % | jJ100 % | 2.207.069.160,00 | 2.371.168.960,00 | 2.105.298.960,00 | -101.770.200,00 | | | - | - | SKPD | | 3.198.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia* | | | | 9 Unit | 9 Unit | 872.717.160,00 | 1.088.692.960,00 | 822.822.960,00 | -49.894.200,00 | Kota Makassar, Tamalate, Mangasa | OPSEN PKB | - | - | | | 1.682.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0008 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.334.352.000,00 | 1.282.476.000,00 | 1.282.476.000,00 | -51.876.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Mangasa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 1.516.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | **UPT PENERANGAN JALAN UMUM** | | | | | | | **64.303.827.400,00** | **64.295.624.360,00** | **67.093.408.810,00** | **2.789.581.410,00** | | | | | | | **103.310.000.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **64.303.827.400,00** | **64.295.624.360,00** | **67.093.408.810,00** | **2.789.581.410,00** | | | | | | | **103.310.000.000,00** | |
| | **2.15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | | **64.303.827.400,00** | **64.295.624.360,00** | **67.093.408.810,00** | **2.789.581.410,00** | | | | | | | **103.310.000.000,00** | |
| 1. | **2.15.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | **Kinerja Lalu Lintas Kota Rasio Konektivitas Kota** | | | | **0.35 - 0.30 80 %** | **0.40-0.35 60 %** | **64.303.827.400,00** | **64.295.624.360,00** | **67.093.408.810,00** | **39.006.172.600,00** | | | | | | | **103.310.000.000,00** | |
| | 2.15.02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | *Jumlah Perlengkapan Jalan yang terpelihara*<br>*Jumlah Perlengkapan Jalan yang tersedia*<br>*Jumlah Perlengkapan Jalan yang tersedia* | | | | 61 %<br>67,66 % | 100 %<br>92,66 %<br>92.66 % | 64.303.827.400,00 | 64.295.624.360,00 | 67.093.408.810,00 | 2.789.581.410,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | SKPD | | 103.310.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia* | | | | 800 Unit | 550 Unit | 9.874.302.000,00 | 49.750.554.360,00 | 49.570.355.860,00 | 39.696.053.860,00 | Kota Makassar, Tamalate, Mangasa | PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | | | 15.310.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.02.0003 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara* | | | | 25000 Unit | 30000 Unit | 54.429.525.400,00 | 14.545.070.000,00 | 17.523.052.950,00 | -36.906.472.450,00 | Kota Makassar, Tamalate, Mangasa | PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - | | | 88.000.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | **71.332.979.680,00** | **76.040.132.858,00** | **68.700.177.180,00** | **-2.632.802.500,00** | | | | | | | **56.894.469.694,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **71.332.979.680,00** | **76.040.132.858,00** | **68.700.177.180,00** | **-2.632.802.500,00** | | | | | | | **56.894.469.694,00** | |
| | **2.16** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | **69.105.226.440,00** | **73.930.499.618,00** | **66.431.722.939,00** | **-2.673.503.501,00** | | | | | | | **55.287.755.791,00** | |
| 1. | **2.16.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik** | | | | **90 %** | **90 %** | **9.396.837.394,00** | **12.741.151.492,00** | **12.547.175.691,00** | **4.210.918.397,00** | | | | | | | **13.607.755.791,00** | |
| | 2.16.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun* | | | | 100 % | 100 % | 92.826.800,00 | 93.926.800,00 | 36.252.400,00 | -56.574.400,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | Diskominfo | | 181.906.768,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 56.112.400,00 | 56.112.400,00 | 36.252.400,00 | -19.860.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 121.906.768,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.052.400,00 | 4.052.400,00 | 0,00 | -4.052.400,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 7.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.052.400,00 | 4.052.400,00 | 0,00 | -4.052.400,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 7.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.052.400,00 | 4.052.400,00 | 0,00 | -4.052.400,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 7.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.052.400,00 | 4.052.400,00 | 0,00 | -4.052.400,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 7.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 16.052.400,00 | 16.052.400,00 | 0,00 | -16.052.400,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 7.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 4.452.400,00 | 5.552.400,00 | 0,00 | -4.452.400,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 25.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Ketersedian Laporan keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 7.013.960.934,00 | 9.980.088.532,00 | 9.980.104.971,00 | 2.966.144.037,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | Diskominfo | | 8.345.276.416,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 54 Orang/bulan | 54 Orang/bulan | 6.389.715.934,00 | 9.363.943.532,00 | 9.363.959.971,00 | 2.974.244.037,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 7.664.389.243,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 610.920.000,00 | 604.320.000,00 | 604.320.000,00 | -6.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 655.887.173,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 13.325.000,00 | 11.825.000,00 | 11.825.000,00 | -1.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 25.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 201.000.000,00 | 276.000.000,00 | 204.000.000,00 | 3.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Diskomnfo | | 443.052.028,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 136.744.453,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 11 Orang | 21 Orang | 201.000.000,00 | 276.000.000,00 | 204.000.000,00 | 3.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 306.307.575,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 608.096.060,00 | 895.214.060,00 | 1.072.613.420,00 | 464.517.360,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Diskominfo | | 1.171.909.863,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 61 Paket | 61 Paket | 132.713.660,00 | 130.413.660,00 | 169.777.420,00 | 37.063.760,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 160.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 13 Paket | 13 Paket | 86.714.400,00 | 74.714.400,00 | 100.362.000,00 | 13.647.600,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 189.637.685,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 18.920.000,00 | 18.920.000,00 | 18.920.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 49.068.164,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 84 Dokumen | 84 Dokumen | 66.780.000,00 | 44.940.000,00 | 44.940.000,00 | -21.840.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 23.204.014,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 38 Laporan | 97 Laporan | 302.968.000,00 | 626.226.000,00 | 738.614.000,00 | 435.646.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 750.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Diskominfo | | 1.495.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 550.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 395.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 550.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 1.006.335.600,00 | 1.024.774.100,00 | 836.594.900,00 | -169.740.700,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | Diskominfo | | 1.254.758.629,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 34 Laporan | 34 Laporan | 380.605.600,00 | 24.400.000,00 | 24.400.000,00 | -356.205.600,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 434.758.629,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 136 Laporan | 136 Laporan | 392.730.000,00 | 393.328.500,00 | 119.439.300,00 | -273.290.700,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 450.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 55 Laporan | 55 Laporan | 233.000.000,00 | 607.045.600,00 | 692.755.600,00 | 459.755.600,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 370.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 474.618.000,00 | 471.148.000,00 | 417.610.000,00 | -57.008.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | Diskominfo | | 715.852.087,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 44.380.000,00 | 44.380.000,00 | 40.880.000,00 | -3.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 48.656.290,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 15 Unit | 15 Unit | 365.138.000,00 | 320.058.000,00 | 288.470.000,00 | -76.668.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 475.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 40 Unit | 40 Unit | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 0,00 | -3.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 7.195.797,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 110.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 90 Unit | 147 Unit | 61.900.000,00 | 103.510.000,00 | 88.260.000,00 | 26.360.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 75.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2. | **2.16.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | **Persentase Peningkatan Data Pertahun Yang Ter-Update Pada Open Data Pemerintah Kota Makassar<br>Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Kota Makassar<br>Persentase Peningkatan Pengunjung Pertahun Pada Website Pemerintah Kota Makassar** | | | | **80<br>85<br>90 %<br>%<br>%** | **80<br>85<br>90 %<br>%<br>%** | **8.260.395.680,00** | **10.241.828.760,00** | **15.357.398.850,00** | **2.419.604.320,00** | | | | | | | **10.680.000.000,00** | |
| | 2.16.02.2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 100 % | 100 % | 8.260.395.680,00 | 10.241.828.760,00 | 15.357.398.850,00 | 7.097.003.170,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | OPD, Masyarakat | | 10.680.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0014 | Relasi Media | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media* | | | | 10 Laporan | 10 Laporan | 3.935.369.000,00 | 327.799.400,00 | 330.413.600,00 | -3.604.955.400,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 660.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0015 | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo* | | | | 4 Komunitas | 2 Komunitas | 45.441.200,00 | 27.741.200,00 | 39.741.200,00 | -5.700.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 330.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0016 | Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 15.330.960,00 | 0,00 | 0,00 | -15.330.960,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 1.100.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0017 | Pelayanan Informasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan* | | | | 20 Permohonan | 20 Permohonan | 864.999.000,00 | 704.326.640,00 | 423.826.640,00 | -441.172.360,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 1.100.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0018 | Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik* | | | | 40 Persentase | 10 Persentase | 32.474.600,00 | 32.474.600,00 | 32.474.600,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 220.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0019 | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah* | | | | 12 Rekomendasi | 12 Rekomendasi | 637.611.960,00 | 1.173.611.960,00 | 922.111.960,00 | 284.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 700.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0020 | Diseminasi Informasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Persentase khalayak yang terpapar informasi publik* | | | | 40 Persentase | 40 Persentase | 919.956.000,00 | 1.667.244.000,00 | 3.597.499.890,00 | 2.677.543.890,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 220.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0021 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis* | | | | 5 Media | 125 Media | 160.450.000,00 | 6.227.850.000,00 | 9.952.850.000,00 | 9.792.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 300.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0022 | Penyusunan Strategi Komunikasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 220.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0023 | Penyusunan Konten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Konten Informasi Publik* | | | | 100 Konten | 100 Konten | 1.274.282.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.274.282.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 5.500.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0024 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan* | | | | 600 Orang | 300 Orang | 174.480.960,00 | 80.780.960,00 | 58.480.960,00 | -116.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 330.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 3. | **2.16.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | **Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo**<br>**Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi** | | | | **100 95.89 % %** | **100 95.89 % %** | **51.447.993.366,00** | **50.947.519.366,00** | **38.527.148.398,00** | **-20.447.993.366,00** | | | | | | | **31.000.000.000,00** | |
| | 2.16.03.2.01 | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Organisasi Perangkat Daerah Yang Terhubung Layanan Internet* | | | | 100 % | 100 % | 73.066.000,00 | 73.066.000,00 | 54.458.000,00 | -18.608.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | OPD, Masyarakat | | 110.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.01.0004 | Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 73.066.000,00 | 73.066.000,00 | 54.458.000,00 | -18.608.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 110.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.02 | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 100 % | 100 % | 51.374.927.366,00 | 50.874.453.366,00 | 38.472.690.398,00 | -12.902.236.968,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | OPD, Masyarakat | | 30.890.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.02.0018 | Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 305.430.000,00 | 477.730.000,00 | 1.580.130.000,00 | 1.274.700.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 420.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.02.0020 | Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah* | | | | 10 Aplikasi | 10 Aplikasi | 807.600.000,00 | 906.846.000,00 | 3.910.540.400,00 | 3.102.940.400,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 1.700.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.02.0021 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah* | | | | 5 Aplikasi | 5 Aplikasi | 88.800.000,00 | 28.400.000,00 | 28.400.000,00 | -60.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 220.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.02.0024 | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota* | | | | 51 Perangkat Daerah | 51 Perangkat Daerah | 28.490.510.126,00 | 28.055.836.126,00 | 10.177.458.758,00 | -18.313.051.368,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 17.000.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.02.0025 | Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional* | | | | 0 Layanan | 0 Layanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 220.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.02.0026 | Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 131.400.000,00 | 132.200.000,00 | 121.400.000,00 | -10.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 330.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.02.0030 | Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas* | | | | 51 Perangkat Daerah | 51 Perangkat Daerah | 21.551.187.240,00 | 21.273.441.240,00 | 22.654.761.240,00 | 1.103.574.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 11.000.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | **2.20** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | | | **1.260.803.640,00** | **1.329.103.640,00** | **1.413.204.640,00** | **152.401.000,00** | | | | | | | **630.000.000,00** | |
| 1. | **2.20.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | **Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah**<br>**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan** | | | | **-** | **88,23 88.23 % %** | **1.260.803.640,00** | **1.329.103.640,00** | **1.413.204.640,00** | **-630.803.640,00** | | | | | | | **630.000.000,00** | |
| | 2.20.02.2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Terselenggaranya Statistik Sektoral Di Pemerintah Kota Makassar* | | | | - | 88,23 % | 1.260.803.640,00 | 1.329.103.640,00 | 1.413.204.640,00 | 152.401.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | OPD | | 630.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.20.02.2.01.0007 | Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 92.188.280,00 | 191.434.280,00 | 169.834.280,00 | 77.646.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 110.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.20.02.2.01.0008 | Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan* | | | | 80 Persentase | 80 Persentase | 319.202.960,00 | 386.256.960,00 | 458.356.960,00 | 139.154.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 110.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.20.02.2.01.0009 | Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu* | | | | 80 Persentase | 80 Persentase | 54.824.320,00 | 84.824.320,00 | 89.805.320,00 | 34.981.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 110.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.20.02.2.01.0010 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 572.001.320,00 | 548.001.320,00 | 512.001.320,00 | -60.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 110.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.20.02.2.01.0011 | Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 222.586.760,00 | 118.586.760,00 | 183.206.760,00 | -39.380.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 190.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | **2.21** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | | | | **966.949.600,00** | **780.529.600,00** | **855.249.601,00** | **-111.699.999,00** | | | | | | | **976.713.903,00** | |
| 1. | **2.21.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | **Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah**<br>**Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah** | | | | **100 52.27 % %** | **100 52.27 % %** | **966.949.600,00** | **780.529.600,00** | **855.249.601,00** | **9.764.303,00** | | | | | | | **976.713.903,00** | |
| | 2.21.02.2.01 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Pemanfaatan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah* | | | | 60 % | 60 % | 906.231.600,00 | 735.211.600,00 | 827.531.601,00 | -78.699.999,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | OPD | | 866.713.903,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.21.02.2.01.0001 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 79.797.000,00 | 79.797.000,00 | 54.097.000,00 | -25.700.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 197.962.210,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.21.02.2.01.0002 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 139.400.000,00 | 97.700.000,00 | 56.000.000,00 | -83.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 110.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.21.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik* | | | | 40 Laporan | 40 Laporan | 533.747.000,00 | 449.747.000,00 | 637.467.001,00 | 103.720.001,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 424.688.160,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.21.02.2.01.0004 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi* | | | | 51 Perangkat Daerah | 51 Perangkat Daerah | 153.287.600,00 | 107.967.600,00 | 79.967.600,00 | -73.320.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 134.063.533,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.21.02.2.02 | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Keterhubungan Perangkat Daerah Dalam Jaring Komunikasi Sandi* | | | | 100 % | 100 % | 60.718.000,00 | 45.318.000,00 | 27.718.000,00 | -33.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | OPD | | 110.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.21.02.2.02.0001 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi* | | | | 51 Perangkat Daerah | 51 Perangkat Daerah | 60.718.000,00 | 45.318.000,00 | 27.718.000,00 | -33.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 110.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | | **UPT WAR ROOM** | | | | | | | **3.609.820.320,00** | **3.612.999.820,00** | **4.207.822.820,00** | **598.002.500,00** | | | | | | | **4.420.000.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **3.609.820.320,00** | **3.612.999.820,00** | **4.207.822.820,00** | **598.002.500,00** | | | | | | | **4.420.000.000,00** | |
| | **2.16** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | **3.609.820.320,00** | **3.612.999.820,00** | **4.207.822.820,00** | **598.002.500,00** | | | | | | | **4.420.000.000,00** | |
| 1. | **2.16.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | **Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo**<br>**Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi** | | | | **100**<br>**95.89 %**<br>**%** | **100**<br>**95.89 %**<br>**%** | **3.609.820.320,00** | **3.612.999.820,00** | **4.207.822.820,00** | **810.179.680,00** | | | | | | | **4.420.000.000,00** | |
| | 2.16.03.2.02 | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 100 % | 100 % | 3.609.820.320,00 | 3.612.999.820,00 | 4.207.822.820,00 | 598.002.500,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | OPD, Masyarakat | | 4.420.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.02.0013 | Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional* | | | | 0 Aplikasi | 0 Aplikasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 220.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.02.0016 | Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3.609.820.320,00 | 3.612.999.820,00 | 4.207.822.820,00 | 598.002.500,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 4.200.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | | **DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH** | | | | | | | **12.009.898.120,00** | **18.643.848.181,00** | **19.049.378.820,00** | **7.039.480.700,00** | | | | | | | **21.400.349.800,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **12.009.898.120,00** | **18.643.848.181,00** | **19.049.378.820,00** | **7.039.480.700,00** | | | | | | | **21.400.349.800,00** | |
| | **2.17** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | | **12.009.898.120,00** | **18.643.848.181,00** | **19.049.378.820,00** | **7.039.480.700,00** | | | | | | | **21.400.349.800,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | **2.17.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah<br>Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas** | | | | **100<br>90 %<br>%** | **100<br>90 %<br>%** | **6.668.659.320,00** | **9.407.916.681,00** | **9.288.950.920,00** | **4.442.425.680,00** | | | | | | | **11.111.085.000,00** | |
| | 2.17.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun* | | | | 100 % | 100 % | 123.303.000,00 | 115.723.000,00 | 76.463.000,00 | -46.840.000,00 | | | - | -<br>- | Dokumen Perencanaan Dinas Koperasi dan UKM | | 391.410.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 9 Dokumen | 3 Dokumen | 65.292.000,00 | 63.052.000,00 | 43.192.000,00 | -22.100.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 181.193.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.943.000,00 | 8.483.000,00 | 5.483.000,00 | -3.460.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 15.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.599.000,00 | 9.139.000,00 | 6.139.000,00 | -3.460.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 15.300.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.067.000,00 | 7.907.000,00 | 4.907.000,00 | -3.160.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 15.194.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.588.000,00 | 7.128.000,00 | 4.128.000,00 | -3.460.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 15.300.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 7.966.000,00 | 7.366.000,00 | 4.366.000,00 | -3.600.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 135.558.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 15.848.000,00 | 12.648.000,00 | 8.248.000,00 | -7.600.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 13.865.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Terlaksananya Dokumen Administrasi Keuangan* | | | | 100 % | 100 % | 5.097.392.280,00 | 7.405.512.441,00 | 7.399.395.180,00 | 2.302.002.900,00 | | | - | -<br>- | - | | 7.951.768.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 32 Orang/bulan | 30 Orang/bulan | 4.677.746.280,00 | 6.921.326.441,00 | 6.921.329.180,00 | 2.243.582.900,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 7.449.156.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 228.345.000,00 | 292.185.000,00 | 286.065.000,00 | 57.720.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 277.560.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1418 Dokumen | 1418 Dokumen | 180.945.000,00 | 181.345.000,00 | 181.345.000,00 | 400.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 146.227.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.025.000,00 | 2.025.000,00 | 2.025.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 15.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 1.115.000,00 | 1.115.000,00 | 1.115.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 15.825.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 3.420.000,00 | 3.420.000,00 | 3.420.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 16.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 815.000,00 | 1.115.000,00 | 1.115.000,00 | 300.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 15.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.981.000,00 | 2.981.000,00 | 2.981.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 16.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 139.825.400,00 | 140.245.400,00 | 122.148.200,00 | -17.677.200,00 | | | - | -<br>- | - | | 225.167.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 139.825.400,00 | 140.245.400,00 | 122.148.200,00 | -17.677.200,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 225.167.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.17.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 168.460.200,00 | 612.820.200,00 | 597.674.400,00 | 429.214.200,00 | | | - | -<br>- | - | | 503.989.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 77 Paket | 77 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 46.200.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 120.460.200,00 | 120.820.200,00 | 93.674.400,00 | -26.785.800,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 265.789.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 4 Orang | 96 Orang | 48.000.000,00 | 492.000.000,00 | 504.000.000,00 | 456.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 192.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 7 Laporan | 641.210.140,00 | 575.270.840,00 | 499.808.340,00 | -141.401.800,00 | | | - | -<br>- | - | | 1.000.733.888,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.335.000,00 | 10.335.000,00 | 10.335.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 8.298.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 118.411.840,00 | 121.710.040,00 | 126.210.040,00 | 7.798.200,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 185.095.888,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 35.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 50.102.800,00 | 27.421.800,00 | 27.421.800,00 | -22.681.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 30.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 25.940.500,00 | 25.984.000,00 | 26.021.500,00 | 81.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 52.080.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 36.420.000,00 | 36.420.000,00 | 36.420.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 16.260.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 30 Laporan | 30 Laporan | 300.000.000,00 | 235.400.000,00 | 173.400.000,00 | -126.600.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 574.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | 118.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 100.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 38.577.000,00 | 38.577.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 445.735.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 38.577.000,00 | 38.577.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 445.735.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 193.324.800,00 | 193.864.800,00 | 193.864.800,00 | 540.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 202.400.012,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 181.324.800,00 | 181.864.800,00 | 181.864.800,00 | 540.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 200.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 2.400.012,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 305.143.500,00 | 364.480.000,00 | 361.020.000,00 | 55.876.500,00 | | | - | -<br>- | - | | 389.882.100,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 39.655.500,00 | 43.130.000,00 | 39.630.000,00 | -25.500,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 39.758.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 11 Unit | 11 Unit | 168.918.000,00 | 236.980.000,00 | 213.020.000,00 | 44.102.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 240.084.100,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 77 Unit | 77 Unit | 51.570.000,00 | 39.370.000,00 | 63.370.000,00 | 11.800.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 65.040.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 45.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2. | **2.17.02** | **PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM** | **Persentase BPR/LKM Aktif** | | | | **-** | **65.51 %** | **142.978.000,00** | **142.978.000,00** | **76.278.000,00** | **100.371.800,00** | | | | | | | **243.349.800,00** | |
| | 2.17.02.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi* | | | | 420 Unit Usaha | 210 Unit Usaha | 71.862.000,00 | 71.862.000,00 | 38.512.000,00 | -33.350.000,00 | | | - | -<br>- | Koperasi yang ada di Kota Makassar | | 39.456.800,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.02.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 210 Unit Usaha | 210 Unit Usaha | 71.862.000,00 | 71.862.000,00 | 38.512.000,00 | -33.350.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 39.456.800,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.02.2.02 | Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Terlaksananya Koperasi yang Terfasilitasi Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas* | | | | 210 Unit Usaha | 210 Unit Usaha | 71.116.000,00 | 71.116.000,00 | 37.766.000,00 | -33.350.000,00 | | | - | -<br>- | Koperasi yang ada di Kota Makassar | | 203.893.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 210 Unit Usaha | 210 Unit Usaha | 71.116.000,00 | 71.116.000,00 | 37.766.000,00 | -33.350.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 203.893.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 3. | **2.17.03** | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | **Persentase Koperasi Yang Diawasi Dan Diperiksa** | | | | **15.20 %** | **15.20 %** | **380.937.400,00** | **373.223.400,00** | **350.776.200,00** | **1.067.290.600,00** | | | | | | | **1.448.228.000,00** | |
| | 2.17.03.2.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | *Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi* | | | | 425 Unit Usaha | 425 Unit Usaha | 380.937.400,00 | 373.223.400,00 | 350.776.200,00 | -30.161.200,00 | | | - | -<br>- | - | | 1.448.228.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.03.2.01.0003 | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi* | | | | 400 Unit Usaha | 400 Unit Usaha | 205.606.000,00 | 205.606.000,00 | 205.606.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 457.151.700,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan* | | | | 25 Unit Usaha | 25 Unit Usaha | 175.331.400,00 | 167.617.400,00 | 145.170.200,00 | -30.161.200,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 991.076.300,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 4. | **2.17.04** | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | **Persentase KSP/USP Koperasi yang Sehat** | | | | **72.84 %** | **72.84 %** | **337.962.200,00** | **838.305.600,00** | **653.540.800,00** | **529.252.800,00** | | | | | | | **867.215.000,00** | |
| | 2.17.04.2.01 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Terlaksananya Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan* | | | | 800 Unit Usaha | 620 Unit Usaha | 337.962.200,00 | 838.305.600,00 | 653.540.800,00 | 315.578.600,00 | | | - | -<br>- | Koperasi yang ada di Kota Makassar | | 867.215.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.04.2.01.0001 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan* | | | | 180 Unit Usaha | 180 Unit Usaha | 236.986.200,00 | 237.346.200,00 | 140.481.400,00 | -96.504.800,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 562.055.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.04.2.01.0003 | Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan* | | | | 300 Unit Usaha | 440 Unit Usaha | 100.976.000,00 | 600.959.400,00 | 513.059.400,00 | 412.083.400,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 305.160.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 5. | **2.17.05** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | **Persentase SDM Koperasi Yang Mendapat Pendidikan Dan Pelatihan** | | | | **1.95 %** | **1.95 %** | **51.556.000,00** | **51.556.000,00** | **25.156.000,00** | **690.127.000,00** | | | | | | | **741.683.000,00** | |
| | 2.17.05.2.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Terlaksananya Pengurus dan Pengelola yang Terfasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian* | | | | 110 Orang | 100 Orang | 51.556.000,00 | 51.556.000,00 | 25.156.000,00 | -26.400.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 741.683.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.05.2.01.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian* | | | | 110 Orang | 100 Orang | 51.556.000,00 | 51.556.000,00 | 25.156.000,00 | -26.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 741.683.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 6. | **2.17.06** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | **Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas** | | | | **28.17 %** | **28.17 %** | **124.075.000,00** | **624.031.900,00** | **1.127.731.900,00** | **1.571.756.000,00** | | | | | | | **1.695.831.000,00** | |
| | 2.17.06.2.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Terlaksananya Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha* | | | | 400 Unit Usaha | 400 Unit Usaha | 124.075.000,00 | 624.031.900,00 | 1.127.731.900,00 | 1.003.656.900,00 | | | - | PD\|2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui perbaikan iklim investasi dan peningkatan kemandirian fiskal daerah<br>PD\|2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui perbaikan iklim investasi dan peningkatan kemandirian fiskal daerah | Koperasi yang ada di Kota Makassar | | 1.695.831.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.06.2.01.0005 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha* | | | | 360 Unit Usaha | 400 Unit Usaha | 124.075.000,00 | 624.031.900,00 | 1.127.731.900,00 | 1.003.656.900,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | PD|2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui perbaikan iklim investasi dan peningkatan kemandirian fiskal daerah<br>PD|2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui perbaikan iklim investasi dan peningkatan kemandirian fiskal daerah | | | 1.695.831.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 7. | **2.17.07** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | **Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor UMKM<br>Meningkatnya Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha** | | | | **520<br>91.99<br>UMKM<br>%** | **520<br>91.99<br>UMKM<br>%** | **1.918.797.200,00** | **4.158.866.600,00** | **4.488.493.000,00** | **2.417.519.800,00** | | | | | | | **4.336.317.000,00** | |
| | 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | *Terlaksananya Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan* | | | | 1664 Unit Usaha | 1622 Unit Usaha | 1.918.797.200,00 | 4.158.866.600,00 | 4.488.493.000,00 | 2.569.695.800,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | UMKM yang ada di Kota Makassar | | 4.336.317.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.07.2.01.0002 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro* | | | | 376 Unit Usaha | 504 Unit Usaha | 313.356.000,00 | 1.110.056.000,00 | 1.644.504.000,00 | 1.331.148.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | | | 2.051.758.250,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.07.2.01.0003 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan* | | | | 45 Unit Usaha | 45 Unit Usaha | 285.196.000,00 | 239.476.000,00 | 119.596.000,00 | -165.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | | | 120.404.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro* | | | | 500 Unit Usaha | 540 Unit Usaha | 1.064.611.200,00 | 1.559.800.600,00 | 1.382.852.000,00 | 318.240.800,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | | | 1.627.881.676,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.07.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro* | | | | 153 Orang | 100 Orang | 49.628.000,00 | 44.528.000,00 | 32.338.000,00 | -17.290.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | | | 490.387.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.07.2.01.0015 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan* | | | | 600 Orang | 600 Orang | 206.006.000,00 | 1.205.006.000,00 | 1.309.203.000,00 | 1.103.197.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | | | 45.886.074,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 8. | **2.17.08** | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | **Jumlah Wirausaha Baru (Start-Up)<br>Persentase Usaha Mikro Dan Kecil** | | | | **10<br>81 UMKM<br>%** | **10<br>81 UMKM<br>%** | **2.384.933.000,00** | **3.046.970.000,00** | **3.038.452.000,00** | **-1.428.292.000,00** | | | | | | | **956.641.000,00** | |
| | 2.17.08.2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | *Terlaksananya Usaha Mikro yang Terfasilitasi Produksi dan Peangolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi* | | | | 720 Unit Usaha | 2260 Unit Usaha | 2.384.933.000,00 | 3.046.970.000,00 | 3.038.452.000,00 | 653.519.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | UMKM yang ada di Kota Makassar | | 956.641.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.08.2.01.0006 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi* | | | | 720 Unit Usaha | 1660 Unit Usaha | 2.384.933.000,00 | 3.046.970.000,00 | 3.038.452.000,00 | 653.519.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 956.641.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | | **UPT PUSAT LAYANAN USAHA LORONG** | | | | | | | **454.501.880,00** | **369.997.780,00** | **342.949.180,00** | **-111.552.700,00** | | | | | | | **406.997.558,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **454.501.880,00** | **369.997.780,00** | **342.949.180,00** | **-111.552.700,00** | | | | | | | **406.997.558,00** | |
| | **2.17** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | | **454.501.880,00** | **369.997.780,00** | **342.949.180,00** | **-111.552.700,00** | | | | | | | **406.997.558,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | **2.17.08** | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | **Jumlah Wirausaha Baru (Start-Up)**<br>**Persentase Usaha Mikro Dan Kecil** | | | | **-** | **10**<br>**81 UMKM %** | **454.501.880,00** | **369.997.780,00** | **342.949.180,00** | **-47.504.322,00** | | | | | | | **406.997.558,00** | |
| | 2.17.08.2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | *Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitasi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi* | | | | - | 103 Unit Usaha | 454.501.880,00 | 369.997.780,00 | 342.949.180,00 | -111.552.700,00 | | | - | -<br>- | UMKM yang ada di Kota Makassar | | 406.997.558,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2.17.08.2.01.0006 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi* | | | | 100 Unit Usaha | 103 Unit Usaha | 454.501.880,00 | 369.997.780,00 | 342.949.180,00 | -111.552.700,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 406.997.558,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | | **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** | | | | | | | **17.856.100.000,00** | **22.721.782.335,00** | **22.373.068.000,00** | **4.516.968.000,00** | | | | | | | **10.473.144.464,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **17.856.100.000,00** | **22.721.782.335,00** | **22.373.068.000,00** | **4.516.968.000,00** | | | | | | | **10.473.144.464,00** | |
| | **2.18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | | **17.856.100.000,00** | **22.721.782.335,00** | **22.373.068.000,00** | **4.516.968.000,00** | | | | | | | **10.473.144.464,00** | |
| 1. | **2.18.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**<br>**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**<br>**Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas** | | | | **100**<br>**90**<br>**90 Persen**<br>**persen**<br>**Persen** | **100**<br>**90**<br>**90 Persen**<br>**persen**<br>**Persen** | **13.629.330.125,00** | **16.689.936.660,00** | **17.132.870.325,00** | **-6.892.656.824,00** | | | | | | | **6.736.673.301,00** | |
| | 2.18.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 185.035.000,00 | 87.955.000,00 | 55.695.000,00 | -129.340.000,00 | | | - | -<br>- | SKPD | | 272.643.899,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 142.710.000,00 | 59.710.000,00 | 39.850.000,00 | -102.860.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 103.238.145,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.108.000,00 | 5.788.000,00 | 3.788.000,00 | -6.320.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 27.307.054,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.308.000,00 | 5.788.000,00 | 3.788.000,00 | -5.520.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 26.572.061,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.090.000,00 | 4.770.000,00 | 2.770.000,00 | -4.320.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 22.923.468,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.449.000,00 | 4.729.000,00 | 2.729.000,00 | -4.720.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 22.209.334,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 8.370.000,00 | 7.170.000,00 | 2.770.000,00 | -5.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 70.393.837,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun Berjalan* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 9.650.332.685,00 | 11.059.732.820,00 | 11.059.733.735,00 | 1.409.401.050,00 | | | - | -<br>- | SKPD | | 1.013.261.469,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 12 Orang/bulan | 12 Orang/bulan | 9.137.692.685,00 | 10.544.094.820,00 | 10.544.095.735,00 | 1.406.403.050,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 14.334.763,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 328.440.000,00 | 333.240.000,00 | 333.240.000,00 | 4.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 785.287.884,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 180.000.000,00 | 182.398.000,00 | 182.398.000,00 | 2.398.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 180.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.100.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 33.638.822,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.100.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 96.000.000,00 | 688.500.000,00 | 516.000.000,00 | 420.000.000,00 | | | - | -<br>- | SKPD | | 445.165.515,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 160 Paket | 160 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 145.165.515,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 14 Orang | 14 Orang | 96.000.000,00 | 688.500.000,00 | 516.000.000,00 | 420.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 300.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 776.863.240,00 | 776.648.740,00 | 636.998.740,00 | -139.864.500,00 | | | - | -<br>- | SKPD | | 2.110.217.186,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 9 Paket | 9 Paket | 1.080.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 3.720.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 21.512.021,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 185.541.240,00 | 85.441.240,00 | 85.441.240,00 | -100.100.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 156.283.682,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 15 Paket | 15 Paket | 1.329.000,00 | 52.476.000,00 | 52.476.000,00 | 51.147.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 20.647.000,00 | 89.907.500,00 | 89.907.500,00 | 69.260.500,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 50.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 7 Paket | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 287.336.455,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 33.600.000,00 | 33.600.000,00 | 33.600.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 27.935.028,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 3000 Laporan | 3000 Laporan | 20.000.000,00 | 29.360.000,00 | 29.360.000,00 | 9.360.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 108.750.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 60 Laporan | 60 Laporan | 300.586.000,00 | 273.584.000,00 | 133.934.000,00 | -166.652.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 795.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 110.100.000,00 | 103.500.000,00 | 103.500.000,00 | -6.600.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 35.100.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 102.500.000,00 | 102.500.000,00 | 102.500.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 628.300.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Barang Penunjang Pemerintah daerah* | | | | 80 Unit | 80 Unit | 0,00 | 0,00 | 896.778.750,00 | 896.778.750,00 | | | - | -<br>- | SKPD | | 1.258.715.600,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 30 Unit | 30 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 288.474.700,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 60 Unit | 60 Unit | 0,00 | 0,00 | 896.778.750,00 | 896.778.750,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 970.240.900,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 3 Jenis | 3 Jenis | 2.548.753.200,00 | 3.634.664.100,00 | 3.533.414.100,00 | 984.660.900,00 | | | - | -<br>- | SKPD | | 277.250.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 535.508.400,00 | 460.593.600,00 | 460.593.600,00 | -74.914.800,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 20.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 102.244.800,00 | 108.244.500,00 | 108.244.500,00 | 5.999.700,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 79.200.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 1.911.000.000,00 | 3.065.826.000,00 | 2.964.576.000,00 | 1.053.576.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 178.050.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Darerah Secara Rutin / Berkala* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 372.346.000,00 | 442.436.000,00 | 434.250.000,00 | 61.904.000,00 | | | - | -<br>- | SKPD | | 1.359.419.632,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 43.630.000,00 | 43.630.000,00 | 40.130.000,00 | -3.500.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 65.145.954,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 50 Unit | 50 Unit | 254.916.000,00 | 325.006.000,00 | 320.320.000,00 | 65.404.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 1.070.373.678,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 41 Unit | 41 Unit | 73.800.000,00 | 73.800.000,00 | 73.800.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 90.900.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 133.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2. | **2.18.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | **Persentase Jumlah Investor serta Investasi PMA dan PMDN Berskala Nasional** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **411.682.000,00** | **628.336.300,00** | **555.136.300,00** | **-46.866.693,00** | | | | | | | **364.815.307,00** | |
| | 2.18.02.2.01 | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kota Makassar yang ditetapkan* | | | | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 195.174.000,00 | 242.184.000,00 | 168.984.000,00 | -26.190.000,00 | | | - | -<br>- | SKPD | | 187.204.915,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.02.2.01.0001 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 63.445.000,00 | 11.445.000,00 | 11.445.000,00 | -52.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 68.982.707,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.02.2.01.0004 | Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 131.729.000,00 | 230.739.000,00 | 157.539.000,00 | 25.810.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 118.222.208,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.02.2.02 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | *Jumlah Peta Potensi Investasi Kota Makassar yang disusun* | | | | 15 Laporan | 15 Laporan | 216.508.000,00 | 386.152.300,00 | 386.152.300,00 | 169.644.300,00 | | | - | -<br>- | SKPD | | 177.610.392,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.02.2.02.0004 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 216.508.000,00 | 386.152.300,00 | 386.152.300,00 | 169.644.300,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 177.610.392,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 3. | **2.18.03** | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | **Jumlah Investor PMA Berskala Nasional<br>Jumlah Investor PNDM Berskala Nasional<br>Jumlah Investasi PNDM Berskala Nasional** | | | | **120<br>200<br>2 Investor<br>Investor<br>Triliyun** | **120<br>200<br>2 Investor<br>Investor<br>Triliyun** | **1.814.203.920,00** | **2.525.497.920,00** | **2.124.449.920,00** | **-1.514.173.920,00** | | | | | | | **300.030.000,00** | |
| | 2.18.03.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kota Makassar yang Diselenggarakan* | | | | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 1.814.203.920,00 | 2.525.497.920,00 | 2.124.449.920,00 | 310.246.000,00 | | | - | -<br>- | SKPD | | 300.030.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.03.2.01.0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 1.575.606.640,00 | 2.026.460.640,00 | 1.625.412.640,00 | 49.806.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 241.656.500,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.03.2.01.0003 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 238.597.280,00 | 499.037.280,00 | 499.037.280,00 | 260.440.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 58.373.500,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 4. | **2.18.04** | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | **Presentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pelayanan Perizinan** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **1.155.480.400,00** | **1.495.715.400,00** | **1.295.015.400,00** | **57.984.094,00** | | | | | | | **1.213.464.494,00** | |
| | 2.18.04.2.01 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | *Pesentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 1.155.480.400,00 | 1.495.715.400,00 | 1.295.015.400,00 | 139.535.000,00 | | | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | -<br>- | - | | 1.213.464.494,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 144.953.000,00 | 267.953.000,00 | 169.253.000,00 | 24.300.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | -<br>- | | | 63.933.700,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.2.01.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik* | | | | 21000 Pelaku Usaha | 21000 Pelaku Usaha | 956.323.400,00 | 1.073.558.400,00 | 1.013.558.400,00 | 57.235.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | -<br>- | | | 566.523.240,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.2.01.0007 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik* | | | | 250 Pelaku Usaha | 250 Pelaku Usaha | 50.204.000,00 | 150.204.000,00 | 108.204.000,00 | 58.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | -<br>- | | | 138.652.690,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.2.01.0008 | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha* | | | | 1000 Kegiatan Usaha | 1000 Kegiatan Usaha | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | -<br>- | | | 444.354.864,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 5. | **2.18.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | **Pesentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Dilaksanakan** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **23.069.500,00** | **555.642.000,00** | **438.942.000,00** | **1.624.491.862,00** | | | | | | | **1.647.561.362,00** | |
| | 2.18.05.2.01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kota Makassar yang Dikendalikan* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 23.069.500,00 | 555.642.000,00 | 438.942.000,00 | 415.872.500,00 | | | - | -<br>- | SKPD | | 1.647.561.362,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.05.2.01.0004 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya* | | | | 12 Kegiatan Usaha. | 12 Kegiatan Usaha. | 9.517.500,00 | 138.965.000,00 | 112.565.000,00 | 103.047.500,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 632.934.252,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.18.05.2.01.0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko* | | | | 12 Pelaku Usaha | 12 Pelaku Usaha | 3.272.000,00 | 269.172.000,00 | 216.372.000,00 | 213.100.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 411.873.790,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.05.2.01.0006 | Pengawasan Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha* | | | | 12 Kegiatan Usaha | 12 Kegiatan Usaha | 10.280.000,00 | 147.505.000,00 | 110.005.000,00 | 99.725.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 602.753.320,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 6. | **2.18.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | **Presentase Kebutuhan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Terpenuhi** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **822.334.055,00** | **826.654.055,00** | **826.654.055,00** | **-611.734.055,00** | | | | | | | **210.600.000,00** | |
| | 2.18.06.2.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada tingkat Kota Makassar yang dikelola* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 822.334.055,00 | 826.654.055,00 | 826.654.055,00 | 4.320.000,00 | | | - | -<br>- | SKPD | | 210.600.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.06.2.01.0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 822.334.055,00 | 826.654.055,00 | 826.654.055,00 | 4.320.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 210.600.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | **DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA** | | | | | | | **233.564.400.000,00** | **120.627.842.078,00** | **67.407.562.000,00** | **-166.156.838.000,00** | | | | | | | **45.704.509.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **233.564.400.000,00** | **120.627.842.078,00** | **67.407.562.000,00** | **-166.156.838.000,00** | | | | | | | **45.704.509.000,00** | |
| | **2.19** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | | **233.564.400.000,00** | **120.627.842.078,00** | **67.407.562.000,00** | **-166.156.838.000,00** | | | | | | | **45.704.509.000,00** | |
| 1. | **2.19.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**<br>**Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas** | | | | **100**<br>**90 %**<br>**%** | **100**<br>**90 %**<br>**%** | **9.637.469.900,00** | **11.346.444.219,00** | **11.265.584.307,00** | **1.495.750.100,00** | | | | | | | **11.133.220.000,00** | |
| | 2.19.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen penganggaran dan laporan kinerja* | | | | 8 dok | 8 dok | 164.793.000,00 | 147.495.000,00 | 87.475.000,00 | -77.318.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Terkelolanya dengan baik dokumen perangkat daerah | | 815.600.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 81.396.000,00 | 74.796.000,00 | 48.776.000,00 | -32.620.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 550.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 19.954.500,00 | 11.271.500,00 | 8.271.500,00 | -11.683.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 19.300.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.057.500,00 | 10.847.500,00 | 7.847.500,00 | -4.210.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 19.500.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.353.000,00 | 10.298.000,00 | 7.298.000,00 | -1.055.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 19.500.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.252.000,00 | 9.702.000,00 | 6.702.000,00 | -2.550.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 19.500.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 33.780.000,00 | 30.580.000,00 | 8.580.000,00 | -25.200.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 136.800.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah* | | | | 1 Data | 1 Data | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 1.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.01.0011 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 50.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase keuangan perangkat daerah* | | | | 100 % | 100 % | 6.743.227.270,00 | 8.095.907.189,00 | 8.045.179.530,00 | 1.301.952.260,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Terkelolanya dengan baik dokumen perangkat daerah | | 6.423.730.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 12 Orang/bulan | 12 Orang/bulan | 6.051.667.270,00 | 7.287.227.189,00 | 7.325.479.530,00 | 1.273.812.260,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 5.500.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 367.560.000,00 | 484.680.000,00 | 485.700.000,00 | 118.140.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 665.880.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.19.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 324.000.000,00 | 324.000.000,00 | 234.000.000,00 | -90.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 180.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 30.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 8.350.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 19.500.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 20.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Persentase capaian administrasi umum barang milik daerah SKPD* | | | | 100 % | 100 % | 13.221.000,00 | 10.185.000,00 | 4.935.000,00 | -8.286.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | ASN, Dokumen, sarana dan prasarana | | 58.500.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 241.000,00 | 241.000,00 | 241.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 19.500.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.585.000,00 | 5.794.000,00 | 2.294.000,00 | -4.291.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 19.500.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.395.000,00 | 4.150.000,00 | 2.400.000,00 | -3.995.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 19.500.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase capaian administrasi kepegawaian* | | | | 100 % | 100 % | 125.000.000,00 | 101.000.000,00 | 61.000.000,00 | -64.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Persentase ASN perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas, Persentase keterseduaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik | | 452.500.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 72.500.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 15 Orang | 15 Orang | 125.000.000,00 | 101.000.000,00 | 61.000.000,00 | -64.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 380.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Tersedianya peralatan dan kelengkapan kantor lainnya* | | | | 100 % | 100 % | 720.438.080,00 | 970.693.680,00 | 1.135.240.680,00 | 414.802.600,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Persentase ASN perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas, Persentase keterseduaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik | | 1.137.890.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 10 Paket | 10 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 30.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 148.010.080,00 | 574.686.080,00 | 597.920.080,00 | 449.910.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 450.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.19.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 9.007.000,00 | 6.908.600,00 | 15.601.600,00 | 6.594.600,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 25.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 29.167.500,00 | 11.005.000,00 | 15.625.000,00 | -13.542.500,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 30.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 44.333.500,00 | 29.174.000,00 | 29.174.000,00 | -15.159.500,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 42.250.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.920.000,00 | 7.920.000,00 | 7.920.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 30.640.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 15.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 15.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 479.000.000,00 | 341.000.000,00 | 469.000.000,00 | -10.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 500.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | - | | 1.350.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | -<br>- | | | 200.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 300.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 300.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 200.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 100.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 1.496.791.000,00 | 1.631.807.800,00 | 1.636.248.547,00 | 139.457.547,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Persentase ASN perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas, Persentase keterseduaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik | | 728.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 34.135.000,00 | 19.135.000,00 | 19.135.000,00 | -15.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 25.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 44.256.000,00 | 41.400.000,00 | 41.400.000,00 | -2.856.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 3.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 200.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.418.400.000,00 | 1.571.272.800,00 | 1.575.713.547,00 | 157.313.547,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 500.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 373.999.550,00 | 389.355.550,00 | 295.505.550,00 | -78.494.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Persentase ASN perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas, Persentase keterseduaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik | | 167.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 45.380.000,00 | 45.380.000,00 | 41.880.000,00 | -3.500.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 60.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 301.219.550,00 | 316.575.550,00 | 235.375.550,00 | -65.844.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 15.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 30.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 27.400.000,00 | 27.400.000,00 | 18.250.000,00 | -9.150.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 30.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 2.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 25.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 5.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 2. | **2.19.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | **Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri** | | | | **86.07 90 % %** | **86.07 90 % %** | **4.481.430.000,00** | **11.031.252.000,00** | **9.149.463.000,00** | **4.478.240.000,00** | | | | | | | **8.959.670.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.19.02.2.01 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | *Jumlah kegiatan Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda yang terlaksana* | | | | 9 keg | 9 keg | 4.127.836.000,00 | 10.563.728.000,00 | 7.767.028.000,00 | 3.639.192.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Pemuda, OKP | | 7.159.670.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.2.01.0010 | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 158.400.000,00 | 158.400.000,00 | 158.400.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 109.670.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.2.01.0011 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda* | | | | 500 Orang | 500 Orang | 1.471.064.000,00 | 1.212.709.000,00 | 955.441.000,00 | -515.623.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 1.500.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.2.01.0012 | Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah yang menerima penghargaan pemuda* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 1.300.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.2.01.0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda* | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1.509.861.000,00 | 4.843.609.000,00 | 3.179.356.000,00 | 1.669.495.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 1.600.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.2.01.0014 | Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi* | | | | 150 Orang | 150 Orang | 745.768.000,00 | 3.604.427.000,00 | 3.300.508.000,00 | 2.554.740.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 1.500.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.2.01.0015 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda* | | | | 150 Orang | 150 Orang | 242.743.000,00 | 744.583.000,00 | 173.323.000,00 | -69.420.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 1.000.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.2.01.0016 | Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 150.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.2.02 | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 353.594.000,00 | 467.524.000,00 | 1.382.435.000,00 | 1.028.841.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Pemuda, OKP | | 1.800.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.2.02.0003 | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya* | | | | 1 Organisasi | 1 Organisasi | 269.563.000,00 | 388.842.000,00 | 1.331.253.000,00 | 1.061.690.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 600.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.2.02.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota* | | | | 150 Orang | 150 Orang | 84.031.000,00 | 78.682.000,00 | 51.182.000,00 | -32.849.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 1.200.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 3. | **2.19.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | **Peningkatan Prestasi Olahraga Cakupan Pembinaan Olahraga Cakupan Pembinaan Atlet Muda** | | | | **406 atlet berprestasi 37 cabang olahraga 57.8 67.16 Atlet Cabang Olahraga % %** | **406 atlet berprestasi 37 cabang olahraga 57.8 67.16 Atlet Cabang Olahraga % %** | **218.445.500.100,00** | **97.250.145.859,00** | **44.934.883.000,00** | **-194.033.881.100,00** | | | | | | | **24.411.619.000,00** | |
| | 2.19.03.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah* | | | | 5 cabang olahraga | 5 cabang olahraga | 205.123.611.600,00 | 77.067.617.859,00 | 4.296.310.000,00 | -200.827.301.600,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Cakupan pembinaan atlet muda dan cakupan pembinaan olahraga | | 3.400.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 100.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.01.0005 | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 205.123.611.600,00 | 77.067.617.859,00 | 4.296.310.000,00 | -200.827.301.600,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 3.000.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.01.0006 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 300.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.02 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah kejuaraan yang terlaksana* | | | | 11 kegiatan | 11 kegiatan | 6.510.437.000,00 | 6.743.725.000,00 | 7.263.349.000,00 | 752.912.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Cakupan pembinaan atlet muda dan cakupan pembinaan olahraga | | 11.000.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.02.0004 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 5 Kegiatan | 5 Kegiatan | 6.174.357.000,00 | 5.792.207.000,00 | 6.330.581.000,00 | 156.224.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 10.000.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.02.0005 | Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota* | | | | 7 Kegiatan | 7 Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 500.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.02.0006 | Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 336.080.000,00 | 951.518.000,00 | 932.768.000,00 | 596.688.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 500.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.03 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Atlet, cabang olahraga | | 961.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.03.0006 | Seleksi Atlet Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 1.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.03.0007 | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah penerima Penghargaan olahraga* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 500.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.03.0008 | Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)* | | | | 3 Pelatda | 3 Pelatda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 10.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.03.0009 | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 350.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.03.0010 | pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 100.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.04 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | *Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga* | | | | 50 organisasi | 50 organisasi | 4.348.800.000,00 | 2.207.800.000,00 | 22.175.800.000,00 | 17.827.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Atlet, cabang olahraga | | 5.000.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.04.0005 | Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 0,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.04.0006 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 4.348.800.000,00 | 2.207.800.000,00 | 22.175.800.000,00 | 17.827.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 5.000.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.05 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | *Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga* | | | | 5 kegiatan | 5 kegiatan | 2.462.651.500,00 | 11.231.003.000,00 | 11.199.424.000,00 | 8.736.772.500,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Atlet, cabang olahraga | | 4.050.619.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.05.0006 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 895.926.500,00 | 2.997.861.380,00 | 3.066.861.380,00 | 2.170.934.880,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 361.619.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.05.0007 | Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 363.276.000,00 | 5.312.022.620,00 | 5.003.522.620,00 | 4.640.246.620,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 1.689.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.05.0008 | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 396.878.000,00 | 1.273.728.000,00 | 1.590.649.000,00 | 1.193.771.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 350.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.05.0009 | Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 1.000.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.05.0010 | Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi* | | | | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 806.571.000,00 | 1.647.391.000,00 | 1.538.391.000,00 | 731.820.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 650.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 4. | **2.19.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | **Cakupan Pembinaan Pramuka<br>Jumlah Prestasi Pramuka** | | | | **90,26 (770 binaan pra muka/853 gugus depan)<br>90 (Pramuka Garuda) 1 prestasi (kwartir tergiat) %<br>Orang** | **90,26 (770 binaan pra muka/853 gugus depan)<br>90 (Pramuka Garuda) 1 prestasi (kwartir tergiat) %<br>Orang** | **1.000.000.000,00** | **1.000.000.000,00** | **2.057.631.693,00** | **200.000.000,00** | | | | | | | **1.200.000.000,00** | |
| | 2.19.04.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | *Jumlah Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan* | | | | 2 keg | 2 keg | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 2.057.631.693,00 | 1.057.631.693,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | cakupan pembinaan pramuka | | 1.200.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.04.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 0,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.04.2.01.0002 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya* | | | | 1 Organisasi | 1 Organisasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 100.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.04.2.01.0003 | Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 100.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.04.2.01.0004 | Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.04.2.01.0005 | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.04.2.01.0006 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.04.2.01.0007 | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.04.2.01.0008 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan* | | | | 1 Organisasi | 1 Organisasi | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 2.057.631.693,00 | 1.057.631.693,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 1.000.000.000,00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | | **DINAS KEBUDAYAAN** | | | | | | | **16.129.700.000,00** | **21.438.163.439,00** | **23.928.360.000,00** | **7.798.660.000,00** | | | | | | | **21.563.374.846,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **16.129.700.000,00** | **21.438.163.439,00** | **23.928.360.000,00** | **7.798.660.000,00** | | | | | | | **21.563.374.846,00** | |
| | **2.22** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | **16.129.700.000,00** | **21.438.163.439,00** | **23.928.360.000,00** | **7.798.660.000,00** | | | | | | | **21.563.374.846,00** | |
| 1. | **2.22.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**<br>**Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas** | | | | **100**<br>**90 %**<br>**%** | **100**<br>**90 %**<br>**%** | **7.555.584.860,00** | **11.809.349.771,00** | **11.872.725.732,00** | **4.361.668.365,00** | | | | | | | **11.917.253.225,00** | |
| | 2.22.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah* | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 156.370.060,00 | 127.630.000,00 | 81.810.000,00 | -74.560.060,00 | | | - | -<br>- | Terkelolanya dengan baik dokumen perangkat daerah | | 227.449.397,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 91.528.560,00 | 67.500.000,00 | 44.980.000,00 | -46.548.560,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 135.765.993,00 | DINAS KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.22.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.250.000,00 | 12.000.000,00 | 8.000.000,00 | -1.250.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 19.960.075,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.250.000,00 | 12.000.000,00 | 8.000.000,00 | -1.250.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 14.447.738,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.250.000,00 | 10.000.000,00 | 7.000.000,00 | -2.250.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 16.946.957,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.250.000,00 | 10.000.000,00 | 6.500.000,00 | -2.750.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 14.641.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 27.841.500,00 | 16.130.000,00 | 7.330.000,00 | -20.511.500,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 25.687.634,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | 12 bulan | | 5.390.953.740,00 | 9.415.867.411,00 | 9.386.667.172,00 | 3.995.713.432,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Terlaksana Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 9.164.189.095,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 35 Orang/bulan | 35 Orang/bulan | 4.658.257.060,00 | 8.679.180.731,00 | 8.679.180.492,00 | 4.020.923.432,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 8.396.025.605,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 23 Dokumen | 23 Dokumen | 365.880.000,00 | 368.280.000,00 | 368.280.000,00 | 2.400.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 445.906.296,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 305.230.400,00 | 306.480.400,00 | 297.480.400,00 | -7.750.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 214.464.296,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 10 Laporan | 10 Laporan | 61.586.280,00 | 61.926.280,00 | 41.726.280,00 | -19.860.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 107.792.898,00 | DINAS KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.22.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Terlaksananya Peningkatan SDM Pegawai Lingkup Dinas Kebudayaan* | | | | 29 Orang | 29 Orang | 100.000.000,00 | 81.000.000,00 | 553.500.000,00 | 453.500.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 286.377.960,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 70 Paket | 70 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 66.762.960,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 20 Orang | 20 Orang | 100.000.000,00 | 81.000.000,00 | 553.500.000,00 | 453.500.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 219.615.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 12 Jenis | 12 Jenis | 863.961.800,00 | 963.197.800,00 | 753.394.000,00 | -110.567.800,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 1.265.169.805,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 5 Paket | 8.256.000,00 | 8.256.000,00 | 8.256.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 8.843.164,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 7 Paket | 44.184.400,00 | 398.540.400,00 | 265.308.600,00 | 221.124.200,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 578.868.538,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 76.981.400,00 | 81.661.400,00 | 81.799.400,00 | 4.818.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 129.416.191,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5.400.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | -1.800.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 19.501.812,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.000.000,00 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 15.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 43.923.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 723.140.000,00 | 450.140.000,00 | 373.430.000,00 | -349.710.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 484.617.100,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusa Pemerintah daerah* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah | | 0,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 0,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 0,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 0,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tersusunnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 733.102.560,00 | 821.462.560,00 | 706.942.560,00 | -26.160.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Tersediannya Jasa Penunjang Pemerintah Daerah | | 738.425.863,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 298.048.800,00 | 298.888.800,00 | 284.888.800,00 | -13.160.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 331.153.680,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 149.453.760,00 | 219.973.760,00 | 149.453.760,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 198.929.024,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 285.600.000,00 | 302.600.000,00 | 272.600.000,00 | -13.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 208.343.159,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terpeliharanya Dengan Baik Barang Milik Daerah* | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 311.196.700,00 | 400.192.000,00 | 390.412.000,00 | 79.215.300,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah | | 235.641.105,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 44.380.000,00 | 44.380.000,00 | 40.880.000,00 | -3.500.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 24.211.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 182.466.700,00 | 177.360.000,00 | 171.080.000,00 | -11.386.700,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 48.613.400,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 15.550.000,00 | 15.550.000,00 | 15.550.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 17.862.020,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 68.800.000,00 | 162.902.000,00 | 162.902.000,00 | 94.102.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 144.954.685,00 | DINAS KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2. | **2.22.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | **Cakupan Objek Pemajuan Kebudayaan Yang dilestarikan** | | | | **55.5 %** | **55.5 %** | **1.858.788.400,00** | **2.677.226.200,00** | **4.244.998.800,00** | **2.442.530.919,00** | | | | | | | **4.301.319.319,00** | |
| | 2.22.02.2.01 | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Terkelolanya dengan Baik Objek Pemajuan Kebudayaan* | | | | 25 Objek | 25 Objek | 674.864.800,00 | 1.244.364.800,00 | 1.620.471.200,00 | 945.606.400,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | Terkelolanya dengan baik objek pemajuan kebudayaan | | 2.062.829.745,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.2.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan* | | | | 25 Objek | 25 Objek | 586.600.800,00 | 1.146.400.800,00 | 1.536.219.200,00 | 949.618.400,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | | | 1.654.363.015,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.2.01.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan* | | | | 3 Orang | 3 Orang | 88.264.000,00 | 97.964.000,00 | 84.252.000,00 | -4.012.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | | | 408.466.730,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.2.02 | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Kota Makassar yang dilestarikan* | | | | 25 OPK | 25 OPK | 1.157.030.000,00 | 1.405.967.800,00 | 2.624.527.600,00 | 1.467.497.600,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | Terlestarinya Objek dan Pelaku Kesenian Tradisional | | 2.047.973.562,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.2.02.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan* | | | | 5 Objek | 5 Objek | 783.635.000,00 | 1.032.558.800,00 | 2.159.821.600,00 | 1.376.186.600,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | | | 1.449.339.676,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.2.02.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional* | | | | 30 Laporan | 30 Laporan | 373.395.000,00 | 373.409.000,00 | 464.706.000,00 | 91.311.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | | | 561.287.624,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.2.02.0003 | Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan* | | | | 5 Sertifikat | 5 Sertifikat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | | | 37.346.262,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.2.03 | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Terlaksananya Lembaga Adat yang penganutnya dalam kota makassar yang di bina* | | | | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 26.893.600,00 | 26.893.600,00 | 0,00 | -26.893.600,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | Terkelolanya dengan baik objek pemajuan kebudayaan | | 190.516.012,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.2.03.0003 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 26.893.600,00 | 26.893.600,00 | 0,00 | -26.893.600,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | | | 190.516.012,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| 3. | **2.22.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | **Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya** | | | | **4 Festival** | **4 Festival** | **4.282.131.000,00** | **4.282.042.000,00** | **4.258.416.000,00** | **-3.435.266.612,00** | | | | | | | **846.864.388,00** | |
| | 2.22.03.2.01 | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/Kota* | | | | 275 Orang | 275 Orang | 4.282.131.000,00 | 4.282.042.000,00 | 4.258.416.000,00 | -23.715.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | Terbinanya SDM dan Kesenian Tradisional | | 846.864.388,00 | DINAS KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.22.03.2.01.0001 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 137.180.000,00 | 139.320.000,00 | 119.944.000,00 | -17.236.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | | | 403.269.042,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.03.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 30 Lembaga | 30 Lembaga | 4.144.951.000,00 | 4.142.722.000,00 | 4.138.472.000,00 | -6.479.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | | | 443.595.346,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| 4. | **2.22.04** | **PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH** | **Persentase Sejarah Lokal Yang dilestarikan** | | | | **100 %** | **100 %** | **815.378.560,00** | **807.556.760,00** | **667.024.760,00** | **205.258.433,00** | | | | | | | **1.020.636.993,00** | |
| | 2.22.04.2.01 | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Terbinanya Sejarah Lokal Kota Makassar* | | | | 7 Objek | 7 Objek | 815.378.560,00 | 807.556.760,00 | 667.024.760,00 | -148.353.800,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | Terbinanya Sejarah Lokal dalam Daerah | | 1.020.636.993,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.04.2.01.0001 | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan* | | | | 15 Orang | 15 Orang | 342.695.080,00 | 333.179.280,00 | 296.847.280,00 | -45.847.800,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | | | 343.405.826,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.04.2.01.0002 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 421.788.000,00 | 198.032.000,00 | 189.032.000,00 | -232.756.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | | | 499.400.117,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.04.2.01.0003 | Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 50.895.480,00 | 276.345.480,00 | 181.145.480,00 | 130.250.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | | | 177.831.050,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| 5. | **2.22.05** | **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | **Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara Terpadu**<br>**Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan** | | | | **0**<br>**78,8 undefined %** | **0**<br>**78,8 undefined %** | **706.165.640,00** | **919.891.168,00** | **961.487.168,00** | **276.664.321,00** | | | | | | | **982.829.961,00** | |
| | 2.22.05.2.01 | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | *Terlaksananya Pendaftaran Objek diduga Cagar Budaya*<br>*Terlaksananya Penetapan Objek Diduga Cagar Budaya* | | | | 15 Objek<br>32 Objek | 15 Objek<br>32 Objek | 212.278.640,00 | 382.142.640,00 | 315.462.640,00 | 103.184.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | Terlaksananya penetapan cagar budaya | | 513.166.082,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.05.2.01.0001 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan* | | | | 32 Objek | 32 Objek | 158.246.000,00 | 278.905.000,00 | 245.225.000,00 | 86.979.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | | | 237.878.982,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.05.2.01.0002 | Penetapan Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan* | | | | 0 Objek | 0 Objek | 54.032.640,00 | 103.237.640,00 | 70.237.640,00 | 16.205.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | | | 275.287.100,00 | DINAS KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.22.05.2.02 | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | *Terlaksananya Cagar budaya yang dilindungi* | | | | 32 Objek | 32 Objek | 475.668.000,00 | 520.822.000,00 | 633.098.000,00 | 157.430.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | Terkelolanya cagar budaya dengan baik | | 307.471.248,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.05.2.02.0001 | Pelindungan Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi* | | | | 3 Objek | 3 Objek | 475.668.000,00 | 520.822.000,00 | 633.098.000,00 | 157.430.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | | | 307.471.248,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.05.2.03 | Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Terkelolanya izin membawa cagar budaya keluar daerah kab/kota* | | | | 6 Objek | 6 Objek | 18.219.000,00 | 16.926.528,00 | 12.926.528,00 | -5.292.472,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | Izin cagar budaya yang terkelola | | 162.192.631,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.05.2.03.0001 | Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi* | | | | 6 Objek | 6 Objek | 18.219.000,00 | 16.926.528,00 | 12.926.528,00 | -5.292.472,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | | | 162.192.631,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| 6. | **2.22.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN** | **Persentase Kenaikan Jumlah Pengunjung Museum Kota Makassar<br>Persentase Koleksi Museum Kota Makassar** | | | | **100<br>92,4 %<br>%** | **100<br>92,4 %<br>%** | **911.651.540,00** | **942.097.540,00** | **1.923.707.540,00** | **1.582.819.420,00** | | | | | | | **2.494.470.960,00** | |
| | 2.22.06.2.01 | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | *Terkelolanya Museum Kota Makassar* | | | | 1 Museum | 1 Museum | 911.651.540,00 | 942.097.540,00 | 1.923.707.540,00 | 1.012.056.000,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | Terkelolanya dengan baik museum | | 2.494.470.960,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.06.2.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu* | | | | 56 Unit | 56 Unit | 134.324.300,00 | 125.924.300,00 | 589.124.100,00 | 454.799.800,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | | | 489.793.865,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.06.2.01.0002 | Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya* | | | | 17 Orang | 17 Orang | 293.356.040,00 | 412.936.040,00 | 358.936.040,00 | 65.580.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | | | 433.386.324,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.06.2.01.0003 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 294.203.200,00 | 355.717.200,00 | 827.123.200,00 | 532.920.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | | | 985.450.571,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.06.2.01.0004 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 187.847.000,00 | 47.520.000,00 | 148.524.200,00 | -39.322.800,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | | | 345.290.397,00 | DINAS KEBUDAYAAN |
| | 2.22.06.2.01.0005 | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 1.921.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.921.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | -<br>- | | | 240.549.803,00 | DINAS KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | **DINAS PERPUSTAKAAN** | | | | | | | **6.843.400.000,00** | **13.244.940.038,00** | **12.942.414.000,00** | **6.099.014.000,00** | | | | | | | **14.413.851.050,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **6.843.400.000,00** | **13.244.940.038,00** | **12.942.414.000,00** | **6.099.014.000,00** | | | | | | | **14.413.851.050,00** | |
| | **2.23** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | | **6.843.400.000,00** | **13.244.940.038,00** | **12.942.414.000,00** | **6.099.014.000,00** | | | | | | | **14.413.851.050,00** | |
| 1. | **2.23.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah<br>Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas** | | | | **100<br>90 %<br>%** | **100<br>90 %<br>%** | **6.244.683.464,00** | **7.983.151.302,00** | **7.994.217.944,00** | **-38.188.914,00** | | | | | | | **6.206.494.550,00** | |
| | 2.23.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Terlaksannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 79.068.300,00 | 85.356.400,00 | 49.796.400,00 | -29.271.900,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | Satuan Kerja Perangkat Daerah | | 156.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 35.008.800,00 | 30.742.400,00 | 21.502.400,00 | -13.506.400,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 46.438.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.614.000,00 | 8.194.000,00 | 4.694.000,00 | -3.920.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 8.423.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.308.000,00 | 8.427.000,00 | 4.927.000,00 | -3.381.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 7.618.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.921.000,00 | 9.284.000,00 | 5.784.000,00 | -3.137.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 7.923.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.119.500,00 | 9.224.000,00 | 5.724.000,00 | -395.500,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 6.079.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 4.690.000,00 | 8.174.000,00 | 2.014.000,00 | -2.676.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 6.079.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 7.407.000,00 | 11.311.000,00 | 5.151.000,00 | -2.256.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 73.440.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Perangkat Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 4.981.986.964,00 | 6.395.481.382,00 | 6.435.922.024,00 | 1.453.935.060,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | Satuan Kerja Perangkat Daerah | | 3.471.837.075,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 32 Orang/bulan | 32 Orang/bulan | 4.690.926.764,00 | 6.086.232.182,00 | 6.086.232.824,00 | 1.395.306.060,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 3.204.704.075,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Bulan Dokumen | 12 Bulan Dokumen | 177.240.000,00 | 178.440.000,00 | 218.880.000,00 | 41.640.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 185.400.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Bulan Dokumen | 12 Bulan Dokumen | 109.346.200,00 | 127.162.200,00 | 127.162.200,00 | 17.816.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 73.670.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 4.474.000,00 | 3.647.000,00 | 3.647.000,00 | -827.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 8.063.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | Satuan Kerja Perangkat Daerah | | 50.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 25.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 25.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Peningkatan Kepegawaian Satuan Kerja Perangkat Daerah* | | | | 90 Persen | 90 Persen | 82.649.600,00 | 78.491.800,00 | 87.491.800,00 | 4.842.200,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | Satuan Kerja Perangkat Daerah | | 112.350.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 55 Paket | 55 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 35.350.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 1.649.600,00 | 6.491.800,00 | 6.491.800,00 | 4.842.200,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 8.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 7 Orang | 7 Orang | 81.000.000,00 | 72.000.000,00 | 81.000.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 69.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 316.983.800,00 | 286.014.520,00 | 287.980.520,00 | -29.003.280,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | Satuan Kerja Perangkat Daerah | | 840.164.250,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.23.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 7 Paket | 25.524.000,00 | 14.896.000,00 | 14.896.000,00 | -10.628.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 6.922.500,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 10 Paket | 10 Paket | 69.850.200,00 | 55.343.320,00 | 55.343.320,00 | -14.506.880,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 173.831.750,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 10 Paket | 10 Paket | 11.739.600,00 | 10.301.200,00 | 10.301.200,00 | -1.438.400,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 29.235.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 16.440.000,00 | 16.440.000,00 | 16.440.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 30.600.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 19.375.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 7 Laporan | 7 Laporan | 163.430.000,00 | 159.034.000,00 | 161.000.000,00 | -2.430.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 300.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 280.200.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah yang Diadakan* | | | | 21 Unit | 21 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | Satuan Kerja Perangkat Daerah | | 713.176.625,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 248.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 465.176.625,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.01.2.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 536.894.800,00 | 865.507.200,00 | 865.507.200,00 | 328.612.400,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | Satuan Kerja Perangkat Daerah | | 607.452.400,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 8 Laporan | 8 Laporan | 214.102.800,00 | 16.636.000,00 | 16.636.000,00 | -197.466.800,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 159.254.400,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 135.792.000,00 | 135.792.000,00 | 135.792.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 86.388.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Bulan Laporan | 12 Bulan Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 34.710.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Bulan Laporan | 12 Bulan Laporan | 187.000.000,00 | 713.079.200,00 | 713.079.200,00 | 526.079.200,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 327.100.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terlaksanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 247.100.000,00 | 272.300.000,00 | 267.520.000,00 | 20.420.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | Satuan Kerja Perangkat Daerah | | 255.514.200,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 44.380.000,00 | 44.380.000,00 | 40.880.000,00 | -3.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 47.447.200,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 14 Unit | 14 Unit | 171.470.000,00 | 190.670.000,00 | 195.390.000,00 | 23.920.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 162.647.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 4.620.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 31.250.000,00 | 37.250.000,00 | 31.250.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 7.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara* | | | | 1 Tahun Unit | 1 Tahun Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 13.800.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 20.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| 2. | **2.23.02** | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | **Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat<br>Jumlah Koleksi Judul Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah<br>Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun<br>Angka Budaya Baca Kota Makassar<br>Angka Budaya Baca Kota Makassar** | | | | **27 Pustakawan, 147 Tenaga Teknis<br>32.212<br>560.000<br>65<br>65 Orang<br>Judul<br>orang/tahun<br>%<br>%** | **27 Pustakawan, 147 Tenaga Teknis<br>32.212<br>560.000<br>65<br>65 Orang<br>Judul<br>orang/tahun<br>%<br>%** | **521.351.776,00** | **4.636.458.776,00** | **4.681.335.096,00** | **3.398.344.724,00** | | | | | | | **3.919.696.500,00** | |
| | 2.23.02.2.01 | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Perpustakaan tingkat Kota yang dikelola dan dibina yang akan terakreditasi*<br>*Jumlah Perpustakaan tingkat Kota yang dikelola dan dibina yang terakreditasi* | | | | 40 sekolah yang terakreditasi | 40 sekolah yang terakreditasi | 405.751.776,00 | 855.993.776,00 | 1.105.209.096,00 | 699.457.320,00 | | | - | -<br>- | - | | 1.701.843.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.02.2.01.0004 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan* | | | | 10 Perpustakaan | 10 Perpustakaan | 16.494.000,00 | 72.088.000,00 | 72.088.000,00 | 55.594.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 484.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.02.2.01.0011 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya* | | | | 142 Perpustakaan | 142 Perpustakaan | 91.275.656,00 | 47.502.856,00 | 327.738.176,00 | 236.462.520,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 584.947.200,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.02.2.01.0016 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 43.277.000,00 | 119.342.400,00 | 118.742.400,00 | 75.465.400,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 55.938.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.02.2.01.0017 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan informasi Perpustakaan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 119.562.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.02.2.01.0018 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan* | | | | 12 Bulan Eksemplar | 12 Bulan Eksemplar | 133.852.320,00 | 601.070.520,00 | 581.350.520,00 | 447.498.200,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 216.009.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.02.2.01.0019 | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan* | | | | 4 Eksemplar | 4 Eksemplar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 9.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.02.2.01.0020 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK* | | | | 12 Bulan Perpustakaan | 12 Bulan Perpustakaan | 120.852.800,00 | 15.990.000,00 | 5.290.000,00 | -115.562.800,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 231.886.800,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.02.2.02 | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Meningkatnya Angka Budaya Baca Kota Makassar* | | | | 55 Persen | 55 Persen | 115.600.000,00 | 3.780.465.000,00 | 3.576.126.000,00 | 3.460.526.000,00 | | | - | -<br>- | Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Kota Makassar | | 2.217.853.500,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.02.2.02.0006 | Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 86.498.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.02.2.02.0007 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan* | | | | 1 Perpustakaan | 1 Perpustakaan | 20.675.000,00 | 243.059.000,00 | 232.559.000,00 | 211.884.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 56.498.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.02.2.02.0008 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Perpustakaan | 1 Perpustakaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 200.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.02.2.02.0009 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 56.146.000,00 | 453.521.000,00 | 334.682.000,00 | 278.536.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 1.325.037.500,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.02.2.02.0010 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat* | | | | 5 Lokus | 5 Lokus | 38.779.000,00 | 3.083.885.000,00 | 3.008.885.000,00 | 2.970.106.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 549.820.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| 3. | **2.23.03** | **PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO** | **Jumlah Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno Yang Dilestarikan** | | | | **707 Judul** | **707 Judul** | **77.364.760,00** | **625.329.960,00** | **266.860.960,00** | **4.210.295.240,00** | | | | | | | **4.287.660.000,00** | |
| | 2.23.03.2.01 | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Naskah Kuno Milik Daerah yang Dilestarikan* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 66.209.760,00 | 608.338.760,00 | 261.869.760,00 | 195.660.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Kota Makassar | | 229.669.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.03.2.01.0003 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno* | | | | 2 Orang | 2 Orang | 51.070.960,00 | 484.691.960,00 | 234.391.960,00 | 183.321.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 189.684.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.03.2.01.0004 | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan* | | | | 2 Eksemplar | 2 Eksemplar | 15.138.800,00 | 123.646.800,00 | 27.477.800,00 | 12.339.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 39.985.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.03.2.02 | Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Terlaksananya Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan* | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 11.155.000,00 | 16.991.200,00 | 4.991.200,00 | -6.163.800,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Kota Makassar | | 4.057.991.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.03.2.02.0003 | Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 2 Eksemplar | 2 Eksemplar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 4.031.501.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | 2.23.03.2.02.0004 | Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 0 Eksemplar | 0 Eksemplar | 11.155.000,00 | 16.991.200,00 | 4.991.200,00 | -6.163.800,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 26.490.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | | **DINAS KEARSIPAN** | | | | | | | **8.051.200.000,00** | **10.693.755.038,00** | **10.023.846.000,00** | **1.972.646.000,00** | | | | | | | **10.965.817.000,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **8.051.200.000,00** | **10.693.755.038,00** | **10.023.846.000,00** | **1.972.646.000,00** | | | | | | | **10.965.817.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **2.24** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | | **8.051.200.000,00** | **10.693.755.038,00** | **10.023.846.000,00** | **1.972.646.000,00** | | | | | | | **10.965.817.000,00** | |
| 1. | **2.24.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah<br>Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat kapasitas** | | | | **100<br>90 %<br>%** | **100<br>90 %<br>%** | **7.033.158.900,00** | **9.884.347.378,00** | **8.559.038.160,00** | **2.551.304.100,00** | | | | | | | **9.584.463.000,00** | |
| | 2.24.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 101.065.860,00 | 116.385.860,00 | 105.381.180,00 | 4.315.320,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | Organisasi Perangkat Daerah | | 295.720.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 60.472.560,00 | 78.532.560,00 | 77.077.560,00 | 16.605.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 73.680.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.799.300,00 | 8.299.300,00 | 6.249.620,00 | -2.549.680,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 21.840.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.665.000,00 | 6.465.000,00 | 4.965.000,00 | -2.700.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 19.010.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.950.000,00 | 5.910.000,00 | 4.410.000,00 | -2.540.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 14.719.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.275.000,00 | 5.275.000,00 | 3.775.000,00 | -1.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 13.540.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 6.389.000,00 | 6.389.000,00 | 4.889.000,00 | -1.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 130.093.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 5.515.000,00 | 5.515.000,00 | 4.015.000,00 | -1.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 22.838.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun* | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 6.273.908.280,00 | 7.132.088.318,00 | 7.130.289.280,00 | 856.381.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | Organisasi Perangkat Daerah | | 6.901.234.450,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 39 Orang/bulan | 39 Orang/bulan | 6.005.002.280,00 | 6.848.302.318,00 | 6.848.303.280,00 | 843.301.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 6.518.888.450,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 194.880.000,00 | 209.760.000,00 | 207.960.000,00 | 13.080.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 216.840.000,00 | DINAS KEARSIPAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.24.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | | 132.892.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | | 6.098.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | | 2.921.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | | 5.829.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.026.000,00 | 2.026.000,00 | 2.026.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | | 12.766.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | | 5.000.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Jumlah Administrasi BMD pada Perangkat Daerah yang disediakan* | | | | 7 Jenis | 7 Jenis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | Organisasi Perangkat Daerah | | | 37.043.500,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | | 8.251.500,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | | 12.000.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | | 2.664.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | | 2.401.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 2.784.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 3.943.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 5.000.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia* | | | | 6 Jenis | 6 Jenis | 96.000.000,00 | 363.000.000,00 | 111.000.000,00 | 15.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Organisasi Perangkat Daerah | | 333.919.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 10.000.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 112 Paket | 112 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 45.750.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 6.729.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 8 Orang | 8 Orang | 96.000.000,00 | 363.000.000,00 | 111.000.000,00 | 15.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 193.000.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 40.940.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 37.500.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah administrasi umum Perangkat Daerah yang disediakan* | | | | - | 12 Bulan | 110.082.760,00 | 480.069.200,00 | 232.267.300,00 | 122.184.540,00 | | | - | - - | Organisasi Perangkat Daerah | | 532.793.625,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 6 Paket | 5.049.000,00 | 4.995.000,00 | 4.995.000,00 | -54.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 10.161.250,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 27.675.600,00 | 28.740.000,00 | 32.281.100,00 | 4.605.500,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 55.234.475,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 5.938.360,00 | 5.193.400,00 | 7.631.400,00 | 1.693.040,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 10.582.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 8 Paket | 1 Paket | 15.677.800,00 | 13.884.800,00 | 7.847.800,00 | -7.830.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 59.268.400,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 4 Paket | 11.942.000,00 | 9.456.000,00 | 14.112.000,00 | 2.170.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 34.762.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 5.280.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 10.000.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 7 Laporan | 7 Laporan | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.400.000,00 | -400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 12.500.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 4 Laporan | 16 Laporan | 41.000.000,00 | 415.000.000,00 | 163.000.000,00 | 122.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 195.000.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 69.685.500,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 70.320.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang diadakan* | | | | 28 Unit | 28 Unit | 56.946.000,00 | 1.294.546.000,00 | 552.364.000,00 | 495.418.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | Organisasi Perangkat Daerah | | 744.280.875,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 300.000.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 7 Unit | 7 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 68.459.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 56.946.000,00 | 1.294.546.000,00 | 552.364.000,00 | 495.418.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 280.821.875,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 20.000.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 50.000.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 25.000.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan* | | | | 4 Jenis | 4 Jenis | 147.736.000,00 | 244.868.000,00 | 199.496.400,00 | 51.760.400,00 | | | - | -<br>- | Organisasi Perangkat Daerah | | 101.040.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 24 Laporan | 24 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 1.800.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 49.236.000,00 | 50.868.000,00 | 28.496.400,00 | -20.739.600,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 87.240.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Laporan | 7 Laporan | 98.500.000,00 | 194.000.000,00 | 171.000.000,00 | 72.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 12.000.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang mendapatkan pemeliharaan* | | | | 5 Jenis | 5 Jenis | 247.420.000,00 | 253.390.000,00 | 228.240.000,00 | -19.180.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | Organisasi Perangkat Daerah | | 638.431.550,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 2 Unit | 3 Unit | 44.380.000,00 | 43.730.000,00 | 40.880.000,00 | -3.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 44.247.300,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 31 Unit | 28 Unit | 157.280.000,00 | 159.880.000,00 | 143.070.000,00 | -14.210.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 275.554.250,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 30.000.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 33 Unit | 39 Unit | 27.760.000,00 | 31.780.000,00 | 26.290.000,00 | -1.470.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 29.190.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 50.000.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 185.440.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 24.000.000,00 | DINAS KEARSIPAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2. | **2.24.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | **Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah Dan Pertanggungjawaban Nasional<br>Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku** | | | | **61<br>89.4<br>90.20 (46 SKPD)<br>Orang<br>%<br>%** | **61<br>89.4<br>90.20 (46 SKPD)<br>Orang<br>%<br>%** | **463.897.380,00** | **411.636.340,00** | **384.964.496,00** | **56.737.620,00** | | | | | | | **520.635.000,00** | |
| | 2.24.02.2.01 | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah arsip Kota Makassar yang dikelola* | | | | 100 arsip | 100 arsip | 107.459.800,00 | 64.486.400,00 | 18.172.400,00 | -89.287.400,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | Organisasi Perangkat Daerah | | 111.966.600,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.01.0001 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan* | | | | 10 Berkas | 100 Berkas | 38.392.400,00 | 33.651.400,00 | 8.359.400,00 | -30.033.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 46.764.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.01.0002 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan* | | | | 1 Berkas | 1 Berkas | 19.005.000,00 | 16.415.000,00 | 5.419.000,00 | -13.586.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 24.955.600,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.01.0003 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 50.062.400,00 | 14.420.000,00 | 4.394.000,00 | -45.668.400,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 40.247.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.02 | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah arsip statis Kota Makassar yang dikelola* | | | | 150 Arsip | 150 Arsip | 176.663.440,00 | 129.958.440,00 | 161.270.696,00 | -15.392.744,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | Organisasi Perangkat Daerah | | 328.012.400,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.02.0001 | Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI* | | | | 2 Arsip | 2 Arsip | 2.561.000,00 | 2.820.000,00 | 5.267.200,00 | 2.706.200,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 21.080.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.02.0004 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis* | | | | 150 Arsip | 150 Arsip | 174.102.440,00 | 127.138.440,00 | 156.003.496,00 | -18.098.944,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 306.932.400,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.03 | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | *Jumlah simpul jaringan kearsipan nasional tingkat Kota Makassar yang dikelola* | | | | 2 Pengguna | 2 Pengguna | 179.774.140,00 | 217.191.500,00 | 205.521.400,00 | 25.747.260,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | Organisasi Perangkat Daerah | | 80.656.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.03.0001 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN* | | | | 2 Pengguna | 2 Pengguna | 142.330.400,00 | 142.750.400,00 | 143.595.400,00 | 1.265.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 13.638.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.02.2.03.0002 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 37.443.740,00 | 74.441.100,00 | 61.926.000,00 | 24.482.260,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 67.018.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| 3. | **2.24.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | **Tingkat Keberadaan Dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat** | | | | **1181 box arsip statis** | **1181 box arsip statis** | **490.208.720,00** | **394.156.920,00** | **976.670.800,00** | **152.119.280,00** | | | | | | | **642.328.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.24.03.2.01 | Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | *Jumlah arsip dilingkungan pemerintah kota makassar yang memiliki retensi dibawah 10 tahun yang dimusnahkan* | | | | 102 Arsip | 102 Arsip | 64.444.000,00 | 26.669.000,00 | 14.213.000,00 | -50.231.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 97.512.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan* | | | | 51 Berkas | 500 Berkas | 9.104.000,00 | 13.780.000,00 | 7.452.000,00 | -1.652.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 8.020.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.01.0004 | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun* | | | | 51 Arsip | 500 Arsip | 55.340.000,00 | 12.889.000,00 | 6.761.000,00 | -48.579.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 89.492.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.02 | Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota | *Jumlah Arsip yang Berskala Kota Makassar yang dilindungi dan diselamatkan akibat bencana* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 12.370.000,00 | 12.370.000,00 | 16.017.000,00 | 3.647.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | Organisasi Perangkat Daerah | | 37.704.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.02.0001 | Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana* | | | | 5 Arsip | 5 Arsip | 6.225.000,00 | 6.225.000,00 | 8.190.000,00 | 1.965.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 19.152.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.02.0002 | Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana* | | | | 5 Arsip | 5 Arsip | 6.145.000,00 | 6.145.000,00 | 7.827.000,00 | 1.682.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 18.552.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.03 | Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan | *Jumlah arsip perangkat daerah kota makassar yang digabung dan/atau dibubarkan,dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan yang diselamatkan* | | | | 10 Arsip | 10 Arsip | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | Organisasi Perangkat Daerah | | 46.668.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.03.0001 | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 3 Daftar | 3 Daftar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 9.576.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.03.0002 | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 3 Arsip | 3 Arsip | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 9.413.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.03.0003 | Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan* | | | | 2 Arsip | 2 Arsip | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 9.741.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.03.0004 | Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan* | | | | 2 Arsip | 2 Arsip | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 17.938.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.04 | Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota | *Jumlah arsip statis dan arsip Hasil Alih Media Kota Makassar yang di autentikasi* | | | | 14 Arsip | 14 Arsip | 146.788.000,00 | 106.400.000,00 | 835.107.200,00 | 688.319.200,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | Organisasi Perangkat Daerah | | 293.728.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.04.0001 | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan* | | | | 2 Arsip | 150 Arsip | 96.250.000,00 | 82.006.000,00 | 829.771.200,00 | 733.521.200,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 114.551.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.04.0002 | Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip* | | | | 12 Arsip | 150 Arsip | 50.538.000,00 | 24.394.000,00 | 5.336.000,00 | -45.202.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 179.177.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.05 | Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang | *Jumlah arsip statis Kota Makassar yang dilakukan pencarian* | | | | 5 Arsip | 5 Arsip | 266.606.720,00 | 248.717.920,00 | 111.333.600,00 | -155.273.120,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Organisasi Perangkat Daerah | | 166.716.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.05.0001 | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan* | | | | 2 Arsip | 150 Arsip | 91.391.760,00 | 87.900.960,00 | 40.412.000,00 | -50.979.760,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 147.884.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.05.0002 | Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang* | | | | 2 Arsip | 150 Arsip | 143.900.400,00 | 143.120.400,00 | 65.549.600,00 | -78.350.800,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 9.774.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.03.2.05.0003 | Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman* | | | | 1 Arsip | 30 Arsip | 31.314.560,00 | 17.696.560,00 | 5.372.000,00 | -25.942.560,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 9.058.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| 4. | **2.24.04** | **PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP** | **Persentase Izin Penggunaan Arsip yang diterbitkan** | | | | **100 %** | **100 %** | **63.935.000,00** | **3.614.400,00** | **103.172.544,00** | **154.456.000,00** | | | | | | | **218.391.000,00** | |
| | 2.24.04.2.01 | Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota | *Jumlah Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kota Makassar yang mendapat pelayanan izin* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 63.935.000,00 | 3.614.400,00 | 103.172.544,00 | 39.237.544,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | Organisasi Perangkat Daerah | | 218.391.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.04.2.01.0003 | Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan* | | | | 1 SOP | 1 SOP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 50.000.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | 2.24.04.2.01.0004 | Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup* | | | | 12 Arsip | 12 Arsip | 63.935.000,00 | 3.614.400,00 | 103.172.544,00 | 39.237.544,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 168.391.000,00 | DINAS KEARSIPAN |
| | | **DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN** | | | | | | | **33.416.783.660,00** | **39.347.079.347,00** | **41.573.746.040,00** | **8.156.962.380,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **33.416.783.660,00** | **39.347.079.347,00** | **41.573.746.040,00** | **8.156.962.380,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **3.25** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | **30.078.069.916,00** | **33.368.781.119,00** | **34.206.764.404,00** | **4.128.694.488,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **3.25.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**<br>**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur** | | | | **100**<br>**90 %**<br>**%** | **100**<br>**90 %**<br>**%** | **28.701.122.416,00** | **30.562.088.419,00** | **31.210.980.224,00** | **-28.701.122.416,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 3.25.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD* | | | | 100 Persen (%) | 27.05 Poin | 165.183.780,00 | 166.480.780,00 | 138.480.780,00 | -26.703.000,00 | | | - | PD\|6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Berintegritas dan Adaptif melalui penguatan meritokrasserta penguatan pemanfaatan teknologi digital untuk transformasi layanan pemerintahan PD\|6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Berintegritas dan Adaptif melalui penguatan meritokrasserta penguatan pemanfaatan teknologi digital untuk transformasi layanan pemerintahan | OPD | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 3.25.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 88.015.000,00 | 88.015.000,00 | 73.515.000,00 | -14.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | PDJ6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Berintegritas dan Adaptif melalui penguatan meritokrasserta penguatan pemanfaatan teknologi digital untuk transformasi layanan pemerintahan PDJ6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Berintegritas dan Adaptif melalui penguatan meritokrasserta penguatan pemanfaatan teknologi digital untuk transformasi layanan pemerintahan | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.963.200,00 | 8.963.200,00 | 6.963.200,00 | -2.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.771.500,00 | 7.771.500,00 | 5.771.500,00 | -2.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.715.000,00 | 4.303.500,00 | 2.303.500,00 | -1.411.500,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.935.000,00 | 4.523.500,00 | 2.523.500,00 | -1.411.500,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.112.000,00 | 3.112.000,00 | 1.612.000,00 | -1.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 49.672.080,00 | 49.792.080,00 | 45.792.080,00 | -3.880.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 218 Orang | 218 Orang | 26.001.971.784,00 | 27.835.787.887,00 | 27.835.788.692,00 | 1.833.816.908,00 | | | - | - - | OPD | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 184 Orang/ bulan | 184 Orang/ bulan | 25.427.051.784,00 | 27.251.267.887,00 | 27.251.268.692,00 | 1.824.216.908,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 448.920.000,00 | 458.520.000,00 | 458.520.000,00 | 9.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 126.000.000,00 | 126.000.000,00 | 126.000.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Administrasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 84.000.000,00 | 319.500.000,00 | 482.044.800,00 | 398.044.800,00 | | | - | - - | OPD | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 275 Paket | 261 Paket | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 177.544.800,00 | 162.544.800,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 16 Orang | 158 Orang | 69.000.000,00 | 304.500.000,00 | 304.500.000,00 | 235.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 862.316.080,00 | 884.846.580,00 | 802.246.580,00 | -60.069.500,00 | | | - | - - | OPD | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 6 Paket | 3.561.000,00 | 3.561.000,00 | 3.561.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 6 Paket | 72.456.680,00 | 191.987.180,00 | 191.987.180,00 | 119.530.500,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 11.798.400,00 | 23.798.400,00 | 23.798.400,00 | 12.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 141.700.000,00 | 141.700.000,00 | 141.700.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 17.400.000,00 | 17.400.000,00 | 17.400.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 374.000.000,00 | 265.000.000,00 | 225.000.000,00 | -149.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 241.400.000,00 | 241.400.000,00 | 198.800.000,00 | -42.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia* | | | | 100 Persen (%) | 100 Persen (%) | 0,00 | 0,00 | 595.113.200,00 | 595.113.200,00 | | | - | -<br>- | OPD | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 16 Unit | 36 Unit | 0,00 | 0,00 | 595.113.200,00 | 595.113.200,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 791.742.772,00 | 587.975.172,00 | 587.975.172,00 | -203.767.600,00 | | | - | -<br>- | OPD | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 257.259.600,00 | 198.492.000,00 | 198.492.000,00 | -58.767.600,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 311.483.172,00 | 311.483.172,00 | 311.483.172,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 223.000.000,00 | 78.000.000,00 | 78.000.000,00 | -145.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 795.908.000,00 | 767.498.000,00 | 769.331.000,00 | -26.577.000,00 | | | - | -<br>- | OPD | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 43.430.000,00 | 43.430.000,00 | 39.930.000,00 | -3.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 34 Unit | 14 Unit | 736.438.000,00 | 708.028.000,00 | 713.361.000,00 | -23.077.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 24 Unit | 24 Unit | 16.040.000,00 | 16.040.000,00 | 16.040.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| 2. | **3.25.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | **Produksi Perikanan Tangkap** | | | | **153 20.713 Kelompok Ton** | **20.713 Ton** | **449.891.000,00** | **469.680.200,00** | **986.289.680,00** | **-449.891.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 3.25.03.2.01 | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | *Jumlah Produksi Perikanan Tangkap* | | | | 20713 Ton | 20713 Ton | 369.673.000,00 | 389.462.200,00 | 333.462.200,00 | -36.210.800,00 | | | - | -<br>- | Kelompok Masyarakat Nelayan | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.03.2.01.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia* | | | | 5 Dokumen | 12 Dokumen | 263.701.000,00 | 284.129.200,00 | 252.129.200,00 | -11.571.800,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.03.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia* | | | | 3 Unit | 202 Unit | 105.333.000,00 | 105.333.000,00 | 81.333.000,00 | -24.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.03.2.01.0004 | Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 639.000,00 | 0,00 | 0,00 | -639.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.03.2.02 | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Nelayan yang mengikuti skill training* | | | | 25 Orang | 25 Orang | 80.218.000,00 | 80.218.000,00 | 80.218.000,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | Kelompok Masyarakat Nelayan | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.03.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya* | | | | 185 Orang | 160 Orang | 80.218.000,00 | 80.218.000,00 | 80.218.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| 3. | **3.25.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | **Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya** | | | | **1.559 Ton** | **1.559 Ton** | **758.145.000,00** | **1.188.601.000,00** | **1.010.083.000,00** | **-758.145.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 3.25.04.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 400.000,00 | 1.252.000,00 | 1.252.000,00 | 852.000,00 | | | - | -<br>- | Kelompok Masyarakat Pembudidaya Ikan | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.04.2.01.0002 | Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan* | | | | 1 Rekomendasi | 1 Rekomendasi | 400.000,00 | 1.252.000,00 | 1.252.000,00 | 852.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.04.2.02 | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | - | | | | - | - | 118.384.500,00 | 374.564.500,00 | 163.964.500,00 | 45.580.000,00 | | | - | -<br>- | Kelompok Masyarakat Pembudidaya Ikan | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.04.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas* | | | | 80 Kelompok | 80 Kelompok | 44.786.000,00 | 44.786.000,00 | 26.386.000,00 | -18.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan* | | | | 80 Kelompok | 80 Kelompok | 37.618.000,00 | 130.408.000,00 | 103.808.000,00 | 66.190.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.04.2.02.0004 | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 80 Kelompok | 80 Kelompok | 35.980.500,00 | 199.370.500,00 | 33.770.500,00 | -2.210.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.04.2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | *Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya* | | | | 1559 Ton | 1559 Ton | 639.360.500,00 | 812.784.500,00 | 844.866.500,00 | 205.506.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.04.2.04.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 249.270.000,00 | 247.870.000,00 | 207.870.000,00 | -41.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.04.2.04.0004 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.623.000,00 | 5.825.000,00 | 5.825.000,00 | 3.202.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.04.2.04.0009 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 3 Unit | 21 Unit | 246.431.500,00 | 406.887.500,00 | 478.969.500,00 | 232.538.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.04.2.04.0011 | Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan* | | | | 8 Unit | 6 Unit | 112.836.500,00 | 126.202.500,00 | 126.202.500,00 | 13.366.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.04.2.04.0012 | Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 28.199.500,00 | 25.999.500,00 | 25.999.500,00 | -2.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| 4. | **3.25.05** | **PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN** | **Persentase Jumlah Kelompok unit usaha yang diawasi** | | | | **100 %** | **100 %** | **51.790.500,00** | **63.290.500,00** | **23.290.500,00** | **-51.790.500,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 3.25.05.2.01 | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | *Jumlah Kelompok Unit Usaha Pembudidaya Ikan yang diawasi* | | | | 51 Unit Usaha / Kelompok | 51 Unit Usaha / Kelompok | 51.790.500,00 | 63.290.500,00 | 23.290.500,00 | -28.500.000,00 | | | - | -<br>- | Kelompok Masyarakat Pembudidaya Ikan | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 3.25.05.2.01.0004 | Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota* | | | | 51 Pelaku Usaha | 51 Pelaku Usaha | 51.790.500,00 | 63.290.500,00 | 23.290.500,00 | -28.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| 5. | **3.25.06** | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | **Produksi Pengolahan Hasil Perikanan** | | | | **27.9 Ton** | **27.9 Ton** | **117.121.000,00** | **1.085.121.000,00** | **976.121.000,00** | **-117.121.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 3.25.06.2.03 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | *Jumlah Kelompok Pengolahan yang dibina* | | | | 51 Kelompok | 51 Kelompok | 117.121.000,00 | 1.085.121.000,00 | 976.121.000,00 | 859.000.000,00 | | | - | -<br>- | Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.06.2.03.0001 | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 27.9 Ton | 27.9 Ton | 117.121.000,00 | 1.085.121.000,00 | 976.121.000,00 | 859.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | **3.338.713.744,00** | **5.978.298.228,00** | **7.366.981.636,00** | **4.028.267.892,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB<br>Cakupan Pengawasan Mutu Pakan dan Produksi Benih/Bibit Ternak<br>Produktivitas Pertanian Per Hektar Pertahun** | | | | **(0.1) 213.36 Milyar<br>450 Sampel (38 %) ; 350 ekor (0.96 %)<br>7.1<br><br>Ton Perhektar** | **(0.1) 213.36 Milyar<br>450 Sampel (38 %) ; 350 ekor (0.96 %)<br>7.1<br><br>Ton Perhektar** | **2.095.667.820,00** | **3.733.848.324,00** | **5.477.531.732,00** | **-2.095.667.820,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | *Jumlah Kelompok Tani Yang Dibina* | | | | 228 Kelompok | 228 Kelompok | 1.756.407.980,00 | 3.298.750.980,00 | 4.924.619.340,00 | 3.168.211.360,00 | | | - | -<br>- | Kelompok Masyarakat Petani, Kelompok Wanita Tani | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.27.02.2.01.0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 68.817.000,00 | 57.417.000,00 | 13.417.000,00 | -55.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian* | | | | 10 Laporan | 10 Laporan | 1.474.907.380,00 | 2.778.299.380,00 | 4.448.167.740,00 | 2.973.260.360,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.27.02.2.02 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | *Jumlah Kelompok Ternak Yang Dibina* | | | | 8 Kelompok | 8 Kelompok | 317.329.640,00 | 415.701.144,00 | 545.516.192,00 | 228.186.552,00 | | | - | -<br>- | Kelompok Masyarakat Peternak | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.27.02.2.02.0003 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 317.329.640,00 | 415.701.144,00 | 545.516.192,00 | 228.186.552,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.27.02.2.03 | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Sampel dan Pakan Yang Diawasi* | | | | 450 Sampel | 450 Sampel | 3.352.200,00 | 3.501.200,00 | 3.501.200,00 | 149.000,00 | | | - | -<br>- | Kelompok Masyarakat Peternak | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.27.02.2.03.0001 | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 3.352.200,00 | 3.501.200,00 | 3.501.200,00 | 149.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.27.02.2.05 | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Bibit Ternak Yang Diawasi* | | | | 350 Ekor | 350 Ekor | 18.578.000,00 | 15.895.000,00 | 3.895.000,00 | -14.683.000,00 | | | - | -<br>- | Kelompok Masyarakat Peternak | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.27.02.2.05.0006 | Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 18.578.000,00 | 15.895.000,00 | 3.895.000,00 | -14.683.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| 2. | **3.27.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | **Cakupan Prasarana Pertanian yang disediakan** | | | | **1 Prasarana UPT Puskeswan** | **1 Prasarana UPT Puskeswan** | **35.772.800,00** | **82.772.800,00** | **31.772.800,00** | **-35.772.800,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 3.27.03.2.01 | Pengembangan Prasarana Pertanian | *Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 35.772.800,00 | 82.772.800,00 | 31.772.800,00 | -4.000.000,00 | | | - | -<br>- | Kelompok Masyarakat Petani, Kelompok Wanita Tani | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.27.03.2.01.0015 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 35.772.800,00 | 82.772.800,00 | 31.772.800,00 | -4.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| 3. | **3.27.04** | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | **Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular<br>Cakupan Produksi Peternakan Dan Hasil Turunannya Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal (Asuh)<br>Cakupan Produk Peternakan dan Hasil Turunannya Yang Aman, Utuh dan Halal (ASUH)** | | | | **100% (0 Kasus)<br>15.25<br>6.100<br>%<br>Ton** | **100% (0 Kasus)<br>15.25<br>6.100<br>%<br>Ton** | **1.128.529.380,00** | **1.960.333.360,00** | **1.684.333.360,00** | **-1.128.529.380,00** | | | | | | | **0,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 3.27.04.2.01 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Hewan/Ternak yang Tertangani Kesehatannya* | | | | 1200 Ekor | 1200 Ekor | 71.047.024,00 | 176.043.024,00 | 56.043.024,00 | -15.004.000,00 | | | - | -<br>- | Kelompok Masyarakat Peternak dan Pengusaha Produk Peternakan Beserta Turunannya | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.27.04.2.01.0008 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 71.047.024,00 | 176.043.024,00 | 56.043.024,00 | -15.004.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.27.04.2.02 | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Hewan/ternak yang diperiksa* | | | | 13400 Ekor | 13400 Ekor | 394.428.500,00 | 393.473.500,00 | 366.473.500,00 | -27.955.000,00 | | | - | -<br>- | Kelompok Pengusaha Peternakan | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.27.04.2.02.0004 | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM* | | | | 8 laporan | 4 laporan | 31.956.500,00 | 25.756.500,00 | 13.756.500,00 | -18.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.27.04.2.02.0006 | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 362.472.000,00 | 367.717.000,00 | 352.717.000,00 | -9.755.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.27.04.2.03 | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah sampel yang diperiksa* | | | | 1400 Sampel | 1400 Sampel | 425.139.312,00 | 902.638.312,00 | 855.638.312,00 | 430.499.000,00 | | | - | -<br>- | Kelompok Masyarakat Peternak Hewan Kesayangan | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.27.04.2.03.0001 | Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium* | | | | 8 Laporan | 8 Laporan | 81.593.512,00 | 81.593.512,00 | 81.593.512,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.27.04.2.03.0002 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 130.439.800,00 | 130.439.800,00 | 130.439.800,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.27.04.2.04 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | *Jumlah Produk Peternakan dan Turunannya yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)* | | | | 6100 Ton | 6100 Ton | 237.914.544,00 | 488.178.524,00 | 406.178.524,00 | 168.263.980,00 | | | - | -<br>- | Kelompok Masyarakat Usaha Hasil Peternakan | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.27.04.2.04.0002 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 104.905.520,00 | 355.867.500,00 | 285.867.500,00 | 180.961.980,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.27.04.2.04.0004 | Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 133.009.024,00 | 132.311.024,00 | 120.311.024,00 | -12.698.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| 4. | **3.27.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | **Persentase Bencana Pertanian yang dikendalikan** | | | | **5 %** | **5 %** | **73.044.500,00** | **196.344.500,00** | **168.344.500,00** | **-73.044.500,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 3.27.05.2.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | *Jumlah Benih/Bibit Untuk Antisipasi Dampak Perubahan Iklim/Banjir* | | | | 100 Hektar | 100 Hektar | 73.044.500,00 | 196.344.500,00 | 168.344.500,00 | 95.300.000,00 | | | - | -<br>- | Kelompok Masyarakat Petani, Kelompok Wanita Tani | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.27.05.2.01.0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan* | | | | 100 Ha | 100 Ha | 73.044.500,00 | 196.344.500,00 | 168.344.500,00 | 95.300.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| 5. | **3.27.06** | **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | **Persentase Perizinan Usaha Pertanian Yang Dibina Dan Diawasi** | | | | **100 %** | **100 %** | **5.699.244,00** | **4.999.244,00** | **4.999.244,00** | **-5.699.244,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 3.27.06.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Unit Usaha Obat Hewan Yang Dibina* | | | | 39 Unit Usaha | 39 Unit Usaha | 3.652.744,00 | 2.952.744,00 | 2.952.744,00 | -700.000,00 | | | - | -<br>- | Kelompok Masyarakat Peternak dan Usaha Peternakan | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.27.06.2.01.0002 | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.652.744,00 | 2.952.744,00 | 2.952.744,00 | -700.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.27.06.2.03 | Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan | *Jumlah Unit Usaha Obat Hewan yang diawasi* | | | | 39 Unit Usaha | 39 Unit Usaha | 2.046.500,00 | 2.046.500,00 | 2.046.500,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | Kelompok Pengusaha obat bidang Peternakan | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.27.06.2.03.0002 | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 2.046.500,00 | 2.046.500,00 | 2.046.500,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | | **UPT TPI PAOTERE** | | | | | | | **551.800.280,00** | **572.609.480,00** | **0,00** | **-551.800.280,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **551.800.280,00** | **572.609.480,00** | **0,00** | **-551.800.280,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **3.25** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | **551.800.280,00** | **572.609.480,00** | **0,00** | **-551.800.280,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **3.25.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | **-** | | | | **-** | **-** | **551.800.280,00** | **572.609.480,00** | **0,00** | **-551.800.280,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 3.25.03.2.03 | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | - | | | | - | - | 551.800.280,00 | 572.609.480,00 | 0,00 | -551.800.280,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.03.2.03.0002 | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)* | | | | 1 Layanan | 1 Layanan | 551.800.280,00 | 572.609.480,00 | 0,00 | -551.800.280,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.03.2.03.0002 | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **UPT TPI RAJAWALI** | | | | | | | **277.677.000,00** | **2.297.886.200,00** | **2.297.886.200,00** | **2.020.209.200,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **277.677.000,00** | **2.297.886.200,00** | **2.297.886.200,00** | **2.020.209.200,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **3.25** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | **277.677.000,00** | **2.297.886.200,00** | **2.297.886.200,00** | **2.020.209.200,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **3.25.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | **-** | | | | **-** | **-** | **277.677.000,00** | **2.297.886.200,00** | **2.297.886.200,00** | **-277.677.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 3.25.03.2.03 | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | - | | | | - | - | 277.677.000,00 | 2.297.886.200,00 | 2.297.886.200,00 | 2.020.209.200,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.03.2.03.0002 | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)* | | | | 1 Layanan | 1 Layanan | 277.677.000,00 | 2.297.886.200,00 | 2.297.886.200,00 | 2.020.209.200,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | | **UPT BBI PARANGTAMBUNG** | | | | | | | **291.830.800,00** | **291.830.800,00** | **291.830.800,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **291.830.800,00** | **291.830.800,00** | **291.830.800,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **3.25** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | **291.830.800,00** | **291.830.800,00** | **291.830.800,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **3.25.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | **-** | | | | **-** | **-** | **291.830.800,00** | **291.830.800,00** | **291.830.800,00** | **-291.830.800,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 3.25.04.2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | - | | | | - | - | 291.830.800,00 | 291.830.800,00 | 291.830.800,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.25.04.2.04.0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 291.830.800,00 | 291.830.800,00 | 291.830.800,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | | **UPT PEMBIBITAN TANAMAN** | | | | | | | **33.416.783.660,00** | **39.347.079.347,00** | **41.573.746.040,00** | **8.156.962.380,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **33.416.783.660,00** | **39.347.079.347,00** | **41.573.746.040,00** | **8.156.962.380,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | **3.338.713.744,00** | **5.978.298.228,00** | **7.366.981.636,00** | **4.028.267.892,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB<br>Cakupan Pengawasan Mutu Pakan dan Produksi Benih/Bibit Ternak<br>Produktivitas Pertanian Per Hektar Pertahun** | | | | **(0.1) 213.36 Milyar<br>450 Sampel (38 %) ; 350 ekor (0.96 %)<br>7.1<br><br>Ton Perhektar** | **(0.1) 213.36 Milyar<br>450 Sampel (38 %) ; 350 ekor (0.96 %)<br>7.1<br><br>Ton Perhektar** | **2.095.667.820,00** | **3.733.848.324,00** | **5.477.531.732,00** | **-2.095.667.820,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | *Jumlah Kelompok Tani Yang Dibina* | | | | 228 Kelompok | 228 Kelompok | 1.756.407.980,00 | 3.298.750.980,00 | 4.924.619.340,00 | 3.168.211.360,00 | | | - | -<br>- | Kelompok Masyarakat Petani, Kelompok Wanita Tani | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 212.683.600,00 | 463.034.600,00 | 463.034.600,00 | 250.351.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | | **UPT PUSKESWAN** | | | | | | | **33.416.783.660,00** | **39.347.079.347,00** | **41.573.746.040,00** | **8.156.962.380,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **33.416.783.660,00** | **39.347.079.347,00** | **41.573.746.040,00** | **8.156.962.380,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | **3.338.713.744,00** | **5.978.298.228,00** | **7.366.981.636,00** | **4.028.267.892,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **3.27.04** | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | **Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular<br>Cakupan Produksi Peternakan Dan Hasil Turunannya Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal (Asuh)<br>Cakupan Produk Peternakan dan Hasil Turunannya Yang Aman, Utuh dan Halal (ASUH)** | | | | **100% (0 Kasus)<br>15.25<br>6.100<br>%<br>Ton** | **100% (0 Kasus)<br>15.25<br>6.100<br>%<br>Ton** | **1.128.529.380,00** | **1.960.333.360,00** | **1.684.333.360,00** | **-1.128.529.380,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 3.27.04.2.03 | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah sampel yang diperiksa* | | | | 1400 Sampel | 1400 Sampel | 425.139.312,00 | 902.638.312,00 | 855.638.312,00 | 430.499.000,00 | | | - | -<br>- | Kelompok Masyarakat Peternak dan Hewan Kesayangan | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.27.04.2.03.0002 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 213.106.000,00 | 690.605.000,00 | 643.605.000,00 | 430.499.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | | **UPT PENYULUHAN** | | | | | | | **172.708.260,00** | **172.707.960,00** | **461.407.960,00** | **288.699.700,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **172.708.260,00** | **172.707.960,00** | **461.407.960,00** | **288.699.700,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | **172.708.260,00** | **172.707.960,00** | **461.407.960,00** | **288.699.700,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **3.27.07** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **172.708.260,00** | **172.707.960,00** | **461.407.960,00** | **-172.708.260,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 3.27.07.2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | - | | | | - | - | 172.708.260,00 | 172.707.960,00 | 461.407.960,00 | 288.699.700,00 | | | - | -<br>- | - | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.27.07.2.01.0001 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 137.969.560,00 | 137.969.360,00 | 451.469.360,00 | 313.499.800,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | 3.27.07.2.01.0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 34.738.700,00 | 34.738.600,00 | 9.938.600,00 | -24.800.100,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN |
| | | **DINAS PARIWISATA** | | | | | | | **27.521.300.000,00** | **41.375.201.106,00** | **42.743.507.000,00** | **15.222.207.000,00** | | | | | | | **38.329.975.300,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **27.521.300.000,00** | **41.375.201.106,00** | **42.743.507.000,00** | **15.222.207.000,00** | | | | | | | **38.329.975.300,00** | |
| | **3.26** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | | | | **27.521.300.000,00** | **41.375.201.106,00** | **42.743.507.000,00** | **15.222.207.000,00** | | | | | | | **38.329.975.300,00** | |
| 1. | **3.26.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**<br>**Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas** | | | | **100**<br>**90 %**<br>**%** | **100**<br>**90 %**<br>**%** | **12.087.470.315,00** | **15.220.971.892,00** | **14.764.282.354,00** | **1.510.504.985,00** | | | | | | | **13.597.975.300,00** | |
| | 3.26.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun* | | | | 13 Dokumen | 13 Dokumen | 159.360.000,00 | 143.500.000,00 | 123.700.000,00 | -35.660.000,00 | | | - | -<br>- | Dokumen dan Laporan Perencanaan Kinerja Dinas Pariwisata | | 260.900.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 67.500.000,00 | 67.500.000,00 | 47.700.000,00 | -19.800.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 180.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.500.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | -3.500.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 11.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 13.220.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | -1.220.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 9.700.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 18.500.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | -8.500.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 10.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.500.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | -2.500.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 9.700.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 16.140.000,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | -140.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 23.500.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 17.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun* | | | | 18 Dokumen | 18 Dokumen | 8.482.908.115,00 | 11.846.714.292,00 | 11.846.714.354,00 | 3.363.806.239,00 | | | - | -<br>- | Dokumen dan Laporan Keuangan Dinas Pariwisata | | 9.671.500.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 64 Orang/bulan | 64 Orang/bulan | 7.854.108.115,00 | 11.274.985.292,00 | 11.274.985.354,00 | 3.420.877.239,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 9.000.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 448.800.000,00 | 385.320.000,00 | 385.320.000,00 | -63.480.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 491.500.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 180.000.000,00 | 186.409.000,00 | 186.409.000,00 | 6.409.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 180.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Jenis Jasa Administrasi Kepegawaian yang Tersedia* | | | | 2 Jenis | 2 Jenis | 262.500.000,00 | 217.500.000,00 | 165.000.000,00 | -97.500.000,00 | | | - | -<br>- | Pegawai ASN dan Non ASN Dinas Pariwisata Kota Makassar | | 350.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 75.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 24 Orang | 24 Orang | 262.500.000,00 | 217.500.000,00 | 165.000.000,00 | -97.500.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 275.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Jenis Jasa Administrasi Umum yang Tersedia* | | | | 8 Jenis | 8 Jenis | 922.476.200,00 | 866.537.600,00 | 713.543.600,00 | -208.932.600,00 | | | - | -<br>- | Kegiatan Administrasi Umum Dinas Pariwisata Kota Makassar | | 1.064.252.300,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 14.868.000,00 | 23.756.000,00 | 23.756.000,00 | 8.888.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 25.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 6 Paket | 141.161.400,00 | 165.866.000,00 | 168.566.000,00 | 27.404.600,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 96.500.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 47.053.800,00 | 76.650.600,00 | 76.650.600,00 | 29.596.800,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 54.752.300,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 131.125.000,00 | 149.919.000,00 | 138.035.000,00 | 6.910.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 175.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 48.750.000,00 | 32.500.000,00 | 32.500.000,00 | -16.250.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 27.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 21.600.000,00 | 6.000.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 16.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 58.500.000,00 | 59.694.000,00 | 59.694.000,00 | 1.194.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 120.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 465.418.000,00 | 342.552.000,00 | 192.742.000,00 | -272.676.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 550.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang Tersedia* | | | | 3 Jenis | 3 Jenis | 586.696.000,00 | 0,00 | 0,00 | -586.696.000,00 | | | - | -<br>- | Barang Milik Dinas Pariwisata Kota Makassar | | 360.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 586.696.000,00 | 0,00 | 0,00 | -586.696.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 16 Unit | 16 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 85.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 275.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia* | | | | 2 Jenis | 2 Jenis | 1.293.012.000,00 | 1.577.640.000,00 | 1.397.174.400,00 | 104.162.400,00 | | | - | -<br>- | Jasa Surat Menyurat dan Penyediaan Komunikasi, Listrik, dan Air | | 1.312.740.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.034.460.000,00 | 1.205.952.000,00 | 1.032.158.400,00 | -2.301.600,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 997.740.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 258.552.000,00 | 371.688.000,00 | 365.016.000,00 | 106.464.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 315.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Jenis Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Tersedia* | | | | 5 Jenis | 5 Jenis | 380.518.000,00 | 569.080.000,00 | 518.150.000,00 | 137.632.000,00 | | | - | -<br>- | Aset Berwujud Dinas Pariwisata Kota Makassar | | 578.583.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 45.130.000,00 | 45.130.000,00 | 41.630.000,00 | -3.500.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 42.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 24 Unit | 24 Unit | 229.618.000,00 | 412.290.000,00 | 364.860.000,00 | 135.242.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 326.583.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 81 Unit | 81 Unit | 55.610.000,00 | 55.610.000,00 | 55.610.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 60.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 50.160.000,00 | 56.050.000,00 | 56.050.000,00 | 5.890.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 150.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| 2. | **3.26.02** | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | **Jumlah Destinasi Wisata yang berstandar Nasional<br>Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan<br>Tingkat Hunian Akomodasi** | | | | **-** | **1<br>5<br>54<br>Destinasi<br>%<br>%** | **4.580.418.785,00** | **7.000.515.714,00** | **6.928.898.574,00** | **3.639.581.215,00** | | | | | | | **8.220.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 3.26.02.2.01 | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | *Jumlah Daya Tarik Wisata yang Dibenahi* | | | | - | 100 DTW | 515.998.865,00 | 515.998.794,00 | 845.444.854,00 | 329.445.989,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | Lorong Wisata Kota Makassar | | 2.000.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.02.2.01.0009 | Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 515.998.865,00 | 515.998.794,00 | 845.444.854,00 | 329.445.989,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | | | | 2.000.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.02.2.03 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | *Jumlah Destinasi Pariwisata yang Dikelolah* | | | | 1 Destinasi | 1 Destinasi | 1.878.994.880,00 | 4.298.994.880,00 | 3.945.284.880,00 | 2.066.290.000,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | Destinasi Pariwisata Kota Makassar | | 3.650.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.02.2.03.0002 | Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 193.002.000,00 | 193.002.000,00 | 166.402.000,00 | -26.600.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | | | 850.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.02.2.03.0003 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)* | | | | 1 Lokasi | 1 Lokasi | 1.457.248.880,00 | 2.967.248.880,00 | 2.967.248.880,00 | 1.510.000.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | | | 2.100.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.02.2.03.0006 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 122.950.000,00 | 1.032.950.000,00 | 635.200.000,00 | 512.250.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | | | 600.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.02.2.03.0010 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 105.794.000,00 | 105.794.000,00 | 176.434.000,00 | 70.640.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | | | 100.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.02.2.04 | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah TDUP yang Difasilitasi* | | | | 200 TDUP | 200 TDUP | 60.885.800,00 | 60.885.800,00 | 33.385.800,00 | -27.500.000,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | Usaha Industri Pariwisata Kota Makassar | | 120.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.02.2.04.0009 | Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 60.885.800,00 | 60.885.800,00 | 33.385.800,00 | -27.500.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | | | 120.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| 3. | **3.26.03** | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | **Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara<br>Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara** | | | | **4.5<br>8.5 %<br>%** | **4.5<br>8.5 %<br>%** | **4.449.887.400,00** | **6.789.387.400,00** | **5.478.127.400,00** | **1.850.112.600,00** | | | | | | | **6.300.000.000,00** | |
| | 3.26.03.2.01 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | *Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Perkebangsaan* | | | | 34694 Orang | 4.879.162 Orang | 4.449.887.400,00 | 6.789.387.400,00 | 5.478.127.400,00 | 1.028.240.000,00 | | | - | -<br>- | Wisatawan Nusantara dan Mancanegara | | 6.300.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.03.2.01.0003 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 538.589.400,00 | 471.193.400,00 | 426.293.400,00 | -112.296.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 800.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.03.2.01.0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri* | | | | 10 Kegiatan | 10 Kegiatan | 3.108.830.000,00 | 4.035.995.000,00 | 2.791.595.000,00 | -317.235.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 3.000.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.03.2.01.0007 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri* | | | | 12 Promosi | 12 Promosi | 802.468.000,00 | 2.282.199.000,00 | 2.260.239.000,00 | 1.457.771.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 2.500.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| 4. | **3.26.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** | **Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang difasilitasi Mendapatkan HAKI PAD Sektor Ekonomi Kreatif** | | | | **150<br>17.15<br>%** | **150<br>17.15<br>%** | **4.608.881.100,00** | **9.518.881.100,00** | **12.818.873.672,00** | **1.043.118.900,00** | | | | | | | **5.652.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 3.26.04.2.02 | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | *Jumlah Kegiatan yang Mendukung Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif* | | | | 10 Kegiatan | 3 Kegiatan | 4.608.881.100,00 | 9.518.881.100,00 | 12.818.873.672,00 | 8.209.992.572,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | - - | Komunitas Pelaku Ekonomi Kreatif Kota Makassar | | 5.652.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.04.2.02.0004 | Penyediaan Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 95.000.000,00 | 95.000.000,00 | 3.603.892.572,00 | 3.508.892.572,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | - - | | | 97.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.04.2.02.0005 | Pengembangan Sistem Pemasaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.461.381.100,00 | 9.371.381.100,00 | 9.162.481.100,00 | 4.701.100.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | - - | | | 5.500.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.04.2.02.0022 | Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif* | | | | 1 Produk | 1 Produk | 52.500.000,00 | 52.500.000,00 | 52.500.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | - - | | | 55.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| 5. | **3.26.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | **Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Pariwisata** | | | | **900 Orang** | **900 Orang** | **1.794.642.400,00** | **2.845.445.000,00** | **2.753.325.000,00** | **2.765.357.600,00** | | | | | | | **4.560.000.000,00** | |
| | 3.26.05.2.01 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | *Jumlah Kegiatan yang Mendukung Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif TIngkat Dasar* | | | | - | 4 Kegiatan | 1.070.516.400,00 | 1.745.364.000,00 | 1.623.054.000,00 | 552.537.600,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | - - | Sumber Daya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar | | 4.260.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.05.2.01.0006 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif* | | | | 900 Orang | 900 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | - - | | | 1.300.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.05.2.01.0009 | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata* | | | | 150 Orang | 150 Orang | 390.280.000,00 | 845.916.000,00 | 594.186.000,00 | 203.906.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | - - | | | 1.000.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.05.2.01.0010 | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata* | | | | 600 Orang | 600 Orang | 261.000.000,00 | 300.000.000,00 | 397.500.000,00 | 136.500.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | - - | | | 800.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.05.2.01.0011 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 34.190.000,00 | 140.000.000,00 | 124.480.000,00 | 90.290.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | - - | | | 60.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.05.2.02 | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | *Jumlah Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang Tersedia* | | | | 1 Kegiatan | 2 Kegiatan | 724.126.000,00 | 1.100.081.000,00 | 1.130.271.000,00 | 406.145.000,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | - - | Pelaku Ekonomi Kreatif Kota Makassar | | 300.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.05.2.02.0001 | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 334.126.000,00 | 476.081.000,00 | 506.271.000,00 | 172.145.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | - - | | | 60.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.05.2.02.0002 | Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | - - | | | 60.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.05.2.02.0005 | Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/ Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | | | 60.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.05.2.02.0006 | Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | | | 60.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.05.2.02.0007 | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 390.000.000,00 | 624.000.000,00 | 624.000.000,00 | 234.000.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | | | 60.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | | **UPT EVENT** | | | | | | | **27.521.300.000,00** | **41.375.201.106,00** | **42.743.507.000,00** | **15.222.207.000,00** | | | | | | | **38.329.975.300,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **27.521.300.000,00** | **41.375.201.106,00** | **42.743.507.000,00** | **15.222.207.000,00** | | | | | | | **38.329.975.300,00** | |
| | **3.26** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | | | | **27.521.300.000,00** | **41.375.201.106,00** | **42.743.507.000,00** | **15.222.207.000,00** | | | | | | | **38.329.975.300,00** | |
| 1. | **3.26.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | **Persentase Sdm Ekonomi Kreatif Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas<br>Persentase SDM Pariwisata Yang Mendapat Sertifikasi<br>Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Pariwisata** | | | | **10<br>6.4<br>900 %<br>%<br>Orang** | **10<br>6.4<br>900 %<br>%<br>Orang** | **1.794.642.400,00** | **2.845.445.000,00** | **2.753.325.000,00** | **2.765.357.600,00** | | | | | | | **4.560.000.000,00** | |
| | 3.26.05.2.01 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | *Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Tersedia* | | | | 6 Kegiatan | 4 Kegiatan | 1.070.516.400,00 | 1.745.364.000,00 | 1.623.054.000,00 | 552.537.600,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | Komunitas Pelaku Ekonomi Kreatif dan Masyarakat Kota Makassar | | 4.260.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.05.2.01.0005 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 385.046.400,00 | 459.448.000,00 | 506.888.000,00 | 121.841.600,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | | | 1.100.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | | **UPT LOSARI** | | | | | | | **27.521.300.000,00** | **41.375.201.106,00** | **42.743.507.000,00** | **15.222.207.000,00** | | | | | | | **38.329.975.300,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **27.521.300.000,00** | **41.375.201.106,00** | **42.743.507.000,00** | **15.222.207.000,00** | | | | | | | **38.329.975.300,00** | |
| | **3.26** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | | | | **27.521.300.000,00** | **41.375.201.106,00** | **42.743.507.000,00** | **15.222.207.000,00** | | | | | | | **38.329.975.300,00** | |
| 1. | **3.26.02** | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | **Jumlah Destinasi Wisata yang berstandar Nasional Tingkat Hunian Akomodasi** | | | | **1<br>54<br>Destinasi<br>%** | **1<br>54<br>Destinasi<br>%** | **4.580.418.785,00** | **7.000.515.714,00** | **6.928.898.574,00** | **3.639.581.215,00** | | | | | | | **8.220.000.000,00** | |
| | 3.26.02.2.02 | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | *Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang Dibenahi* | | | | 1 Kawasan | 1 Kawasan | 2.124.539.240,00 | 2.124.636.240,00 | 2.104.783.040,00 | -19.756.200,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | Destinasi Anjungan Pantai Losari | | 2.450.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3.26.02.2.02.0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 2.124.539.240,00 | 2.124.636.240,00 | 2.104.783.040,00 | -19.756.200,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | | | 2.450.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | | **DINAS PERDAGANGAN** | | | | | | | **22.828.200.000,00** | **24.592.368.110,00** | **22.241.065.000,00** | **-587.135.000,00** | | | | | | | **22.646.523.031,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **22.828.200.000,00** | **24.592.368.110,00** | **22.241.065.000,00** | **-587.135.000,00** | | | | | | | **22.646.523.031,00** | |
| | **3.30** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | | **16.652.971.960,00** | **18.332.784.150,00** | **17.886.455.960,00** | **1.233.484.000,00** | | | | | | | **20.056.523.031,00** | |
| 1. | **3.30.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah<br>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik<br>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik** | | | | **100<br>90 %<br>%** | **100<br>90<br>90 %<br>%<br>%** | **13.918.341.904,00** | **14.505.510.282,00** | **14.441.376.483,00** | **1.626.448.196,00** | | | | | | | **15.544.790.100,00** | |
| | 3.30.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Tersusunnya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas* | | | | 7 Dokumen | 19 Dokumen | 195.119.000,00 | 195.322.340,00 | 173.822.340,00 | -21.296.660,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Dinas Perdagangan | | 180.560.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 153.022.600,00 | 153.225.940,00 | 145.685.940,00 | -7.336.660,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 110.145.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.324.600,00 | 8.324.600,00 | 5.384.600,00 | -2.940.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 12.800.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.552.000,00 | 8.552.000,00 | 5.612.000,00 | -2.940.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 12.348.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.748.000,00 | 5.748.000,00 | 2.808.000,00 | -2.940.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 10.250.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.887.000,00 | 5.887.000,00 | 2.947.000,00 | -2.940.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 11.630.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 9 Laporan | 9 Laporan | 7.855.800,00 | 7.855.800,00 | 5.655.800,00 | -2.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 12.572.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 5.729.000,00 | 5.729.000,00 | 5.729.000,00 | 0,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 10.815.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Tersedianya dokumen pengelolaan keuangan yang baik* | | | | 460 Dokumen | 460 Dokumen | 11.954.204.152,00 | 12.321.423.734,00 | 12.321.424.184,00 | 367.220.032,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | ASN dan Non ASN | | 13.087.767.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 76 Orang/bulan | 76 Orang/bulan | 11.277.988.952,00 | 11.678.438.534,00 | 11.678.438.984,00 | 400.450.032,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 12.500.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 370.240.000,00 | 332.560.000,00 | 332.560.000,00 | -37.680.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 0,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 432 Dokumen | 432 Dokumen | 182.256.000,00 | 186.346.000,00 | 186.346.000,00 | 4.090.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 420.800.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 123.719.200,00 | 124.079.200,00 | 124.079.200,00 | 360.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 166.967.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Tersedianya Dokumen administrasi pengelolaan barang milik daerah yang baik* | | | | 8 | 2 Dokumen | 900.000,00 | 2.669.000,00 | 2.669.000,00 | 1.769.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Dinas Perdagangan | | 2.706.200,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 900.000,00 | 2.669.000,00 | 2.669.000,00 | 1.769.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 2.706.200,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Prosentase Penyediaan administrasi kepegawaian* | | | | 90 % | 90 % | 51.500.000,00 | 45.510.000,00 | 45.510.000,00 | -5.990.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | ASN dan Non ASN | | 284.584.900,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 90.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 3.500.000,00 | 3.510.000,00 | 3.510.000,00 | 10.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 60.880.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 48.000.000,00 | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | -6.000.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 133.704.900,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase pelayanan administrasi umum* | | | | 90 % | 90 % | 315.651.940,00 | 474.393.136,00 | 450.393.136,00 | 134.741.196,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | ASN dan Non ASN | | 549.672.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 6.760.000,00 | 6.760.000,00 | 6.760.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 325.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 43.027.140,00 | 216.520.336,00 | 216.520.336,00 | 173.493.196,00 | Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 41.100.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 11.064.800,00 | 11.064.800,00 | 11.064.800,00 | 0,00 | Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 6.400.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 24.600.000,00 | 26.616.000,00 | 26.616.000,00 | 2.016.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 40.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 31.200.000,00 | 31.200.000,00 | 31.200.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 29.172.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 199.000.000,00 | 182.232.000,00 | 158.232.000,00 | -40.768.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 108.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase sarana penunjang yang tersedia* | | | | 90 % | 90 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Dinas Perdagangan | | 140.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 18.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 122.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase pelayanan administrasi perkantoran* | | | | 100 % | 100 % | 699.970.812,00 | 699.654.072,00 | 722.251.823,00 | 22.281.011,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Dinas Perdagangan | | 585.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 59.367.600,00 | 64.472.600,00 | 64.472.600,00 | 5.105.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 120.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 189.720.612,00 | 217.564.872,00 | 240.162.623,00 | 50.442.011,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 325.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 450.882.600,00 | 417.616.600,00 | 417.616.600,00 | -33.266.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 140.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 3.30.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terpeliharanya sarana penunjang urusan pemerintah daerah* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 700.996.000,00 | 766.538.000,00 | 725.306.000,00 | 24.310.000,00 | | | - | -<br>- | Dinas Perdagangan | | 714.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 44.380.000,00 | 44.380.000,00 | 40.880.000,00 | -3.500.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 42.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 30 Unit | 30 Unit | 345.736.000,00 | 460.684.000,00 | 423.108.000,00 | 77.372.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 330.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 40 Unit | 40 Unit | 22.180.000,00 | 22.180.000,00 | 22.180.000,00 | 0,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 47.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 57.000.000,00 | 53.000.000,00 | 53.000.000,00 | -4.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 75.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 231.700.000,00 | 186.294.000,00 | 186.138.000,00 | -45.562.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 220.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| 2. | **3.30.02** | **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN** | **Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan** | | | | **75 %** | **75 %** | **345.217.080,00** | **304.677.080,00** | **275.477.080,00** | **165.583.891,00** | | | | | | | **510.800.971,00** | |
| | 3.30.02.2.01 | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | *Jumlah Dokumen Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan* | | | | 340 Izin | 16 Dokumen | 49.717.200,00 | 19.617.200,00 | 12.417.200,00 | -37.300.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | | 75.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 49.717.200,00 | 19.617.200,00 | 12.417.200,00 | -37.300.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 75.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.02 | Penerbitan Tanda Daftar Gudang | *Jumlah Dokumen Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan* | | | | 440 Unit | 16 Dokumen | 139.378.880,00 | 138.438.880,00 | 131.238.880,00 | -8.140.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Gudang | | 225.000.971,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.02.0001 | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 139.378.880,00 | 138.438.880,00 | 131.238.880,00 | -8.140.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 225.000.971,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.03 | Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri | *Jumlah Dokumen Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan* | | | | 460 Unit | 16 Dokumen | 22.381.000,00 | 23.481.000,00 | 16.281.000,00 | -6.100.000,00 | | | - | -<br>- | Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri | | 67.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.03.0001 | Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 22.381.000,00 | 23.481.000,00 | 16.281.000,00 | -6.100.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 67.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.05 | Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat | *Jumlah Dokumen Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan* | | | | 110 Unit | 16 Dokumen | 133.740.000,00 | 123.140.000,00 | 115.540.000,00 | -18.200.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat | | 143.300.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.05.0001 | Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 133.740.000,00 | 123.140.000,00 | 115.540.000,00 | -18.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 143.300.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| 3. | **3.30.03** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | **Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan** | | | | **100<br>1 Pasar** | **85 %** | **13.090.200,00** | **52.557.200,00** | **22.562.000,00** | **114.909.800,00** | | | | | | | **128.000.000,00** | |
| | 3.30.03.2.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | *Jumlah Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan* | | | | 1 | 1 Unit | 8.690.200,00 | 3.127.200,00 | 2.432.000,00 | -6.258.200,00 | | | - | -<br>- | Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | | 50.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.03.2.01.0001 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 8.690.200,00 | 3.127.200,00 | 2.432.000,00 | -6.258.200,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 50.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.03.2.02 | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | *Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang di bina* | | | | 100 | 100 Orang | 4.400.000,00 | 49.430.000,00 | 20.130.000,00 | 15.730.000,00 | | | - | -<br>- | Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | | 78.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.03.2.02.0001 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4.400.000,00 | 49.430.000,00 | 20.130.000,00 | 15.730.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 78.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| 4. | **3.30.04** | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | **Persentase harga Komoditas Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Yang Stabil** | | | | **33.33<br>33.33 %<br>%** | **90% %** | **988.543.640,00** | **995.223.640,00** | **946.223.640,00** | **11.456.360,00** | | | | | | | **1.000.000.000,00** | |
| | 3.30.04.2.02 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | *Jumlah Laporan Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kota Makassar* | | | | 2 jenis<br>4 Jenis | 8 Laporan | 988.543.640,00 | 995.223.640,00 | 946.223.640,00 | -42.320.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | Pasar Tradisonal dan Pasar Modern | | 1.000.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.04.2.02.0001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 127.088.800,00 | 157.022.800,00 | 130.022.800,00 | 2.934.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 150.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 861.454.840,00 | 838.200.840,00 | 816.200.840,00 | -45.254.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 850.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| 5. | **3.30.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | **Persentase Komoiditas Ekspor Yang Di kembangkan** | | | | **724.027.78<br>1 US$** | **75 %** | **629.750.680,00** | **1.092.491.840,00** | **999.791.840,00** | **938.181.280,00** | | | | | | | **1.567.931.960,00** | |
| | 3.30.05.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Pameran Dagang dan Misi dagang dalam Rangka Promosi Produk Eksport Unggulan daearah yang di ikuti* | | | | 10 Jenis | 3 Pameran | 629.750.680,00 | 1.092.491.840,00 | 999.791.840,00 | 370.041.160,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | Pelaku Usaha UMKM | | 1.567.931.960,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.05.2.01.0002 | Pameran Dagang Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang* | | | | 5 Pelaku Usaha | 5 Pelaku Usaha | 218.348.000,00 | 216.364.000,00 | 203.164.000,00 | -15.184.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | | | 392.931.960,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.05.2.01.0003 | Pameran Dagang Lokal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal* | | | | 10 Pelaku Usaha | 10 Pelaku Usaha | 58.040.000,00 | 541.161.000,00 | 542.361.000,00 | 484.321.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | | | 175.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.05.2.01.0004 | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan* | | | | 10 Pelaku Usaha | 10 Pelaku Usaha | 108.883.000,00 | 105.033.000,00 | 51.333.000,00 | -57.550.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | | | 550.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.05.2.01.0005 | Peningkatan Citra Produk Ekspor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi* | | | | 15 Produk | 15 Produk | 244.479.680,00 | 229.933.840,00 | 202.933.840,00 | -41.545.840,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | | | 450.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| 6. | **3.30.06** | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | **Persentase Capaian Standarisasi Tera dan Tera Ulang** | | | | **80 %** | **80 %** | **486.004.000,00** | **606.829.652,00** | **549.530.461,00** | **168.996.000,00** | | | | | | | **655.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 3.30.06.2.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | *Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan* | | | | 1600 UTTP | 80 % | 486.004.000,00 | 606.829.652,00 | 549.530.461,00 | 63.526.461,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Pelaku Usaha | | 655.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.06.2.01.0002 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 154.577.200,00 | 155.981.200,00 | 143.981.200,00 | -10.596.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 125.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| 7. | **3.30.07** | **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | **Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal** | | | | **500 Kelompok** | **500 Kelompok** | **272.024.456,00** | **775.494.456,00** | **651.494.456,00** | **377.975.544,00** | | | | | | | **650.000.000,00** | |
| | 3.30.07.2.01 | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | *Jumlah promosi, pemasaran produk dalam negeri yang dilaksanakan* | | | | 1 Pameran | 1 Pameran | 272.024.456,00 | 775.494.456,00 | 651.494.456,00 | 379.470.000,00 | | | - | -<br>- | UMKM | | 650.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.07.2.01.0005 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 15 UMKM | 15 UMKM | 114.823.856,00 | 114.823.856,00 | 114.823.856,00 | 0,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 150.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.07.2.01.0006 | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi* | | | | 500 UMKM | 500 UMKM | 157.200.600,00 | 660.670.600,00 | 536.670.600,00 | 379.470.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 500.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | **3.31** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | | **6.175.228.040,00** | **6.259.583.960,00** | **4.354.609.040,00** | **-1.820.619.000,00** | | | | | | | **2.590.000.000,00** | |
| 1. | **3.31.02** | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | **Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Perindustrian**<br>**Pertambahan Jumlah Industri Kecil Dan Menengah Di Kota Makassar**<br>**Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri** | | | | **250**<br>**360**<br>**60 Orang**<br><br>**%** | **250**<br>**360**<br>**60 Orang**<br><br>**%** | **5.838.799.120,00** | **5.919.557.040,00** | **4.108.382.120,00** | **-4.098.799.120,00** | | | | | | | **1.740.000.000,00** | |
| | 3.31.02.2.01 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | *Jumlah IKM Lorong Wisata yang di bina*<br>*Jumlah pengrajin yang dibina* | | | | 350 Orang<br>75 Lorong | 350 Orang<br>75 Lorong | 5.838.799.120,00 | 5.919.557.040,00 | 4.108.382.120,00 | -1.730.417.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | IKM | | 1.740.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.31.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 92.547.800,00 | 161.151.800,00 | 106.151.800,00 | 13.604.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 425.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.31.02.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 209.251.800,00 | 194.516.800,00 | 162.516.800,00 | -46.735.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 340.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.31.02.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 5.096.581.920,00 | 5.221.581.920,00 | 3.520.461.920,00 | -1.576.120.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 425.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| 2. | **3.31.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI** | **Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil Dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait** | | | | **95 %** | **95 %** | **231.023.840,00** | **182.203.840,00** | **164.403.840,00** | **468.976.160,00** | | | | | | | **700.000.000,00** | |
| | 3.31.03.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | *Jumlah usaha ikm yang di pantau* | | | | 360 IKM | 360 IKM | 231.023.840,00 | 182.203.840,00 | 164.403.840,00 | -66.620.000,00 | | | - | -<br>- | USAHA INDUSTRI | | 700.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.31.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 203.967.720,00 | 171.627.720,00 | 156.627.720,00 | -47.340.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 350.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.31.03.2.01.0004 | Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 27.056.120,00 | 10.576.120,00 | 7.776.120,00 | -19.280.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 350.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| 3. | **3.31.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | **Persentase Ketersediaan Informasi Industri Secara Lengkap Dan Terkini** | | | | **100 %** | **100 %** | **105.405.080,00** | **157.823.080,00** | **81.823.080,00** | **44.594.920,00** | | | | | | | **150.000.000,00** | |
| | 3.31.04.2.01 | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | *Tersedianya data informasi industri* | | | | 100 % | 100 % | 105.405.080,00 | 157.823.080,00 | 81.823.080,00 | -23.582.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | USAHA INDUSTRI | | 150.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.31.04.2.01.0001 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 73.628.480,00 | 151.299.480,00 | 75.299.480,00 | 1.671.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 75.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.31.04.2.01.0003 | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 31.776.600,00 | 6.523.600,00 | 6.523.600,00 | -25.253.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 75.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | | **UPT METROLOGI** | | | | | | | **22.828.200.000,00** | **24.592.368.110,00** | **22.241.065.000,00** | **-587.135.000,00** | | | | | | | **22.646.523.031,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **22.828.200.000,00** | **24.592.368.110,00** | **22.241.065.000,00** | **-587.135.000,00** | | | | | | | **22.646.523.031,00** | |
| | **3.30** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | | **16.652.971.960,00** | **18.332.784.150,00** | **17.886.455.960,00** | **1.233.484.000,00** | | | | | | | **20.056.523.031,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | **3.30.06** | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | **Persentase Alat-Alat Ukur, Takaran, Timbangan Dan Perlengkapanya (UTTP) Bertanda Terakebudayaan Sah Yang Berlaku** | | | | **80 %** | **80 %** | **486.004.000,00** | **606.829.652,00** | **549.530.461,00** | **168.996.000,00** | | | | | | | **655.000.000,00** | |
| | 3.30.06.2.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | *jumlah alat UTTP yang di tera* | | | | 1600 UTTP | 1600 UTTP | 486.004.000,00 | 606.829.652,00 | 549.530.461,00 | 63.526.461,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Pelaku Usaha | | 655.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.30.06.2.01.0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang* | | | | 2000 Unit | 2000 Unit | 331.426.800,00 | 450.848.452,00 | 405.549.261,00 | 74.122.461,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 530.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | | **UPT PENYEMAKAN KULIT** | | | | | | | **22.828.200.000,00** | **24.592.368.110,00** | **22.241.065.000,00** | **-587.135.000,00** | | | | | | | **22.646.523.031,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **22.828.200.000,00** | **24.592.368.110,00** | **22.241.065.000,00** | **-587.135.000,00** | | | | | | | **22.646.523.031,00** | |
| | **3.31** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | | **6.175.228.040,00** | **6.259.583.960,00** | **4.354.609.040,00** | **-1.820.619.000,00** | | | | | | | **2.590.000.000,00** | |
| 1. | **3.31.02** | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | **Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Perindustrian**<br>**Pertambahan Jumlah Industri Kecil Dan Menengah Di Kota Makassar**<br>**Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri** | | | | **250**<br>**360**<br>**60 Orang**<br><br>**%** | **250**<br>**360**<br>**60 Orang**<br><br>**%** | **5.838.799.120,00** | **5.919.557.040,00** | **4.108.382.120,00** | **-4.098.799.120,00** | | | | | | | **1.740.000.000,00** | |
| | 3.31.02.2.01 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | *Jumlah IKM Lorong Wisata yang di bina*<br>*Jumlah pengrajin yang dibina*<br>*Persentase Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kota* | | | | 350 Orang<br>75 Lorong | 350 Orang<br>65 %<br>75 Lorong | 5.838.799.120,00 | 5.919.557.040,00 | 4.108.382.120,00 | -1.730.417.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | USAHA INDUSTRI | | 1.740.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | 3.31.02.2.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 440.417.600,00 | 342.306.520,00 | 319.251.600,00 | -121.166.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 550.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN |
| | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | **247.859.900.000,00** | **301.700.773.452,00** | **291.200.592.000,00** | **43.340.692.000,00** | | | | | | | **228.990.884.003,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **14.977.669.800,00** | **14.124.008.200,00** | **15.114.432.320,00** | **136.762.520,00** | | | | | | | **15.763.550.000,00** | |
| | **2.13** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | **14.977.669.800,00** | **14.124.008.200,00** | **15.114.432.320,00** | **136.762.520,00** | | | | | | | **15.763.550.000,00** | |
| 1. | **2.13.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | **Persentase kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)** | | | | **100 %** | **100 %** | **13.008.499.800,00** | **14.124.008.200,00** | **15.114.432.320,00** | **2.755.050.200,00** | | | | | | | **15.763.550.000,00** | |
| | 2.13.05.2.01 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Terselenggaranya Kegiatan-Kegiatan Kelembagaan Kemasyarakatan di 153 Kelurahan*<br>*Terselenggaranya Pembinaan Kelembagaan, RT/RW dan PKK*<br>*Terselenggaranya Pembinanaan LPM dan Peningkatan Peran Kelembagaan Dalam Kegiatan Pembangunan Kelurahan*<br>*Terselenggaranya Sayembara dan Pembinaan Kelompok TTG* | | | | 153 Kelurahan | 153 Kelurahan | 13.008.499.800,00 | 14.124.008.200,00 | 15.114.432.320,00 | 2.105.932.520,00 | | | - | -<br>- | 153 Kelurahan Lingkup Kota Makassar | | 15.763.550.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 2.13.05.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 153 Lembaga | 3 Lembaga | 8.700.162.800,00 | 6.863.722.300,00 | 6.201.302.300,00 | -2.498.860.500,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 11.795.934.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 2.13.05.2.01.0004 | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat* | | | | 153 Unit | 3 Unit | 4.009.455.000,00 | 5.510.801.400,00 | 7.827.395.520,00 | 3.817.940.520,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 3.457.823.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 2.13.05.2.01.0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna* | | | | 153 Laporan | 153 Laporan | 298.882.000,00 | 1.749.484.500,00 | 1.085.734.500,00 | 786.852.500,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 509.793.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 2. | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Indeks kepuasan pelayanan yang difasilitasi dan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah<br>Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Perangkat Daerah<br>Persentase Pengelolaan BMD dan Aset Lainnya yang mendukung Produktivitas Sekretariat Daerah.** | | | | **100<br>60<br>90 %<br>%<br>%** | **100<br>60<br>90 %<br>%<br>%** | **188.096.586.680,00** | **229.628.675.388,00** | **223.654.607.456,00** | **-17.542.172.677,00** | | | | | | **170.554.414.003,00** | |
| | 4.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Bahan Bacaan Yang disediakan<br>Jumlah Barang Cetak dan Penggadaan Yang disediakan<br>Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung Yang diadakan<br>Jumlah Kunjungan Tamu Pemerintah Kota Makassar Yang difasiltasi<br>Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah<br>% Terlaksananya Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 %<br>140 Perjalanan<br>200 Kunjungan<br>2112 Bahan Bacaan<br>30 Jenis<br>36 Jenis | 100 %<br>140 Perjalanan<br>200 Kunjungan<br>2112 Bahan Bacaan<br>30 Jenis<br>36 Jenis | 18.570.879.900,00 | 22.735.579.900,00 | 18.700.624.900,00 | 129.745.000,00 | | | - | -<br>- | Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar | | 12.862.646.022,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 141 Laporan | 141 Laporan | 1.969.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.969.170.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **232.882.230.200,00** | **287.576.765.252,00** | **276.086.159.680,00** | **43.203.929.480,00** | | | | | | | **213.227.334.003,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | **232.882.230.200,00** | **287.576.765.252,00** | **276.086.159.680,00** | **43.203.929.480,00** | | | | | | | **213.227.334.003,00** | |
| | 4.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen DPA - SKPD Yang disusun<br>Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun<br>Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhriar Realisasi Kinerja SKPD Yang disusun<br>Jumlah Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah Yang disusun<br>Jumlah Dokumen RKA - SKPD Yang disusun<br>Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 25 Dokumen<br>2 Dokumen<br>3 Dokumen<br>4 Laporan<br>60 Dokumen<br>6 Dokumen | 25 Dokumen<br>2 Dokumen<br>3 Dokumen<br>4 Laporan<br>60 Dokumen<br>6 Dokumen | 290.226.440,00 | 256.327.300,00 | 224.874.300,00 | -65.352.140,00 | | | - | -<br>- | Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar | | 559.726.803,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 194.714.800,00 | 170.550.300,00 | 166.097.300,00 | -28.617.500,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 351.080.779,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 60 Dokumen | 2 Dokumen | 28.564.000,00 | 24.676.000,00 | 18.676.000,00 | -9.888.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 55.186.227,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 25 Dokumen | 2 Dokumen | 21.870.000,00 | 19.982.000,00 | 13.982.000,00 | -7.888.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 64.410.053,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 3 Laporan | 5 Laporan | 19.789.000,00 | 15.849.000,00 | 12.849.000,00 | -6.940.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 51.365.662,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 25.288.640,00 | 25.270.000,00 | 13.270.000,00 | -12.018.640,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 37.684.082,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 4.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Bulan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Yang disediakan*<br>*Jumlah Bulan Gaji dan Tunjangan ASN Yang disediakan*<br>*% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian Yang Terverifikasi*<br>*Jumlah Kegiatan Penyusunan Bahan Tanggapan Pemeriksaan*<br>*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang disusun*<br>*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Yang Tersusun*<br>*Terpenuhinya Dokumen Administrasi Keuangan* | | | | 100 %<br>12 Bulan<br>12 Laporan<br>14 Bulan<br>18 Dokumen<br>4 Kegiatan<br>5 Laporan | 100 %<br>12 Bulan<br>12 Laporan<br>14 Bulan<br>18 Dokumen<br>4 Kegiatan<br>5 Laporan | 46.326.432.277,00 | 53.070.146.148,00 | 52.628.499.040,00 | 6.302.066.763,00 | | | - | -<br>- | ASN dan Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar | | 50.533.768.563,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 14 Orang/bulan | 251 Orang/bulan | 43.083.664.197,00 | 49.652.810.008,00 | 49.613.700.300,00 | 6.530.036.103,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 45.455.470.496,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 2.076.384.000,00 | 2.293.264.000,00 | 1.887.504.000,00 | -188.880.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 3.519.088.675,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 100% Dokumen | 12 Dokumen | 821.342.640,00 | 775.708.700,00 | 784.931.300,00 | -36.411.340,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 894.876.312,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 20.372.640,00 | 19.772.640,00 | 16.772.640,00 | -3.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 76.341.932,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 4 Dokumen | 2 Dokumen | 15.504.000,00 | 16.184.000,00 | 16.184.000,00 | 680.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 323.391.444,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 309.164.800,00 | 312.406.800,00 | 309.406.800,00 | 242.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 264.599.704,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah*<br>*Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Yang disusun*<br>*% Terlaksananya Administrasi barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah* | | | | 100 %<br>1 Laporan<br>4 Dokumen | 100 %<br>1 Laporan<br>4 Dokumen | 8.159.604.000,00 | 5.379.700.000,00 | 4.526.585.000,00 | -3.633.019.000,00 | | | - | -<br>- | Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar | | 3.010.489.746,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.487.352.000,00 | 1.800.452.000,00 | 1.800.452.000,00 | 313.100.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 1.193.706.944,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 6.672.252.000,00 | 3.579.248.000,00 | 2.726.133.000,00 | -3.946.119.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 1.816.782.802,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Yang diadakan*<br>*% Terlaksananya Adminsitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*<br>*Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi* | | | | 100 %<br>120 Orang<br>2192 Stel | 100 %<br>120 Orang<br>2192 Stel | 1.457.020.000,00 | 1.494.020.000,00 | 2.995.720.000,00 | 1.538.700.000,00 | | | - | -<br>- | Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar | | 4.104.859.425,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 2192 Paket | 2192 Paket | 1.025.020.000,00 | 1.147.520.000,00 | 2.649.220.000,00 | 1.624.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 2.919.764.811,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 120 Orang | 120 Orang | 432.000.000,00 | 346.500.000,00 | 346.500.000,00 | -85.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 1.185.094.614,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Bahan Bacaan Yang disediakan*<br>*Jumlah Barang Cetak dan Penggadaan Yang disediakan*<br>*Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung Yang diadakan*<br>*Jumlah Kunjungan Tamu Pemerintah Kota Makassar Yang difasiltasi*<br>*Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah*<br>*% Terlaksananya Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 %<br>140 Perjalanan<br>200 Kunjungan<br>2112 Bahan Bacaan<br>30 Jenis<br>36 Jenis | 100 %<br>140 Perjalanan<br>200 Kunjungan<br>2112 Bahan Bacaan<br>30 Jenis<br>36 Jenis | 18.570.879.900,00 | 22.735.579.900,00 | 18.700.624.900,00 | 129.745.000,00 | | | - | -<br>- | Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar | | 12.862.646.022,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 36 Paket | 36 Paket | 1.557.709.900,00 | 1.554.709.900,00 | 1.191.794.900,00 | -365.915.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 1.701.140.691,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 30 Paket | 30 Paket | 436.000.000,00 | 3.517.960.000,00 | 2.203.010.000,00 | 1.767.010.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 1.211.995.298,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 2112 Dokumen | 2112 Dokumen | 408.000.000,00 | 366.000.000,00 | 324.000.000,00 | -84.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 525.583.067,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 200 Laporan | 200 Laporan | 14.200.000.000,00 | 15.700.000.000,00 | 13.574.000.000,00 | -626.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 7.735.889.760,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 141 Laporan | 141 Laporan | 0,00 | 1.596.910.000,00 | 1.407.820.000,00 | 1.407.820.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 1.688.037.206,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang diadakan*<br>*Jumlah Mebeleur Yang diadakan*<br>*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang diadakan*<br>*% Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan* | | | | 100 %<br>10 Jenis<br>17 Jenis<br>2 Unit | 100 %<br>10 Jenis<br>17 Jenis<br>2 Unit | 22.184.710.400,00 | 37.809.126.400,00 | 42.930.216.968,00 | 20.745.506.568,00 | | | - | -<br>- | Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar | | 13.410.444.722,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 20 Unit | 20 Unit | 4.138.080.000,00 | 10.935.804.000,00 | 7.105.773.920,00 | 2.967.693.920,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 3.925.964.845,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 3.911.108.000,00 | 15.206.740.000,00 | 16.013.068.148,00 | 12.101.960.148,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 3.147.173.049,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 17 Unit | 17 Unit | 14.135.522.400,00 | 11.666.582.400,00 | 19.811.374.900,00 | 5.675.852.500,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 6.337.306.828,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Penyediaan Kebutuhan Jasa Telepon Air dan Listrik*<br>*Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia*<br>*Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar Yang Tersedia*<br>*Jumlah Tenaga Kebersihan Yang Terlibat Dalam Kebersihan Kantor*<br>*% Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 %<br>10500 Surat<br>10 Jenis<br>12 Bulan<br>300 Orang | 100 %<br>10500 Surat<br>10 Jenis<br>12 Bulan<br>300 Orang | 24.812.496.304,00 | 37.037.383.100,00 | 36.546.833.100,00 | 11.734.336.796,00 | | | - | -<br>- | Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar | | 22.677.141.178,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 10500 Laporan | 10500 Laporan | 412.080.000,00 | 412.080.000,00 | 310.080.000,00 | -102.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 7.218.355.410,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 8.353.513.824,00 | 8.823.669.120,00 | 8.823.669.120,00 | 470.155.296,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 5.138.502.199,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 10 Laporan | 10 Laporan | 12.946.780.000,00 | 23.163.400.000,00 | 23.037.350.000,00 | 10.090.570.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 8.791.574.465,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 300 Laporan | 300 Laporan | 3.100.122.480,00 | 4.638.233.980,00 | 4.375.733.980,00 | 1.275.611.500,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 1.528.709.104,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 4.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Bangunan/Gedung Yang Peralatan dan Mesinnya Mendapatkan Pemeliharaan Rutin/Berkala*<br>*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Mendapatkan Pemeliharaan Rutin/Berkala*<br>*Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Pajaknya di Bayar dan dipelihara*<br>*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Pajaknya di Perpanjang dan dipelihara*<br>*Jumlah Mabeluer Yang Mendapatkan Pemeliharaan Rutin/Berkala*<br>*% Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan* | | | | 100 %<br>10 Unit<br>3 Gedung Kantor<br>439 Unit<br>6 Banguna n/Gedung | 100 %<br>10 Unit<br>3 Gedung Kantor<br>439 Unit<br>6 Banguna n/Gedung | 14.993.400.700,00 | 17.954.467.600,00 | 21.382.277.608,00 | 6.388.876.908,00 | | | - | -<br>- | Unit Kerja Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar | | 15.531.005.699,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 1.269.725.000,00 | 1.254.725.000,00 | 1.725.505.900,00 | 455.780.900,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 1.117.991.409,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 439 Unit | 439 Unit | 8.521.742.200,00 | 8.500.238.200,00 | 7.015.098.200,00 | -1.506.644.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 7.897.556.128,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 58.800.000,00 | 58.800.000,00 | 58.800.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 64.232.770,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 1.591.862.500,00 | 2.375.283.300,00 | 2.354.283.300,00 | 762.420.800,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 2.072.758.221,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 3.551.271.000,00 | 5.765.421.100,00 | 10.228.590.208,00 | 6.677.319.208,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 4.378.467.171,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | *Jumlah Bulan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*<br>*Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*<br>*Jumlah Pimpinan dan Keluarga Yang Mendapatkan Jasa Perawatan Kesehatan (Medical Chekh-Up)*<br>*% Terlaksananya Adminsitrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* | | | | 100 %<br>12 Bulan<br>8 Orang | 100 %<br>12 Bulan<br>8 Orang | 3.969.685.540,00 | 3.978.940.620,00 | 3.978.940.620,00 | 9.255.080,00 | | | - | -<br>- | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | 4.439.190.995,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* | | | | 12 Orang/Bulan | 2 Orang/Bulan | 317.973.920,00 | 326.373.920,00 | 326.373.920,00 | 8.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 225.521.257,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* | | | | 8 Orang | 8 Orang | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 102.772.433,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11.0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* | | | | 12 Orang/Bulan | 12 Orang/Bulan | 3.571.711.620,00 | 3.572.566.700,00 | 3.572.566.700,00 | 855.080,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 4.110.897.305,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.12 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | *Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah*<br>*Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah*<br>*Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah*<br>*% Terfasilitasinya Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah* | | | | 100 %<br>1 Rumah Dinas<br>1 Rumah Jabatan | 100 %<br>1 Rumah Dinas<br>1 Rumah Jabatan | 22.423.110.000,00 | 25.003.910.000,00 | 22.029.842.000,00 | -393.268.000,00 | | | - | -<br>- | Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah | | 10.632.379.893,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.12.0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 6.494.690.000,00 | 6.494.690.000,00 | 6.344.690.000,00 | -150.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 6.156.209.802,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.12.0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4.079.660.000,00 | 4.079.660.000,00 | 3.829.660.000,00 | -250.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 2.608.700.452,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.12.0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 11.848.760.000,00 | 14.429.560.000,00 | 11.855.492.000,00 | 6.732.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 1.867.469.639,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 4.01.01.2.13 | Penataan Organisasi | *Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Yang dilaksanakan*<br>*Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Yang dilaksanakan*<br>*Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Yang dilaksanakan*<br>*Terlaksananya Penataan Organisasi* | | | | 100 %<br>2 Dokumen<br>5 Dokumen | 100 %<br>2 Dokumen<br>5 Dokumen | 1.881.491.779,00 | 1.881.489.080,00 | 1.520.489.080,00 | -361.002.699,00 | | | - | -<br>- | Perangkat Daerah | | 2.794.397.602,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 352.254.800,00 | 309.258.800,00 | 241.258.800,00 | -110.996.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 644.544.248,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 996.671.480,00 | 762.962.280,00 | 635.962.280,00 | -360.709.200,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 1.502.007.798,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 532.565.499,00 | 809.268.000,00 | 643.268.000,00 | 110.702.501,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 647.845.556,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | *Jumlah Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Yang dilaksanakan*<br>*Jumlah Pelayanan Fasilitasi Keprotokolan Pemerintah Kota Makassar Yang Mendapat Layanan Keprotokoleran*<br>*Jumlah Pelayanan, Fasilitas Keprotokoleran dan Dokumentasi Pimpinan Pemerintahan Kota Makassar*<br>*Jumlah Pendokumentasian Kegiatan/Tugas Pimpinan Daerah Yang dilaksanakan* | | | | 1160 Pelayanan<br>240 Dokumen<br>320 Pelayanan<br>840 Pelayanan | 1160 Pelayanan<br>240 Dokumen<br>320 Pelayanan<br>840 Pelayanan | 23.027.529.340,00 | 23.027.585.240,00 | 16.189.704.840,00 | -6.837.824.500,00 | | | - | -<br>- | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | 29.998.363.355,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14.0001 | Fasilitasi Keprotokolan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan* | | | | 840 Laporan | 760 Laporan | 12.516.246.660,00 | 12.424.335.560,00 | 11.738.455.160,00 | -777.791.500,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 13.477.376.730,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14.0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan* | | | | 320 Laporan | 320 Laporan | 495.096.480,00 | 484.013.480,00 | 484.013.480,00 | -11.083.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 555.423.078,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14.0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan* | | | | 240 Laporan | 110 Laporan | 10.016.186.200,00 | 10.119.236.200,00 | 3.967.236.200,00 | -6.048.950.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 15.965.563.547,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 1. | **4.01.02** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | **Cakupan Pembinaan dan Pelayanan Kegiatan Keagamaan**<br>**Cakupan Penataan Administrasi Tata Pemerintahan** | | | | **100 Sangat Tinggi %** | **100 Sangat Tinggi %** | **38.192.607.020,00** | **49.733.474.620,00** | **45.487.501.980,00** | **-8.708.691.020,00** | | | | | | | **29.483.916.000,00** | |
| | 4.01.02.2.01 | Administrasi Tata Pemerintahan | *Jumlah Dokumen Laporan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD)*<br>*Jumlah Dokumen Penetapan Kode dan Data Kewilayahan*<br>*Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Pelanggrana Adminsitrasi Pemerintahan*<br>*% Terlaksananya Administrasi Pemerintahan* | | | | 100 %<br>1 Laporan<br>4 Dokumen | 100 %<br>1 Laporan<br>4 Dokumen | 1.630.858.700,00 | 1.944.858.300,00 | 1.705.248.300,00 | 74.389.600,00 | | | - | -<br>- | Kecamatan dan Kelurahan Lingkup Kota Makassar | | 3.553.681.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.01.0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan* | | | | 4 Dokumen | 2 Dokumen | 308.997.500,00 | 605.115.900,00 | 543.115.900,00 | 234.118.400,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 640.677.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.01.0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 779.988.500,00 | 611.816.100,00 | 510.266.100,00 | -269.722.400,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 1.777.597.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.01.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 541.872.700,00 | 727.926.300,00 | 651.866.300,00 | 109.993.600,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 1.135.407.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.02 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | *Jumlah Pelaksaan Kebijakan dan Kapaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat*<br>*Jumlah Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial*<br>*Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Bina Mental Spritual*<br>*Terlaksananya Kegiatan dan Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat* | | | | 22 Kegiatan<br>27 Kegiatan<br>5 Kebijakan | 22 Kegiatan<br>27 Kegiatan<br>5 Kebijakan | 28.581.392.000,00 | 38.971.192.000,00 | 37.073.019.400,00 | 8.491.627.400,00 | | | - | -<br>- | Kecamatan dan Kelurahan Lingkup Kota Makassar | | 15.404.515.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual* | | | | 27 Dokumen | 27 Dokumen | 26.971.688.000,00 | 34.576.909.000,00 | 33.195.136.400,00 | 6.223.448.400,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 14.135.010.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.02.0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 286.112.000,00 | 1.589.057.000,00 | 1.387.657.000,00 | 1.101.545.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 658.380.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.02.0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 1.323.592.000,00 | 2.805.226.000,00 | 2.490.226.000,00 | 1.166.634.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 611.125.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.03 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | *Jumlah Penanganan Perkara dan Fasilitasi Bantuan Hukum*<br>*Jumlah Pendokumentasian Produk Hukum Daerah*<br>*Jumlah Penyusunan Produk Hukum Daerah*<br>*% Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Daerah* | | | | 100 %<br>120 Produk Hukum<br>12 Perkara | 100 %<br>120 Produk Hukum<br>12 Perkara | 3.060.580.100,00 | 3.897.336.100,00 | 3.350.414.100,00 | 289.834.000,00 | | | - | -<br>- | SKPD Lingkup Kota Makassar | | 5.014.231.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.03.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun* | | | | 120 Dokumen | 120 Dokumen | 1.141.153.100,00 | 2.039.233.100,00 | 1.197.657.100,00 | 56.504.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 1.899.844.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.03.0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum* | | | | 12 Kasus | 12 Kasus | 1.442.281.440,00 | 1.408.741.440,00 | 1.815.507.440,00 | 373.226.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 1.728.262.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.03.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan<br>Pengelolaan Informasi Hukum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi* | | | | 120 Dokumen | 120 Dokumen | 477.145.560,00 | 449.361.560,00 | 337.249.560,00 | -139.896.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 1.386.125.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.04 | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | *Buku Potensi Kerjasama*<br>*Forum Investasi Luar Negeri*<br>*Jumlah Dokumen Kerjasama Dalam Negeri Yang ditandatangani*<br>*% Terlaksananya Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri dan Kerjasama Luar Negeri* | | | | 100 %<br>100 Eksemplar<br>1 Forum Kerjasama<br>20 Dokumen Kerjasama | 100 %<br>100 Eksemplar<br>1 Forum Kerjasama<br>20 Dokumen Kerjasama | 4.919.776.220,00 | 4.920.088.220,00 | 3.358.820.180,00 | -1.560.956.040,00 | | | - | -<br>- | Forum Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri | | 5.511.489.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.04.0001 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri* | | | | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 2.139.192.360,00 | 2.139.024.360,00 | 1.224.714.320,00 | -914.478.040,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 2.427.577.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.04.0002 | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.972.101.500,00 | 1.972.581.500,00 | 1.605.623.500,00 | -366.478.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 2.194.206.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.04.0003 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama* | | | | 1 Laporan | 2 Laporan | 808.482.360,00 | 808.482.360,00 | 528.482.360,00 | -280.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 889.706.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 2. | **4.01.03** | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | **Persentase Jumlah Pengadaan Yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif**<br>**Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke Tahun Berikutnya Yang Ditandatangani Pada Kuartal Pertama** | | | | **100**<br>**20 %**<br>**%** | **100**<br>**20 %**<br>**%** | **8.562.206.500,00** | **8.214.615.244,00** | **6.944.050.244,00** | **4.626.797.500,00** | | | | | | | **13.189.004.000,00** | |
| | 4.01.03.2.01 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | *Jumlah Laporan Informasi dan rekomendasi Distribusi dan Pengendalian Perekonomian*<br>*Jumlah Laporan Kinerja Manajemen dan Keuangan BMUD dan BLUD*<br>*Jumlah Rapat Koordinasi*<br>*% Tersedianya Rumusan Kebijakan Perekonomian dan Jumlah BUMD yang berkinerja baik* | | | | 100 %<br>26 BUMD/BLUD<br>2 Laporan<br>4 Kali | 100 %<br>26 BUMD/BLUD<br>2 Laporan<br>4 Kali | 2.339.010.800,00 | 2.265.010.340,00 | 1.873.086.340,00 | -465.924.460,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | BUMD Pemerintah Kota Makassar | | 4.347.976.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD* | | | | 26 Dokumen | 26 Dokumen | 1.428.360.500,00 | 1.388.360.040,00 | 1.208.610.040,00 | -219.750.460,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | | | 3.075.018.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.01.0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 501.274.500,00 | 467.274.500,00 | 358.300.500,00 | -142.974.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | | | 605.278.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.01.0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 409.375.800,00 | 409.375.800,00 | 306.175.800,00 | -103.200.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | | | 667.680.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.02 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | *Jumlah Dokumen Pelayanan Program Pembangunan Yang difasilitasi*<br>*Jumlah Dokumen Program Pembangunan Yang dikendalikan dan dievaluasi*<br>*% Penyerapan Realisasi Anggaran melalui SISMONTEPRA*<br>*% SKPD Yang Mengisi Laporan Evaluasi dan Pengawasan Anggaran Pada Aplikasi Sismontepra Tepat Waktu* | | | | 90 % | 100 %<br>1 Dokumen<br>90 % | 1.244.252.400,00 | 1.080.252.400,00 | 926.809.400,00 | -317.443.000,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | SKPD Lingkup Kota Makassar | | 1.376.206.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.02.0001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 722.006.000,00 | 642.006.000,00 | 544.599.000,00 | -177.407.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | | | 381.580.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.02.0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 258.596.200,00 | 218.596.200,00 | 198.596.200,00 | -60.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | | | 493.190.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.02.0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 263.650.200,00 | 219.650.200,00 | 183.614.200,00 | -80.036.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | | | 501.436.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.03 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | *JuJumlah Bimbingan Teknis/Sosialisasi yang dilkasanakan, Jumlah SKPD Yang Mendapatkan Pendampingan Barang dan Jasa*<br>*Jumlah Fungsi Pemgelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Yang dilaksanakan*<br>*Jumlah Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang dilayani Manuritas/Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa* | | | | 200 Paket<br>3 Level<br>6 Kegiatan<br>7 Fungsi Layanan | 200 Paket<br>3 Level<br>6 Kegiatan<br>7 Fungsi Layanan | 4.978.943.300,00 | 4.869.352.504,00 | 4.144.154.504,00 | -834.788.796,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | SKPD Lingkup Kota Makassar | | 7.464.822.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.03.0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa* | | | | 50 Dokumen | 50 Dokumen | 1.176.147.600,00 | 1.067.067.600,00 | 1.211.869.600,00 | 35.722.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | | | 2.540.874.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.03.0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik* | | | | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 1.731.776.100,00 | 1.713.321.304,00 | 1.463.321.304,00 | -268.454.796,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | | | 1.759.920.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa* | | | | 300 Orang | 300 Orang | 2.071.019.600,00 | 2.088.963.600,00 | 1.468.963.600,00 | -602.056.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PAJAK DAERAH | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | | | 3.164.028.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | **182.836.000.000,00** | **222.794.884.191,00** | **184.272.166.000,00** | **1.436.166.000,00** | | | | | | | **217.634.712.600,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **182.836.000.000,00** | **222.794.884.191,00** | **184.272.166.000,00** | **1.436.166.000,00** | | | | | | | **217.634.712.600,00** | |
| | **4.02** | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | **182.836.000.000,00** | **222.794.884.191,00** | **184.272.166.000,00** | **1.436.166.000,00** | | | | | | | **217.634.712.600,00** | |
| 1. | **4.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah**<br>**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik** | | | | **100**<br>**90 %**<br>**%** | **100**<br>**90 %**<br>**%** | **106.595.977.000,00** | **126.455.252.191,00** | **110.986.346.400,00** | **-3.177.614.500,00** | | | | | | | **103.418.362.500,00** | |
| | 4.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Tersedianya Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 114.888.400,00 | 171.323.700,00 | 87.123.700,00 | -27.764.700,00 | | | - | -<br>- | Seluruh Pegawai ASN dan Pegawai Kontrak | | 498.094.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 31.459.400,00 | 41.539.400,00 | 23.539.400,00 | -7.920.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 21.539.500,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 16.093.000,00 | 12.357.500,00 | 6.057.500,00 | -10.035.500,00 | Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 6.888.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 17.141.000,00 | 12.556.000,00 | 6.256.000,00 | -10.885.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 7.857.900,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 11.961.000,00 | 11.961.000,00 | 5.661.000,00 | -6.300.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 117.424.100,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.043.000,00 | 12.043.000,00 | 5.743.000,00 | -6.300.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 120.539.500,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 8 Laporan | 8 Laporan | 26.191.000,00 | 80.866.800,00 | 39.866.800,00 | 13.675.800,00 | Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 223.845.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Tersusunnya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 21.155.930.192,00 | 15.804.655.884,00 | 15.702.724.093,00 | -5.453.206.099,00 | | | - | -<br>- | Seluruh Pegawai ASN dan Pegawai Kontrak | | 11.797.500.318,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 64 Orang/bulan | 64 Orang/bulan | 19.102.241.013,00 | 13.376.133.764,00 | 13.376.133.893,00 | -5.726.107.120,00 | Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 9.828.300.890,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 808.452.379,00 | 1.167.631.920,00 | 1.069.200.000,00 | 260.747.621,00 | Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 747.360.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 820.556.200,00 | 796.256.200,00 | 796.256.200,00 | -24.300.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 806.162.428,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 11.147.600,00 | 14.647.600,00 | 11.147.600,00 | 0,00 | Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 7.674.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 413.533.000,00 | 449.986.400,00 | 449.986.400,00 | 36.453.400,00 | Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 408.003.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Tersusunnya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 8.257.835.000,00 | 7.636.500.000,00 | 5.833.000.000,00 | -2.424.835.000,00 | | | - | -<br>- | Seluruh Pegawai ASN dan Pegawai Kontrak dan Anggota DPRD | | 7.369.500.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 250 Paket | 250 Paket | 276.335.000,00 | 0,00 | 0,00 | -276.335.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 7.981.500.000,00 | 7.636.500.000,00 | 5.833.000.000,00 | -2.148.500.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 7.369.500.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Tersusunnya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 3.537.402.180,00 | 4.923.931.100,00 | 4.844.465.100,00 | 1.307.062.920,00 | | | - | -<br>- | Seluruh Pegawai ASN dan Pegawai Kontrak | | 3.079.632.390,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 10 Paket | 10 Paket | 101.348.260,00 | 193.827.100,00 | 193.827.100,00 | 92.478.840,00 | Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 114.804.040,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 100 Paket | 100 Paket | 1.313.477.200,00 | 1.286.374.200,00 | 1.278.374.200,00 | -35.103.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 661.407.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 10 Paket | 10 Paket | 364.068.000,00 | 1.440.074.800,00 | 1.384.608.800,00 | 1.020.540.800,00 | Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 850.626.200,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 100 Paket | 100 Paket | 656.262.000,00 | 616.146.000,00 | 608.146.000,00 | -48.116.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 573.981.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 100 Paket | 100 Paket | 450.906.720,00 | 414.609.000,00 | 414.609.000,00 | -36.297.720,00 | Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 346.071.200,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 317.640.000,00 | 646.200.000,00 | 646.200.000,00 | 328.560.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 353.742.950,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 333.700.000,00 | 326.700.000,00 | 318.700.000,00 | -15.000.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 179.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Tersusunnya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjung Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 73.209.000,00 | 16.025.925.263,00 | 15.089.577.263,00 | 15.016.368.263,00 | | | - | - - | Seluruh Pegawai ASN dan Pegawai Kontrak dan Anggota DPRD | | 8.575.720.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 63 Unit | 63 Unit | 73.209.000,00 | 16.025.925.263,00 | 15.089.577.263,00 | 15.016.368.263,00 | Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 8.575.720.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tersusunnya Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 6.103.961.552,00 | 6.094.787.552,00 | 6.030.697.552,00 | -73.264.000,00 | | | - | - - | Seluruh Pegawai ASN dan Pegawai Kontrak | | 5.463.569.312,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.627.385.200,00 | 2.707.491.200,00 | 2.699.491.200,00 | 72.106.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 2.634.385.200,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.106.976.352,00 | 2.088.496.352,00 | 2.040.406.352,00 | -66.570.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 2.107.184.112,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.369.600.000,00 | 1.298.800.000,00 | 1.290.800.000,00 | -78.800.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 722.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tersusunnya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 6.642.738.000,00 | 4.458.473.358,00 | 4.336.603.358,00 | -2.306.134.642,00 | | | - | - - | Seluruh Pegawai ASN dan Pegawai Kontrak | | 3.466.697.300,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 50 Unit | 50 Unit | 3.949.662.000,00 | 344.010.000,00 | 325.430.000,00 | -3.624.232.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 307.525.300,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 50 Unit | 50 Unit | 991.236.000,00 | 1.194.520.000,00 | 1.092.400.000,00 | 101.164.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 758.282.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 150 Unit | 150 Unit | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 16.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 60 Unit | 60 Unit | 336.340.000,00 | 464.360.000,00 | 464.360.000,00 | 128.020.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 204.340.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 100.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 1.249.500.000,00 | 2.339.583.358,00 | 2.338.413.358,00 | 1.088.913.358,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 2.080.550.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.15 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | *Tersusunnya Kegiatan Pada Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD* | | | | 100 % | 100 % | 38.181.094.308,00 | 37.766.198.526,00 | 37.766.198.526,00 | -414.895.782,00 | | | - | - - | Seluruh Pegawai ASN dan Pegawai Kontrak dan Anggota DPRD | | 39.437.604.900,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.15.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD* | | | | 50 Orang/Bulan | 50 Orang/Bulan | 36.503.453.308,00 | 36.503.760.526,00 | 36.503.760.526,00 | 307.218,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 35.866.555.800,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.15.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan* | | | | 50 Paket | 50 Paket | 890.203.000,00 | 525.000.000,00 | 525.000.000,00 | -365.203.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 2.890.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.15.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 787.438.000,00 | 737.438.000,00 | 737.438.000,00 | -50.000.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 681.049.100,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.16 | Layanan Administrasi DPRD | *Tersusunnya Kegiatan Layanan Administrasi DPRD* | | | | 100 % | 100 % | 22.528.918.368,00 | 33.573.456.808,00 | 21.295.956.808,00 | -1.232.961.560,00 | | | - | -<br>- | Seluruh Pegawai ASN dan Pegawai Kontrak dan Anggota DPRD | | 23.730.044.280,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.16.0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD* | | | | 200 Laporan | 200 Laporan | 12.945.500.000,00 | 19.315.000.000,00 | 7.037.500.000,00 | -5.908.000.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 15.214.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.16.0004 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 9.583.418.368,00 | 14.258.456.808,00 | 14.258.456.808,00 | 4.675.038.440,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 8.516.044.280,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| 2. | **4.02.02** | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | **Terintegrasinya Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD** | | | | **ADA ADA** | **ADA ADA** | **76.240.023.000,00** | **96.339.632.000,00** | **73.285.819.600,00** | **37.976.327.100,00** | | | | | | | **114.216.350.100,00** | |
| | 4.02.02.2.01 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | *Terlaksananya kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 18.467.905.000,00 | 35.811.138.000,00 | 24.403.039.600,00 | 5.935.134.600,00 | | | - | -<br>- | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan SKPD | | 47.665.474.300,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.01.0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program<br>Pembentukan Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 738.081.000,00 | 1.101.567.000,00 | 738.567.000,00 | 486.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 1.114.965.700,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.01.0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah* | | | | 74 Dokumen | 74 Dokumen | 3.671.209.000,00 | 6.122.634.000,00 | 2.391.634.000,00 | -1.279.575.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 4.362.800.400,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.01.0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan* | | | | 20 Dokumen | 12 Dokumen | 729.415.000,00 | 725.937.000,00 | 688.338.600,00 | -41.076.400,00 | Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 709.533.200,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.01.0004 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan<br>Naskah Akademik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi* | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 627.000.000,00 | 627.000.000,00 | 627.000.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 627.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.01.0006 | Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 12.702.200.000,00 | 27.234.000.000,00 | 19.957.500.000,00 | 7.255.300.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 40.851.175.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | *Tersusunnya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran* | | | | 100 % | 100 % | 1.867.607.000,00 | 3.175.963.000,00 | 2.605.963.000,00 | 738.356.000,00 | | | - | -<br>- | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan SKPD | | 1.797.300.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0001 | Pembahasan KUA dan PPAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 114.470.500,00 | 115.673.000,00 | 115.673.000,00 | 1.202.500,00 | Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 113.700.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 214.114.500,00 | 216.304.000,00 | 216.304.000,00 | 2.189.500,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 147.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0003 | Pembahasan APBD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD* | | | | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 496.951.000,00 | 1.815.232.000,00 | 1.323.232.000,00 | 826.281.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 506.800.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0004 | Pembahasan APBD Perubahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan* | | | | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 525.940.500,00 | 526.925.000,00 | 478.925.000,00 | -47.015.500,00 | Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 513.800.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 516.130.500,00 | 501.829.000,00 | 471.829.000,00 | -44.301.500,00 | Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 516.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | *Tersusunnya Kegiatan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintah* | | | | 100 % | 100 % | 3.888.910.000,00 | 6.973.890.000,00 | 4.379.890.000,00 | 490.980.000,00 | | | - | -<br>- | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan SKPD | | 5.666.515.600,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0001 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum* | | | | 10 Laporan | 10 Laporan | 952.735.000,00 | 1.554.571.000,00 | 926.571.000,00 | -26.164.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 1.329.628.900,00 | SEKRETARIAT DPRD |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 4.02.02.2.03.0002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur* | | | | 10 Laporan | 10 Laporan | 892.735.000,00 | 1.494.571.000,00 | 866.571.000,00 | -26.164.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 1.269.628.900,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0003 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat* | | | | 10 Laporan | 10 Laporan | 1.082.735.000,00 | 1.727.859.000,00 | 1.047.859.000,00 | -34.876.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 1.485.628.900,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0004 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian* | | | | 10 Laporan | 10 Laporan | 648.705.000,00 | 1.614.505.000,00 | 986.505.000,00 | 337.800.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 1.269.628.900,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0008 | Pembahasan Laporan Keterangan<br><br>Pertanggungjawaban Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 312.000.000,00 | 582.384.000,00 | 552.384.000,00 | 240.384.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 312.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04 | Peningkatan Kapasitas DPRD | *Tersusunnya Peningkatan Kapasitas DPRD* | | | | 100 % | 100 % | 10.431.974.000,00 | 10.780.634.000,00 | 10.601.034.000,00 | 169.060.000,00 | | | - | -<br>- | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan SKPD | | 10.920.576.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli* | | | | 9-30 Orang | 9-30 Orang | 1.312.400.000,00 | 1.352.400.000,00 | 1.352.400.000,00 | 40.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 1.312.400.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Ahli Fraksi* | | | | 12 Orang | 18 Orang | 475.200.000,00 | 475.200.000,00 | 475.200.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 475.200.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0006 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat* | | | | 50 Dokumen | 50 Dokumen | 3.834.644.000,00 | 3.887.244.000,00 | 3.713.644.000,00 | -121.000.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 4.426.376.800,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0007 | Penyusunan Program Kerja DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.730.000,00 | 15.790.000,00 | 9.790.000,00 | 60.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 6.599.200,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 4.800.000.000,00 | 5.050.000.000,00 | 5.050.000.000,00 | 250.000.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 4.700.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.05 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | *Tersusunnya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat* | | | | 100 % | 100 % | 40.210.705.000,00 | 36.902.785.000,00 | 29.968.671.000,00 | -10.242.034.000,00 | | | - | -<br>- | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Masyarakat | | 46.279.519.600,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.05.0001 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD* | | | | 100 Laporan | 100 Laporan | 5.788.236.000,00 | 4.485.198.000,00 | 2.588.184.000,00 | -3.200.052.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 2.258.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.05.0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun* | | | | 2 Dokumen | 3 Dokumen | 7.205.000,00 | 10.205.000,00 | 2.705.000,00 | -4.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 7.499.100,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.05.0003 | Pelaksanaan Reses | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses* | | | | 50 Dokumen | 150 Dokumen | 32.062.764.000,00 | 30.054.882.000,00 | 26.382.282.000,00 | -5.680.482.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 40.890.680.500,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.05.0004 | Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah* | | | | 50-75 Orang | 50-75 Orang | 2.352.500.000,00 | 2.352.500.000,00 | 995.500.000,00 | -1.357.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 3.123.340.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.06 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | *Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD* | | | | 100 % | 100 % | 9.984.000,00 | 636.984.000,00 | 218.984.000,00 | 209.000.000,00 | | | - | -<br>- | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | | 9.712.400,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.06.0002 | Pengawasan Kode Etik DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 9.984.000,00 | 636.984.000,00 | 218.984.000,00 | 209.000.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 9.712.400,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.07 | Pembahasan Kerja Sama Daerah | *Terlaksananya kegiatan Pemabahasan Kerja Sama Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 103.317.000,00 | 66.417.000,00 | 66.417.000,00 | -36.900.000,00 | | | - | -<br>- | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan SKPD | | 110.299.700,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.07.0002 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 103.317.000,00 | 66.417.000,00 | 66.417.000,00 | -36.900.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 110.299.700,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.08 | Fasilitasi Tugas DPRD | *Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD* | | | | 100 % | 100 % | 1.259.621.000,00 | 1.991.821.000,00 | 1.041.821.000,00 | -217.800.000,00 | | | - | -<br>- | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan SKPD | | 1.766.952.500,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.08.0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD* | | | | 50 Dokumen | 50 Dokumen | 233.038.000,00 | 84.986.000,00 | 84.986.000,00 | -148.052.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 274.499.800,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.08.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah* | | | | 50 Dokumen | 50 Dokumen | 986.715.000,00 | 1.865.639.000,00 | 915.639.000,00 | -71.076.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 1.452.628.900,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.08.0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 39.868.000,00 | 41.196.000,00 | 41.196.000,00 | 1.328.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 39.823.800,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | | | | | | | **39.967.500.000,00** | **42.069.049.553,00** | **42.868.819.000,00** | **2.901.319.000,00** | | | | | | | **43.282.318.000,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **39.967.500.000,00** | **42.069.049.553,00** | **42.868.819.000,00** | **2.901.319.000,00** | | | | | | | **43.282.318.000,00** | |
| | **5.01** | **PERENCANAAN** | | | | | | | **39.967.500.000,00** | **42.069.049.553,00** | **42.868.819.000,00** | **2.901.319.000,00** | | | | | | | **43.282.318.000,00** | |
| 1. | **5.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**<br>**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik** | | | | **100**<br>**90 %**<br>**%** | **100**<br>**90 %**<br>**%** | **24.627.795.656,00** | **27.333.241.209,00** | **27.864.860.056,00** | **543.745.307,00** | | | | | | | **25.171.540.963,00** | |
| | 5.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 170.416.200,00 | 170.476.200,00 | 101.616.200,00 | -68.800.000,00 | | | - | -<br>- | Perangkat Daerah | | 811.043.562,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 94.247.200,00 | 94.307.200,00 | 57.247.200,00 | -37.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 500.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.476.000,00 | 20.476.000,00 | 7.976.000,00 | -12.500.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 75.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 11.979.000,00 | 11.979.000,00 | 8.479.000,00 | -3.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 30.250.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 11.098.000,00 | 11.098.000,00 | 7.598.000,00 | -3.500.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 35.420.330,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.065.000,00 | 12.065.000,00 | 8.565.000,00 | -3.500.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 33.463.232,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.844.000,00 | 5.844.000,00 | 5.844.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 13.310.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 14.707.000,00 | 14.707.000,00 | 5.907.000,00 | -8.800.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 123.600.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 14.210.754.896,00 | 17.652.914.849,00 | 17.743.125.277,00 | 3.532.370.381,00 | | | - | -<br>- | Perangkat daerah | | 13.823.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 68 Orang/bulan | 68 Orang/bulan | 13.376.757.296,00 | 16.813.337.249,00 | 16.867.747.677,00 | 3.490.990.381,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 13.000.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 314.400.000,00 | 319.200.000,00 | 355.000.000,00 | 40.600.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 400.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 239.908.000,00 | 239.908.000,00 | 239.908.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 350.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.797.000,00 | 3.797.000,00 | 3.797.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 15.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.611.000,00 | 4.611.000,00 | 4.611.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 15.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5.164.000,00 | 5.164.000,00 | 5.164.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 15.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 261.520.600,00 | 262.300.600,00 | 262.300.600,00 | 780.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 18.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 4.597.000,00 | 4.597.000,00 | 4.597.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 10.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Tersedianya layanan Admininstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 90 % | 90 % | 990.000.000,00 | 765.000.000,00 | 750.000.000,00 | -240.000.000,00 | | | - | -<br>- | Perangkat Daerah | | 1.016.497.401,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 71.070.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 80 Orang | 80 Orang | 990.000.000,00 | 765.000.000,00 | 750.000.000,00 | -240.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 945.427.401,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Tersedianya layanan Admininstrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 90 % | 90 % | 4.701.760.360,00 | 4.367.340.360,00 | 4.604.457.860,00 | -97.302.500,00 | | | - | -<br>- | Perangkat Daerah | | 4.305.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 7.173.980,00 | 7.173.980,00 | 7.173.980,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 25.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 121.956.280,00 | 121.956.280,00 | 121.956.280,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 170.822.400,00 | 170.822.400,00 | 215.822.400,00 | 45.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 93.139.700,00 | 93.139.700,00 | 149.981.200,00 | 56.841.500,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 400.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 177.708.000,00 | 177.708.000,00 | 153.508.000,00 | -24.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 350.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.702.280.000,00 | 1.702.280.000,00 | 1.754.280.000,00 | 52.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 350.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 135.000.000,00 | 135.000.000,00 | 63.000.000,00 | -72.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 400.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 1.368.160.000,00 | 1.083.740.000,00 | 1.223.616.000,00 | -144.544.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 2.000.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 442.000.000,00 | 442.000.000,00 | 442.000.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 30.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 483.520.000,00 | 433.520.000,00 | 473.120.000,00 | -10.400.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Tersedianya layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 90 % | 90 % | 1.204.639.000,00 | 1.003.623.000,00 | 1.513.553.919,00 | 308.914.919,00 | | | - | -<br>- | Perangkat Daerah | | 1.250.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 60 Unit | 60 Unit | 1.028.533.000,00 | 827.517.000,00 | 1.234.589.919,00 | 206.056.919,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 1.200.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 12 Unit | 12 Unit | 176.106.000,00 | 176.106.000,00 | 278.964.000,00 | 102.858.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 50.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tersedianya layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 90 % | 90 % | 2.054.395.200,00 | 2.078.056.800,00 | 1.958.056.800,00 | -96.338.400,00 | | | - | -<br>- | Perangkat Daerah | | 1.791.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 131.735.200,00 | 92.396.800,00 | 92.396.800,00 | -39.338.400,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 550.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 512.160.000,00 | 512.160.000,00 | 512.160.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 425.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 8 Laporan | 8 Laporan | 1.410.500.000,00 | 1.473.500.000,00 | 1.353.500.000,00 | -57.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 816.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tersedianya layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 90 % | 90 % | 1.295.830.000,00 | 1.295.830.000,00 | 1.194.050.000,00 | -101.780.000,00 | | | - | -<br>- | Perangkat Daerah | | 2.175.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 46.380.000,00 | 46.380.000,00 | 42.880.000,00 | -3.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 175.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 65 Unit | 65 Unit | 790.600.000,00 | 790.600.000,00 | 719.770.000,00 | -70.830.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 1.500.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 289 Unit | 289 Unit | 158.850.000,00 | 158.850.000,00 | 131.400.000,00 | -27.450.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 2. | **5.01.02** | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | **Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka menegah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan dengan PERDA** | | | | **100 Ada Persen Ada** | **Ada Ada** | **4.939.838.744,00** | **4.705.352.744,00** | **3.964.221.744,00** | **2.162.388.256,00** | | | | | | | **7.102.227.000,00** | |
| | 5.01.02.2.01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | *Tersusunya Perencanaan dan Pendanaan* | | | | 100 % | 100 % | 3.672.431.744,00 | 3.618.945.744,00 | 3.179.544.744,00 | -492.887.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | Perangkat Daerah | | 4.466.116.147,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0001 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 398.963.290,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0002 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 561.140.951,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik* | | | | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | 229.693.000,00 | 229.693.000,00 | 226.293.000,00 | -3.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 350.409.951,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah* | | | | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | 233.514.024,00 | 233.514.024,00 | 139.714.024,00 | -93.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 470.367.951,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota* | | | | 1 Berita Acara | 2 Berita Acara | 964.472.400,00 | 914.472.400,00 | 725.272.400,00 | -239.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 1.195.561.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan*<br><br>*(RPJPD/RPJMD/RKPD)* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 2.244.752.320,00 | 2.241.266.320,00 | 2.088.265.320,00 | -156.487.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 1.489.673.004,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.02 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | *Tersusunnya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 484.731.000,00 | 426.731.000,00 | 252.001.000,00 | -232.730.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | Perangkat Daerah | | 1.074.322.902,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.02.0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 131.663.000,00 | 79.663.000,00 | 10.413.000,00 | -121.250.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 501.637.951,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.02.0002 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi* | | | | 51 Orang | 51 Orang | 353.068.000,00 | 347.068.000,00 | 241.588.000,00 | -111.480.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 572.684.951,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | *Terlaksananya Pengendalian,Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 782.676.000,00 | 659.676.000,00 | 532.676.000,00 | -250.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | Perangkat Daerah | | 1.561.787.951,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.03.0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 199.897.000,00 | 175.897.000,00 | 64.897.000,00 | -135.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 1.168.654.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 582.779.000,00 | 483.779.000,00 | 467.779.000,00 | -115.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 393.133.951,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 3. | **5.01.03** | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | **Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD** | | | | **100 Persen** | **100 %** | **10.399.865.600,00** | **10.030.455.600,00** | **11.039.737.200,00** | **608.684.437,00** | | | | | | | **11.008.550.037,00** | |
| | 5.01.03.2.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | *Penjabaran Konsistensi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia* | | | | 100 % | 100 % | 2.973.299.200,00 | 2.810.434.200,00 | 2.124.734.200,00 | -848.565.000,00 | | | - | -<br>- | Perangkat Daerah | | 4.026.630.070,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)* | | | | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 477.134.600,00 | 411.114.600,00 | 349.714.600,00 | -127.420.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 616.741.600,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan* | | | | 6 Laporan | 2 Laporan | 115.773.000,00 | 131.645.000,00 | 82.645.000,00 | -33.128.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 87.911.168,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan* | | | | 6 Laporan | 4 Laporan | 211.142.000,00 | 189.157.000,00 | 175.157.000,00 | -35.985.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 304.928.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 607.255.000,00 | 466.715.000,00 | 434.415.000,00 | -172.840.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 861.861.600,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)* | | | | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 472.724.600,00 | 416.039.600,00 | 361.839.600,00 | -110.885.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 717.077.600,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia* | | | | 7 Laporan | 2 Laporan | 107.176.000,00 | 122.976.000,00 | 73.976.000,00 | -33.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 64.943.502,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia* | | | | 7 Laporan | 4 Laporan | 213.707.000,00 | 189.339.000,00 | 175.339.000,00 | -38.368.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 400.085.600,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 768.387.000,00 | 883.448.000,00 | 471.648.000,00 | -296.739.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 973.081.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | *Penjabaran Konsistensi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)* | | | | 100 % | 100 % | 4.501.054.200,00 | 4.467.999.200,00 | 2.522.280.800,00 | -1.978.773.400,00 | | | - | -<br>- | Perangkat Daerah | | 3.696.801.502,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 784.111.000,00 | 746.111.000,00 | 672.311.000,00 | -111.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 660.156.200,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian* | | | | 7 Laporan | 7 Laporan | 85.094.000,00 | 85.094.000,00 | 88.094.000,00 | 3.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 62.777.266,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian* | | | | 7 Laporan | 7 Laporan | 205.384.000,00 | 205.384.000,00 | 285.384.000,00 | 80.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 259.575.100,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 2.539.808.000,00 | 2.612.753.000,00 | 835.733.000,00 | -1.704.075.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 689.527.037,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 391.741.600,00 | 357.741.600,00 | 282.017.000,00 | -109.724.600,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 529.210.200,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 64.033.200,00 | 64.033.200,00 | 55.308.600,00 | -8.724.600,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 62.303.599,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 154.616.400,00 | 154.616.400,00 | 174.767.200,00 | 20.150.800,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 259.734.100,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 276.266.000,00 | 242.266.000,00 | 128.666.000,00 | -147.600.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 1.173.518.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | *Penjabaran Konsistensi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan* | | | | 100 % | 100 % | 2.925.512.200,00 | 2.752.022.200,00 | 6.392.722.200,00 | 3.467.210.000,00 | | | - | -<br>- | Perangkat Daerah | | 3.285.118.465,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 328.652.600,00 | 328.832.600,00 | 248.882.600,00 | -79.770.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 498.704.800,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 105.255.000,00 | 105.255.000,00 | 91.755.000,00 | -13.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 134.725.166,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 181.943.000,00 | 121.943.000,00 | 121.943.000,00 | -60.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 367.723.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 708.277.000,00 | 464.127.000,00 | 4.870.077.000,00 | 4.161.800.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 502.797.500,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 326.762.600,00 | 318.942.600,00 | 243.992.600,00 | -82.770.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 640.781.500,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan* | | | | 17 Laporan | 17 Laporan | 106.454.000,00 | 106.454.000,00 | 89.954.000,00 | -16.500.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 158.028.499,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan* | | | | 17 Laporan | 17 Laporan | 274.875.000,00 | 198.875.000,00 | 92.875.000,00 | -182.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 324.702.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 893.293.000,00 | 1.107.593.000,00 | 633.243.000,00 | -260.050.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 657.656.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH** | | | | | | | **91.410.000.000,00** | **96.078.335.159,00** | **90.088.985.000,00** | **-1.321.015.000,00** | | | | | | | **193.061.599.803,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **91.410.000.000,00** | **96.078.335.159,00** | **90.088.985.000,00** | **-1.321.015.000,00** | | | | | | | **193.061.599.803,00** | |
| | **5.02** | **KEUANGAN** | | | | | | | **91.410.000.000,00** | **96.078.335.159,00** | **90.088.985.000,00** | **-1.321.015.000,00** | | | | | | | **193.061.599.803,00** | |
| 1. | **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**<br>**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik** | | | | **100**<br>**90 %**<br>**%** | **100**<br>**90 %**<br>**%** | **25.036.082.144,00** | **31.899.430.219,00** | **32.817.974.360,00** | **4.467.362.658,00** | | | | | | | **29.503.444.802,00** | |
| | 5.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun*<br>*Persentase capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 13 Dokumen | 100 Persen<br>13 Dokumen | 226.024.550,00 | 223.919.550,00 | 161.349.550,00 | -64.675.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | Perangkat Daerah | | 711.600.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 3 Dokumen | 121.373.550,00 | 111.813.550,00 | 94.443.550,00 | -26.930.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 283.500.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 17.605.000,00 | 18.498.000,00 | 14.998.000,00 | -2.607.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 31.500.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 17.605.000,00 | 18.477.000,00 | 14.977.000,00 | -2.628.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 29.400.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 17.347.000,00 | 12.482.000,00 | 6.182.000,00 | -11.165.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | | 19.950.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 17.347.000,00 | 12.482.000,00 | 8.982.000,00 | -8.365.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | | 19.950.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 16.847.000,00 | 34.187.000,00 | 10.187.000,00 | -6.660.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | | 300.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 17.900.000,00 | 15.980.000,00 | 11.580.000,00 | -6.320.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | | 27.300.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan SPJ yang disusun*<br>*Persentase capaian administrasi keuangan Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 100 Persen<br>1 Laporan | 18.460.966.294,00 | 23.459.381.305,00 | 23.447.961.606,00 | 4.986.995.312,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | Perangkat Daerah | | 18.834.005.217,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 66 Orang/bulan | 94 Orang/bulan | 16.108.642.694,00 | 17.884.229.915,00 | 17.790.230.216,00 | 1.681.587.522,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | | 16.275.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 499.440.000,00 | 3.691.050.000,00 | 3.349.630.000,00 | 2.850.190.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | | 552.228.800,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 5 Dokumen | 1700 Dokumen | 1.683.968.400,00 | 1.686.351.000,00 | 2.124.351.000,00 | 440.382.600,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | | 1.785.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 9.785.000,00 | 22.247.000,00 | 8.247.000,00 | -1.538.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | | 28.350.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.112.000,00 | 5.095.000,00 | 5.095.000,00 | 983.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | | 14.926.417,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 38.932.000,00 | 38.280.000,00 | 38.280.000,00 | -652.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 31.500.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 116.086.200,00 | 132.128.390,00 | 132.128.390,00 | 16.042.190,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 147.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun*<br>*Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* | | | | - | 100 Persen<br>2 Laporan | 20.741.000,00 | 20.741.000,00 | 20.741.000,00 | 0,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | Perangkat Daerah | | 24.150.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 20.741.000,00 | 20.741.000,00 | 20.741.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 24.150.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas dan Pelatihan*<br>*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | - | 100 %<br>96 Orang | 660.000.000,00 | 472.500.000,00 | 472.500.000,00 | -187.500.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | Perangkat Daerah | | 1.093.025.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 198.450.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 40 Orang | 55 Orang | 660.000.000,00 | 472.500.000,00 | 472.500.000,00 | -187.500.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 694.575.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 150 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 100.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 150 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 100.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Persentase Sarana dan Prasarana yang disediakan*<br>*Persentase Capaian Administrasi umum Perangkat Daerah* | | | | 80 % | 100 %<br>80 % | 2.736.332.860,00 | 4.788.960.524,00 | 5.320.742.224,00 | 2.584.409.364,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | Perangkat Daerah | | 3.569.313.187,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 16.550.000,00 | 25.860.000,00 | 25.860.000,00 | 9.310.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 18.081.263,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 6 Paket | 251.469.960,00 | 470.567.920,00 | 465.287.920,00 | 213.817.960,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 286.650.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 0 Paket | 28.900.800,00 | 28.900.800,00 | 0,00 | -28.900.800,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 150.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 3 Paket | 434.407.100,00 | 461.671.100,00 | 461.671.100,00 | 27.264.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 570.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 154.675.000,00 | 161.875.000,00 | 129.243.000,00 | -25.432.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 218.791.125,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 35.280.000,00 | 35.280.000,00 | 35.280.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 48.510.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 2 Laporan | 69.000.000,00 | 69.000.000,00 | 69.000.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 73.500.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 126 Laporan | 225 Laporan | 1.150.540.000,00 | 875.310.000,00 | 1.336.110.000,00 | 185.570.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 1.470.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 305.910.000,00 | 305.910.000,00 | 305.910.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 418.780.799,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 289.600.000,00 | 2.354.585.704,00 | 2.492.380.204,00 | 2.202.780.204,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 315.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Persentase Realisasi Barang Milik Daerah SKPD yang diadakan*<br>*Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 80 % | 100 %<br>80 % | 198.327.200,00 | 194.357.600,00 | 927.485.100,00 | 729.157.900,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | Perangkat Daerah | | 1.826.100.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 500.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 200.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 96 Unit | 136 Unit | 198.327.200,00 | 194.357.600,00 | 927.485.100,00 | 729.157.900,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 926.100.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 100.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 100.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Persentase Jasa Penunjang Kantor yang disediakan*<br>*Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 80 % | 100 %<br>80 % | 1.665.512.240,00 | 1.648.292.240,00 | 1.501.724.880,00 | -163.787.360,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | Perangkat Daerah | | 1.722.250.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 1 Laporan | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 2.800.000,00 | -5.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 5.500.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 612.152.640,00 | 612.152.640,00 | 470.585.280,00 | -141.567.360,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 945.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.045.559.600,00 | 1.028.339.600,00 | 1.028.339.600,00 | -17.220.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 771.750.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang dipelihara*<br>*Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 80 % | 100 %<br>80 % | 1.068.178.000,00 | 1.091.278.000,00 | 965.470.000,00 | -102.708.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | Perangkat Daerah | | 1.723.001.398,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 43.130.000,00 | 43.130.000,00 | 40.880.000,00 | -2.250.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 49.750.671,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 53 Unit | 112 Unit | 577.008.000,00 | 577.008.000,00 | 501.140.000,00 | -75.868.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 253.250.727,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.02.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 2 Unit | 168 Unit | 13.440.000,00 | 13.440.000,00 | 13.440.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 0,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 135 Unit | 135 Unit | 94.600.000,00 | 117.700.000,00 | 117.700.000,00 | 23.100.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 420.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara* | | | | 1 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 200.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara* | | | | 1 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 100.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 340.000.000,00 | 340.000.000,00 | 292.310.000,00 | -47.690.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 200.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 100.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 400.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 2. | **5.02.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | **Persentase laporan keuangan tepat waktu<br>Persentase Penurunan SILPA<br>Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD<br>Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik<br>Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar<br>Ketepatan Waktu Penetapan APBD<br>Opini Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Laporan Keuangan** | | | | **Tepat Waktu<br>WTP** | **100<br>15<br>29,69<br>40,58<br>85<br>Tepat Waktu<br>WTP<br>%<br>%<br>%<br>%** | **58.500.340.256,00** | **56.104.194.140,00** | **51.315.947.840,00** | **98.846.432.745,00** | | | | | | **157.346.773.001,00** | |
| | 5.02.02.2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | *Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun<br>Persentase capaian Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah* | | | | 2 Perda | 100 %<br>2 Perda | 9.692.316.656,00 | 7.774.751.540,00 | 5.352.322.440,00 | -4.339.994.216,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | Perangkat Daerah | | 12.973.798.337,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 572.196.600,00 | 548.129.600,00 | 260.378.000,00 | -311.818.600,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 809.211.131,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 575.154.000,00 | 563.918.000,00 | 179.018.000,00 | -396.136.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 816.163.827,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi* | | | | 51 Dokumen | 51 Dokumen | 149.588.000,00 | 135.323.000,00 | 32.304.000,00 | -117.284.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 158.380.464,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi* | | | | 51 Dokumen | 51 Dokumen | 149.588.100,00 | 131.994.500,00 | 32.689.500,00 | -116.898.600,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 158.380.464,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi* | | | | 51 Dokumen | 51 Dokumen | 114.748.100,00 | 96.458.000,00 | 42.153.000,00 | -72.595.100,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 158.380.464,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi* | | | | 51 Dokumen | 51 Dokumen | 116.288.760,00 | 52.125.000,00 | 42.820.000,00 | -73.468.760,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 158.380.464,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1.235.521.200,00 | 1.078.572.400,00 | 881.660.400,00 | -353.860.800,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 1.407.547.729,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1.274.211.496,00 | 908.337.680,00 | 695.556.680,00 | -578.654.816,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 1.551.032.164,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 1.895.018.000,00 | 955.235.500,00 | 470.773.500,00 | -1.424.244.500,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 2.511.626.090,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0011 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 2.537.305.800,00 | 2.463.393.960,00 | 1.998.111.960,00 | -539.193.840,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 2.712.471.481,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0012 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 149.052.000,00 | 116.488.000,00 | 240.000.000,00 | 90.948.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 1.145.857.742,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0013 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota* | | | | 1100 Orang | 1000 Orang | 923.644.600,00 | 724.775.900,00 | 476.857.400,00 | -446.787.200,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 1.386.366.317,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | *Jumlah Persentase SP2D yang diterbitkan Persentase capaian koordinasi dan pengelolaan perbendaharaaan* | | | | 100 % | 100 % | 2.758.864.000,00 | 2.886.914.000,00 | 1.645.928.800,00 | -1.112.935.200,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | Perangkat Daerah | | 3.699.651.952,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.021.278.600,00 | 1.210.943.600,00 | 900.543.600,00 | -120.735.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 1.116.716.466,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD* | | | | 12 Dokumen | 800 Dokumen | 220.000.000,00 | 111.525.000,00 | 39.125.000,00 | -180.875.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 240.125.691,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0004 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 29.613.379,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0005 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 153.124.200,00 | 680.924.200,00 | 263.724.200,00 | 110.600.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 51.191.046,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0006 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 80.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 294.355.200,00 | 148.155.200,00 | 11.755.200,00 | -282.600.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 147.614.726,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 11.158.000,00 | 11.158.000,00 | 11.158.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 111.526.345,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 177.868.200,00 | 109.268.200,00 | 13.668.200,00 | -164.200.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 150.765.318,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0010 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan* | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 472.098.981,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0011 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota* | | | | 453 Orang | 1000 Orang | 881.079.800,00 | 614.939.800,00 | 405.954.600,00 | -475.125.200,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 1.300.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | *Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dikoordinasikan dan disusun Persentase capaian Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah* | | | | 3 Dokumen | 100 % 3 Dokumen | 3.322.081.800,00 | 3.229.671.000,00 | 2.592.939.000,00 | -729.142.800,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | Perangkat Daerah | | 3.163.398.403,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0001 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 114.380.000,00 | 114.380.000,00 | 90.380.000,00 | -24.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 283.565.453,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0002 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban* | | | | 51 Dokumen | 3 Dokumen | 95.626.800,00 | 115.716.000,00 | 115.716.000,00 | 20.089.200,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 190.801.906,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran* | | | | 51 Laporan | 17 Laporan | 53.570.000,00 | 53.570.000,00 | 11.570.000,00 | -42.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 105.120.627,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 171.600.000,00 | 171.600.000,00 | 117.100.000,00 | -54.500.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 118.163.009,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 448.210.000,00 | 448.210.000,00 | 296.210.000,00 | -152.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 736.051.025,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0007 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 551.383.000,00 | 551.383.000,00 | 437.383.000,00 | -114.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 407.705.106,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0009 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 149.250.000,00 | 59.250.000,00 | 59.250.000,00 | -90.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 262.066.794,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0010 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah* | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 109.203.513,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.02.02.2.03.0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan<br>Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota* | | | | 772 Orang | 1950 Orang | 1.738.062.000,00 | 1.715.562.000,00 | 1.465.330.000,00 | -272.732.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 750.720.970,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0012 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina* | | | | 25 Lembaga | 0 Lembaga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 200.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.04 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | *Jumlah Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan yang dilaksanakan*<br>*Persentase capaian penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah* | | | | 2 Kegiatan | 100 %<br>2 Kegiatan | 40.057.939.000,00 | 40.057.939.000,00 | 40.007.939.000,00 | -50.000.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | Perangkat Daerah | | 133.621.687.555,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.04.0004 | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 57.939.000,00 | 57.939.000,00 | 7.939.000,00 | -50.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 100.429.988,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.04.0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak* | | | | 12 Laporan | 1 Laporan | 40.000.000.000,00 | 40.000.000.000,00 | 40.000.000.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 133.521.257.567,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.05 | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | *Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Informasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan*<br>*Persentase capaian penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah* | | | | - | 100 %<br>12 Laporan | 2.669.138.800,00 | 2.154.918.600,00 | 1.716.818.600,00 | -952.320.200,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | Perangkat Daerah | | 3.888.236.754,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.05.0001 | Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah* | | | | 12 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 583.443.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.05.0002 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.712.033.800,00 | 1.540.313.600,00 | 1.476.313.600,00 | -235.720.200,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 2.624.231.805,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.02.2.05.0003 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota* | | | | 300 Orang | 200 Orang | 957.105.000,00 | 614.605.000,00 | 240.505.000,00 | -716.600.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 680.561.949,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 3. | **5.02.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | **Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap**<br>**Persentase Barang Milik Daerah Yang Diyakini Kewajaranya Oleh BPK** | | | | **98 %** | **4**<br>**98 %**<br>**%** | **7.873.577.600,00** | **8.074.710.800,00** | **5.955.062.800,00** | **-1.662.195.600,00** | | | | | | | **6.211.382.000,00** | |
| | 5.02.03.2.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | *Jumlah Dokumen Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah*<br>*Persentase capaian pengelolaan barang milik daerah* | | | | 83 Dokumen | 100 %<br>83 Dokumen | 7.873.577.600,00 | 8.074.710.800,00 | 5.955.062.800,00 | -1.918.514.800,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | Perangkat Daerah | | 6.211.382.000,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0001 | Penyusunan Standar Harga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Standar Harga yang Disusun* | | | | 3 Dokumen | 2 Dokumen | 98.432.000,00 | 97.332.000,00 | 73.032.000,00 | -25.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 301.375.166,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0003 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 65.500.000,00 | 65.260.000,00 | 47.500.000,00 | -18.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 144.169.113,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0004 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 47.190.000,00 | 48.120.000,00 | 30.710.000,00 | -16.480.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 140.757.707,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 1.205.638.000,00 | 1.197.258.000,00 | 1.237.258.000,00 | 31.620.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 377.240.972,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah* | | | | 1 Laporan | 0 Laporan | 999.040.000,00 | 977.640.000,00 | 0,00 | -999.040.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 0,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah* | | | | 1 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 393.895.682,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0008 | Penilaian Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 81.500.000,00 | 81.260.000,00 | 63.500.000,00 | -18.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 272.669.192,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0009 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 3.129.503.600,00 | 3.038.492.800,00 | 2.830.232.800,00 | -299.270.800,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 451.007.736,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 572.726.000,00 | 577.640.000,00 | 477.340.000,00 | -95.386.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 823.886.806,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah* | | | | 1 Laporan | 2 Laporan | 87.260.000,00 | 87.020.000,00 | 60.452.000,00 | -26.808.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 92.085.538,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0013 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota* | | | | 1482 Orang | 1500 Orang | 1.586.788.000,00 | 1.904.688.000,00 | 1.135.038.000,00 | -451.750.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 3.214.294.088,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| | | **BADAN PENDAPATAN DAERAH** | | | | | | | **136.083.000.000,00** | **135.979.929.182,00** | **119.557.091.000,00** | **-16.525.909.000,00** | | | | | | | **144.327.589.328,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **136.083.000.000,00** | **135.979.929.182,00** | **119.557.091.000,00** | **-16.525.909.000,00** | | | | | | | **144.327.589.328,00** | |
| | **5.02** | **KEUANGAN** | | | | | | | **136.083.000.000,00** | **135.979.929.182,00** | **119.557.091.000,00** | **-16.525.909.000,00** | | | | | | | **144.327.589.328,00** | |
| 1. | **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah<br>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik** | | | | **100<br>90 %<br>%** | **100<br>90 %<br>%** | **99.578.975.325,00** | **98.237.449.426,00** | **87.715.616.144,00** | **8.388.431.128,00** | | | | | | | **107.967.406.453,00** | |
| | 5.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah* | | | | 100 % | 100 % | 151.341.840,00 | 113.773.340,00 | 113.773.340,00 | -37.568.500,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | Kota Makassar | | 323.803.500,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 103.363.900,00 | 47.792.955,00 | 47.792.955,00 | -55.570.945,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 259.002.500,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.811.500,00 | 11.578.795,00 | 11.578.795,00 | 2.767.295,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 11.081.500,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.815.000,00 | 11.053.400,00 | 11.053.400,00 | 2.238.400,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 10.720.300,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.594.000,00 | 7.035.000,00 | 7.035.000,00 | -1.559.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 10.852.900,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.230.400,00 | 6.970.000,00 | 6.970.000,00 | -2.260.400,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 10.348.900,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 9.233.040,00 | 18.404.535,00 | 18.404.535,00 | 9.171.495,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 14.152.600,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 3.294.000,00 | 10.938.655,00 | 10.938.655,00 | 7.644.655,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 7.644.800,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat perangkat daerah* | | | | 100 % | 100 % | 83.353.192.355,00 | 78.841.450.506,00 | 75.118.741.368,00 | -8.234.450.987,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | Kota Makassar | | 82.085.030.521,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 169 Orang/ bulan | 241 Orang/ bulan | 82.131.888.555,00 | 77.613.802.706,00 | 73.902.733.568,00 | -8.229.154.987,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 80.808.246.221,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 737.040.000,00 | 736.440.000,00 | 724.800.000,00 | -12.240.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 781.920.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 386.667.000,00 | 397.372.000,00 | 397.372.000,00 | 10.705.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 390.419.500,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 17 Laporan | 17 Laporan | 97.596.800,00 | 93.835.800,00 | 93.835.800,00 | -3.761.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 104.444.800,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase ASN Perangkat daerah yang mendapat peningkatan kapsitas* | | | | 100 % | 100 % | 1.941.250.000,00 | 1.583.500.000,00 | 508.500.000,00 | -1.432.750.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | Kota Makassar | | 1.712.970.600,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 164.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -164.250.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 168.470.600,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 443 Orang | 37 Orang | 1.777.000.000,00 | 1.583.500.000,00 | 508.500.000,00 | -1.268.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 1.544.500.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Presentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik* | | | | 100 % | 100 % | 5.492.533.040,00 | 4.452.283.040,00 | 3.448.616.440,00 | -2.043.916.600,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | Kota Makassar | | 4.737.487.540,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 133.032.800,00 | 96.342.800,00 | 87.523.400,00 | -45.509.400,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 91.846.540,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 5 Paket | 552.644.440,00 | 447.745.040,00 | 356.736.840,00 | -195.907.600,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 553.152.700,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 154.161.800,00 | 149.450.200,00 | 127.369.200,00 | -26.792.600,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 483.428.900,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 465.212.000,00 | 222.510.000,00 | 222.510.000,00 | -242.702.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 120.950.400,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 1.215.267.000,00 | 1.194.987.000,00 | 1.190.037.000,00 | -25.230.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 868.744.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 160.440.000,00 | 160.440.000,00 | 160.440.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 160.440.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 500 Laporan | 100 Laporan | 92.000.000,00 | 59.000.000,00 | 59.000.000,00 | -33.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 92.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 222 Laporan | 101 Laporan | 2.656.550.000,00 | 2.004.808.000,00 | 1.164.000.000,00 | -1.492.550.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 2.305.500.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 63.225.000,00 | 117.000.000,00 | 81.000.000,00 | 17.775.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 61.425.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Presentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik* | | | | 100 % | 100 % | 634.889.800,00 | 1.359.495.400,00 | 1.228.990.400,00 | 594.100.600,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | Kota Makassar | | 7.974.372.574,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 101.000.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 86 Unit | 136 Unit | 634.889.800,00 | 1.359.495.400,00 | 1.228.990.400,00 | 594.100.600,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 7.873.372.574,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Presentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik* | | | | 100 % | 100 % | 3.606.429.140,00 | 3.732.034.740,00 | 3.461.146.196,00 | -145.282.944,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | Kota Makassar | | 3.279.524.068,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.190.629.140,00 | 2.416.434.740,00 | 2.232.546.196,00 | 41.917.056,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 2.116.524.068,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 227.500.000,00 | 227.500.000,00 | 152.500.000,00 | -75.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 221.500.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 1.188.300.000,00 | 1.088.100.000,00 | 1.076.100.000,00 | -112.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 941.500.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik* | | | | 100 % | 100 % | 4.399.339.150,00 | 8.154.912.400,00 | 3.835.848.400,00 | -563.490.750,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | Kota Makassar | | 7.854.217.650,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 39.609.500,00 | 39.609.500,00 | 39.109.500,00 | -500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 38.691.950,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 220 Unit | 220 Unit | 2.478.212.450,00 | 2.436.172.000,00 | 2.132.822.000,00 | -345.390.450,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 2.553.106.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 362 Unit | 362 Unit | 28.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | -28.960.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 28.960.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 563 Unit | 563 Unit | 705.429.900,00 | 723.727.900,00 | 723.727.900,00 | 18.298.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 692.030.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 1.122.627.300,00 | 4.913.283.000,00 | 910.479.000,00 | -212.148.300,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 4.517.469.700,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 680 Unit | 680 Unit | 24.500.000,00 | 42.120.000,00 | 29.710.000,00 | 5.210.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 23.960.000,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 2. | **5.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | **Deviasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran PAD dalam APBD<br>Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)** | | | | **100<br>53.04 %<br>%** | **100<br>53.04 %<br>%** | **36.504.024.675,00** | **37.742.479.756,00** | **31.841.474.856,00** | **-143.841.800,00** | | | | | | | **36.360.182.875,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.02.04.2.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | *Persentase realisasi pajak daerah dan retribusi daerah* | | | | 100 % | 100 % | 36.504.024.675,00 | 37.742.479.756,00 | 31.841.474.856,00 | -4.662.549.819,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | Kota Makassar | | 36.360.182.875,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 827.518.980,00 | 695.398.980,00 | 634.298.980,00 | -193.220.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 665.096.200,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 1.676.826.768,00 | 634.346.768,00 | 566.346.768,00 | -1.110.480.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 1.618.365.200,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 25.624.875.115,00 | 27.255.549.480,00 | 22.793.629.280,00 | -2.831.245.835,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 25.695.770.475,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 566.474.300,00 | 785.474.300,00 | 532.398.800,00 | -34.075.500,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 128.712.700,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0010 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi* | | | | 1620 Dokumen | 1620 Dokumen | 115.817.764,00 | 119.334.520,00 | 100.790.520,00 | -15.027.244,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 120.836.300,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0011 | Penagihan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah* | | | | 50 Dokumen | 50 Dokumen | 37.622.028,00 | 134.742.028,00 | 114.742.028,00 | 77.120.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 32.077.100,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah* | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 2.513.317.952,00 | 2.380.752.952,00 | 1.587.544.952,00 | -925.773.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 2.541.426.900,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | | **UPT PELAYANAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH** | | | | | | | **136.083.000.000,00** | **135.979.929.182,00** | **119.557.091.000,00** | **-16.525.909.000,00** | | | | | | | **144.327.589.328,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **136.083.000.000,00** | **135.979.929.182,00** | **119.557.091.000,00** | **-16.525.909.000,00** | | | | | | | **144.327.589.328,00** | |
| | **5.02** | **KEUANGAN** | | | | | | | **136.083.000.000,00** | **135.979.929.182,00** | **119.557.091.000,00** | **-16.525.909.000,00** | | | | | | | **144.327.589.328,00** | |
| 1. | **5.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | **Deviasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran PAD dalam APBD Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)** | | | | **100 53.04 % %** | **100 53.04 % %** | **36.504.024.675,00** | **37.742.479.756,00** | **31.841.474.856,00** | **-143.841.800,00** | | | | | | | **36.360.182.875,00** | |
| | 5.02.04.2.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | *Persentase realisasi pajak daerah dan retribusi daerah* | | | | 100 % | 100 % | 36.504.024.675,00 | 37.742.479.756,00 | 31.841.474.856,00 | -4.662.549.819,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | Kota Makassar | | 36.360.182.875,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah* | | | | 16 Laporan | 16 Laporan | 1.152.222.000,00 | 1.246.722.000,00 | 1.271.722.000,00 | 119.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 1.600.810.500,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.02.04.2.01.0015 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 138.168.000,00 | 96.768.000,00 | 86.468.000,00 | -51.700.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 145.423.100,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | | **UPT PAJAK BUMI BANGUNAN** | | | | | | | **136.083.000.000,00** | **135.979.929.182,00** | **119.557.091.000,00** | **-16.525.909.000,00** | | | | | | | **144.327.589.328,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **136.083.000.000,00** | **135.979.929.182,00** | **119.557.091.000,00** | **-16.525.909.000,00** | | | | | | | **144.327.589.328,00** | |
| | **5.02** | **KEUANGAN** | | | | | | | **136.083.000.000,00** | **135.979.929.182,00** | **119.557.091.000,00** | **-16.525.909.000,00** | | | | | | | **144.327.589.328,00** | |
| 1. | **5.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | **Deviasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran PAD dalam APBD<br>Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)** | | | | **100<br>53.04 %<br>%** | **100<br>53.04 %<br>%** | **36.504.024.675,00** | **37.742.479.756,00** | **31.841.474.856,00** | **-143.841.800,00** | | | | | | | **36.360.182.875,00** | |
| | 5.02.04.2.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | *Persentase realisasi pajak daerah dan retribusi daerah* | | | | 100 % | 100 % | 36.504.024.675,00 | 37.742.479.756,00 | 31.841.474.856,00 | -4.662.549.819,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | Kota Makassar | | 36.360.182.875,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0007 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya* | | | | 51000 Obyek Pajak | 51000 Obyek Pajak | 3.384.037.000,00 | 3.229.109.000,00 | 3.199.759.000,00 | -184.278.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 3.235.431.400,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | | **UPT BPHTB** | | | | | | | **136.083.000.000,00** | **135.979.929.182,00** | **119.557.091.000,00** | **-16.525.909.000,00** | | | | | | | **144.327.589.328,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **136.083.000.000,00** | **135.979.929.182,00** | **119.557.091.000,00** | **-16.525.909.000,00** | | | | | | | **144.327.589.328,00** | |
| | **5.02** | **KEUANGAN** | | | | | | | **136.083.000.000,00** | **135.979.929.182,00** | **119.557.091.000,00** | **-16.525.909.000,00** | | | | | | | **144.327.589.328,00** | |
| 1. | **5.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | **Deviasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran PAD dalam APBD<br>Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)** | | | | **100<br>53.04 %<br>%** | **100<br>53.04 %<br>%** | **36.504.024.675,00** | **37.742.479.756,00** | **31.841.474.856,00** | **-143.841.800,00** | | | | | | | **36.360.182.875,00** | |
| | 5.02.04.2.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | *Persentase realisasi pajak daerah dan retribusi daerah* | | | | 100 % | 100 % | 36.504.024.675,00 | 37.742.479.756,00 | 31.841.474.856,00 | -4.662.549.819,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | Kota Makassar | | 36.360.182.875,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0007 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya* | | | | 51000 Obyek Pajak | 51000 Obyek Pajak | 202.160.000,00 | 202.160.000,00 | 163.960.000,00 | -38.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 358.768.200,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | | **UPT PELAYANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH** | | | | | | | **136.083.000.000,00** | **135.979.929.182,00** | **119.557.091.000,00** | **-16.525.909.000,00** | | | | | | | **144.327.589.328,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **136.083.000.000,00** | **135.979.929.182,00** | **119.557.091.000,00** | **-16.525.909.000,00** | | | | | | | **144.327.589.328,00** | |
| | **5.02** | **KEUANGAN** | | | | | | | **136.083.000.000,00** | **135.979.929.182,00** | **119.557.091.000,00** | **-16.525.909.000,00** | | | | | | | **144.327.589.328,00** | |
| 1. | **5.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | **Deviasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran PAD dalam APBD<br>Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)** | | | | **100<br>53.04 %<br>%** | **100<br>53.04 %<br>%** | **36.504.024.675,00** | **37.742.479.756,00** | **31.841.474.856,00** | **-143.841.800,00** | | | | | | | **36.360.182.875,00** | |
| | 5.02.04.2.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | *Persentase realisasi pajak daerah dan retribusi daerah* | | | | 100 % | 100 % | 36.504.024.675,00 | 37.742.479.756,00 | 31.841.474.856,00 | -4.662.549.819,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | Kota Makassar | | 36.360.182.875,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0009 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah* | | | | 21600 Layanan | 21600 Layanan | 264.984.768,00 | 962.121.728,00 | 789.814.528,00 | 524.829.760,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 217.464.800,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | | **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH** | | | | | | | **23.003.800.000,00** | **30.704.884.842,00** | **30.678.090.000,00** | **7.674.290.000,00** | | | | | | | **36.858.616.410,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **23.003.800.000,00** | **30.704.884.842,00** | **30.678.090.000,00** | **7.674.290.000,00** | | | | | | | **36.858.616.410,00** | |
| | **5.03** | **KEPEGAWAIAN** | | | | | | | **16.893.214.440,00** | **19.824.071.662,00** | **19.864.205.380,00** | **2.970.990.940,00** | | | | | | | **27.263.914.700,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | **5.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah<br>Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas** | | | | **100<br>90 %<br>%** | **100<br>90 persen<br>persen** | **13.248.822.680,00** | **16.478.304.902,00** | **17.052.843.420,00** | **6.724.557.252,00** | | | | | | | **19.973.379.932,00** | |
| | 5.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun* | | | | 19 Dokumen | 19 Dokumen | 93.628.400,00 | 104.468.400,00 | 82.208.400,00 | -11.420.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | ASN Pemerintah Kota Makassar | | 233.795.870,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 16.108.200,00 | 29.048.200,00 | 21.788.200,00 | 5.680.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 28.500.560,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.230.600,00 | 10.230.600,00 | 8.230.600,00 | -2.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 10.560.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.362.600,00 | 9.362.600,00 | 7.362.600,00 | -2.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 10.221.750,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.777.000,00 | 8.777.000,00 | 6.777.000,00 | -2.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 14.099.250,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.250.000,00 | 9.250.000,00 | 7.250.000,00 | -2.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 13.347.070,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 27.540.000,00 | 27.540.000,00 | 24.540.000,00 | -3.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 144.171.170,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 7 Laporan | 7 Laporan | 12.360.000,00 | 10.260.000,00 | 6.260.000,00 | -6.100.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 12.896.070,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun* | | | | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 10.319.405.940,00 | 13.673.644.162,00 | 13.673.662.678,00 | 3.354.256.738,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | ASN Pemerintah Kota Makassar | | 14.575.913.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 75 Orang/bulan | 75 Orang/bulan | 9.886.400.940,00 | 13.233.739.162,00 | 13.233.757.678,00 | 3.347.356.738,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 14.080.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 18 Dokumen | 18 Dokumen | 281.640.000,00 | 286.440.000,00 | 286.440.000,00 | 4.800.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 324.060.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 151.365.000,00 | 153.465.000,00 | 153.465.000,00 | 2.100.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 171.853.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan* | | | | 3 Jenis | 3 Jenis | 226.290.000,00 | 226.290.000,00 | 406.790.000,00 | 180.500.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | ASN Pemerintah Kota Makassar | | 596.741.970,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 135 Paket | 135 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 95.700.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.05.0006 | Pemulangan Pegawai yang Pensiun | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan* | | | | 400 Orang | 400 Orang | 34.420.000,00 | 34.420.000,00 | 25.420.000,00 | -9.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 48.140.620,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.05.0007 | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 191.870.000,00 | 191.870.000,00 | 381.370.000,00 | 189.500.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 452.901.350,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Jasa Adminitrasi Umum yang Tersedia* | | | | 6 Jenis | 6 Jenis | 992.982.700,00 | 688.547.700,00 | 717.747.700,00 | -275.235.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | ASN Pemerintah Kota Makassar | | 1.169.398.010,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 14.029.400,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 44.888.400,00 | 45.453.400,00 | 45.453.400,00 | 565.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 103.094.310,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 62.791.500,00 | 62.791.500,00 | 62.791.500,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 69.360.500,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 18 Dokumen | 18 Dokumen | 17.280.000,00 | 17.280.000,00 | 17.280.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 131.516.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 20.022.800,00 | 20.022.800,00 | 26.722.800,00 | 6.700.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 26.397.800,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 28 Laporan | 28 Laporan | 848.000.000,00 | 543.000.000,00 | 565.500.000,00 | -282.500.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 825.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 0,00 | 0,00 | 227.700.002,00 | 227.700.002,00 | | | - | -<br>- | ASN Pemerintah Kota Makassar | | 965.775.800,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 126.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 34 Unit | 34 Unit | 0,00 | 0,00 | 227.700.002,00 | 227.700.002,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 839.275.800,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang disediakan* | | | | 2 Jenis | 2 Jenis | 1.459.544.640,00 | 1.447.144.640,00 | 1.439.144.640,00 | -20.400.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | ASN Pemerintah Kota Makassar | | 1.730.254.592,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 49 Laporan | 49 Laporan | 1.211.352.000,00 | 1.198.952.000,00 | 1.190.952.000,00 | -20.400.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 1.308.560.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 248.192.640,00 | 248.192.640,00 | 248.192.640,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 421.694.592,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara* | | | | 4 Jenis | 4 Jenis | 156.971.000,00 | 338.210.000,00 | 505.590.000,00 | 348.619.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | ASN Pemerintah Kota Makassar | | 701.500.690,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 44.380.000,00 | 44.380.000,00 | 40.880.000,00 | -3.500.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 77.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 67 Unit | 67 Unit | 76.996.000,00 | 269.250.000,00 | 244.130.000,00 | 167.134.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 251.042.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 12 Unit | 12 Unit | 32.510.000,00 | 24.580.000,00 | 24.580.000,00 | -7.930.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 112.915.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 3.085.000,00 | 0,00 | 196.000.000,00 | 192.915.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 260.543.690,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| 2. | **5.03.02** | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | **Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi Dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)<br>Rasio Pegawai Fungsional (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)** | | | | **64.48 8.56 % %** | **64.48 8.56 persen persen** | **3.644.391.760,00** | **3.345.766.760,00** | **2.811.361.960,00** | **3.646.143.008,00** | | | | | | | **7.290.534.768,00** | |
| | 5.03.02.2.01 | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | *Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang dikelola* | | | | 5 Jenis | 5 Jenis | 1.896.172.600,00 | 1.754.597.600,00 | 1.573.157.600,00 | -323.015.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | ASN Pemerintah Kota Makassar | | 3.164.161.660,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.02.2.01.0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN* | | | | 50 Dokumen | 50 Dokumen | 482.697.000,00 | 407.147.000,00 | 368.647.000,00 | -114.050.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 924.561.660,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.02.2.01.0008 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi* | | | | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 188.958.600,00 | 180.958.600,00 | 170.458.600,00 | -18.500.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 561.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.02.2.01.0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 992.000.000,00 | 992.000.000,00 | 950.000.000,00 | -42.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 1.183.600.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.02.2.01.0011 | Pengelolaan Data Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 173.235.000,00 | 115.610.000,00 | 72.770.000,00 | -100.465.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 330.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.02.2.01.0012 | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 59.282.000,00 | 58.882.000,00 | 11.282.000,00 | -48.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 165.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.02.2.02 | Mutasi dan Promosi ASN | *Jumlah Mutasi dan Promosi ASN* | | | | 5225 ASN | 5225 ASN | 360.619.400,00 | 331.859.400,00 | 253.644.600,00 | -106.974.800,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | ASN Pemerintah Kota Makassar | | 825.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.02.2.02.0001 | Pengelolaan Mutasi ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah* | | | | 950 Dokumen | 950 Dokumen | 220.136.400,00 | 206.376.400,00 | 118.490.800,00 | -101.645.600,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 429.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.02.2.02.0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN* | | | | 1250 Dokumen | 1250 Dokumen | 140.483.000,00 | 125.483.000,00 | 135.153.800,00 | -5.329.200,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 396.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.02.2.03 | Pengembangan Kompetensi ASN | *Jumlah Pengembangan Kompetensi ASN yang dikelola* | | | | 3 Jenis | 3 Jenis | 664.227.000,00 | 489.227.000,00 | 533.977.000,00 | -130.250.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | ASN Pemerintah Kota Makassar | | 1.801.424.790,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.02.2.03.0003 | Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 139.227.000,00 | 64.227.000,00 | 58.977.000,00 | -80.250.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 670.857.110,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.02.2.03.0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan* | | | | 4 Orang | 4 Orang | 480.000.000,00 | 380.000.000,00 | 430.000.000,00 | -50.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 990.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.02.2.03.0009 | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 140.567.680,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.03.02.2.04 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | *Jumlah Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang dikelola* | | | | 3 Jenis | 3 Jenis | 723.372.760,00 | 770.082.760,00 | 450.582.760,00 | -272.790.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | ASN Pemerintah Kota Makassar | | 1.499.948.318,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 419.309.800,00 | 414.309.800,00 | 61.809.800,00 | -357.500.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 1.045.030.118,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.02.2.04.0004 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan* | | | | 300 Orang | 300 Orang | 147.262.000,00 | 198.972.000,00 | 191.972.000,00 | 44.710.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 164.518.200,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.03.02.2.04.0007 | Pembinaan Disiplin ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 156.800.960,00 | 156.800.960,00 | 196.800.960,00 | 40.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 290.400.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | **5.04** | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | | **6.110.585.560,00** | **10.880.813.180,00** | **10.813.884.620,00** | **4.703.299.060,00** | | | | | | | **9.594.701.710,00** | |
| 1. | **5.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | **Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural**<br>**Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan**<br>**Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal** | | | | **100**<br>**20**<br>**4.24 %**<br>**Jam Pelajaran**<br>**%** | **100**<br>**20**<br>**4.24 %**<br>**Jam Pelajaran**<br>**%** | **6.110.585.560,00** | **10.880.813.180,00** | **10.813.884.620,00** | **3.484.116.150,00** | | | | | | | **9.594.701.710,00** | |
| | 5.04.02.2.02 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | *Jumlah Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang dikelola* | | | | 2 Jenis | 2 Jenis | 6.110.585.560,00 | 10.880.813.180,00 | 10.813.884.620,00 | 4.703.299.060,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | ASN Pemerintah Kota Makassar | | 9.594.701.710,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.04.02.2.02.0007 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 4.173.697.560,00 | 5.720.547.780,00 | 3.813.369.220,00 | -360.328.340,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 6.490.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | 5.04.02.2.02.0008 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 1.936.888.000,00 | 5.160.265.400,00 | 7.000.515.400,00 | 5.063.627.400,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 3.104.701.710,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | | **BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | | | | | | | **8.921.200.000,00** | **10.575.936.007,00** | **11.729.303.000,00** | **2.808.103.000,00** | | | | | | | **17.314.927.294,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **8.921.200.000,00** | **10.575.936.007,00** | **11.729.303.000,00** | **2.808.103.000,00** | | | | | | | **17.314.927.294,00** | |
| | **5.05** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | **8.921.200.000,00** | **10.575.936.007,00** | **11.729.303.000,00** | **2.808.103.000,00** | | | | | | | **17.314.927.294,00** | |
| 1. | **5.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah**<br>**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik** | | | | **100**<br>**90 %**<br>**%** | **100**<br>**90 %**<br>**%** | **6.535.838.000,00** | **7.695.350.407,00** | **7.913.071.400,00** | **8.189.351.293,00** | | | | | | | **14.725.189.293,00** | |
| | 5.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 127.185.000,00 | 128.626.200,00 | 48.260.700,00 | -78.924.300,00 | | | - | -<br>- | Balitbangda Kota Makassar | | 466.654.400,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 3 Dokumen | 73.495.000,00 | 74.936.200,00 | 25.356.200,00 | -48.138.800,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 150.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.538.000,00 | 7.538.000,00 | 3.652.500,00 | -3.885.500,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 12.360.600,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.538.000,00 | 7.538.000,00 | 3.658.000,00 | -3.880.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 12.360.600,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.05.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.538.000,00 | 7.538.000,00 | 3.658.000,00 | -3.880.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 12.360.600,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.538.000,00 | 7.538.000,00 | 3.658.000,00 | -3.880.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 12.360.600,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 7.538.000,00 | 7.538.000,00 | 3.658.000,00 | -3.880.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 247.212.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 4.620.000,00 | -11.380.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 20.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 5.448.676.900,00 | 6.769.948.107,00 | 6.975.794.600,00 | 1.527.117.700,00 | | | - | -<br>- | Balitbangda Kota Makassar | | 10.967.472.400,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 36 Orang/bulan | 36 Orang/bulan | 5.064.132.100,00 | 6.353.843.307,00 | 6.569.844.300,00 | 1.505.712.200,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 10.000.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 225.960.000,00 | 257.520.000,00 | 257.520.000,00 | 31.560.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 300.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 140.282.000,00 | 140.282.000,00 | 139.267.500,00 | -1.014.500,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 618.030.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 7.152.000,00 | 7.152.000,00 | 4.652.000,00 | -2.500.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 24.721.200,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 11.150.800,00 | 11.150.800,00 | 4.510.800,00 | -6.640.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 24.721.200,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 105.000.000,00 | 91.500.000,00 | 208.500.000,00 | 103.500.000,00 | | | - | -<br>- | Balitbangda Kota Makassar | | 761.803.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 61.803.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 8 Orang | 8 Orang | 105.000.000,00 | 91.500.000,00 | 208.500.000,00 | 103.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 700.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Tertib dan Akuntabel* | | | | 3 Jenis Pengelolaan | 5 Jenis Pengelolaan | 452.251.500,00 | 333.251.500,00 | 327.551.500,00 | -124.700.000,00 | | | - | -<br>- | Balitbangda Kota Makassar | | 1.275.407.200,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 3.474.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 42.451.500,00 | 42.451.500,00 | 42.451.500,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 247.212.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 24.721.200,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 7 Dokumen | 4 Dokumen | 109.800.000,00 | 84.800.000,00 | 51.100.000,00 | -58.700.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 200.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 32 Laporan | 27 Laporan | 300.000.000,00 | 206.000.000,00 | 234.000.000,00 | -66.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 800.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | Balitbangda Kota Makassar | | 388.935.890,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 350.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.2.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 38.935.890,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 170.714.600,00 | 140.014.600,00 | 140.014.600,00 | -30.700.000,00 | | | - | -<br>- | Balitbangda Kota Makassar | | 231.124.540,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 11.124.540,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 39.000.000,00 | 39.000.000,00 | 39.000.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 50.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 1 Laporan | 1.768.600,00 | 1.768.600,00 | 1.768.600,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 20.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 129.946.000,00 | 99.246.000,00 | 99.246.000,00 | -30.700.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 150.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 10 Paket | 10 Paket | 232.010.000,00 | 232.010.000,00 | 212.950.000,00 | -19.060.000,00 | | | - | -<br>- | Balitbangda Kota Makassar | | 633.791.863,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 44.380.000,00 | 44.380.000,00 | 40.880.000,00 | -3.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 50.661.155,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 15 Unit | 15 Unit | 159.930.000,00 | 159.930.000,00 | 147.370.000,00 | -12.560.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 300.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 6.700.000,00 | 6.700.000,00 | 6.700.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 15.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 92.704.500,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 22.916.552,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 18.000.000,00 | -3.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 152.509.656,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2. | **5.05.02** | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | **Persentase SKPD Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah<br>Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan<br>Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan Di Kota Makassar<br>undefined** | | | | **100<br>90<br>94.93 %<br>%<br>%** | **100<br>90<br>94.93<br>undefined<br>%<br>%<br>%<br>undefined** | **2.385.362.000,00** | **2.880.585.600,00** | **3.816.231.600,00** | **204.376.001,00** | | | | | | | **2.589.738.001,00** | |
| | 5.05.02.2.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | *Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dihasilkan* | | | | 3 Rekomendasi | 6 Rekomendasi | 499.999.800,00 | 774.999.300,00 | 1.034.385.300,00 | 534.385.500,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Perangkat Daerah, Badan Usaha Mllik Daerah (BUMD), Perguruan Tinggi, Pihak Swasta, Media, dan Masyarakat | | 614.673.832,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.01.0001 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah* | | | | 1 Laporan | 2 Laporan | 166.684.200,00 | 320.012.700,00 | 276.012.700,00 | 109.328.500,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 194.537.269,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.01.0012 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik* | | | | 1 Laporan | 2 Laporan | 170.479.900,00 | 287.190.900,00 | 266.390.900,00 | 95.911.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 165.661.566,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.01.0013 | Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan* | | | | 1 Rekomendasi | 2 Rekomendasi | 162.835.700,00 | 167.795.700,00 | 491.981.700,00 | 329.146.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 254.474.997,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.02 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan* | | | | 3 Dokumen | 6 Dokumen | 623.397.500,00 | 738.177.500,00 | 1.458.637.500,00 | 835.240.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | SKPD, Perusda, Perguruan Tinggi, Masyarakat dan Stakeholder | | 578.305.247,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.02.0001 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial* | | | | 1 Dokumen | 3 Dokumen | 208.447.000,00 | 248.267.000,00 | 576.667.000,00 | 368.220.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 165.518.146,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.02.0002 | Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 0,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.02.0003 | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 207.238.000,00 | 248.438.000,00 | 226.438.000,00 | 19.200.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | | 222.665.622,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.02.0004 | Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | | 0,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.02.0005 | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | | 0,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.02.0006 | Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | | 0,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.02.0007 | Penelitian dan Pengembangan Pengendalian<br>Penduduk dan Keluarga Berencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | | 0,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.02.0008 | Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | | 0,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.02.0009 | Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | | 0,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.02.0010 | Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 207.712.500,00 | 241.472.500,00 | 655.532.500,00 | 447.820.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 190.121.479,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.03 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan* | | | | 2 Dokumen | 3 Dokumen | 431.774.100,00 | 502.674.200,00 | 509.074.200,00 | 77.300.100,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | SKPD, Perusda, Perguruan Tinggi, Masyarakat dan Stakeholder | | 444.596.476,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.03.0001 | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 208.138.000,00 | 241.338.000,00 | 219.338.000,00 | 11.200.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 254.474.997,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.03.0002 | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 0,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.03.0003 | Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 0,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.03.0004 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 0,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.03.0005 | Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 0,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.03.0006 | Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 0,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.05.02.2.03.0007 | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 0,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.03.0008 | Penelitian dan Pengembangan Kehutanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 0,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.03.0009 | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum* | | | | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 223.636.100,00 | 261.336.200,00 | 289.736.200,00 | 66.100.100,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 190.121.479,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.03.0010 | Penelitian dan Pengembangan Perhubungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 0,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.03.0011 | Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 0,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.03.0012 | Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 0,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.03.0013 | Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 0,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.05.02.2.04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | *Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 830.190.600,00 | 864.734.600,00 | 814.134.600,00 | -16.056.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | SKPD, Perusda, Perguruan Tinggi, Masyarakat dan Stakeholder | | 952.162.446,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.04.0001 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 224.000.000,00 | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 26.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 200.000.000,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.04.0002 | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 207.184.600,00 | 240.564.600,00 | 202.164.600,00 | -5.020.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 278.942.793,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.04.0003 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 87.033.000,00 | 87.397.000,00 | 80.197.000,00 | -6.836.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 209.486.362,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.04.0004 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 162.259.000,00 | 162.259.000,00 | 162.259.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 190.856.248,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.04.0005 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 149.714.000,00 | 124.514.000,00 | 119.514.000,00 | -30.200.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 72.877.043,00 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | | **30.000.000.000,00** | **55.358.466.984,00** | **42.703.928.000,00** | **12.703.928.000,00** | | | | | | | **30.271.617.000,00** | |
| | **6** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **30.000.000.000,00** | **55.358.466.984,00** | **42.703.928.000,00** | **12.703.928.000,00** | | | | | | | **30.271.617.000,00** | |
| | **6.01** | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | | **30.000.000.000,00** | **55.358.466.984,00** | **42.703.928.000,00** | **12.703.928.000,00** | | | | | | | **30.271.617.000,00** | |
| 1. | **6.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**<br>**Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas** | | | | **100**<br>**90 %**<br>**%** | **100**<br>**90 %**<br>**%** | **28.191.789.700,00** | **49.126.285.684,00** | **39.478.225.100,00** | **-1.071.999.700,00** | | | | | | | **27.119.790.000,00** | |
| | 6.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselenggarakan* | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 193.846.872,00 | 238.306.872,00 | 214.906.872,00 | 21.060.000,00 | | | - | -<br>- | Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar dan SKPD Terkait | | 330.932.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 176.569.200,00 | 221.029.200,00 | 197.629.200,00 | 21.060.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 274.834.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.136.500,00 | 7.136.500,00 | 7.136.500,00 | 0,00 | Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 18.196.500,00 | INSPEKTORAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 6.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.136.500,00 | 7.136.500,00 | 7.136.500,00 | 0,00 | Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 16.769.500,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.823.336,00 | 1.823.336,00 | 1.823.336,00 | 0,00 | Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 10.606.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.181.336,00 | 1.181.336,00 | 1.181.336,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 10.526.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Tersedianya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah tahun berjalan* | | | | 100 % | 100 % | 21.607.726.308,00 | 28.093.880.492,00 | 25.398.870.908,00 | 3.791.144.600,00 | | | - | - | Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar dan SKPD Terkait | | 22.977.483.727,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 87 Orang/bulan | 87 Orang/bulan | 21.207.379.036,00 | 27.658.733.220,00 | 24.965.973.636,00 | 3.758.594.600,00 | Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - | | | 22.586.146.727,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 241.680.000,00 | 276.480.000,00 | 274.230.000,00 | 32.550.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 226.920.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.755.112,00 | 2.755.112,00 | 2.755.112,00 | 0,00 | Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 3.852.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 155.912.160,00 | 155.912.160,00 | 155.912.160,00 | 0,00 | Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 160.565.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Tersedianya dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah tahun berjalan* | | | | 90 % | 90 % | 61.974.000,00 | 61.974.000,00 | 61.974.000,00 | 0,00 | | | - | - | Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar | | 99.986.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1.187.000,00 | 1.187.000,00 | 1.187.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 1.616.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 96.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 787.000,00 | 787.000,00 | 787.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 2.370.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur Inspektorat Daerah dan PNS Lingkup Pemerintah Kota Makassar* | | | | 90 % | 90 % | 3.127.187.000,00 | 12.814.879.000,00 | 6.639.751.000,00 | 3.512.564.000,00 | | | - | - | Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar | | 728.870.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | - | | | 108.550.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 87 Orang | 87 Orang | 3.094.000.000,00 | 12.781.692.000,00 | 6.606.564.000,00 | 3.512.564.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 567.500.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 61 Orang | 61 Orang | 33.187.000,00 | 33.187.000,00 | 33.187.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 52.820.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Termanfaatkannya Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 90 % | 90 % | 1.613.086.400,00 | 2.687.018.800,00 | 1.869.306.800,00 | 256.220.400,00 | | | - | - | Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar | | 1.136.966.100,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 8 Paket | 8 Paket | 11.186.000,00 | 11.186.000,00 | 11.186.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 27.177.600,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 14 Paket | 20 Paket | 234.130.800,00 | 457.149.600,00 | 457.149.600,00 | 223.018.800,00 | Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 160.972.500,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 8 Paket | 8 Paket | 45.792.000,00 | 64.512.000,00 | 64.512.000,00 | 18.720.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | | | 59.392.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 6.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 5.160.000,00 | 5.160.000,00 | 5.160.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 65.400.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 23.793.600,00 | 61.987.200,00 | 61.987.200,00 | 38.193.600,00 | Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 63.984.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 43 Laporan | 37 Laporan | 951.424.000,00 | 1.570.424.000,00 | 952.712.000,00 | 1.288.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 468.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 341.600.000,00 | 516.600.000,00 | 316.600.000,00 | -25.000.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 292.040.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Termanfaatkannya Barang Milik Daerah* | | | | 90 % | 90 % | 435.138.000,00 | 3.567.073.000,00 | 3.584.400.000,00 | 3.149.262.000,00 | | | - | -<br>- | Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar | | 436.962.500,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 6 Unit | 92 Unit | 42.900.000,00 | 365.225.000,00 | 382.552.000,00 | 339.652.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 143.000.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 11 Unit | 176 Unit | 392.238.000,00 | 3.201.848.000,00 | 3.201.848.000,00 | 2.809.610.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 293.962.500,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Termanfaatkannya jasa penunjang urusan pemerintah daerah tahun berjalan* | | | | 90 % | 90 % | 432.591.000,00 | 621.338.800,00 | 621.338.800,00 | 188.747.800,00 | | | - | -<br>- | Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar | | 507.463.600,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 203.943.000,00 | 204.238.000,00 | 204.238.000,00 | 295.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 240.221.200,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 228.648.000,00 | 417.100.800,00 | 417.100.800,00 | 188.452.800,00 | Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 267.242.400,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terpeliharanya barang milik daerah* | | | | 90 % | 90 % | 720.240.120,00 | 1.041.814.720,00 | 1.087.676.720,00 | 367.436.600,00 | | | - | -<br>- | Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar | | 901.126.073,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 44.380.000,00 | 44.380.000,00 | 40.880.000,00 | -3.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 41.724.800,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 30 Unit | 32 Unit | 287.073.400,00 | 451.188.000,00 | 400.100.000,00 | 113.026.600,00 | Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 488.530.400,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 125 Unit | 125 Unit | 95.560.000,00 | 95.560.000,00 | 95.560.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 91.610.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 293.226.720,00 | 450.686.720,00 | 551.136.720,00 | 257.910.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 279.260.873,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 2. | **6.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | **Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Persentase Tindak Lanjut Temuan** | | | | **100<br>3<br>75,60 %<br>Level<br>%** | **100<br>3<br>75,60 %<br>Level<br>%** | **1.237.023.900,00** | **5.126.343.900,00** | **2.322.149.500,00** | **383.978.100,00** | | | | | | | **1.621.002.000,00** | |
| | 6.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | *Tercapainya Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah* | | | | 3 Level | 3 Level | 1.155.237.900,00 | 4.771.357.900,00 | 2.187.563.500,00 | 1.032.325.600,00 | | | - | -<br>- | SKPD, Masyarakat, ASN, Stakeholder. | | 1.274.521.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.02.2.01.0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 10.830.600,00 | 147.630.600,00 | 10.830.600,00 | 0,00 | Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 23.026.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.02.2.01.0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah* | | | | 88 Laporan | 88 Laporan | 254.457.600,00 | 1.164.857.600,00 | 387.657.600,00 | 133.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 222.862.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.02.2.01.0003 | Reviu Laporan Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja* | | | | 208 Laporan | 208 Laporan | 209.255.900,00 | 886.655.900,00 | 439.055.900,00 | 229.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 93.055.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.02.2.01.0004 | Reviu Laporan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan* | | | | 9 Laporan | 9 Laporan | 21.072.800,00 | 41.372.800,00 | 9.872.800,00 | -11.200.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 43.161.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.02.2.01.0006 | Kerja Sama Pengawasan Internal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk* | | | | 12 Kesepakatan | 3 Kesepakatan | 295.055.600,00 | 1.866.255.600,00 | 868.255.600,00 | 573.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 620.734.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.02.2.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 364.565.400,00 | 664.585.400,00 | 471.891.000,00 | 107.325.600,00 | Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 271.683.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | *Peningkatan Penyelesaian Penanganan Pengaduan Masyarakat* | | | | 100 % | 100 % | 81.786.000,00 | 354.986.000,00 | 134.586.000,00 | 52.800.000,00 | | | - | -<br>- | SKPD, Masyarakat, ASN, dan Stakeholder. | | 346.481.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.02.2.02.0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian<br><br>Negara/Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani* | | | | 6 Laporan | 12 Laporan | 6.857.600,00 | 68.057.600,00 | 6.857.600,00 | 0,00 | Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 262.849.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.02.2.02.0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu* | | | | 32 Laporan | 32 Laporan | 74.928.400,00 | 286.928.400,00 | 127.728.400,00 | 52.800.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 83.632.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 3. | **6.01.03** | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | **Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)** | | | | **3 Level** | **3 Level** | **571.186.400,00** | **1.105.837.400,00** | **903.553.400,00** | **959.638.600,00** | | | | | | | **1.530.825.000,00** | |
| | 6.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | *Tercapainya Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)* | | | | 3 Level | 3 Level | 185.640.400,00 | 509.940.400,00 | 342.656.400,00 | 157.016.000,00 | | | - | -<br>- | SKPD Lingkup Pemerintah Kota Makassar | | 573.556.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.03.2.01.0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun* | | | | 53 Rekomendasi | 53 Rekomendasi | 124.682.400,00 | 174.982.400,00 | 127.840.400,00 | 3.158.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 399.949.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.03.2.01.0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun* | | | | 1 Rekomendasi | 1 Rekomendasi | 60.958.000,00 | 334.958.000,00 | 214.816.000,00 | 153.858.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 173.607.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.03.2.02 | Pendampingan dan Asistensi | *Tercapainya Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah* | | | | 3 Level | 3 Level | 385.546.000,00 | 595.897.000,00 | 560.897.000,00 | 175.351.000,00 | | | - | -<br>- | SKPD Lingkup Pemerintah Kota Makassar | | 957.269.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.03.2.02.0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 40 perangkat daerah | 50 perangkat daerah | 19.539.000,00 | 24.728.000,00 | 24.728.000,00 | 5.189.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 34.350.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.03.2.02.0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi* | | | | 37 perangkat daerah | 37 perangkat daerah | 163.305.400,00 | 182.305.400,00 | 225.305.400,00 | 62.000.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 90.046.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.03.2.02.0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi* | | | | 13 Kegiatan | 13 Kegiatan | 181.898.600,00 | 237.898.600,00 | 237.898.600,00 | 56.000.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 675.308.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | 6.01.03.2.02.0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas* | | | | 3 perangkat daerah | 51 perangkat daerah | 20.803.000,00 | 150.965.000,00 | 72.965.000,00 | 52.162.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 157.565.000,00 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | | **KECAMATAN BIRINGKANAYA** | | | | | | | **46.426.430.828,00** | **51.894.921.599,00** | **51.251.975.648,00** | **4.825.544.820,00** | | | | | | | **47.985.600.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **46.426.430.828,00** | **51.894.921.599,00** | **51.251.975.648,00** | **4.825.544.820,00** | | | | | | | **47.985.600.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **46.426.430.828,00** | **51.894.921.599,00** | **51.251.975.648,00** | **4.825.544.820,00** | | | | | | | **47.985.600.000,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**<br>**Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas** | | | | **100**<br>**90 %**<br>**%** | **100**<br>**90 %**<br>**%** | **14.756.337.554,00** | **19.690.684.527,00** | **19.561.444.536,00** | **432.262.446,00** | | | | | | | **15.188.600.000,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun* | | | | 100 % | 100 % | 69.430.000,00 | 59.710.000,00 | 27.430.000,00 | -42.000.000,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | Kecamatan Biringkanaya | | 70.600.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 19.600.000,00 | 9.880.000,00 | 4.600.000,00 | -15.000.000,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | | | 19.600.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 3.600.000,00 | -3.000.000,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 3.600.000,00 | -3.000.000,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 3.600.000,00 | -3.000.000,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 3.600.000,00 | -3.000.000,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 10.020.000,00 | 10.020.000,00 | 4.020.000,00 | -6.000.000,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | | | 11.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 13.410.000,00 | 13.410.000,00 | 4.410.000,00 | -9.000.000,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Indeks kepuasan ASN perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (kepegawaian,perlengkapan dan keuangan)* | | | | 100 % | 100 % | 12.951.416.534,00 | 15.064.015.305,00 | 14.964.741.314,00 | 2.013.324.780,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | Pegawai kecamatan biringkanaya | | 13.280.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 85 Orang/bulan | 85 Orang/bulan | 10.736.555.134,00 | 12.753.065.905,00 | 12.753.091.914,00 | 2.016.536.780,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 11.000.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 717.720.000,00 | 748.680.000,00 | 748.380.000,00 | 30.660.000,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 720.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 357.681.400,00 | 419.809.400,00 | 320.809.400,00 | -36.872.000,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 360.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.139.460.000,00 | 1.142.460.000,00 | 1.142.460.000,00 | 3.000.000,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 1.200.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Indeks Kepuasan ASN perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (kepegawaian,Perlengkapan dan keuangan )* | | | | 100 % | 100 % | 96.000.000,00 | 195.000.000,00 | 202.500.000,00 | 106.500.000,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | - - | Kecamatan Biringkanaya | | 96.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | - - | | | 0,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 8 Orang | 8 Orang | 96.000.000,00 | 195.000.000,00 | 202.500.000,00 | 106.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | - - | | | 96.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Indeks Kepuasan ASN perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (kepegawaian,Perlengkapan dan keuangan )* | | | | 100 % | 100 % | 118.060.000,00 | 246.080.000,00 | 350.080.000,00 | 232.020.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | Kecamatan Biringkanaya | | 137.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 1.420.000,00 | 5.440.000,00 | 5.440.000,00 | 4.020.000,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 2.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 22.320.000,00 | 22.320.000,00 | 22.320.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 25.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 54.320.000,00 | 104.320.000,00 | 254.320.000,00 | 200.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 60.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 40.000.000,00 | 114.000.000,00 | 68.000.000,00 | 28.000.000,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 50.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Presentase barang milik Daerah yang diadakan* | | | | 100 % | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | Kecamatan Biringkanaya | | 0,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 0,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 0,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Indeks Kepuasan ASN perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (kepegawaian,Perlengkapan dan keuangan )* | | | | 100 % | 100 % | 746.083.520,00 | 2.931.562.722,00 | 2.841.562.722,00 | 2.095.479.202,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | Kecamatan Biringkanaya | | 800.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 213.338.400,00 | 233.338.400,00 | 233.338.400,00 | 20.000.000,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 91.500.120,00 | 2.062.224.322,00 | 2.062.224.322,00 | 1.970.724.202,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 441.245.000,00 | 636.000.000,00 | 546.000.000,00 | 104.755.000,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 450.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik* | | | | 100 % | 100 % | 775.347.500,00 | 1.194.316.500,00 | 1.175.130.500,00 | 399.783.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | Kecamatan biringkanaya | | 805.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 34.588.000,00 | 39.770.000,00 | 36.630.000,00 | 2.042.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 35.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 23 Unit | 23 Unit | 272.239.500,00 | 273.046.000,00 | 257.510.000,00 | -14.729.500,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 300.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 399.420.000,00 | 797.640.500,00 | 797.130.500,00 | 397.710.500,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 400.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 102 Unit | 102 Unit | 69.100.000,00 | 83.860.000,00 | 83.860.000,00 | 14.760.000,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 70.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan** | | | | **100 %** | **100 %** | **16.851.482.402,00** | **17.125.925.400,00** | **17.125.925.400,00** | **613.517.598,00** | | | | | | | **17.465.000.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Persentase sarana dan prasarana pelayanan umum yang Dipelihara* | | | | 100 % | 100 % | 458.216.402,00 | 462.064.400,00 | 462.064.400,00 | 3.847.998,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | Kecamatan Biringkanaya | | 465.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 374.400.002,00 | 377.412.000,00 | 377.412.000,00 | 3.011.998,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | | | 380.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 83.816.400,00 | 84.652.400,00 | 84.652.400,00 | 836.000,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 85.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan* | | | | 100 % | 100 % | 16.393.266.000,00 | 16.663.861.000,00 | 16.663.861.000,00 | 270.595.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | Kecamatan Biringkanaya | | 17.000.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 16.393.266.000,00 | 16.663.861.000,00 | 16.663.861.000,00 | 270.595.000,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 17.000.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **100<br>95 %<br>%** | **100<br>95 %<br>%** | **192.522.000,00** | **202.490.000,00** | **202.490.000,00** | **7.478.000,00** | | | | | | | **200.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Presentase Masyarakat/kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan* | | | | 100 % | 100 % | 192.522.000,00 | 202.490.000,00 | 202.490.000,00 | 9.968.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | Kecamatan Biringkanaya | | 200.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 192.522.000,00 | 202.490.000,00 | 202.490.000,00 | 9.968.000,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 200.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan Yang Dapat Diselesaikan** | | | | **100 %** | **100 %** | **132.000.000,00** | **132.000.000,00** | **132.000.000,00** | **0,00** | | | | | | | **132.000.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum di tingkat kecamatan* | | | | 100 % | 100 % | 132.000.000,00 | 132.000.000,00 | 132.000.000,00 | 0,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | Kecamatan Biringkanaya | | 132.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 132.000.000,00 | 132.000.000,00 | 132.000.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 132.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Di Tingkat Kecamatan** | | | | **100 %** | **100 %** | **14.494.088.872,00** | **14.743.821.672,00** | **14.230.115.712,00** | **505.911.128,00** | | | | | | | **15.000.000.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum di tingkat Kecamatan* | | | | 100 % | 100 % | 14.494.088.872,00 | 14.743.821.672,00 | 14.230.115.712,00 | -263.973.160,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | Kecamatan Biringkanaya | | 15.000.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.05.2.01.0007 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 14.494.088.872,00 | 14.743.821.672,00 | 14.230.115.712,00 | -263.973.160,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 15.000.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | | **KELURAHAN LAIKANG KECAMATAN BIRINGKANAYA** | | | | | | | **463.238.300,00** | **463.238.300,00** | **450.438.300,00** | **-12.800.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **463.238.300,00** | **463.238.300,00** | **450.438.300,00** | **-12.800.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **463.238.300,00** | **463.238.300,00** | **450.438.300,00** | **-12.800.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **463.238.300,00** | **463.238.300,00** | **450.438.300,00** | **36.761.700,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Presentase Masyarakat/kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan* | | | | 100 % | 100 % | 463.238.300,00 | 463.238.300,00 | 450.438.300,00 | -12.800.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | MASYARAKAT | | 500.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 7 Unit | 7 Unit | 379.399.800,00 | 379.399.800,00 | 379.399.800,00 | 0,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Laikang | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 400.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 83.838.500,00 | 83.838.500,00 | 71.038.500,00 | -12.800.000,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Laikang | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | | **KELURAHAN SUDIANG KECAMATAN BIRINGKANAYA** | | | | | | | **498.516.600,00** | **497.903.800,00** | **483.003.800,00** | **-15.512.800,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **498.516.600,00** | **497.903.800,00** | **483.003.800,00** | **-15.512.800,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **498.516.600,00** | **497.903.800,00** | **483.003.800,00** | **-15.512.800,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **498.516.600,00** | **497.903.800,00** | **483.003.800,00** | **1.483.400,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Presentase Masyarakat/kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan* | | | | 100 % | 100 % | 498.516.600,00 | 497.903.800,00 | 483.003.800,00 | -15.512.800,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Masyarakat | | 500.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 398.523.600,00 | 397.910.800,00 | 397.910.800,00 | -612.800,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Sudiang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 400.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 99.993.000,00 | 99.993.000,00 | 85.093.000,00 | -14.900.000,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Sudiang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | | **KELURAHAN BERUA KECAMATAN BIRINGKANAYA** | | | | | | | **499.677.000,00** | **498.109.300,00** | **487.109.300,00** | **-12.567.700,00** | | | | | | | **550.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.677.000,00** | **498.109.300,00** | **487.109.300,00** | **-12.567.700,00** | | | | | | | **550.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.677.000,00** | **498.109.300,00** | **487.109.300,00** | **-12.567.700,00** | | | | | | | **550.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **499.677.000,00** | **498.109.300,00** | **487.109.300,00** | **50.323.000,00** | | | | | | | **550.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Presentase Masyarakat/kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan* | | | | 100 % | 100 % | 499.677.000,00 | 498.109.300,00 | 487.109.300,00 | -12.567.700,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Masyarakat | | 550.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 423.454.500,00 | 421.886.800,00 | 421.886.800,00 | -1.567.700,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Biringkanaya, Berua | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 450.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 76.222.500,00 | 76.222.500,00 | 65.222.500,00 | -11.000.000,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Berua | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | | **KELURAHAN PACCERAKKANG KECAMATAN BIRINGKANAYA** | | | | | | | **491.407.500,00** | **481.615.500,00** | **457.115.500,00** | **-34.292.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **491.407.500,00** | **481.615.500,00** | **457.115.500,00** | **-34.292.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **491.407.500,00** | **481.615.500,00** | **457.115.500,00** | **-34.292.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **491.407.500,00** | **481.615.500,00** | **457.115.500,00** | **8.592.500,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Presentase Masyarakat/kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan* | | | | 100 % | 100 % | 491.407.500,00 | 481.615.500,00 | 457.115.500,00 | -34.292.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Masyarakat | | 500.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 392.508.000,00 | 392.508.000,00 | 392.508.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Biringkanaya, Paccerakkang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 400.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 98.899.500,00 | 89.107.500,00 | 64.607.500,00 | -34.292.000,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Paccerakkang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | | **KELURAHAN BAKUNG KECAMATAN BIRINGKANAYA** | | | | | | | **497.309.700,00** | **496.672.700,00** | **480.572.700,00** | **-16.737.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **497.309.700,00** | **496.672.700,00** | **480.572.700,00** | **-16.737.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **497.309.700,00** | **496.672.700,00** | **480.572.700,00** | **-16.737.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **497.309.700,00** | **496.672.700,00** | **480.572.700,00** | **2.690.300,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Presentase Masyarakat/kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan* | | | | 100 % | 100 % | 497.309.700,00 | 496.672.700,00 | 480.572.700,00 | -16.737.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | MASYARAKAT | | 500.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 398.359.200,00 | 397.908.700,00 | 397.908.700,00 | -450.500,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Bakung | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 400.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 5 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas | 98.950.500,00 | 98.764.000,00 | 82.664.000,00 | -16.286.500,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Bakung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | | **KELURAHAN UNTIA KECAMATAN BIRINGKANAYA** | | | | | | | **498.660.600,00** | **489.087.500,00** | **464.087.500,00** | **-34.573.100,00** | | | | | | | **499.707.100,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **498.660.600,00** | **489.087.500,00** | **464.087.500,00** | **-34.573.100,00** | | | | | | | **499.707.100,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **498.660.600,00** | **489.087.500,00** | **464.087.500,00** | **-34.573.100,00** | | | | | | | **499.707.100,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **498.660.600,00** | **489.087.500,00** | **464.087.500,00** | **1.046.500,00** | | | | | | | **499.707.100,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Presentase Masyarakat/kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan* | | | | 100 % | 100 % | 498.660.600,00 | 489.087.500,00 | 464.087.500,00 | -34.573.100,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | MASYARAKAT | | 499.707.100,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 399.707.100,00 | 390.134.000,00 | 390.134.000,00 | -9.573.100,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Untia | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 399.707.100,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 98.953.500,00 | 98.953.500,00 | 73.953.500,00 | -25.000.000,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Untia | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | | **KELURAHAN BULUROKENG KECAMATAN BIRINGKANAYA** | | | | | | | **495.999.252,00** | **436.618.952,00** | **421.377.352,00** | **-74.621.900,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **495.999.252,00** | **436.618.952,00** | **421.377.352,00** | **-74.621.900,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **495.999.252,00** | **436.618.952,00** | **421.377.352,00** | **-74.621.900,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **495.999.252,00** | **436.618.952,00** | **421.377.352,00** | **4.000.748,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Presentase Masyarakat/kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan* | | | | 100 % | 100 % | 495.999.252,00 | 436.618.952,00 | 421.377.352,00 | -74.621.900,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | MASYARAKAT | | 500.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 297.189.000,00 | 297.189.000,00 | 297.162.100,00 | -26.900,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Bulurokeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 300.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 198.810.252,00 | 139.429.952,00 | 124.215.252,00 | -74.595.000,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Bulurokeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 200.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | | **KELURAHAN KATIMBANG KECAMATAN BIRINGKANAYA** | | | | | | | **499.721.500,00** | **495.750.000,00** | **481.100.000,00** | **-18.621.500,00** | | | | | | | **520.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.721.500,00** | **495.750.000,00** | **481.100.000,00** | **-18.621.500,00** | | | | | | | **520.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.721.500,00** | **495.750.000,00** | **481.100.000,00** | **-18.621.500,00** | | | | | | | **520.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **499.721.500,00** | **495.750.000,00** | **481.100.000,00** | **20.278.500,00** | | | | | | | **520.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Presentase Masyarakat/kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan* | | | | 100 % | 100 % | 499.721.500,00 | 495.750.000,00 | 481.100.000,00 | -18.621.500,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Masyarakat | | 520.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 386.334.000,00 | 382.362.500,00 | 382.362.500,00 | -3.971.500,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Katimbang | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 400.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 113.387.500,00 | 113.387.500,00 | 98.737.500,00 | -14.650.000,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Katimbang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 120.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | | **KELURAHAN DAYA KECAMATAN BIRINGKANAYA** | | | | | | | **347.293.500,00** | **340.796.600,00** | **320.576.600,00** | **-26.716.900,00** | | | | | | | **400.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **347.293.500,00** | **340.796.600,00** | **320.576.600,00** | **-26.716.900,00** | | | | | | | **400.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **347.293.500,00** | **340.796.600,00** | **320.576.600,00** | **-26.716.900,00** | | | | | | | **400.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **347.293.500,00** | **340.796.600,00** | **320.576.600,00** | **52.706.500,00** | | | | | | | **400.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Presentase Masyarakat/kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan* | | | | 100 % | 100 % | 347.293.500,00 | 340.796.600,00 | 320.576.600,00 | -26.716.900,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Makassar | | 400.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 246.555.000,00 | 240.058.100,00 | 240.058.100,00 | -6.496.900,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Daya | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 100.738.500,00 | 100.738.500,00 | 80.518.500,00 | -20.220.000,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Daya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 150.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | | **KELURAHAN PAI KECAMATAN BIRINGKANAYA** | | | | | | | **462.520.500,00** | **461.716.700,00** | **447.216.700,00** | **-15.303.800,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **462.520.500,00** | **461.716.700,00** | **447.216.700,00** | **-15.303.800,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **462.520.500,00** | **461.716.700,00** | **447.216.700,00** | **-15.303.800,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **462.520.500,00** | **461.716.700,00** | **447.216.700,00** | **-462.520.500,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | | | | - | - | 462.520.500,00 | 461.716.700,00 | 447.216.700,00 | -15.303.800,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat | | 0,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 7 Unit | 7 Unit | 349.186.500,00 | 348.382.700,00 | 348.382.700,00 | -803.800,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Pai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 3 Pokmas / Ormas | 3 Pokmas / Ormas | 113.334.000,00 | 113.334.000,00 | 98.834.000,00 | -14.500.000,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Pai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | | **KELURAHAN SUDIANG RAYA KECAMATAN BIRINGKANAYA** | | | | | | | **499.524.720,00** | **499.524.720,00** | **482.326.600,00** | **-17.198.120,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.524.720,00** | **499.524.720,00** | **482.326.600,00** | **-17.198.120,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.524.720,00** | **499.524.720,00** | **482.326.600,00** | **-17.198.120,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **499.524.720,00** | **499.524.720,00** | **482.326.600,00** | **475.280,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Presentase Masyarakat/kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan* | | | | 100 % | 100 % | 499.524.720,00 | 499.524.720,00 | 482.326.600,00 | -17.198.120,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Masyarakat | | 500.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 399.905.220,00 | 399.905.220,00 | 399.707.100,00 | -198.120,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Sudiang Raya | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 400.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 99.619.500,00 | 99.619.500,00 | 82.619.500,00 | -17.000.000,00 | Kota Makassar, Biringkanaya, Sudiang Raya | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN BIRINGKANAYA |
| | | **KECAMATAN BONTOALA** | | | | | | | **30.600.598.969,00** | **35.275.019.131,00** | **35.391.274.196,00** | **4.790.675.227,00** | | | | | | | **31.857.638.717,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **30.600.598.969,00** | **35.275.019.131,00** | **35.391.274.196,00** | **4.790.675.227,00** | | | | | | | **31.857.638.717,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **30.600.598.969,00** | **35.275.019.131,00** | **35.391.274.196,00** | **4.790.675.227,00** | | | | | | | **31.857.638.717,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**<br>**Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas** | | | | **100**<br>**90 %**<br>**%** | **100**<br>**90 %**<br>**%** | **13.185.173.649,00** | **18.026.661.371,00** | **17.895.716.436,00** | **757.147.868,00** | | | | | | | **13.942.321.517,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat daerah* | | | | 100 % | 100 % | 62.184.000,00 | 65.684.000,00 | 32.684.000,00 | -29.500.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Kasubag Keuangan | | 62.184.000,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 29.172.000,00 | 32.672.000,00 | 11.672.000,00 | -17.500.000,00 | Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 29.172.000,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.253.000,00 | 8.253.000,00 | 5.253.000,00 | -3.000.000,00 | Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 8.253.000,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.253.000,00 | 8.253.000,00 | 5.253.000,00 | -3.000.000,00 | Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 8.253.000,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.253.000,00 | 8.253.000,00 | 5.253.000,00 | -3.000.000,00 | Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 8.253.000,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.253.000,00 | 8.253.000,00 | 5.253.000,00 | -3.000.000,00 | Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 8.253.000,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 10.790.910.072,00 | 13.176.775.811,00 | 13.148.837.539,00 | 2.357.927.467,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | Kasubag Keuangan | | 10.790.910.072,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 100 Orang/ bulan | 100 Orang/ bulan | 9.915.352.072,00 | 12.223.537.811,00 | 12.223.599.539,00 | 2.308.247.467,00 | Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 9.915.352.072,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 692.640.000,00 | 703.320.000,00 | 703.320.000,00 | 10.680.000,00 | Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 692.640.000,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 182.918.000,00 | 249.918.000,00 | 221.918.000,00 | 39.000.000,00 | Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 182.918.000,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Tersedianya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 96.000.000,00 | 682.500.000,00 | 637.500.000,00 | 541.500.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | Kasubag Keuangan | | 96.000.000,00 | KECAMATAN BONTOALA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 170 Paket | 170 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 0,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 20 Orang | 20 Orang | 96.000.000,00 | 682.500.000,00 | 637.500.000,00 | 541.500.000,00 | Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 96.000.000,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 464.064.477,00 | 462.965.360,00 | 559.600.697,00 | 95.536.220,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | Kasubag Kepegawaian | | 464.064.477,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 9.608.000,00 | 12.070.000,00 | 12.070.000,00 | 2.462.000,00 | Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 9.608.000,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 87.966.160,00 | 96.213.960,00 | 96.213.960,00 | 8.247.800,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 87.966.160,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 155.852.400,00 | 44.459.400,00 | 44.459.400,00 | -111.393.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 155.852.400,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 7.824.000,00 | 7.824.000,00 | 7.824.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 7.824.000,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 109.933.917,00 | 109.518.000,00 | 109.518.000,00 | -415.917,00 | Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 109.933.917,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 52.880.000,00 | 52.880.000,00 | 202.880.000,00 | 150.000.000,00 | Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 52.880.000,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 40.000.000,00 | 140.000.000,00 | 86.635.337,00 | 46.635.337,00 | Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 40.000.000,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Tersedianya layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 4.249.800,00 | 1.379.196.000,00 | 1.379.196.000,00 | 1.374.946.200,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Kasubag Kepegawaian | | 4.249.800,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 4.249.800,00 | 1.379.196.000,00 | 1.379.196.000,00 | 1.374.946.200,00 | Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 4.249.800,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tersedianya layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 1.145.554.800,00 | 1.550.528.200,00 | 1.466.528.200,00 | 320.973.400,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Kasubag Kepegawaian | | 1.902.702.668,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 757.147.868,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 168.468.000,00 | 203.064.400,00 | 203.064.400,00 | 34.596.400,00 | Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 168.468.000,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 977.086.800,00 | 1.347.463.800,00 | 1.263.463.800,00 | 286.377.000,00 | Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 977.086.800,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tersedianya layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 622.210.500,00 | 709.012.000,00 | 671.370.000,00 | 49.159.500,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Kasubag Keuangan | | 622.210.500,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 37.926.500,00 | 51.562.000,00 | 37.880.000,00 | -46.500,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 37.926.500,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 120 Unit | 120 Unit | 303.734.000,00 | 278.120.000,00 | 254.160.000,00 | -49.574.000,00 | Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 303.734.000,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 150 Unit | 150 Unit | 165.600.000,00 | 121.800.000,00 | 121.800.000,00 | -43.800.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 165.600.000,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 114.950.000,00 | 257.530.000,00 | 257.530.000,00 | 142.580.000,00 | Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 114.950.000,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik**<br>**Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **100**<br>**89 %**<br>**%** | **100**<br>**89 %**<br>**%** | **9.498.344.560,00** | **9.399.224.560,00** | **9.399.224.560,00** | **0,00** | | | | | | | **9.498.344.560,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | | | | 100 % | 100 % | 172.430.160,00 | 129.830.160,00 | 129.830.160,00 | -42.600.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | PKK | | 172.430.160,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 172.430.160,00 | 129.830.160,00 | 129.830.160,00 | -42.600.000,00 | Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 172.430.160,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat* | | | | 100 % | 100 % | 9.325.914.400,00 | 9.269.394.400,00 | 9.269.394.400,00 | -56.520.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Kebersihan OPD Kecamatan | | 9.325.914.400,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 9.325.914.400,00 | 9.269.394.400,00 | 9.269.394.400,00 | -56.520.000,00 | Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 9.325.914.400,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik**<br>**Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **100**<br>**89 %**<br>**%** | **100**<br>**89 %**<br>**%** | **234.584.600,00** | **217.454.600,00** | **624.088.500,00** | **499.891.880,00** | | | | | | | **734.476.480,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | | | | 100 % | 100 % | 234.584.600,00 | 217.454.600,00 | 624.088.500,00 | 389.503.900,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | 734.476.480,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 12 Lembaga Kemasyarakatan | 12 Lembaga Kemasyarakatan | 234.584.600,00 | 217.454.600,00 | 213.854.600,00 | -20.730.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 234.584.600,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan** | | | | **100 %** | **100 %** | **652.200.000,00** | **702.800.000,00** | **702.800.000,00** | **0,00** | | | | | | | **652.200.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 100 % | 100 % | 652.200.000,00 | 702.800.000,00 | 702.800.000,00 | 50.600.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Kepala Seksi Trantib | | 652.200.000,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 508.200.000,00 | 558.800.000,00 | 558.800.000,00 | 50.600.000,00 | Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 508.200.000,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 144.000.000,00 | 144.000.000,00 | 144.000.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 144.000.000,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Peresentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Di Tingkat Kecamtan** | | | | **100 %** | **100 %** | **7.030.296.160,00** | **6.928.878.600,00** | **6.769.444.700,00** | **0,00** | | | | | | | **7.030.296.160,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 7.030.296.160,00 | 6.928.878.600,00 | 6.769.444.700,00 | -260.851.460,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | Bop Kelurahan | | 7.030.296.160,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.05.2.01.0007 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 7.030.296.160,00 | 6.928.878.600,00 | 6.769.444.700,00 | -260.851.460,00 | Kota Makassar, Bontoala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 7.030.296.160,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | | **KELURAHAN LAYANG KECAMATAN BONTOALA** | | | | | | | **499.995.440,00** | **408.838.700,00** | **399.338.700,00** | **-100.656.740,00** | | | | | | | **499.995.440,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.995.440,00** | **408.838.700,00** | **399.338.700,00** | **-100.656.740,00** | | | | | | | **499.995.440,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.995.440,00** | **408.838.700,00** | **399.338.700,00** | **-100.656.740,00** | | | | | | | **499.995.440,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Sarana dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik**<br>**Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang diberdayakan** | | | | **80**<br>**85 %**<br>**%** | **80**<br>**85 %**<br>**%** | **499.995.440,00** | **408.838.700,00** | **399.338.700,00** | **0,00** | | | | | | | **499.995.440,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 499.995.440,00 | 408.838.700,00 | 399.338.700,00 | -100.656.740,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | Kelurahan | | 499.995.440,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 334.799.740,00 | 253.847.500,00 | 253.847.500,00 | -80.952.240,00 | Kota Makassar, Bontoala, Layang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 334.799.740,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 165.195.700,00 | 154.991.200,00 | 145.491.200,00 | -19.704.500,00 | Kota Makassar, Bontoala, Layang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 165.195.700,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | | **KELURAHAN TIMUNGAN LOMPOA KECAMATAN BONTOALA** | | | | | | | **499.835.990,00** | **407.430.700,00** | **396.430.700,00** | **-103.405.290,00** | | | | | | | **499.835.990,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.835.990,00** | **407.430.700,00** | **396.430.700,00** | **-103.405.290,00** | | | | | | | **499.835.990,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.835.990,00** | **407.430.700,00** | **396.430.700,00** | **-103.405.290,00** | | | | | | | **499.835.990,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Sarana dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik**<br>**Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang diberdayakan** | | | | **80**<br>**85 %**<br>**%** | **80**<br>**85 %**<br>**%** | **499.835.990,00** | **407.430.700,00** | **396.430.700,00** | **0,00** | | | | | | | **499.835.990,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 499.835.990,00 | 407.430.700,00 | 396.430.700,00 | -103.405.290,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Kelurahan | | 499.835.990,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 9 Unit | 9 Unit | 299.897.990,00 | 258.630.100,00 | 258.630.100,00 | -41.267.890,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 299.897.990,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 199.938.000,00 | 148.800.600,00 | 137.800.600,00 | -62.137.400,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 199.938.000,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | | **KELURAHAN BONTOALA PARANG KECAMATAN BONTOALA** | | | | | | | **498.626.934,00** | **479.696.880,00** | **466.196.880,00** | **-32.430.054,00** | | | | | | | **498.626.934,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **498.626.934,00** | **479.696.880,00** | **466.196.880,00** | **-32.430.054,00** | | | | | | | **498.626.934,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **498.626.934,00** | **479.696.880,00** | **466.196.880,00** | **-32.430.054,00** | | | | | | | **498.626.934,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Sarana dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **80 %** | **80 %** | **498.626.934,00** | **479.696.880,00** | **466.196.880,00** | **0,00** | | | | | | | **498.626.934,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 498.626.934,00 | 479.696.880,00 | 466.196.880,00 | -32.430.054,00 | | | - | -<br>- | Kelurahan | | 498.626.934,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 299.889.700,00 | 264.960.000,00 | 264.960.000,00 | -34.929.700,00 | Kota Makassar, Bontoala, Bontoala Parang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 299.889.700,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 198.737.234,00 | 214.736.880,00 | 201.236.880,00 | 2.499.646,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Bontoala, Bontoala Parang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 198.737.234,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | | **KELURAHAN BUNGA EJAYA KECAMATAN BONTOALA** | | | | | | | **499.957.060,00** | **497.590.040,00** | **480.340.040,00** | **-19.617.020,00** | | | | | | | **499.957.060,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.957.060,00** | **497.590.040,00** | **480.340.040,00** | **-19.617.020,00** | | | | | | | **499.957.060,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.957.060,00** | **497.590.040,00** | **480.340.040,00** | **-19.617.020,00** | | | | | | | **499.957.060,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Sarana dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik**<br>**Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang diberdayakan** | | | | **80**<br>**85 %** | **80**<br>**85 %** | **499.957.060,00** | **497.590.040,00** | **480.340.040,00** | **0,00** | | | | | | | **499.957.060,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 499.957.060,00 | 497.590.040,00 | 480.340.040,00 | -19.617.020,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Kelurahan | | 499.957.060,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 8 Unit | 8 Unit | 371.321.000,00 | 362.405.600,00 | 362.405.600,00 | -8.915.400,00 | Kota Makassar, Bontoala, Bunga Ejaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 371.321.000,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 0 | 1 0 | 128.636.060,00 | 135.184.440,00 | 117.934.440,00 | -10.701.620,00 | Kota Makassar, Bontoala, Bunga Ejaya | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 128.636.060,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | | **KELURAHAN WAJO BARU KECAMATAN BONTOALA** | | | | | | | **499.144.450,00** | **499.144.450,00** | **488.644.450,00** | **-10.500.000,00** | | | | | | | **499.144.450,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.144.450,00** | **499.144.450,00** | **488.644.450,00** | **-10.500.000,00** | | | | | | | **499.144.450,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.144.450,00** | **499.144.450,00** | **488.644.450,00** | **-10.500.000,00** | | | | | | | **499.144.450,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **100 %** | **100 %** | **499.144.450,00** | **499.144.450,00** | **488.644.450,00** | **0,00** | | | | | | | **499.144.450,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | | | | - | - | 499.144.450,00 | 499.144.450,00 | 488.644.450,00 | -10.500.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 499.144.450,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 299.869.450,00 | 299.869.450,00 | 299.869.450,00 | 0,00 | Kota Makassar, Bontoala, Wajo Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 299.869.450,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 199.275.000,00 | 199.275.000,00 | 188.775.000,00 | -10.500.000,00 | Kota Makassar, Bontoala, Wajo Baru | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 199.275.000,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | | **KELURAHAN BARAYA KECAMATAN BONTOALA** | | | | | | | **499.891.880,00** | **414.383.900,00** | **0,00** | **-499.891.880,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.891.880,00** | **414.383.900,00** | **0,00** | **-499.891.880,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.891.880,00** | **414.383.900,00** | **0,00** | **-499.891.880,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Sarana dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **80 %** | **80 %** | **499.891.880,00** | **414.383.900,00** | **0,00** | **-499.891.880,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 499.891.880,00 | 414.383.900,00 | 0,00 | -499.891.880,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | - | | 0,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 7 Unit | 7 Unit | 300.426.980,00 | 264.859.400,00 | 0,00 | -300.426.980,00 | Kota Makassar, Bontoala, Baraya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 199.464.900,00 | 149.524.500,00 | 0,00 | -199.464.900,00 | Kota Makassar, Bontoala, Baraya | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **KELURAHAN BONTOALA TUA KECAMATAN BONTOALA** | | | | | | | **499.956.164,00** | **405.283.494,00** | **397.283.494,00** | **-102.672.670,00** | | | | | | | **499.559.834,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.956.164,00** | **405.283.494,00** | **397.283.494,00** | **-102.672.670,00** | | | | | | | **499.559.834,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.956.164,00** | **405.283.494,00** | **397.283.494,00** | **-102.672.670,00** | | | | | | | **499.559.834,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Sarana dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik**<br>**Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang diberdayakan** | | | | **80**<br>**85 %**<br>**%** | **80**<br>**85 %**<br>**%** | **499.956.164,00** | **405.283.494,00** | **397.283.494,00** | **-396.330,00** | | | | | | | **499.559.834,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 499.956.164,00 | 405.283.494,00 | 397.283.494,00 | -102.672.670,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Kelurahan | | 499.559.834,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 299.958.524,00 | 191.865.694,00 | 191.865.694,00 | -108.092.830,00 | Kota Makassar, Bontoala, Bontoala Tua | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 299.562.194,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 199.997.640,00 | 213.417.800,00 | 205.417.800,00 | 5.420.160,00 | Kota Makassar, Bontoala, Bontoala Tua | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 199.997.640,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | | **KELURAHAN MALIMONGAN BARU KECAMATAN BONTOALA** | | | | | | | **499.748.080,00** | **449.336.900,00** | **437.836.900,00** | **-61.911.180,00** | | | | | | | **499.748.080,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.748.080,00** | **449.336.900,00** | **437.836.900,00** | **-61.911.180,00** | | | | | | | **499.748.080,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.748.080,00** | **449.336.900,00** | **437.836.900,00** | **-61.911.180,00** | | | | | | | **499.748.080,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Sarana dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik**<br>**Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang diberdayakan** | | | | **80**<br>**85 %**<br>**%** | **80**<br>**85 %**<br>**%** | **499.748.080,00** | **449.336.900,00** | **437.836.900,00** | **0,00** | | | | | | | **499.748.080,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 499.748.080,00 | 449.336.900,00 | 437.836.900,00 | -61.911.180,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Kelurahan | | 499.748.080,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 299.953.680,00 | 299.656.500,00 | 299.656.500,00 | -297.180,00 | Kota Makassar, Bontoala, Malimongan Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 299.953.680,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 199.794.400,00 | 149.680.400,00 | 138.180.400,00 | -61.614.000,00 | Kota Makassar, Bontoala, Malimongan Baru | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 199.794.400,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | | **KELURAHAN TOMPO BALANG KECAMATAN BONTOALA** | | | | | | | **497.368.861,00** | **496.396.780,00** | **482.896.780,00** | **-14.472.081,00** | | | | | | | **497.368.861,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **497.368.861,00** | **496.396.780,00** | **482.896.780,00** | **-14.472.081,00** | | | | | | | **497.368.861,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **497.368.861,00** | **496.396.780,00** | **482.896.780,00** | **-14.472.081,00** | | | | | | | **497.368.861,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang diberdayakan** | | | | **85 %** | **85 %** | **497.368.861,00** | **496.396.780,00** | **482.896.780,00** | **0,00** | | | | | | | **497.368.861,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 497.368.861,00 | 496.396.780,00 | 482.896.780,00 | -14.472.081,00 | | | - | -<br>- | Kelurahan | | 497.368.861,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 7 Unit | 7 Unit | 232.511.121,00 | 333.731.500,00 | 333.731.500,00 | 101.220.379,00 | Kota Makassar, Bontoala, Tompo Balang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 232.511.121,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 5 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas | 264.857.740,00 | 162.665.280,00 | 149.165.280,00 | -115.692.460,00 | Kota Makassar, Bontoala, Tompo Balang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 264.857.740,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | | **KELURAHAN PARANG LAYANG KECAMATAN BONTOALA** | | | | | | | **499.925.780,00** | **483.510.780,00** | **473.510.780,00** | **-26.415.000,00** | | | | | | | **499.925.780,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.925.780,00** | **483.510.780,00** | **473.510.780,00** | **-26.415.000,00** | | | | | | | **499.925.780,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.925.780,00** | **483.510.780,00** | **473.510.780,00** | **-26.415.000,00** | | | | | | | **499.925.780,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Sarana dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik<br>Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang diberdayakan** | | | | **80<br>85 %<br>%** | **80<br>85 %<br>%** | **499.925.780,00** | **483.510.780,00** | **473.510.780,00** | **0,00** | | | | | | | **499.925.780,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 499.925.780,00 | 483.510.780,00 | 473.510.780,00 | -26.415.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Kelurahan | | 499.925.780,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 344.986.140,00 | 334.215.800,00 | 334.215.800,00 | -10.770.340,00 | Kota Makassar, Bontoala, Parang Layang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 344.986.140,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 154.939.640,00 | 149.294.980,00 | 139.294.980,00 | -15.644.660,00 | Kota Makassar, Bontoala, Parang Layang | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 154.939.640,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | | **KELURAHAN GADDONG KECAMATAN BONTOALA** | | | | | | | **474.785.350,00** | **471.519.080,00** | **462.269.080,00** | **-12.516.270,00** | | | | | | | **474.785.350,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **474.785.350,00** | **471.519.080,00** | **462.269.080,00** | **-12.516.270,00** | | | | | | | **474.785.350,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **474.785.350,00** | **471.519.080,00** | **462.269.080,00** | **-12.516.270,00** | | | | | | | **474.785.350,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Sarana dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik<br>Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang diberdayakan** | | | | **80<br>85 %<br>%** | **80<br>85 %<br>%** | **474.785.350,00** | **471.519.080,00** | **462.269.080,00** | **0,00** | | | | | | | **474.785.350,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 474.785.350,00 | 471.519.080,00 | 462.269.080,00 | -12.516.270,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Kelurahan | | 474.785.350,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 7 Unit | 7 Unit | 345.112.920,00 | 344.902.600,00 | 344.902.600,00 | -210.320,00 | Kota Makassar, Bontoala, Gaddong | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 345.112.920,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 129.672.430,00 | 126.616.480,00 | 117.366.480,00 | -12.305.950,00 | Kota Makassar, Bontoala, Gaddong | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 129.672.430,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | | **KELURAHAN BONTOALA KECAMATAN BONTOALA** | | | | | | | **483.465.042,00** | **481.978.000,00** | **470.478.000,00** | **-12.987.042,00** | | | | | | | **483.465.042,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **483.465.042,00** | **481.978.000,00** | **470.478.000,00** | **-12.987.042,00** | | | | | | | **483.465.042,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **483.465.042,00** | **481.978.000,00** | **470.478.000,00** | **-12.987.042,00** | | | | | | | **483.465.042,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Sarana dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik**<br>**Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang diberdayakan** | | | | **80**<br>**85 %**<br>**%** | **80**<br>**85 %**<br>**%** | **483.465.042,00** | **481.978.000,00** | **470.478.000,00** | **0,00** | | | | | | | **483.465.042,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 483.465.042,00 | 481.978.000,00 | 470.478.000,00 | -12.987.042,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Kelurahan | | 483.465.042,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 13 Unit | 13 Unit | 301.948.042,00 | 301.662.000,00 | 301.662.000,00 | -286.042,00 | Kota Makassar, Bontoala, Bontoala | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 301.948.042,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 181.517.000,00 | 180.316.000,00 | 168.816.000,00 | -12.701.000,00 | Kota Makassar, Bontoala, Bontoala | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 181.517.000,00 | KECAMATAN BONTOALA |
| | | **KECAMATAN MAKASSAR** | | | | | | | **43.865.396.043,00** | **50.564.516.931,00** | **49.793.129.920,00** | **5.927.733.877,00** | | | | | | | **52.096.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **43.865.396.043,00** | **50.564.516.931,00** | **49.793.129.920,00** | **5.927.733.877,00** | | | | | | | **52.096.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **43.865.396.043,00** | **50.564.516.931,00** | **49.793.129.920,00** | **5.927.733.877,00** | | | | | | | **52.096.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Presentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah**<br>**Presentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas** | | | | **100**<br>**90 %**<br>**%** | **100**<br>**90 %**<br>**%** | **18.034.229.463,00** | **24.285.986.951,00** | **23.447.651.480,00** | **3.111.770.537,00** | | | | | | | **21.146.000.000,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun* | | | | 100 % | 100 % | 49.690.000,00 | 52.110.000,00 | 20.610.000,00 | -29.080.000,00 | | | - | -<br>- | Kecamatan Makassar | | 240.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.226.000,00 | 5.726.000,00 | 2.226.000,00 | -5.000.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 45.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.226.000,00 | 5.726.000,00 | 2.226.000,00 | -5.000.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 45.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.240.000,00 | 6.740.000,00 | 3.240.000,00 | -5.000.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 45.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.293.000,00 | 6.793.000,00 | 3.293.000,00 | -5.000.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 45.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.723.000,00 | 4.223.000,00 | 723.000,00 | -5.000.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 12.982.000,00 | 22.902.000,00 | 8.902.000,00 | -4.080.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan)* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 14.796.852.463,00 | 16.625.573.351,00 | 16.625.651.880,00 | 1.828.799.417,00 | | | - | -<br>- | Kecamatan Makassar | | 15.575.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 120 Orang/ bulan | 120 Orang/ bulan | 13.616.812.963,00 | 15.397.973.851,00 | 15.398.052.380,00 | 1.781.239.417,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 15.000.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 670.869.000,00 | 694.869.000,00 | 694.869.000,00 | 24.000.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 120.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 198.069.000,00 | 198.069.000,00 | 198.069.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 125.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 311.101.500,00 | 334.661.500,00 | 334.661.500,00 | 23.560.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 330.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 24.069.000,00 | 24.069.000,00 | 24.069.000,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | Kecamatan Makassar | | 24.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 24.069.000,00 | 24.069.000,00 | 24.069.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 24.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan)* | | | | 90 % | 90 % | 96.000.000,00 | 702.000.000,00 | 754.500.000,00 | 658.500.000,00 | | | - | -<br>- | Kecamatan Makassar | | 370.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 225 Paket | 225 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 220.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 20 Orang | 20 Orang | 96.000.000,00 | 702.000.000,00 | 754.500.000,00 | 658.500.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 150.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan)* | | | | 95 % | 95 % | 197.801.000,00 | 540.420.000,00 | 506.220.000,00 | 308.419.000,00 | | | - | -<br>- | Kecamatan Makassar | | 665.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 13.315.000,00 | 41.515.000,00 | 13.315.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 55.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 7 Paket | 5.986.000,00 | 69.025.000,00 | 69.025.000,00 | 63.039.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 70.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 37.740.000,00 | 39.120.000,00 | 39.120.000,00 | 1.380.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 150.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 70.760.000,00 | 70.760.000,00 | 220.760.000,00 | 150.000.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 190.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 10 Laporan | 10 Laporan | 70.000.000,00 | 320.000.000,00 | 164.000.000,00 | 94.000.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 200.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Indeks Kepuasan ASN Perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (kepegawaian, perlengkapan dan keuangan)* | | | | 90 % | 90 % | 554.000,00 | 1.741.343.000,00 | 1.771.523.000,00 | 1.770.969.000,00 | | | - | -<br>- | Kecamatan Makassar | | 590.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 554.000,00 | 1.741.343.000,00 | 1.771.523.000,00 | 1.770.969.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.01.2.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 150.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 8 Unit | 8 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 190.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Indeks Kepuasan ASN Perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (kepegawaian, perlengkapan dan keuangan)* | | | | 90 % | 90 % | 1.821.692.000,00 | 2.448.748.400,00 | 1.820.048.400,00 | -1.643.600,00 | | | - | -<br>- | Kecamatan Makassar | | 2.462.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 477.344.000,00 | 478.559.000,00 | 478.559.000,00 | 1.215.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 70.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 194.683.200,00 | 198.209.200,00 | 198.209.200,00 | 3.526.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 392.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.149.664.800,00 | 1.771.980.200,00 | 1.143.280.200,00 | -6.384.600,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 2.000.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 90 % | 90 % | 1.047.571.000,00 | 2.151.723.200,00 | 1.925.029.200,00 | 877.458.200,00 | | | - | -<br>- | Kecamatan Makassar | | 1.220.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 17.570.000,00 | 36.770.000,00 | 33.630.000,00 | 16.060.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 90.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 125 Unit | 125 Unit | 613.399.000,00 | 632.599.000,00 | 442.330.000,00 | -171.069.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 495.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 32 Unit | 32 Unit | 39.500.000,00 | 39.500.000,00 | 39.500.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 95.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 364.902.000,00 | 1.430.654.200,00 | 1.397.369.200,00 | 1.032.467.200,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 450.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 20 Unit | 20 Unit | 12.200.000,00 | 12.200.000,00 | 12.200.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 90.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Presentase Sarana dan Prasarana Lingkup Kelurahan dalam Kondisi Baik** | | | | **100 %** | **100 %** | **14.647.064.100,00** | **15.115.645.340,00** | **15.106.035.340,00** | **2.622.935.900,00** | | | | | | | **17.270.000.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan di Wilayah Kecamatan* | | | | 14 Laporan | 14 Laporan | 153.732.700,00 | 173.726.740,00 | 161.976.740,00 | 8.244.040,00 | | | - | -<br>- | Kecamatan Makassar | | 270.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 153.732.700,00 | 173.726.740,00 | 161.976.740,00 | 8.244.040,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 270.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 14.493.331.400,00 | 14.941.918.600,00 | 14.944.058.600,00 | 450.727.200,00 | | | - | -<br>- | Kecamatan Makassar | | 17.000.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 14.493.331.400,00 | 14.941.918.600,00 | 14.944.058.600,00 | 450.727.200,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 17.000.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Presentase Sarana dan Prasarana Lingkup Kelurahan dalam Kondisi Baik** | | | | **100 %** | **100 %** | **176.464.740,00** | **200.604.140,00** | **683.604.100,00** | **683.535.260,00** | | | | | | | **860.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan di kelurahan* | | | | 14 Lembaga kemasyarakat | 14 Lembaga kemasyarakat | 176.464.740,00 | 200.604.140,00 | 683.604.100,00 | 507.139.360,00 | | | - | -<br>- | Kecamatan Makassar | | 860.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 14 Lembaga Kemasyarakatan | 14 Lembaga Kemasyarakatan | 176.464.740,00 | 200.604.140,00 | 192.204.140,00 | 15.739.400,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 360.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan yang dapat di selesaikan** | | | | **88 %** | **88 %** | **567.147.300,00** | **567.147.300,00** | **567.147.300,00** | **252.852.700,00** | | | | | | | **820.000.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 560.538.000,00 | 560.538.000,00 | 560.538.000,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | Kecamatan Makassar | | 730.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 392.469.000,00 | 392.469.000,00 | 392.469.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 500.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 168.069.000,00 | 168.069.000,00 | 168.069.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 230.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | *Jumlah Hasil Laporan Koordinasi dengan Perengkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan atau Kepolisian Negara republik Indonesia* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.609.300,00 | 6.609.300,00 | 6.609.300,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | Kecamatan Makassar | | 90.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 6.609.300,00 | 6.609.300,00 | 6.609.300,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 90.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan** | | | | **100 %** | **100 %** | **10.440.490.440,00** | **10.395.133.200,00** | **9.988.691.700,00** | **1.559.509.560,00** | | | | | | | **12.000.000.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.440.490.440,00 | 10.395.133.200,00 | 9.988.691.700,00 | -451.798.740,00 | | | - | -<br>- | Kecamatan Makassar | | 12.000.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.05.2.01.0007 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 10.440.490.440,00 | 10.395.133.200,00 | 9.988.691.700,00 | -451.798.740,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 12.000.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | | **KELURAHAN MARADEKAYA KECAMATAN MAKASSAR** | | | | | | | **499.999.246,00** | **499.998.492,00** | **489.418.492,00** | **-10.580.754,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.999.246,00** | **499.998.492,00** | **489.418.492,00** | **-10.580.754,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.999.246,00** | **499.998.492,00** | **489.418.492,00** | **-10.580.754,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Presentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang mendapat Pemberdayaan** | | | | **100 %** | **100 %** | **499.999.246,00** | **499.998.492,00** | **489.418.492,00** | **754,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 499.999.246,00 | 499.998.492,00 | 489.418.492,00 | -10.580.754,00 | | | - | -<br>- | Kelurahan Maradekaya | | 500.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 274.754.246,00 | 284.611.600,00 | 284.611.600,00 | 9.857.354,00 | Kota Makassar, Makassar, Maradekaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 5 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas | 225.245.000,00 | 215.386.892,00 | 204.806.892,00 | -20.438.108,00 | Kota Makassar, Makassar, Maradekaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | | **KELURAHAN MARADEKAYA UTARA KECAMATAN MAKASSAR** | | | | | | | **499.999.080,00** | **499.845.580,00** | **473.155.580,00** | **-26.843.500,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.999.080,00** | **499.845.580,00** | **473.155.580,00** | **-26.843.500,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.999.080,00** | **499.845.580,00** | **473.155.580,00** | **-26.843.500,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Presentase sarana dan prasarana lingkup kelurahan dalam kondisi baik** | | | | **100 %** | **100 %** | **499.999.080,00** | **499.845.580,00** | **473.155.580,00** | **920,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 499.999.080,00 | 499.845.580,00 | 473.155.580,00 | -26.843.500,00 | | | - | -<br>- | Kelurahan Maradekaya Utara | | 500.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 249.941.280,00 | 249.790.080,00 | 249.790.080,00 | -151.200,00 | Kota Makassar, Makassar, Maradekaya Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 5 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas | 250.057.800,00 | 250.055.500,00 | 223.365.500,00 | -26.692.300,00 | Kota Makassar, Makassar, Maradekaya Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | | **KELURAHAN MARADEKAYA SELATAN KECAMATAN MAKASSAR** | | | | | | | **498.795.956,00** | **498.795.956,00** | **488.595.956,00** | **-10.200.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **498.795.956,00** | **498.795.956,00** | **488.595.956,00** | **-10.200.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **498.795.956,00** | **498.795.956,00** | **488.595.956,00** | **-10.200.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Presentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang mendapat Pemberdayaan** | | | | **100 %** | **100 %** | **498.795.956,00** | **498.795.956,00** | **488.595.956,00** | **1.204.044,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 498.795.956,00 | 498.795.956,00 | 488.595.956,00 | -10.200.000,00 | | | - | -<br>- | Kelurahan Maradekaya Selatan | | 500.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 248.796.000,00 | 289.542.200,00 | 289.542.200,00 | 40.746.200,00 | Kota Makassar, Makassar, Maradekaya Selatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 0 Pokmas / Ormas | 0 Pokmas / Ormas | 249.999.956,00 | 209.253.756,00 | 199.053.756,00 | -50.946.200,00 | Kota Makassar, Makassar, Maradekaya Selatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | | **KELURAHAN MACCINI KECAMATAN MAKASSAR** | | | | | | | **499.999.800,00** | **499.999.800,00** | **499.999.800,00** | **0,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.999.800,00** | **499.999.800,00** | **499.999.800,00** | **0,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.999.800,00** | **499.999.800,00** | **499.999.800,00** | **0,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Presentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang mendapat Pemberdayaan** | | | | **100 %** | **100 %** | **499.999.800,00** | **499.999.800,00** | **499.999.800,00** | **200,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 499.999.800,00 | 499.999.800,00 | 499.999.800,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | Kelurahan Maccini | | 500.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 381.850.600,00 | 381.850.600,00 | 381.850.600,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 5 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas | 118.149.200,00 | 118.149.200,00 | 118.149.200,00 | 0,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | | **KELURAHAN MACCINI GUSUNG KECAMATAN MAKASSAR** | | | | | | | **500.000.000,00** | **445.583.020,00** | **445.316.500,00** | **-54.683.500,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **445.583.020,00** | **445.316.500,00** | **-54.683.500,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **445.583.020,00** | **445.316.500,00** | **-54.683.500,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Presentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang mendapat Pemberdayaan**<br>**Presentase sarana dan prasarana lingkup kelurahan dalam kondisi baik** | | | | **100**<br>**100 %**<br>**%** | **100**<br>**100 %**<br>**%** | **500.000.000,00** | **445.583.020,00** | **445.316.500,00** | **0,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 500.000.000,00 | 445.583.020,00 | 445.316.500,00 | -54.683.500,00 | | | - | -<br>- | Kelurahan Maccini Gusung | | 500.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 342.404.500,00 | 342.403.520,00 | 342.137.000,00 | -267.500,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini Gusung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 5 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas | 157.595.500,00 | 103.179.500,00 | 103.179.500,00 | -54.416.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Makassar, Maccini Gusung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | | **KELURAHAN MACCINI PARANG KECAMATAN MAKASSAR** | | | | | | | **499.882.946,00** | **499.817.100,00** | **499.817.100,00** | **-65.846,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.882.946,00** | **499.817.100,00** | **499.817.100,00** | **-65.846,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.882.946,00** | **499.817.100,00** | **499.817.100,00** | **-65.846,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Presentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang mendapat Pemberdayaan** | | | | **100 %** | **100 %** | **499.882.946,00** | **499.817.100,00** | **499.817.100,00** | **117.054,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 499.882.946,00 | 499.817.100,00 | 499.817.100,00 | -65.846,00 | | | - | -<br>- | Kelurahan Maccini Parang | | 500.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 355.718.900,00 | 383.115.200,00 | 383.115.200,00 | 27.396.300,00 | Kota Makassar, Makassar, Maccini Parang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 5 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas | 144.164.046,00 | 116.701.900,00 | 116.701.900,00 | -27.462.146,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Makassar, Maccini Parang | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | | **KELURAHAN BARA-BARAYA KECAMATAN MAKASSAR** | | | | | | | **499.998.400,00** | **499.998.400,00** | **488.998.400,00** | **-11.000.000,00** | | | | | | | **450.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.998.400,00** | **499.998.400,00** | **488.998.400,00** | **-11.000.000,00** | | | | | | | **450.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.998.400,00** | **499.998.400,00** | **488.998.400,00** | **-11.000.000,00** | | | | | | | **450.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Presentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang mendapat Pemberdayaan** | | | | **100 %** | **100 %** | **499.998.400,00** | **499.998.400,00** | **488.998.400,00** | **-49.998.400,00** | | | | | | | **450.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 499.998.400,00 | 499.998.400,00 | 488.998.400,00 | -11.000.000,00 | | | - | -<br>- | Kelurahan Bara - Baraya | | 450.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 299.292.400,00 | 299.292.400,00 | 299.292.400,00 | 0,00 | Kota Makassar, Makassar, Bara Baraya Selatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 5 Pokmas / Ormas | 2 Pokmas / Ormas | 200.706.000,00 | 200.706.000,00 | 189.706.000,00 | -11.000.000,00 | Kota Makassar, Makassar, Bara Baraya Selatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 200.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | | **KELURAHAN BARA-BARAYA SELATAN KECAMATAN MAKASSAR** | | | | | | | **499.999.608,00** | **497.450.164,00** | **486.100.164,00** | **-13.899.444,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.999.608,00** | **497.450.164,00** | **486.100.164,00** | **-13.899.444,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.999.608,00** | **497.450.164,00** | **486.100.164,00** | **-13.899.444,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Presentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang mendapat Pemberdayaan** | | | | **100 %** | **100 %** | **499.999.608,00** | **497.450.164,00** | **486.100.164,00** | **392,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 499.999.608,00 | 497.450.164,00 | 486.100.164,00 | -13.899.444,00 | | | - | -<br>- | Kelurahan Bara-Baraya Selatan | | 500.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 372.811.300,00 | 371.088.200,00 | 371.088.200,00 | -1.723.100,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Makassar, Bara Baraya Selatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 127.188.308,00 | 126.361.964,00 | 115.011.964,00 | -12.176.344,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Makassar, Bara Baraya Selatan | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | | **KELURAHAN BARA-BARAYA TIMUR KECAMATAN MAKASSAR** | | | | | | | **499.999.811,00** | **499.999.760,00** | **490.299.760,00** | **-9.700.051,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.999.811,00** | **499.999.760,00** | **490.299.760,00** | **-9.700.051,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.999.811,00** | **499.999.760,00** | **490.299.760,00** | **-9.700.051,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Presentase sarana dan prasarana lingkup kelurahan dalam kondisi baik** | | | | **100 %** | **100 %** | **499.999.811,00** | **499.999.760,00** | **490.299.760,00** | **189,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persen Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 499.999.811,00 | 499.999.760,00 | 490.299.760,00 | -9.700.051,00 | | | - | -<br>- | Kelurahan Bara-Baraya Timur | | 500.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 6 Unit | 10 Unit | 353.488.451,00 | 353.349.900,00 | 353.349.900,00 | -138.551,00 | Kota Makassar, Makassar, Bara Baraya Timur | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 146.511.360,00 | 146.649.860,00 | 136.949.860,00 | -9.561.500,00 | Kota Makassar, Makassar, Bara Baraya Timur | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | | **KELURAHAN BARA-BARAYA UTARA KECAMATAN MAKASSAR** | | | | | | | **499.999.960,00** | **499.999.960,00** | **0,00** | **-499.999.960,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.999.960,00** | **499.999.960,00** | **0,00** | **-499.999.960,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.999.960,00** | **499.999.960,00** | **0,00** | **-499.999.960,00** | | | | | | | **0,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Presentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang mendapat Pemberdayaan** | | | | **100 %** | **100 %** | **499.999.960,00** | **499.999.960,00** | **0,00** | **-499.999.960,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 499.999.960,00 | 499.999.960,00 | 0,00 | -499.999.960,00 | | | - | -<br>- | Kelurahan Bara-Baraya Utara | | 0,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 350.268.400,00 | 350.268.400,00 | 0,00 | -350.268.400,00 | Kota Makassar, Makassar, Bara Baraya Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 6 Pokmas / Ormas | 6 Pokmas / Ormas | 149.731.560,00 | 149.731.560,00 | 0,00 | -149.731.560,00 | Kota Makassar, Makassar, Bara Baraya Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **KELURAHAN BARANA KECAMATAN MAKASSAR** | | | | | | | **499.529.620,00** | **499.456.220,00** | **499.456.220,00** | **-73.400,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.529.620,00** | **499.456.220,00** | **499.456.220,00** | **-73.400,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.529.620,00** | **499.456.220,00** | **499.456.220,00** | **-73.400,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Presentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang mendapat Pemberdayaan** | | | | **100 %** | **100 %** | **499.529.620,00** | **499.456.220,00** | **499.456.220,00** | **470.380,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 499.529.620,00 | 499.456.220,00 | 499.456.220,00 | -73.400,00 | | | - | -<br>- | Kelurahan Barana | | 500.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 378.234.000,00 | 378.160.600,00 | 378.160.600,00 | -73.400,00 | Kota Makassar, Makassar, Barana | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 5 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas | 121.295.620,00 | 121.295.620,00 | 121.295.620,00 | 0,00 | Kota Makassar, Makassar, Barana | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | | **KELURAHAN LARIANG BANGI KECAMATAN MAKASSAR** | | | | | | | **500.000.000,00** | **499.936.400,00** | **497.436.400,00** | **-2.563.600,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **499.936.400,00** | **497.436.400,00** | **-2.563.600,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **499.936.400,00** | **497.436.400,00** | **-2.563.600,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Presentase sarana dan prasarana lingkup kelurahan dalam kondisi baik** | | | | **100 %** | **100 %** | **500.000.000,00** | **499.936.400,00** | **497.436.400,00** | **0,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 500.000.000,00 | 499.936.400,00 | 497.436.400,00 | -2.563.600,00 | | | - | -<br>- | Kelurahan Lariang Bangi | | 500.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 381.203.500,00 | 396.227.200,00 | 396.227.200,00 | 15.023.700,00 | Kota Makassar, Makassar, Lariangbangi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 118.796.500,00 | 103.709.200,00 | 101.209.200,00 | -17.587.300,00 | Kota Makassar, Makassar, Lariangbangi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | | **KELURAHAN MARICAYA KECAMATAN MAKASSAR** | | | | | | | **500.000.000,00** | **499.997.424,00** | **480.355.608,00** | **-19.644.392,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **499.997.424,00** | **480.355.608,00** | **-19.644.392,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **499.997.424,00** | **480.355.608,00** | **-19.644.392,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Presentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang mendapat Pemberdayaan<br>Presentase sarana dan prasarana lingkup kelurahan dalam kondisi baik** | | | | **100<br>100 %<br>%** | **100<br>100 %<br>%** | **500.000.000,00** | **499.997.424,00** | **480.355.608,00** | **0,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 500.000.000,00 | 499.997.424,00 | 480.355.608,00 | -19.644.392,00 | | | - | -<br>- | Kelurahan Maricaya | | 500.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 345.729.500,00 | 345.726.924,00 | 326.085.108,00 | -19.644.392,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Makassar, Maricaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 0 Pokmas / Ormas | 0 Pokmas / Ormas | 154.270.500,00 | 154.270.500,00 | 154.270.500,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Makassar, Maricaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | | **KELURAHAN MARICAYA BARU KECAMATAN MAKASSAR** | | | | | | | **499.999.530,00** | **499.840.100,00** | **494.320.100,00** | **-5.679.430,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.999.530,00** | **499.840.100,00** | **494.320.100,00** | **-5.679.430,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.999.530,00** | **499.840.100,00** | **494.320.100,00** | **-5.679.430,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **100<br>100 %<br>%** | **-** | **499.999.530,00** | **499.840.100,00** | **494.320.100,00** | **470,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | | | | 100 % | - | 499.999.530,00 | 499.840.100,00 | 494.320.100,00 | -5.679.430,00 | | | - | -<br>- | Kelurahan Maricaya Baru | | 500.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 306.029.810,00 | 284.644.400,00 | 284.644.400,00 | -21.385.410,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Makassar, Maricaya Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 5 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas | 193.969.720,00 | 215.195.700,00 | 209.675.700,00 | 15.705.980,00 | Kota Makassar, Makassar, Maricaya Baru | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN MAKASSAR |
| | | **KECAMATAN MAMAJANG** | | | | | | | **35.501.465.361,00** | **39.709.219.236,00** | **39.845.903.671,00** | **4.344.438.310,00** | | | | | | | **66.813.369.266,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **35.501.465.361,00** | **39.709.219.236,00** | **39.845.903.671,00** | **4.344.438.310,00** | | | | | | | **66.813.369.266,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **35.501.465.361,00** | **39.709.219.236,00** | **39.845.903.671,00** | **4.344.438.310,00** | | | | | | | **66.813.369.266,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah<br>Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas<br>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik** | | | | **100<br>90<br>90 %<br><br>%** | **100<br>90<br>90 %<br><br>%** | **17.058.616.293,00** | **20.028.851.670,00** | **20.080.803.965,00** | **16.018.561.954,00** | | | | | | | **33.077.178.247,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 93.767.800,00 | 68.078.800,00 | 36.578.800,00 | -57.189.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | SKPD | | 486.058.062,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 24.206.800,00 | 16.706.800,00 | 6.206.800,00 | -18.000.000,00 | Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 86.340.557,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 13.990.000,00 | 13.590.000,00 | 10.090.000,00 | -3.900.000,00 | Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.666.000,00 | 10.332.500,00 | 6.832.500,00 | -5.833.500,00 | Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 35.593.344,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.983.000,00 | 7.774.000,00 | 4.274.000,00 | -5.709.000,00 | Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 29.302.042,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.864.000,00 | 7.617.500,00 | 4.117.500,00 | -5.746.500,00 | Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 29.302.042,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 8.545.000,00 | 6.045.000,00 | 2.545.000,00 | -6.000.000,00 | Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 32.093.107,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 14.513.000,00 | 6.013.000,00 | 2.513.000,00 | -12.000.000,00 | Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 273.426.970,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Tersedianya Administrasi Keuangan SKPD* | | | | 100 % | 100 % | 14.968.390.173,00 | 16.768.912.950,00 | 16.730.329.245,00 | 1.761.939.072,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | SKPD | | 29.977.722.915,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 102 Orang/ bulan | 102 Orang/ bulan | 13.523.636.773,00 | 15.426.699.550,00 | 15.426.755.845,00 | 1.903.119.072,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 27.930.591.590,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 829.800.000,00 | 798.360.000,00 | 783.720.000,00 | -46.080.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 1.144.129.536,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br><br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 259.200.000,00 | 232.320.000,00 | 232.320.000,00 | -26.880.000,00 | Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 311.869.440,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 355.753.400,00 | 311.533.400,00 | 287.533.400,00 | -68.220.000,00 | Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 591.132.349,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 90 % | 90 % | 96.000.000,00 | 411.000.000,00 | 471.000.000,00 | 375.000.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | SKPD | | 437.529.600,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 220 Paket | 220 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 238.464.000,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 96.000.000,00 | 411.000.000,00 | 471.000.000,00 | 375.000.000,00 | Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 199.065.600,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 162.862.600,00 | 210.704.600,00 | 360.704.600,00 | 197.842.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | - | | 259.123.795,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 16.936.000,00 | 9.018.000,00 | 9.018.000,00 | -7.918.000,00 | Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 18.254.419,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 6.006.600,00 | 6.006.600,00 | 6.006.600,00 | 0,00 | Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 2.384.640,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.020.000,00 | 10.020.000,00 | 10.020.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 2.384.640,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 89.900.000,00 | 65.660.000,00 | 215.660.000,00 | 125.760.000,00 | Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 28.740.096,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 7 Laporan | 7 Laporan | 40.000.000,00 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 80.000.000,00 | Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 207.360.000,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | - - | SKPD | | 347.846.400,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 0,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 15 Unit | 15 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 140.486.400,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.01.2.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 207.360.000,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 1.198.395.720,00 | 1.420.373.320,00 | 1.360.373.320,00 | 161.977.600,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | SKPD | | 1.097.824.803,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 455.784.000,00 | 411.285.600,00 | 411.285.600,00 | -44.498.400,00 | Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 237.497.702,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 231.172.000,00 | 231.172.000,00 | 231.172.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 350.464.942,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 0,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 511.439.720,00 | 777.915.720,00 | 717.915.720,00 | 206.476.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 509.862.159,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 539.200.000,00 | 1.149.782.000,00 | 1.121.818.000,00 | 582.618.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | - | | 471.072.672,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 29.500.000,00 | 38.170.000,00 | 35.030.000,00 | 5.530.000,00 | Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 67.838.446,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 356.940.000,00 | 292.804.000,00 | 267.980.000,00 | -88.960.000,00 | Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 284.653.336,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 20 Unit | 20 Unit | 27.760.000,00 | 27.760.000,00 | 27.760.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 73.509.120,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 125.000.000,00 | 791.048.000,00 | 791.048.000,00 | 666.048.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | - - | | | 45.071.770,00 | KECAMATAN MAMAJANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **100 95 % %** | **100 95 % %** | **9.105.643.200,00** | **9.401.940.200,00** | **9.401.940.200,00** | **8.958.860.440,00** | | | | | | | **18.064.503.640,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang Mendapat Pemberdayaan* | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 23.866.000,00 | 24.222.000,00 | 24.222.000,00 | 356.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | SKPD dan Masyarakat | | 112.522.318,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 23.866.000,00 | 24.222.000,00 | 24.222.000,00 | 356.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 112.522.318,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan* | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 9.081.777.200,00 | 9.377.718.200,00 | 9.377.718.200,00 | 295.941.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | SKPD | | 17.951.981.322,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 9.081.777.200,00 | 9.377.718.200,00 | 9.377.718.200,00 | 295.941.000,00 | Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 17.951.981.322,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **100 95 % %** | **100 95 % %** | **148.018.800,00** | **179.618.800,00** | **646.608.340,00** | **810.993.296,00** | | | | | | | **959.012.096,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Koordinasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan dan Kecamatan* | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 148.018.800,00 | 179.618.800,00 | 646.608.340,00 | 498.589.540,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Masyarakat | | 959.012.096,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 148.018.800,00 | 179.618.800,00 | 171.808.800,00 | 23.790.000,00 | Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 459.012.096,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan Yang Dapat Diselesaikan** | | | | **100 %** | **100 %** | **443.870.400,00** | **781.741.200,00** | **781.741.200,00** | **1.624.257.784,00** | | | | | | | **2.068.128.184,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Meningkatnya Kualitas Mental dan Spiritual Terlaksananya Koordinasi dan Upaya Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum* | | | | 13 Orang 2 Orang | 13 Orang 2 Orang | 443.870.400,00 | 781.741.200,00 | 781.741.200,00 | 337.870.800,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | SKPD dan masyarakat | | 2.068.128.184,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 105.556.800,00 | 465.796.800,00 | 465.796.800,00 | 360.240.000,00 | Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 1.602.147.963,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 338.313.600,00 | 315.944.400,00 | 315.944.400,00 | -22.369.200,00 | Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 465.980.221,00 | KECAMATAN MAMAJANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Di Tingkat Kecamatan** | | | | **90 %** | **90 %** | **8.745.316.668,00** | **9.317.067.366,00** | **8.934.809.966,00** | **3.899.230.431,00** | | | | | | | **12.644.547.099,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Di Tingkat Kecamatan* | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 8.745.316.668,00 | 9.317.067.366,00 | 8.934.809.966,00 | 189.493.298,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | SKPD | | 12.644.547.099,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.05.2.01.0007 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.745.316.668,00 | 9.317.067.366,00 | 8.934.809.966,00 | 189.493.298,00 | Kota Makassar, Mamajang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 12.644.547.099,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | | **KELURAHAN BONTO LEBANG KECAMATAN MAMAJANG** | | | | | | | **499.999.660,00** | **499.999.660,00** | **475.799.660,00** | **-24.200.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.999.660,00** | **499.999.660,00** | **475.799.660,00** | **-24.200.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.999.660,00** | **499.999.660,00** | **475.799.660,00** | **-24.200.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan**<br>**Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **100**<br>**95 %**<br>**%** | **100**<br>**95 %**<br>**%** | **499.999.660,00** | **499.999.660,00** | **475.799.660,00** | **340,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Koordinasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan dan Kecamatan* | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 499.999.660,00 | 499.999.660,00 | 475.799.660,00 | -24.200.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | Masyarakat | | 500.000.000,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 335.122.800,00 | 335.122.800,00 | 335.122.800,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Mamajang, Bonto Lebang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 300.000.000,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 5 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas | 164.876.860,00 | 164.876.860,00 | 140.676.860,00 | -24.200.000,00 | Kota Makassar, Mamajang, Bonto Lebang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 200.000.000,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | | **KELURAHAN BONTO BIRAENG KECAMATAN MAMAJANG** | | | | | | | **500.000.000,00** | **499.999.900,00** | **482.399.900,00** | **-17.600.100,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **499.999.900,00** | **482.399.900,00** | **-17.600.100,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **499.999.900,00** | **482.399.900,00** | **-17.600.100,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan**<br>**Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **100**<br>**95 %**<br>**%** | **100**<br>**95 %**<br>**%** | **500.000.000,00** | **499.999.900,00** | **482.399.900,00** | **0,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Koordinasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan dan Kecamatan* | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 500.000.000,00 | 499.999.900,00 | 482.399.900,00 | -17.600.100,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | Masyarakat | | 500.000.000,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 5 Unit | 28 Unit | 302.835.000,00 | 302.757.400,00 | 302.757.400,00 | -77.600,00 | Kota Makassar, Mamajang, Bonto Biraeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 300.000.000,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 5 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 197.165.000,00 | 197.242.500,00 | 179.642.500,00 | -17.522.500,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Mamajang, Bonto Biraeng | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 200.000.000,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | | **KELURAHAN TAMPARANG KEKE KECAMATAN MAMAJANG** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **473.750.000,00** | **-26.250.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **473.750.000,00** | **-26.250.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **473.750.000,00** | **-26.250.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan**<br>**Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **100**<br>**95 %**<br>**%** | **100**<br>**95 %**<br>**%** | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **473.750.000,00** | **0,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Koordinasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan dan Kecamatan* | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 473.750.000,00 | -26.250.000,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat | | 500.000.000,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 283.226.300,00 | 283.226.300,00 | 283.226.300,00 | 0,00 | Kota Makassar, Mamajang, Tamparang Keke | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 300.000.000,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 5 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas | 216.773.700,00 | 216.773.700,00 | 190.523.700,00 | -26.250.000,00 | Kota Makassar, Mamajang, Tamparang Keke | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 200.000.000,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | | **KELURAHAN KARANG ANYAR KECAMATAN MAMAJANG** | | | | | | | **499.999.619,00** | **499.999.619,00** | **475.199.619,00** | **-24.800.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.999.619,00** | **499.999.619,00** | **475.199.619,00** | **-24.800.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.999.619,00** | **499.999.619,00** | **475.199.619,00** | **-24.800.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan<br>Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **100<br>95 %<br>%** | **100<br>95 %<br>%** | **499.999.619,00** | **499.999.619,00** | **475.199.619,00** | **381,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Koordinasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan dan Kecamatan* | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 499.999.619,00 | 499.999.619,00 | 475.199.619,00 | -24.800.000,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat | | 500.000.000,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 299.999.999,00 | 299.999.999,00 | 299.899.999,00 | -100.000,00 | Kota Makassar, Mamajang, Karang Anyar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 300.000.000,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 199.999.620,00 | 199.999.620,00 | 175.299.620,00 | -24.700.000,00 | Kota Makassar, Mamajang, Karang Anyar | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 200.000.000,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | | **KELURAHAN LABUANG BAJI KECAMATAN MAMAJANG** | | | | | | | **479.693.700,00** | **479.693.700,00** | **454.293.700,00** | **-25.400.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **479.693.700,00** | **479.693.700,00** | **454.293.700,00** | **-25.400.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **479.693.700,00** | **479.693.700,00** | **454.293.700,00** | **-25.400.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan<br>Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **100<br>95 %<br>%** | **100<br>95 %<br>%** | **479.693.700,00** | **479.693.700,00** | **454.293.700,00** | **20.306.300,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Koordinasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan dan Kecamatan* | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 479.693.700,00 | 479.693.700,00 | 454.293.700,00 | -25.400.000,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat | | 500.000.000,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 299.889.700,00 | 299.889.700,00 | 299.889.700,00 | 0,00 | Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 300.000.000,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 0 Pokmas / Ormas | 0 Pokmas / Ormas | 179.804.000,00 | 179.804.000,00 | 154.404.000,00 | -25.400.000,00 | Kota Makassar, Mamajang, Labuang Baji | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 200.000.000,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | | **KELURAHAN MAMAJANG DALAM KECAMATAN MAMAJANG** | | | | | | | **499.999.240,00** | **499.998.950,00** | **463.998.950,00** | **-36.000.290,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.999.240,00** | **499.998.950,00** | **463.998.950,00** | **-36.000.290,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.999.240,00** | **499.998.950,00** | **463.998.950,00** | **-36.000.290,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan<br>Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **100<br>95 %<br>%** | **100<br>95 %<br>%** | **499.999.240,00** | **499.998.950,00** | **463.998.950,00** | **760,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Koordinasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan dan Kecamatan* | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 499.999.240,00 | 499.998.950,00 | 463.998.950,00 | -36.000.290,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat | | 500.000.000,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 302.345.700,00 | 302.345.700,00 | 302.345.700,00 | 0,00 | Kota Makassar, Mamajang, Mamajang Dalam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 300.000.000,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 197.653.540,00 | 197.653.250,00 | 161.653.250,00 | -36.000.290,00 | Kota Makassar, Mamajang, Mamajang Dalam | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 200.000.000,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | | **KELURAHAN MANDALA KECAMATAN MAMAJANG** | | | | | | | **499.999.940,00** | **498.889.840,00** | **467.889.840,00** | **-32.110.100,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.999.940,00** | **498.889.840,00** | **467.889.840,00** | **-32.110.100,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.999.940,00** | **498.889.840,00** | **467.889.840,00** | **-32.110.100,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **100 95 % %** | **100 95 % %** | **499.999.940,00** | **498.889.840,00** | **467.889.840,00** | **60,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Koordinasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan dan Kecamatan* | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 499.999.940,00 | 498.889.840,00 | 467.889.840,00 | -32.110.100,00 | | | - | - - | - | | 500.000.000,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 327.785.700,00 | 315.441.800,00 | 315.441.800,00 | -12.343.900,00 | Kota Makassar, Mamajang, Mandala | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | - - | | | 300.000.000,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 172.214.240,00 | 183.448.040,00 | 152.448.040,00 | -19.766.200,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Mamajang, Mandala | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | - - | | | 200.000.000,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | | **KELURAHAN MARICAYA SELATAN KECAMATAN MAMAJANG** | | | | | | | **499.999.540,00** | **499.999.540,00** | **0,00** | **-499.999.540,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.999.540,00** | **499.999.540,00** | **0,00** | **-499.999.540,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.999.540,00** | **499.999.540,00** | **0,00** | **-499.999.540,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **100 95 % %** | **100 95 % %** | **499.999.540,00** | **499.999.540,00** | **0,00** | **-499.999.540,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Koordinasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan dan Kecamatan* | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 499.999.540,00 | 499.999.540,00 | 0,00 | -499.999.540,00 | | | - | - - | - | | 0,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 332.446.900,00 | 332.446.900,00 | 0,00 | -332.446.900,00 | Kota Makassar, Mamajang, Maricaya Selatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | - - | | | 0,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 167.552.640,00 | 167.552.640,00 | 0,00 | -167.552.640,00 | Kota Makassar, Mamajang, Maricaya Selatan | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | - - | | | 0,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **KELURAHAN MAMAJANG LUAR KECAMATAN MAMAJANG** | | | | | | | **499.999.620,00** | **499.999.620,00** | **486.999.620,00** | **-13.000.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.999.620,00** | **499.999.620,00** | **486.999.620,00** | **-13.000.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.999.620,00** | **499.999.620,00** | **486.999.620,00** | **-13.000.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **100 95 % %** | **100 95 % %** | **499.999.620,00** | **499.999.620,00** | **486.999.620,00** | **380,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Koordinasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan dan Kecamatan* | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 499.999.620,00 | 499.999.620,00 | 486.999.620,00 | -13.000.000,00 | | | - | - - | - | | 500.000.000,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 372.413.540,00 | 372.413.540,00 | 372.413.540,00 | 0,00 | Kota Makassar, Mamajang, Mamajang Luar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | - - | | | 300.000.000,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 5 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas | 127.586.080,00 | 127.586.080,00 | 114.586.080,00 | -13.000.000,00 | Kota Makassar, Mamajang, Mamajang Luar | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | - - | | | 200.000.000,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | | **KELURAHAN PARANG KECAMATAN MAMAJANG** | | | | | | | **499.999.560,00** | **499.340.360,00** | **471.340.360,00** | **-28.659.200,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.999.560,00** | **499.340.360,00** | **471.340.360,00** | **-28.659.200,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.999.560,00** | **499.340.360,00** | **471.340.360,00** | **-28.659.200,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **499.999.560,00** | **499.340.360,00** | **471.340.360,00** | **440,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | | | | - | - | 499.999.560,00 | 499.340.360,00 | 471.340.360,00 | -28.659.200,00 | | | - | - - | Masyarakat | | 500.000.000,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 329.707.200,00 | 329.048.000,00 | 329.048.000,00 | -659.200,00 | Kota Makassar, Mamajang, Parang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 300.000.000,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 4 Pokmas / Ormas | 4 Pokmas / Ormas | 170.292.360,00 | 170.292.360,00 | 142.292.360,00 | -28.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Mamajang, Parang | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 200.000.000,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | | **KELURAHAN PA`BATANG KECAMATAN MAMAJANG** | | | | | | | **499.999.800,00** | **499.481.180,00** | **472.981.180,00** | **-27.018.620,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.999.800,00** | **499.481.180,00** | **472.981.180,00** | **-27.018.620,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.999.800,00** | **499.481.180,00** | **472.981.180,00** | **-27.018.620,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **100 95 % %** | **100 95 % %** | **499.999.800,00** | **499.481.180,00** | **472.981.180,00** | **200,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Koordinasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan dan Kecamatan* | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 499.999.800,00 | 499.481.180,00 | 472.981.180,00 | -27.018.620,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat | | 500.000.000,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 7 Unit | 7 Unit | 311.143.620,00 | 310.945.500,00 | 310.945.500,00 | -198.120,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Mamajang, Pa'batang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 300.000.000,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 4 Pokmas / Ormas | 4 Pokmas / Ormas | 188.856.180,00 | 188.535.680,00 | 162.035.680,00 | -26.820.500,00 | Kota Makassar, Mamajang, Pa'batang | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 200.000.000,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | | **KELURAHAN SAMBUNG JAWA KECAMATAN MAMAJANG** | | | | | | | **499.944.460,00** | **499.944.000,00** | **471.944.000,00** | **-28.000.460,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.944.460,00** | **499.944.000,00** | **471.944.000,00** | **-28.000.460,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.944.460,00** | **499.944.000,00** | **471.944.000,00** | **-28.000.460,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **100 95 % %** | **100 95 % %** | **499.944.460,00** | **499.944.000,00** | **471.944.000,00** | **55.540,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Koordinasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan dan Kecamatan* | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 499.944.460,00 | 499.944.000,00 | 471.944.000,00 | -28.000.460,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat | | 500.000.000,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 7 Unit | 7 Unit | 299.945.600,00 | 288.172.200,00 | 288.172.200,00 | -11.773.400,00 | Kota Makassar, Mamajang, Sambung Jawa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 300.000.000,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 5 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas | 199.998.860,00 | 211.771.800,00 | 183.771.800,00 | -16.227.060,00 | Kota Makassar, Mamajang, Sambung Jawa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 200.000.000,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | | **KELURAHAN BAJI MAPPAKASUNGGU KECAMATAN MAMAJANG** | | | | | | | **499.999.500,00** | **499.999.500,00** | **474.999.500,00** | **-25.000.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.999.500,00** | **499.999.500,00** | **474.999.500,00** | **-25.000.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.999.500,00** | **499.999.500,00** | **474.999.500,00** | **-25.000.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **100 95 % %** | **100 95 % %** | **499.999.500,00** | **499.999.500,00** | **474.999.500,00** | **500,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Koordinasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan dan Kecamatan* | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 499.999.500,00 | 499.999.500,00 | 474.999.500,00 | -25.000.000,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat | | 500.000.000,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 309.125.100,00 | 309.125.100,00 | 309.125.100,00 | 0,00 | Kota Makassar, Mamajang, Baji Mappakasunggu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 300.000.000,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 190.874.400,00 | 190.874.400,00 | 165.874.400,00 | -25.000.000,00 | Kota Makassar, Mamajang, Baji Mappakasunggu | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 200.000.000,00 | KECAMATAN MAMAJANG |
| | | **KECAMATAN MANGGALA** | | | | | | | **39.624.919.030,00** | **45.298.012.814,00** | **44.841.038.126,00** | **5.216.119.096,00** | | | | | | | **42.125.161.499,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **39.624.919.030,00** | **45.298.012.814,00** | **44.841.038.126,00** | **5.216.119.096,00** | | | | | | | **42.125.161.499,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **39.624.919.030,00** | **45.298.012.814,00** | **44.841.038.126,00** | **5.216.119.096,00** | | | | | | | **42.125.161.499,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah<br>Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas** | | | | **100<br>90 %<br>%** | **100<br>90 %<br>%** | **14.867.686.390,00** | **20.456.849.434,00** | **20.352.530.146,00** | **921.663.130,00** | | | | | | | **15.789.349.520,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 125.425.000,00 | 94.244.760,00 | 56.544.760,00 | -68.880.240,00 | | | - | -<br>- | Kecamatan Manggala | | 207.765.636,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 35.261.000,00 | 22.762.760,00 | 17.262.760,00 | -17.998.240,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 77.372.690,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.795.000,00 | 14.263.000,00 | 9.263.000,00 | -6.532.000,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 26.717.070,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 13.617.000,00 | 11.722.000,00 | 6.722.000,00 | -6.895.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 26.908.270,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.280.000,00 | 11.580.000,00 | 6.580.000,00 | -5.700.000,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 20.038.471,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 13.447.000,00 | 12.747.000,00 | 7.747.000,00 | -5.700.000,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 17.397.784,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 17.255.000,00 | 14.520.000,00 | 4.520.000,00 | -12.735.000,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 21.098.757,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 17.770.000,00 | 6.650.000,00 | 4.450.000,00 | -13.320.000,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 18.232.594,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Indeks Kepuasan ASN perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretarian (Kepegawaian, Perlengkapan, dan Keuangan)* | | | | 100 % | 100 % | 12.808.128.790,00 | 12.893.306.454,00 | 12.889.299.566,00 | 81.170.776,00 | | | - | -<br>- | Kecamatan Manggala | | 13.730.211.927,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 83 Orang/bulan | 83 Orang/bulan | 10.751.330.790,00 | 12.090.506.454,00 | 12.090.579.566,00 | 1.339.248.776,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | -<br>- | | | 11.774.154.523,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 572.400.000,00 | 586.800.000,00 | 582.720.000,00 | 10.320.000,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 224.165.948,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.484.398.000,00 | 216.000.000,00 | 216.000.000,00 | -1.268.398.000,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 1.731.891.456,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Indeks Kepuasan ASN Perangkat daerah pelayanan kesekretarian (Kepegawaian, Perlengkapan, dan Keuangan)* | | | | 100 % | 100 % | 96.000.000,00 | 472.500.000,00 | 457.500.000,00 | 361.500.000,00 | | | - | -<br>- | Kecamatan Manggala | | 194.481.000,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 121.550.625,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 96.000.000,00 | 472.500.000,00 | 457.500.000,00 | 361.500.000,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 72.930.375,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Indeks Kepuasan ASN Perangkat daerah pelayanan kesekretarian (Kepegawaian, Perlengkapan, dan Keuangan)* | | | | 100 % | 100 % | 471.089.520,00 | 2.975.986.620,00 | 3.053.986.620,00 | 2.582.897.100,00 | | | - | -<br>- | Kecamatan Manggala | | 421.435.165,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 4.373.850,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 146.623.120,00 | 2.578.922.620,00 | 2.576.922.620,00 | 2.430.299.500,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 121.550.625,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 66.846.400,00 | 75.864.000,00 | 75.864.000,00 | 9.017.600,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 195.793.247,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 101.880.000,00 | 83.460.000,00 | 83.460.000,00 | -18.420.000,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 12.274.182,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 69.140.000,00 | 19.140.000,00 | 169.140.000,00 | 100.000.000,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 20.617.417,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 80.000.000,00 | 212.000.000,00 | 142.000.000,00 | 62.000.000,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 66.825.844,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Presentase barang milik daerah yang diadakan* | | | | 100 % | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | - | | 559.132.877,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 85.085.438,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 182.325.938,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 24.310.125,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 133.705.688,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.01.2.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 133.705.688,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Indeks Kepuasan ASN Perangkat daerah pelayanan kesekretarian (Kepegawaian, Perlengkapan, dan Keuangan)* | | | | 100 % | 100 % | 951.533.080,00 | 2.884.030.100,00 | 2.767.837.700,00 | 1.816.304.620,00 | | | - | -<br>- | - | | 276.095.292,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 285.190.080,00 | 311.390.700,00 | 311.390.700,00 | 26.200.620,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 163.782.514,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 666.343.000,00 | 2.572.639.400,00 | 2.456.447.000,00 | 1.790.104.000,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 112.312.778,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 415.510.000,00 | 1.136.781.500,00 | 1.127.361.500,00 | 711.851.500,00 | | | - | -<br>- | Kecamatan Manggala | | 400.227.623,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 39.520.000,00 | 39.520.000,00 | 36.380.000,00 | -3.140.000,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 40.611.766,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 132 Unit | 132 Unit | 207.390.000,00 | 207.390.000,00 | 201.110.000,00 | -6.280.000,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 189.444.981,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 67.900.000,00 | 67.900.000,00 | 67.900.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 85.085.438,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 100.700.000,00 | 821.971.500,00 | 821.971.500,00 | 721.271.500,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 36.465.188,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 48.620.250,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan** | | | | **95 %** | **95 %** | **13.553.405.000,00** | **13.863.925.300,00** | **13.844.077.300,00** | **3.198.703.790,00** | | | | | | | **16.752.108.790,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Persentase Sarana dan Prasarana pelayanan umum yang dipelihara* | | | | 95 % | 95 % | 562.070.000,00 | 559.393.000,00 | 559.393.000,00 | -2.677.000,00 | | | - | -<br>- | Kecamatan Manggala | | 751.913.091,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 562.070.000,00 | 559.393.000,00 | 559.393.000,00 | -2.677.000,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 751.913.091,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 43.580.800,00 | 38.580.800,00 | 29.580.800,00 | -14.000.000,00 | | | - | -<br>- | Kecamatan Manggala | | 71.503.790,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 8 Laporan | 8 Laporan | 43.580.800,00 | 38.580.800,00 | 29.580.800,00 | -14.000.000,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 71.503.790,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan* | | | | 95 % | 95 % | 12.947.754.200,00 | 13.265.951.500,00 | 13.255.103.500,00 | 307.349.300,00 | | | - | -<br>- | Kecamatan Manggala | | 15.928.691.909,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 12.947.754.200,00 | 13.265.951.500,00 | 13.255.103.500,00 | 307.349.300,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 15.928.691.909,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan**<br>**Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **100**<br>**95 %**<br>**%** | **100**<br>**95 %**<br>**%** | **214.076.000,00** | **217.070.440,00** | **217.070.440,00** | **26.816.189,00** | | | | | | | **240.892.189,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Masyarakat/ Kelompok Masyarakat Lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan* | | | | 100 % | 100 % | 214.076.000,00 | 217.070.440,00 | 217.070.440,00 | 2.994.440,00 | | | - | -<br>- | - | | 240.892.189,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 3 Lembaga Kemasyarakatan | 3 Lembaga Kemasyarakatan | 214.076.000,00 | 217.070.440,00 | 217.070.440,00 | 2.994.440,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 240.892.189,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan Yang Dapat Diselesaikan** | | | | **100 %** | **100 %** | **136.800.000,00** | **96.000.000,00** | **96.000.000,00** | **-136.800.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*<br>*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan* | | | | 100 %<br>1 Laporan | 100 %<br>1 Laporan | 136.800.000,00 | 96.000.000,00 | 96.000.000,00 | -40.800.000,00 | | | - | -<br>- | Kecamatan Manggala | | 0,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 136.800.000,00 | 96.000.000,00 | 96.000.000,00 | -40.800.000,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Di Tingkat Kecamatan** | | | | **95 %** | **95 %** | **10.852.951.640,00** | **10.664.167.640,00** | **10.331.360.240,00** | **-1.510.140.640,00** | | | | | | | **9.342.811.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan* | | | | 95 % | 95 % | 10.852.951.640,00 | 10.664.167.640,00 | 10.331.360.240,00 | -521.591.400,00 | | | - | -<br>- | Kecamatan Manggala | | 9.342.811.000,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.05.2.01.0007 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal* | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 10.852.951.640,00 | 10.664.167.640,00 | 10.331.360.240,00 | -521.591.400,00 | Kota Makassar, Manggala, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 9.342.811.000,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | | **KELURAHAN MANGGALA KECAMATAN MANGGALA** | | | | | | | **499.872.200,00** | **499.871.280,00** | **484.571.280,00** | **-15.300.920,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.872.200,00** | **499.871.280,00** | **484.571.280,00** | **-15.300.920,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.872.200,00** | **499.871.280,00** | **484.571.280,00** | **-15.300.920,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan**<br>**Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **100**<br>**95 %**<br>**%** | **100**<br>**95 %**<br>**%** | **499.872.200,00** | **499.871.280,00** | **484.571.280,00** | **127.800,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Masyarakat/ Kelompok Masyarakat Lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan* | | | | 100 % | 100 % | 499.872.200,00 | 499.871.280,00 | 484.571.280,00 | -15.300.920,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat Kelurahan Manggala | | 500.000.000,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 403.144.700,00 | 380.147.800,00 | 380.147.800,00 | -22.996.900,00 | Kota Makassar, Manggala, Manggala | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 350.000.000,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 2 Pokmas / Ormas | 2 Pokmas / Ormas | 96.727.500,00 | 119.723.480,00 | 104.423.480,00 | 7.695.980,00 | Kota Makassar, Manggala, Manggala | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 150.000.000,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | | **KELURAHAN ANTANG KECAMATAN MANGGALA** | | | | | | | **499.803.500,00** | **499.803.100,00** | **477.303.100,00** | **-22.500.400,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.803.500,00** | **499.803.100,00** | **477.303.100,00** | **-22.500.400,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.803.500,00** | **499.803.100,00** | **477.303.100,00** | **-22.500.400,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan<br>Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **100<br>95 %<br>%** | **100<br>95 %<br>%** | **499.803.500,00** | **499.803.100,00** | **477.303.100,00** | **196.500,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Masyarakat/ Kelompok Masyarakat Lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan* | | | | 100 % | 100 % | 499.803.500,00 | 499.803.100,00 | 477.303.100,00 | -22.500.400,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat Kelurahan Antang | | 500.000.000,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 350.000.000,00 | 349.557.980,00 | 349.557.980,00 | -442.020,00 | Kota Makassar, Manggala, Antang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 350.000.000,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 2 Pokmas / Ormas | 2 Pokmas / Ormas | 149.803.500,00 | 150.245.120,00 | 127.745.120,00 | -22.058.380,00 | Kota Makassar, Manggala, Antang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 150.000.000,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | | **KELURAHAN BANGKALA KECAMATAN MANGGALA** | | | | | | | **499.460.000,00** | **499.459.820,00** | **457.459.820,00** | **-42.000.180,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.460.000,00** | **499.459.820,00** | **457.459.820,00** | **-42.000.180,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.460.000,00** | **499.459.820,00** | **457.459.820,00** | **-42.000.180,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan<br>Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **100<br>95 %<br>%** | **100<br>95 %<br>%** | **499.460.000,00** | **499.459.820,00** | **457.459.820,00** | **540.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Masyarakat/ Kelompok Masyarakat Lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan* | | | | 100 % | 100 % | 499.460.000,00 | 499.459.820,00 | 457.459.820,00 | -42.000.180,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat Kelurahan Bangkala | | 500.000.000,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 149.049.600,00 | 261.754.700,00 | 261.754.700,00 | 112.705.100,00 | Kota Makassar, Manggala, Bangkala | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 350.000.000,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 2 Pokmas / Ormas | 2 Pokmas / Ormas | 350.410.400,00 | 237.705.120,00 | 195.705.120,00 | -154.705.280,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Manggala, Bangkala | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 150.000.000,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | | **KELURAHAN BATUA KECAMATAN MANGGALA** | | | | | | | **499.184.200,00** | **499.179.824,00** | **478.179.824,00** | **-21.004.376,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.184.200,00** | **499.179.824,00** | **478.179.824,00** | **-21.004.376,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.184.200,00** | **499.179.824,00** | **478.179.824,00** | **-21.004.376,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan<br>Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **100<br>95 %<br>%** | **100<br>95 %<br>%** | **499.184.200,00** | **499.179.824,00** | **478.179.824,00** | **815.800,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Masyarakat/ Kelompok Masyarakat Lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan* | | | | 100 % | 100 % | 499.184.200,00 | 499.179.824,00 | 478.179.824,00 | -21.004.376,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat Kelurahan Batua | | 500.000.000,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 339.184.200,00 | 339.184.200,00 | 339.184.200,00 | 0,00 | Kota Makassar, Manggala, Batua | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 350.000.000,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 2 Pokmas / Ormas | 2 Pokmas / Ormas | 160.000.000,00 | 159.995.624,00 | 138.995.624,00 | -21.004.376,00 | Kota Makassar, Manggala, Batua | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 150.000.000,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | | **KELURAHAN BORONG KECAMATAN MANGGALA** | | | | | | | **494.493.800,00** | **494.475.920,00** | **480.475.920,00** | **-14.017.880,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **494.493.800,00** | **494.475.920,00** | **480.475.920,00** | **-14.017.880,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **494.493.800,00** | **494.475.920,00** | **480.475.920,00** | **-14.017.880,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **100 95 % %** | **100 95 % %** | **494.493.800,00** | **494.475.920,00** | **480.475.920,00** | **5.506.200,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Masyarakat/ Kelompok Masyarakat Lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan* | | | | 100 % | 100 % | 494.493.800,00 | 494.475.920,00 | 480.475.920,00 | -14.017.880,00 | | | - | - - | Masyarakat Kelurahan Borong | | 500.000.000,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 349.921.800,00 | 349.921.800,00 | 349.921.800,00 | 0,00 | Kota Makassar, Manggala, Borong | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | - - | | | 350.000.000,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 2 Pokmas / Ormas | 2 Pokmas / Ormas | 144.572.000,00 | 144.554.120,00 | 130.554.120,00 | -14.017.880,00 | Kota Makassar, Manggala, Borong | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | - - | | | 150.000.000,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | | **KELURAHAN TAMANGAPA KECAMATAN MANGGALA** | | | | | | | **499.727.780,00** | **499.725.380,00** | **479.845.480,00** | **-19.882.300,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.727.780,00** | **499.725.380,00** | **479.845.480,00** | **-19.882.300,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.727.780,00** | **499.725.380,00** | **479.845.480,00** | **-19.882.300,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **100 95 % %** | **100 95 % %** | **499.727.780,00** | **499.725.380,00** | **479.845.480,00** | **272.220,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Masyarakat/ Kelompok Masyarakat Lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan* | | | | 100 % | 100 % | 499.727.780,00 | 499.725.380,00 | 479.845.480,00 | -19.882.300,00 | | | - | - - | Masyarakat Kelurahan Tamangapa | | 500.000.000,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 349.728.200,00 | 350.986.100,00 | 351.106.200,00 | 1.378.000,00 | Kota Makassar, Manggala, Tamangapa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | - - | | | 350.000.000,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 2 Pokmas / Ormas | 2 Pokmas / Ormas | 149.999.580,00 | 148.739.280,00 | 128.739.280,00 | -21.260.300,00 | Kota Makassar, Manggala, Tamangapa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 150.000.000,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | | **KELURAHAN BIRING ROMANG KECAMATAN MANGGALA** | | | | | | | **499.900.050,00** | **499.899.670,00** | **473.199.670,00** | **-26.700.380,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.900.050,00** | **499.899.670,00** | **473.199.670,00** | **-26.700.380,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.900.050,00** | **499.899.670,00** | **473.199.670,00** | **-26.700.380,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **100 95 % %** | **100 95 % %** | **499.900.050,00** | **499.899.670,00** | **473.199.670,00** | **99.950,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Masyarakat/ Kelompok Masyarakat Lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan* | | | | 100 % | 100 % | 499.900.050,00 | 499.899.670,00 | 473.199.670,00 | -26.700.380,00 | | | - | - - | Masyarakat Kelurahan Biring Romang | | 500.000.000,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 249.908.550,00 | 249.908.550,00 | 249.908.550,00 | 0,00 | Kota Makassar, Manggala, Biring Romang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 350.000.000,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 2 Pokmas / Ormas | 2 Pokmas / Ormas | 249.991.500,00 | 249.991.120,00 | 223.291.120,00 | -26.700.380,00 | Kota Makassar, Manggala, Biring Romang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | - - | | | 150.000.000,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | | **KELURAHAN BITOWA KECAMATAN MANGGALA** | | | | | | | **499.639.440,00** | **499.626.780,00** | **467.626.780,00** | **-32.012.660,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.639.440,00** | **499.626.780,00** | **467.626.780,00** | **-32.012.660,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.639.440,00** | **499.626.780,00** | **467.626.780,00** | **-32.012.660,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **499.639.440,00** | **499.626.780,00** | **467.626.780,00** | **360.560,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Masyarakat/ Kelompok Masyarakat Lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan* | | | | 100 % | 100 % | 499.639.440,00 | 499.626.780,00 | 467.626.780,00 | -32.012.660,00 | | | - | - - | - | | 500.000.000,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 299.656.500,00 | 299.656.500,00 | 299.656.500,00 | 0,00 | Kota Makassar, Manggala, Bitowo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | - - | | | 350.000.000,00 | KECAMATAN MANGGALA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 2 Pokmas / Ormas | 2 Pokmas / Ormas | 199.982.940,00 | 199.970.280,00 | 167.970.280,00 | -32.012.660,00 | Kota Makassar, Manggala, Bitowo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 150.000.000,00 | KECAMATAN MANGGALA |
| | | **KECAMATAN MARISO** | | | | | | | **29.823.220.706,00** | **32.517.465.567,00** | **32.414.542.336,00** | **2.591.321.630,00** | | | | | | | **34.873.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **29.823.220.706,00** | **32.517.465.567,00** | **32.414.542.336,00** | **2.591.321.630,00** | | | | | | | **34.873.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **29.823.220.706,00** | **32.517.465.567,00** | **32.414.542.336,00** | **2.591.321.630,00** | | | | | | | **34.873.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**<br>**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik** | | | | **100**<br>**90 %**<br>**%** | **100**<br>**90 %**<br>**%** | **14.098.180.906,00** | **15.452.310.955,00** | **15.451.382.024,00** | **1.966.819.094,00** | | | | | | | **16.065.000.000,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat daerah* | | | | 100 % | 100 % | 87.240.640,00 | 87.057.440,00 | 58.137.440,00 | -29.103.200,00 | | | - | -<br>- | Kecamatan Mariso | | 120.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 26.734.600,00 | 26.734.600,00 | 15.814.600,00 | -10.920.000,00 | Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.460.000,00 | 10.460.000,00 | 7.460.000,00 | -3.000.000,00 | Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.100.000,00 | 12.100.000,00 | 9.100.000,00 | -3.000.000,00 | Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.428.640,00 | 12.428.640,00 | 9.428.640,00 | -3.000.000,00 | Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.466.400,00 | 10.466.400,00 | 7.466.400,00 | -3.000.000,00 | Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 8.500.000,00 | 8.316.800,00 | 5.316.800,00 | -3.183.200,00 | Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.551.000,00 | 6.551.000,00 | 3.551.000,00 | -3.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 14 kali | 14 kali | 12.327.628.782,00 | 13.004.193.443,00 | 12.982.604.164,00 | 654.975.382,00 | | | - | -<br>- | Kecamatan Mariso | | 13.120.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 14 Orang/bulan | 14 Orang/bulan | 11.289.738.582,00 | 11.939.543.243,00 | 11.939.553.964,00 | 649.815.382,00 | Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 12.000.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 663.720.000,00 | 690.120.000,00 | 668.520.000,00 | 4.800.000,00 | Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 700.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 109.215.000,00 | 109.215.000,00 | 109.215.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 120.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 264.955.200,00 | 265.315.200,00 | 265.315.200,00 | 360.000,00 | Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 300.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 233.095.000,00 | 773.395.000,00 | 818.395.000,00 | 585.300.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 550.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 288 Paket | 288 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 200.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 137.095.000,00 | 137.395.000,00 | 137.395.000,00 | 300.000,00 | Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 150.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 8 Orang | 182 Orang | 96.000.000,00 | 636.000.000,00 | 681.000.000,00 | 585.000.000,00 | Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 200.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 130.005.600,00 | 128.972.000,00 | 112.972.000,00 | -17.033.600,00 | | | - | -<br>- | - | | 275.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 15 Paket | 15 Paket | 11.505.000,00 | 11.505.000,00 | 11.505.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 10 Paket | 10 Paket | 17.400.600,00 | 24.367.000,00 | 24.367.000,00 | 6.966.400,00 | Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 45.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 5 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 50.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 55.100.000,00 | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | -50.000.000,00 | Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 20 Laporan | 8 Laporan | 46.000.000,00 | 88.000.000,00 | 72.000.000,00 | 26.000.000,00 | Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 60.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | Kecamatan Mariso | | 550.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 150.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 12 Unit | 12 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 200.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 9 Unit | 9 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 972.200.884,00 | 1.006.973.072,00 | 1.036.973.420,00 | 64.772.536,00 | | | - | -<br>- | - | | 1.000.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 186.448.600,00 | 186.928.600,00 | 186.928.600,00 | 480.000,00 | Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 200.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 287.468.084,00 | 213.596.072,00 | 213.596.420,00 | -73.871.664,00 | Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 300.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 498.284.200,00 | 606.448.400,00 | 636.448.400,00 | 138.164.200,00 | Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 500.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 348.010.000,00 | 451.720.000,00 | 442.300.000,00 | 94.290.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 450.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 39.270.000,00 | 39.270.000,00 | 36.130.000,00 | -3.140.000,00 | Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 50.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 20 Unit | 20 Unit | 142.740.000,00 | 285.590.000,00 | 279.310.000,00 | 136.570.000,00 | Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 150.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 23 Unit | 23 Unit | 28.400.000,00 | 28.400.000,00 | 28.400.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 125.400.000,00 | 86.260.000,00 | 86.260.000,00 | -39.140.000,00 | Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 200.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 62 Unit | 62 Unit | 12.200.000,00 | 12.200.000,00 | 12.200.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang Mendapat Pemberdayaan Persentase Sarana dan Prasarana Lingkup Kelurahan dalam Kondisi Baik** | | | | **100 95 % %** | **100 95 % %** | **8.164.336.400,00** | **8.202.805.400,00** | **8.285.082.500,00** | **1.935.663.600,00** | | | | | | | **10.100.000.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang Mendapat Pemberdayaan* | | | | 100 % | 100 % | 50.254.000,00 | 40.264.000,00 | 40.264.000,00 | -9.990.000,00 | | | - | -<br>- | Kecamatan Mariso | | 100.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 50.254.000,00 | 40.264.000,00 | 40.264.000,00 | -9.990.000,00 | Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat* | | | | 100 % | 100 % | 8.114.082.400,00 | 8.162.541.400,00 | 8.244.818.500,00 | 130.736.100,00 | | | - | -<br>- | Kecamatan Mariso | | 10.000.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 8.114.082.400,00 | 8.162.541.400,00 | 8.244.818.500,00 | 130.736.100,00 | Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 10.000.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **159.440.400,00** | **154.440.400,00** | **150.840.400,00** | **40.559.600,00** | | | | | | | **200.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | | | | - | - | 159.440.400,00 | 154.440.400,00 | 150.840.400,00 | -8.600.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 200.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 159.440.400,00 | 154.440.400,00 | 150.840.400,00 | -8.600.000,00 | Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 200.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada** | | | | **95 %** | **95 %** | **483.430.000,00** | **483.430.000,00** | **483.430.000,00** | **24.570.000,00** | | | | | | | **508.000.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | | | | 100 % | 100 % | 483.430.000,00 | 483.430.000,00 | 483.430.000,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | Kecamatan Mariso | | 508.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 375.430.000,00 | 375.430.000,00 | 375.430.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 400.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 9 Laporan | 9 Laporan | 108.000.000,00 | 108.000.000,00 | 108.000.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 108.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **6.917.833.000,00** | **8.224.478.812,00** | **8.043.807.412,00** | **1.082.167.000,00** | | | | | | | **8.000.000.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 6.917.833.000,00 | 8.224.478.812,00 | 8.043.807.412,00 | 1.125.974.412,00 | | | - | -<br>- | - | | 8.000.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.05.2.01.0007 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal* | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 6.917.833.000,00 | 8.224.478.812,00 | 8.043.807.412,00 | 1.125.974.412,00 | Kota Makassar, Mariso, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 8.000.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | | **KELURAHAN BONTORANNU KECAMATAN MARISO** | | | | | | | **499.990.300,00** | **499.990.300,00** | **478.940.300,00** | **-21.050.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.990.300,00** | **499.990.300,00** | **478.940.300,00** | **-21.050.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.990.300,00** | **499.990.300,00** | **478.940.300,00** | **-21.050.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan** | | | | **95 %** | **95 %** | **499.990.300,00** | **499.990.300,00** | **478.940.300,00** | **9.700,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang Mendapat Pemberdayaan Persentase Sarana dan Prasarana Lingkup Kelurahan dalam Kondisi Baik* | | | | 100 %<br>95 % | 100 %<br>95 % | 499.990.300,00 | 499.990.300,00 | 478.940.300,00 | -21.050.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Masyarakat Kelurahan Bontorannu | | 500.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 372.644.300,00 | 372.644.300,00 | 372.644.300,00 | 0,00 | Kota Makassar, Mariso, Bontorannu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 127.346.000,00 | 127.346.000,00 | 106.296.000,00 | -21.050.000,00 | Kota Makassar, Mariso, Bontorannu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | | **KELURAHAN KAMPUNG BUYANG KECAMATAN MARISO** | | | | | | | **430.783.024,00** | **427.659.024,00** | **376.659.024,00** | **-54.124.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **430.783.024,00** | **427.659.024,00** | **376.659.024,00** | **-54.124.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **430.783.024,00** | **427.659.024,00** | **376.659.024,00** | **-54.124.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan** | | | | **95 %** | **95 %** | **430.783.024,00** | **427.659.024,00** | **376.659.024,00** | **69.216.976,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang Mendapat Pemberdayaan Persentase Sarana dan Prasarana Lingkup Kelurahan dalam Kondisi Baik* | | | | 100 % 95 % | 100 % 95 % | 430.783.024,00 | 427.659.024,00 | 376.659.024,00 | -54.124.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Masyarakat Kelurahan Kampung Buyang | | 500.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 149.718.000,00 | 125.718.000,00 | 125.718.000,00 | -24.000.000,00 | Kota Makassar, Mariso, Kampung Buyang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 281.065.024,00 | 301.941.024,00 | 250.941.024,00 | -30.124.000,00 | Kota Makassar, Mariso, Kampung Buyang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | | **KELURAHAN KUNJUNG MAE KECAMATAN MARISO** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **461.000.000,00** | **-39.000.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **461.000.000,00** | **-39.000.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **461.000.000,00** | **-39.000.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan** | | | | **95 %** | **95 %** | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **461.000.000,00** | **0,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang Mendapat Pemberdayaan Persentase Sarana dan Prasarana Lingkup Kelurahan dalam Kondisi Baik* | | | | 100 % 95 % | 100 % 95 % | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 461.000.000,00 | -39.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Masyarakat Kelurahan Kunjung Mae | | 500.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 303.343.900,00 | 303.343.900,00 | 255.844.900,00 | -47.499.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 196.656.100,00 | 196.656.100,00 | 205.155.100,00 | 8.499.000,00 | Kota Makassar, Mariso, Kunjung Mae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | | **KELURAHAN LETTE KECAMATAN MARISO** | | | | | | | **495.766.930,00** | **495.766.930,00** | **468.916.900,00** | **-26.850.030,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **495.766.930,00** | **495.766.930,00** | **468.916.900,00** | **-26.850.030,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **495.766.930,00** | **495.766.930,00** | **468.916.900,00** | **-26.850.030,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan** | | | | **95 %** | **95 %** | **495.766.930,00** | **495.766.930,00** | **468.916.900,00** | **4.233.070,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang Mendapat Pemberdayaan Persentase Sarana dan Prasarana Lingkup Kelurahan dalam Kondisi Baik* | | | | 100 %<br>95 % | 100 %<br>95 % | 495.766.930,00 | 495.766.930,00 | 468.916.900,00 | -26.850.030,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Masyarakat Kelurahan Lette | | 500.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 396.377.330,00 | 271.455.330,00 | 271.605.300,00 | -124.772.030,00 | Kota Makassar, Mariso, Lette | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 99.389.600,00 | 224.311.600,00 | 197.311.600,00 | 97.922.000,00 | Kota Makassar, Mariso, Lette | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | | **KELURAHAN MARIO KECAMATAN MARISO** | | | | | | | **499.999.800,00** | **490.142.200,00** | **445.722.200,00** | **-54.277.600,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.999.800,00** | **490.142.200,00** | **445.722.200,00** | **-54.277.600,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.999.800,00** | **490.142.200,00** | **445.722.200,00** | **-54.277.600,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan** | | | | **95 %** | **95 %** | **499.999.800,00** | **490.142.200,00** | **445.722.200,00** | **200,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang Mendapat Pemberdayaan* | | | | 100 % | 100 % | 499.999.800,00 | 490.142.200,00 | 445.722.200,00 | -54.277.600,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Masyarakat Kelurahan Mario | | 500.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 373.257.800,00 | 363.400.200,00 | 363.400.200,00 | -9.857.600,00 | Kota Makassar, Mariso, Mario | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 2 Pokmas / Ormas | 2 Pokmas / Ormas | 126.742.000,00 | 126.742.000,00 | 82.322.000,00 | -44.420.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Mariso, Mario | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | | **KELURAHAN MARISO KECAMATAN MARISO** | | | | | | | **499.999.940,00** | **499.999.940,00** | **471.599.940,00** | **-28.400.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.999.940,00** | **499.999.940,00** | **471.599.940,00** | **-28.400.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.999.940,00** | **499.999.940,00** | **471.599.940,00** | **-28.400.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan** | | | | **95 %** | **95 %** | **499.999.940,00** | **499.999.940,00** | **471.599.940,00** | **60,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang Mendapat Pemberdayaan Persentase Sarana dan Prasarana Lingkup Kelurahan dalam Kondisi Baik* | | | | 100 % 95 % | 100 % 95 % | 499.999.940,00 | 499.999.940,00 | 471.599.940,00 | -28.400.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Masyarakat Kelurahan Mariso | | 500.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 292.263.000,00 | 292.263.000,00 | 292.263.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Mariso, Mariso | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 2 Pokmas / Ormas | 2 Pokmas / Ormas | 207.736.940,00 | 207.736.940,00 | 179.336.940,00 | -28.400.000,00 | Kota Makassar, Mariso, Mariso | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | | **KELURAHAN MATTOANGIN KECAMATAN MARISO** | | | | | | | **497.278.740,00** | **497.278.740,00** | **482.278.740,00** | **-15.000.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **497.278.740,00** | **497.278.740,00** | **482.278.740,00** | **-15.000.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **497.278.740,00** | **497.278.740,00** | **482.278.740,00** | **-15.000.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan** | | | | **95 %** | **95 %** | **497.278.740,00** | **497.278.740,00** | **482.278.740,00** | **2.721.260,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang Mendapat Pemberdayaan Persentase Sarana dan Prasarana Lingkup Kelurahan dalam Kondisi Baik* | | | | 100 % 95 % | 100 % 95 % | 497.278.740,00 | 497.278.740,00 | 482.278.740,00 | -15.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Masyarakat Kelurahan Mattoangin | | 500.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 278.918.100,00 | 278.918.100,00 | 278.918.100,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Mariso, Mattoangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 218.360.640,00 | 218.360.640,00 | 203.360.640,00 | -15.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Mariso, Mattoangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | | **KELURAHAN PANAMBUNGAN KECAMATAN MARISO** | | | | | | | **499.976.500,00** | **499.976.500,00** | **484.976.500,00** | **-15.000.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.976.500,00** | **499.976.500,00** | **484.976.500,00** | **-15.000.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.976.500,00** | **499.976.500,00** | **484.976.500,00** | **-15.000.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan** | | | | **95 %** | **95 %** | **499.976.500,00** | **499.976.500,00** | **484.976.500,00** | **23.500,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang Mendapat Pemberdayaan Persentase Sarana dan Prasarana Lingkup Kelurahan dalam Kondisi Baik* | | | | 100 % 95 % | 100 % 95 % | 499.976.500,00 | 499.976.500,00 | 484.976.500,00 | -15.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Masyarakat Kelurahan Panambungan | | 500.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 426.713.500,00 | 426.713.500,00 | 426.713.500,00 | 0,00 | Kota Makassar, Mariso, Panambungan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 5 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas | 73.263.000,00 | 73.263.000,00 | 58.263.000,00 | -15.000.000,00 | Kota Makassar, Mariso, Panambungan | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | | **KELURAHAN TAMARUNANG KECAMATAN MARISO** | | | | | | | **499.884.060,00** | **498.784.060,00** | **432.264.060,00** | **-67.620.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.884.060,00** | **498.784.060,00** | **432.264.060,00** | **-67.620.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.884.060,00** | **498.784.060,00** | **432.264.060,00** | **-67.620.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan** | | | | **95 %** | **95 %** | **499.884.060,00** | **498.784.060,00** | **432.264.060,00** | **115.940,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang Mendapat Pemberdayaan Persentase Sarana dan Prasarana Lingkup Kelurahan dalam Kondisi Baik* | | | | 100 % 95 % | 100 % 95 % | 499.884.060,00 | 498.784.060,00 | 432.264.060,00 | -67.620.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Masyarakat Kelurahan Tamarunang | | 500.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 359.843.060,00 | 359.843.060,00 | 308.323.060,00 | -51.520.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Mariso, Tamarunang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 140.041.000,00 | 138.941.000,00 | 123.941.000,00 | -16.100.000,00 | Kota Makassar, Mariso, Tamarunang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN MARISO |
| | | **KECAMATAN PANAKKUKANG** | | | | | | | **47.997.248.981,00** | **52.203.222.784,00** | **51.687.416.350,00** | **3.690.167.369,00** | | | | | | | **58.803.548.510,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **47.997.248.981,00** | **52.203.222.784,00** | **51.687.416.350,00** | **3.690.167.369,00** | | | | | | | **58.803.548.510,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **47.997.248.981,00** | **52.203.222.784,00** | **51.687.416.350,00** | **3.690.167.369,00** | | | | | | | **58.803.548.510,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah<br>Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas** | | | | **100<br>90 %<br>%** | **100<br>90 %<br>%** | **17.214.199.499,00** | **19.740.000.702,00** | **19.710.642.929,00** | **6.161.475.771,00** | | | | | | | **23.375.675.270,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah* | | | | 100 % | 100 % | 98.144.000,00 | 98.944.000,00 | 57.684.000,00 | -40.460.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Kecamatan Panakkukang | | 100.794.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 28.499.000,00 | 28.499.000,00 | 21.239.000,00 | -7.260.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 22.716.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.250.000,00 | 9.250.000,00 | 6.250.000,00 | -3.000.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 15.193.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.250.000,00 | 9.250.000,00 | 6.250.000,00 | -3.000.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 15.193.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.250.000,00 | 9.250.000,00 | 6.250.000,00 | -3.000.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 11.963.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.250.000,00 | 9.250.000,00 | 6.250.000,00 | -3.000.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 11.963.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 16.645.000,00 | 16.645.000,00 | 4.645.000,00 | -12.000.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 11.883.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 16.000.000,00 | 16.800.000,00 | 6.800.000,00 | -9.200.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 11.883.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.01.2.01.0011 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | - | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 14.279.581.299,00 | 15.589.050.102,00 | 15.577.093.529,00 | 1.297.512.230,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Kecamatan Panakkukang | | 20.331.846.835,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 14 Orang/bulan | 14 Orang/bulan | 13.285.991.539,00 | 14.581.220.342,00 | 14.581.263.769,00 | 1.295.272.230,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 19.360.670.435,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 687.561.000,00 | 711.201.000,00 | 711.201.000,00 | 23.640.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 653.040.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 280.331.000,00 | 270.931.000,00 | 270.931.000,00 | -9.400.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 241.834.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 25.697.760,00 | 25.697.760,00 | 13.697.760,00 | -12.000.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 76.302.400,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Tersedianya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 96.000.000,00 | 1.032.000.000,00 | 1.054.500.000,00 | 958.500.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | Kecamatan Panakkukang | | 393.380.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 270 Paket | 270 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 218.380.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 20 Orang | 20 Orang | 96.000.000,00 | 1.032.000.000,00 | 1.054.500.000,00 | 958.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 175.000.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 264.022.800,00 | 278.151.000,00 | 270.151.000,00 | 6.128.200,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Kecamatan Panakkukang | | 576.445.410,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 6 Paket | 19.560.000,00 | 19.560.000,00 | 19.560.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 46.082.175,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 5.952.800,00 | 20.371.000,00 | 20.371.000,00 | 14.418.200,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 285.584.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 105.010.000,00 | 91.020.000,00 | 91.020.000,00 | -13.990.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 69.386.850,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 93.500.000,00 | 37.200.000,00 | 37.200.000,00 | -56.300.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 39.392.385,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 20 Laporan | 20 Laporan | 40.000.000,00 | 110.000.000,00 | 102.000.000,00 | 62.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 136.000.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Tersedianya Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Kecamatan Panakkukang | | 709.824.375,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 0,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 13 Unit | 13 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 120.000.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 50 Unit | 50 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 300.000.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 289.824.375,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 0,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 1.758.252.400,00 | 1.895.122.600,00 | 1.926.001.400,00 | 167.749.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | Kecamatan Panakkukang | | 693.218.800,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 313.970.000,00 | 335.125.200,00 | 330.284.400,00 | 16.314.400,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 384.960.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.444.282.400,00 | 1.559.997.400,00 | 1.595.717.000,00 | 151.434.600,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 308.258.800,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tersedianya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 718.199.000,00 | 846.733.000,00 | 825.213.000,00 | 107.014.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | Kecamatan Panakkukang | | 570.165.850,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 39.270.000,00 | 39.270.000,00 | 36.130.000,00 | -3.140.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 49.240.600,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 24 Unit | 24 Unit | 256.834.000,00 | 272.190.000,00 | 253.810.000,00 | -3.024.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 253.810.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 85 Unit | 85 Unit | 97.800.000,00 | 92.100.000,00 | 92.100.000,00 | -5.700.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 91.080.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 25.000.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 324.295.000,00 | 443.173.000,00 | 443.173.000,00 | 118.878.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 151.035.250,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan** | | | | **100 %** | **100 %** | **17.778.559.440,00** | **17.705.090.040,00** | **17.736.482.579,00** | **4.412.418.770,00** | | | | | | | **22.190.978.210,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | 100 % | - | 268.771.600,00 | 177.572.800,00 | 140.804.800,00 | -127.966.800,00 | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | Kecamatan Panakkukang | | 110.393.560,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 268.771.600,00 | 177.572.800,00 | 140.804.800,00 | -127.966.800,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | -<br>- | | | 110.393.560,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat* | | | | 100 % | 100 % | 17.509.787.840,00 | 17.527.517.240,00 | 17.595.677.779,00 | 85.889.939,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | Kecamatan Panakkukang | | 22.080.584.650,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 17.509.787.840,00 | 17.527.517.240,00 | 17.595.677.779,00 | 85.889.939,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 22.080.584.650,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **100 %** | **100 %** | **214.348.000,00** | **182.410.000,00** | **182.410.000,00** | **34.965.230,00** | | | | | | | **249.313.230,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 214.348.000,00 | 182.410.000,00 | 182.410.000,00 | -31.938.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | Kecamatan Panakkukang | | 249.313.230,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 12 Lembaga Kemasyarakatan | 12 Lembaga Kemasyarakatan | 214.348.000,00 | 182.410.000,00 | 182.410.000,00 | -31.938.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 249.313.230,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan Yang Dapat Diselesaikan** | | | | **75 %** | **75 %** | **610.563.000,00** | **586.563.000,00** | **605.185.000,00** | **464.489.700,00** | | | | | | | **1.075.052.700,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum* | | | | 100 % | 100 % | 610.563.000,00 | 586.563.000,00 | 605.185.000,00 | -5.378.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | Kecamatan Panakkukang | | 1.075.052.700,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 477.102.000,00 | 453.102.000,00 | 471.724.000,00 | -5.378.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 775.706.100,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 133.461.000,00 | 133.461.000,00 | 133.461.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 299.346.600,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan** | | | | **100 %** | **100 %** | **12.179.579.042,00** | **13.989.159.042,00** | **13.452.695.842,00** | **-267.049.942,00** | | | | | | | **11.912.529.100,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah* | | | | 98 % | 98 % | 12.179.579.042,00 | 13.989.159.042,00 | 13.452.695.842,00 | 1.273.116.800,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | Kecamatan Panakkukang | | 11.912.529.100,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.05.2.01.0007 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal* | | | | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 12.179.579.042,00 | 13.989.159.042,00 | 13.452.695.842,00 | 1.273.116.800,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 11.912.529.100,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | | **KELURAHAN TAMAMAUNG KECAMATAN PANAKKUKANG** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **468.499.599,00** | **-31.500.401,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **468.499.599,00** | **-31.500.401,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **468.499.599,00** | **-31.500.401,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **100 %** | **100 %** | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **468.499.599,00** | **0,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | | | | 100 % | 100 % | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 468.499.599,00 | -31.500.401,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | Kelurahan Tamamaung | | 500.000.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 299.523.600,00 | 299.517.699,00 | 299.517.699,00 | -5.901,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 300.000.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 200.476.400,00 | 200.482.301,00 | 168.981.900,00 | -31.494.500,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Tamamaung | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 200.000.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | | **KELURAHAN SINRIJALA KECAMATAN PANAKKUKANG** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **477.499.753,00** | **-22.500.247,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **477.499.753,00** | **-22.500.247,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **477.499.753,00** | **-22.500.247,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **100 %** | **100 %** | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **477.499.753,00** | **0,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | | | | 100 % | 100 % | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 477.499.753,00 | -22.500.247,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | Kelurahan Sinrijala | | 500.000.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 366.951.400,00 | 348.074.553,00 | 348.074.553,00 | -18.876.847,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Sinrijala | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 300.000.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 133.048.600,00 | 151.925.447,00 | 129.425.200,00 | -3.623.400,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Sinrijala | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 200.000.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | | **KELURAHAN KARUWISI KECAMATAN PANAKKUKANG** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **465.368.000,00** | **-34.632.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **465.368.000,00** | **-34.632.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **465.368.000,00** | **-34.632.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **100 %** | **100 %** | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **465.368.000,00** | **0,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | | | | 100 % | 100 % | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 465.368.000,00 | -34.632.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | Kelurahan Karuwisi | | 500.000.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 313.100.700,00 | 310.781.900,00 | 304.649.900,00 | -8.450.800,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Karuwisi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 300.000.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 186.899.300,00 | 189.218.100,00 | 160.718.100,00 | -26.181.200,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Karuwisi | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 200.000.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | | **KELURAHAN KARUWISI UTARA KECAMATAN PANAKKUKANG** | | | | | | | **499.851.019,00** | **499.851.019,00** | **472.810.599,00** | **-27.040.420,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.851.019,00** | **499.851.019,00** | **472.810.599,00** | **-27.040.420,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.851.019,00** | **499.851.019,00** | **472.810.599,00** | **-27.040.420,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **100 %** | **100 %** | **499.851.019,00** | **499.851.019,00** | **472.810.599,00** | **148.981,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | | | | 100 % | 100 % | 499.851.019,00 | 499.851.019,00 | 472.810.599,00 | -27.040.420,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | Kelurahan Karuwisi Utara | | 500.000.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 343.479.259,00 | 357.888.458,00 | 357.873.599,00 | 14.394.340,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Karuwisi Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 300.000.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 156.371.760,00 | 141.962.561,00 | 114.937.000,00 | -41.434.760,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Karuwisi Utara | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 200.000.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | | **KELURAHAN PANAIKANG KECAMATAN PANAKKUKANG** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **474.912.000,00** | **-25.088.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **474.912.000,00** | **-25.088.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **474.912.000,00** | **-25.088.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **100 %** | **100 %** | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **474.912.000,00** | **0,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | | | | 100 % | 100 % | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 474.912.000,00 | -25.088.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | Kelurahan Panaikang | | 500.000.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 362.471.800,00 | 376.450.899,00 | 372.362.899,00 | 9.891.099,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 300.000.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 137.528.200,00 | 123.549.101,00 | 102.549.101,00 | -34.979.099,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 200.000.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | **KELURAHAN PAROPO KECAMATAN PANAKKUKANG** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **480.000.000,00** | **-20.000.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **480.000.000,00** | **-20.000.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **480.000.000,00** | **-20.000.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **100 %** | **100 %** | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **480.000.000,00** | **0,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | | | | 100 % | 100 % | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 480.000.000,00 | -20.000.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | Kelurahan Paropo | | 500.000.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 332.044.000,00 | 332.044.000,00 | 332.044.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Paropo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 300.000.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 167.956.000,00 | 167.956.000,00 | 147.956.000,00 | -20.000.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Paropo | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 200.000.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | | **KELURAHAN KARAMPUANG KECAMATAN PANAKKUKANG** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **476.909.700,00** | **-23.090.300,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **476.909.700,00** | **-23.090.300,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **476.909.700,00** | **-23.090.300,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **100 %** | **100 %** | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **476.909.700,00** | **0,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | | | | 100 % | 100 % | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 476.909.700,00 | -23.090.300,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | Kelurahan Karampuang | | 500.000.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 359.928.000,00 | 358.419.300,00 | 358.329.000,00 | -1.599.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Karampuang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 300.000.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 140.072.000,00 | 141.580.700,00 | 118.580.700,00 | -21.491.300,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Karampuang | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 200.000.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | | **KELURAHAN PANDANG KECAMATAN PANAKKUKANG** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **481.999.999,00** | **-18.000.001,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **481.999.999,00** | **-18.000.001,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **481.999.999,00** | **-18.000.001,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **100 %** | **100 %** | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **481.999.999,00** | **0,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | | | | 100 % | 100 % | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 481.999.999,00 | -18.000.001,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | Kelurahan Pandang | | 500.000.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 386.495.000,00 | 387.625.499,00 | 387.625.499,00 | 1.130.499,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Pandang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 300.000.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 113.505.000,00 | 112.374.501,00 | 94.374.500,00 | -19.130.500,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Pandang | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 200.000.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | | **KELURAHAN PAMPANG KECAMATAN PANAKKUKANG** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **468.784.000,00** | **-31.216.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **468.784.000,00** | **-31.216.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **468.784.000,00** | **-31.216.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **100 %** | **-** | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **468.784.000,00** | **0,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | | | | 100 % | - | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 468.784.000,00 | -31.216.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | Kelurahan Pampang | | 500.000.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 299.523.600,00 | 302.199.400,00 | 297.983.400,00 | -1.540.200,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Pampang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 300.000.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 200.476.400,00 | 197.800.600,00 | 170.800.600,00 | -29.675.800,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Pampang | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 200.000.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | | **KELURAHAN TELLO BARU KECAMATAN PANAKKUKANG** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **481.000.000,00** | **-19.000.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **481.000.000,00** | **-19.000.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **481.000.000,00** | **-19.000.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **100 %** | **100 %** | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **481.000.000,00** | **0,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | | | | 100 % | 100 % | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 481.000.000,00 | -19.000.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | Kelurahan Tello Baru | | 500.000.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 385.113.500,00 | 382.139.800,00 | 382.139.800,00 | -2.973.700,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Tello Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 300.000.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 114.886.500,00 | 117.860.200,00 | 98.860.200,00 | -16.026.300,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Tello Baru | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 200.000.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | | **KELURAHAN MASALE KECAMATAN PANAKKUKANG** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **466.500.000,00** | **-33.500.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **466.500.000,00** | **-33.500.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **466.500.000,00** | **-33.500.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **100 %** | **100 %** | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **466.500.000,00** | **0,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | | | | 100 % | 100 % | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 466.500.000,00 | -33.500.000,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | Kelurahan Masale | | 500.000.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 250.085.000,00 | 247.650.000,00 | 247.650.000,00 | -2.435.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Masale | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 300.000.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 249.915.000,00 | 252.350.000,00 | 218.850.000,00 | -31.065.000,00 | Kota Makassar, Panakkukang, Masale | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | -<br>- | | | 200.000.000,00 | KECAMATAN PANAKKUKANG |
| | | **KECAMATAN RAPPOCINI** | | | | | | | **43.811.000.262,00** | **50.703.690.982,00** | **50.292.309.802,00** | **6.481.309.540,00** | | | | | | | **49.532.235.479,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **43.811.000.262,00** | **50.703.690.982,00** | **50.292.309.802,00** | **6.481.309.540,00** | | | | | | | **49.532.235.479,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **43.811.000.262,00** | **50.703.690.982,00** | **50.292.309.802,00** | **6.481.309.540,00** | | | | | | | **49.532.235.479,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**<br>**Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas** | | | | **100**<br>**90 %**<br>**%** | **100**<br>**90 %**<br>**%** | **14.858.324.594,00** | **20.287.028.474,00** | **20.435.073.914,00** | **4.626.896.708,00** | | | | | | | **19.485.221.302,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun* | | | | 100 % | 100 % | 62.304.080,00 | 61.022.080,00 | 37.056.080,00 | -25.248.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | SKPD | | 88.672.145,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 13.626.520,00 | 13.626.520,00 | 7.626.520,00 | -6.000.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 17.877.340,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 3 Dokumen | 1 Dokumen | 9.311.640,00 | 9.319.640,00 | 6.319.640,00 | -2.992.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 17.877.340,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 3 Dokumen | 1 Dokumen | 8.432.640,00 | 9.447.640,00 | 6.447.640,00 | -1.985.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 15.031.585,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 3 Dokumen | 1 Dokumen | 8.491.640,00 | 8.491.640,00 | 5.491.640,00 | -3.000.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 13.154.080,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 3 Dokumen | 1 Dokumen | 7.552.640,00 | 7.552.640,00 | 4.552.640,00 | -3.000.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 13.154.080,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 3 Laporan | 1 Laporan | 14.889.000,00 | 12.584.000,00 | 6.618.000,00 | -8.271.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 11.577.720,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Indeks kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan)* | | | | 100 % | 100 % | 12.977.501.114,00 | 17.549.096.834,00 | 17.531.999.774,00 | 4.554.498.660,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | ASN | | 17.515.208.125,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 104 Orang/ bulan | 104 Orang/ bulan | 11.944.888.004,00 | 16.480.218.724,00 | 16.480.281.664,00 | 4.535.393.660,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 16.624.784.257,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 734.640.000,00 | 768.145.000,00 | 750.985.000,00 | 16.345.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - - | | | 623.578.026,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 132.567.600,00 | 134.967.600,00 | 134.967.600,00 | 2.400.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 135.593.338,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 165.405.510,00 | 165.765.510,00 | 165.765.510,00 | 360.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 131.252.504,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.01.2.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | *Indeks kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan, dan Keuangan)* | | | | 100 % | 100 % | 13.520.000,00 | 29.326.000,00 | 29.326.000,00 | 15.806.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | SKPD | | 19.730.550,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.01.2.04.0004 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 13.520.000,00 | 29.326.000,00 | 29.326.000,00 | 15.806.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | -<br>- | | | 19.730.550,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Indeks kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan, dan Keuangan)* | | | | 100 % | 100 % | 207.045.400,00 | 318.045.400,00 | 325.845.400,00 | 118.800.000,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | ASN dan Non ASN | | 243.723.030,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 187 Paket | 187 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 5 Dokumen | 12 Dokumen | 123.045.400,00 | 123.045.400,00 | 123.345.400,00 | 300.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 163.569.964,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 5 Orang | 20 Orang | 84.000.000,00 | 195.000.000,00 | 202.500.000,00 | 118.500.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 80.153.066,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Indeks kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan, dan Keuangan)* | | | | 100 % | 100 % | 301.936.640,00 | 330.459.800,00 | 254.459.800,00 | -47.476.840,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | ASN dan Non ASN | | 323.409.944,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 58 Paket | 2 Paket | 10.800.000,00 | 16.650.000,00 | 16.650.000,00 | 5.850.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 9.935.976,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 7 Paket | 92.467.640,00 | 92.540.800,00 | 92.540.800,00 | 73.160,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 105.017.252,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 3 Paket | 74.689.000,00 | 57.989.000,00 | 57.989.000,00 | -16.700.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 74.035.784,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 3 Dokumen | 2 Dokumen | 75.980.000,00 | 17.280.000,00 | 17.280.000,00 | -58.700.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 8.771.951,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 8 Laporan | 1 Laporan | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 25.648.981,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 8 Laporan | 22 Laporan | 40.000.000,00 | 138.000.000,00 | 62.000.000,00 | 22.000.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Indeks kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan, dam Keuangan)* | | | | 100 % | 100 % | 0,00 | 0,00 | 34.360.000,00 | 34.360.000,00 | | | - | -<br>- | ASN dan Non ASN | | 0,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 34.360.000,00 | 34.360.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.01.2.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Indeks kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan, dan Keuangan)* | | | | 100 % | 100 % | 956.704.860,00 | 1.360.664.860,00 | 1.606.664.860,00 | 649.960.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | ASN dan Non ASN | | 760.797.765,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 8 Laporan | 8 Laporan | 187.845.260,00 | 188.325.260,00 | 188.325.260,00 | 480.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 256.831.454,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 4 Laporan | 282.816.000,00 | 282.816.000,00 | 282.816.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 263.702.560,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 10 Laporan | 18 Laporan | 486.043.600,00 | 889.523.600,00 | 1.135.523.600,00 | 649.480.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 240.263.751,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik* | | | | 100 % | 100 % | 339.312.500,00 | 638.413.500,00 | 615.362.000,00 | 276.049.500,00 | | | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | ASN dan Non ASN | | 533.679.743,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 59.270.000,00 | 39.020.000,00 | 35.880.000,00 | -23.390.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 41.105.313,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 13 Unit | 13 Unit | 177.771.500,00 | 177.771.500,00 | 157.860.000,00 | -19.911.500,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 300.731.032,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 51 Unit | 20 Unit | 14.600.000,00 | 14.600.000,00 | 14.600.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 107.084.496,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 2 Unit | 75.471.000,00 | 394.822.000,00 | 394.822.000,00 | 319.351.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 51.902.557,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 14 Unit | 20 Unit | 12.200.000,00 | 12.200.000,00 | 12.200.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | -<br>- | | | 32.856.345,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan** | | | | **95 %** | **95 %** | **14.805.386.780,00** | **14.574.302.980,00** | **14.560.106.980,00** | **1.084.014.788,00** | | | | | | | **15.889.401.568,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | 95 % | - | 95.699.580,00 | 65.559.580,00 | 54.559.580,00 | -41.140.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Masayarakat | | 77.290.568,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 95.699.580,00 | 65.559.580,00 | 54.559.580,00 | -41.140.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 77.290.568,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *Indeks Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan* | | | | 95 % | 95 % | 14.709.687.200,00 | 14.508.743.400,00 | 14.505.547.400,00 | -204.139.800,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | ASN dan Non ASN | | 15.812.111.000,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 14.709.687.200,00 | 14.508.743.400,00 | 14.505.547.400,00 | -204.139.800,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 15.812.111.000,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **95 %** | **95 %** | **194.949.448,00** | **194.949.448,00** | **194.949.448,00** | **2.376.161,00** | | | | | | | **197.325.609,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan* | | | | 100 % | 100 % | 194.949.448,00 | 194.949.448,00 | 194.949.448,00 | 0,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | Masayarakat | | 197.325.609,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 11 Lembaga Kemasyarakatan | 11 Lembaga Kemasyarakatan | 194.949.448,00 | 194.949.448,00 | 194.949.448,00 | 0,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 197.325.609,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan Yang Dapat Diselesaikan** | | | | **95 %** | **95 %** | **604.428.400,00** | **604.548.400,00** | **604.548.400,00** | **189.218.600,00** | | | | | | | **793.647.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Cakupan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lingkup Kecamatan yang tertangani* | | | | 95 % | 95 % | 604.428.400,00 | 604.548.400,00 | 604.548.400,00 | 120.000,00 | | | - | - - | Masayarakat | | 793.647.000,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 472.428.400,00 | 472.548.400,00 | 472.548.400,00 | 120.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 624.363.726,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 11 Laporan | 11 Laporan | 132.000.000,00 | 132.000.000,00 | 132.000.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 169.283.274,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Di Tingkat Kecamatan** | | | | **100 %** | **100 %** | **13.347.911.040,00** | **15.042.861.680,00** | **14.497.631.060,00** | **-181.271.040,00** | | | | | | | **13.166.640.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan* | | | | 100 % | 100 % | 13.347.911.040,00 | 15.042.861.680,00 | 14.497.631.060,00 | 1.149.720.020,00 | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | - - | Masayarakat | | 13.166.640.000,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.05.2.01.0007 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal* | | | | 12 Dokumen | 30 Dokumen | 13.347.911.040,00 | 15.042.861.680,00 | 14.497.631.060,00 | 1.149.720.020,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | - - | | | 13.166.640.000,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | | **KELURAHAN RAPPOCINI KECAMATAN RAPPOCINI** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **488.000.000,00** | **-12.000.000,00** | | | | | | | **597.620.255,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **488.000.000,00** | **-12.000.000,00** | | | | | | | **597.620.255,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **488.000.000,00** | **-12.000.000,00** | | | | | | | **597.620.255,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **95 %** | **95 %** | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **488.000.000,00** | **97.620.255,00** | | | | | | | **597.620.255,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan* | | | | 100 % | 100 % | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 488.000.000,00 | -12.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Masyarakat | | 597.620.255,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 334.372.500,00 | 334.372.500,00 | 334.372.500,00 | 0,00 | Kota Makassar, Rappocini, Rappocini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 469.375.351,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 165.627.500,00 | 165.627.500,00 | 153.627.500,00 | -12.000.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Rappocini | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 128.244.904,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | | **KELURAHAN MINASA UPA KECAMATAN RAPPOCINI** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **494.750.000,00** | **-5.250.000,00** | | | | | | | **597.620.255,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **494.750.000,00** | **-5.250.000,00** | | | | | | | **597.620.255,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **494.750.000,00** | **-5.250.000,00** | | | | | | | **597.620.255,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **95 %** | **95 %** | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **494.750.000,00** | **97.620.255,00** | | | | | | | **597.620.255,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan* | | | | 100 % | 100 % | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 494.750.000,00 | -5.250.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Masyarakat | | 597.620.255,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 302.134.800,00 | 302.134.800,00 | 302.134.800,00 | 0,00 | Kota Makassar, Rappocini, Minasa Upa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 469.375.351,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 197.865.200,00 | 197.865.200,00 | 192.615.200,00 | -5.250.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Minasa Upa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 128.244.904,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | | **KELURAHAN BALLA PARANG KECAMATAN RAPPOCINI** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **491.250.000,00** | **-8.750.000,00** | | | | | | | **597.620.255,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **491.250.000,00** | **-8.750.000,00** | | | | | | | **597.620.255,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **491.250.000,00** | **-8.750.000,00** | | | | | | | **597.620.255,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **95 %** | **95 %** | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **491.250.000,00** | **97.620.255,00** | | | | | | | **597.620.255,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan* | | | | 100 % | 100 % | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 491.250.000,00 | -8.750.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Masyarakat | | 597.620.255,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 323.444.400,00 | 323.444.400,00 | 323.444.400,00 | 0,00 | Kota Makassar, Rappocini, Balla Parang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 469.375.351,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 176.555.600,00 | 176.555.600,00 | 167.805.600,00 | -8.750.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Balla Parang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 128.244.904,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | | **KELURAHAN BANTA BANTAENG KECAMATAN RAPPOCINI** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **488.000.000,00** | **-12.000.000,00** | | | | | | | **597.620.255,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **488.000.000,00** | **-12.000.000,00** | | | | | | | **597.620.255,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **488.000.000,00** | **-12.000.000,00** | | | | | | | **597.620.255,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **95 %** | **95 %** | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **488.000.000,00** | **97.620.255,00** | | | | | | | **597.620.255,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan* | | | | 100 % | 100 % | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 488.000.000,00 | -12.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Masyarakat | | 597.620.255,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 379.998.000,00 | 379.998.000,00 | 379.998.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 469.375.351,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 120.002.000,00 | 120.002.000,00 | 108.002.000,00 | -12.000.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 128.244.904,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | | **KELURAHAN BONTO MAKKIO KECAMATAN RAPPOCINI** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **483.999.660,00** | **-16.000.340,00** | | | | | | | **597.620.255,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **483.999.660,00** | **-16.000.340,00** | | | | | | | **597.620.255,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **483.999.660,00** | **-16.000.340,00** | | | | | | | **597.620.255,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **95 %** | **95 %** | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **483.999.660,00** | **97.620.255,00** | | | | | | | **597.620.255,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan* | | | | 100 % | 100 % | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 483.999.660,00 | -16.000.340,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Masyarakat | | 597.620.255,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 375.142.460,00 | 375.142.460,00 | 375.142.460,00 | 0,00 | Kota Makassar, Rappocini, Bonto Makkio | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 469.375.351,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 124.857.540,00 | 124.857.540,00 | 108.857.200,00 | -16.000.340,00 | Kota Makassar, Rappocini, Bonto Makkio | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 128.244.904,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | | **KELURAHAN BUAKANA KECAMATAN RAPPOCINI** | | | | | | | **500.000.000,00** | **499.690.000,00** | **491.740.000,00** | **-8.260.000,00** | | | | | | | **128.244.904,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **499.690.000,00** | **491.740.000,00** | **-8.260.000,00** | | | | | | | **128.244.904,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **499.690.000,00** | **491.740.000,00** | **-8.260.000,00** | | | | | | | **128.244.904,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **95 %** | **95 %** | **500.000.000,00** | **499.690.000,00** | **491.740.000,00** | **-371.755.096,00** | | | | | | | **128.244.904,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan* | | | | 100 % | 100 % | 500.000.000,00 | 499.690.000,00 | 491.740.000,00 | -8.260.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Masyarakat | | 128.244.904,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 6 Unit | 4 Unit | 391.441.400,00 | 351.185.700,00 | 351.185.700,00 | -40.255.700,00 | Kota Makassar, Rappocini, Buakana | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 108.558.600,00 | 148.504.300,00 | 140.554.300,00 | 31.995.700,00 | Kota Makassar, Rappocini, Buakana | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 128.244.904,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | | **KELURAHAN GUNUNG SARI KECAMATAN RAPPOCINI** | | | | | | | **500.000.000,00** | **499.760.800,00** | **488.560.800,00** | **-11.439.200,00** | | | | | | | **597.620.255,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **499.760.800,00** | **488.560.800,00** | **-11.439.200,00** | | | | | | | **597.620.255,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **499.760.800,00** | **488.560.800,00** | **-11.439.200,00** | | | | | | | **597.620.255,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **95 %** | **-** | **500.000.000,00** | **499.760.800,00** | **488.560.800,00** | **97.620.255,00** | | | | | | | **597.620.255,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | | | | 100 % | - | 500.000.000,00 | 499.760.800,00 | 488.560.800,00 | -11.439.200,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Masyarakat | | 597.620.255,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 320.203.000,00 | 319.963.800,00 | 319.963.800,00 | -239.200,00 | Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 469.375.351,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 0 Pokmas / Ormas | 0 Pokmas / Ormas | 179.797.000,00 | 179.797.000,00 | 168.597.000,00 | -11.200.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 128.244.904,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | | **KELURAHAN KARUNRUNG KECAMATAN RAPPOCINI** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **493.000.000,00** | **-7.000.000,00** | | | | | | | **597.620.255,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **493.000.000,00** | **-7.000.000,00** | | | | | | | **597.620.255,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **493.000.000,00** | **-7.000.000,00** | | | | | | | **597.620.255,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **95 %** | **95 %** | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **493.000.000,00** | **97.620.255,00** | | | | | | | **597.620.255,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan* | | | | 100 % | 100 % | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 493.000.000,00 | -7.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Masyarakat | | 597.620.255,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 372.530.000,00 | 372.530.000,00 | 372.530.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Rappocini, Karunrung | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 469.375.351,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 127.470.000,00 | 127.470.000,00 | 120.470.000,00 | -7.000.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Karunrung | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 128.244.904,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | | **KELURAHAN KASSI-KASSI KECAMATAN RAPPOCINI** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **485.790.000,00** | **-14.210.000,00** | | | | | | | **597.620.255,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **485.790.000,00** | **-14.210.000,00** | | | | | | | **597.620.255,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **485.790.000,00** | **-14.210.000,00** | | | | | | | **597.620.255,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **95 %** | **95 %** | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **485.790.000,00** | **97.620.255,00** | | | | | | | **597.620.255,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan* | | | | 100 % | 100 % | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 485.790.000,00 | -14.210.000,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat | | 597.620.255,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 281.825.700,00 | 281.825.700,00 | 281.825.700,00 | 0,00 | Kota Makassar, Rappocini, Kassi - Kassi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 469.375.351,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 218.174.300,00 | 218.174.300,00 | 203.964.300,00 | -14.210.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Kassi - Kassi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 128.244.904,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | | **KELURAHAN MAPPALA KECAMATAN RAPPOCINI** | | | | | | | **499.999.738,00** | **499.999.738,00** | **483.999.738,00** | **-16.000.000,00** | | | | | | | **597.620.255,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.999.738,00** | **499.999.738,00** | **483.999.738,00** | **-16.000.000,00** | | | | | | | **597.620.255,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.999.738,00** | **499.999.738,00** | **483.999.738,00** | **-16.000.000,00** | | | | | | | **597.620.255,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **95 %** | **95 %** | **499.999.738,00** | **499.999.738,00** | **483.999.738,00** | **97.620.517,00** | | | | | | | **597.620.255,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan* | | | | 100 % | 100 % | 499.999.738,00 | 499.999.738,00 | 483.999.738,00 | -16.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Masyarakat | | 597.620.255,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 365.399.738,00 | 365.399.738,00 | 365.399.738,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Rappocini, Mappala | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 469.375.351,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 134.600.000,00 | 134.600.000,00 | 118.600.000,00 | -16.000.000,00 | Kota Makassar, Rappocini, Mappala | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 128.244.904,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | | **KELURAHAN TIDUNG KECAMATAN RAPPOCINI** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **486.900.000,00** | **-13.100.000,00** | | | | | | | **597.620.255,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **486.900.000,00** | **-13.100.000,00** | | | | | | | **597.620.255,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **486.900.000,00** | **-13.100.000,00** | | | | | | | **597.620.255,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **95 %** | **-** | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **486.900.000,00** | **97.620.255,00** | | | | | | | **597.620.255,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | | | | 100 % | - | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 486.900.000,00 | -13.100.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Masyarakat | | 597.620.255,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 250.000.000,00 | 353.020.800,00 | 353.020.800,00 | 103.020.800,00 | Kota Makassar, Rappocini, Tidung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 469.375.351,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 0 Pokmas / Ormas | 0 Pokmas / Ormas | 250.000.000,00 | 146.979.200,00 | 133.879.200,00 | -116.120.800,00 | Kota Makassar, Rappocini, Semua Kel/Desa | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 128.244.904,00 | KECAMATAN RAPPOCINI |
| | | **KECAMATAN TALLO** | | | | | | | **41.382.904.240,00** | **47.040.482.070,00** | **46.383.581.840,00** | **5.000.677.600,00** | | | | | | | **49.833.561.899,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **41.382.904.240,00** | **47.040.482.070,00** | **46.383.581.840,00** | **5.000.677.600,00** | | | | | | | **49.833.561.899,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **41.382.904.240,00** | **47.040.482.070,00** | **46.383.581.840,00** | **5.000.677.600,00** | | | | | | | **49.833.561.899,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah<br>Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas** | | | | **100<br>90 %<br>%** | **100<br>90 %<br>%** | **16.869.974.840,00** | **20.215.272.070,00** | **20.102.184.640,00** | **6.434.593.459,00** | | | | | | | **23.304.568.299,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat daerah* | | | | 100 % | 100 % | 94.393.000,00 | 94.393.000,00 | 64.113.000,00 | -30.280.000,00 | | | - | - - | SKPD | | 110.180.736,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 25.743.000,00 | 25.743.000,00 | 17.963.000,00 | -7.780.000,00 | Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 42.906.931,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.482.000,00 | 7.482.000,00 | 4.982.000,00 | -2.500.000,00 | Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 13.082.342,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.756.000,00 | 6.756.000,00 | 4.256.000,00 | -2.500.000,00 | Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 9.936.691,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.177.000,00 | 12.177.000,00 | 9.677.000,00 | -2.500.000,00 | Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 10.660.378,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.597.000,00 | 12.597.000,00 | 10.097.000,00 | -2.500.000,00 | Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 10.108.800,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 13.660.000,00 | 13.660.000,00 | 13.660.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 12.675.917,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 15.978.000,00 | 15.978.000,00 | 3.478.000,00 | -12.500.000,00 | Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 10.809.677,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 13.954.697.040,00 | 16.294.534.870,00 | 16.266.138.240,00 | 2.311.441.200,00 | | | - | - - | SKPD | | 18.380.899.085,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 99 Orang/bulan | 99 Orang/bulan | 12.731.287.040,00 | 15.030.324.870,00 | 15.030.328.240,00 | 2.299.041.200,00 | Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 17.062.326.567,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 886.800.000,00 | 927.600.000,00 | 904.200.000,00 | 17.400.000,00 | Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 931.737.600,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 193.012.000,00 | 193.012.000,00 | 193.012.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 172.800.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 143.598.000,00 | 143.598.000,00 | 138.598.000,00 | -5.000.000,00 | Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 214.034.918,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Tersedianya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 96.000.000,00 | 471.340.000,00 | 450.000.000,00 | 354.000.000,00 | | | - | - - | SKPD | | 373.248.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 220 Paket | 220 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 228.096.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 11 Orang | 11 Orang | 96.000.000,00 | 471.340.000,00 | 450.000.000,00 | 354.000.000,00 | Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 145.152.000,00 | KECAMATAN TALLO |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 522.049.200,00 | 830.108.800,00 | 846.106.000,00 | 324.056.800,00 | | | - | -<br>- | SKPD | | 920.647.296,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 9 Paket | 9 Paket | 45.899.000,00 | 45.899.000,00 | 45.899.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 32.679.936,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 16 Paket | 16 Paket | 119.867.800,00 | 317.597.000,00 | 317.597.000,00 | 197.729.200,00 | Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 519.613.056,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 5 Paket | 100.292.400,00 | 111.822.800,00 | 111.820.000,00 | 11.527.600,00 | Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 49.559.040,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 10 Paket | 10 Paket | 142.950.000,00 | 75.750.000,00 | 75.750.000,00 | -67.200.000,00 | Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 81.575.424,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 73.040.000,00 | 73.040.000,00 | 223.040.000,00 | 150.000.000,00 | Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 29.859.840,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 10 Laporan | 10 Laporan | 40.000.000,00 | 206.000.000,00 | 72.000.000,00 | 32.000.000,00 | Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 207.360.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Tersedianya layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | SKPD | | 622.080.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 30 Unit | 30 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 414.720.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.01.2.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 207.360.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tersedianya layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 1.599.145.600,00 | 1.509.625.400,00 | 1.483.087.400,00 | -116.058.200,00 | | | - | -<br>- | SKPD | | 2.066.655.099,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 189.081.000,00 | 189.955.800,00 | 189.955.800,00 | 874.800,00 | Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 1.295.792.640,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 450.072.000,00 | 450.072.000,00 | 491.934.000,00 | 41.862.000,00 | Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 408.791.163,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 132.500.000,00 | 132.500.000,00 | 132.500.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 124.416.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 827.492.600,00 | 737.097.600,00 | 668.697.600,00 | -158.795.000,00 | Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 237.655.296,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tersedianya layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 603.690.000,00 | 1.015.270.000,00 | 992.740.000,00 | 389.050.000,00 | | | - | -<br>- | SKPD | | 830.858.083,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 41.020.000,00 | 41.020.000,00 | 37.880.000,00 | -3.140.000,00 | Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 85.599.590,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 114 Unit | 114 Unit | 306.370.000,00 | 306.370.000,00 | 286.980.000,00 | -19.390.000,00 | Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 394.370.813,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 40 Unit | 40 Unit | 68.200.000,00 | 68.200.000,00 | 68.200.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 82.771.200,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 188.100.000,00 | 599.680.000,00 | 599.680.000,00 | 411.580.000,00 | Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 268.116.480,00 | KECAMATAN TALLO |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik**<br>**Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **100**<br>**95 %**<br>**%** | **100**<br>**95 %**<br>**%** | **11.313.706.000,00** | **11.952.440.600,00** | **11.871.440.600,00** | **2.705.187.800,00** | | | | | | | **14.018.893.800,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | | | | 100 % | 100 % | 134.100.000,00 | 134.100.000,00 | 90.600.000,00 | -43.500.000,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat | | 1.190.860.800,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 16 Dokumen | 16 Dokumen | 134.100.000,00 | 134.100.000,00 | 90.600.000,00 | -43.500.000,00 | Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 1.190.860.800,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat* | | | | 100 % | 100 % | 11.179.606.000,00 | 11.818.340.600,00 | 11.780.840.600,00 | 601.234.600,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat | | 12.828.033.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 11.179.606.000,00 | 11.818.340.600,00 | 11.780.840.600,00 | 601.234.600,00 | Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 12.828.033.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik**<br>**Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **100**<br>**95 %**<br>**%** | **100**<br>**95 %**<br>**%** | **270.850.000,00** | **270.850.000,00** | **251.850.000,00** | **543.469.200,00** | | | | | | | **814.319.200,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 270.850.000,00 | 270.850.000,00 | 251.850.000,00 | -19.000.000,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat | | 814.319.200,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 15 Lembaga Kemasyarakatan | 15 Lembaga Kemasyarakatan | 270.850.000,00 | 270.850.000,00 | 251.850.000,00 | -19.000.000,00 | Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 814.319.200,00 | KECAMATAN TALLO |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan Yang Dapat Diselesaikan** | | | | **100 %** | **100 %** | **873.177.600,00** | **873.177.600,00** | **873.177.600,00** | **-629.936.000,00** | | | | | | | **243.241.600,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | | | | 100 % | 100 % | 873.177.600,00 | 873.177.600,00 | 873.177.600,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat | | 243.241.600,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 566.594.400,00 | 566.594.400,00 | 566.594.400,00 | 0,00 | Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 63.241.600,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 306.583.200,00 | 306.583.200,00 | 306.583.200,00 | 0,00 | Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 180.000.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Di Tingkat Kecamatan** | | | | **100 %** | **100 %** | **12.055.195.800,00** | **13.728.741.800,00** | **13.284.929.000,00** | **-602.656.800,00** | | | | | | | **11.452.539.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Oenugasan Kepala Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 12.055.195.800,00 | 13.728.741.800,00 | 13.284.929.000,00 | 1.229.733.200,00 | | | - | -<br>- | - | | 11.452.539.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.05.2.01.0007 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal* | | | | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 12.055.195.800,00 | 13.728.741.800,00 | 13.284.929.000,00 | 1.229.733.200,00 | Kota Makassar, Tallo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 11.452.539.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | | **KELURAHAN UJUNG PANDANG BARU KECAMATAN TALLO** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **473.500.000,00** | **-26.500.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **473.500.000,00** | **-26.500.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **473.500.000,00** | **-26.500.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Sarana dan Prasarana Lingkup Kelurahan dalam Kondisi Baik**<br>**Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan** | | | | **100**<br>**90 %**<br>**%** | **100**<br>**90 %**<br>**%** | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **473.500.000,00** | **0,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 473.500.000,00 | -26.500.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Masyarakat | | 500.000.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 338.179.100,00 | 338.179.100,00 | 338.179.100,00 | 0,00 | Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 400.000.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 161.820.900,00 | 161.820.900,00 | 135.320.900,00 | -26.500.000,00 | Kota Makassar, Tallo, Ujung Pandang Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | | **KELURAHAN KALUKU BODOA KECAMATAN TALLO** | | | | | | | **499.897.200,00** | **499.890.400,00** | **474.090.400,00** | **-25.806.800,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.897.200,00** | **499.890.400,00** | **474.090.400,00** | **-25.806.800,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.897.200,00** | **499.890.400,00** | **474.090.400,00** | **-25.806.800,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik<br>Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **100<br>95 %<br>%** | **100<br>95 %<br>%** | **499.897.200,00** | **499.890.400,00** | **474.090.400,00** | **102.800,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 499.897.200,00 | 499.890.400,00 | 474.090.400,00 | -25.806.800,00 | | | - | - - | Masyarakat | | 500.000.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 7 Unit | 7 Unit | 330.860.400,00 | 330.860.400,00 | 330.860.400,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Tallo, Kaluku Bodoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 400.000.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 169.036.800,00 | 169.030.000,00 | 143.230.000,00 | -25.806.800,00 | Kota Makassar, Tallo, Kaluku Bodoa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | | **KELURAHAN BUNGA EJA BERU KECAMATAN TALLO** | | | | | | | **497.839.660,00** | **497.839.660,00** | **465.544.660,00** | **-32.295.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **497.839.660,00** | **497.839.660,00** | **465.544.660,00** | **-32.295.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **497.839.660,00** | **497.839.660,00** | **465.544.660,00** | **-32.295.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik<br>Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **100<br>95 %<br>%** | **100<br>95 %<br>%** | **497.839.660,00** | **497.839.660,00** | **465.544.660,00** | **2.160.340,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 497.839.660,00 | 497.839.660,00 | 465.544.660,00 | -32.295.000,00 | | | - | - - | MASYARAKAT | | 500.000.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 8 Unit | 8 Unit | 186.424.300,00 | 186.424.300,00 | 186.329.300,00 | -95.000,00 | Kota Makassar, Tallo, Bunga Eja Beru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 400.000.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 311.415.360,00 | 311.415.360,00 | 279.215.360,00 | -32.200.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Tallo, Bunga Eja Beru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | | **KELURAHAN WALA-WALAYYA KECAMATAN TALLO** | | | | | | | **499.758.560,00** | **499.758.560,00** | **475.508.560,00** | **-24.250.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.758.560,00** | **499.758.560,00** | **475.508.560,00** | **-24.250.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.758.560,00** | **499.758.560,00** | **475.508.560,00** | **-24.250.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik<br>Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **100<br>95 %<br>%** | **100<br>95 %<br>%** | **499.758.560,00** | **499.758.560,00** | **475.508.560,00** | **241.440,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 499.758.560,00 | 499.758.560,00 | 475.508.560,00 | -24.250.000,00 | | | - | - - | Masyarakat | | 500.000.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 220.948.200,00 | 220.948.200,00 | 220.948.200,00 | 0,00 | Kota Makassar, Tallo, Wala-Walaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 400.000.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 278.810.360,00 | 278.810.360,00 | 254.560.360,00 | -24.250.000,00 | Kota Makassar, Tallo, Wala-Walaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | | **KELURAHAN TALLO KECAMATAN TALLO** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **459.600.000,00** | **-40.400.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **459.600.000,00** | **-40.400.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **459.600.000,00** | **-40.400.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik**<br>**Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **100**<br>**95 %**<br>**%** | **100**<br>**95 %**<br>**%** | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **459.600.000,00** | **0,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 459.600.000,00 | -40.400.000,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat | | 500.000.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 158.497.200,00 | 158.497.200,00 | 158.347.200,00 | -150.000,00 | Kota Makassar, Tallo, Tallo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 400.000.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 341.502.800,00 | 341.502.800,00 | 301.252.800,00 | -40.250.000,00 | Kota Makassar, Tallo, Tallo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | | **KELURAHAN RAPPOKALLING KECAMATAN TALLO** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **471.250.000,00** | **-28.750.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **471.250.000,00** | **-28.750.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **471.250.000,00** | **-28.750.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik**<br>**Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **100**<br>**95 %**<br>**%** | **100**<br>**95 %**<br>**%** | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **471.250.000,00** | **0,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 471.250.000,00 | -28.750.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Masyarakat | | 500.000.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 282.816.300,00 | 282.816.300,00 | 282.816.300,00 | 0,00 | Kota Makassar, Tallo, Rappokalling | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 400.000.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 217.183.700,00 | 217.183.700,00 | 188.433.700,00 | -28.750.000,00 | Kota Makassar, Tallo, Rappokalling | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | | **KELURAHAN TAMMUA KECAMATAN TALLO** | | | | | | | **483.894.580,00** | **483.894.580,00** | **473.394.580,00** | **-10.500.000,00** | | | | | | | **400.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **483.894.580,00** | **483.894.580,00** | **473.394.580,00** | **-10.500.000,00** | | | | | | | **400.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **483.894.580,00** | **483.894.580,00** | **473.394.580,00** | **-10.500.000,00** | | | | | | | **400.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik**<br>**Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **100**<br>**95 %**<br>**%** | **100**<br>**95 %**<br>**%** | **483.894.580,00** | **483.894.580,00** | **473.394.580,00** | **-83.894.580,00** | | | | | | | **400.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 483.894.580,00 | 483.894.580,00 | 473.394.580,00 | -10.500.000,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat | | 400.000.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 7 Unit | 7 Unit | 273.269.580,00 | 273.269.580,00 | 273.269.580,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Tallo, Tammua | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 300.000.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 210.625.000,00 | 210.625.000,00 | 200.125.000,00 | -10.500.000,00 | Kota Makassar, Tallo, Tammua | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | | **KELURAHAN PANNAMPU KECAMATAN TALLO** | | | | | | | **492.169.500,00** | **492.169.500,00** | **476.619.500,00** | **-15.550.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **492.169.500,00** | **492.169.500,00** | **476.619.500,00** | **-15.550.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **492.169.500,00** | **492.169.500,00** | **476.619.500,00** | **-15.550.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik<br>Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **100<br>95 %<br>%** | **100<br>95 %<br>%** | **492.169.500,00** | **492.169.500,00** | **476.619.500,00** | **7.830.500,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 492.169.500,00 | 492.169.500,00 | 476.619.500,00 | -15.550.000,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat | | 500.000.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 187.278.500,00 | 304.003.153,00 | 304.003.153,00 | 116.724.653,00 | Kota Makassar, Tallo, Pannampu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 400.000.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 304.891.000,00 | 188.166.347,00 | 172.616.347,00 | -132.274.653,00 | Kota Makassar, Tallo, Pannampu | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | | **KELURAHAN LEMBO KECAMATAN TALLO** | | | | | | | **487.330.100,00** | **487.329.300,00** | **464.379.300,00** | **-22.950.800,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **487.330.100,00** | **487.329.300,00** | **464.379.300,00** | **-22.950.800,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **487.330.100,00** | **487.329.300,00** | **464.379.300,00** | **-22.950.800,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik<br>Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **100<br>95 %<br>%** | **100<br>95 %<br>%** | **487.330.100,00** | **487.329.300,00** | **464.379.300,00** | **12.669.900,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 487.330.100,00 | 487.329.300,00 | 464.379.300,00 | -22.950.800,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat | | 500.000.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 321.328.500,00 | 321.328.500,00 | 321.328.500,00 | 0,00 | Kota Makassar, Tallo, Lembo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 400.000.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 166.001.600,00 | 166.000.800,00 | 143.050.800,00 | -22.950.800,00 | Kota Makassar, Tallo, Lembo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | | **KELURAHAN BULOA KECAMATAN TALLO** | | | | | | | **499.986.040,00** | **499.986.040,00** | **489.436.040,00** | **-10.550.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.986.040,00** | **499.986.040,00** | **489.436.040,00** | **-10.550.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.986.040,00** | **499.986.040,00** | **489.436.040,00** | **-10.550.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup keurahan yang mendapat pemberdayaan<br>Persentase sarana dan prasarana lingkup kelurahan dalam kondisi baik** | | | | **100<br>95 %<br>%** | **100<br>95 %<br>%** | **499.986.040,00** | **499.986.040,00** | **489.436.040,00** | **13.960,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 499.986.040,00 | 499.986.040,00 | 489.436.040,00 | -10.550.000,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat | | 500.000.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 398.139.900,00 | 398.139.900,00 | 398.139.900,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Tallo, Buloa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 400.000.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 101.846.140,00 | 101.846.140,00 | 91.296.140,00 | -10.550.000,00 | Kota Makassar, Tallo, Buloa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | | **KELURAHAN RAPPOJAWA KECAMATAN TALLO** | | | | | | | **499.996.220,00** | **499.996.220,00** | **485.896.220,00** | **-14.100.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.996.220,00** | **499.996.220,00** | **485.896.220,00** | **-14.100.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.996.220,00** | **499.996.220,00** | **485.896.220,00** | **-14.100.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik<br>Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **100<br>95 %<br>%** | **100<br>95 %<br>%** | **499.996.220,00** | **499.996.220,00** | **485.896.220,00** | **3.780,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 499.996.220,00 | 499.996.220,00 | 485.896.220,00 | -14.100.000,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat | | 500.000.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 369.399.300,00 | 369.399.300,00 | 369.399.300,00 | 0,00 | Kota Makassar, Tallo, Rappojawa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 400.000.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 130.596.920,00 | 130.596.920,00 | 116.496.920,00 | -14.100.000,00 | Kota Makassar, Tallo, Rappojawa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | | **KELURAHAN LAKKANG KECAMATAN TALLO** | | | | | | | **500.000.000,00** | **499.524.000,00** | **468.774.000,00** | **-31.226.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **499.524.000,00** | **468.774.000,00** | **-31.226.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **499.524.000,00** | **468.774.000,00** | **-31.226.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik<br>Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **100<br>95 %<br>%** | **100<br>95 %<br>%** | **500.000.000,00** | **499.524.000,00** | **468.774.000,00** | **0,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 500.000.000,00 | 499.524.000,00 | 468.774.000,00 | -31.226.000,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat | | 500.000.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 231.451.100,00 | 274.788.600,00 | 274.788.600,00 | 43.337.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Tallo, Lakkang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 400.000.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 268.548.900,00 | 224.735.400,00 | 193.985.400,00 | -74.563.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Tallo, Lakkang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | | **KELURAHAN SUANGGA KECAMATAN TALLO** | | | | | | | **499.624.900,00** | **496.925.900,00** | **476.325.900,00** | **-23.299.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.624.900,00** | **496.925.900,00** | **476.325.900,00** | **-23.299.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.624.900,00** | **496.925.900,00** | **476.325.900,00** | **-23.299.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **100<br>95 %<br>%** | **-** | **499.624.900,00** | **496.925.900,00** | **476.325.900,00** | **375.100,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | | | | 100 % | - | 499.624.900,00 | 496.925.900,00 | 476.325.900,00 | -23.299.000,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat | | 500.000.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 317.763.900,00 | 317.763.900,00 | 317.763.900,00 | 0,00 | Kota Makassar, Tallo, Suangga | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 400.000.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 181.861.000,00 | 179.162.000,00 | 158.562.000,00 | -23.299.000,00 | Kota Makassar, Tallo, Suangga | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | | **KELURAHAN LA`LATANG KECAMATAN TALLO** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **469.000.000,00** | **-31.000.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **469.000.000,00** | **-31.000.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **469.000.000,00** | **-31.000.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik<br>Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **100<br>95 %<br>%** | **100<br>95 %<br>%** | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **469.000.000,00** | **0,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 469.000.000,00 | -31.000.000,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat | | 500.000.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 12 Unit | 12 Unit | 199.226.400,00 | 199.226.400,00 | 199.226.400,00 | 0,00 | Kota Makassar, Tallo, La'latang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 400.000.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 300.773.600,00 | 300.773.600,00 | 269.773.600,00 | -31.000.000,00 | Kota Makassar, Tallo, La'latang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | | **KELURAHAN KALUKUANG KECAMATAN TALLO** | | | | | | | **499.999.000,00** | **499.999.000,00** | **479.549.000,00** | **-20.450.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.999.000,00** | **499.999.000,00** | **479.549.000,00** | **-20.450.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.999.000,00** | **499.999.000,00** | **479.549.000,00** | **-20.450.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik<br>Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **100<br>95 %<br>%** | **100<br>95 %<br>%** | **499.999.000,00** | **499.999.000,00** | **479.549.000,00** | **1.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 499.999.000,00 | 499.999.000,00 | 479.549.000,00 | -20.450.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 500.000.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 287.380.200,00 | 287.380.200,00 | 287.380.200,00 | 0,00 | Kota Makassar, Tallo, Kalukuang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 400.000.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 212.618.800,00 | 212.618.800,00 | 192.168.800,00 | -20.450.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Tallo, Kalukuang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN TALLO |
| | | **KECAMATAN TAMALANREA** | | | | | | | **37.274.400.000,00** | **42.127.643.769,00** | **41.705.561.500,00** | **4.431.161.500,00** | | | | | | | **51.827.627.428,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **37.274.400.000,00** | **42.127.643.769,00** | **41.705.561.500,00** | **4.431.161.500,00** | | | | | | | **51.827.627.428,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **37.274.400.000,00** | **42.127.643.769,00** | **41.705.561.500,00** | **4.431.161.500,00** | | | | | | | **51.827.627.428,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah<br>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik** | | | | **100<br>90 %<br>%** | **100<br>90 %<br>%** | **12.317.015.214,00** | **15.236.675.383,00** | **15.228.289.614,00** | **8.550.676.748,00** | | | | | | | **20.867.691.962,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 31.710.000,00 | 52.424.000,00 | 30.164.000,00 | -1.546.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | ASN | | 71.339.736,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.785.000,00 | 28.499.000,00 | 21.239.000,00 | 13.454.000,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 11.889.956,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.785.000,00 | 4.785.000,00 | 1.785.000,00 | -3.000.000,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 11.889.956,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.785.000,00 | 4.785.000,00 | 1.785.000,00 | -3.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 11.889.956,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.785.000,00 | 4.785.000,00 | 1.785.000,00 | -3.000.000,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 11.889.956,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.785.000,00 | 4.785.000,00 | 1.785.000,00 | -3.000.000,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 11.889.956,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.785.000,00 | 4.785.000,00 | 1.785.000,00 | -3.000.000,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 11.889.956,00 | KECAMATAN TAMALANREA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 9.806.439.894,00 | 11.191.970.263,00 | 11.159.936.494,00 | 1.353.496.600,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | ASN | | 17.216.806.370,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 69 Orang/bulan | 69 Orang/bulan | 8.886.220.494,00 | 10.345.624.263,00 | 10.345.658.494,00 | 1.459.438.000,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 15.876.400.213,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 568.010.000,00 | 587.090.000,00 | 587.090.000,00 | 19.080.000,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 625.639.212,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 336.480.400,00 | 243.527.000,00 | 226.459.000,00 | -110.021.400,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 690.986.973,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.405.000,00 | 3.405.000,00 | 405.000,00 | -3.000.000,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 11.889.986,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 12.324.000,00 | 12.324.000,00 | 324.000,00 | -12.000.000,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 11.889.986,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.01.2.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | *Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 5.663.000,00 | 2.263.000,00 | 2.263.000,00 | -3.400.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | ASN | | 73.205.000,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.01.2.04.0004 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.663.000,00 | 2.263.000,00 | 2.263.000,00 | -3.400.000,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 73.205.000,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas* | | | | 90 % | 90 % | 60.000.000,00 | 1.035.000.000,00 | 1.020.000.000,00 | 960.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | ASN | | 314.049.450,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 175.692.000,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 5 Orang | 266 Orang | 60.000.000,00 | 1.035.000.000,00 | 1.020.000.000,00 | 960.000.000,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 138.357.450,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan)* | | | | 90 % | 90 % | 151.553.520,00 | 165.061.000,00 | 163.061.000,00 | 11.507.480,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | ASN | | 155.465.817,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 8.751.000,00 | 8.751.000,00 | 8.751.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 19.465.920,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 16.022.520,00 | 19.530.000,00 | 19.530.000,00 | 3.507.480,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 47.905.000,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 23.820.000,00 | 23.820.000,00 | 23.820.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 26.427.005,00 | KECAMATAN TAMALANREA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 62.960.000,00 | 12.960.000,00 | 12.960.000,00 | -50.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 17.744.892,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 40.000.000,00 | 100.000.000,00 | 98.000.000,00 | 58.000.000,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 43.923.000,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik* | | | | 90 % | 90 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | ASN | | 356.359.760,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 63.834.760,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 0,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 0,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.01.2.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 0,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 292.525.000,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik* | | | | 90 % | 90 % | 1.852.132.400,00 | 1.951.141.120,00 | 2.006.849.120,00 | 154.716.720,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | ASN | | 2.078.772.705,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 184.636.800,00 | 199.380.000,00 | 199.380.000,00 | 14.743.200,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 218.277.105,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.667.495.600,00 | 1.751.761.120,00 | 1.807.469.120,00 | 139.973.520,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 1.860.495.600,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik* | | | | 90 % | 90 % | 409.516.400,00 | 838.816.000,00 | 846.016.000,00 | 436.499.600,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | ASN | | 601.693.124,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 39.520.000,00 | 39.520.000,00 | 39.130.000,00 | -390.000,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 109.825.069,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 54.930.000,00 | 50.180.000,00 | 45.770.000,00 | -9.160.000,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 268.666.010,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 233.920.000,00 | 673.576.000,00 | 673.576.000,00 | 439.656.000,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 119.104.535,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 35 Unit | 35 Unit | 38.546.400,00 | 32.940.000,00 | 32.940.000,00 | -5.606.400,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 26.793.030,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 60 Unit | 60 Unit | 42.600.000,00 | 42.600.000,00 | 54.600.000,00 | 12.000.000,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 77.304.480,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **100 95 % %** | **100 95 % %** | **15.502.945.602,00** | **15.614.276.682,00** | **15.544.636.682,00** | **3.958.106.879,00** | | | | | | | **19.461.052.481,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang Mendapat Pemberdayaan* | | | | 95 % | 95 % | 126.508.040,00 | 49.408.040,00 | 34.824.040,00 | -91.684.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | Masyarakat | | 66.688.291,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 126.508.040,00 | 49.408.040,00 | 34.824.040,00 | -91.684.000,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 66.688.291,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan* | | | | 95 % | 95 % | 11.354.242,00 | 11.354.242,00 | 11.354.242,00 | 0,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | ASN | | 276.511.976,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 11.354.242,00 | 11.354.242,00 | 11.354.242,00 | 0,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 276.511.976,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan* | | | | 95 % | 95 % | 15.365.083.320,00 | 15.553.514.400,00 | 15.498.458.400,00 | 133.375.080,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | Masyarakat | | 19.117.852.214,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 15.365.083.320,00 | 15.553.514.400,00 | 15.498.458.400,00 | 133.375.080,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 19.117.852.214,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan<br>Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **100<br>95 %<br>%** | **100<br>95 %<br>%** | **161.107.000,00** | **161.209.000,00** | **156.409.000,00** | **40.934.408,00** | | | | | | | **202.041.408,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Persentase Mayarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang Mendapat Pemberdayaan* | | | | 95 % | 95 % | 161.107.000,00 | 161.209.000,00 | 156.409.000,00 | -4.698.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Masyarakat | | 202.041.408,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 161.107.000,00 | 161.209.000,00 | 156.409.000,00 | -4.698.000,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 202.041.408,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan yang dapat diselesaikan** | | | | **100 %** | **100 %** | **686.680.600,00** | **686.680.600,00** | **686.680.600,00** | **274.521.841,00** | | | | | | | **961.202.441,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Persentase Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum Lingkup Kecamatan yang dapat diselesaikan* | | | | 100 % | 100 % | 686.680.600,00 | 686.680.600,00 | 686.680.600,00 | 0,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | Masyarakat | | 961.202.441,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 590.605.000,00 | 590.605.000,00 | 590.605.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 818.603.493,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 96.075.600,00 | 96.075.600,00 | 96.075.600,00 | 0,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 142.598.948,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase Penyelenggaraan Umum Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan** | | | | **100 %** | **100 %** | **8.606.651.584,00** | **10.428.802.104,00** | **10.089.545.604,00** | **1.728.987.552,00** | | | | | | | **10.335.639.136,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Indeks Kepuasan Pelayanan Publik di Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 8.606.651.584,00 | 10.428.802.104,00 | 10.089.545.604,00 | 1.482.894.020,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | ASN | | 10.335.639.136,00 | KECAMATAN TAMALANREA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.05.2.01.0007 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal* | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 8.606.651.584,00 | 10.428.802.104,00 | 10.089.545.604,00 | 1.482.894.020,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 10.335.639.136,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | | **KELURAHAN TAMALANREA KECAMATAN TAMALANREA** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **477.392.900,00** | **-22.607.100,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **477.392.900,00** | **-22.607.100,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **477.392.900,00** | **-22.607.100,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan**<br>**Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **100**<br>**95 %**<br>**%** | **100**<br>**95 %**<br>**%** | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **477.392.900,00** | **0,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*<br>*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun* | | | | 95 % | 95 % | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 477.392.900,00 | -22.607.100,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat | | 500.000.000,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 399.392.900,00 | -607.100,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 400.000.000,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 78.000.000,00 | -22.000.000,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | | **KELURAHAN TAMALANREA JAYA KECAMATAN TAMALANREA** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **477.257.601,00** | **-22.742.399,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **477.257.601,00** | **-22.742.399,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **477.257.601,00** | **-22.742.399,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan**<br>**Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **100**<br>**95 %**<br>**%** | **100**<br>**95 %**<br>**%** | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **477.257.601,00** | **0,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*<br>*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun* | | | | 95 % | 95 % | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 477.257.601,00 | -22.742.399,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat | | 500.000.000,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 399.257.601,00 | -742.399,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 400.000.000,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 78.000.000,00 | -22.000.000,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | | **KELURAHAN TAMALANREA INDAH KECAMATAN TAMALANREA** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **472.937.200,00** | **-27.062.800,00** | | | | | | | **520.823.603,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **472.937.200,00** | **-27.062.800,00** | | | | | | | **520.823.603,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **472.937.200,00** | **-27.062.800,00** | | | | | | | **520.823.603,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan**<br>**Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **100**<br>**95 %**<br>**%** | **100**<br>**95 %**<br>**%** | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **472.937.200,00** | **20.823.603,00** | | | | | | | **520.823.603,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*<br>*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun* | | | | 95 % | 95 % | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 472.937.200,00 | -27.062.800,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat | | 520.823.603,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 13 Unit | 13 Unit | 379.176.397,00 | 379.176.397,00 | 379.113.597,00 | -62.800,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 400.000.000,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 120.823.603,00 | 120.823.603,00 | 93.823.603,00 | -27.000.000,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 120.823.603,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | | **KELURAHAN BUNTUSU KECAMATAN TAMALANREA** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **477.814.100,00** | **-22.185.900,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **477.814.100,00** | **-22.185.900,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **477.814.100,00** | **-22.185.900,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **100 95 % %** | **100 95 % %** | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **477.814.100,00** | **0,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*<br>*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun* | | | | 95 % | 95 % | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 477.814.100,00 | -22.185.900,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat | | 500.000.000,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 399.814.100,00 | -185.900,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Buntusu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 400.000.000,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 78.000.000,00 | -22.000.000,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Buntusu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | | **KELURAHAN KAPASA KECAMATAN TAMALANREA** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **477.331.999,00** | **-22.668.001,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **477.331.999,00** | **-22.668.001,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **477.331.999,00** | **-22.668.001,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **100 95 % %** | **100 95 % %** | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **477.331.999,00** | **0,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*<br>*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun* | | | | 95 % | 95 % | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 477.331.999,00 | -22.668.001,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat | | 500.000.000,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 399.331.999,00 | -668.001,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Kapasa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 400.000.000,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 78.000.000,00 | -22.000.000,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Kapasa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | | **KELURAHAN KAPASA RAYA KECAMATAN TAMALANREA** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **477.750.300,00** | **-22.249.700,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **477.750.300,00** | **-22.249.700,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **477.750.300,00** | **-22.249.700,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **100 95 % %** | **100 95 % %** | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **477.750.300,00** | **0,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*<br>*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun* | | | | 95 % | 95 % | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 477.750.300,00 | -22.249.700,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat | | 500.000.000,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 399.750.300,00 | -249.700,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Kapasa Raya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 400.000.000,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 2 Pokmas / Ormas | 2 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 78.000.000,00 | -22.000.000,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Kapasa Raya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | | **KELURAHAN BIRA KECAMATAN TAMALANREA** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **477.254.400,00** | **-22.745.600,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **477.254.400,00** | **-22.745.600,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **477.254.400,00** | **-22.745.600,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **100 95 % %** | **100 95 % %** | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **477.254.400,00** | **0,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 95 % | 95 % | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 477.254.400,00 | -22.745.600,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat | | 500.000.000,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 399.254.400,00 | -745.600,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Bira | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 400.000.000,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 78.000.000,00 | -22.000.000,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Bira | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN TAMALANREA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | **KELURAHAN PARANGLOE KECAMATAN TAMALANREA** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **467.000.000,00** | **-33.000.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **467.000.000,00** | **-33.000.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **467.000.000,00** | **-33.000.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan<br>Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **100<br>95 %<br>%** | **100<br>95 %<br>%** | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **467.000.000,00** | **0,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun<br>Persentase Mayarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang Mendapat Pemberdayaan* | | | | 95 % | 95 % | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 467.000.000,00 | -33.000.000,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat | | 500.000.000,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 253.593.600,00 | 253.593.600,00 | 253.593.600,00 | 0,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Parang Loe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 400.000.000,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 246.406.400,00 | 246.406.400,00 | 213.406.400,00 | -33.000.000,00 | Kota Makassar, Tamalanrea, Parang Loe | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN TAMALANREA |
| | | **KECAMATAN TAMALATE** | | | | | | | **47.482.865.967,00** | **52.183.566.828,00** | **51.815.132.658,00** | **4.332.266.691,00** | | | | | | | **58.533.032.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **47.482.865.967,00** | **52.183.566.828,00** | **51.815.132.658,00** | **4.332.266.691,00** | | | | | | | **58.533.032.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **47.482.865.967,00** | **52.183.566.828,00** | **51.815.132.658,00** | **4.332.266.691,00** | | | | | | | **58.533.032.000,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ASN perangkat daerah yang mendapatkan peningkatan kapsitas<br>Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah<br>Persentase saran dan prasaran aparatur dalam kondisi baik** | | | | **100 %** | **100`<br>100<br>90 %<br>%<br>%** | **16.562.023.019,00** | **21.409.645.160,00** | **21.380.290.990,00** | **15.576.002.719,00** | | | | | | | **32.138.025.738,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 88.789.120,00 | 66.569.120,00 | 32.049.120,00 | -56.740.000,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat Kecamatan tamalate | | 95.963.409,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 3 Dokumen | 28.199.120,00 | 23.319.120,00 | 9.459.120,00 | -18.740.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 12.960.000,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.175.000,00 | 8.815.000,00 | 5.315.000,00 | -3.860.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 20.325.427,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.175.000,00 | 8.815.000,00 | 5.315.000,00 | -3.860.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 21.036.672,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.610.000,00 | 7.250.000,00 | 4.750.000,00 | -2.860.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 12.960.000,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.610.000,00 | 7.250.000,00 | 4.750.000,00 | -2.860.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 12.960.000,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.725.000,00 | 3.665.000,00 | 1.165.000,00 | -14.560.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 13.631.363,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 11.295.000,00 | 7.455.000,00 | 1.295.000,00 | -10.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 2.089.947,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 14.347.339.499,00 | 16.494.433.660,00 | 16.491.949.490,00 | 2.144.609.991,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat Kecamatan tamalate | | 27.558.555.396,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 108 Orang/ bulan | 108 Orang/ bulan | 13.242.525.499,00 | 15.381.790.660,00 | 15.381.806.490,00 | 2.139.280.991,00 | Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 25.709.685.777,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 651.240.000,00 | 696.169.000,00 | 696.169.000,00 | 44.929.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 967.127.040,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 224.256.000,00 | 208.256.000,00 | 208.256.000,00 | -16.000.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 331.192.690,00 | KECAMATAN TAMALATE |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 7.250.000,00 | 4.750.000,00 | 2.250.000,00 | -5.000.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 3.205.440,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 222.068.000,00 | 203.468.000,00 | 203.468.000,00 | -18.600.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 547.344.449,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat Kecamatan tamalate | | 805.821.239,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 438.091.331,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 365.057.487,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 2.672.421,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 96.000.000,00 | 296.200.000,00 | 502.735.400,00 | 406.735.400,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat Kecamatan tamalate | | 515.068.416,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 251 Paket | 251 Paket | 0,00 | 0,00 | 176.735.400,00 | 176.735.400,00 | Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 286.108.416,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 96.000.000,00 | 296.200.000,00 | 326.000.000,00 | 230.000.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 228.960.000,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 385.920.150,00 | 2.343.423.030,00 | 2.467.423.030,00 | 2.081.502.880,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat Kecamatan tamalate | | 1.369.993.941,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 7 Paket | 51.658.000,00 | 51.658.000,00 | 51.658.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 51.840.000,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 25 Paket | 25 Paket | 204.050.350,00 | 2.092.495.030,00 | 2.092.495.030,00 | 1.888.444.680,00 | Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 569.436.113,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 16 Paket | 16 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 187.294.775,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 5.989.800,00 | 43.848.000,00 | 43.848.000,00 | 37.858.200,00 | Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 413.130.240,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 200 Paket | 200 Paket | 24.622.000,00 | 19.822.000,00 | 19.822.000,00 | -4.800.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 39.564.288,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 59.600.000,00 | 9.600.000,00 | 159.600.000,00 | 100.000.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 17.144.525,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 40.000.000,00 | 126.000.000,00 | 100.000.000,00 | 60.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 91.584.000,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat Kecamatan tamalate | | 184.851.072,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 32.787.072,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 11 Unit | 11 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 152.064.000,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.01.2.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 1.471.978.800,00 | 2.040.684.900,00 | 1.516.544.500,00 | 44.565.700,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat Kecamatan tamalate | | 1.001.438.657,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 154.400.000,00 | 133.400.000,00 | 133.400.000,00 | -21.000.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 294.056.808,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 233.250.000,00 | 230.562.000,00 | 230.562.000,00 | -2.688.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 274.552.713,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 61.550.000,00 | 578.840.900,00 | 180.700.500,00 | 119.150.500,00 | Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 273.604.949,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.022.778.800,00 | 1.097.882.000,00 | 971.882.000,00 | -50.896.800,00 | Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 159.224.187,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 171.995.450,00 | 168.334.450,00 | 369.589.450,00 | 197.594.000,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat Kecamatan tamalate | | 606.333.608,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 39.770.000,00 | 39.770.000,00 | 36.630.000,00 | -3.140.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 53.601.113,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 168 Unit | 168 Unit | 132.225.450,00 | 128.564.450,00 | 111.554.450,00 | -20.671.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 272.732.495,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 221.405.000,00 | 221.405.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 180.000.000,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan** | | | | **95 %** | **95 %** | **15.158.667.600,00** | **15.071.797.600,00** | **15.071.797.600,00** | **-1.088.364.439,00** | | | | | | | **14.070.303.161,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 100 % | 100 % | 59.662.600,00 | 65.672.600,00 | 65.672.600,00 | 6.010.000,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat Kecamatan Tamalate | | 583.548.000,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 263.548.000,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 59.662.600,00 | 65.672.600,00 | 65.672.600,00 | 6.010.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 320.000.000,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada CamaT* | | | | 100 % | 100 % | 15.099.005.000,00 | 15.006.125.000,00 | 15.006.125.000,00 | -92.880.000,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat Kecamatan tamalate | | 13.486.755.161,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 15.099.005.000,00 | 15.006.125.000,00 | 15.006.125.000,00 | -92.880.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 13.486.755.161,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **100<br>95 %<br>%** | **100<br>95 %<br>%** | **190.694.060,00** | **183.853.580,00** | **183.853.580,00** | **58.210.900,00** | | | | | | | **248.904.960,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 190.694.060,00 | 183.853.580,00 | 183.853.580,00 | -6.840.480,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat Kecamatan tamalate | | 248.904.960,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 11 Lembaga Kemasyarakatan | 11 Lembaga Kemasyarakatan | 190.694.060,00 | 183.853.580,00 | 183.853.580,00 | -6.840.480,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 248.904.960,00 | KECAMATAN TAMALATE |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan Yang Dapat Diselesaikan** | | | | **80 %** | **80 %** | **686.400.000,00** | **687.992.000,00** | **687.992.000,00** | **-267.668.000,00** | | | | | | | **418.732.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum* | | | | 100 % | 100 % | 146.400.000,00 | 147.343.000,00 | 147.343.000,00 | 943.000,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat Kecamatan tamalate | | 155.184.000,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 14.400.000,00 | 14.694.000,00 | 14.694.000,00 | 294.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 15.264.000,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 11 Laporan | 11 Laporan | 132.000.000,00 | 132.649.000,00 | 132.649.000,00 | 649.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 139.920.000,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | *Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 540.000.000,00 | 540.649.000,00 | 540.649.000,00 | 649.000,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat Kecamatan tamalate | | 263.548.000,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 540.000.000,00 | 540.649.000,00 | 540.649.000,00 | 649.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 263.548.000,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan Kelurahan berbasis Digital** | | | | **100 %** | **100 %** | **14.885.081.288,00** | **14.830.278.488,00** | **14.491.198.488,00** | **-3.228.015.147,00** | | | | | | | **11.657.066.141,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 14.885.081.288,00 | 14.830.278.488,00 | 14.491.198.488,00 | -393.882.800,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat Kecamatan tamalate | | 11.657.066.141,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.05.2.01.0007 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal* | | | | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 14.885.081.288,00 | 14.830.278.488,00 | 14.491.198.488,00 | -393.882.800,00 | Kota Makassar, Tamalate, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 11.657.066.141,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | | **KELURAHAN BALANG BARU KECAMATAN TAMALATE** | | | | | | | **499.612.020,00** | **497.243.748,00** | **476.243.748,00** | **-23.368.272,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.612.020,00** | **497.243.748,00** | **476.243.748,00** | **-23.368.272,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.612.020,00** | **497.243.748,00** | **476.243.748,00** | **-23.368.272,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan**<br>**Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **100**<br>**95 %**<br>**%** | **100**<br>**95 %**<br>**%** | **499.612.020,00** | **497.243.748,00** | **476.243.748,00** | **387.980,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 499.612.020,00 | 497.243.748,00 | 476.243.748,00 | -23.368.272,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | MASYARAKAT KELURAHAN BALANG BARU | | 500.000.000,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 9 Unit | 9 Unit | 388.152.300,00 | 388.107.028,00 | 388.107.028,00 | -45.272,00 | Kota Makassar, Tamalate, Balang Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 2 Pokmas / Ormas | 2 Pokmas / Ormas | 111.459.720,00 | 109.136.720,00 | 88.136.720,00 | -23.323.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Balang Baru | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | | **KELURAHAN BAROMBONG KECAMATAN TAMALATE** | | | | | | | **358.589.100,00** | **358.589.100,00** | **356.089.100,00** | **-2.500.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **358.589.100,00** | **358.589.100,00** | **356.089.100,00** | **-2.500.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **358.589.100,00** | **358.589.100,00** | **356.089.100,00** | **-2.500.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **100 95 % %** | **100 95 % %** | **358.589.100,00** | **358.589.100,00** | **356.089.100,00** | **141.410.900,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 358.589.100,00 | 358.589.100,00 | 356.089.100,00 | -2.500.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | MASYARAKAT KELURAHAN BAROMBONG | | 500.000.000,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 327.482.100,00 | 327.482.100,00 | 327.482.100,00 | 0,00 | Kota Makassar, Tamalate, Barombong | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 4 Pokmas / Ormas | 4 Pokmas / Ormas | 31.107.000,00 | 31.107.000,00 | 28.607.000,00 | -2.500.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Barombong | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | | **KELURAHAN BONGAYA KECAMATAN TAMALATE** | | | | | | | **499.507.260,00** | **497.723.000,00** | **471.723.000,00** | **-27.784.260,00** | | | | | | | **450.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.507.260,00** | **497.723.000,00** | **471.723.000,00** | **-27.784.260,00** | | | | | | | **450.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.507.260,00** | **497.723.000,00** | **471.723.000,00** | **-27.784.260,00** | | | | | | | **450.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang Mendapat Pemberdayaan Persentase Sarana dan Prasarana Lingkup Kelurahan dalam Kondisi Baik** | | | | **100 95 % %** | **100 95 % %** | **499.507.260,00** | **497.723.000,00** | **471.723.000,00** | **-49.507.260,00** | | | | | | | **450.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 499.507.260,00 | 497.723.000,00 | 471.723.000,00 | -27.784.260,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | MASYARAKAT KELURAHAN BONGAYA | | 450.000.000,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 7 Unit | 7 Unit | 343.100.600,00 | 343.100.600,00 | 343.100.600,00 | 0,00 | Kota Makassar, Tamalate, Bongaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 4 Pokmas / Ormas | 4 Pokmas / Ormas | 156.406.660,00 | 154.622.400,00 | 128.622.400,00 | -27.784.260,00 | Kota Makassar, Tamalate, Bongaya | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 200.000.000,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | | **KELURAHAN JONGAYA KECAMATAN TAMALATE** | | | | | | | **499.925.372,00** | **467.100.322,00** | **445.350.322,00** | **-54.575.050,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.925.372,00** | **467.100.322,00** | **445.350.322,00** | **-54.575.050,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.925.372,00** | **467.100.322,00** | **445.350.322,00** | **-54.575.050,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan<br>Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **100<br>95 %<br>%** | **100<br>95 %<br>%** | **499.925.372,00** | **467.100.322,00** | **445.350.322,00** | **74.628,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 499.925.372,00 | 467.100.322,00 | 445.350.322,00 | -54.575.050,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | MASYARAKAT KELURAHAN JONGAYA | | 500.000.000,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 352.115.600,00 | 346.755.000,00 | 346.755.000,00 | -5.360.600,00 | Kota Makassar, Tamalate, Jongaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 4 Pokmas / Ormas | 4 Pokmas / Ormas | 147.809.772,00 | 120.345.322,00 | 98.595.322,00 | -49.214.450,00 | Kota Makassar, Tamalate, Jongaya | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | | **KELURAHAN MACCINI SOMBALA KECAMATAN TAMALATE** | | | | | | | **499.751.500,00** | **498.539.300,00** | **498.539.300,00** | **-1.212.200,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.751.500,00** | **498.539.300,00** | **498.539.300,00** | **-1.212.200,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.751.500,00** | **498.539.300,00** | **498.539.300,00** | **-1.212.200,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan<br>Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **100<br>95 %<br>%** | **100<br>95 %<br>%** | **499.751.500,00** | **498.539.300,00** | **498.539.300,00** | **248.500,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 499.751.500,00 | 498.539.300,00 | 498.539.300,00 | -1.212.200,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | MASYARAKAT KELURAHAN MACCINI SOMBALA | | 500.000.000,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 357.000.000,00 | 449.239.300,00 | 449.239.300,00 | 92.239.300,00 | Kota Makassar, Tamalate, Maccini Sombala | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 5 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas | 142.751.500,00 | 49.300.000,00 | 49.300.000,00 | -93.451.500,00 | Kota Makassar, Tamalate, Maccini Sombala | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | | **KELURAHAN MANGASA KECAMATAN TAMALATE** | | | | | | | **499.368.380,00** | **488.263.020,00** | **471.263.020,00** | **-28.105.360,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.368.380,00** | **488.263.020,00** | **471.263.020,00** | **-28.105.360,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.368.380,00** | **488.263.020,00** | **471.263.020,00** | **-28.105.360,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **100 %** | **100 %** | **499.368.380,00** | **488.263.020,00** | **471.263.020,00** | **631.620,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 499.368.380,00 | 488.263.020,00 | 471.263.020,00 | -28.105.360,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | MASYARAKAT KELURAHAN MANGASA | | 500.000.000,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 369.948.500,00 | 369.948.500,00 | 369.948.500,00 | 0,00 | Kota Makassar, Tamalate, Mangasa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 129.419.880,00 | 118.314.520,00 | 101.314.520,00 | -28.105.360,00 | Kota Makassar, Tamalate, Mangasa | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | | **KELURAHAN MANNURUKI KECAMATAN TAMALATE** | | | | | | | **499.980.036,00** | **497.598.040,00** | **467.198.040,00** | **-32.781.996,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.980.036,00** | **497.598.040,00** | **467.198.040,00** | **-32.781.996,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.980.036,00** | **497.598.040,00** | **467.198.040,00** | **-32.781.996,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang Mendapat Pemberdayaan**<br>**Persentase Sarana dan Prasarana Lingkup Kelurahan dalam Kondisi Baik** | | | | **100**<br>**95 %**<br>**%** | **100**<br>**95 %**<br>**%** | **499.980.036,00** | **497.598.040,00** | **467.198.040,00** | **19.964,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 499.980.036,00 | 497.598.040,00 | 467.198.040,00 | -32.781.996,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | MASYARAKAT KELURAHAN MANNURUKI | | 500.000.000,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 438.500.000,00 | 438.500.000,00 | 438.500.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Tamalate, Mannuruki | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 61.480.036,00 | 59.098.040,00 | 28.698.040,00 | -32.781.996,00 | Kota Makassar, Tamalate, Mannuruki | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | | **KELURAHAN PA`BAENG BAENG KECAMATAN TAMALATE** | | | | | | | **498.682.345,00** | **498.682.000,00** | **467.182.000,00** | **-31.500.345,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **498.682.345,00** | **498.682.000,00** | **467.182.000,00** | **-31.500.345,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **498.682.345,00** | **498.682.000,00** | **467.182.000,00** | **-31.500.345,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan<br>Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **100<br>95 %<br>%** | **100<br>95 %<br>%** | **498.682.345,00** | **498.682.000,00** | **467.182.000,00** | **1.317.655,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 498.682.345,00 | 498.682.000,00 | 467.182.000,00 | -31.500.345,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | MASYARAKAT KELURAHAN PABAENG BAENG | | 500.000.000,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 328.827.345,00 | 342.248.100,00 | 342.248.100,00 | 13.420.755,00 | Kota Makassar, Tamalate, Pa'baeng-Baeng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 332.578.945,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 4 Pokmas / Ormas | 4 Pokmas / Ormas | 169.855.000,00 | 156.433.900,00 | 124.933.900,00 | -44.921.100,00 | Kota Makassar, Tamalate, Pa'baeng-Baeng | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 167.421.055,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | | **KELURAHAN PARANG TAMBUNG KECAMATAN TAMALATE** | | | | | | | **474.602.500,00** | **474.404.800,00** | **455.404.800,00** | **-19.197.700,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **474.602.500,00** | **474.404.800,00** | **455.404.800,00** | **-19.197.700,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **474.602.500,00** | **474.404.800,00** | **455.404.800,00** | **-19.197.700,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan<br>Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **100<br>95 %<br>%** | **100<br>95 %<br>%** | **474.602.500,00** | **474.404.800,00** | **455.404.800,00** | **25.397.500,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | - | 100 % | 474.602.500,00 | 474.404.800,00 | 455.404.800,00 | -19.197.700,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | MASYARAKAT KELURAHAN PARANG TAMBUNG | | 500.000.000,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 8 Unit | 8 Unit | 393.728.900,00 | 393.531.200,00 | 393.531.200,00 | -197.700,00 | Kota Makassar, Tamalate, Parang Tambung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 2 Pokmas / Ormas | 2 Pokmas / Ormas | 80.873.600,00 | 80.873.600,00 | 61.873.600,00 | -19.000.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Parang Tambung | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | | **KELURAHAN TANJUNG MERDEKA KECAMATAN TAMALATE** | | | | | | | **469.415.700,00** | **458.826.520,00** | **430.415.700,00** | **-39.000.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **469.415.700,00** | **458.826.520,00** | **430.415.700,00** | **-39.000.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **469.415.700,00** | **458.826.520,00** | **430.415.700,00** | **-39.000.000,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan**<br>**Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **100**<br>**95 %**<br>**%** | **100**<br>**95 %**<br>**%** | **469.415.700,00** | **458.826.520,00** | **430.415.700,00** | **30.584.300,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 469.415.700,00 | 458.826.520,00 | 430.415.700,00 | -39.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | MASYARAKAT KELURAHAN TANJUNG MERDEKA | | 500.000.000,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 8 Unit | 8 Unit | 397.478.700,00 | 386.889.520,00 | 373.478.700,00 | -24.000.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Tanjung Merdeka | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 71.937.000,00 | 71.937.000,00 | 56.937.000,00 | -15.000.000,00 | Kota Makassar, Tamalate, Tanjung Merdeka | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | | **KELURAHAN BONTODURI KECAMATAN TAMALATE** | | | | | | | **499.999.820,00** | **494.408.312,00** | **474.908.312,00** | **-25.091.508,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.999.820,00** | **494.408.312,00** | **474.908.312,00** | **-25.091.508,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.999.820,00** | **494.408.312,00** | **474.908.312,00** | **-25.091.508,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan**<br>**Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **100**<br>**95 %**<br>**%** | **100**<br>**95 %**<br>**%** | **499.999.820,00** | **494.408.312,00** | **474.908.312,00** | **180,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 499.999.820,00 | 494.408.312,00 | 474.908.312,00 | -25.091.508,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | MASYARAKAT KELURAHAN BONTODURI | | 500.000.000,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 378.962.600,00 | 373.371.400,00 | 373.371.400,00 | -5.591.200,00 | Kota Makassar, Tamalate, Bonto Duri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 121.037.220,00 | 121.036.912,00 | 101.536.912,00 | -19.500.308,00 | Kota Makassar, Tamalate, Bonto Duri | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN TAMALATE |
| | | **KECAMATAN UJUNG PANDANG** | | | | | | | **34.833.928.747,00** | **38.612.779.100,00** | **38.544.772.227,00** | **3.710.843.480,00** | | | | | | | **51.972.500.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **34.833.928.747,00** | **38.612.779.100,00** | **38.544.772.227,00** | **3.710.843.480,00** | | | | | | | **51.972.500.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **34.833.928.747,00** | **38.612.779.100,00** | **38.544.772.227,00** | **3.710.843.480,00** | | | | | | | **51.972.500.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**<br>**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik** | | | | **100**<br>**90 %**<br>**%** | **100**<br>**90 %**<br>**%** | **13.422.262.243,00** | **16.483.446.060,00** | **16.596.834.007,00** | **2.380.237.757,00** | | | | | | | **15.802.500.000,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat daerah* | | | | 100 % | 100 % | 79.556.320,00 | 79.556.320,00 | 49.896.320,00 | -29.660.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Masyarakat<br>Masyarakat Kecamatan Ujung Pandang | | 92.500.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 27.665.000,00 | 27.665.000,00 | 20.405.000,00 | -7.260.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 26.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.198.320,00 | 9.198.320,00 | 4.698.320,00 | -4.500.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.224.000,00 | 9.224.000,00 | 4.724.000,00 | -4.500.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.175.000,00 | 9.175.000,00 | 4.675.000,00 | -4.500.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.175.000,00 | 9.175.000,00 | 4.675.000,00 | -4.500.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.119.000,00 | 15.119.000,00 | 10.719.000,00 | -4.400.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 6.500.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 10.963.396.383,00 | 13.040.446.736,00 | 13.043.968.783,00 | 2.080.572.400,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Masyarakat | | 12.305.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 69 Orang/bulan | 69 Orang/bulan | 9.676.938.383,00 | 11.775.248.736,00 | 11.775.266.783,00 | 2.098.328.400,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 11.000.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 693.120.000,00 | 719.760.000,00 | 719.760.000,00 | 26.640.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 750.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 309.190.000,00 | 302.290.000,00 | 302.290.000,00 | -6.900.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 280.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 284.148.000,00 | 243.148.000,00 | 246.652.000,00 | -37.496.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 275.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Tersedianya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 48.000.000,00 | 687.000.000,00 | 732.000.000,00 | 684.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Masyarakat | | 400.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 200 Paket | 200 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 175.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 21 Orang | 21 Orang | 48.000.000,00 | 687.000.000,00 | 732.000.000,00 | 684.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 225.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 262.225.000,00 | 558.990.704,00 | 547.635.004,00 | 285.410.004,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Masyarakat | | 580.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 51.282.000,00 | 12.708.000,00 | 12.708.000,00 | -38.574.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 25.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 49.336.000,00 | 380.796.740,00 | 380.796.740,00 | 331.460.740,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 91.287.000,00 | 21.745.964,00 | 30.390.264,00 | -60.896.736,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 60.320.000,00 | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 | -58.580.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 325.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 10.000.000,00 | 142.000.000,00 | 122.000.000,00 | 112.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 110.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Tersedianya layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Masyarakat | | 600.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 150.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 300.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.01.2.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 150.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tersedianya layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 1.057.444.540,00 | 897.033.300,00 | 1.012.334.900,00 | -45.109.640,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Masyarakat | | 1.200.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 122.676.000,00 | 77.277.600,00 | 80.781.600,00 | -41.894.400,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 300.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 193.518.000,00 | 177.751.300,00 | 161.956.900,00 | -31.561.100,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 300.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 741.250.540,00 | 642.004.400,00 | 769.596.400,00 | 28.345.860,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 600.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 1.011.640.000,00 | 1.220.419.000,00 | 1.210.999.000,00 | 199.359.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Masyarakat | | 625.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 39.270.000,00 | 39.270.000,00 | 36.130.000,00 | -3.140.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 75.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 318.540.000,00 | 171.240.000,00 | 164.960.000,00 | -153.580.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 375.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 12 Unit | 12 Unit | 55.380.000,00 | 55.380.000,00 | 55.380.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 50.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 565.510.000,00 | 921.589.000,00 | 921.589.000,00 | 356.079.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 75.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 32.940.000,00 | 32.940.000,00 | 32.940.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 50.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **100 95 % %** | **100 95 % %** | **16.050.591.500,00** | **15.783.086.700,00** | **15.728.364.400,00** | **11.049.408.500,00** | | | | | | | **27.100.000.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | | | | 100 % | 100 % | 45.987.000,00 | 44.298.000,00 | 61.664.000,00 | 15.677.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | Masyarakat | | 100.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 45.987.000,00 | 44.298.000,00 | 61.664.000,00 | 15.677.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat* | | | | 100 % | 100 % | 16.004.604.500,00 | 15.738.788.700,00 | 15.666.700.400,00 | -337.904.100,00 | | | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | Masyarakat | | 27.000.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 16.004.604.500,00 | 15.738.788.700,00 | 15.666.700.400,00 | -337.904.100,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | - - | | | 27.000.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **100 %** | **100 %** | **167.369.900,00** | **163.703.900,00** | **146.903.900,00** | **-47.369.900,00** | | | | | | | **120.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | | | | 100 % | 100 % | 167.369.900,00 | 163.703.900,00 | 146.903.900,00 | -20.466.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Masyarakat | | 120.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 167.369.900,00 | 163.703.900,00 | 146.903.900,00 | -20.466.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 120.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan Yang Dapat Diselesaikan Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan Yang Dapat Diselesaikan** | | | | **100 95 % %** | **100 95 % %** | **584.400.000,00** | **584.400.000,00** | **584.400.000,00** | **365.600.000,00** | | | | | | | **950.000.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | | | | 100 % | 100 % | 584.400.000,00 | 584.400.000,00 | 584.400.000,00 | 0,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | Masyarakat | | 950.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 464.400.000,00 | 464.400.000,00 | 464.400.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 800.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 150.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Di Tingkat Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Di Tingkat Kecamatan** | | | | **100 95 % %** | **100 95 % %** | **4.609.305.104,00** | **5.598.142.440,00** | **5.488.269.920,00** | **3.390.694.896,00** | | | | | | | **8.000.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 4.609.305.104,00 | 5.598.142.440,00 | 5.488.269.920,00 | 878.964.816,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | Masyarakat | | 8.000.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.05.2.01.0007 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 4.609.305.104,00 | 5.598.142.440,00 | 5.488.269.920,00 | 878.964.816,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 8.000.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | | **KELURAHAN BARU KECAMATAN UJUNG PANDANG** | | | | | | | **499.999.900,00** | **499.925.750,00** | **464.925.750,00** | **-35.074.150,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.999.900,00** | **499.925.750,00** | **464.925.750,00** | **-35.074.150,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.999.900,00** | **499.925.750,00** | **464.925.750,00** | **-35.074.150,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik<br>Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan<br>Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **45<br>70<br>95<br>Kelompok<br>Kelompok<br>%** | **45<br>70<br>95<br>Kelompok<br>Kelompok<br>%** | **499.999.900,00** | **499.925.750,00** | **464.925.750,00** | **100.000.100,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | | | | 100 % | 100 % | 499.999.900,00 | 499.925.750,00 | 464.925.750,00 | -35.074.150,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | MASYARAKAT | | 600.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 2 Unit | 3 Unit | 328.953.900,00 | 167.381.600,00 | 167.381.600,00 | -161.572.300,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 350.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 171.046.000,00 | 332.544.150,00 | 297.544.150,00 | 126.498.150,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | | **KELURAHAN BULOGADING KECAMATAN UJUNG PANDANG** | | | | | | | **343.296.663,00** | **343.220.663,00** | **304.452.663,00** | **-38.844.000,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **343.296.663,00** | **343.220.663,00** | **304.452.663,00** | **-38.844.000,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **343.296.663,00** | **343.220.663,00** | **304.452.663,00** | **-38.844.000,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **100 %** | **100 %** | **343.296.663,00** | **343.220.663,00** | **304.452.663,00** | **256.703.337,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | | | | 100 % | 100 % | 343.296.663,00 | 343.220.663,00 | 304.452.663,00 | -38.844.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | MASYARAKAT | | 600.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 149.016.663,00 | 149.016.663,00 | 149.016.663,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 350.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 194.280.000,00 | 194.204.000,00 | 155.436.000,00 | -38.844.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | | **KELURAHAN LAE-LAE KECAMATAN UJUNG PANDANG** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **250.300.000,00** | **-249.700.000,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **250.300.000,00** | **-249.700.000,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **250.300.000,00** | **-249.700.000,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan<br>Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik<br>Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan<br>Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **100<br>45<br>70<br>95 %<br>Kelompok<br>Kelompok<br>%** | **100<br>45<br>70<br>95 %<br>Kelompok<br>Kelompok<br>%** | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **250.300.000,00** | **100.000.000,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | | | | 100 % | 100 % | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 250.300.000,00 | -249.700.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | MASYARAKAT | | 600.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 213.556.000,00 | 208.540.000,00 | 5.040.000,00 | -208.516.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Lae-Lae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 350.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 286.444.000,00 | 291.460.000,00 | 245.260.000,00 | -41.184.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Lae-Lae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | | **KELURAHAN LAJANGIRU KECAMATAN UJUNG PANDANG** | | | | | | | **499.999.900,00** | **499.999.900,00** | **474.999.900,00** | **-25.000.000,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.999.900,00** | **499.999.900,00** | **474.999.900,00** | **-25.000.000,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.999.900,00** | **499.999.900,00** | **474.999.900,00** | **-25.000.000,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan<br>Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik<br>Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan<br>Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **100<br>45<br>70<br>95 %<br>Kelompok<br>Kelompok<br>%** | **100<br>45<br>70<br>95 %<br>Kelompok<br>Kelompok<br>%** | **499.999.900,00** | **499.999.900,00** | **474.999.900,00** | **100.000.100,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | | | | 100 % | 100 % | 499.999.900,00 | 499.999.900,00 | 474.999.900,00 | -25.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | MASYARAKAT | | 600.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 378.213.900,00 | 316.303.800,00 | 316.303.800,00 | -61.910.100,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Lajangiru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 350.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 121.786.000,00 | 183.696.100,00 | 158.696.100,00 | 36.910.100,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Lajangiru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | | **KELURAHAN LOSARI KECAMATAN UJUNG PANDANG** | | | | | | | **500.000.000,00** | **499.353.280,00** | **477.353.280,00** | **-22.646.720,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **499.353.280,00** | **477.353.280,00** | **-22.646.720,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **499.353.280,00** | **477.353.280,00** | **-22.646.720,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik<br>Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik<br>Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan<br>Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **100<br>45<br>70<br>95 %<br>Kelompok<br>Kelompok<br>%** | **100<br>45<br>70<br>95 %<br>Kelompok<br>Kelompok<br>%** | **500.000.000,00** | **499.353.280,00** | **477.353.280,00** | **100.000.000,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | | | | 100 % | 100 % | 500.000.000,00 | 499.353.280,00 | 477.353.280,00 | -22.646.720,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | MASYARAKAT | | 600.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 261.072.000,00 | 260.952.000,00 | 260.952.000,00 | -120.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Losari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 350.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 238.928.000,00 | 238.401.280,00 | 216.401.280,00 | -22.526.720,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Losari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | | **KELURAHAN MALOKU KECAMATAN UJUNG PANDANG** | | | | | | | **499.999.950,00** | **499.999.700,00** | **477.599.700,00** | **-22.400.250,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.999.950,00** | **499.999.700,00** | **477.599.700,00** | **-22.400.250,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.999.950,00** | **499.999.700,00** | **477.599.700,00** | **-22.400.250,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan<br>Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik<br>Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan<br>Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **100<br>45<br>70<br>95 %<br>Kelompok<br>Kelompok<br>%** | **100<br>45<br>70<br>95 %<br>Kelompok<br>Kelompok<br>%** | **499.999.950,00** | **499.999.700,00** | **477.599.700,00** | **100.000.050,00** | | | | | | **600.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | | | | 100 % | 100 % | 499.999.950,00 | 499.999.700,00 | 477.599.700,00 | -22.400.250,00 | | | - | -<br>- | MASYARAKAT | | 600.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 294.070.050,00 | 278.633.700,00 | 278.633.700,00 | -15.436.350,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Maloku | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 350.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 205.929.900,00 | 221.366.000,00 | 198.966.000,00 | -6.963.900,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Maloku | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | | **KELURAHAN MANGKURA KECAMATAN UJUNG PANDANG** | | | | | | | **499.999.920,00** | **499.289.239,00** | **470.670.320,00** | **-29.329.600,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.999.920,00** | **499.289.239,00** | **470.670.320,00** | **-29.329.600,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.999.920,00** | **499.289.239,00** | **470.670.320,00** | **-29.329.600,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik<br>Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik<br>Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan<br>Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **100<br>45<br>70<br>95 %<br>Kelompok<br>Kelompok<br>%** | **100<br>45<br>70<br>95 %<br>Kelompok<br>Kelompok<br>%** | **499.999.920,00** | **499.289.239,00** | **470.670.320,00** | **100.000.080,00** | | | | | | **600.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | | | | 100 % | 100 % | 499.999.920,00 | 499.289.239,00 | 470.670.320,00 | -29.329.600,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | MASYARAKAT | | 600.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 404.256.600,00 | 250.994.600,00 | 250.394.000,00 | -153.862.600,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 350.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 95.743.320,00 | 248.294.639,00 | 220.276.320,00 | 124.533.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Mangkura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | | **KELURAHAN PISANG SELATAN KECAMATAN UJUNG PANDANG** | | | | | | | **499.975.120,00** | **499.083.220,00** | **482.583.220,00** | **-17.391.900,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.975.120,00** | **499.083.220,00** | **482.583.220,00** | **-17.391.900,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.975.120,00** | **499.083.220,00** | **482.583.220,00** | **-17.391.900,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik<br>Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik<br>Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan<br>Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **100<br>45<br>70<br>95 %<br>Kelompok<br>Kelompok<br>%** | **100<br>45<br>70<br>95 %<br>Kelompok<br>Kelompok<br>%** | **499.975.120,00** | **499.083.220,00** | **482.583.220,00** | **100.024.880,00** | | | | | | **600.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | | | | 100 % | 100 % | 499.975.120,00 | 499.083.220,00 | 482.583.220,00 | -17.391.900,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | MASYARAKAT | | 600.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 272.597.800,00 | 406.740.300,00 | 406.740.300,00 | 134.142.500,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Pisang Selatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 350.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 227.377.320,00 | 92.342.920,00 | 75.842.920,00 | -151.534.400,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Pisang Selatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | | **KELURAHAN PISANG UTARA KECAMATAN UJUNG PANDANG** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **484.143.140,00** | **-15.856.860,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **484.143.140,00** | **-15.856.860,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **484.143.140,00** | **-15.856.860,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **100 45 70 95 % Kelompok Kelompok %** | **100 45 70 95 % Kelompok Kelompok %** | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **484.143.140,00** | **100.000.000,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | | | | 100 % | 100 % | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 484.143.140,00 | -15.856.860,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | MASYARAKAT | | 600.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 393.351.600,00 | 331.706.700,00 | 331.706.700,00 | -61.644.900,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Pisang Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 350.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 106.648.400,00 | 168.293.300,00 | 152.436.440,00 | 45.788.040,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Pisang Utara | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | | **KELURAHAN SAWERIGADING KECAMATAN UJUNG PANDANG** | | | | | | | **499.999.800,00** | **499.999.800,00** | **472.499.800,00** | **-27.500.000,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.999.800,00** | **499.999.800,00** | **472.499.800,00** | **-27.500.000,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.999.800,00** | **499.999.800,00** | **472.499.800,00** | **-27.500.000,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik<br>Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik<br>Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan<br>Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **100<br>45<br>70<br>95 %<br>Kelompok<br>Kelompok<br>%** | **100<br>45<br>70<br>95 %<br>Kelompok<br>Kelompok<br>%** | **499.999.800,00** | **499.999.800,00** | **472.499.800,00** | **100.000.200,00** | | | | | | | **600.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | | | | 100 % | 100 % | 499.999.800,00 | 499.999.800,00 | 472.499.800,00 | -27.500.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | MASYARAKAT | | 600.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 318.385.100,00 | 318.338.500,00 | 318.338.500,00 | -46.600,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Sawerigading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 350.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 181.614.700,00 | 181.661.300,00 | 154.161.300,00 | -27.453.400,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Pisang Selatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG PANDANG |
| | | **KECAMATAN UJUNG TANAH** | | | | | | | **26.804.943.281,00** | **29.178.010.824,00** | **28.989.767.616,00** | **2.184.824.335,00** | | | | | | | **33.805.916.762,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **26.804.943.281,00** | **29.178.010.824,00** | **28.989.767.616,00** | **2.184.824.335,00** | | | | | | | **33.805.916.762,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **26.804.943.281,00** | **29.178.010.824,00** | **28.989.767.616,00** | **2.184.824.335,00** | | | | | | | **33.805.916.762,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK<br>PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS** | | | | **100<br>90 %<br>%** | **100<br>90 %<br>%** | **11.775.865.462,00** | **13.264.717.148,00** | **13.008.690.740,00** | **8.076.740.710,00** | | | | | | | **19.852.606.172,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun* | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 92.148.320,00 | 90.756.427,00 | 64.096.320,00 | -28.052.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | SKPD | | 141.230.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 37.108.000,00 | 28.308.000,00 | 21.048.000,00 | -16.060.000,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 42.763.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.426.720,00 | 8.326.720,00 | 5.326.720,00 | -1.100.000,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 16.790.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.400.000,00 | 11.585.000,00 | 8.585.000,00 | 3.185.000,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 15.165.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.141.400,00 | 9.708.400,00 | 6.708.400,00 | -2.433.000,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 18.027.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.400.000,00 | 8.556.107,00 | 5.556.000,00 | -1.844.000,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 15.189.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 8.396.400,00 | 8.396.400,00 | 5.396.400,00 | -3.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 16.800.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 18.275.800,00 | 15.875.800,00 | 11.475.800,00 | -6.800.000,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 16.496.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Indeks kepuasan ASN perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan ( Kepegawaian, perlengkapan, dan keuangan )* | | | | - | 90 % | 9.706.564.542,00 | 10.515.362.185,00 | 10.508.775.824,00 | 802.211.282,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | SKPD | | 15.276.299.410,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 76 Orang/bulan | 76 Orang/bulan | 8.364.960.042,00 | 9.196.147.585,00 | 9.196.161.224,00 | 831.201.182,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 12.828.046.610,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 655.041.400,00 | 656.361.400,00 | 652.761.400,00 | -2.280.000,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 1.494.600.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 672.914.300,00 | 329.915.600,00 | 329.915.600,00 | -342.998.700,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 915.722.800,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 13.648.800,00 | 332.937.600,00 | 329.937.600,00 | 316.288.800,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 37.930.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.01.2.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | *Tersusunnya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah* | | | | 100 % | 100 % | 102.202.800,00 | 102.202.800,00 | 12.202.800,00 | -90.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | SKPD | | 17.910.422,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.01.2.04.0004 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 102.202.800,00 | 102.202.800,00 | 12.202.800,00 | -90.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 17.910.422,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Tersedianya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 90 % | 90 % | 96.000.000,00 | 297.000.000,00 | 210.000.000,00 | 114.000.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | SKPD | | 410.500.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 170.500.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 8 Orang | 45 Orang | 96.000.000,00 | 297.000.000,00 | 210.000.000,00 | 114.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 240.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Indeks Kepuasan ASN perangkat daerah terhadap pelayanan kesektariatan (Kepegawaian, perlengkapan, dan keuangan)* | | | | - | 90 % | 270.252.000,00 | 290.306.940,00 | 222.307.000,00 | -47.945.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | SKPD | | 519.185.840,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 54.828.000,00 | 54.828.000,00 | 54.828.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 57.150.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 2 Paket | 5.997.000,00 | 37.987.500,00 | 37.987.500,00 | 31.990.500,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 91.585.840,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 8 Paket | 9 Paket | 79.827.000,00 | 68.331.440,00 | 68.331.500,00 | -11.495.500,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 94.050.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 6 Dokumen | 5 Dokumen | 89.600.000,00 | 17.160.000,00 | 17.160.000,00 | -72.440.000,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 76.400.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 4 Laporan | 5 Laporan | 40.000.000,00 | 112.000.000,00 | 44.000.000,00 | 4.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 200.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Presentase barang milik daerah yang diadakan* | | | | 100 % | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | SKPD | | 1.514.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 600.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 206.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 400.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 308.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Indeks Kepuasan ASN perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (Kepegawaian, perlengkapan, dan keuangan)* | | | | 90 % | 90 % | 1.001.931.800,00 | 1.226.635.796,00 | 1.276.635.796,00 | 274.703.996,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | SKPD | | 804.550.800,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 229.894.400,00 | 364.949.196,00 | 364.949.196,00 | 135.054.796,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 201.235.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 772.037.400,00 | 861.686.600,00 | 911.686.600,00 | 139.649.200,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 603.315.800,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara* | | | | - | 100 % | 506.766.000,00 | 742.453.000,00 | 714.673.000,00 | 207.907.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | SKPD | | 1.168.929.700,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 42.520.000,00 | 42.520.000,00 | 39.380.000,00 | -3.140.000,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 60.610.200,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 168 Unit | 168 Unit | 309.600.000,00 | 309.600.000,00 | 284.960.000,00 | -24.640.000,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 774.143.500,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 67 Unit | 67 Unit | 63.680.000,00 | 63.680.000,00 | 63.680.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 93.290.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 40.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 2 Unit | 90.966.000,00 | 326.653.000,00 | 326.653.000,00 | 235.687.000,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 200.886.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan** | | | | **-** | **100 %** | **8.813.620.420,00** | **10.101.776.820,00** | **10.053.396.820,00** | **-475.431.431,00** | | | | | | | **8.338.188.989,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan* | | | | - | 90 % | 161.406.020,00 | 245.719.420,00 | 245.719.420,00 | 84.313.400,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | SKPD | | 134.454.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 161.406.020,00 | 245.719.420,00 | 245.719.420,00 | 84.313.400,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 134.454.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN* | | | | 90 % | 90 % | 8.652.214.400,00 | 9.856.057.400,00 | 9.807.677.400,00 | 1.155.463.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | SKPD | | 8.203.734.989,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 8.652.214.400,00 | 9.856.057.400,00 | 9.807.677.400,00 | 1.155.463.000,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 8.203.734.989,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase masyarakat/kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **100 %** | **100 %** | **178.331.080,00** | **170.331.080,00** | **166.531.080,00** | **-2.562.080,00** | | | | | | | **175.769.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *PERSENTASE KOORDINASI MASYARAKAT/KELOMPOK MASYARAKAT LINGKUP KELURAHAN DAN KECAMATAN* | | | | 100 % | 100 % | 178.331.080,00 | 170.331.080,00 | 166.531.080,00 | -11.800.000,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | SKPD | | 175.769.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 178.331.080,00 | 170.331.080,00 | 166.531.080,00 | -11.800.000,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 175.769.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase Cakupan Gangguan Ketentraman Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan yang Tertangani** | | | | **80 %** | **80 %** | **728.832.600,00** | **727.005.560,00** | **727.005.560,00** | **117.586.200,00** | | | | | | | **846.418.800,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan* | | | | 80 % | 80 % | 728.832.600,00 | 727.005.560,00 | 727.005.560,00 | -1.827.040,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | SKPD | | 846.418.800,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 520.699.400,00 | 520.819.400,00 | 520.819.400,00 | 120.000,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 611.916.800,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 208.133.200,00 | 206.186.160,00 | 206.186.160,00 | -1.947.040,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | | | 234.502.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan** | | | | **100 %** | **100 %** | **5.308.293.719,00** | **4.914.180.216,00** | **5.034.143.416,00** | **-715.359.918,00** | | | | | | | **4.592.933.801,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan* | | | | 100 % | 100 % | 5.308.293.719,00 | 4.914.180.216,00 | 5.034.143.416,00 | -274.150.303,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | - - | SKPD | | 4.592.933.801,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.05.2.01.0007 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 5.308.293.719,00 | 4.914.180.216,00 | 5.034.143.416,00 | -274.150.303,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 4.592.933.801,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | | **KELURAHAN CAMBA BERUA KECAMATAN UJUNG TANAH** | | | | | | | **498.489.820,00** | **498.489.100,00** | **487.389.100,00** | **-11.100.720,00** | | | | | | | **466.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **498.489.820,00** | **498.489.100,00** | **487.389.100,00** | **-11.100.720,00** | | | | | | | **466.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **498.489.820,00** | **498.489.100,00** | **487.389.100,00** | **-11.100.720,00** | | | | | | | **466.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Presentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan** | | | | **100 %** | **100 %** | **498.489.820,00** | **498.489.100,00** | **487.389.100,00** | **-32.489.820,00** | | | | | | | **466.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Presentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapat pemberdayaan* | | | | 100 % | 100 % | 498.489.820,00 | 498.489.100,00 | 487.389.100,00 | -11.100.720,00 | | | - | -<br>- | - | | 466.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 255.079.500,00 | 252.603.000,00 | 252.603.000,00 | -2.476.500,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Camba Berua | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 366.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 243.410.320,00 | 245.886.100,00 | 234.786.100,00 | -8.624.220,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Camba Berua | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | | **KELURAHAN CAMBAYA KECAMATAN UJUNG TANAH** | | | | | | | **499.664.628,00** | **499.664.628,00** | **478.844.628,00** | **-20.820.000,00** | | | | | | | **466.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.664.628,00** | **499.664.628,00** | **478.844.628,00** | **-20.820.000,00** | | | | | | | **466.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.664.628,00** | **499.664.628,00** | **478.844.628,00** | **-20.820.000,00** | | | | | | | **466.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **PERSENTASE MASYARAKAT/ KELOMPOK MASYARAKAT LINGKUP KELURAHAN YANG MENDAPAT PEMBERDAYAAN** | | | | **100 %** | **100 %** | **499.664.628,00** | **499.664.628,00** | **478.844.628,00** | **-33.664.628,00** | | | | | | | **466.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *PERSENTASE MASYARAKAT/ KELOMPOK MASYARAKAT LINGKUP KELURAHAN YANG MENDAPAT PEMBERDAYAAN* | | | | 100 % | 100 % | 499.664.628,00 | 499.664.628,00 | 478.844.628,00 | -20.820.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 466.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 9 Unit | 9 Unit | 270.825.500,00 | 289.920.000,00 | 289.920.000,00 | 19.094.500,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Cambaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 366.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 228.839.128,00 | 209.744.628,00 | 188.924.628,00 | -39.914.500,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Cambaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | | **KELURAHAN GUSUNG KECAMATAN UJUNG TANAH** | | | | | | | **499.999.600,00** | **499.999.600,00** | **473.229.500,00** | **-26.770.100,00** | | | | | | | **466.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.999.600,00** | **499.999.600,00** | **473.229.500,00** | **-26.770.100,00** | | | | | | | **466.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.999.600,00** | **499.999.600,00** | **473.229.500,00** | **-26.770.100,00** | | | | | | | **466.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **PERSENTASE MASYARAKAT/ KELOMPOK MASYARAKAT LINGKUP KELURAHAN YANG MENDAPAT PEMBERDAYAAN** | | | | **100 %** | **100 %** | **499.999.600,00** | **499.999.600,00** | **473.229.500,00** | **-33.999.600,00** | | | | | | | **466.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *PERSENTASE MASYARAKAT/ KELOMPOK MASYARAKAT LINGKUP KELURAHAN YANG MENDAPAT PEMBERDAYAAN* | | | | 100 % | 100 % | 499.999.600,00 | 499.999.600,00 | 473.229.500,00 | -26.770.100,00 | | | - | -<br>- | - | | 466.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 262.267.600,00 | 262.080.000,00 | 262.080.000,00 | -187.600,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Gusung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 366.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 237.732.000,00 | 237.919.600,00 | 211.149.500,00 | -26.582.500,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Gusung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU<br>TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | | **KELURAHAN PATTINGALLOANG KECAMATAN UJUNG TANAH** | | | | | | | **499.903.536,00** | **499.903.536,00** | **485.053.436,00** | **-14.850.100,00** | | | | | | | **466.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.903.536,00** | **499.903.536,00** | **485.053.436,00** | **-14.850.100,00** | | | | | | | **466.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.903.536,00** | **499.903.536,00** | **485.053.436,00** | **-14.850.100,00** | | | | | | | **466.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **PERSENTASE MASYARAKAT/ KELOMPOK MASYARAKAT LINGKUP KELURAHAN YANG MENDAPAT PEMBERDAYAAN** | | | | **100 %** | **100 %** | **499.903.536,00** | **499.903.536,00** | **485.053.436,00** | **-33.903.536,00** | | | | | | | **466.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *PERSENTASE MASYARAKAT/ KELOMPOK MASYARAKAT LINGKUP KELURAHAN YANG MENDAPAT PEMBERDAYAAN* | | | | 100 % | 100 % | 499.903.536,00 | 499.903.536,00 | 485.053.436,00 | -14.850.100,00 | | | - | -<br>- | - | | 466.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 334.433.100,00 | 334.370.000,00 | 334.370.000,00 | -63.100,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Patingalloang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU<br>TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 366.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 165.470.436,00 | 165.533.536,00 | 150.683.436,00 | -14.787.000,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Patingalloang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU<br>TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | | **KELURAHAN PATTINGALLOANG BARU KECAMATAN UJUNG TANAH** | | | | | | | **499.999.895,00** | **499.999.895,00** | **499.674.940,00** | **-324.955,00** | | | | | | | **466.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.999.895,00** | **499.999.895,00** | **499.674.940,00** | **-324.955,00** | | | | | | | **466.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.999.895,00** | **499.999.895,00** | **499.674.940,00** | **-324.955,00** | | | | | | | **466.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **PERSENTASE MASYARAKAT/ KELOMPOK MASYARAKAT LINGKUP KELURAHAN YANG MENDAPAT PEMBERDAYAAN** | | | | **100 %** | **100 %** | **499.999.895,00** | **499.999.895,00** | **499.674.940,00** | **-33.999.895,00** | | | | | | | **466.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *PERSENTASE MASYARAKAT/ KELOMPOK MASYARAKAT LINGKUP KELURAHAN YANG MENDAPAT PEMBERDAYAAN* | | | | 100 % | 100 % | 499.999.895,00 | 499.999.895,00 | 499.674.940,00 | -324.955,00 | | | - | -<br>- | - | | 466.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 226.679.655,00 | 226.679.655,00 | 226.454.700,00 | -224.955,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Patingalloang Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU<br>TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 366.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 273.320.240,00 | 273.320.240,00 | 273.220.240,00 | -100.000,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Patingalloang Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU<br>TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | | **KELURAHAN TABARINGAN KECAMATAN UJUNG TANAH** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **494.691.200,00** | **-5.308.800,00** | | | | | | | **466.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **494.691.200,00** | **-5.308.800,00** | | | | | | | **466.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **494.691.200,00** | **-5.308.800,00** | | | | | | | **466.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **PERSENTASE MASYARAKAT/ KELOMPOK MASYARAKAT LINGKUP KELURAHAN YANG MENDAPAT PEMBERDAYAAN** | | | | **100 %** | **100 %** | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **494.691.200,00** | **-34.000.000,00** | | | | | | | **466.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *PERSENTASE MASYARAKAT/ KELOMPOK MASYARAKAT LINGKUP KELURAHAN YANG MENDAPAT PEMBERDAYAAN* | | | | 100 % | 100 % | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 494.691.200,00 | -5.308.800,00 | | | - | -<br>- | - | | 466.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 262.000.000,00 | 261.608.300,00 | 261.299.700,00 | -700.300,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Tabaringan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU<br>TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 366.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 238.000.000,00 | 238.391.700,00 | 233.391.500,00 | -4.608.500,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Tabaringan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU<br>TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | | **KELURAHAN TAMALABBA KECAMATAN UJUNG TANAH** | | | | | | | **499.999.700,00** | **499.999.700,00** | **480.249.700,00** | **-19.750.000,00** | | | | | | | **587.031.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.999.700,00** | **499.999.700,00** | **480.249.700,00** | **-19.750.000,00** | | | | | | | **587.031.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.999.700,00** | **499.999.700,00** | **480.249.700,00** | **-19.750.000,00** | | | | | | | **587.031.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **PERSENTASE MASYARAKAT/ KELOMPOK MASYARAKAT LINGKUP KELURAHAN YANG MENDAPAT PEMBERDAYAAN** | | | | **100 %** | **100 %** | **499.999.700,00** | **499.999.700,00** | **480.249.700,00** | **87.031.300,00** | | | | | | | **587.031.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *PERSENTASE MASYARAKAT/ KELOMPOK MASYARAKAT LINGKUP KELURAHAN YANG MENDAPAT PEMBERDAYAAN* | | | | 100 % | 100 % | 499.999.700,00 | 499.999.700,00 | 480.249.700,00 | -19.750.000,00 | | | - | -<br>- | - | | 587.031.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 140.665.200,00 | 140.665.200,00 | 140.665.200,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Tamalabba | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 366.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 359.334.500,00 | 359.334.500,00 | 339.584.500,00 | -19.750.000,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Tamalabba | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 221.031.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | | **KELURAHAN TOTAKA KECAMATAN UJUNG TANAH** | | | | | | | **499.999.540,00** | **499.999.540,00** | **481.249.660,00** | **-18.749.880,00** | | | | | | | **466.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.999.540,00** | **499.999.540,00** | **481.249.660,00** | **-18.749.880,00** | | | | | | | **466.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.999.540,00** | **499.999.540,00** | **481.249.660,00** | **-18.749.880,00** | | | | | | | **466.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **PERSENTASE MASYARAKAT/ KELOMPOK MASYARAKAT LINGKUP KELURAHAN YANG MENDAPAT PEMBERDAYAAN** | | | | **100 %** | **100 %** | **499.999.540,00** | **499.999.540,00** | **481.249.660,00** | **-33.999.540,00** | | | | | | | **466.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *PERSENTASE MASYARAKAT/ KELOMPOK MASYARAKAT LINGKUP KELURAHAN YANG MENDAPAT PEMBERDAYAAN* | | | | 100 % | 100 % | 499.999.540,00 | 499.999.540,00 | 481.249.660,00 | -18.749.880,00 | | | - | -<br>- | - | | 466.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 170.813.440,00 | 170.965.800,00 | 170.965.800,00 | 152.360,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Totaka | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 366.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 329.186.100,00 | 329.033.740,00 | 310.283.860,00 | -18.902.240,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Totaka | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | | **KELURAHAN UJUNG TANAH KECAMATAN UJUNG TANAH** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **476.750.220,00** | **-23.249.780,00** | | | | | | | **466.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **476.750.220,00** | **-23.249.780,00** | | | | | | | **466.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **476.750.220,00** | **-23.249.780,00** | | | | | | | **466.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **PERSENTASE MASYARAKAT/ KELOMPOK MASYARAKAT LINGKUP KELURAHAN YANG MENDAPAT PEMBERDAYAAN** | | | | **100 %** | **100 %** | **500.000.000,00** | **500.000.000,00** | **476.750.220,00** | **-34.000.000,00** | | | | | | | **466.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *PERSENTASE MASYARAKAT/ KELOMPOK MASYARAKAT LINGKUP KELURAHAN YANG MENDAPAT PEMBERDAYAAN* | | | | 100 % | 100 % | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 476.750.220,00 | -23.249.780,00 | | | - | -<br>- | - | | 466.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 200.000.000,00 | 199.605.900,00 | 199.605.900,00 | -394.100,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 366.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 300.000.000,00 | 300.394.100,00 | 277.144.320,00 | -22.855.680,00 | Kota Makassar, Ujung Tanah, Ujung Tanah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN UJUNG TANAH |
| | | **KECAMATAN WAJO** | | | | | | | **25.621.561.733,00** | **28.428.802.970,00** | **28.903.874.225,00** | **3.282.312.492,00** | | | | | | | **26.569.010.388,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **25.621.561.733,00** | **28.428.802.970,00** | **28.903.874.225,00** | **3.282.312.492,00** | | | | | | | **26.569.010.388,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **25.621.561.733,00** | **28.428.802.970,00** | **28.903.874.225,00** | **3.282.312.492,00** | | | | | | | **26.569.010.388,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas** | | | | **90 Persen** | **90 Persen** | **11.760.291.739,00** | **14.547.506.056,00** | **14.579.439.711,00** | **1.448.920.809,00** | | | | | | | **13.209.212.548,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Cakupan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja* | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 76.581.400,00 | 54.674.400,00 | 31.394.400,00 | -45.187.000,00 | | | - | -<br>- | Cakupan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja | | 73.911.500,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 25.344.800,00 | 12.624.800,00 | 4.344.800,00 | -21.000.000,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 20.696.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.311.000,00 | 8.311.000,00 | 5.311.000,00 | -3.000.000,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 10.210.500,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.252.600,00 | 8.252.600,00 | 5.252.600,00 | -3.000.000,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 8.262.500,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.220.000,00 | 9.220.000,00 | 6.220.000,00 | -3.000.000,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 9.250.500,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.031.000,00 | 8.031.000,00 | 5.031.000,00 | -3.000.000,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 8.077.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 9.187.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.187.000,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 9.218.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 8.235.000,00 | 8.235.000,00 | 5.235.000,00 | -3.000.000,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 8.197.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 9.414.231.139,00 | 11.182.482.376,00 | 11.021.916.031,00 | 1.607.684.892,00 | | | - | -<br>- | Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 10.153.545.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 77 Orang/bulan | 77 Orang/bulan | 8.646.402.139,00 | 10.427.183.376,00 | 10.282.097.031,00 | 1.635.694.892,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 9.217.809.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 574.920.000,00 | 574.920.000,00 | 562.440.000,00 | -12.480.000,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 485.280.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 158.933.000,00 | 164.403.000,00 | 164.403.000,00 | 5.470.000,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 288.000.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 7.226.000,00 | 7.226.000,00 | 4.226.000,00 | -3.000.000,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 7.434.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 26.750.000,00 | 8.750.000,00 | 8.750.000,00 | -18.000.000,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 155.022.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 90 Persen | 90 Persen | 96.000.000,00 | 144.000.000,00 | 438.000.000,00 | 342.000.000,00 | | | - | -<br>- | Pegawai Pemerintahan Kecamatan Wajo | | 249.600.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 105 Paket | 105 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 69.600.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 15 Orang | 15 Orang | 96.000.000,00 | 144.000.000,00 | 438.000.000,00 | 342.000.000,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 180.000.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 95 Persen | 95 Persen | 532.071.700,00 | 1.492.091.780,00 | 1.590.091.780,00 | 1.058.020.080,00 | | | - | -<br>- | Persentase Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 333.309.770,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 17.756.000,00 | 17.756.000,00 | 17.756.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 4.662.500,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 155.012.200,00 | 1.125.471.200,00 | 1.125.471.200,00 | 970.459.000,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 85.248.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 176.487.000,00 | 176.487.000,00 | 176.487.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 123.424.270,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 80.396.500,00 | 37.957.580,00 | 37.957.580,00 | -42.438.920,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 12.595.000,00 | KECAMATAN WAJO |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 62.420.000,00 | 62.420.000,00 | 212.420.000,00 | 150.000.000,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 7.380.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 40.000.000,00 | 72.000.000,00 | 20.000.000,00 | -20.000.000,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Presentase barang milik Daerah yang diadakan* | | | | 90 % | 90 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | Presentase barang milik Daerah yang diadakan | | 1.197.891.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 77.891.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 820.000.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.01.2.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 300.000.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 992.884.000,00 | 1.123.964.000,00 | 1.003.964.000,00 | 11.080.000,00 | | | - | -<br>- | Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 605.865.828,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 410.205.600,00 | 411.285.600,00 | 411.285.600,00 | 1.080.000,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 481.042.800,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 76.058.400,00 | 76.058.400,00 | 76.058.400,00 | 0,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 106.823.028,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 506.620.000,00 | 636.620.000,00 | 516.620.000,00 | 10.000.000,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 18.000.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tersedianya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 24 Unit | 24 Unit | 648.523.500,00 | 550.293.500,00 | 494.073.500,00 | -154.450.000,00 | | | - | -<br>- | Tersedianya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 595.089.450,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 36.770.000,00 | 39.520.000,00 | 36.380.000,00 | -390.000,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 50.631.600,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 24 Unit | 24 Unit | 321.492.500,00 | 355.512.500,00 | 302.432.500,00 | -19.060.000,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 365.425.250,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 85 Unit | 85 Unit | 55.150.000,00 | 55.150.000,00 | 55.150.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 129.030.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 225.111.000,00 | 100.111.000,00 | 100.111.000,00 | -125.000.000,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 40.002.600,00 | KECAMATAN WAJO |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan** | | | | **90 Persen** | **90 Persen** | **8.050.350.800,00** | **8.050.350.800,00** | **8.622.975.300,00** | **1.019.395.800,00** | | | | | | | **9.069.746.600,00** | |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 8.050.350.800,00 | 8.050.350.800,00 | 8.622.975.300,00 | 572.624.500,00 | | | - | -<br>- | Terwujudnya Pelayanan Publik yang "Sombere' dan Smart" | | 9.069.746.600,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 8.050.350.800,00 | 8.050.350.800,00 | 8.622.975.300,00 | 572.624.500,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 9.069.746.600,00 | KECAMATAN WAJO |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Cakupan Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan dan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kondisi Baik** | | | | **95 Persentase** | **95 Persentase** | **217.802.638,00** | **217.802.638,00** | **217.802.638,00** | **62.252.362,00** | | | | | | | **280.055.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 217.802.638,00 | 217.802.638,00 | 217.802.638,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | Jumlah Kelompok Masyarakat/Kelompok Masyarakat yang di berdayakan | | 280.055.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 9 Lembaga Kemasyarakatan | 217.802.638,00 | 217.802.638,00 | 217.802.638,00 | 0,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 180.055.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan* | | | | 214 Laporan | 214 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase Gangguan Trantib Lingkup Kecamatan Yang Dapat Diselesaikan** | | | | **75 Persen** | **75 Persen** | **620.400.000,00** | **624.117.000,00** | **624.117.000,00** | **-202.172.000,00** | | | | | | | **418.228.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Persentase Gangguan Trantib Lingkup Kecamatan yang Dapat Diselesaikan* | | | | 63 Persen | 63 Persen | 620.400.000,00 | 624.117.000,00 | 624.117.000,00 | 3.717.000,00 | | | - | -<br>- | Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | 418.228.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 524.400.000,00 | 528.117.000,00 | 528.117.000,00 | 3.717.000,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 322.228.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 96.000.000,00 | 96.000.000,00 | 96.000.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 96.000.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan** | | | | **89 Persen** | **89 Persen** | **4.972.716.556,00** | **4.989.026.476,00** | **4.859.539.576,00** | **-1.380.948.316,00** | | | | | | | **3.591.768.240,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Terselenggaranya Urusan Pemerintah Kepada Masyarakat yang di selenggarakan Kepala Daerah* | | | | 90 Persen | 90 Persen | 4.972.716.556,00 | 4.989.026.476,00 | 4.859.539.576,00 | -113.176.980,00 | | | - | -<br>- | Terselenggaranya Urusan Pemerintah Kepada Masyarakat yang di selenggarakan Kepala Daerah | | 3.591.768.240,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.05.2.01.0007 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal* | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 4.972.716.556,00 | 4.989.026.476,00 | 4.859.539.576,00 | -113.176.980,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 3.591.768.240,00 | KECAMATAN WAJO |
| | | **KELURAHAN BUTUNG KECAMATAN WAJO** | | | | | | | **409.243.084,00** | **409.028.096,00** | **393.528.096,00** | **-15.714.988,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **409.243.084,00** | **409.028.096,00** | **393.528.096,00** | **-15.714.988,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **409.243.084,00** | **409.028.096,00** | **393.528.096,00** | **-15.714.988,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Terlaksananya Kordinasi, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **409.243.084,00** | **409.028.096,00** | **393.528.096,00** | **90.756.916,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 409.243.084,00 | 409.028.096,00 | 393.528.096,00 | -15.714.988,00 | | | - | -<br>- | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | 500.000.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 235.563.284,00 | 235.348.296,00 | 235.348.296,00 | -214.988,00 | Kota Makassar, Wajo, Butung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 173.679.800,00 | 173.679.800,00 | 158.179.800,00 | -15.500.000,00 | Kota Makassar, Wajo, Butung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | | **KELURAHAN ENDE KECAMATAN WAJO** | | | | | | | **499.999.186,00** | **499.998.800,00** | **483.498.800,00** | **-16.500.386,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.999.186,00** | **499.998.800,00** | **483.498.800,00** | **-16.500.386,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.999.186,00** | **499.998.800,00** | **483.498.800,00** | **-16.500.386,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **100 %** | **100 %** | **499.999.186,00** | **499.998.800,00** | **483.498.800,00** | **814,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Presentase Masyarakat/kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan* | | | | 8 Kelurahan | 8 Kelurahan | 499.999.186,00 | 499.998.800,00 | 483.498.800,00 | -16.500.386,00 | | | - | -<br>- | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | 500.000.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 252.445.686,00 | 260.016.800,00 | 260.016.800,00 | 7.571.114,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 5 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas | 247.553.500,00 | 239.982.000,00 | 223.482.000,00 | -24.071.500,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | | **KELURAHAN MALIMONGAN KECAMATAN WAJO** | | | | | | | **499.999.718,00** | **498.735.000,00** | **482.235.000,00** | **-17.764.718,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.999.718,00** | **498.735.000,00** | **482.235.000,00** | **-17.764.718,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.999.718,00** | **498.735.000,00** | **482.235.000,00** | **-17.764.718,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **100 %** | **100 %** | **499.999.718,00** | **498.735.000,00** | **482.235.000,00** | **282,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Presentase Masyarakat/kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan* | | | | 8 Kelurahan | 8 Kelurahan | 499.999.718,00 | 498.735.000,00 | 482.235.000,00 | -17.764.718,00 | | | - | -<br>- | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | 500.000.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 296.199.718,00 | 298.735.000,00 | 298.735.000,00 | 2.535.282,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 203.800.000,00 | 200.000.000,00 | 183.500.000,00 | -20.300.000,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | | **KELURAHAN MALIMONGAN TUA KECAMATAN WAJO** | | | | | | | **499.999.978,00** | **499.987.300,00** | **483.487.300,00** | **-16.512.678,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.999.978,00** | **499.987.300,00** | **483.487.300,00** | **-16.512.678,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.999.978,00** | **499.987.300,00** | **483.487.300,00** | **-16.512.678,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **100 %** | **100 %** | **499.999.978,00** | **499.987.300,00** | **483.487.300,00** | **22,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Presentase Masyarakat/kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan* | | | | 8 Kelurahan | 8 Kelurahan | 499.999.978,00 | 499.987.300,00 | 483.487.300,00 | -16.512.678,00 | | | - | -<br>- | Presentase Masyarakat/kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan | | 500.000.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 237.399.978,00 | 237.387.300,00 | 237.387.300,00 | -12.678,00 | Kota Makassar, Wajo, Malimongan Tua | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 262.600.000,00 | 262.600.000,00 | 246.100.000,00 | -16.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | | **KELURAHAN MAMPU KECAMATAN WAJO** | | | | | | | **499.999.735,00** | **499.996.311,00** | **483.496.311,00** | **-16.503.424,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.999.735,00** | **499.996.311,00** | **483.496.311,00** | **-16.503.424,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.999.735,00** | **499.996.311,00** | **483.496.311,00** | **-16.503.424,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **499.999.735,00** | **499.996.311,00** | **483.496.311,00** | **265,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Presentase Masyarakat/kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 499.999.735,00 | 499.996.311,00 | 483.496.311,00 | -16.503.424,00 | | | - | -<br>- | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | 500.000.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 194.149.735,00 | 194.146.311,00 | 194.146.311,00 | -3.424,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 305.850.000,00 | 305.850.000,00 | 289.350.000,00 | -16.500.000,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | | **KELURAHAN MELAYU KECAMATAN WAJO** | | | | | | | **499.996.994,00** | **499.881.270,00** | **462.381.270,00** | **-37.615.724,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.996.994,00** | **499.881.270,00** | **462.381.270,00** | **-37.615.724,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.996.994,00** | **499.881.270,00** | **462.381.270,00** | **-37.615.724,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **499.996.994,00** | **499.881.270,00** | **462.381.270,00** | **3.006,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Presentase Masyarakat/kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan* | | | | 100 Persen | 100 Persen | 499.996.994,00 | 499.881.270,00 | 462.381.270,00 | -37.615.724,00 | | | - | -<br>- | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | 500.000.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 354.996.994,00 | 354.881.270,00 | 354.881.270,00 | -115.724,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 145.000.000,00 | 145.000.000,00 | 107.500.000,00 | -37.500.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | | **KELURAHAN MELAYU BARU KECAMATAN WAJO** | | | | | | | **500.000.000,00** | **499.999.900,00** | **482.649.900,00** | **-17.350.100,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **499.999.900,00** | **482.649.900,00** | **-17.350.100,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **499.999.900,00** | **482.649.900,00** | **-17.350.100,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **100 %** | **100 %** | **500.000.000,00** | **499.999.900,00** | **482.649.900,00** | **0,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Presentase Masyarakat/kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan* | | | | 8 Kelurahan | 8 Kelurahan | 500.000.000,00 | 499.999.900,00 | 482.649.900,00 | -17.350.100,00 | | | - | -<br>- | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | 500.000.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 344.800.000,00 | 344.748.900,00 | 344.748.900,00 | -51.100,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 155.200.000,00 | 155.251.000,00 | 137.901.000,00 | -17.299.000,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | | **KELURAHAN PATTUNUANG KECAMATAN WAJO** | | | | | | | **499.999.572,00** | **499.999.098,00** | **459.499.098,00** | **-40.500.474,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **499.999.572,00** | **499.999.098,00** | **459.499.098,00** | **-40.500.474,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **499.999.572,00** | **499.999.098,00** | **459.499.098,00** | **-40.500.474,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **100 %** | **100 %** | **499.999.572,00** | **499.999.098,00** | **459.499.098,00** | **428,00** | | | | | | | **500.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Presentase Masyarakat/kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan* | | | | 1 Kelurahan | 1 Kelurahan | 499.999.572,00 | 499.999.098,00 | 459.499.098,00 | -40.500.474,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat Kelurahan | | 500.000.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 331.294.832,00 | 299.997.858,00 | 299.997.858,00 | -31.296.974,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 168.704.740,00 | 200.001.240,00 | 159.501.240,00 | -9.203.500,00 | Kota Makassar, Wajo, Semua Kel/Desa | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | -<br>- | | | 250.000.000,00 | KECAMATAN WAJO |
| | | **KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG** | | | | | | | **10.985.800.000,00** | **13.118.147.840,00** | **13.213.979.116,00** | **2.228.179.116,00** | | | | | | | **12.348.709.100,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **10.985.800.000,00** | **13.118.147.840,00** | **13.213.979.116,00** | **2.228.179.116,00** | | | | | | | **12.348.709.100,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **10.985.800.000,00** | **13.118.147.840,00** | **13.213.979.116,00** | **2.228.179.116,00** | | | | | | | **12.348.709.100,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Presentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah**<br>**Persentase sarana dan prsarana aparatur dalm kondisi baik** | | | | **100**<br>**90 %**<br>**%** | **100**<br>**90 %**<br>**%** | **6.781.870.952,00** | **8.031.459.792,00** | **8.078.406.168,00** | **926.592.148,00** | | | | | | | **7.708.463.100,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik*<br>*Presentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 100 %<br>90 % | 100 %<br>90 % | 24.478.000,00 | 23.118.000,00 | 8.478.000,00 | -16.000.000,00 | | | - | -<br>- | Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dan Kelurahan | | 26.000.000,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 4.660.000,00 | 5.300.000,00 | 660.000,00 | -4.000.000,00 | Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.406.000,00 | 5.406.000,00 | 2.406.000,00 | -4.000.000,00 | Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 6.000.000,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.730.000,00 | 3.730.000,00 | 730.000,00 | -4.000.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.506.000,00 | 4.506.000,00 | 2.506.000,00 | -2.000.000,00 | Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.176.000,00 | 4.176.000,00 | 2.176.000,00 | -2.000.000,00 | Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Makassar, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Tersedianya Administrasi Keuangan SKPD* | | | | 100 % | 100 % | 3.846.980.452,00 | 5.474.916.592,00 | 5.469.934.968,00 | 1.622.954.516,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat Kecamatan Kepulauan Sangkarrang | | 4.607.000.000,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 21 Orang/bulan | 21 Orang/bulan | 3.225.940.452,00 | 4.837.666.592,00 | 4.837.684.968,00 | 1.611.744.516,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 3.900.000.000,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 434.520.000,00 | 449.280.000,00 | 449.280.000,00 | 14.760.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 500.000.000,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 180.000.000,00 | 180.000.000,00 | 180.000.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 200.000.000,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.520.000,00 | 7.970.000,00 | 2.970.000,00 | -3.550.000,00 | Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 7.000.000,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan Kapasitas*<br>*Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah*<br>*Pesertasee Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik* | | | | 100 %<br>90 % | 100 %<br>90 % | 96.000.000,00 | 96.000.000,00 | 103.500.000,00 | 7.500.000,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat Kecamatan Kepulauan Sangkarrang | | 100.000.000,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | - | 70 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 8 Orang | 8 Orang | 96.000.000,00 | 96.000.000,00 | 103.500.000,00 | 7.500.000,00 | Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Tersedianya Administrasi umum Perangkat Daerah* | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 208.104.200,00 | 95.272.800,00 | 95.272.800,00 | -112.831.400,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat Kecamatan Kepulauan Sangkarrang | | 228.000.000,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 8.340.000,00 | 8.340.000,00 | 8.340.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.205.000,00 | 7.071.800,00 | 7.071.800,00 | -3.133.200,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4.519.200,00 | 39.861.000,00 | 39.861.000,00 | 35.341.800,00 | Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 8.000.000,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 145.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | -145.040.000,00 | Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 150.000.000,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 40.000.000,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 50.000.000,00 | 9.370.800,00 | 9.370.800,00 | -40.629.200,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat Kecamatan Kepulauan Sangkarrang | | 100.000.000,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |
| | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 13 Unit | 13 Unit | 50.000.000,00 | 9.370.800,00 | 9.370.800,00 | -40.629.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 1.789.239.200,00 | 1.321.479.600,00 | 1.384.479.600,00 | -404.759.600,00 | | | - | -<br>- | Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dan Kelurahan | | 1.830.000.000,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 25.079.200,00 | 50.019.600,00 | 50.019.600,00 | 24.940.400,00 | Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.764.160.000,00 | 1.271.460.000,00 | 1.334.460.000,00 | -429.700.000,00 | Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 1.800.000.000,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan pajak Kendaraan yang terbayarkan Tersedianya layanan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah* | | | | 100 %<br>90 % | 100 %<br>90 % | 767.069.100,00 | 1.011.302.000,00 | 1.007.370.000,00 | 240.300.900,00 | | | - | -<br>- | Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dan Kelurahan | | 817.463.100,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 49.606.000,00 | 40.770.000,00 | 37.630.000,00 | -11.976.000,00 | Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 679.193.100,00 | 970.532.000,00 | 969.740.000,00 | 290.546.900,00 | Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 679.193.100,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 38.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | -38.270.000,00 | Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 38.270.000,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat Peningkatan Kapasitas** | | | | **90 %** | **90 %** | **1.920.684.600,00** | **1.913.314.200,00** | **1.913.314.200,00** | **62.561.400,00** | | | | | | | **1.983.246.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Tersediannya Kegiatan Peningkatan Efetifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 100 % | 100 % | 137.438.600,00 | 198.020.200,00 | 198.020.200,00 | 60.581.600,00 | | | - | -<br>- | Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dan Kelurahan | | 200.000.000,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 137.438.600,00 | 198.020.200,00 | 198.020.200,00 | 60.581.600,00 | Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 200.000.000,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan* | | | | 100 % | 100 % | 1.783.246.000,00 | 1.715.294.000,00 | 1.715.294.000,00 | -67.952.000,00 | | | - | -<br>- | Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dan Kelurahan | | 1.783.246.000,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.783.246.000,00 | 1.715.294.000,00 | 1.715.294.000,00 | -67.952.000,00 | Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 1.783.246.000,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **100 %** | **100 %** | **80.565.000,00** | **95.627.200,00** | **95.627.200,00** | **19.435.000,00** | | | | | | | **100.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | | | | 100 % | 100 % | 80.565.000,00 | 95.627.200,00 | 95.627.200,00 | 15.062.200,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat Kecamatan Kepulauan Sangkarrang | | 100.000.000,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |
| | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan* | | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 80.565.000,00 | 95.627.200,00 | 95.627.200,00 | 15.062.200,00 | Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 100.000.000,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Presentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan yang dapat diselesaikan** | | | | **100 %** | **100 %** | **36.594.000,00** | **38.712.000,00** | **38.712.000,00** | **406.000,00** | | | | | | | **37.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Presentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan yang dapat diselesaikan* | | | | 100 % | 100 % | 36.594.000,00 | 38.712.000,00 | 38.712.000,00 | 2.118.000,00 | | | - | -<br>- | Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dan Kelurahan | | 37.000.000,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 36.594.000,00 | 38.712.000,00 | 38.712.000,00 | 2.118.000,00 | Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 37.000.000,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan** | | | | **90 %** | **90 %** | **2.166.085.448,00** | **3.039.034.648,00** | **3.087.919.548,00** | **353.914.552,00** | | | | | | | **2.520.000.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah* | | | | 95 % | 95 % | 2.166.085.448,00 | 3.039.034.648,00 | 3.087.919.548,00 | 921.834.100,00 | | | - | -<br>- | Masyarakat Kecamatan Kepulauan Sangkarrang | | 2.520.000.000,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |
| | 7.01.05.2.01.0007 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.151.685.448,00 | 3.024.634.648,00 | 3.073.519.548,00 | 921.834.100,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 2.500.000.000,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |
| | | **KELURAHAN BARRANG CADDI KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG** | | | | | | | **500.000.000,00** | **499.996.180,00** | **436.058.300,00** | **-63.941.700,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **499.996.180,00** | **436.058.300,00** | **-63.941.700,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **499.996.180,00** | **436.058.300,00** | **-63.941.700,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan**<br>**Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **100**<br>**95 %**<br>**%** | **100**<br>**95 %**<br>**%** | **500.000.000,00** | **499.996.180,00** | **436.058.300,00** | **-500.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 500.000.000,00 | 499.996.180,00 | 436.058.300,00 | -63.941.700,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | MASYARAKAT KELURAHAN BARRANG CADDI | | 0,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 300.000.000,00 | 299.996.600,00 | 299.996.600,00 | -3.400,00 | Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Barrang Caddi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 5 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas | 200.000.000,00 | 199.999.580,00 | 136.061.700,00 | -63.938.300,00 | Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Barrang Caddi | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |
| | | **KELURAHAN BARRANG LOMPO KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG** | | | | | | | **500.000.000,00** | **499.996.264,00** | **449.296.264,00** | **-50.703.736,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **499.996.264,00** | **449.296.264,00** | **-50.703.736,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **499.996.264,00** | **449.296.264,00** | **-50.703.736,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan**<br>**Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik** | | | | **100**<br>**95 %**<br>**%** | **100**<br>**95 %**<br>**%** | **500.000.000,00** | **499.996.264,00** | **449.296.264,00** | **-500.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Tersedianya Sarana dan Prasarana yang di bangun* | | | | 100 % | 100 % | 500.000.000,00 | 499.996.264,00 | 449.296.264,00 | -50.703.736,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | MASYARAKAT KELURAHAN BARRANG LOMPO | | 0,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 300.000.000,00 | 299.996.600,00 | 299.996.600,00 | -3.400,00 | Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Barrang Lompo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 3 Pokmas / Ormas | 3 Pokmas / Ormas | 200.000.000,00 | 199.999.664,00 | 149.299.664,00 | -50.700.336,00 | Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Barrang Lompo | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |
| | | **KELURAHAN PULAU KODINGARENG KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG** | | | | | | | **500.000.000,00** | **498.999.720,00** | **440.516.320,00** | **-59.483.680,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **498.999.720,00** | **440.516.320,00** | **-59.483.680,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **500.000.000,00** | **498.999.720,00** | **440.516.320,00** | **-59.483.680,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan** | | | | **100 %** | **100 %** | **500.000.000,00** | **498.999.720,00** | **440.516.320,00** | **-500.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | *Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* | | | | 100 % | 100 % | 500.000.000,00 | 498.999.720,00 | 440.516.320,00 | -59.483.680,00 | | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | MASYARAKAT KELURAHAN KODINGARENG | | 0,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 300.000.000,00 | 299.702.300,00 | 294.819.200,00 | -5.180.800,00 | Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Kodingareng | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* | | | | 4 Pokmas / Ormas | 4 Pokmas / Ormas | 200.000.000,00 | 199.297.420,00 | 145.697.120,00 | -54.302.880,00 | Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Kodingareng | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | -<br>- | | | 0,00 | KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG |
| | | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | **36.703.000.000,00** | **41.621.763.080,00** | **39.987.494.000,00** | **3.284.494.000,00** | | | | | | | **23.582.417.000,00** | |
| | **8** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | **36.703.000.000,00** | **41.621.763.080,00** | **39.987.494.000,00** | **3.284.494.000,00** | | | | | | | **23.582.417.000,00** | |
| | **8.01** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | **36.703.000.000,00** | **41.621.763.080,00** | **39.987.494.000,00** | **3.284.494.000,00** | | | | | | | **23.582.417.000,00** | |
| 1. | **8.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas** | | | | **100 %** | **100 %** | **6.694.413.000,00** | **8.034.945.280,00** | **8.082.926.200,00** | **2.361.252.000,00** | | | | | | | **9.055.665.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 8.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Renja, Renstra, Dokumen RKA, Dokumen DPA dan LAKIP Perangkat Daerah* | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 92.094.000,00 | 213.574.000,00 | 192.754.000,00 | 100.660.000,00 | | | - | PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama<br>PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama | Perangkat Daerah | | 367.323.650,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 6 Dokumen | 58.686.000,00 | 73.426.000,00 | 63.166.000,00 | 4.480.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama<br>PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama | | | 332.657.157,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.545.000,00 | 4.545.000,00 | 3.885.000,00 | -660.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama<br>PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama | | | 14.936.615,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.420.000,00 | 3.420.000,00 | 2.760.000,00 | -660.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama<br>PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama | | | 8.918.806,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.945.000,00 | 4.945.000,00 | 4.285.000,00 | -660.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama<br>PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama | | | 8.900.921,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.440.000,00 | 4.440.000,00 | 3.780.000,00 | -660.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama<br>PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama | | | 1.910.151,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 2.860.000,00 | -2.640.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama<br>PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama | | | 0,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.558.000,00 | 117.298.000,00 | 112.018.000,00 | 101.460.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama<br>PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama | | | 0,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 5.237.960.710,00 | 6.577.311.790,00 | 6.577.312.710,00 | 1.339.352.000,00 | | | - | PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama | Perangkat Daerah | | 4.862.182.936,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 24 Orang/bulan | 24 Orang/bulan | 4.790.597.910,00 | 6.111.828.990,00 | 6.111.829.910,00 | 1.321.232.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama<br>PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama | | | 4.378.889.767,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 266.280.000,00 | 299.400.000,00 | 299.400.000,00 | 33.120.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama<br>PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama | | | 459.294.665,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 181.082.800,00 | 166.082.800,00 | 166.082.800,00 | -15.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama<br>PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama | | | 23.998.504,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 180.000.000,00 | 147.000.000,00 | 147.000.000,00 | -33.000.000,00 | | | - | -<br>- | Perangkat Daerah | | 199.898.106,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 56.815.656,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 29 Orang | 29 Orang | 180.000.000,00 | 147.000.000,00 | 147.000.000,00 | -33.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 143.082.450,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | 6 Dikumen | 6 Dikumen | 380.842.690,00 | 266.014.690,00 | 266.014.690,00 | -114.828.000,00 | | | - | PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama | Perangkat Daerah | | 446.014.825,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4.594.970,00 | 4.594.970,00 | 4.594.970,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama<br>PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama | | | 4.465.961,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 45.279.720,00 | 45.519.720,00 | 45.519.720,00 | 240.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama<br>PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama | | | 0,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 38.678.000,00 | 14.678.000,00 | 14.678.000,00 | -24.000.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama<br>PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama | | | 83.771.197,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 16.410.000,00 | 16.410.000,00 | 16.410.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama<br>PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama | | | 0,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 6 Dokumen | 1 Dokumen | 54.000.000,00 | 54.000.000,00 | 54.000.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama<br>PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama | | | 41.207.746,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 221.880.000,00 | 130.812.000,00 | 130.812.000,00 | -91.068.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama<br>PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama | | | 316.569.921,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | - | -<br>- | Perangkat Daerah | | 2.441.959.457,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 2.441.959.457,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 529.605.600,00 | 557.134.800,00 | 645.134.800,00 | 115.529.200,00 | | | - | -<br>- | Perangkat Daerah | | 377.731.706,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 356.039.214,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama<br>PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama | | | 17.258.128,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 517.605.600,00 | 545.134.800,00 | 633.134.800,00 | 115.529.200,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama<br>PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama | | | 4.434.364,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 273.910.000,00 | 273.910.000,00 | 254.710.000,00 | -19.200.000,00 | | | - | PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama<br>PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama | Perangkat Daerah | | 360.554.320,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 46.380.000,00 | 46.380.000,00 | 42.880.000,00 | -3.500.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama<br>PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama | | | 47.451.506,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 20 Unit | 20 Unit | 201.350.000,00 | 201.350.000,00 | 185.650.000,00 | -15.700.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama<br>PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama | | | 280.539.633,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 50 Unit | 50 Unit | 26.180.000,00 | 26.180.000,00 | 26.180.000,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama<br>PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama | | | 32.563.181,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 2. | **8.01.02** | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | **Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapat Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | | | | **100 %** | **100 %** | **2.493.592.840,00** | **3.013.285.960,00** | **3.096.535.960,00** | **-953.716.840,00** | | | | | | | **1.539.876.000,00** | |
| | 8.01.02.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | *Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.493.592.840,00 | 3.013.285.960,00 | 3.096.535.960,00 | 602.943.120,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama<br>PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama | Kelompok Masyarakat | | 1.539.876.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru<br>Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama<br>PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama | | | 0,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.2.01.0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 268.086.440,00 | 193.485.360,00 | 187.485.360,00 | -80.601.080,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama<br>PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama | | | 1.539.876.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 0,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan* | | | | 81 Orang | 81 Orang | 52.977.400,00 | 136.207.400,00 | 129.457.400,00 | 76.480.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama<br>PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama | | | 0,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 0,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.2.01.0006 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara* | | | | 0 Keluarga | 0 Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | -<br>- | | | 0,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.2.01.0007 | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.060.909.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.060.909.000,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 0,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.2.01.0008 | Pembentukan Paskibraka | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paskibraka* | | | | 70 Orang | 70 Orang | 111.620.000,00 | 2.683.593.200,00 | 2.779.593.200,00 | 2.667.973.200,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PD|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama PD|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama | | | 0,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.2.01.0009 | Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 0,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.2.01.0010 | Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | - | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 0,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.02.2.01.0011 | Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | - - | | | 0,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 3. | **8.01.03** | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | **Persentase Partai Politik yang mendapat Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik** | | | | **100 %** | **100 %** | **3.785.489.600,00** | **3.915.694.600,00** | **3.910.554.600,00** | **-421.504.600,00** | | | | | | | **3.363.985.000,00** | |
| | 8.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | *Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 3.785.489.600,00 | 3.915.694.600,00 | 3.910.554.600,00 | 125.065.000,00 | | | - | - - | Pengurus Partai Politik dan Kelompok Masyarakat | | 3.363.985.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.03.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - - | | | 2.768.525.319,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.03.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 3.785.489.600,00 | 3.915.694.600,00 | 3.910.554.600,00 | 125.065.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama<br>PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama | | | 595.459.681,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.03.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.03.2.01.0006 | Pelaksanaan tugas Paskibraka | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka* | | | | 0 Kegiatan | 0 Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 4. | **8.01.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | **Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar dan mendapat pembinaan** | | | | **100 %** | **100 %** | **1.297.294.000,00** | **1.331.772.600,00** | **1.423.222.600,00** | **7.018.290.000,00** | | | | | | | **8.315.584.000,00** | |
| | 8.01.04.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | *Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1.297.294.000,00 | 1.331.772.600,00 | 1.423.222.600,00 | 125.928.600,00 | | | - | PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama<br>PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama | Pengurus Ormas dan Kelompok Masyarakat | | 8.315.584.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.04.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1.297.294.000,00 | 1.331.772.600,00 | 1.423.222.600,00 | 125.928.600,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama<br>PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama | | | 845.767.091,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.04.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.04.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 7.469.816.909,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.04.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.04.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 5. | **8.01.05** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | **Persentase Kelompok Masyarakat yang berpartisipasi dan mendapat Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** | | | | **100 %** | **100 %** | **1.289.321.240,00** | **3.925.155.040,00** | **2.593.755.040,00** | **-781.305.240,00** | | | | | | | **508.016.000,00** | |
| | 8.01.05.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | *Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1.289.321.240,00 | 3.925.155.040,00 | 2.593.755.040,00 | 1.304.433.800,00 | | | - | -<br>- | Kelompok Masyarakat | | 508.016.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.05.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.05.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.05.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 44.086.690,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.05.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 1.289.321.240,00 | 3.925.155.040,00 | 2.593.755.040,00 | 1.304.433.800,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama<br>PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama | | | 463.929.310,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.05.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 6. | **8.01.06** | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | **Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapat Pemahaman terhadap Pencegahan Konflik Sosial** | | | | **100 %** | **100 %** | **21.142.889.320,00** | **21.400.909.600,00** | **20.880.499.600,00** | **-20.343.598.320,00** | | | | | | | **799.291.000,00** | |
| | 8.01.06.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | *Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 21.142.889.320,00 | 21.400.909.600,00 | 20.880.499.600,00 | -262.389.720,00 | | | - | PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama<br>PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama | Kelompok Masyarakat | | 799.291.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 19.664.403.240,00 | 19.701.323.240,00 | 19.641.473.240,00 | -22.930.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama<br>PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama | | | 304.700.382,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 335.503.400,00 | 556.603.680,00 | 435.603.680,00 | 100.100.280,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama<br>PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama | | | 0,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 494.590.618,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | -<br>- | | | 0,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8.01.06.2.01.0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1.142.982.680,00 | 1.142.982.680,00 | 803.422.680,00 | -339.560.000,00 | Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama PD\|7. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama | | | 0,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | **J U M L A H** | | | | | | | | **5.102.407.900.000,00** | **5.684.607.633.732,00** | **5.128.954.350.000,00** | **26.546.450.000,00** | | | | | | | **4.744.739.297.271,00** | |

PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR

makassarkota.go.id